PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2025

BAPPEDA HALUT

BUKU I

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2025

BAPPEDA HALUT

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2024

BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 29 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

BAPEDA HALUT

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);\
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Neghara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

BAPPEDA HALUT

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;

BAPPEDA HALUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Halmahera Utara
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Badan, dan Kecamatan Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian,dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat kota/desa/kelurahan, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi,pemerintah kabupaten, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAPPEDA HALUT

11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Halmahera Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun (2005-2025).
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Halmahera Utara untuk periode 5 (lima) tahun
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
15. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
23. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
24. Kerangka anggaran, adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

BAPPEDA HALUT

25. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
26. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
31. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
33. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
34. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
36. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
37. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
38. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
39. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
40. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAPPEDA HALUT

41. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
42. Forum Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
43. Narasumber/Tenaga Ahli adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
44. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
45. Provinsi lainnya adalah provinsi lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubunganketerkaitanatau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
46. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkansebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
47. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan.
(2) RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.
(3) RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RKP Nasional.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.
(2) RKPD tahun 2025 bertujuan untuk:
a. mewujudkan perencanaan teknis pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Utara;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;dan

BAPPEDA HALUT

d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bagian Keempat
RKPD Sebagai Pedoman Renja Perangkat Daerah
Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja–Perangkat Daerah Tahun 2025, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 untuk :
a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Utara dengan Program/Kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya;dan
b. penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 oleh Peraturan Kepala Daerah (Perbup).

Pasal 5

Dalam rangka penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:
a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 kepada Kepala Bappeda;
b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025; dan
c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati Halmahera Utara dalam rangka, memperoleh pengesahan melalui Peraturan Bupati Halmahera Utara.

Pasal 6

Pengesahan Renja Perangkat Daerah oleh Bupati Halmahera Utara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
a. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada/Peraturan Bupati;dan
b. Pengesahan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Peraturan Bupati Halmahera Utara paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan Bupati Halmahera Utara tentang RKPD Tahun 2025 ditetapkan.

BAB II
ISI DAN URAIAN RKPD
Pasal 7

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
a. Buku I tentang Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penutup yang berisi kaidah pelaksanaan;dan
b. Buku II berisikan tentang Matriks Program dan kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah.

BAPPEDA HALUT

Pasal 8

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah sebagai berikut :

a. dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah;
b. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh Renja Perangkat Daerah;
c. Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
d. Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD;dan
e. RKPD Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 serta bahan arahan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan

BAB IV
PERUBAHAN RKPD
Pasal 10

(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
    a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
    b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
    c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 12

Jika terjadi Perubahan Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah maka RKPD 2025 juga dapat menyesuaikan sesuai dengan peraturan Daerah yang Baru.

BAPPEDA HALUT

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 11 Juli 2024
BUPATI HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY

Diundangkan di Tobelo
Pada Tanggal 11 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ERASMUS JOSEPH PAPILAYA

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor 29)

BAPPEDA HALUT

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 11 Juli 2024

BUPATI HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

BAPPEDA HALUT

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dan penting sebagai perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara. Penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah serta kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan demikian RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta 2menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2024, Serta menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rencana Kerja (renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025.

Dengan selesainya penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunn RKPD dimaksud. Demikian RKPD ini dibuat semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun Kabupaten Halmahera Utara yang lebih baik.

Tobelo, Juni 2024

Bupati Halmahera Utara,

FRANS MANERY

BAPPEDA HALUT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL vii
BAB 1 PENDAHULUAN 1-1
1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1-3
1.3. Hubungan antar Dokumen 1-7
1.4. Maksud dan Tujuan 1-7
1.5. Sistimatika Dokumen 1-8
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 2-18
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 2-22
2.1.4. Kondisi Demografi 2-24
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-29
2.2.1. Product Domestic Regional Bruto 2-29
2.2.2. Tingkat Inflasi 2-39
2.2.3. PDRB Per Kapita 2-40
2.2.4. Indeks Gini 2-41
2.2.5. Tingkat Kemiskinan 2-42
2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka 2-47
2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia 2-51
2.2.8. Indeks Pembangunan Gender 2-56
2.2.9. Perkembangan Wilayah 2-57
2.2.10. Seni Budaya dan Olahraga 2-61
2.3. Aspek Pelayanan Umum 2-62
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2-62
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 2-106
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan 2-137
2.3.4. Fokus Layanan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum 2-150
2.4. Aspek Daya Saing 2-156
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2-156
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2-158
2.4.3. Fokus Iklim Investasi 2-162

BAPPEDA HALUT

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 2-165
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2-167
2.6. Permasalahan Pembangunan daerah 2-421
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3-3
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3-3
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 3-3
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 3-9
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3-13
3.2.1. Pendapatan Daerah 3-13
3.2.2. Belanja Daerah 3-17
3.2.3. Pembiayaan Daerah 3-20
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4-22
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4-22
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 4-32
4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 4-32
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara 4-34
4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara 4-36
BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 5-1
5.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 5-1
5.2 Pokok-pokok Pikiran DPRD 5-4
BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 6-1
6.1 Hirarki Indikator Kinerja 6-1
6.2 Penetapan Target Kinerja 6-2
BAB 7 PENUTUP 7-1

BAPPEDA HALUT

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1-7
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Utara 2-2
Gambar 2.2. Posisi Kabupaten Halmahera Utara Di Alur Laut Kepulauan Indonesia 2-4
Gambar 2.3. Posisi Geostrategis Kabupaten Halmahera Utara 2-5
Gambar 2.4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Halmahera Utara.....2-9
Gambar 2.5. Peta Topografi Kabupaten Halmahera Utara 2-10
Gambar 2.6. Peta Geologi Kabupaten Halmahera Utara 2-13
Gambar 2.7. Peta Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Utara 2-14
Gambar 2.8. Piramida Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 2-26
Gambar 2.9. Komposisi Penduduk Kabupaten Halmahera Usia 15+ Menurut Kualifikasi Pendidikan Tertinggi Tahun 2023.....2-27
Gambar 2.10. Komposisi Penduduk Kabupaten Halmahera Usia 15+ Status Berkerja Menurut Lapangan Kerja Utama Tahun 2022 & 2023....2-27
Gambar 2.11. PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-29
Gambar 2.12. Distribusi PDRB ADHB Menurut Sektor Ekonomi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-32
Gambar 2.13. Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Industri Pengolahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-33
Gambar 2.14. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-36
Gambar 2.15. Tren Inflasi Kota Ternate (Regional) Periode Januari – Desember 2023 2-40
Gambar 2.16. Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023.....2-42
Gambar 2.17 Tren Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023 2-43
Gambar 2.18 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-44
Gambar 2.19 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023 2-45
Gambar 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023 2-46
Gambar 2.21 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023 2-47
Gambar 2.22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023.....2-49

BAPPEDA HALUT

Gambar 2.23 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023 2-49
Gambar 2.24 Karakteristik Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 & 2023 2-50
Gambar 2.25 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023.....2-51
Gambar 2.26 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023.....2-52
Gambar 2.27 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023.....2-53
Gambar 2.28 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023.....2-54
Gambar 2.29 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023.....2-55
Gambar 2.30 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023.....2-56
Gambar 2.31 Indeks Ketahanan Sosial Desa Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-59
Gambar 2.32 Indeks Ketahanan Ekonomi Desa Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-60
Gambar 2.33 Indeks Ketahanan Lingkungan Desa Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-60
Gambar 2.34 Kondisi Ruangan Kelas SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-68
Gambar 2.35 Persentase Guru SD dan SMP Berkualifikasi Pendidikan D4/S1 dan Bersertfikasi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-69
Gambar 2.36 Rasio Pustu per Satuan Wilayah Setingkat Desa Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-88
Gambar 2.37 Rasio Ketersediaan Polindes Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-89
Gambar 2.38 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023.....2-110
Gambar 2.39 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023.....2-111
Gambar 2.40 Komposisi Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pembinaan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-160
Gambar 2.41 Volume Air Disalurkan dan Jumlah Pelanggan PDAM Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-161
Gambar 2.42 Daya Terpasang dan Jumlah Pelanggan PLN Tobelo

BAPPEDA HALUT

Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-161
Gambar 3.1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2023 3-7
Gambar 4.1 Logframe Perencanaan Integratif Tujuan/Sasaran-1 4-25
Gambar 4.2 Logframe Perencanaan Integratif Tujuan/Sasaran-2 4-27
Gambar 4.3 Logframe Perencanaan Integratif Tujuan/Sasaran-3 4-29
Gambar 4.4 Logframe Perencanaan Integratif Tujuan/Sasaran-4 4-31

BAPPEDA HALUT

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan.....2-3
Tabel 2.2. Desa Pesisir dan Bukan Pesisir Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara.....2-6
Tabel 2.3. Jumlah dan Sebaran Pulau Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara.....2-7
Tabel 2.4. Kondisi Topografi Kabupaten Halmahera Utara Menurut Klasifikasi Kemiringan Lereng.....2-8
Tabel 2.5. Potensi Geologi Kabupaten Halmahera Utara.....2-11
Tabel 2.6. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Halmahera Utara.....2-15
Tabel 2.7. Potensi Cekungan Air Tanah Di Kabupaten Halmahera Utara.....2-16
Tabel 2.8. Kondisi Temperatur, Kelembaban, Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-17
Tabel 2.9. Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-17
Tabel 2.10. Penutupan Lahan Di Kabupaten Halmahera Utara.....2-18
Tabel 2.11. Penggunaan Kawasan Hutan di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-18
Tabel 2.12. Potensi Bahaya Bencana di Kabupaten Halmahera Utara.....2-23
Tabel 2.13. Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan Tahun 2023.....2-24
Tabel 2.14. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan Tahun 2023.....2-25
Tabel 2.15. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-28
Tabel 2.16. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-30
Tabel 2.17. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 & 2023.....2-31
Tabel 2.18. Perkembangan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-34
Tabel 2.19. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-34
Tabel 2.20. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-35
Tabel 2.21. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-36

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.22. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-38
Tabel 2.23. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-38
Tabel 2.24. PDRB ADHK per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023 2-41
Tabel 2.25. Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-48
Tabel 2.26. Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022-2023 2-58
Tabel 2.27. Jumlah SD/Sederajat dan SMP/Sederajat Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-63
Tabel 2.28. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-65
Tabel 2.29. Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Mengulang Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-66
Tabel 2.30. Perkembangan Rasio Guru/Siswa, Rombel/Siswa, Kelas/Rombel Di Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-67
Tabel 2.31. Jumlah PAUD dan RA Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-71
Tabel 2.32. Perkembangan APK PAUD Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-72
Tabel 2.33. Perkembangan Rasio Guru/Siswa PAUD Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-72
Tabel 2.34. Perkembangan PKBM Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-73
Tabel 2.35. Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-75
Tabel 2.36. Angka Kematian Neonatal Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-76
Tabel 2.37. Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-77
Tabel 2.38. Angka Kematian Balita Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-78
Tabel 2.39. Prevalensi Balita Underweight Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023 2-79
Tabel 2.40. Prevalensi Balita Stunting Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023 2-80
Tabel 2.41. Prevalensi Balita Wasting Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023 2-81

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.42. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023 2-82
Tabel 2.43. Cakupan Desa Universal Child Immunization Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023..... 2-83
Tabel 2.44. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023..... 2-85
Tabel 2.45. Perkembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-86
Tabel 2.46. Sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menuurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023..... 2-87
Tabel 2.47. Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-89
Tabel 2.48. Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022..... 2-90
Tabel 2.49. Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022-2023..... 2-91
Tabel 2.50. Posbindu PTM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022-2023..... 2-92
Tabel 2.51. Kinerja Pengembangan Sumber Daya Air Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-94
Tabel 2.52. Akses Rumah Tangga pada Sumber Air Minum Bersih dan Sanitasi Layak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 2-95
Tabel 2.53. Kinerja Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-97
Tabel 2.54. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-99
Tabel 2.55. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-100
Tabel 2.56. Kinerja Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-101
Tabel 2.57. Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-105
Tabel 2.58. Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023..... 2-107
Tabel 2.59. Ikhtisar Partisipasi dan Peran Perempuan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-109
Tabel 2.60. Ikhtisar Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023 2-112

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.61. Ikhtisar Pemenuhan Hak Anak dan Layanan Data Gender dan Anak Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023.....2-113
Tabel 2.62. Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023.....2-114
Tabel 2.63. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023.....2-116
Tabel 2.64. Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023.....2-118
Tabel 2.65. Ketegori Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-121
Tabel 2.66. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-122
Tabel 2.67. Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-124
Tabel 2.68. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-126
Tabel 2.69. Perkembangan Koperasi dan UKM Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-128
Tabel 2.70. Sebaran Koperasi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-128
Tabel 2.71. Sebaran UMKM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-129
Tabel 2.72. Realisasi Investasi PMA Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-130
Tabel 2.73. Realisasi Investasi PMDN Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-130
Tabel 2.74. Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023.....2-131
Tabel 2.75. Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023.....2-135
Tabel 2.76. Desa Memiliki Perpustakaan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-136
Tabel 2.77. Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023.....2-138
Tabel 2.78. Kelompok Usaha Nelayan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.....2-138
Tabel 2.79. Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023.....2-139
Tabel 2.80. Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023.....2-140
Tabel 2.81. Distribusi Persentase Rumah Tangga dan Sumber Penerangan di Kabupaten Halmahera Utara 2020-2023.....2-143

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.82. Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023 2-144
Tabel 2.83. Perusahaan Industri Menurut Kualifikasi dan Klasifikasi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023 2-147
Tabel 2.84. Perusahaan Industri Kecil Menurut Klasifikasi Industri Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 2-147
Tabel 2.85. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023 2-150
Tabel 2.86. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023 2-151
Tabel 2.87. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian & Pengembangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023 2-152
Tabel 2.88. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023 2-152
Tabel 2.89. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian & Diklat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023 2-153
Tabel 2.90. Kinerja Layanan Unsur Pengawasan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023 2-154
Tabel 2.91. Proporsi Desa Berkembang – Maju Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 2-155
Tabel 2.92. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023 2-156
Tabel 2.93. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-157
Tabel 2.94. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023 2-158
Tabel 2.95. Perkembangan Fasilitas Akomodasi/Restoran/Rumah Makan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-159
Tabel 2.96. Jangkauan Layanan Infrastruktur TIK Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-162
Tabel 2.97. Angka Kriminalitas Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-163
Tabel 2.98. Jumlah Aksi Unjuk Rasa Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-164
Tabel 2.99. Lama Proses Perizinan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2022 2-165
Tabel 2.100. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023 2-166
Tabel 2.101. Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022-2023 2-166

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.102. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2023 2-168
Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022-2026 3-15
Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022-2026 3-18
Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022-2026 3-21
Tabel 5.1. Pagu Indikatif RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 Rencana 3-21
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Makro RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 6-2
Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 6-2
Tabel 6.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 6-3

BAPPEDA HALUT

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Rencana pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. RPJPD tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAPPEDA HALUT

RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026 sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026. Tahun 2025 menjadi tantangan tersendiri karena merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, serta RPJM Nasional Tahun 2025-2029, yang mengusung agenda transformasi di segala bidang menuju visi Indonesia Emas 2045. Agenda-agenda transformasi Indonesia tersebut tentunya menjadi fokus dalam RKP 2025.

Secara proses, penyusunan RKPD menggunakan empat pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratis untuk memastikan bahwa penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Adapun perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada subtansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Pasal 16 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai proses yang sistimatis meliputi persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, hingga penetapan RKPD melalui Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara.

BAPPEDA HALUT

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan SuIa, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaral Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1264);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

BAPPEDA HALUT

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6416);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 danTambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

BAPPEDA HALUT

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1540, 2018);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114, 2019);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477, 2019);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288, 2020);

BAPPEDA HALUT

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781, 2020);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406-5889 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

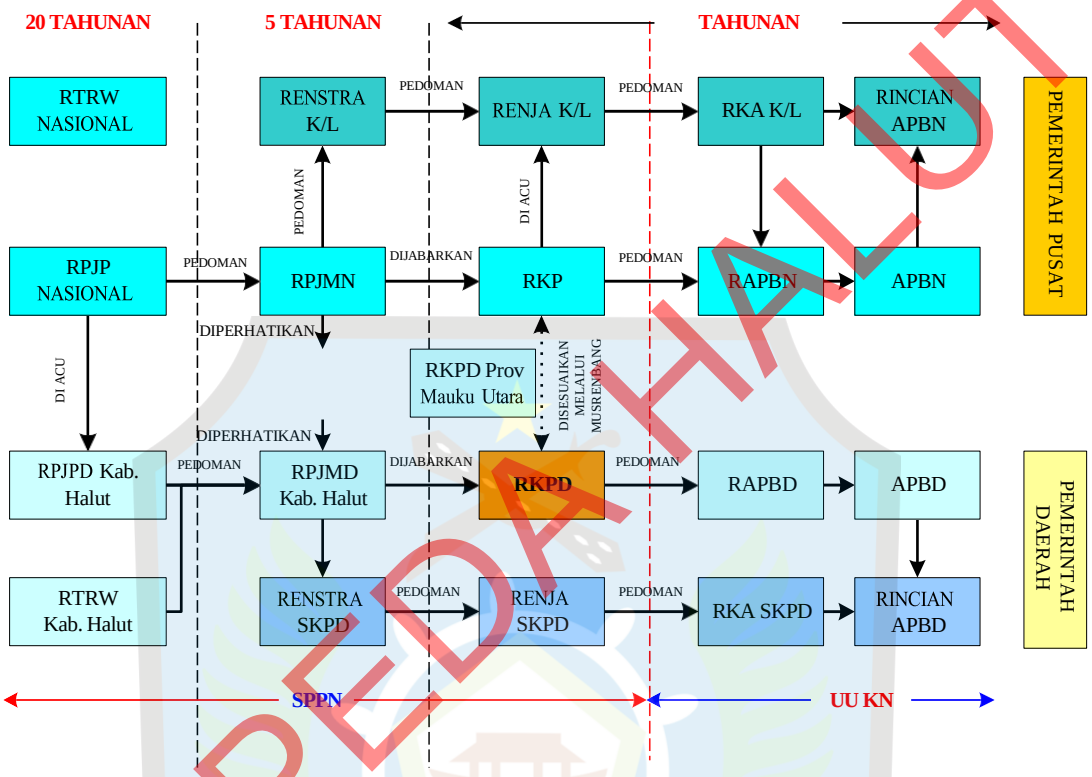
BAPPEDA HALUT

37. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.

BAPPEDA HALUT

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagaimana tersaji dalam Gambar I.1, RKPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 memiliki keterkaitan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.



Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjamin keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Adapun tujuan penyusunanan RKPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2025 sesuai RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026;
2. Menjadi tolok ukur tahunan keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode jabatannya;

BAPPEDA HALUT

3. Menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Bupati terpilih;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi msyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. Menjadi acuan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS, beserta RAPBD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025.

1.5. SISTIMATIKA DOKUMEN

RKPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan RKPD dgn dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistimatika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat (ekonomi dan sosial budaya), aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; serta permasalahan pembangunan daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAPPEDA HALUT

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Menguraikan secara eksplisit perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menyajikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII Penutup

Menguraikan tentang pedoman umum dan kaidah-kaidah dalam pelaksanaan RKPD.

BAPPEDA HALUT

BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

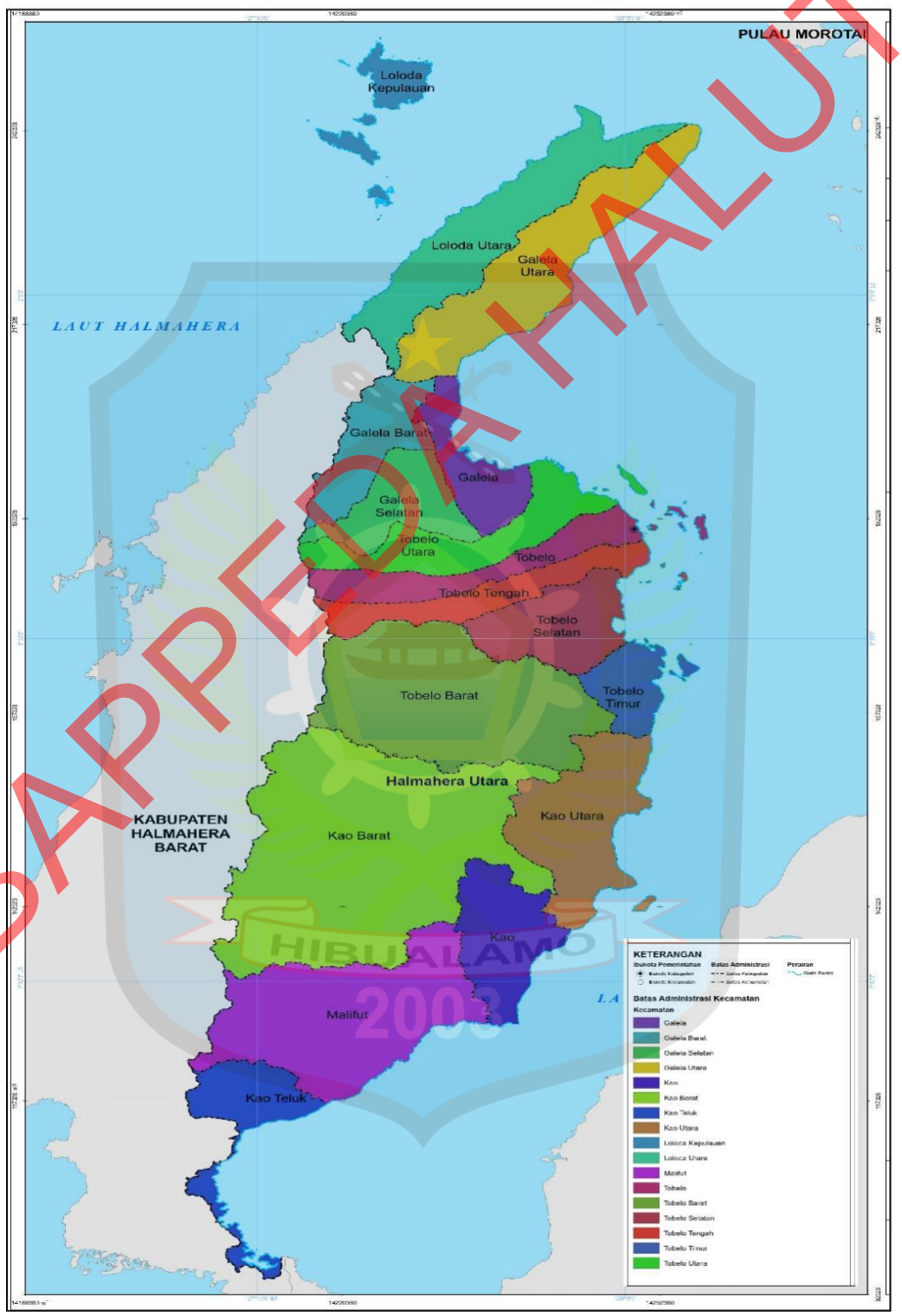
Kabupaten Halmahera Utara terbentuk pada 31 Mei 2003 berdasarkan UU No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, dengan ibukota di Tobelo. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 22.019,96 Km², meliputi daratan seluas 3.404,27 Km2 (15,5%) dan lautan 18.615,68 Km² (84,5%), dan secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pulau Morotai dan Samudera Pasifik
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- Sebelah Timur dengan Kab. Pulau Morotai dan Kecamatan Wasilei Kabupaten Halmahera Timur
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu, Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

Kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah agraris sekaligus maritim merujuk pada panjang garis pantai yang mencapai 515,1 km atau 7,5 persen dari total garis pantai Provinsi Maluku Utara sepanjang 6.823,5 km. Dengan karakteristik tersebut, Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi alam yang besar meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Sejalan dengan pembentukan kabupaten baru, sembilan kecamatan dimekarkan menjadi 22 kecamatan dan 174 desa menjadi 260 desa. Seiring ditetapkannya Pulau Morotai sebagai kabupaten tersendiri berdasarkan UU No. 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara, jumlah kecamatan berubah menjadi 17 dan 196 desa.

BAPPEDA HALUT

Disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, peta wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Utara
Sumber : Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

Secara administratif, saat ini Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dan 196 Desa. Wilayah kecamatan dengan luas terbesar adalah Kao Barat Barat dengan proporsi 24,56 persen, disusul Kecamatan Malifut dengan proporsi 10,56 persen, serta Galela Utara dengan proporsi 7,89 persen dan Loloda Utara dengan proporsi 7,27 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Adapun wilayah kecamatan dengan luas terkecil yaitu Galela, Tobelo Timur dan Loloda Kepulauan, masing-masing dengan proporsi 2,80 persen, 2,16 persen dan 1,52 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Perubahan terjadi pada luas Kecamatan Kao Teluk, yaitu dari 158,57 Km2 menjadi 111,83 Km2 menindaklajuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2019.

Rincian luas wilayah masing-masing kecamatan selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
				Km2	Proporsi (%)
1	Malifut	Ngofakiaha	22	359,44	10,56
2	Kao Teluk	Dum Dum	11	111,83	3,28
3	Kao	Kao	14	138,43	4,07
4	Kao Barat	Tolabit	21	835,93	24,56
5	Kao Utara	Daru	12	221,85	6,52
6	Tobelo Selatan	Kupa Kupa	13	136,01	4,00
7	Tobelo Barat	Kusuri	5	249,81	7,34
8	Tobelo Timur	Mawea	6	73,52	2,16
9	Tobelo	Gamsungi	10	126,07	3,70
10	Tobelo Tengah	Pitu	9	111,99	3,29
11	Tobelo Utara	Gorua	10	151,56	4,45
12	Galela	Soa Sio	7	95,47	2,80
13	Galela Selatan	Soakonora	7	113,86	3,34
14	Galela Barat	Dokulamo	9	110,59	3,25
15	Galela Utara	Salimuli	12	268,68	7,89
16	Loloda Utara	Dorume	18	247,62	7,27
17	Loloda Kepulauan	Dama	10	51,61	1,52
Halmahera Utara		**Tobelo**	**196**	**3.404,27**	**100,0**

Sumber : Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2024

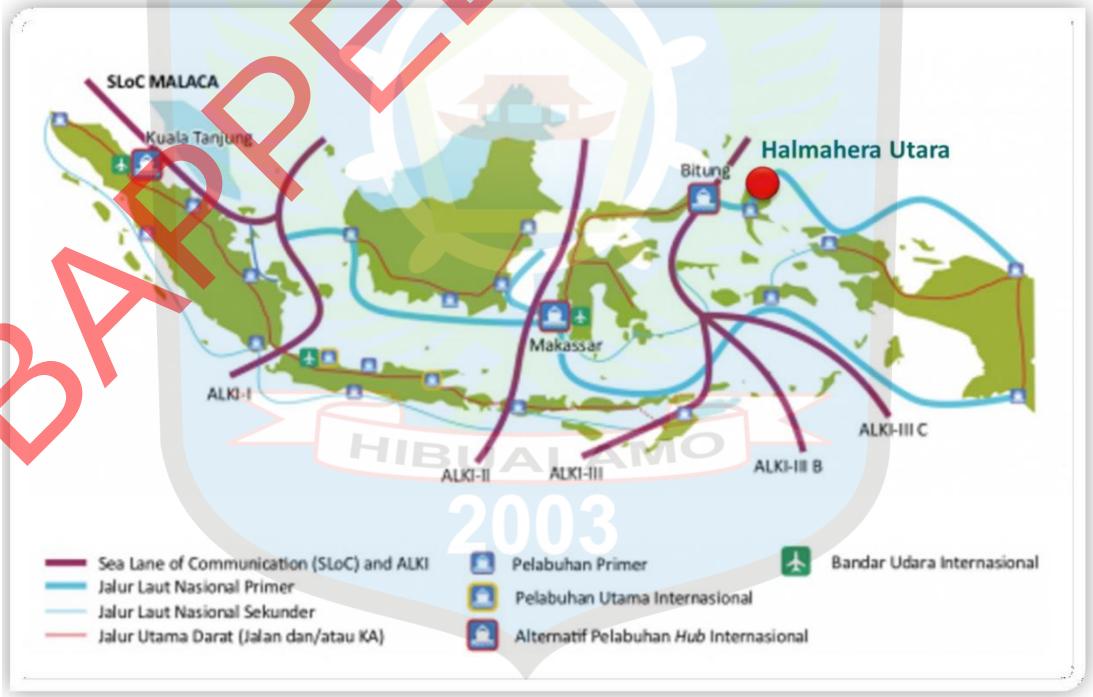
B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Halmahera Utara terletak antara $1^{0}57'$ Lintang Utara (LU) – $3^{0}00'$ Lintang Utara (LU) dan $127^{0}17'$ Bujur Timur (BT) – $129^{0}08'$ Bujur Timur (BT).

Posisi Geostrategis

Wilayah Kabupaten Halmahera Utara merupakan kawasan yang cukup strategis karena berada di bagian utara wilayah Kepulauan Indonesia yang berhadapan langsung dengan Pasific Basin. Di posisi tersebut Kabupaten Halmahera Utara dapat menjadi pintu gerbang dari dan menuju dunia internasional khususnya Asia Tenggara, Australia dan Kawasan Pasifik.

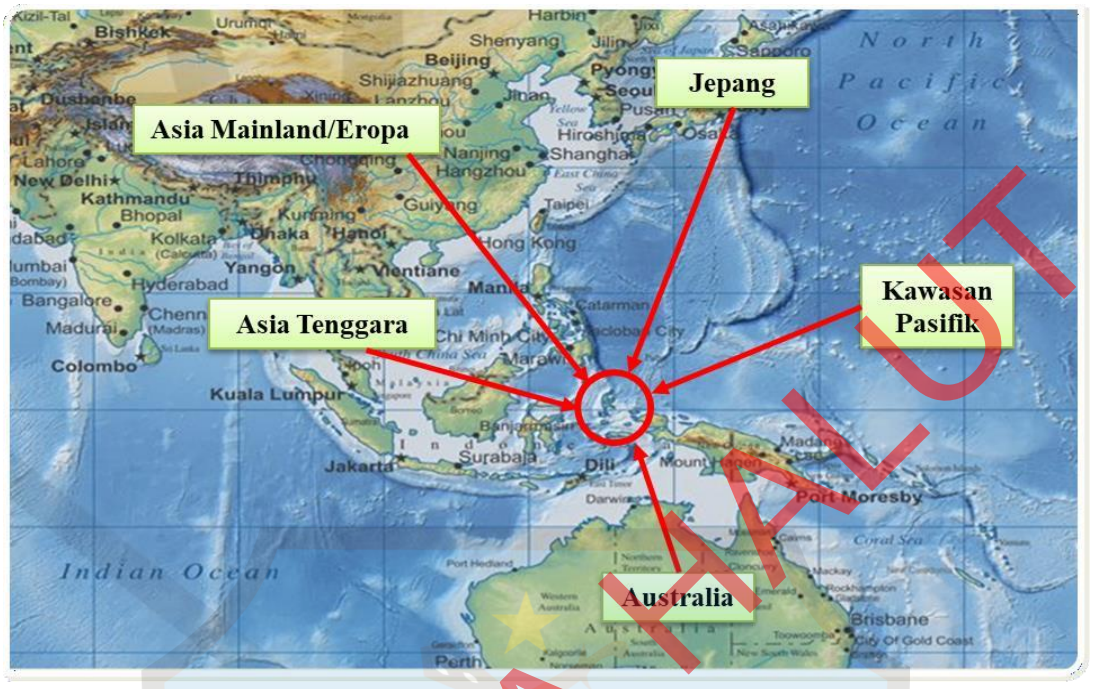
Wilayah Kabupaten Halmahera Utara berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI – III) (lihat Gambar 2.1). Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus bagi Kabupaten Halmahera Utara karena sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan Pasifik.



Gambar 2.2. Posisi Kabupaten Halmahera Utara Di Alur Laut Kepulauan Indonesia
Sumber : Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2024

Secara global, posisi geostrategis Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana diilustrasikan pada gambar di halaman berikut.

BAPPEDA HALUT



Gambar 2.3. Posisi Geostrategis Kabupaten Halmahera Utara
Sumber : Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

Kondisi Kawasan

Kondisi kawasan Kabupaten Halmahera Utara dapat diuraikan menurut Daerah Pedalaman, Daerah Terpencil, Daerah Pesisir, Daerah Pegunungan, Daerah Kepulauan, sebagai berikut.

a) Daerah Pedalaman

Daerah pedalaman merupakan daerah yang terletak jauh dari kota atau dari pantai. Daerah pedalaman di Kabupaten Halmahera Utara terdiri beberapa desa yakni Desa Kai dan Desa Leleseng berada di Kecamatan Kao Barat, Desa Roko di Kecamatan Galela Barat, Desa Wangongira, Desa Kusuri, dan Desa Talaga Paca di Kecamatan Tobelo Barat.

b) Daerah Terpencil

Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi. Wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang masuk dalam ketegori wilayah terpencil adalah Kecamatan Loloda Kepulauan terdiri atas 10 desa yaitu: Desa Cera, Desa Dowonggila, Desa Jikolamo, Desa Dedeta, Desa Dagasuli, Desa Fitako, Desa Tuakara, Desa Tobo-Tobo, Desa Tuakara, Desa Salube dan Desa Dama.

c) Daerah Pesisir

Wilayah Pesisir secara umum didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota. Sebanyak 122 desa (62,24 persen) di Kabupaten Halmahera Utara berada pada wilayah pesisir, dan 74 desa (37,76 persen) bukan desa pesisir. Tobelo Utara, Galela Utara dan Loloda Kepulauan merupakan kecamatan yang seluruh desanya berada di wilayah pesisir. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Desa Pesisir dan Bukan Pesisir Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara

No	Kecamatan	Desa Pesisir		Desa Bukan Pesisir		Jumlah Total
		Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	
1	Malifut	10	45,45	12	54,55	22
2	Kao Teluk	9	81,82	2	18,18	11
3	Kao	8	57,14	6	42,86	14
4	Kao Barat	-	-	21	100,00	21
5	Kao Utara	11	91,67	1	8,33	12
6	Tobelo Selatan	12	92,31	1	7,69	13
7	Tobelo Barat	-	-	5	100	5
8	Tobelo Timur	5	83,33	1	16,67	6
9	Tobelo	7	70,00	3	30,00	10
10	Tobelo Tengah	5	55,56	4	44,44	9
11	Tobelo Utara	10	100	-	-	10
12	Galela	6	85,71	1	14,29	7
13	Galela Selatan	-	-	7	100,00	7
14	Galela Barat	-	-	9	100,00	9
15	Galela Utara	12	100	-	0,00	12
16	Loloda Utara	17	94,44	1	5,56	18
17	Loloda Kepulauan	10	100	-	-	10
Halmahera Utara		**122**	**62,24**	**74**	**37,76**	**196**

Sumber : Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

d) Daerah Pegunungan

Kabupaten Halmahera Utara memiliki daerah pegunungan dengan ketinggian bervariasi mulai dari ±500 meter di atas permukaan laut(dpl) hingga ±1.245 meter di atas permukaan laut (dpl). Gunung tertinggi di Kabupaten Halmahera Utara adalah Gunung Karianga yang terletak di Kecamatan Tobelo dengan ketinggian ±1.245 meter di atas permukaan laut (dpl). Kabupaten Halmahera Utara juga memiliki sebuah gunung api aktif, yaitu Gunung Dukono yang terletak di Kecamatan Galela dengan ketinggian ±1.087 meter di atas permukaan laut (dpl).

e) Daerah Kepulauan

Kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah kepulauan dengan 65 pulau besar dan kecil. Sebagian besarnya adalah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau tersebut terdapat di enam kecamatan. Jumlah dan sebaran, serta nama-nama pulau menurut kecamatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Jumlah dan Sebaran Pulau Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara

Kecamatan	Jumlah Pulau	Nama Pulau
Loloda Utara	1	Kakapal
Loloda Kepulauan	43	Sedeng, Pombo, Takuramagura, Ogono, Dua, Lebeno, Doi, Deherete, Tabatukuno, Zadrak, Sarang, Maogu, Padosa, Laba, Tuakara, Fofoya, Dagasuli, Tomakomafatu, Hamadi, Akep, Kaharoriha, Ladansa, Lamasi, Kabingi Masaeke, Ici, Gaheru, Rasni, Salangadeke, Raja, Guratotolaka, Pontiana, Amat, Sulu, Dopnonoa, Tobo - Tobo Kecil, Funaililiar, Suwengko, Binongko Besar, Binongko Kecil, Bosowele, Tuo-Tuo, Kusain, Abana
Tobelo Utara	3	Mede, Popilo, Tolonuo
Tobelo	7	Rarangane, Kakara Lamo, Kakara Ici, Kumo, Tulang, Tagalaya, Pawole
Tobelo Tengah	5	Tupu-Tupu, Raha, Bobi, Koyobata, Kolorai
Tobelo Timur	5	Meti, Takou, Magaliho, Gumilamo, Ranga-Ranga
Kao Utara	1	Bobale

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 2020

BAPPEDA HALUT

C. Kondisi Topografi

Topografi daratan Kabupaten Halmahera Utara dibentuk oleh relief-relief besar, dimana Palung Oceanis dan Punggung Pegunungannya saling bergantungan secara mencolok, disertai kemiringan lahannya. Secara umum kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Halmahera Utara sangat bervariasi dari 0% sampai lebih besar dari 40%, dengan didominasi oleh lahan dengan kemiringan lereng 0–8%. Di sebagian wilayah pegunungan yang tersebar di Kecamatan Loloda Utara dan Galela Utara adalah wilayah yang memiliki lahan dengan kemiringan 26 – 40% dan daerah dengan kemiringan lereng curam yaitu >40% tersebar sebagian kecil berada di Galela, Tobelo Utara, Tobelo dan Tobelo Tengah pada wilayah pegunungan Karianga, Dukono dan Mamuya. Sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Utara dengan kondisi datar, landai dan curam.

Kondisi topografi menurut klasifikasi kemiringan lereng wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

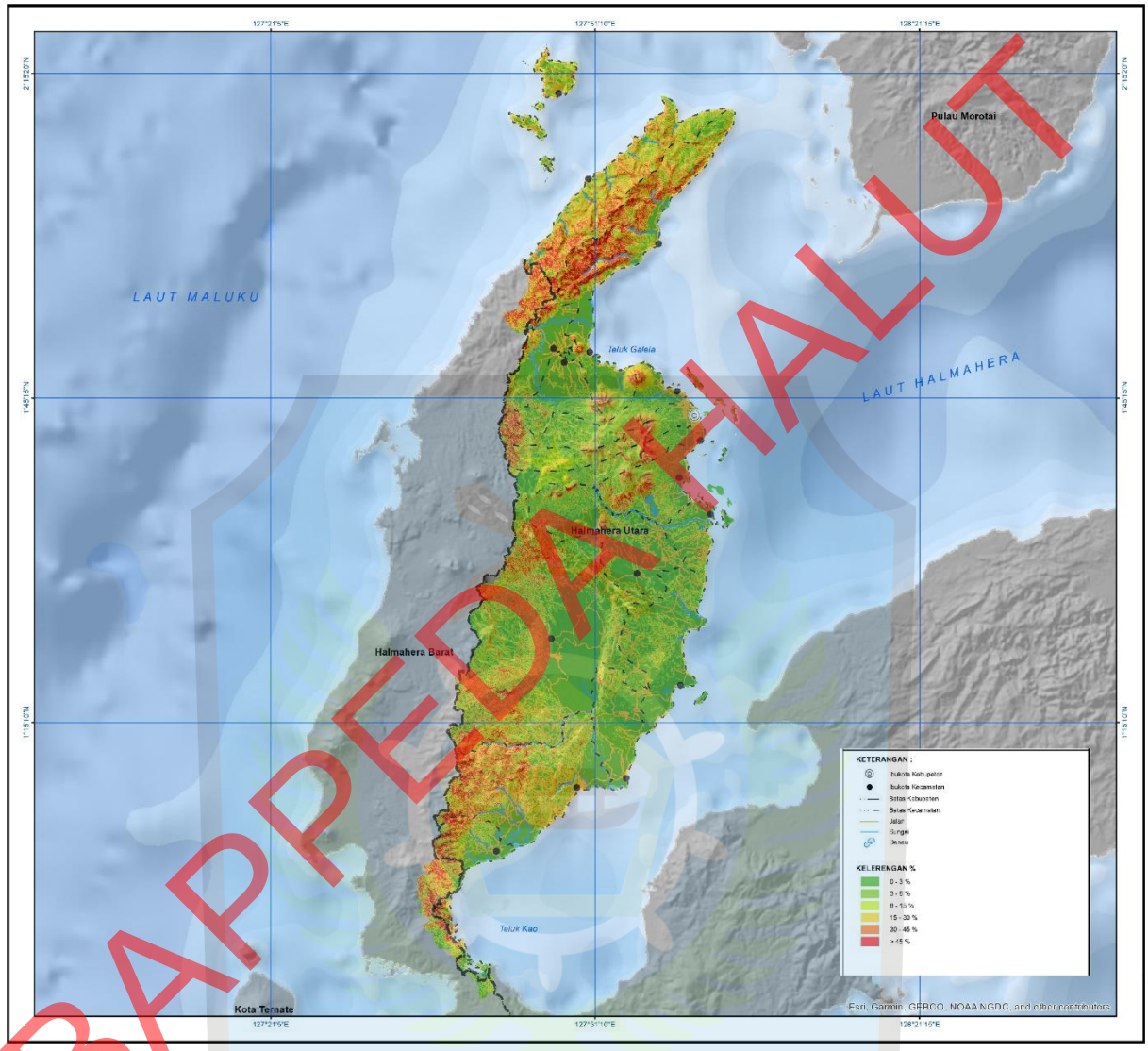
Tabel 2.4. Kondisi Topografi Kabupaten Halmahera Utara Menurut Klasifikasi Kemiringan Lereng

Kemiringan	Luas (Ha)	%	Klasifikasi
0 – 3 %	118.358	33,5	Datar-hampir datar
3 – 8 %	85.963	24,3	Sangat landai
8 – 15 %	58.599	16,6	Landai
15 – 30 %	43.771	12,4	Agak curam
30 – 45 %	28.131	8,0	Curam
>45 %	18.895	5,3	Sangat Curam/Terjal
Jumlah	**353.717**	**100**	

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara 2021-2032

Sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.4 di halaman berikut, wilayah Kabupaten Halmahera Utara dengan kemiringan lereng sangat curam/terjal (>45%), yang ditunjukkan oleh gradasi warna paling gelap, dengan proporsi cukup dominan meliputi kecamatan Galela Utara, Loloda, Malifut dan Kao Teluk. Adapun peta topografi wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.5 di halaman berikut.

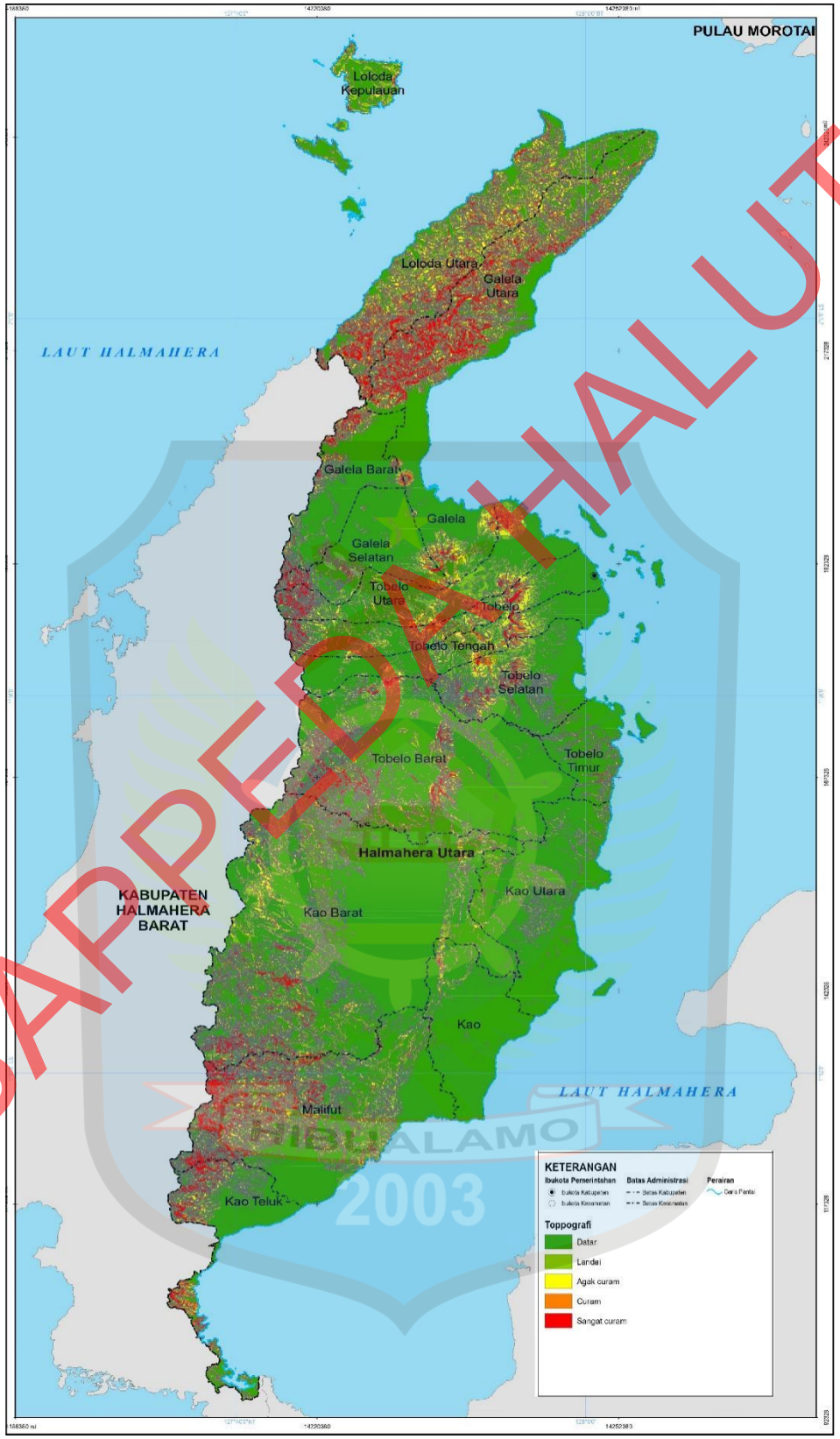
BAPPEDA HALUT



BAPPEDA HALUT

Gambar 2.4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Halmahera Utara

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara 2012-2032



Gambar 2.5. Peta Topografi Kabupaten Halmahera Utara
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara 2012-2032

BAPPEDA HALUT

D. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Berdasarkan pada peta geologi lembar Ternate, formasi geologi Pulau Halmahera terbagi dalam tiga mandala (bagian utama), yaitu Mandala Halmahera Timur, Halmahera barat termasuk Pulau Morotai, dan Busur Kepulauan Gunung Api Kuarter yang meliputi pulau-pulau kecil di bagian barat Pulau Halmahera. Mandala Halmahera Barat meliputi bagian Utara dan lengan Selatan Halmahera. Morfologi mandala berupa perbukitan yang tersusun atas Batuan Sedimen, pada Batu gamping berumur Neogen dan morfologi karst dan di beberapa tempat terdapat morfologi kasar yang merupakan cerminan batuan gunung api berumur oligosen. Berdasarkan deskripsi tersebut, wilayah Kabupaten Halmahera Utara termasuk dalam formasi Mandala Halmahera Barat.

Terdapat 10 formasi batuan di wilayah geologi Halmahera Utara, antara lain: Andesit, Aluvium, Tufa, Batuan Gunung Api Holosen, Terumbu Koral terangkat, Kayasa, Togawa, Weda dan Bacan. Potensi geologi yang ada di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tersaji dalam berikut.

Tabel 2.5. Potensi Geologi Kabupaten Halmahera Utara

No	Potensi	Lokasi (Kecamatan)
1	Emas	Loloda Utara, Galela Barat, Galela Utara, Kao, Malifut, Kao Barat dan Kao Teluk
2	Mangan	Loloda Utara, Loloda Kepulauan & Galela
3	Nikel	Galele, Kao
4	Pasir Besi	Loloda Utara, Galela
5	Tembaga	Loloda Utara, Galela
6	Semen	Galela
7	Batubara	Galela

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara 2021-2032

Struktur dan karakteristik tanah di wilayah Kabupaten Halmahera Utara antara lain: Tanah Litosol terdapat di dataran Galela; Tanah Rendzina terdapat di dataran Loloda Utara; Tanah Mediteran terdapat di dataran Loloda dan Galela; Tanah Alluvial terdapat di hampir semua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara; Tanah Regosol terdapat di Kecamatan Loloda Utara, Galela, Kao, dan Malifut; Tanah Latosol terdapat di Kecamatan Loloda Utara, Galela, Tobelo, Tobelo Selatan, Kao, dan Malifut.

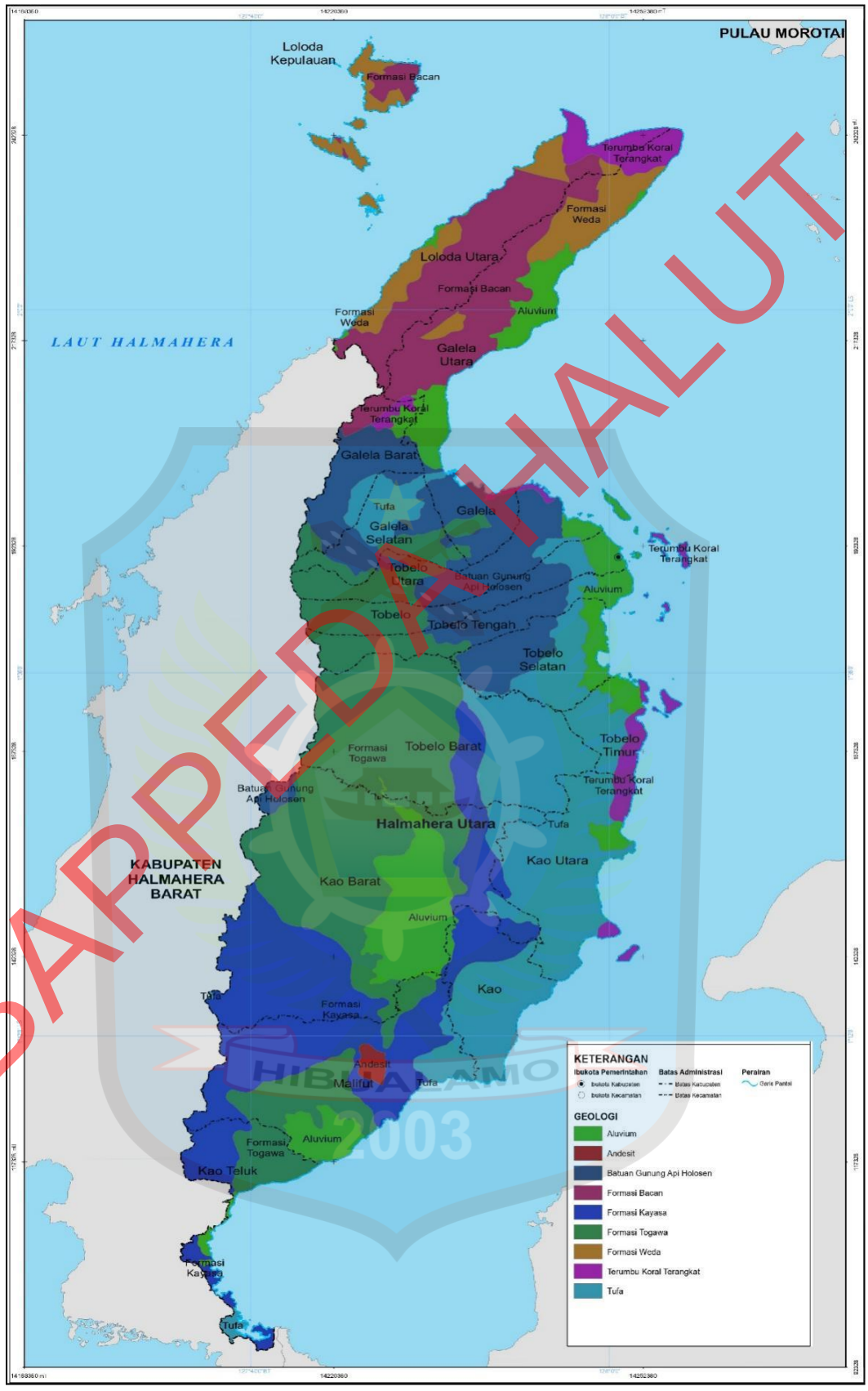
BAPPEDA HALUT

Berdasarkan karekteristik tanah yang ada maka potensi yang dimanfaatkan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Latosol, dengan bahan induk berupa Tuff Vulkan, Latosol Vulkanik dan Latosol Gunung, dengan potensi terdapat pada tanaman perkebunan serta kebun campuran berbagai tanaman (keras dan tanaman semusim). Jenis tanah ini tersebar di Kecamatan Loloda Utara, Galela, Tobelo, Tobelo Selatan, Kao dan Maifut;
2. Alluvial, dengan bahan induk berupa Aluvial Pantai dan Lembah, dengan potensi Aluvial Pantai biasanya terdapat di wilayah pantai yang subur, dan ditanami oleh masyarakat dengan tanaman kelapa dan kebun campuran. Aluvial Lembah terdapat di pedalaman dan biasanya ditanami tanaman pangan (sawah) dan sayuran. Sebaran jenis tanah ini terdapat hampir di semua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Rendzina merupakan tanah organik diatas bahan berkapur yang memiliki tekstur lempung seperti vertisol, dengan potensi memiliki kadar lempung yang tinggi, teksturnya halus dan daya permeabilitasnya rendah sehingga kemampuan menahan air dan mengikat air tinggi. Jenis tanah ini terdapat di kecamatan Loloda Utara;
4. Mediteran, merupakan tanah ordo alfisol, dengan potensi Alfisol banyak terdapat di bawah tanaman hutan dengan karakteristik tanah akumulasi lempung pada horizon Bt, horizon E yang tipis, mampu menyediakan dan menampung banyak air, dan bersifat asam. Alfisol mempuyai tekstur lempung dan bahan induknya terdiri atas kapur sehingga permeabilitasnya lambat. Jenis tanah ini dapat ditemukan di Dataran Loloda dan Galela;
5. Regosol, merupakan tanah yang termasuk ordo entisol, dengan potensi dimanfaatkan untuk tanaman palawija, tembakau, dan buah-buahan yang juga tidak terlalu banyak membutuhkan air. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Loloda Utara, Galela, Kao dan Malifut;

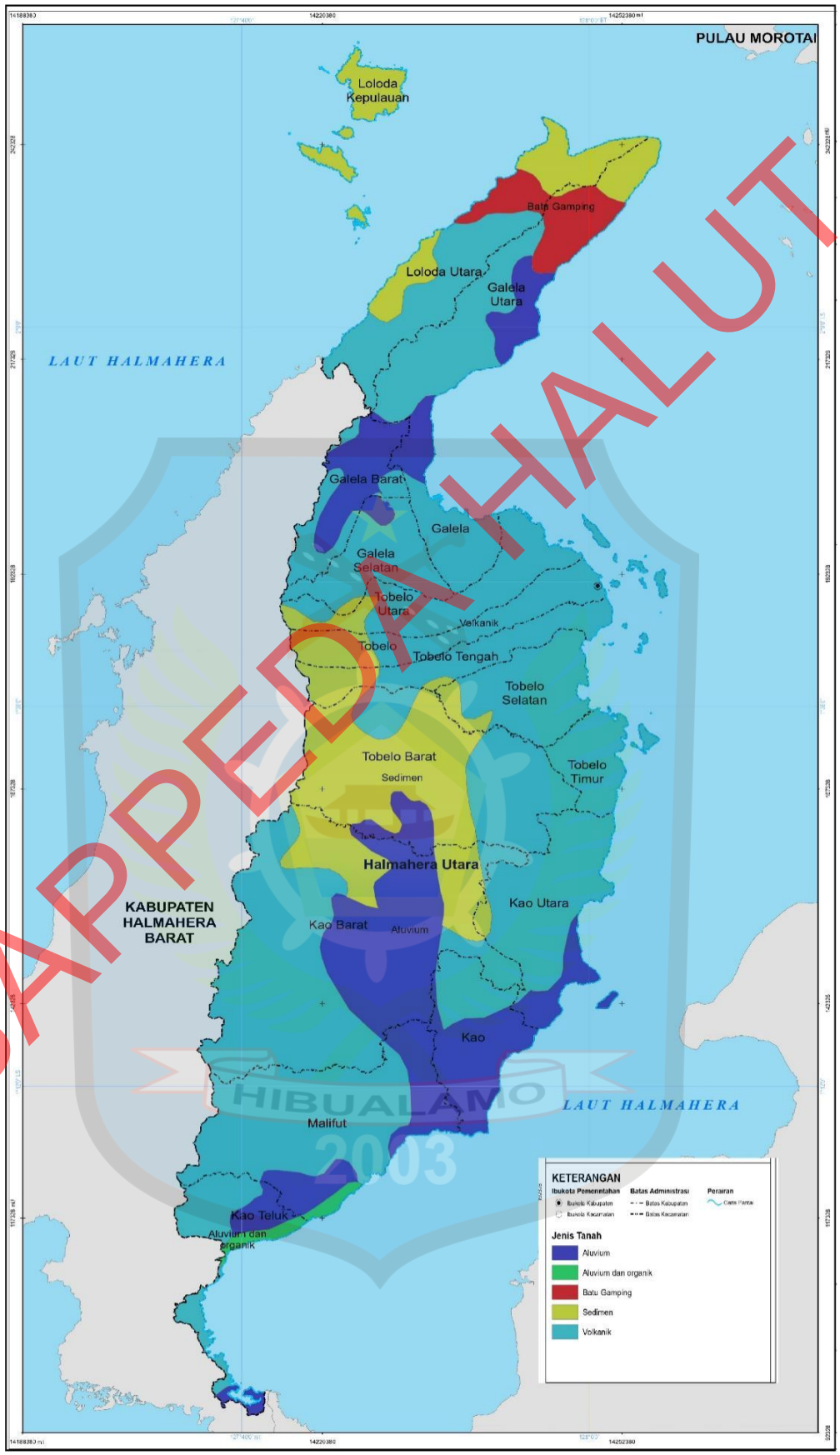
Peta geologi wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.6, sedangkan peta jenis tanah di wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.7 di halaman berikut.

BAPPEDA HALUT



Gambar 2.6. Peta Geologi Kabupaten Halmahera Utara
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara 2012-2032

BAPPEDA HALUT



Gambar 2.7. Peta Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Utara
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara 2012-2032

BAPPEDA HALUT

E. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Halmahera Utara dipengaruhi oleh sifat iklim regional, di samping sifat-sifat fisik wilayah/tanah, hutan, dan lingkungan. Sumberdaya air di Kabupaten Halmahera Utara meliputi, danau, sungai, dan air tanah dalam (mata air). Di wilayah Kabupaten Halmahera Utara terdapat 6 (enam) danau, sebagai berikut:

1. Danau Talaga Duma, Galela
2. Danau Makete, Galela
3. Danau Kapupu, Galela
4. Danau Talaga Biru, Galela
5. Danau Talaga Paca, Tobelo Selatan
6. Danau Talaga Lina, Tobelo Selatan

Di Kabupaten Halmahera Utara terdapat 64 Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.6. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Halmahera Utara

No.	Nama DAS	No.	Nama DAS	No.	Nama DAS
1	Ake Aru	23	Ake Ngajam	45	Kakara Besar
2	Ake Asimiro	24	Ake Paca	46	Laba
3	Ake Daru	25	Ake Para	47	Magaliho
4	Ake Doitia	26	Ake Pinatu	48	Mamuya
5	Ake Domera	27	Ake Pitau	49	Miti
6	Ake Domu-Domu	28	Ake Posowani	50	Salangadeke
7	Ake Dorume	29	Ake Roko	51	Sidangoli
8	Ake Gamhoku	30	Ake Soho	52	Tagalaya
9	Ake Gisi	31	Ake Salu	53	Tolonuo
10	Ake Giare	32	Ake Soasangaji	54	Tutumaloleo
11	Ake Goluk	33	Ake Supu	55	Ake Posi-Posi
12	Ake Jati	34	Ake Tabobo	56	Ake Pocao
13	Ake Kakara B	35	Ake Teru (Teru-Teru)	57	Ake Kapa-Kapa
14	Ake Kosidi	36	Ake Tiabo	58	Ake Galao
15	Ake Kupa-Kupa	37	Ake Wadengolak	59	Ake Worimoi
16	Ake Kwekao	38	Akelamo Gamsungi	60	Ake Mamojiu
17	Ake Lakata	39	Bobale	61	Ake Apulea
18	Ake Lamo	40	Bobane igo	62	Ake Raki (Salube)
19	Ake Lamo Kao	41	Doi	63	Ake Kebun Jala (Salube)
20	Ake Lapi	42	Dagasuli	64	Ake Cera
21	Ake Mawea	43	Gumilamo		
22	Ake Mela (Mede)	44	Kao		

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara 2021-2032

BAPPEDA HALUT

Di wilayah Halmahera Utara terdapat juga Cekungan Air Tanah (CAT) pada daerah aliran air tanah atau Ground Water Basin, yaitu adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari: 1) CAT lintas kabupaten yaitu CAT Ibu dan CAT Jailolo – Sidangoli; dan 2) CAT dalam kabupaten yaitu CAT Kao, CAT Tobelo dan CAT Galela. Gambaran potensi dari masing-masing CAT sebagaimana tersaji dalam Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.7. Potensi Cekungan Air Tanah Di Kabupaten Halmahera Utara

No. CAT	Cekungan Air Tanah (CAT)		Jumlah Air Tanah [juta m3/tahun]		Kategori CAT	
					Prov.	Kab./Kota
	Nama	Luas [Km^2]	Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)	B	C
318	Galela	704	340	113	x	
319	Tobelo	763	419	125		x
320	Ibu	756	454	249	x	
321	Kau	1941	647	215	x	
322	Jailolo-Sidangoli	1576	531	177	x	
	Total	**9.826**	**2.391**	**879**	**5**	**20**

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2020

F. Klimatologi

Sebagai wilayah kepulauan, iklim di Kabupaten Halmahera Utara dikontrol oleh sistem sirkulasi angin monsun dengan dua musim utama yakni musim penghujan (Mei - September) dan musim kemarau atau kering (Februari - April). Dalam konteks ini terhadap 3 (tiga) wilayah curah hujan yang dominan di Indonesia atau sering disebut sebagai daerah dengan periode puncak musim hujan, yaitu: 1) monsunal, wilayah yang memiliki satu puncak musim hujan antara Desember-Januari-Februari; 2) ekuatorial, wilayah yang memiliki dua puncak musih hujan sekitar bulan April- Mei dan Oktober-November; dan 3) lokal, wilayah yang memiliki satu puncak curah hujan dominan di sekitar Bulan Juni-Juli. Secara umum wilayah kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah kepulauan dengan iklim tropis. Tabel di halaman berikut menyajikan gambaran curah hujan, suhu dan kelembaban udara bulanan di Kabupaten Halmahera Utara sepanjang tahun 2023.

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.8. Kondisi Temperatur, Kelembaban, Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

Bulan	Temperatur (^{0}C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)
Januari	26,3	89,5	2,50	1.003,9
Februari	25,9	90,4	1,70	1.004,3
Maret	26,7	89,1	1,90	1.005,3
April	27,5	87,3	2,10	1.004,4
Mei	27,5	87,8	2,10	1.005,4
Juni	26,9	89,6	1,50	1.005,5
Juli	26,7	89,1	1,70	1.005,6
Agustus	26,8	87,8	2,00	1.006,3
September	26,4	89,6	2,10	1.005,7
Oktober	27,2	87,5	2,10	1.006,6
November	27,5	89,8	1,60	1.005,1
Desember	27,3	89,7	1,50	1.005,2

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2024

Tabel 2.9. Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	327,0	21	9,11
Februari	277,5	25	7,70
Maret	167,4	24	4,34
April	237,8	22	4,63
Mei	158,1	17	5,65
Juni	192,6	24	5,92
Juli	214,7	19	5,97
Agustus	205,4	23	4,84
September	179,4	19	5,04
Oktober	111,8	8	5,87
November	79,0	17	3,43
Desember	63,4	15	6,77
Tahunan	**2.214,1**	**234**	**5,77**

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2024

G. Penutupan dan Penggunaan Lahan

Penutupan lahan (*land cover*) di Kabupaten Halmahera Utara didominasi oleh pertanian, yaitu pertanuan lahan kering campur (35,01 persen) dan pertanian lahan kering (21,41) persen. Sementara proporsi penutupan lahan berhutan sebesar 40,5 persen yang didominasi oleh hutan lahan sekunder.

Gambaran lengkap penutupan lahan di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana

BAPPEDA HALUT

tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.10. Penutupan Lahan Di Kabupaten Halmahera Utara

No	Klasifikasi	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Hutan lahan kering primer	17.470,53	5,13
2	Hutan lahan kering sekunder	89.784,39	26,37
3	Hutan mangrove primer	2.229,72	0,65
4	Hutan mangrove sekunder	1.088,76	0,32
5	Hutan rawa sekunder	4.176,17	1,23
6	Belukar	21.624,81	6,35
7	Belukar rawa	1.548,57	0,45
8	Pertanian lahan kering	72.878,89	21,41
9	Pertanian lahan kering campur	119.169,14	35,01
10	Permukiman	5.923,91	1,74
11	Pertambangan	701,48	0,21
12	Sawah	1.411,55	0,41
13	Tanah terbuka	730,89	0,21
14	Bandara	199,24	0,06
15	Badan Air	1488,66	0,44
	Halmahera Utara	**340.426,71**	**100,0**

Sumber : Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2021

Adapun dari sisi penggunaan lahan (*land use*) khususnya pada kawasan hutan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, masih tersedia sekitar 79.181 Ha hutan lindung atau 31,86 persen dari total areal kawasan hutan yang ada. Keberadaan hutan lindung ini penting sebagai potensi bagi penyediaan sumber air serta sebagai perlindungan terhadap kawasan bawahnya Rincian penggunaan kawasan hutan yang meliputi hutan produksi terbatas, tetap dan dapat dikonversi, serta kawasan lindung, dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.11. Penggunaan Kawasan Hutan di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

Kawasan Hutan	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Suaka Alam	Hutan Lindung	Total
Luas (Ha)	77.712,61	21.747,70	69.908,33	-	79.256,17	248.624,81
Persentase Luas (%)	31,26%	8,75%	28,12%	-	31,88%	100,0%

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan arahan

BAPPEDA HALUT

RTRW Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032, dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi terbagi atas hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas, dimana eksploitasi hanya melalui tebang pilih dan tanam. Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap, dimana eksploitasi melalui tebang pilih atau tebang habis dan tanam, Kawasan hutan yang bilamana diperlukan dapat dialih fungsikan.

B. Kawasan Pertanian

Penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Halmahera Utara merupakan penggunaan lahan kedua terbesar setelah penggunaan hutan. Lahan pertanian tersebut ditanami dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan tanaman hortikultura. Tanaman perkebunan yang diusahakan terdiri dari kelapa, cengkeh, coklat, pala, kopi, vanili. Untuk tanaman perkebunan, Kelapa merupakan tanaman yang memiliki luas area tanam terbesar yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Utara, disusul tanaman pala, kakao, cengkeh, sagu, aren dan kopi. Untuk tanaman pangan yang diusahakan di kabupaten ini, jagung merupakan tanaman pangan dengan luas tanam terbesar, disusul tanaman padi sawah, padi ladang, ubi kayu dan ubi jalar. Di Kabupaten Halmahera Utara dapat juga dijumpai berbagai jenis ternak seperti sapi, kambing, babi, ayam, dan itik. Dilihat dari populasinya, ayam merupakan ternak yang terbesar jumlahnya dan terdiri dari ayam buras, ayam ras pedaging, serta ayam ras petelur.

C. Kawasan Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tentang sub urusan perikanan tangkap untuk kewenangan kabupaten hanya pada pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten dan pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) sedangkan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 mil merupakan kewenangan provinsi.

Kabupaten Halmahera Utara merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah pulau 65 yang dikelilingi oleh lautan dan sebagian besar wilayahnya yakni 40% merupakan lautan yang mayoritas masyarakatnya tinggal di wilayah pesisir dengan mata

BAPPEDA HALUT

pencaharian nelayan yang berjumlah 5.466 orang yang terdata pada tahun 2023 (sumber data: BPS tahun 2023) dengan sub zona pelagis dan demersal.

Sentra perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera Utara dapat dikelompokkan dalam beberapa wilayah sebagai sentra kegiatan perikanan, serta dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok besar yang terdiri dari beberapa kecamatan dan gugusan pulau-pulau kecil yang terintegrasi dalam suatu kawasan penangkapan ikan dan pendaratan hasil tangkapan. Pengelompokkan sentra-sentra perikanan tersebut yaitu:

a) Wilayah Kecamatan Loloda Kepulauan dan Loloda Utara
b) Wilayah Kecamatan Galela
c) Wilayah Kecamatan Tobelo
d) Wilayah Kecamatan Kao
e) Wilayah Kecamatan Malifut
f) Wilayah Kecamatan Tobelo Selatan
g) Wilayah Kecamatan Tobelo
h) Wilayah Kecamatan Tobelo Timur

D. Kawasan Pariwisata

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Kabupaten Halmahera Utara memiliki berbagai keistimewaan dengan berbagai potensi yang mempunya keunggulan kompetitif dan komparatif dari daerah lain. Keistimewaan tersebut tidak hanya dari segi aspek historis yang dimiliknya tetapi juga berbagai keindahan alam serta keunikan lokal baik budaya serta masyarakatnya.

Karakteristik wilayah Kabupaten Halmahera Utara sangat beranekaragam. Hal ini berpengaruh terhadap potensi daya tarik wisata yang ada di setiap kecamatan. Potensi obyek dan daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Halmahera adalah daya tarik alam bahari pulaupulau dan budaya. Pulau-pulau kecil disekitar Kota Tobelo menyimpan daya tarik wisata bahari yang besar, misalnya Pulau Tanjung Kakara, Pulau Tagalaya, Pulau Duma, dan lain sebagainya. Kabupaten Halmahera Utara di sekitar Kota Tobelo juga merupakan area pegunungan, mempunyai potensi tinggi sebagai obyek dan daya tarik alam, dimana terdapat Gunung Dukono dan Mamuya yang masih aktif. Di sekitarnya juga terdapat mata air panas Mamuya yang ramai

BAPPEDA HALUT

dikunjungi oleh wisatawan.

Di bagian lain sekitar Kota Tobelo dan Galela menyimpan potensi telaga/danua luas dan mempesona, seperti Danau Duma, Danau Paca, Danau Lina, Danau Makete dan lain sebagainya. Selain itu juga tidak kalah pentingnya, Kabupaten Halmahera Utara menyimpan potensi budaya dan peninggalan sejarah yang masih dijaga hingga saat ini.

Daya tarik wisata di Kabupaten Halmahera Utara tersebar di 17 kecamatan yang ada dalam berbagai jenis dan jumlahnya. Setidaknya terdapat objek dan daya tarik wisata Halmahera Utara sebanyak 56 daya tarik wisata, ditambah sekitar 20 titik dive site dengan rincian : 41 daya tarik wisata alam sisanya 15 daya tarik wisata budaya. Semua potensi wisata ini secara bersama-sama dapat memperkuat daya saing produk wisata Kabupaten Halmahera Utara.

E. Kawasan Industri

Kegiatan industri yang dilakukan oleh masyarakat akan dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan dan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Industri yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah industri yang memanfaatkan hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) sebagai bahan bakunya, dalam hal ini adalah agroindustri. Wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat mengembangkan Kawasan Agroindustri di seluruh wilayah Kecamatan yang ada disesuaikan dengan komditas potensial di setiap kecamatan. Sektor industri yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah industri pangan (makanan dan minuman) dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Industri pengolahan makanan dan minuman yang dapat dikembangkan antara lain: pengolahan tepung dan keripik (ubi kayu, ubi jalar, pisang), aneka olahan (cabe, tomat, mangga, kelapa, pala, kakao, cengkeh dan daging). Pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Halmahera Utara harus mampu meningkatkan daya saing dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Pengembangan industri kecil dan menengah harus melakukan pembenahan diri dengan berorientasi pada pengkajian peluang dan tantangan yang berbasis teknologi agar mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi (*enginee of economic growth*) bagi

BAPPEDA HALUT

perekonomian masyarakat dan daerah.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Risiko bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Kriteria kawasan risiko bencana alam mencakup kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. Perlindungan terhadap kawasan Risiko bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Halmahera Utara diuraikan sebagai berikut.

A. Kawasan Rawan Banjir

Bencana banjir merupakan melimpahnya volume air yang berlebih umumnya dari air hujan yang tidak bisa diserap oleh lapisan tanah dan mengalir ke daerah dataran yang lebih rendah serta disebabkan terperangkapnya air karena tidak terhubungnya saluran hingga ke bagian hilir. Beberapa daerah yang berisiko terhadap banjir bandang antara lain Kecamatan Tobelo, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, Tobelo Utara, Galela Barat, Galela Selatan, Galela Utara, Kao, Kao Barat, Kao Teluk, Kao Utara, Malifut, Loloda Utara.

B. Kawasan Rawan Abrasi

Abrasi merupakan proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai.

Beberapa daerah yang rawan terhadap abrasi antara lain Kecamatan Tobelo, Tobelo Utara, Tobelo Timur, Tobelo Selatan, Galela, Galela Utara, Kao, Kao Teluk, Kao Utara, Malifut, Loloda Kepulauan dan Loloda Utara.

C. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunungapi atau runtuhan batuan. Kawasan Risiko gempa bumi berpotensi di setiap kecamatan di

BAPPEDA HALUT

Kabupaten Halmahera Utara.

D. Kawasan Rawan Letusan Gunungapi

Bahaya letusan gunungapi di Kabupaten Halmahera Utara dapat berasal dari Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Utara dan Gunung Dukono. Wilayah potensi bahaya letusan gunung api terdapat di Kecamatan Galela, Galela Barat, Galela Selatan, Tobelo, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, dan Tobelo Utara.

E. Kawasan Rawan Tsunami

Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempabumi. Tsunami juga dapat diakibatkan oleh longsor dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut, atau jatuhnya meteor ke laut. Bahaya tsunami dapat dipetakan melalui beberapa parameter seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana. Bahaya Risiko tsunami berpotensi terjadi pada daerah di sepanjang pesisir pantai sampai dengan sekitar 10 km menuju daratan. Adapun daerah yang rawan akan terjadinya tsunami antara lain Kecamatan Galela, Galela Utara, Kao, Kao Teluk, Kao Utara, Loloda Kepulauan, Loloda Utara, Malifut, Tobelo, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, dan Tobelo Utara.

Gambaran potensi bahaya menurut jenis bencana dan luasannya di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.12. Potensi Bahaya Bencana di Kabupaten Halmahera Utara

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	102.515	RENDAH
2	Banjir Bandang	13.686	TINGGI
3	Cuaca Exstrim	81.287	TINGGI
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	7.697	TINGGI
5	Gempa Bumi	411.724	TINGGI
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	226.442	TINGGI
7	Kekeringan	411.724	TINGGI
8	Letusan Gunung Api	33	RENDAH
9	Tanah Longsor	116.462	RENDAH
10	Tsunami	2.277	TINGGI

Sumber : BPBD Kabupaten Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

2.1.4. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada Semester I 2023 berdasarkan data registrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, sebanyak 203.213 jiwa, dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 201.196 jiwa, atau tumbuh sebesar 1,0 persen. Adapun berdasarkan Proyeksi BPS, pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara tercatat sebanyak 205.567 jiwa, atau tumbuh sebesar 1,39 persen dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 202.755 jiwa.

Penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 lebih banyak laki-laki dengan rasio L/P (lak-laki/perempuan) 104,79 atau setiap 104-105 laki-laki terdapat 100 perempuan. Meskipun di hampir seluruh kecamatan penduduk laki-laki lebih banyak, rasionya tidak seragam. Kecamatan dengan rasio L/P di atas 110 terdapat di Kao Barat, Galela Utara, dan Tobelo Barat. Adapun kecamatan dengan rasio L/P terkecil adalah Galela Selatan dan Tobelo Utara. Tabel berikut menyajikan laju pertumbuhan dan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Halmahera Utara menurut kecamatan pada tahun 2023.

Tabel 2.13. Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan (%)	Rasio L/P
		2022	2023		
1	Malifut	14.107	14.054	(0,38)	103,80
2	Kao Teluk	6.920	6.936	0,23	103,64
3	Kao	9.735	9.762	0,28	109,04
4	Kao Barat	9.836	9.903	0,68	113,93
5	Kao Utara	14.129	14.282	1,08	107,35
6	Tobelo Selatan	15.228	15.326	0,64	103,02
7	Tobelo Barat	6.136	6.080	(0,91)	110,75
8	Tobelo Timur	7.098	7.138	0,56	106,72
9	Tobelo	33.173	34.062	2,68	101,30
10	Tobelo Tengah	15.766	16.294	3,35	104,01
11	Tobelo Utara	12.090	12.193	0,85	99,85
12	Galela	8.626	8.742	1,34	103,63
13	Galela Selatan	9.206	9.401	2,12	99,26
14	Galela Barat	11.065	11.337	2,46	103,87
15	Galela Utara	9.300	9.370	0,75	112,23
16	Loloda Utara	10.840	10.631	(1,93)	109,35
17	Loloda Kepulauan	7.941	7.702	(3,01)	103,81
Halmahera Utara		**201.196**	**203.213**	**1,00**	**104,79**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

Hampir 25 persen atau seperempat dari total penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 bermukim di wilayah Kecamatan Tobelo dan Tobelo Tengah yang merupakan kawasan pusat pemerintahan serta pusat perdagangan dan ekonomi serta pelayanan publik kabupaten. Dengan luas wilayah 126,07 Km2 atau 3,7 persen dari total luas daratan Halmahera Utara, Kecamatan Tobelo merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yang mencapai 270,2 jiwa/km2, disusul Kecamatan Loloda Kepulauan dengan kepadatan penduduk sebesar 149,2 jiwa/km2 pada luas wilayah yang hanya 51,61 km2 atau 1,5 persen dari total luas daratan Halmahera Utara. Adapun wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu Kao Barat dengan 11,8 jiwa/km2.

Secara keseluruhan rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 sebesar 59,7 jiwa/km2. Gambaran perbandingan distribusi penduduk Kabupaten Halmahera Utara menurut kecamatan dan tingkat kepadatannya dapat dilihat pada tabel berikut.

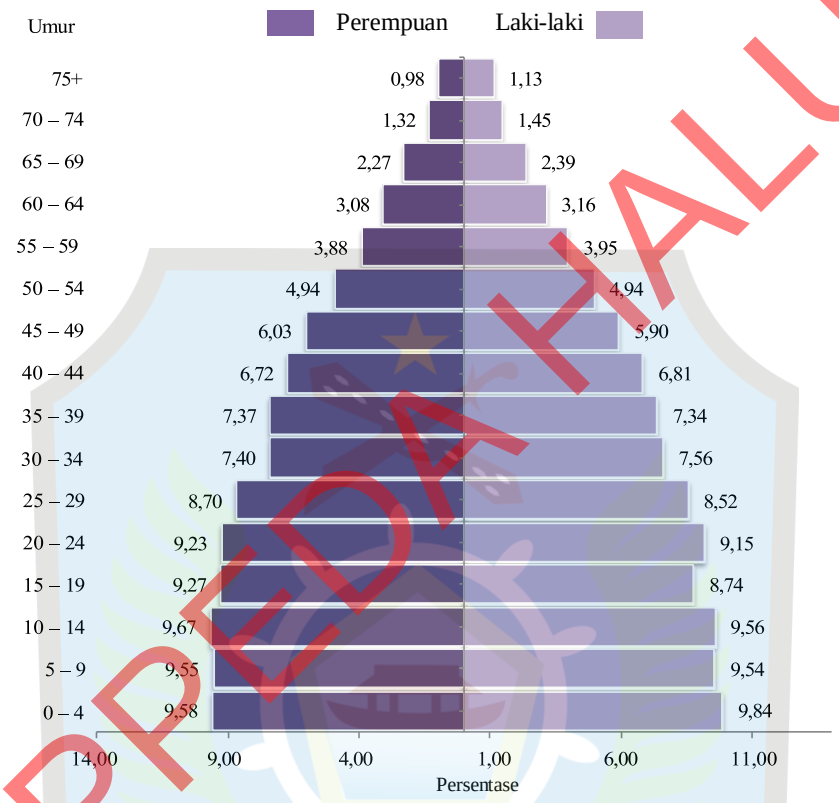
Tabel 2.14. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Penduduk		Luas (Km2)	Kepadatan (jiwa/km2)
		Jumlah (jiwa)	Distribusi (%)		
1	Malifut	14.054	6,92%	359,44	39,1
2	Kao Teluk	6.936	3,41%	111,83	62,0
3	Kao	9.762	4,80%	138,43	70,5
4	Kao Barat	9.903	4,87%	835,93	11,8
5	Kao Utara	14.282	7,03%	221,85	64,4
6	Tobelo Selatan	15.326	7,54%	136,01	112,7
7	Tobelo Barat	6.080	2,99%	249,81	24,3
8	Tobelo Timur	7.138	3,51%	73,52	97,1
9	Tobelo	34.062	16,76%	126,07	270,2
10	Tobelo Tengah	16.294	8,02%	111,99	145,5
11	Tobelo Utara	12.193	6,00%	151,56	80,4
12	Galela	8.742	4,30%	95,47	91,6
13	Galela Selatan	9.401	4,63%	113,86	82,6
14	Galela Barat	11.337	5,58%	110,59	102,5
15	Galela Utara	9.370	4,61%	268,68	34,9
16	Loloda Utara	10.631	5,23%	247,62	42,9
17	Loloda Kepulauan	7.702	3,79%	51,61	149,2
Halmahera Utara		**203.213**	**100,0%**	**3.404,27**	**59,7**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

Berdasarkan kelompok umur, Kabupaten Halmahera Utara didominasi penduduk usia produktif 15-64 tahun dengan proporsi 66,36 persen. Gambar berikut menyajikan piramida penduduk Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan kelompok umur pada tahun 2023.



Gambar 2.8. Piramida Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Utara, 2024, diolah

Jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif, tentunya dapat menjadi bonus demografi bagi Kabupaten Halmahera Utara, untuk mendorong kemajuan dan daya saing daerah. Namun selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi daerah untuk semakin berkembang karena jumlah usia tidak produktif akan ditanggung oleh usia produktif, bonus demografi juga bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi Kabupaten Halmahera Utara jika tidak dipersiapkan dengan baik. Ancaman bisa datang karena berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatnya jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, hingga ekonomi dan kesehatan masyarakat.

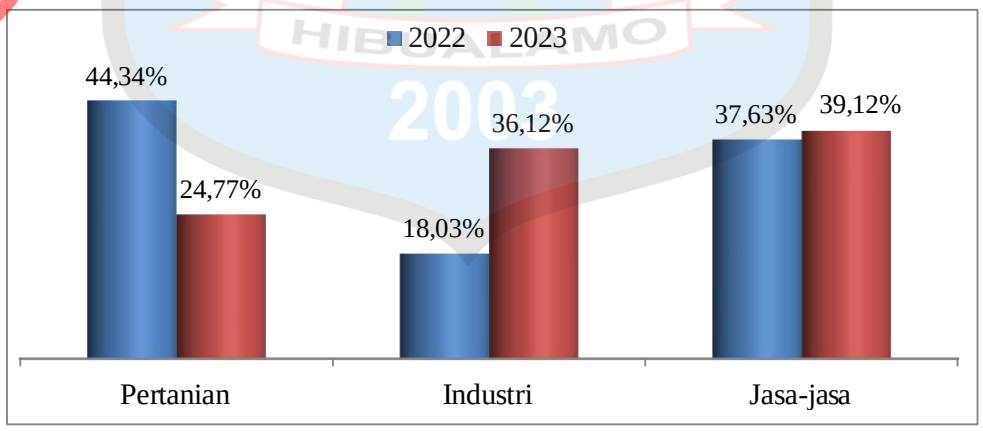
BAPPEDA HALUT

Ancaman terkait standar kualifikasi yang diperlukan dapat merujuk hasil Sakernas BPS periode Agustus 2023, dimana dari 147.883 penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja di Kabupaten Halmahera Utara, 55 persen lebih diantaranya memiliki tingkat pendidikan setara SMP ke bawah. Sementara penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi (PT) baru sebesar 11,56 persen. Perbandingan secara grafisnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.9. Komposisi Penduduk Kabupaten Halmahera Usia 15+ Menurut Kualifikasi Pendidikan Tertinggi Tahun 2023
Sumber : Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka 2024, diolah

Peningkatan jumlah penduduk usia produktif juga harus didukung dengan ketersedian lapangan pekerjaan yang layak. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 telah bergeser pada sektor industri. Grafik berikut menyajikan perubahan komposisi mata pencaharian penduduk Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 dan 2023.



Gambar 2.10. Komposisi Penduduk Kabupaten Halmahera Usia 15+ Status Berkerja Menurut Lapangan Kerja Utama Tahun 2022 & 2023
Sumber : Sakernas BPS Provinsi Maluku Utara, Agustus 2022 & 2023, diolah

BAPPEDA HALUT

Senada dengan tingkat pendidikan yang didominasi setara lulusan SMP ke bawah, dari 65,3 persen penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Halmahera Utara yang termasuk angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2023, tercatat sekitar 24,77 persennya bekerja di sektor pertanian. Proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian ini menurun jika dibandingkan dengan data hasil Sakernas periode Agustus 2022 yang sebesar 44,34 persen. Adapun proporsi penduduk yang bekerja di sektor industri mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2023, demikian pula di sektor jasa.

Melengkapi uraian kondisi demografi, sebagian besar penduduk Kabupaten Halmahera Utara menganut agama Kristen Protestan dan Islam dengan masing-masing persentase 58,4 dan 40,7. Sedangkan kurang dari 1 (satu) persen lainnya merupakan penganut agama Katolik, Hindu, Budha, dan Lainnya. Tabel berikut menyajikan komposisi Penduduk Kabupaten Halmahera Utara menurut agama yang dianut dan menurut kecamatan pada tahun 2023.

Tabel 2.15. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Malifut	75,3%	24,2%	0,5%	-	-	-
2	Kao Teluk	73,6%	26,0%	0,4%	-	-	-
3	Kao	24,6%	74,5%	0,9%	-	-	-
4	Kao Barat	20,3%	78,8%	0,9%	-	-	-
5	Kao Utara	1,1%	98,7%	0,2%	-	-	-
6	Tobelo Selatan	7,4%	92,2%	0,3%	-	-	0,01%
7	Tobelo Barat	27,9%	71,8%	0,4%	-	-	-
8	Tobelo Timur	0,1%	99,7%	0,1%	-	-	-
9	Tobelo	37,1%	59,4%	3,4%	0,02%	0,03%	-
10	Tobelo Tengah	4,0%	94,8%	1,2%	0,02%	0,04%	0,03%
11	Tobelo Utara	74,1%	25,9%	0,06%	-	0,0%	-
12	Galela	87,7%	12,3%	-	-	-	-
13	Galela Selatan	77,8%	22,1%	0,1%	-	-	-
14	Galela Barat	47,6%	52,1%	0,3%	-	0,01%	-
15	Galela Utara	66,1%	33,9%	0,04%	-	0,01%	-
16	Loloda Utara	34,4%	65,5%	0,05%	-	-	-
17	Loloda Kepulauan	88,3%	11,7%	-	-	-	-
Halmahera Utara		**40,7%**	**58,4%**	**0,9%**	**0,005%**	**0,010%**	**0,003%**

Sumber : Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka 2024

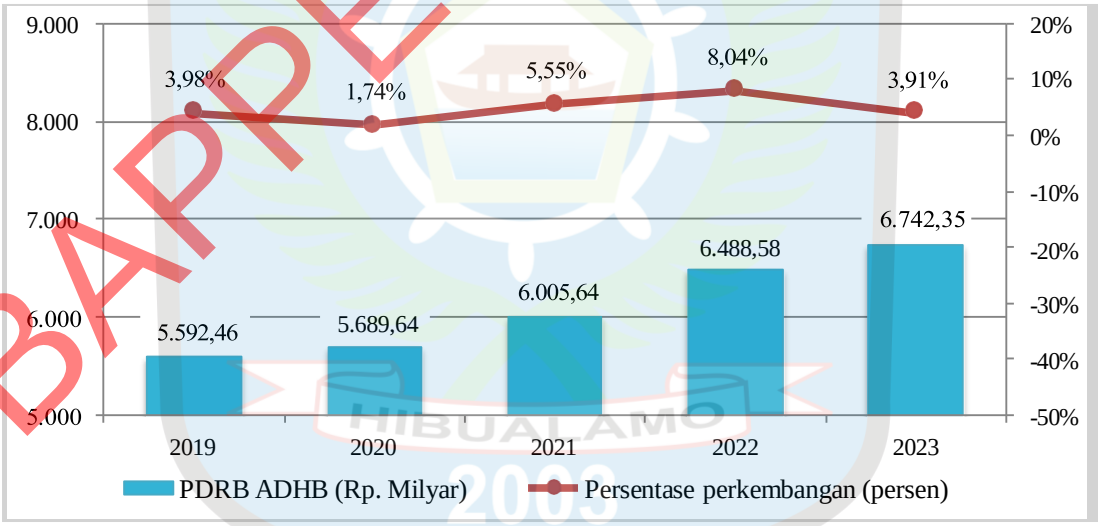
BAPPEDA HALUT

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Product Domestic Regional Bruto

Kemajuan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Dinamika perekonomian Kabupaten Halmahera Utara secara agregat yang tercermin dalam distribusi PDRB pertumbuhannya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (pengeluaran).

Nilai PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 telah mencapai 6,74 trilyun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB mengalami kenaikan sebesar 1,15 trilyun rupiah atau 20,6 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang baru mencapai 5,59 trilyun rupiah. Naiknya nilai PDRB tentunya dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Grafik berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara dan persentase perkembangannya dalam kurun waktu 2019-2023.



Gambar 2.11. PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2024, diolah

Dari sisi produksi (penawaran), kontribusi terbesar ekonomi Kabupaten Halmahera Utara hingga tahun 2023 masih berasal dari empat Lapangan Usaha (LU) utama, yaitu LU Pertambangan dan Penggalian; LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

BAPPEDA HALUT

Gambaran perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara menurut lapangan usaha dalam kurun waktu 2019-2023 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.16. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.277,8	1.327,2	1.386,4	1.466,8	1.578,2
2	Pertambangan dan Penggalian	1.626,2	1.702,1	1.874,7	2.055,5	2.047,9
3	Industri Pengolahan	185,7	169,0	155,1	164,9	177,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,4	4,7	5,0	5,6	6,1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,0	5,3	5,5	6,0	6,3
6	Konstruksi	380,7	390,3	421,0	457,9	456,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	741,7	695,9	726,5	795,0	841,8
8	Transportasi dan Pergudangan	128,8	118,6	123,6	143,9	160,8
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	16,7	15,9	16,7	17,5	18,1
10	Informasi dan Komunikasi	140,7	147,2	154,4	159,2	167,7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	85,0	90,4	102,2	111,9	116,7
12	Real Estate	3,7	3,8	3,8	3,9	4,0
13	Jasa Perusahaan	5,8	5,8	6,1	6,4	6,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	712,0	726,0	727,0	784,3	821,5
15	Jasa Pendidikan	157,5	158,4	163,0	170,0	183,6
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95,5	103,4	108,2	111,9	121,0
17	Jasa lainnya	25,0	25,5	26,5	28,0	28,9
PDRB		**5.592,5**	**5.689,6**	**6.005,6**	**6.488,6**	**6.742,4**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2024

Gabungan empat lapangan usaha, Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengambil share sebesar 78,45 persen dari total PDRB ADHB. Walaupun terjadi perubahan besaran kontribusi pada sejumlah lapangan usaha, urutan kontribusi lapangan usaha relatif belum berubah dalam lima tahun terakhir. Beberapa LU dengan kontribusi di bawah 1 persen, yaitu Real Estate; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Perusahaan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Jasa Lainnya.

BAPPEDA HALUT

Terdapat dua lapangan usaha dalam struktur PDRB ADHB yang tercatat mengalami penurunan persentase kontribusi pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu LU Pertambangan dan Penggalian; dan LU Konstruksi. Beberapa LU tidak terjadi perubahan kontribusi dari tahun sebelumnya, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Jasa Perusahaan; dan jasa Lainnya. Sementara LU lainnya mengalami peningkatan kontribusi pada tahun 2023. Gambaran peningkatan/penurunan kontribusi dari masing-masing lapangan usaha dalam PDRB ADHB selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

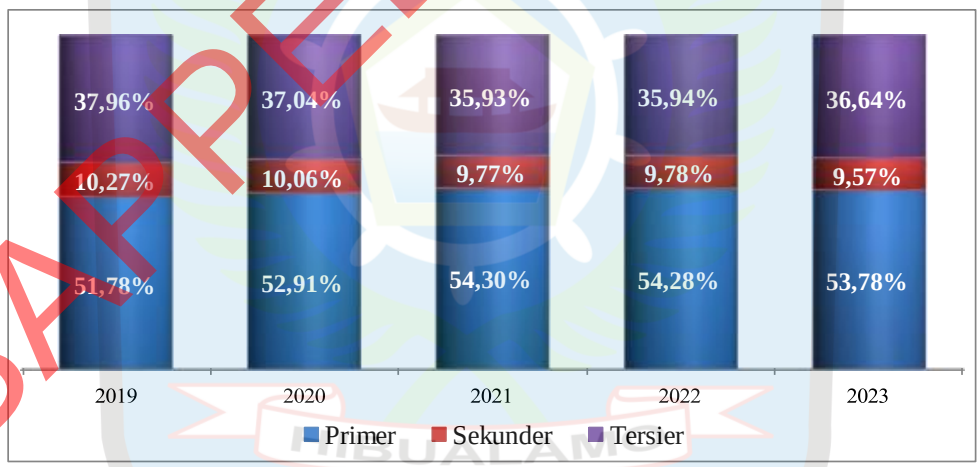
Tabel 2.17. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 & 2023

No	Lapangan Usaha	Kontribusi		Naik/ Turun
		2022	2023	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,61%	23,41%	0,80%
2	Pertambangan dan Penggalian	31,68%	30,37%	-1,30%
3	Industri Pengolahan	2,54%	2,63%	0,09%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09%	0,09%	0,00%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09%	0,09%	0,00%
6	Konstruksi	7,06%	6,76%	-0,29%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,25%	12,49%	0,23%
8	Transportasi dan Pergudangan	2,22%	2,38%	0,17%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27%	0,27%	0,00%
10	Informasi dan Komunikasi	2,45%	2,49%	0,03%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,72%	1,73%	0,01%
12	Real Estate	0,06%	0,06%	0,00%
13	Jasa Perusahaan	0,10%	0,10%	0,00%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,09%	12,18%	0,10%
15	Jasa Pendidikan	2,62%	2,72%	0,10%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,72%	1,79%	0,07%
17	Jasa Lainnya	0,43%	0,43%	0,00%
PDRB ADHB		**100%**	**100%**	

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

Berdasarkan distribusi PDRB ADHB, hingga tahun 2023 perekonomian Kabupaten Halmahera Utara masih didominasi oleh sektor primer yang mencakup LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta LU Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2023 gabungan kedua lapangan usaha mengambil share sebesar 53,78 persen dari total PDRB ADHB atau mengalami sedikit penurunan sebesar 0,5 persen poin dibandingkan kondisi tahun sebelumnya pada 2022 dengan share 54,28 persen. Sektor sekunder yang meliputi LU Industri Pengolahan; LU Pengadaan Listrik dan Gas; LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan LU Konstruksi, baru mampu memberikan kontribusi sebesar 9,57 persen pada tahun 2023, atau mengalami penurunan sebesar 0,20 persen poin dari tahun sebelumnya, yaitu 9,78 persen pada 2021. Peningkatan kontribusi terjadi pada sektor tersier, dimana kontribusinya pada tahun 2023 sebesar 36,64 persen mengalami peningkatan 0,71 persen poin dari kondisi di tahun 2022 sebesar 35,94 persen. Gambaran perkembangan kontribusi ketiga sektor ekonomi dalam kurun waktu 2019-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

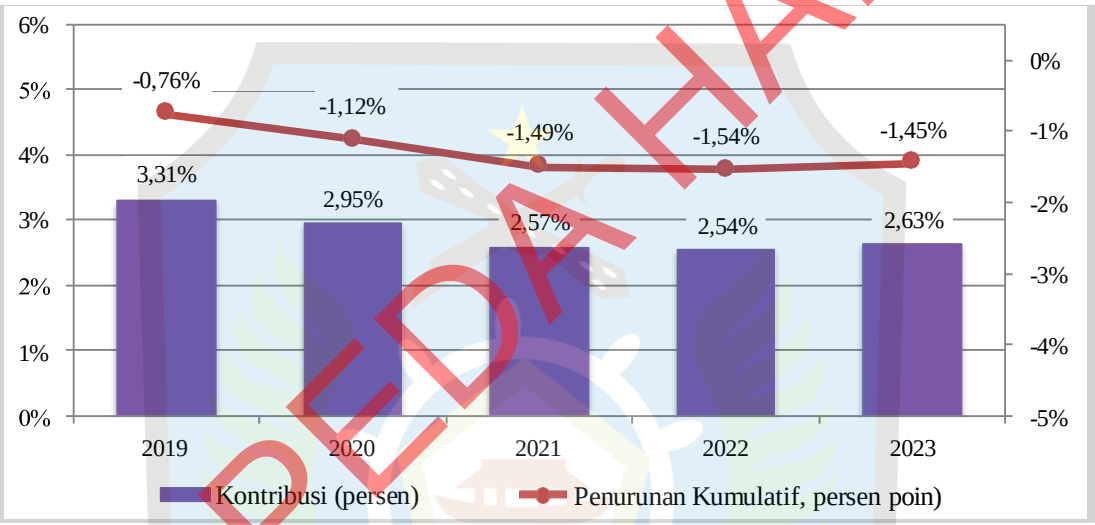


Gambar 2.12. Distribusi PDRB ADHB Menurut Sektor Ekonomi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2024, diolah

Mencermati perkembangan kontribusi masing-masing sektor, dapat dikatakan bahwa transformasi struktural belum berjalan dengan optimal. Secara ringkas, transformasi struktural merupakan proses perubahan struktur perekonomian yang pada mulanya lebih bersifat subsistem dan lebih menitik beratkan pada sektor pertanian (sektor primer) menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern dalam hal ini sangat di dominasi oleh sektor industri (sektor sekunder).

BAPPEDA HALUT

Secara lebih spesifik, belum optimalnya transformasi struktural di Kabupaten Halmahera Utara ini dapat dilihat dari perkembangan kontribusi LU Industri Pengolahan. Pada tahun 2022, kontribusi LU Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB hanya sebesar 2,54 persen dengan kecenderungan semakin menurun dari tahun 2019 yang sebesar 3,31 persen. Sebagaimana tersaji dalam grafik berikut, meskipun kontribusi LU Industri Pengolahan telah mengalami sedikit peningkatan di tahun 2023 namun masih lebih kecil jika dibandingkan dengan keadaan pada lima tahun sebelumnya.



Gambar 2.13. Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Industri Pengolahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2024, diolah

Cenderung lambatnya transformasi struktural tentunya sangat dipengaruhi oleh perkembangan investasi padat modal di di Kabupaten Halmahera Utara. Dilihat dari sisi permintaan (pengeluaran), hingga tahun 2023 struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Utara masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi, baik dari Konsumsi Rumah Tangga; Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT); maupun Konsumsi Pemerintah. Dengan kecenderungan yang berfluktuasi, kontribusi gabungan dari ketiga komponen pengeluaran konsumsi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 masih di atas 75 persen. Sementara kontribusi komponen Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2023 tercatat sebesar 22,78 persen atau mengalami penurunan dibandingkan keadaan di tahun 2022 yang sebesar 33,4 persen dan tahun 2021 yang sebesar 30,86 persen.

BAPPEDA HALUT

Adapun Net Ekspor Barang Jasa pada tahun 2023 bernilai negatif, yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Halmahera Utara pada tahuh 2023 tercatat lebih banyak mengimpor barang dari luar daerah dibandingkan mengirim/mengekspor barang ke luar daerah. Pada tahun 2023, Net Ekspor Barang Jasa tercatat negatif 46,5 milyar rupiah, dibandingkan tahun 2021 dan 2022 yang tercatat mengalami surplus perdagangan antar daerah. Tabel-tabel berikut menyajikan perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara menurut komponen pengeluaran, dan kontribusi masing-masing komponen pengeluaran dalam kurun tahun 2019-2023.

Tabel 2.18. Perkembangan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.945,0	3.018,1	3.183,3	3.429,6	3.747,5
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	81,7	70,0	73,6	79,1	86,5
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.285,4	1.185,3	1.346,3	1.468,9	1.457,4
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.726,0	1.834,0	1.619,4	2.150,2	1.536,1
5	Perubahan Inventori	-26,9	130,6	10.635,5	16,1	10.698,8
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-418,8	-548,4	10.622,4	10.082,1	-46,5
PDRB		**5.592,5**	**5.689,6**	**6.005,6**	**6.488,6**	**6.742,4**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2024

Tabel 2.19. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	52,90%	52,82%	52,66%	53,28%	55,58%
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,23%	1,22%	1,46%	1,23%	1,28%
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20,74%	23,30%	22,99%	22,82%	21,62%
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,14%	26,87%	30,86%	33,40%	22,78%
5	Perubahan Inventori	2,33%	-1,64%	-0,48%	0,27%	158,68%
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-9,34%	-2,57%	-7,49%	-11,01%	-0,69%
PDRB		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

Sementara berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 mencapai Rp. 4,03 trilyun, atau mengalami pertumbuhan lebih dari 7,48 persen dalam lima tahun terakhir. Dari sisi produksi atau penawaran, hampit seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.20. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	844,0	865,4	882,4	901,9	945,1
2	Pertambangan dan Penggalian	995,3	976,5	1.050,1	1.122,0	1.088,8
3	Industri Pengolahan	142,9	129,2	117,8	121,6	126,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,3	3,5	3,8	4,0	4,4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,9	4,1	4,2	4,5	4,7
6	Konstruksi	255,3	261,0	263,7	269,0	258,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	539,5	512,1	528,1	554,0	572,1
8	Transportasi dan Pergudangan	84,8	76,9	78,9	86,7	90,2
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	11,7	11,1	11,6	11,9	12,1
10	Informasi dan Komunikasi	119,5	127,1	132,3	135,2	137,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	55,5	59,7	64,6	65,3	66,9
12	Real Estate	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
13	Jasa Perusahaan	4,5	4,5	4,6	4,7	4,8
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	494,7	502,1	502,5	503,2	504,6
15	Jasa Pendidikan	110,9	111,4	112,8	115,5	118,6
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69,0	73,7	76,3	77,8	79,9
17	Jasa lainnya	17,3	17,6	18,0	18,7	19,0
PDRB		**3.754,7**	**3.738,6**	**3.854,4**	**3.998,7**	**4.035,6**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2024

Dari sisi permintaan (pengeluaran), terkecuali komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang mengalami penurunan, DRB ADHK komponen lainya mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi di tahun sebelumnya. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di halaman berikut.

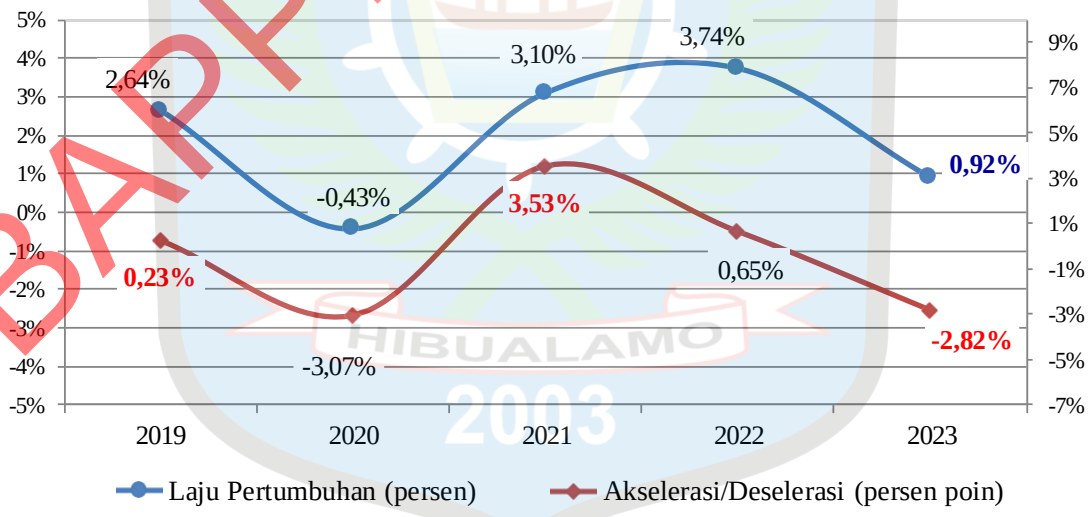
BAPPEDA HALUT

Tabel 2.21. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.914,6	1.908,9	1.959,1	2.052,0	2.147,4
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	53,9	45,9	47,7	48,9	51,7
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	719,1	658,7	732,0	766,3	738,8
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.186,6	1.236,1	1.081,2	1.344,4	914,0
5	Perubahan Inventori	-21,8	58,3	-71,0	1,8	-4,6
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-97,7	-169,3	105,3	10.522,7	188,3
PDRB		**5.592,5**	**5.689,6**	**6.005,6**	**6.488,6**	**6.742,4**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2024

Berdasarkan PDRB ADHK dapat digambarkan laju pertumbuan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara tercatat sebesar 0,92 persen atau mengalami deselerasi (perlambatan) sebesar 2,82 persen poin dibandingkan laju pertumbuhan tahun sebelumnya. Grafik berikut menyajikan tren akselerasi/deselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2019-2023.



Gambar 2.14. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2024, diolah

Dari grafik, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 merupakan catatan tertinggi dalam lima tahun terakhir, dimana titik terendahnya pada tahun 2020 yang terkontraksi negatif.

BAPPEDA HALUT

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara tercatat mengalami kontraksi cukup dalam, yaitu negatif 0,43 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2,64 persen atau terdeselerasi 3,07 persen poin. Tahun 2023 pertumbuhan Ekonomi melambat sebesar 0.92 persen dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,74 persen.

Dari sisi produksi, tercatat 7 (tujuh) lapangan usaha yang mengalami akselerasi pertumbuhan pada tahun 2023, yaitu LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; LU Pengadaan Listrik dan Gas; LU Jasa Keuangan dan Asuransi; LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; LU Industri Pengolahan; LU Jasa Pendidikan; serta LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Dengan laju pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 4,79 persen dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 2,21 persen, LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang mengalami akselerasi pertumbuhan terbesar dibandingkan LU lainnya, disusul oleh LU Pengadaan Listrik dan Gas dengan laju pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 9,10 persen dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 6,55 persen. Adapun 10 lapangan usaha lainnya tercatat mengalami deselerasi, atau tumbuh lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu LU Real Estate; LU Informasi dan Komunikasi; LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; LU Jasa Perusahaan; LU Jasa Lainnya; LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; LU Transportasi dan Pergudangan; LU Konstruksi; serta LU Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2023 LU Pertambangan dan Penggalian mencatatkan perlambatan terbesar dengan 9,80 persen, dimana pada tahun 2023

Sedangkan dari sisi permintaan (pengeluaran), terkecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang mengalami percepatan dimana pertumbuhan tahun 2023 sebesar 5,77 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,47 persen, seluruh komponen pengeluaran mencatatkan perlambatan atau deselerasi laju pertumbuhan. Perlambatan laju pertumbuhan terbesar tercatat pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu sebesar 56,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat mengalami akselerasi. Tren pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha dan komponen pengeluaran dalam kurun waktu 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.23 dan 2.24.

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.22. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,45	2,54	1,97	2,21	4,79
2	Pertambangan dan Penggalian	-6,71	-1,90	7,54	6,85	-2,95
3	Industri Pengolahan	0,04	-9,59	-8,81	3,20	3,68
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,17	8,12	6,29	6,55	9,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,33	4,70	3,67	7,63	2,67
6	Konstruksi	13,48	2,25	1,03	1,99	-3,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,95	-5,07	3,11	4,90	3,27
8	Transportasi dan Pergudangan	5,54	-9,26	2,63	9,86	4,01
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7,81	-4,79	4,28	2,67	1,38
10	Informasi dan Komunikasi	4,80	6,35	4,16	2,15	1,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,02	7,55	8,21	1,14	2,35
12	Real Estate	5,74	0,96	0,53	0,77	0,26
13	Jasa Perusahaan	3,82	0,22	2,40	2,61	0,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,11	1,49	0,07	0,15	0,27
15	Jasa Pendidikan	4,52	0,43	1,23	2,37	2,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,88	6,77	3,57	1,87	2,79
17	Jasa lainnya	8,68	1,91	2,17	3,98	1,36
PDRB		**2,64**	**-0,43**	**3,10**	**3,74**	**0,92**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2024

Tabel 2.23. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,06	-0,30	2,63	4,74	4,65
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	18,06	-14,77	3,85	2,47	5,77
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,46	-8,39	11,13	4,68	-3,59
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,95	4,17	-12,53	24,34	-32,01
5	Perubahan Inventori	-130,86	-367,37	-221,75	-102,58	-351,83
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	4,56	73,37	-162,22	9888,4	-98,21
PDRB		**2,64**	**-0,43**	**3,10**	**3,74**	**0,92**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

2.2.2. Tingkat Inflasi

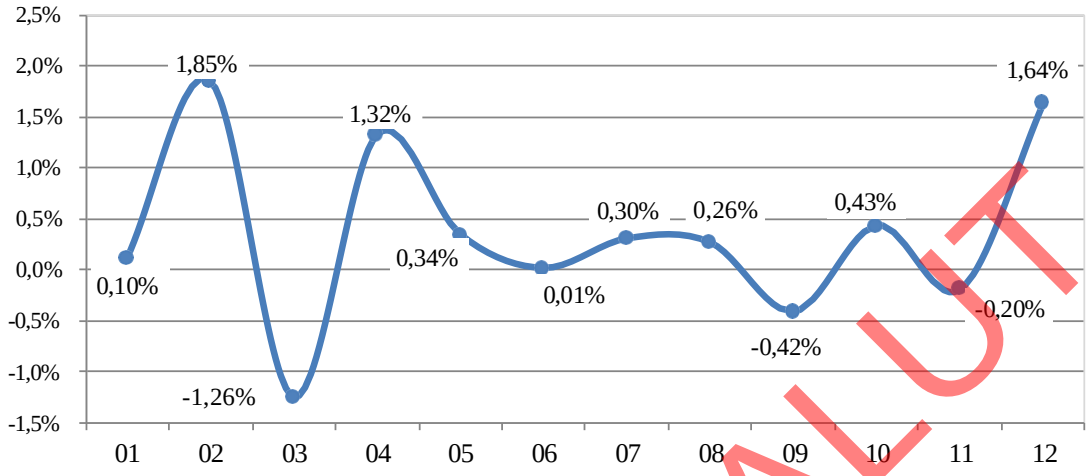
Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), setiap bulannya. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*Administered Price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Inflasi Kabupaten Halmahera Utara merujuk pada angka inflasi Kota Ternate (Regional).

Pada Desember 2023, Kota Ternate mengalami inflasi (m-t-m) sebesar 1,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,71. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2022 (Desember 2023 terhadap Desember 2022) tercatat sebesar 4,41 persen. Tren inflasi bulanan Kota Ternate sepanjang tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam grafik di halaman berikut.

BAPPEDA HALUT



Gambar 2.15. Tren Inflasi Kota Ternate (Regional) Periode Januari – Desember 2023
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Inflasi tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 yang tercatat sebesar 3,70 persen. Jika dilihat perkembangan inflasi secara bulanan di tahun 2023, Kota Ternate mengalami inflasi sebanyak sembilan kali dan mengalami deflasi sebanyak tiga kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 1,85. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 1,26 persen. Berdasarkan kelompok pengeluaran, perkembangan inflasi secara bulanan pada tahun 2023, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,37 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,00 persen; kelompok transportasi sebesar 0,38 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,00 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,00 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,02 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,00 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,30 persen.

Pada Tahun 2023 dari 21 Kota IHK di Kawasan Timur Indonesia, Kota Ternate mengalami inflasi tertinggi ke-2 yaitu sebesar 4,41 persen di mana inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Merauke sebesar 4,67 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Jayapura sebesar 1,65 persen, serta dibandingkan dengan Inflasi Nasional yang tercatat sebesar 2,61 persen.

2.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima

BAPPEDA HALUT

oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun suatu daerah. PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi PDRB Per Kapita, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Tabel berikut menyajikan perkembangan PDRB ADHK per Kapita Kabupaten Halmahera Utara dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 2019-2023.

Tabel 2.24. PDRB ADHK per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita ADHK (Jutaan Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Halmahera Barat	12,87	11,56	11,50	11,62	11,94
2	Halmahera Tengah	27,26	35,28	90,76	179,68	250,21
3	Kepulauan Sula	15,94	15,77	15,79	16,13	16,37
4	Halmahera Selatan	20,70	23,04	25,98	31,02	38,89
5	**Halmahera Utara**	**19,37**	**18,92**	**19,28**	**19,72**	**19,67**
6	Halmahera Timur	24,12	25,05	26,92	26,79	33,19
7	Pulau Morotai	15,33	14,14	14,11	14,15	14,48
8	Pulau Taliabu	18,67	17,16	19,12	19,49	19,72
9	Ternate	31,19	34,92	35,66	37,39	38,28
10	Tidore Kepulauan	19,84	17,77	17,72	17,95	18,30
	Maluku Utara	**21,18**	**21,84**	**25,20**	**30,51**	**36,27**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

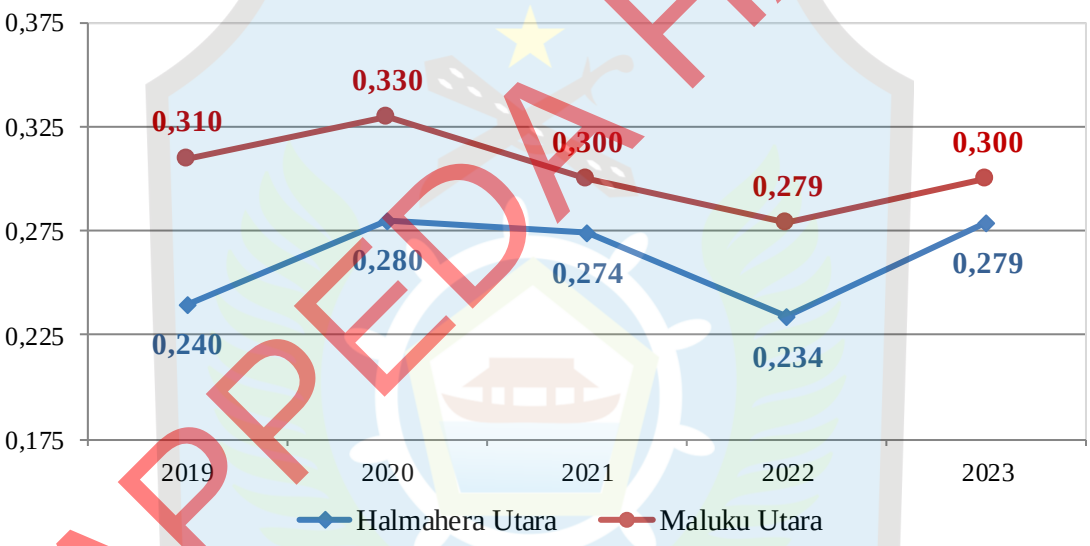
Dari tabel, pada tahun 2022 PDRB per Kapita Kabupaten Halmahera Utara telah mencapai Rp. 19,72 juta per kapita. Namun pada tahun 2023 PDRB per Kapita Kabupaten Halmahera Utara mengalami penurunan 0,25 persen disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023 peringkat PDRB per Kapita Kabupaten Halmahera Utara turun di posisi keenam dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di posisi kelima. PDRB per Kapita Kabupaten Halmahera Utara juga masih konsisten berada di bawah rata-rata provinsi Maluku Utara.

2.2.4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan

BAPPEDA HALUT

atau pengeluaran antar masyarakat. Angka ini dapat digunakan untuk memperkuat fenomena terkait pendapatan per kapita berdasarkan PDRB. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk garis lurus maka bernilai "0" atau disebut pemerataan sempurna, yang menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun jika membentuk garis tidak lurus maka dianggap sebagai ketimpangan pemerataan, dengan nilai "1" sebagai ketimpangan sempurna. Jika angka koefisien mendekati "0" berarti tingkat pemerataan semakin baik, sebaliknya jika mendekati angka "1" maka menunjukan ketimpangan pemerataan masyarakat. Grafik berikut menyajikan perbandingan Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara dengan Provinsi Maluku Utara selama lima tahun terakhir.



Gambar 2.16. Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

Dari grafik, indeks gini Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 sebesar 0,279 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 0,234 yang merupakan titik terendah yang tercatat dalam lima tahun terakhir. Indeks gini Kabupaten Halmahera Utara juga masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi Maluku Utara dalam empat tahun terakhir. Secara keseluruhan, baik Indeks Gini pada tingkatan Provinsi Maluku Utara maupun Kabupaten Halmahera Utara masih berada pada rentang ketimpangan rendah (<0,4).

2.2.5. Tingkat Kemiskinan

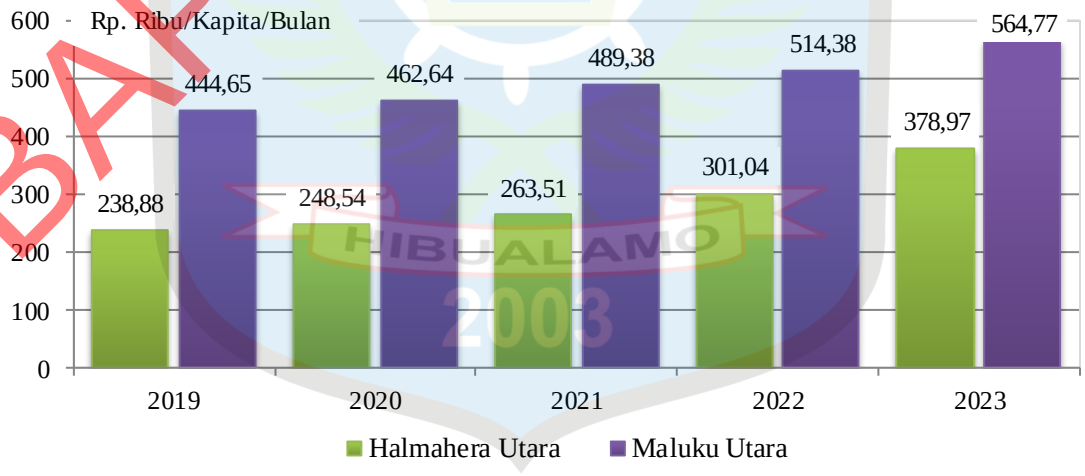
BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mendefinisikan kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai

BAPPEDA HALUT

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: ***Pertama***, *Head Count Index* (HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); ***Kedua***, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; ***Ketiga***, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi/kapita/bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Tren garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara selama lima tahun terakhir dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 2.17 Tren Garis Kemiskinan

Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2024, diolah

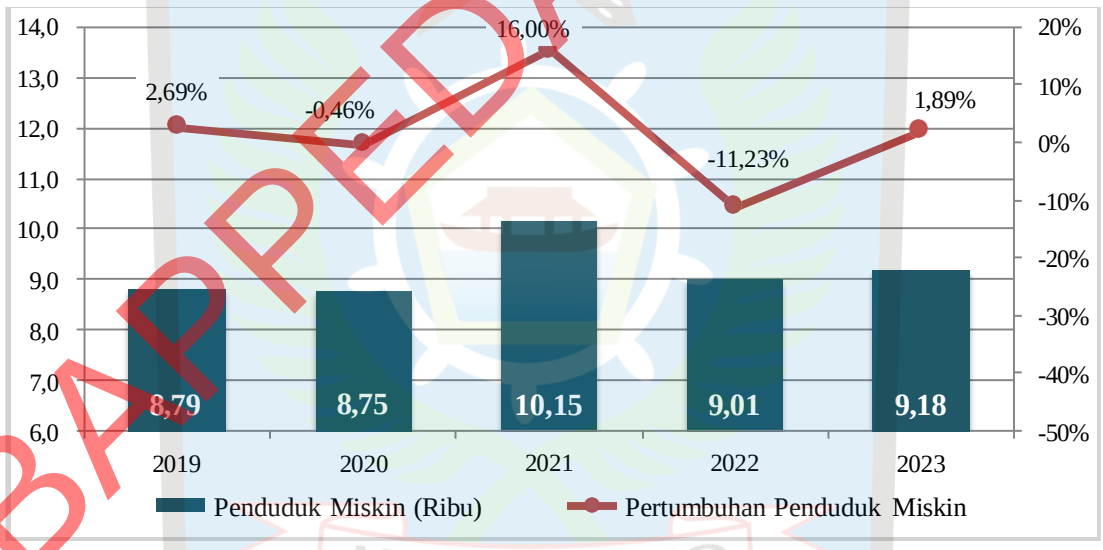
Garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara terus mengalami kenaikan, yang mana salah satunya disebabkan oleh inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi

BAPPEDA HALUT

non makanan. Pada tahun 2023 garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 378,97 ribu perkapita/bulan atau tumbuh sebesar 25,9 persen dari tahun 2022 yang sebesar Rp. 301,04 ribu perkapita/bulan. Dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara telah meningkat sebesar 58,6 persen. Namun dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara, garis kemiskinan Halmahera Utara masih tetap lebih rendah. Rata-rata rasio garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara terhadap Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir sebesar 57,4 persen. Ini artinya garis kemiskinan yang menjadi ukuran untuk menentukan kemiskinan di tingkatan provinsi hampir dua kali lipat dari yang dibutuhkan di Kabupaten Halmahera Utara.

P0 - Persentase Penduduk Miskin

Grafik berikut menyajikan tren perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2019-2023.



Gambar 2.18 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2024, diolah

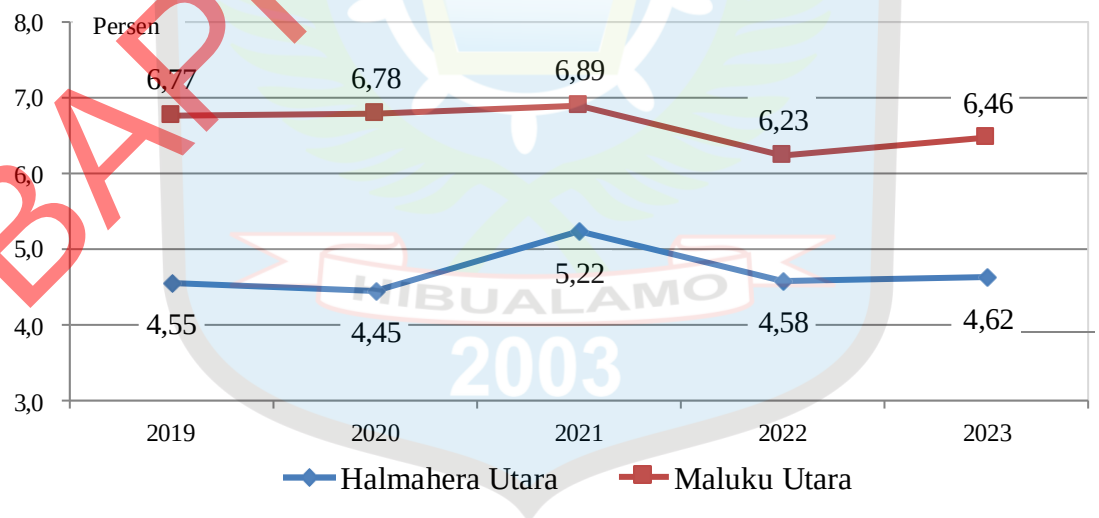
Terlihat bahwa pada sepanjang periode 2019-2023, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami fluktuasi. Setelah pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 11,23 persen, dimana terdapat sekitar 9,01 ribu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan.

Bertambahnya jumlah penduduk miskin tentunya di Kabupaten Halmahera Utara tentunya merupakan sesuatu yang negatif. Seperti yang terlihat pada grafik di Gambar 2.19, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang telah diuraikan pada

BAPPEDA HALUT

sub bab terdahulu, tingkat pertumbuhan penduduk miskin yang positif merupakan suatu keadaan yang perlu dihindari agar tidak lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk. Secara keseluruhan, dengan masih adanya penduduk miskin ini perlu menjadi perhatian, terutama terkait efektititas upaya-upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun garis kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara yang relatif lebih rendah, di sisi lain pendapatan per kapita yang juga cukup rendah tentunya akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perlunya perhatian atas relatif rendahnya garis kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara ini dapat ditelusur melalui persentase penduduk miskin, yang membandingkan jumlah penduduk miskin dengan total penduduk. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara tercatat meningkat pada periode 2020-2021, dan mengalami sedikit penurunan pada 2022 yang tercatat sebesar 4,58 persen, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,62 persen. Dibandingkan dengan rata-rata pada tingkatan Provinsi Maluku Utara, persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara masih senantiasa lebih rendah dalam lima tahun terakhir. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



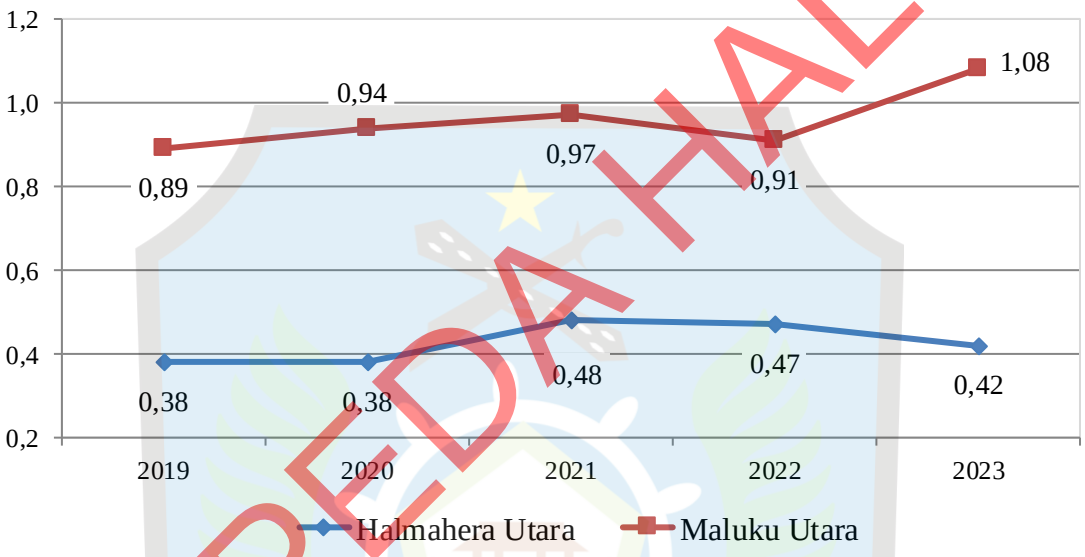
Gambar 2.19 Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2024, diolah

P1 - Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 sebesar 0,42 atau berkurang 0,05 poin, tetapu masih lebih tinggi dibandingkan

BAPPEDA HALUT

kondisi di tahun 2019 dan 2020. Namun secara keseluruhan kondisi dalam tiga tahun terakhir mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara berpotensi semakin kecil. Selain itu, dibandingkan dengan rata-rata di tingkatan Provinsi Maluku Utara, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara masih senantiasa lebih rendah dalam lima tahun terakhir. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

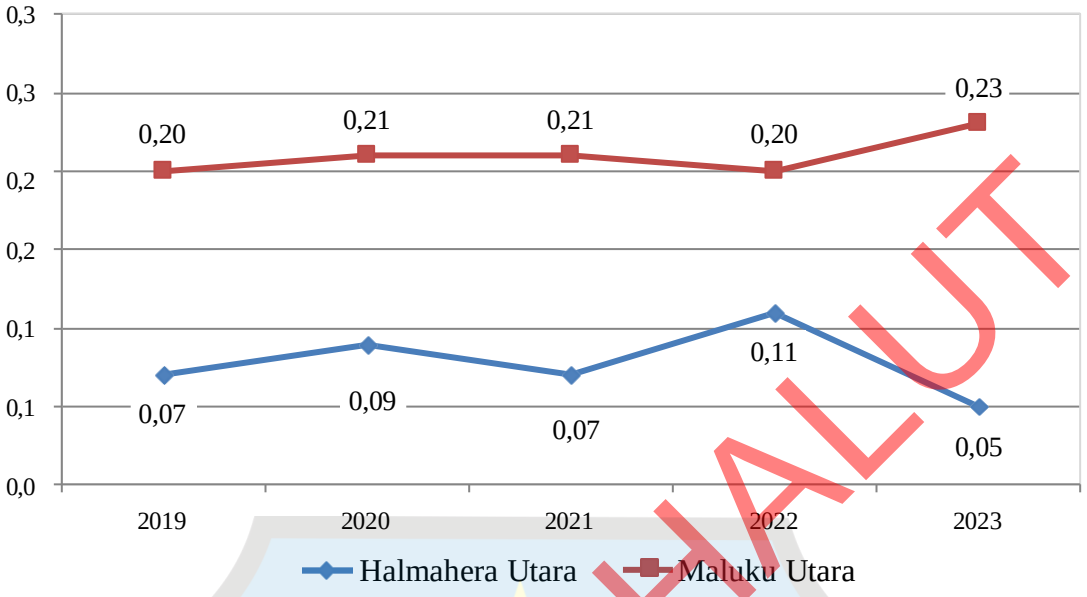


Gambar 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, diolah

BAPPEDA HALUT

P2 - Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 sebesar 0,05 atau turun 0,06 poin dari tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan titik terendah Indeks Keparahah Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun terakhir. Keadaan ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara berpotensi semakin rendah. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun tahun 2019-2023 masih tetap lebih rendah dari rata-rata provinsi Maluku Utara. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2.21 Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023
Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, diolah

BAPPEDA HALUT

2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara umum, pengangguran merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai usaha dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sedangkan secara ekonomi, pengangguran merupakan efek dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Keterbatasan lapangan kerja tidak mampu menyerap bertambahnya pencari kerja yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan demikian maka pengangguran merupakan fungsi dari tingkat partisipasi kerja dan kesempatan kerja.

Salah satu indikator penting yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang berstatus pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja merujuk pada penduduk yang termasuk kategori usia kerja (15 tahun dan lebih) dengan status bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang berstatus pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk kategori usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Berdasarkan Sakernas Agustus 2023, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Halmahera Utara diperkirakan sebanyak 147.883 orang, bertambah 4.621 orang (3,23 persen) dibandingkan Agustus 2022 yang berjumlah 143.262 orang. Jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2019, maka jumlah penduduk usia kerja telah meningkat 13,25 persen. Dari total penduduk usia kerja di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023, lebih dari 69 persen merupakan angkatan kerja, sedangkan lainnya bukan merupakan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan aktiftas Lainnya). Tabel berikut menyajikan perkembangan penduduk usia kerja di Kabupaten Halmahera Utara sepanjang periode 2019-2023.

Tabel 2.25. Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

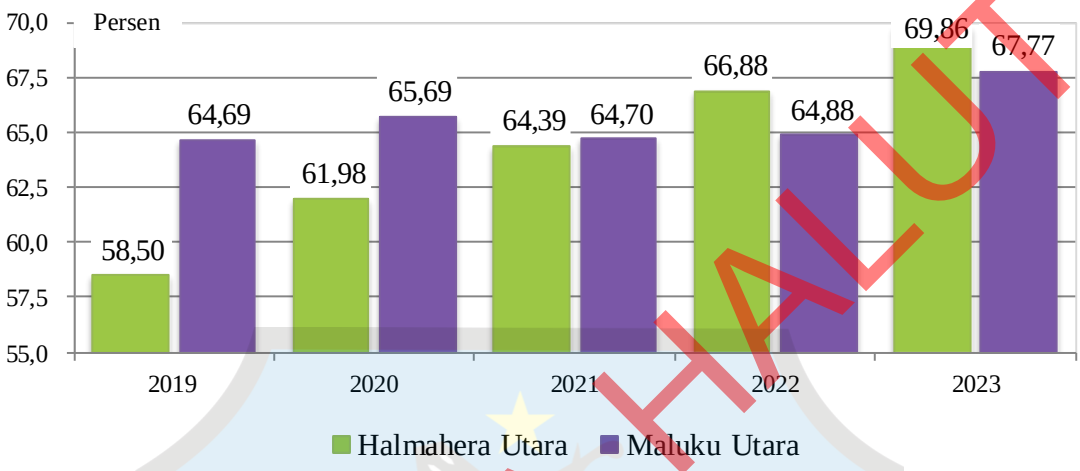
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja (15+)	130.586	138.747	141.028	143.262	147.883
Angkatan Kerja	**76.396**	**85.993**	**90.801**	**95.817**	**103.305**
- Bekerja	71.899	80.412	83.529	90.006	96.557
- Pengangguran	4.497	5.581	7.272	5.811	6.748
Bukan Angkatan Kerja	**54.190**	**52.754**	**50.227**	**47.445**	**44.578**
- Sekolah	16.649	12.125	10.719	14.318	11.043
- Mengurus Rumah Tangga	32.577	33.685	30.676	27.344	23.911
- Lainnya	4.964	6.944	8.832	5.783	9.624

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Dari tabel, dapat diketahui perkembangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Halmahera Utara. TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Halmahera Utara terus meningkat dalam lima tahun terakhir. TPAK pada Agustus 2023 tercatat sebesar 69,86 persen, meningkat 2,97 persen poin dari tahun sebelumnya. Naiknya TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Secara keseluruhan TPAK pada Agustus 2023 mengalami peningkatan sebesar 11,35 persen poin dibanding lima tahun sebelumnya (2019).

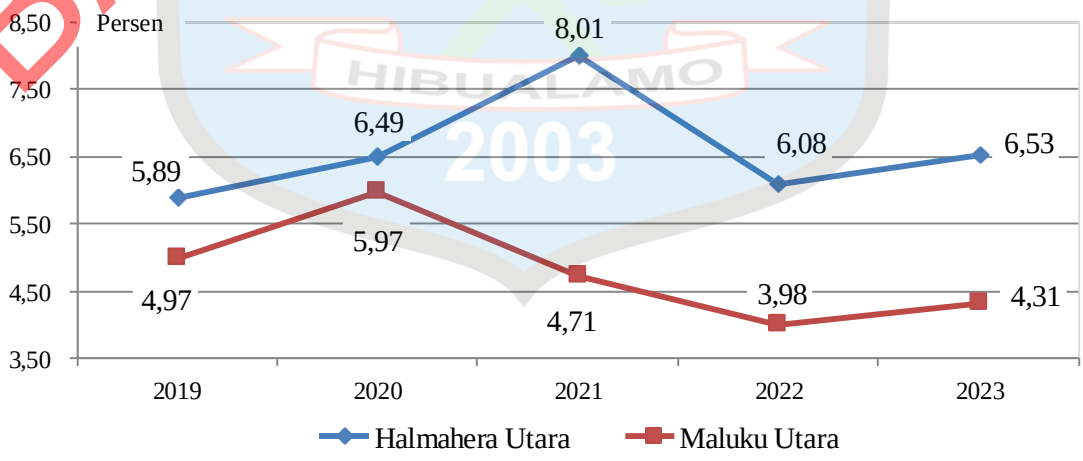
BAPPEDA HALUT

TPAK Kabupaten Halmahera Utara sejak tahun 2022 telah berada di atas rata-rata TPAK di tingkatan Provinsi Maluku Utara. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023
Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Pada akhirnya, dampak dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan kerja akan berhulu kepada upaya untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur. Dalam hal ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Grafik berikut menyajikan TPT Kabupaten Halmahera Utara dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 2019-2023.

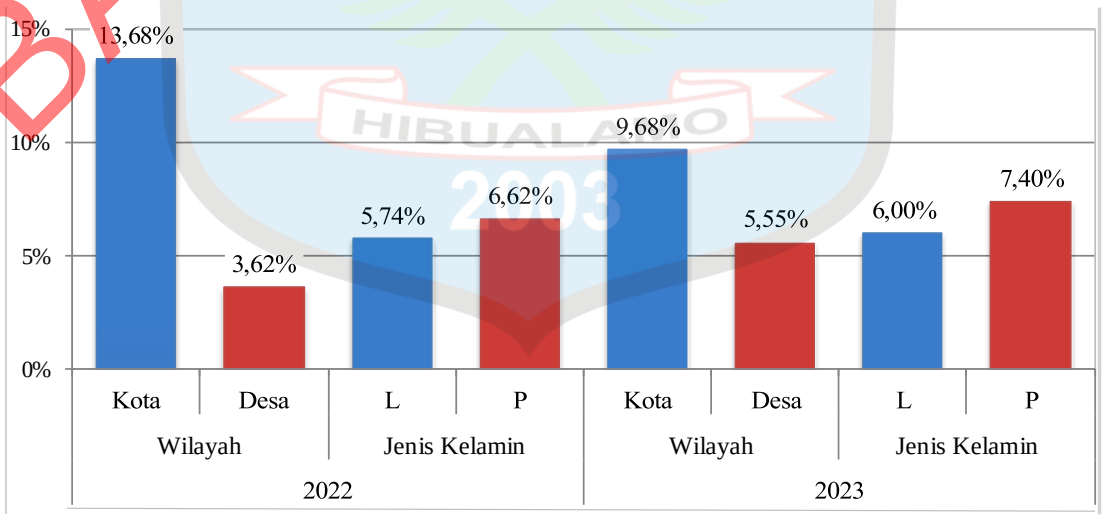


Gambar 2.23 Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023
Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, , Agustus 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

BAPPEDA HALUT

Dari grafik, TPT Kabupaten Halmahera Utara pada Agustus 2022 tercatat sebesar 6,08 persen atau turun sebesar 1,93 persen poin dari periode yang sama tahun tahun 2021, namun kemudian mengalami peningkatan sebesar 0,45 persen poin menjadi 6,53 persen pada tahun 2023. TPT Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun terakhir juga selalu lebih tinggi dari rata-rata provinsi Maluku Utara. Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan. TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha.

Jika ditelusur lebih dalam, pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Halmahera Utara lebih banyak terdapat di wilayah perkotaan yang mencapai 9,68 persen di banding wilayah perdesaan yang tercatat sebesar 5,55 persen. Adapun berdasarkan jenis kelamin, TPT tercatat lebih banyak pada angkatan kerja perempuan, yaitu sebesar 7,40 persen dibandingkan angkatan kerja laki-laki yang tercatat sebesar 6,00 persen. Secara keseluruhan, peningkatan TPT di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 banyak dikontribusikan oleh peningkatan TPT di kawasan perdesaan dan angkatan kerja perempuan, dimana pada tahun 2022 tercatat sebesar 3,62 persen dan 6,62 persen. Gambaran selengkapnya tersaji dalam grafik berikut.



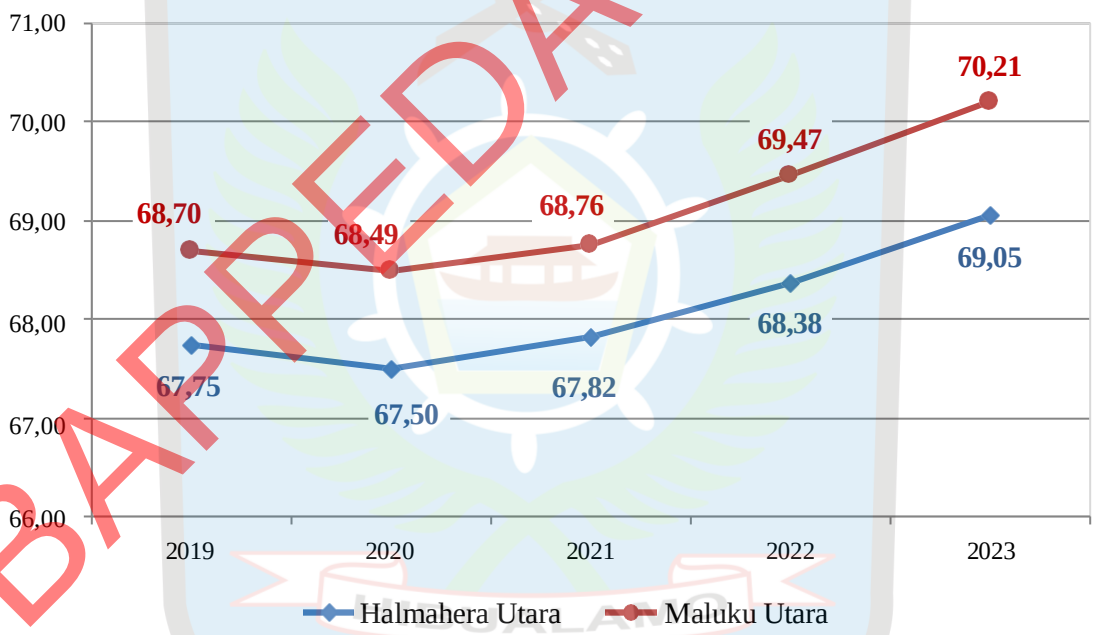
Gambar 2.24 Karakteristik Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 & 2023

Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2022 & 2023, diolah

BAPPEDA HALUT

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan). IPM Kabupaten Halmahera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. IPM Kabupaten Halmahera Utara meningkat dari 67,75 pada tahun 2019 menjadi 69,05 pada tahun 2023. Dengan demikian IPM Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 masih berada pada kategori Sedang (60≤IPM<70). Sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.25, IPM Kabupaten Halmahera Utara masih masih konsisten berada dibawah rata-rata IPM provinsi Maluku Utara.



Gambar 2.25 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

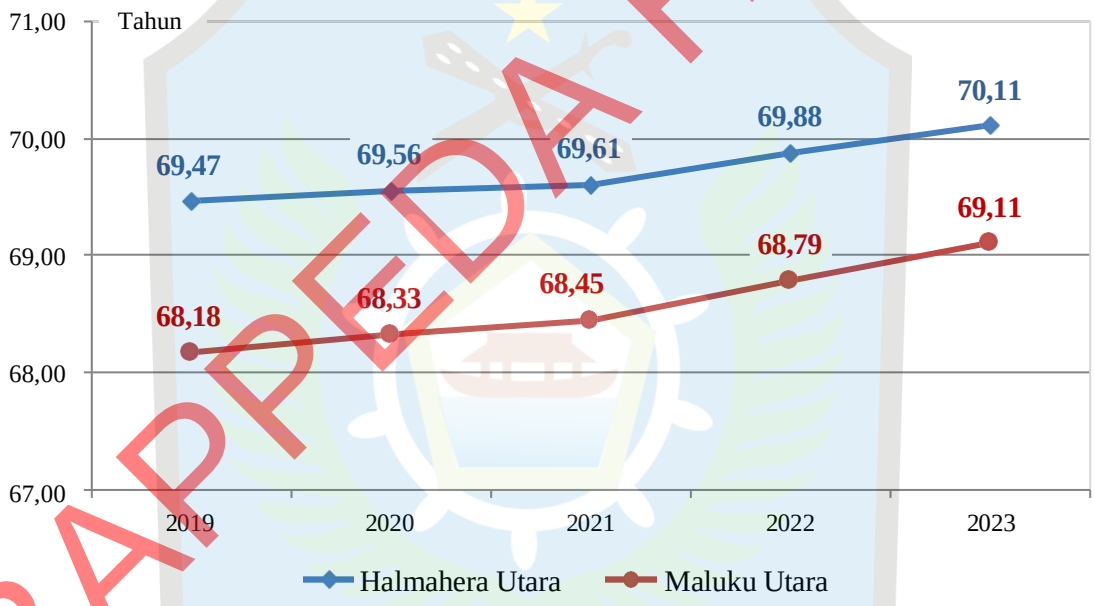
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

Penurunan IPM pada tahun 2020 sebesar 0,25 basis poin dari tahun sebelumnya dapat dikatakan karena dipengaruhi menurunnya pengeluaran per kapita riil disesuaikan yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. Penurunan disebabkan dampak Pandemi Covid-19 yang mulai meluas pada tahun 2020. Penurunan indeks pada komponen pengeluaran per kapita riil disesuaikan terjadi di hampir semua daerah di Indonesia.

BAPPEDA HALUT

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya. UHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat di Kabupaten Halmahera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka UHH Kabupaten Halmahera Utara naik dari 69,88 tahun pada 2022 menjadi 70,11 tahun pada 2023. Sebagaimana tersaji pada Gambar 2.26, angka UHH Kabupaten Halmahera Utara masih konsisten berada di atas rata-rata provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2.26 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

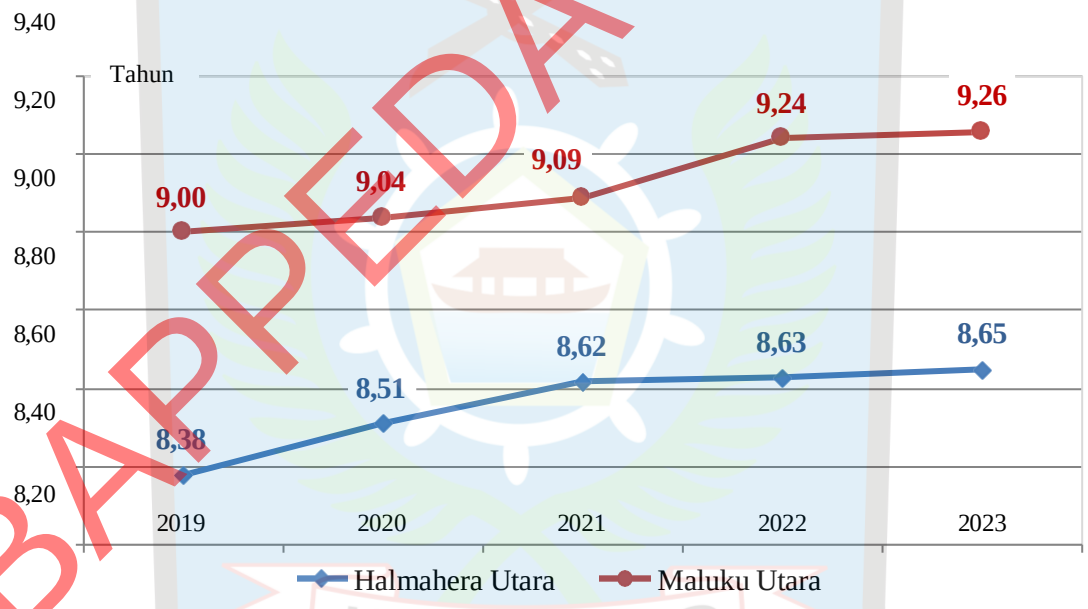
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

Dimensi Pengetahuan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam perhitungannya, lama sekolah selama 6 tahun untuk penduduk yang tamat SD, 9 tahun untuk tamat SMP dan 12 tahun untuk tamat SMA, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

BAPPEDA HALUT

Sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2015 maka idealnya RLS minimal adalah 12 tahun. Angka RLS Kabupaten Halmahera Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga mencapai angka tertingginya 8,65 di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 telah menempuh pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II). Kenaikan RLS ini merupakan salah satu modal penting dalam membangun kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Halmahera Utara. Namun demikian, seperti yang tersaji dalam grafik di Gambar 2.27, capaian RLS Kabupaten Halmahera Utara masih tetap konsisten berada di bawah RLS provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir. Kesenjangan yang terjadi juga semakin melebar. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan RLS di Kabupaten Halmahera Utara kurang berakselerasi, dibandingkan akselerasi yang terjadi di tingkatan Provinsi.



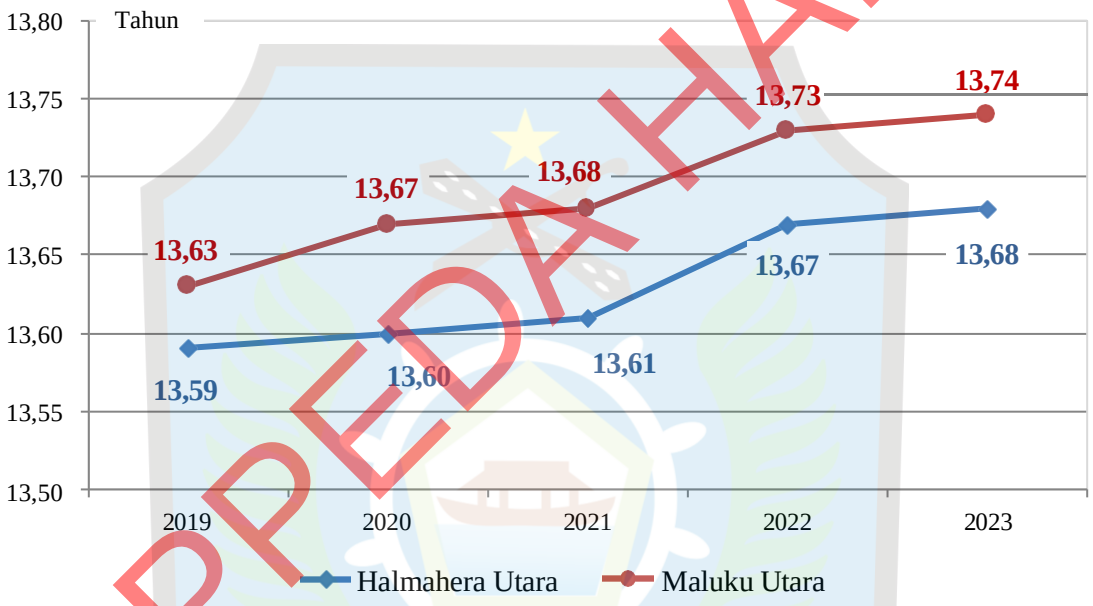
Gambar 2.27 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

Selain rata-rata lama sekolah, komponen dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal, yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

BAPPEDA HALUT

Pada tahun 2023, seorang anak di Kabupaten Halmahera Utara yang berusia >7 tahun berpotensi untuk menempuh pendidikan hingga lulus SMA/sederajat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat setara Diploma II. Indikasi tersebut merujuk angka HLS yang mencapai 13,68 tahun ≈14 tahun. Namun seperti yang terlihat pada grafik di Gambar 2.28, Angka HLS Kabupaten Halmahera Utara masih konsisten berada di bawah rata-rata provinsi Maluku Utara sepanjang periode 2019-2023. Hal ini mengindikasikan bahwa harapan lama sekolah seorang anak usia tujuh tahun di Kabupaten Halmahera Utara masih di bawah dari rata-rata provinsi.



Gambar 2.28 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

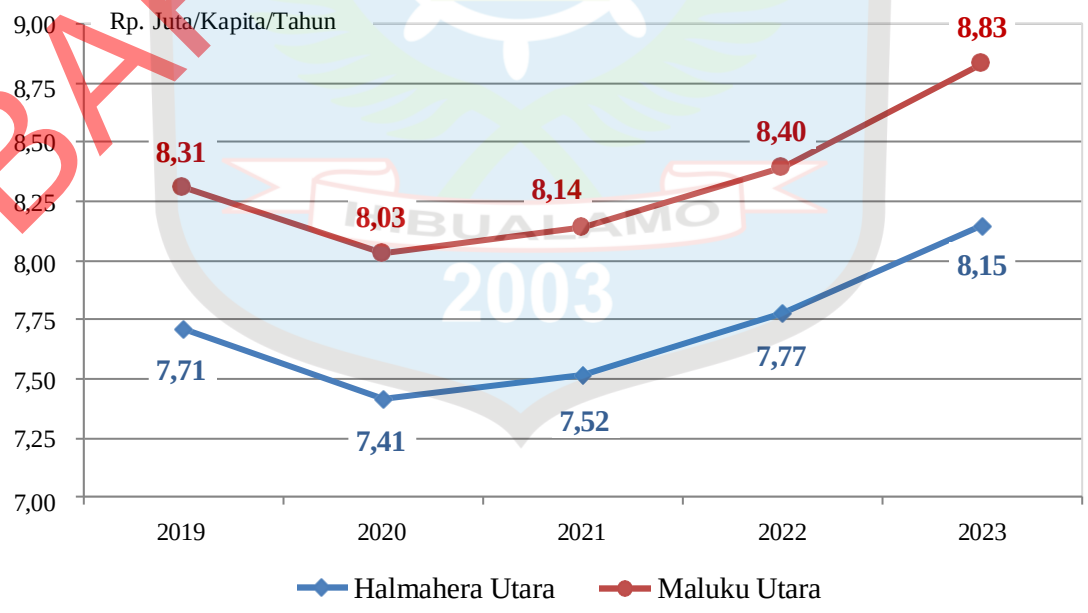
Salah satu komponen dimensi pengetahuan yang sudah tidak diperhitungkan sebagai pembentuk IPM berdasarkan metode baru, namun masih relevan untuk diungkap adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka melek huruf menunjukan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Penduduk yang bisa membaca dan menulis memiliki akses ke berbagai hal yang jauh lebih besar. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Berdasarkan definisinya, Angka Melek Huruf menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan lainnya dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.

BAPPEDA HALUT

Angka Melek Huruf di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 telah mencapai 99,74. Capaian pada tahun 2023 ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Angka Melek Huruf pada rata-rata provinsi Maluku Utara yang tercatat sebesar 98,77 persen.

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purcashing Power Parity*-PPP). Indikator ini merepresentasikan daya beli atau kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa, juga menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pada tahun 2023, Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 8,15 juta/orang/tahun, naik sebesar Rp. 378 ribu atau 4,86 persen dari tahun sebelumnya. Capaian Pengeluaran per kapita yang disesuaikan pada tahun 2023 ini merupakan catatan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Maluku Utara, Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten Halmahera Utara masih jauh berada di bawah, dimana selisih pada tahun 2023 mencapai Rp. 680 ribu. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



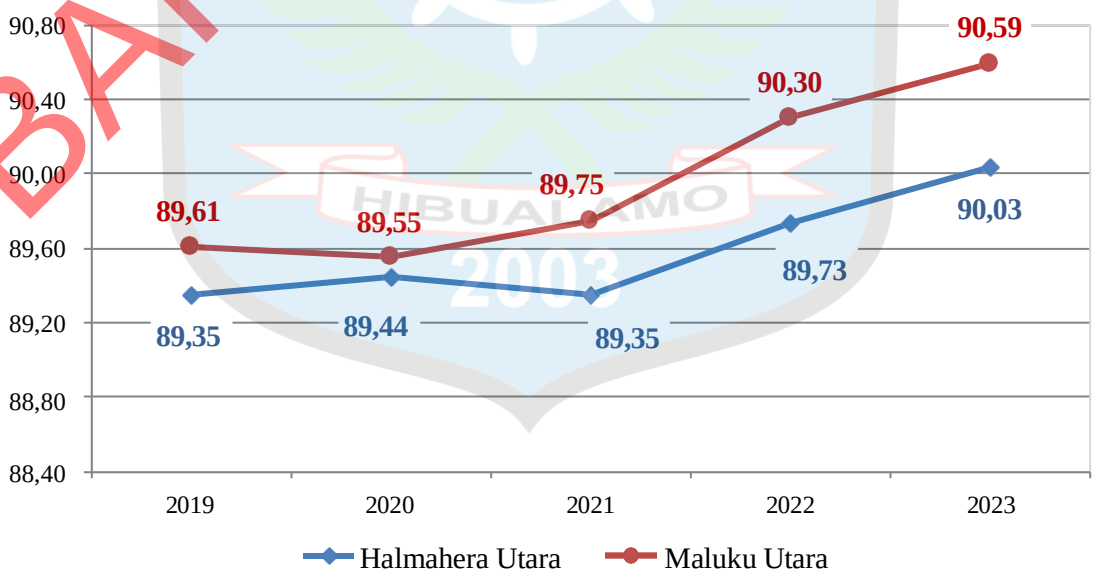
Gambar 2.29 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

2.2.8. Indeks Pembangunan Gender

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki- laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkap ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sebagaimana tersaji dalam grafik di Gambar 2.30, IPG Kabupaten Halmahera Utara cenderung meningkat. Pada tahun 2023, IPG Kabupaten Halmahera Utara tercatat sebesar 90,03 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun capaian IPG Kabupaten Halmahera Utara IPG juga masih tetap konsisten berada dibawah rata-rata IPG Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2.30 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023
Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

2.2.9. Perkembangan Wilayah

Perkembangan global yang dimanifestasikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) mendorong pemerintah Indonesia untuk mengubah strategi pembangunannya, antara lain dengan arah kebijakan untuk membangun dari pinggiran, yakni memperkuat daerah dan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengusung paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional, yang tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Meningkatnya perhatian pemerintah pada pembangunan desa memunculkan berbagai upaya untuk membangun desa melalui pengembangan berbagai model, salah satunya melalui konsep Desa Membangun. Desa Membangun menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, dimana Desa dapat merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dan memberdayakan sendiri masyarakatnya.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengembangkan Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa, dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019 (tercapai 1.444 Desa Mandiri). Adapun RPJMN 2020- 2024 menargetkan sebanyak 10.559 Desa Mandiri pada tahun 2024. Target pemerintah untuk meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri tersebut tentunya perlu mendapat dukungan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 adalah pada kategori Berkembang dengan skor 0,6035. Skor IDM di tahun 2023 ini mengalami peningkatan 2,18 persen dari skor tahun 2022 sebesar 0,5924. Dengan dengan skor tersebut Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 masih berada pada peringkat ke-31, namun dari 36 provinsi, dibandingkan tahun 2022 dari 36 provinsi di Indonesia. Dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah dengan peringkat terbaik dalam pencapaian IDM pada tahun 2023. Status IDM Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2023 adalah Berkembang dengan skor 0,6976.

Peningkatan skor IDM Kabupaten Halmahera Timur pada pada tahun 2023

BAPPEDA HALUT

merupakan yang tertinggi di Maluku Utara, yaitu dari 0,6635 pada tahun 2022 menjadi 0,6976 atau naik 5,14. Adapun 2 (dua) kabupaten tercatat mengalami penurunan skor IDM pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu Kota Tidore Kepulauan dan Kepulauan Sula.

Adapun Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 telah berstatus IDM Berkembang, dengan menempati peringkat 365 secara Nasional, atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang berada di peringkat 370 dengan status IDM Berkembang. Gambaran perkembangan IDM Kabupaten Halmahera Utara yang dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022-2023

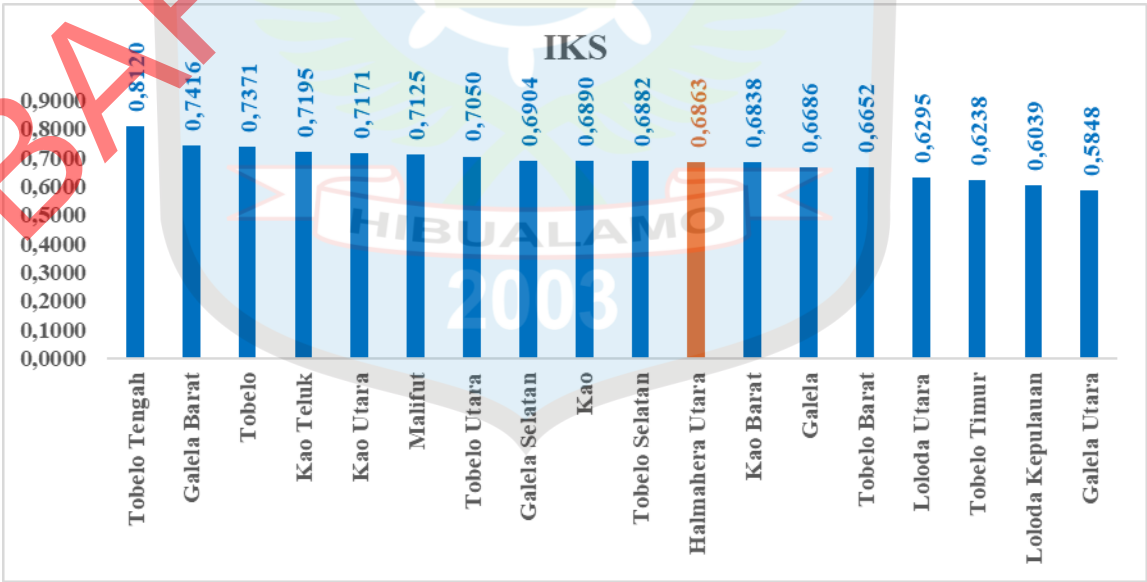
Rank*	Kabupaten/ Kota	Tahun	Status	IDM	Perubahan
244	Pulau Morotai	2023	Berkembang	0,6976	5,14%
279		2022	Berkembang	0,6635	
321	Tidore Kepulauan	2023	Berkembang	0,6220	-6,03%
281		2022	Berkembang	0,6619	
365	**Halmahera Utara**	**2023**	**Berkembang**	**0,6234**	3,87%
370		**2022**	**Berkembang**	**0,6002**	
367	Halmahera Tengah	2023	Berkembang	0,6195	0,03%
358		2022	Berkembang	0,6193	
373	Halmahera Timur	2023	Berkembang	0,6120	2,02%
371		2022	Tertinggal	0,5999	
384	Kepulauan Sula	2023	Tertinggal	0,5900	-0,15%
377		2022	Tertinggal	0,5909	
388	Halmahera Selatan	2023	Tertinggal	0,5775	1,21%
389		2022	Tertinggal	0,5706	
389	Halmahera Barat	2023	Tertinggal	0,5757	3,64%
398		2022	Tertinggal	0,5555	
392	Pulau Taliabu	2023	Tertinggal	0,5664	0,00%
391		2022	Tertinggal	0,5664	
31	**Maluku Utara**	2023	**Berkembang**	**0,6053**	2,18%
31		**2022**	**Tertinggal**	**0,5924**	

Sumber: KemenDesPDTTrans, 2024

BAPPEDA HALUT

IDM disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

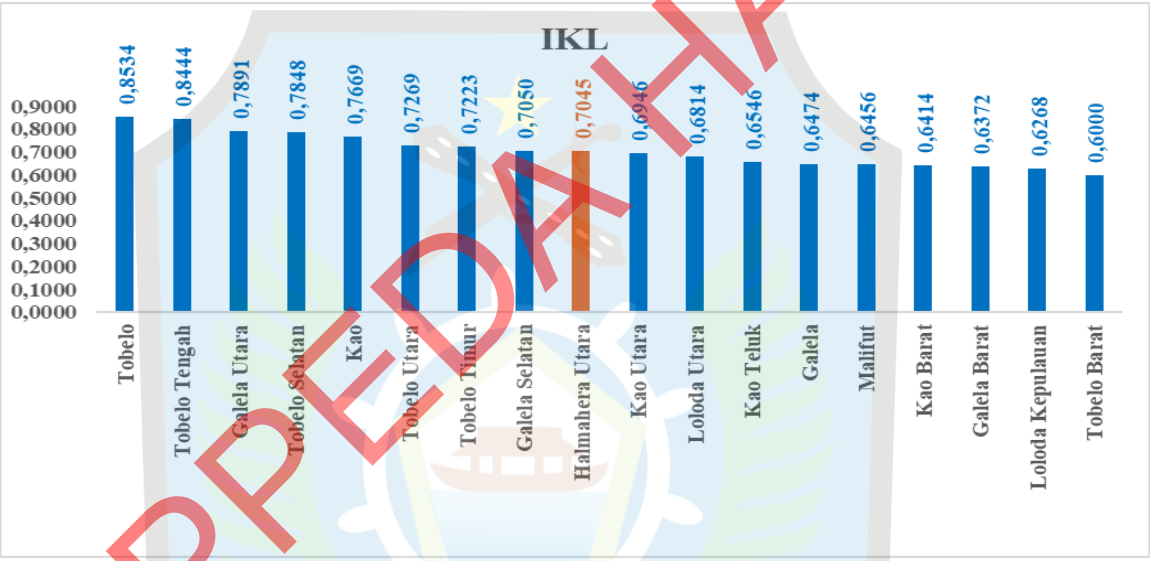
Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga dikelompokkan ke dalam sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Diantara yang membangun dimensi modal sosial, yaitu: memiliki solidaritas sosial (kebiasaan gotong royong di desa; keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar; ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan adanya kelompok kegiatan olahraga di masyarakat); memiliki toleransi (adanya keragaman etnis dan suku; keragaman bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari); rasa aman penduduk (minimnya kriminalitas serta konflik yang terjadi di Desa); kesejahteraan sosial (terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa; tidak ada penyandang kesejahteraan sosial seperti anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis). Dasi aspek sosial, pada tahun 2023 Kabupaten Halmahera Utara memiliki Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,69 atau termasuk dalam kategori sedang. Grafik berikut menyajikan perbandingan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa tahun 2023 menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara.



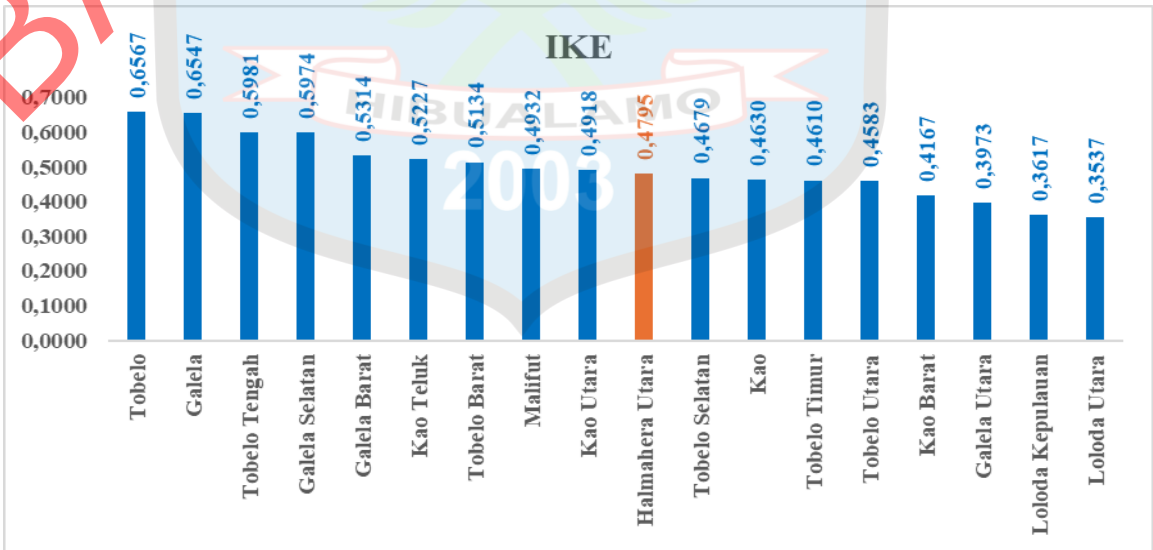
Gambar 2.31 Indeks Ketahanan Sosial Desa
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023
Sumber : KemenDesPDTTrans, 2024, diolah

RAPPEDA HALUT

Dimensi ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup risiko-risiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan, termasuk kewaspadaan risiko bencana. Grafik-grafik berikut menyajikan perbandingan Indeks Ketahanan Ekonomi Desa (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan Desa (IKL) Kabupaten Halmahera Utara menurut kecamatan pada tahun 2023.



Gambar 2.32 Indeks Ketahanan Ekonomi Desa
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023
Sumber : KemenDesPDTTrans, 2024, diolah



Gambar 2.33 Indeks Ketahanan Lingkungan Desa
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023
Sumber : KemenDesPDTTrans, 2024, diolah

BAPPEDA HALUT

2.2.10. Seni Budaya dan Olahraga

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Berdasarkan UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional. Kabupaten Halmahera Utara memiliki khasanah kebudayaan yang sangat beragam, yang dapat berkontribusi dalam memperkaya khasanah kebudayaan nasional. Budaya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara secara umum sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari Suku asli yang mendiami Halmahera Utara atau Hoana yaitu: Hoana Modole, Hoana Pagu, Hoana Boeng, Hoana Towiliko, Hoana Lina, Hoana Huboto, Hoana Mumulati, Hoana Gura, suku Loloda dan Hoana Morodina. Masing-masing kelompok etnis/ suku/hoana tersebut memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa suku pendatang yang sudah sejak lama masuk dan mendiami Halmahera Utara di antaranya; Tobaru, Suku Sangir, Ternate, Tidore, Makian, Ambon, Kei, Timor, Manado, Minahasa, Bugis, Makasar, Buton, Jawa, Padang, Batak, Dayak, dan Sunda.

Dintinjau dari unsur budaya bahasa, Kabupaten Halmahera Utara memiliki tujuh bahasa daerah yaitu; Bahasa Tobelo, Bahasa Galela, Bahasa Loloda, Bahasa Tobaru, Bahasa Modole, bahasa Towiliko, dan Bahasa Pagu. Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten Halmahera Utara memiliki keunikan seni dan budaya daerah, antara lain: tarian Cakalele, tarian Tide-Tide, tarian Denge-Denge, Gomatere, dan Lehe-Lehe. Di samping itu seni tradisional yang dimiliki antara lain: pertunjukan tradisional Tokuwela, upacara adat Hibua Lamo, dan seni tradisional Bobaso. Kebudayaan dalam bentuk musik antara lain: musik Yangere, Bambu Hitadi, dan musik bambu Tiup. Berbagai khasanah seni dan budaya sebagian telah terlembagakan dalam grup- grup seni budaya, yang disertai dengan dukungan prasarana dan sarana berupa gedung kesenian dan rumah adat. Adapun olahraga telah menjadi bagian hidup dari sebagian besar masyarakat, baik di kota besar maupun pelosok pedesaan, serta menjadi bagian integral dari kebudayaan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.

BAPPEDA HALUT

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Capaian kinerja pada urusan-urusan ini diuraikan sebagai berikut.

A. Pendidikan

Pendidikan pada hakekatnya merupakan bekal manusia untuk mampu bertahan hidup. Pendidikan dapat diperoleh melalui cara formal maupun cara informal dan pendidikan dapat juga dapat diperoleh baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukan semata-mata kegiatan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah suatu upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, cerdas, bertaqwa, memiliki moral yang tinggi, memiliki integritas dan loyalitas, berjiwa patriot dan nasionalis serta memiliki kepedulian terhadap manusia dan alam sekitarnya. Pendidikan juga berperan penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* -SDGs) 2030, yang menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, melalui pembelajaran yang relevan dan efektif, dengan memperhatikan kualitas pendidik atau guru. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, senantiasa komitmen dan serius untuk memperhatikan dan membangun sektor pendidikan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan pendidikan adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. Capaian kinerja pembangunan pada urusan pelayanan dasar pendidikan Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

BAPPEDA HALUT

A1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Layanan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam hal ini Dinas Pendidikan dan kebudayaan, serta Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), atau bentuk lain yang sederajat. Gambaran perkembangan jumlah satuan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu tahun 2019-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.27. Jumlah SD/Sederajat dan SMP/Sederajat Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Kecamatan		Kemendikbud						Kemenag					
			SD			SMP			MI			MTs		
			Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Malifut		15	14	1	2	1	1	2	-	2	2	1	1
2	Kao Teluk		9	9	-	3	2	1	0	-	-	1	-	1
3	Kao		14	11	3	3	2	1	0	-	-	1	-	1
4	Kao Barat		18	18	-	6	5	1	0	-	-	0	-	-
5	Kao Utara		15	12	3	5	2	3	0	-	-	0	-	-
6	Tobelo Selatan		15	14	1	3	3	0	1	-	1	1	-	1
7	Tobelo Barat		10	9	1	2	1	1	0	-	-	1	-	1
8	Tobelo Timur		9	7	2	2	1	1	0	-	-	0	-	-
9	Tobelo		28	21	7	14	2	12	2	-	2	1	-	1
10	Tobelo Tengah		10	9	1	2	1	1	0	-	-	0	-	-
11	Tobelo Utara		8	8	-	6	3	3	3	1	2	1	1	-
12	Galela		5	5	-	1	1	0	3	2	1	3	-	3
13	Galela Selatan		8	8	-	3	1	2	3	1	2	2	-	2
14	Galela Barat		8	8	-	3	1	2	3	1	2	2	1	1
15	Galela Utara		11	8	3	3	2	1	4	-	4	3	-	3
16	Loloda Utara		17	16	1	7	4	3	1	1	-	2	-	2
17	Loloda Kepulauan		10	9	1	7	5	2	1	-	1	3	-	3
Halmahera Utara		**2023**	**210**	**186**	**24**	**72**	**37**	**35**	**23**	**6**	**17**	**23**	**3**	**20**
		2022	209	141	68	69	37	32	23	6	17	23	3	20
		2021	209	141	68	67	36	31	23	6	17	23	3	20
		2020	207	140	67	63	35	28	22	6	16	22	3	19
		2019	207	140	67	63	35	28	20	6	14	22	3	18

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

Secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir terjadi penambahan jumlah satuan pendidikan baik pada jenjang SD/sederajat maupun pada jenjang SMP/sederajat. Dengan semakin banyaknya sekolah yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar, tentunya diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan akses pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara, dapat dijelaskan melalui sejumlah indikator angka partisipasi pendidikan yang meliputi Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan pada suatu wilayah. APS didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK juga dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

BAPPEDA HALUT

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK, dikarenakan APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Gambaran perkembangan APS, APK dan APM pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.28. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Persentase				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Sekolah (APS)*					
7-12 Tahun	99,36	99,09	99,01	98,72	98,69
13-15 Tahun	96,33	94,49	96,88	98,72	99,30
Angka Partisipasi Kasar (APK)**					
SD/sederajat	101,26	93,55	93,07	95,25	96,21
SMP/sederajat	102,9	107,60	108,86	108,08	108,50
Angka Partisipasi Murni (APM)**					
SD/sederajat	86,38	80,01	79,25	82,12	83,43
SMP/sederajat	70,91	69,82	70,24	69,85	70,89

Sumber: *) BPS Provinsi Maluku Utara, 2024 ; **) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2024

Disamping menjamin ketersediaan sekolah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara masih dihadapkan dengan jaminan keberlanjutan pendidikan dari para peserta didik. Dalam konteks ini masih ada anak didik yang mengalami putus sekolah dan mengulang pada jenjang SD maupun SMP setiap tahunnya.

BAPPEDA HALUT

Tabel berikut menyajikan gambaran perkembangan jumlah siswa putus sekolah dan mengulang pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Utara sepanjang periode tahun 2019-2023.

Tabel 2.29. Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Mengulang Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Uraian/Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
Putus Sekolah (Jumlah Siswa)					
SD	102	28	51	93	62
SMP	94	85	56	9	25
Mengulang (Jumlah Siswa)					
SD	365	-	-	-	157
SMP	34	27	-	-	34

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2024

Efektifitas pelayanan pendidikan dapat diamati dari Rasio guru terhadap siswa; Rasio rombel (rombongan belajar) terhadap siswa; dan rasio kelas terhadap rombel. Rasio guru terhadap siswa adalah jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu per 1.000 jumlah siswa pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal siswa untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Pada tahun 2023, Rasio guru/siswa jenjang pendidikan SD sebesar 1:14 sementara pada jenjang SMP sebesar 1:13. Rasio ini cukup memadai untuk membantu dalam efektifitas pembelajaran karena seorang guru tidak terbebani dalam mengawasi terlalu banyak murid. Namun perlu ditelusur lebih lanjut karena terdapat kemungkinan sekolah yang kekurangan jumlah guru sehingga rasio terhadap murid lebih tinggi, atau sebaliknya terdapat kemungkinan sekolah yang mengalami kelebihan jumlah guru namun kekurangan siswa sehingga rasio guru terhadap murid sangat kecil.

Rasio antara rombongan belajar terhadap siswa merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan. Indikator ini menunjukkan kecukupan antara rombel yang tersedia dengan jumlah siswa. Merujuk Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar untuk SD adalah 28 dan untuk SMP adalah 32. Adapun Rasio antara rombongan belajar (rombel) menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan. Indikator ini menunjukkan kecukupan antara ruangan kelas yang tersedia untuk melayani jumlah rombongan belajar.

BAPPEDA HALUT

Sepanjang periode tahun 2019-2023, rasio rombongan belajar baik pada jenjang SD maupun SMP di Kabupaten Halmahera Utara adalah 1: <1,1 dan terus mengecil. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa jumlah ruangan kelas pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara rata-rata masih mampu memenuhi kebutuhan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan. Perkembangan Rasio Guru/Siswa; Rasio Rombel/Siswa; Rasio Kelas/Rombel pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

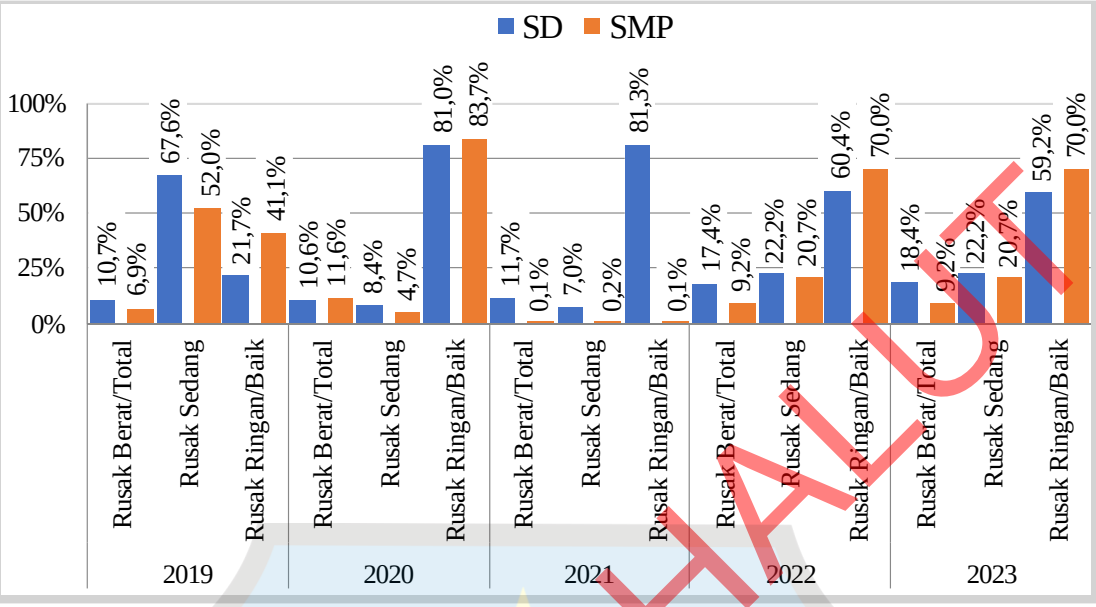
Tabel 2.30. Perkembangan Rasio Guru/Siswa, Rombel/Siswa, Kelas/Rombel Di Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Uraian/Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
SD					
Jumlah Siswa	23.631	25.103	21.610	21.544	21.494
Jumlah Guru	1.120	1.193	1.288	1.459	1.571
Jumlah Rombel	1.269	1.361	1.282	1.279	1.305
Jumlah Kelas	1.216	1.271	1.470	1300	1296
Rasio Pelayanan					
Rasio Guru/Siswa	21	21	17	15	14
Rasio Rombel/Siswa	19	18	17	17	16
Rasio Kelas/Rombel	1,0	1,1	0,9	1,0	1,0
SMP					
Jumlah Siswa	9.294	13.001	9.560	9.531	9.757
Jumlah Guru	550	574	622	686	751
Jumlah Rombel	346	350	361	361	366
Jumlah Kelas	323	323	445	444	456
Rasio Pelayanan					
Rasio Guru/Siswa	17	23	15	14	13
Rasio Rombel/Siswa	27	37	26	26	27
Rasio Kelas/Rombel	1,1	1,1	0,8	0,8	0,8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2024

Sebagai prasarana sekolah, kondisi ruang kelas perlu diperhatikan karena ruang kelas yang baik akan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan kondusif. Sebagaimana tersaji pada grafik di bawah, persentase ruang kelas dalam kondisi rusak berat/rusak total maupun rusak sedang terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, baik pada jenjang SD maupun SMP. Hingga tahun 2024 ditenggarai masih cukup banyak ruangan kelas dalam kondisi rusak sedang hingga rusak berat, baik pada jenjang SD maupun SMP.

BAPPEDA HALUT

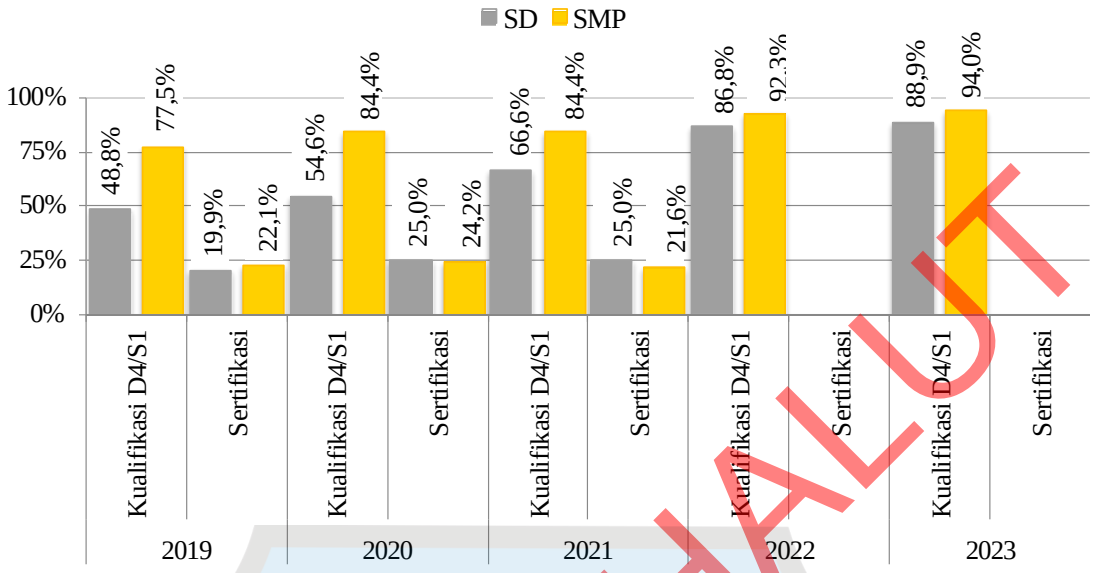


Gambar 2.34 Kondisi Ruangan Kelas SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2024

Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dengan meningkatkan sarana prasarananya, melainkan juga dengan menetapkan kualifikasi guru sebagai tenaga pengajar. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dimaksud dapat dilihat melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Dalam hal ini Guru pada jenjang pendidikan dasar harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sebagaimana tertuang dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007.

Dalam lima tahun terakhir, persentase guru SD dan SMP yang berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 terus mengalami peningkatan. Namun demikian baik pada jenjang SD maupun SMP belum mencapai 100 persen. Pada jenjang SD, persentase guru yang berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 pada tahun 2023 tercatat sebesar 88,9 persen, sementara pada jenjang SMP tercatat sebesar 94,0 persen. Perhatian penuh perlu diberikan pada aspek kompetensi guru, dimana persentase guru yang memiliki sertifikasi kompetensi pendidik masih di bawah 50 persen, baik pada jenjang SD maupun SMP. Gambaran lengkap perkembangan guru SD dan SMP berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 dan bersertifikasi di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.

BAPPEDA HALUT



Gambar 2.35 Persentase Guru SD dan SMP Berkualifikasi Pendidikan D4/S1 dan Bersertfikasi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2024

Secara keseluruhan, mutu penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara dapat tercermin dari indikator akreditasi sekolah. Akreditasi merupakan bentuk pengakuan terhadap suatu lembaga pendidikan oleh badan yang berwewenang. Pengakuan tersebut diberikan setelah lembaga pendidikan tersebut dinilai memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Akreditasi dibutuhkan untuk memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri, maka layanan pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan standar mutu.

Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan-satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan yang meliputi Standar: kompetensi lulusan; isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Akreditasi sekolah dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

BAPPEDA HALUT

Sampai dengan tahun 2023 masih terdapat sejumlah satuan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara yang belum terakreditasi/tanpa keterangan, yaitu sebanyak 14,8 persen pada jenjang SD dan sebanyak 17,6 persen pada jenjang SMP. Sebagian besar SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Utara berstatus akreditasi B dan C. Adapun Akreditasi A baru mencakup 4,8 persen pada jenjang SD dan 7,4 persen pada jenjang SMP yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara.

Adapun di sisi mutu hasil pembelajaran, dapat tercermin dari hasil asesmen kompetensi minimum (AKM). Pada tahun 2023, Persentase siswa SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Utara yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca baru mencapai 22,74 persen dan Numerasi baru mencapai 19,14 persen.

A2) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini memainkan peran penting dalam membentuk masa depan anak. Dalam konteks ini, dengan memberikan pengalaman belajar yang positif, pendidikan anak usia dini membantu membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan bahasa anak

Hingga tahun 2023, telah tersedia 271 satuan PAUD di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, dalam bentuk layanan: Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 74, Kelompok Bermain (KB) sebanyak 154, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebanyak 32. Terdapat juga Raudatul Athfal (RA) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu sebanyak 11 sekolah. Tabel di halaman berikut menyajikan gambaran perkembangan jumlah PAUD dan sebaran PAUD berdasarkan bentuk layanannya termasuk RA menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara pada kurun waktu tahun tahun 2019-2023.

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.31. Jumlah PAUD dan RA Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Kemendikbud			Kemenag	Total
		TK	KB	SPS	RA	
1	Malifut	3	9	2	-	14
2	Kao Teluk	-	9	1	-	10
3	Kao	5	10	3	-	18
4	Kao Barat	6	14	-	-	20
5	Kao Utara	11	10	6	-	27
6	Tobelo Selatan	6	11	2	-	19
7	Tobelo Barat	2	6	1	-	9
8	Tobelo Timur	1	5	1	-	7
9	Tobelo	18	18	4	1	41
10	Tobelo Tengah	7	12	0	-	19
11	Tobelo Utara	4	6	0	1	11
12	Galela	2	4	2	3	11
13	Galela Selatan	1	9	1	4	15
14	Galela Barat	1	8	2	1	12
15	Galela Utara	3	11	1	-	15
16	Loloda Utara	2	8	1	1	12
17	Loloda Kepulauan	2	4	5	-	11
Halmahera Utara	**2023**	**74**	**154**	**32**	**11**	**271**
	2022	74	144	32	11	261
	2021	71	139	32	11	253
	2020	68	138	32	11	249
	2019	67	136	32	14	249

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2024

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, hingga tahun 2023 jumlah PAUD yang sudah terakreditasi sebanyak 86 sekolah atau 37,4 persen dari total 230 PAUD (tidak termasuk RA). Jumlah di tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yang baru berjumlah 61 PAUD terakreditasi. Dengan semakin banyaknya PAUD terakreditasi diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan PAUD di daerah.

Angka Partisipasi Kasar (APK), yang merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat PAUD terhadap jumlah anak dalam kategori PAUD di Kabupaten Halmahera Utara, pada tahun 2023 telah mencapai 56,79 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang baru sebesar 54,97 persen. Jika memperhitungkan RA yang berada di bawah naungan Kementerian Agama maka APK PAUD+RA pada tahun 2021 mencapai 59,28 persen atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 57,01 persen.

BAPPEDA HALUT

Gambaran perkembangan APK PAUD (termasuk RA) di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.32. Perkembangan APK PAUD Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Uraian		2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia 3-6 Tahun		16.591	16.666	16.711	14.324	14.451
Siswa PAUD Formal	TK/TKLB	2.628	2.437	2.342	1950	2.186
	RA	311	340	415	631	873
Siswa PAUD Non Formal	KB	4.944	5.312	5.660	5074	5.329
	SPS	1309	1.413	1.489	1309	1.398
Jumlah Siswa PAUD	Kemendikbud	8.881	9.162	9.491	8.333	8.913
	Kemendikbud + Kemenag	9.192	9.502	9.906	8.964	9.786
APK PAUD	**Kemendikbud**	**53,53**	**54,97**	**56,79**	**58,18**	**61,68**
	Kemendikbud + Kemenag	**55,40**	**57,01**	**59,28**	**62,58**	**67,72**

Sumber: Kemendikbud, 2024

Pada tahun 2023, rasio Guru/siswa PAUD (termasuk RA) di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 1:24 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1:21. Sebagai rujukan untuk jenjang Kelompok Bermain (KB) dan TK berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD, dengan anak didik usia 4-6 tahun maka rasio Guru dan anak didik maksimal 1:15. Ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan di Kabupaten Halmahera Utara masih kekurangan guru PAUD. Gambaran perkembangan rasio guru/siswa PAUD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2019-2023 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.33. Perkembangan Rasio Guru/Siswa PAUD Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Uraian		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Siswa PAUD	Kemendikbud	8.881	9.162	9.491	8.333	8.913
	Kemendikbud + Kemenag	9.192	9.502	9.906	8.964	9.786
Jumlah Guru PAUD	Kemendikbud	421	430	368	335	357
	Kemendikbud + Kemenag	440	449	417	385	410
Rasio Guru/Siswa PAUD	Kemendikbud	**1:21**	**1:21**	**1:26**	**1:25**	**1:25**
	Kemendikbud + Kemenag	**1:21**	**1:21**	**1:24**	**1:23**	**1:24**

Sumber: Kemendikbud; Dinas Pendidikan & Kebudayan Kab. Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

A3) Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP dan Program Paket C setara SMA , dengan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap kepribadian kepada peserta didik. Pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga, salah satunya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Gambaran perkembangan PKBM di Kabupaten Halmahera Utara, tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.34. Perkembangan PKBM Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Kecamatan		Jumlah PKBM	Jumlah Peserta Didik	Rerata Siswa/PKBM
1	Malifut		4	737	184
2	Kao Teluk		-	-	-
3	Kao		2	734	367
4	Kao Barat		1	64	64
5	Kao Utara		1	102	102
6	Tobelo Selatan		4	1,159	0
7	Tobelo Barat		1	253	253
8	Tobelo Timur		1	44	44
9	Tobelo		6	1,206	0
10	Tobelo Tengah		2	800	400
11	Tobelo Utara		1	241	241
12	Galela		1	73	73
13	Galela Selatan		2	267	134
14	Galela Barat		4	255	64
15	Galela Utara		3	589	196
16	Loloda Utara		-	-	-
17	Loloda Kepulauan		2	-	-
Halmahera Utara		**2023**	**35**	**4.161**	**119**
		2022	31	5.498	177
		2021	31	4.184	135
		2020	31	4.206	136
		2019	28	4.708	168

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

B. Kesehatan

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Undang- undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan kesehatan meliputi sub urusan: 1) Upaya kesehatan (Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota; Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota; serta Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota; 2) Sumber Daya Manusia Kesehatan (Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota); 3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman (Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal; Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT); Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga); dan 4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

B1) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *maternal mortality ratio* didefinisikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka Kematian Ibu di Kabupaten Halmahera Utara mengalami peningkatan yang signifikan dalam periode 2019-2021, yaitu dari 53 per 100 ribu KH di tahun 2019 kemudian naik sehingga berada pada angka 145 per 100 ribu KH di tahun 2021, kemudian menurun hingga menjadi 123 per 100 ribu KH dan kembali

BAPPEDA HALUT

meningkat di tahun 2023 menjadi 149 per 100 ribu KH.

Kondisi di tahun 2019 telah berada di bawah (lebih baik) target Millenium Development Goals (MDGs) yang menetapkan 102 per 100 ribu KH pada 2019, namun masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pada tahun 2030 sehingga kurang dari 70 per 100 ribu KH. Masih tingginya Angka Kematian Ibu di tahun 2023 dikontribusikan oleh Tiga kecamatan, yaitu, Kao Utara (Puskesmas Daru), Galela Utara (Puskesmas Salimuli dan Loloda Utara (Puskesmas Dorume dan Supu). Terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang tercatat tidak ada kasus kematian ibu dalam lima tahun terakhir, yaitu Malifut, Kao Teluk, Tobelo Barat, Tobelo Utara, Galela Selatan, Galela Barat, dan Loloda Kepulauan. Kondisi AKI menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.35. Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Per 100.000 Kelahiran Hidup				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Malifut	0	0	0	0	0
2	Kao Teluk (Bobane Igo)	0	0	0	0	0
3	Kao Teluk (Dum-Dum)		0	0	0	0
4	Kao	0	588	0	654	0
5	Kao Barat	0	0	714	667	0
6	Kao Utara	0	0	0	0	508
7	Tobelo Selatan	0	342	0	0	391
8	Tobelo Barat	0	0	0	0	0
9	Tobelo Timur	0	0	1176	0	0
10	Tobelo	0	121	0	142	0
11	Tobelo Tengah	0	0	556	0	0
12	Tobelo Utara	0	0	0	0	562
13	Galela	538	0	0	0	0
14	Galela Selatan	0	0	0	0	0
15	Galela Barat	0	0	0	0	0
16	Galela Utara	0	0	781	0	520
17	Loloda Utara (Dorume)	0	1389	0	1408	1205
18	Loloda Utara (Supu)	1163	0	0	0	1282
19	Loloda Kepulauan	0	0	0	0	0
Halmahera Utara		**53**	**111**	**145**	**123**	**149**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

B2) Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (*Neonatal Mortality Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup (KH) pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal ini menggambarkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kabupaten Halmahera Utara memperlihatkan tren fluktuatif dalam periode 2019-2023, dimana pada tahun 2023 tercatat pada angka 8 per 1000 KH, atau menurun kembali dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih lebih tinggi dari capaian di tahun 2020. Masih terdapat kecamatan dengan AKN masih di atas target TPB 12 per 1000 KH. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.36. Angka Kematian Neonatal Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Per 1000 Kelahiran Hidup				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Malifut	9	11	6	4	10
2	Kao Teluk (Bobane Igo)	41	0	0	0	0
3	Kao Teluk (Dum-Dum)		32	22	0	29
4	Kao	5	18	33	20	24
5	Kao Barat	7	7	29	13	18
6	Kao Utara	0	0	6	0	0
7	Tobelo Selatan	4	7	11	5	4
8	Tobelo Barat	30	12	10	33	20
9	Tobelo Timur	0	15	12	8	18
10	Tobelo	4	0	0	0	0
11	Tobelo Tengah	6	9	11	14	4
12	Tobelo Utara	5	5	12	5	11
13	Galela	16	12	34	16	16
14	Galela Selatan	0	0	8	0	7
15	Galela Barat	5	0	7	14	0
16	Galela Utara	0	0	8	17	10
17	Loloda Utara (Dorume)	6	14	37	42	0
18	Loloda Utara (Supu)		0	20	38	13
19	Loloda Kepulauan	0	0	11	0	0
Halmahera Utara		**6**	**5**	**11**	**9**	**8**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

B3) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB seringkali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah. AKB di Kabupaten Halmahera Utara memperlihatkan tren kenaikan dalam periode 2019-2023, yaitu dari 6 per 1000 KH di tahun 2019 kemudian naik sehingga berada pada angka 14 per 1000 ribu KH. Namun pada tahun 2022 dan 2023 menurun masing-masing menjadi 12 dan 9 per 1000 KH, atau dalam target TPB 8 per 1000 KH. Kondisi AKB menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun terakhir qdapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.37. Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Per 1000 Kelahiran Hidup				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Malifut	9	16	6	13	14
2	Kao Teluk (Bobaneigo)	37	0	0	0	0
3	Kao Teluk (Dum-Dum)	43	32	67	0	29
4	Kao	5	29	49	26	24
5	Kao Barat	7	13	43	27	25
6	Kao Utara	0	5	6	0	0
7	Tobelo Selatan	4	7	11	5	8
8	Tobelo Barat	40	12	10	33	20
9	Tobelo Timur	0	15	12	8	18
10	Tobelo	4	0	0	0	0
11	Tobelo Tengah	6	18	11	18	8
12	Tobelo Utara	5	5	12	10	11
13	Galela	16	12	42	22	16
14	Galela Selatan	0	0	8	0	7
15	Galela Barat	5	0	7	14	0
16	Galela Utara	0	10	8	23	10
17	Loloda Utara (Dorume)	13	14	37	56	0
18	Loloda Utara (Supu)	0	0	20	38	13
19	Loloda Kepulauan	0	0	22	0	0
Halmahera Utara		**6**	**8**	**14**	**12**	**9**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

B4) Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKBa) merujuk pada jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKBa kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Dalam empat tahun terakhir upaya untuk menurunkan AKBa ke tingkat seminimal mungkin di Kabupaten Halmahera Utara semakin membaik. Sepanjang periode 2020-2022 tidak terekam Angka Kematian Balita di seluruh kecamatan dibandingkan kondisi di tahun 2019 namun pada tahun 2023 ditemukan kembali kasus kematian anak balita sebanyak 7 balita yang tersebar ke dalam 6 kecamatan yaitu Malifut, Tobelo Barat, Tobelo Utara, Galela Selatan, Galela Utara, Dan Loloda Utara . Gambaran kondisi AKBa menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.38. Angka Kematian Balita Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Per 1000 Balita				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Malifut	4	0	0	0	1
2	Kao Teluk (Bobaneigo)	0	0	0	0	0
3	Kao Teluk (Dum-Dum)		0	0	0	0
4	Kao	0	0	0	0	0
5	Kao Barat	0	0	0	0	0
6	Kao Utara	0	0	0	0	0
7	Tobelo Selatan	0	0	0	0	0
8	Tobelo Barat	0	0	0	0	1
9	Tobelo Timur	8	0	0	0	0
10	Tobelo	0	0	0	0	0
11	Tobelo Tengah	3	0	0	0	0
12	Tobelo Utara	0	0	0	0	1
13	Galela	0	0	0	0	0
14	Galela Selatan	0	0	0	0	2
15	Galela Barat	0	0	0	0	0
16	Galela Utara	14	0	0	0	1
17	Loloda Utara (Dorume)	0	0	0	0	0
18	Loloda Utara (Supu)		0	0	0	1
19	Loloda Kepulauan	0	0	0	0	0
Halmahera Utara		**1**	**0**	**0**	**0**	**0,40**

BAPPEDA HALUT

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024

B5) Prevalensi Balita Underweight

Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/2010, pengertian Gizi Kurang dan Gizi Buruk adalah status gizi yang didasarkan pada Indeks berat Badan menurut Umum (BB/U) yang merupakan padanan istilah *underweight* (gizi kurang) dan *severely underweight* (gizi buruk). Pada tahun 2023, prevalensi balita underweigt di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 13,77 persen. Kondisi di tahun 2023 ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tercatat hanya 13,46 persen. Terdapat sejumlah kecamatan dengan prevalensi underweigt di atas 20 persen, yaitu Kao Barat, Tobelo Selatan, dan Tobelo Timur. Kondisi prevalensi balita underweight menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.39. Prevalensi Balita Underweight Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Kecamatan	Persentase			
		2020	2021	2022	2023
1	Malifut	40,00%	21,82%	16,51%	14,62%
2	Kao Teluk (Bobaneigo)	0,00%	0,00%	0,00%	1,65%
3	Kao Teluk (Dum-Dum)	0,00%	12,50%	0,00%	12,58%
4	Kao	0,00%	24,00%	23,87%	18,05%
5	Kao Barat	11,90%	15,24%	22,04%	20,07%
6	Kao Utara	12,82%	9,57%	16,58%	10,38%
7	Tobelo Selatan	17,00%	12,50%	9,84%	20,28%
8	Tobelo Barat	17,14%	19,54%	26,30%	18,62%
9	Tobelo Timur	24,44%	36,96%	15,61%	22,13%
10	Tobelo	9,63%	8,33%	9,47%	12,61%
11	Tobelo Tengah	14,72%	10,87%	14,36%	16,55%
12	Tobelo Utara	14,47%	8,11%	2,16%	7,89%
13	Galela	8,60%	10,10%	13,21%	5,19%
14	Galela Selatan	0,00%	3,31%	18,84%	13,02%
15	Galela Barat	3,23%	4,76%	11,11%	9,39%
16	Galela Utara	24,07%	20,00%	14,21%	9,76%
17	Loloda Utara (Dorume)	0,00%	0,00%	0,26%	19,37%
18	Loloda Utara (Supu)	0,00%	18,60%	15,05%	19,28%
19	Loloda Kepulauan	11,40%	12,71%	16,34%	16,67%
Halmahera Utara		**12,93%**	**10,38%**	**13,46%**	**13,77%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

B6) Prevalensi Balita Stunting

Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995//2010, pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan sangat pendek (severely stunted). Capaian prevalensi stunting tahun 2023 menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kabupaten Halmahera Utara berada pada angka 24,3%. Dalam pencapaian tersebut terjadi penurunan sebesar 0,6% dari angka prevalensi stunting tahun 2022 yang mana sebesar 24,90% ,Sedangkan prevalensi balita stunting tahun 2023 menurut aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) sebesar 17,89 persen. Kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang terekam sebesar 18,78 persen. Sekitar tujuh kecamatan masih mencatatkan angka stunting di atas 20 persen. Kondisi prevalensi balita stunting menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.40. Prevalensi Balita Stunting Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Kecamatan	Persentase			
		2020	2021	2022	2023
1	Malifut	20,00%	25,93%	18,30%	13,76%
2	Kao Teluk (Bobaneigo)	2,00%	0,00%	2,27%	3,31%
3	Kao Teluk (Dum-Dum)	0,00%	12,50%	1,29%	7,95%
4	Kao	25,00%	52,00%	28,39%	26,10%
5	Kao Barat	14,46%	17,07%	36,84%	37,37%
6	Kao Utara	2,56%	5,92%	11,69%	21,31%
7	Tobelo Selatan	30,77%	11,25%	30,98%	44,06%
8	Tobelo Barat	11,76%	40,70%	29,60%	26,21%
9	Tobelo Timur	32,22%	26,09%	7,83%	11,48%
10	Tobelo	19,40%	9,09%	22,95%	16,61%
11	Tobelo Tengah	16,23%	11,96%	15,64%	14,94%
12	Tobelo Utara	14,48%	24,32%	4,75%	15,05%
13	Galela	33,70%	26,26%	26,26%	4,22%
14	Galela Selatan	11,76%	16,28%	19,67%	8,85%
15	Galela Barat	0,00%	8,42%	11,81%	10,47%
16	Galela Utara	33,33%	27,50%	7,24%	6,68%
17	Loloda Utara (Dorume)	19,59%	0,00%	0,51%	28,27%
18	Loloda Utara (Supu)	0,00%	11,63%	26,77%	22,89%

BAPPEDA HALUT

No	Kecamatan	Persentase			
		2020	2021	2022	2023
19	Loloda Kepulauan	4,39%	16,11%	18,01%	15,56%
Halmahera Utara		**17,92%**	**15,10%**	**18,78%**	**17,89%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024

B7) Prevalensi Balita Wasting

Selain *underweight* dan *stunting*, *wasting* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan gizi anak, ketika bobot tubuhnya jauh di bawah normal. *Wasting* menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan cukup. *Wasting* merupakan gabungan dari istilah kurus (*wasted*) dan sangat kurus (*severe wasted*) yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). WHO selaku badan kesehatan dunia, menyatakan bahwa *wasting* adalah salah satu masalah kesehatan utama. Sebab kondisi ini berhubungan langsung dengan angka kejadian suatu penyakit (*morbiditas*). Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita kurus 5% atau lebih. Gambaran kondisi prevalensi balita wasting menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.41. Prevalensi Balita Wasting Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Kecamatan	Persentase			
		2020	2021	2022	2023
1	Malifut	20,00%	20,37%	12,74%	7,74%
2	Kao Teluk (Bobaneigo)	0,00%	0,00%	0,76%	3,31%
3	Kao Teluk (Dum-Dum)	0,00%	37,50%	1,29%	4,64%
4	Kao	0,00%	16,00%	9,52%	8,78%
5	Kao Barat	15,48%	20,86%	13,75%	7,79%
6	Kao Utara	5,13%	2,37%	4,41%	6,92%
7	Tobelo Selatan	13,85%	10,00%	4,46%	6,99%
8	Tobelo Barat	14,29%	10,47%	15,14%	6,90%
9	Tobelo Timur	15,56%	23,91%	10,72%	23,77%
10	Tobelo	7,81%	3,79%	7,13%	7,03%
11	Tobelo Tengah	8,33%	8,15%	9,30%	9,89%
12	Tobelo Utara	17,62%	2,70%	3,51%	4,30%
13	Galela	0,00%	4,04%	10,37%	10,71%
14	Galela Selatan	0,00%	1,53%	12,45%	5,73%
15	Galela Barat	1,61%	1,83%	2,78%	4,69%
16	Galela Utara	11,11%	7,50%	7,24%	3,60%

BAPPEDA HALUT

No	Kecamatan	Persentase			
		2020	2021	2022	2023
17	Loloda Utara (Dorume)	3,09%	0,00%	3,07%	12,04%
18	Loloda Utara (Supu)	0,00%	11,63%	15,38%	13,25%
19	Loloda Kepulauan	7,02%	5,56%	7,88%	11,85%
Halmahera Utara		**9,44%**	**6,37%**	**8,12%**	**7,78%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024

B8) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi dilakukan untuk mencegah penyakit, kecacatan, dan kematian dari wabah yang dapat dicegah dengan memberikan vaksin tertentu ke dalam tubuh manusia. Penyakit-penyakit tersebut, yakni tuberkulosis (TBC), hepatitis B, difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, pneumonia, rubella, dan lain-lain. Imunisasi dasar lengkap merupakan penyuntikkan vaksin tertentu yang diberikan kepada bayi sesuai dengan usianya, antara lain: Bayi berusia kurang dari 24 jam: imunisasi Hepatitis B (HB-0); Bayi usia 1 bulan: BCG dan Polio 1; Bayi usia 2 bulan: DPT-HB-Hib 1, Polio 2, dan Rotavirus; Bayi usia 3 bulan: DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3; Bayi usia 4 bulan: DPT-HB-Hib 3, Polio 4, IPV atau Polio suntik, dan Rotavirus; Bayi usia 9 bulan: Campak atau MR. Perkembangan cakupan imuniasi dasar lengkap menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.42. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Kecamatan	Persentase			
		2020	2021	2022	2023
1	Malifut	77,18%	77,13%	98,45%	44,2%
2	Kao Teluk (Bobaneigo)	48,00%	95,24%	26,19%	35,3%
3	Kao Teluk (Dum-Dum)	8,13%	16,43%	80,71%	47,1%
4	Kao	77,09%	77,04%	79,59%	83,2%
5	Kao Barat	13,21%	17,02%	66,31%	12,1%
6	Kao Utara	96,15%	94,47%	63,82%	42,9%
7	Tobelo Selatan	93,47%	92,53%	73,70%	48,4%
8	Tobelo Barat	8,77%	17,56%	109,16%	46,6%
9	Tobelo Timur	58,20%	60,43%	71,22%	88,5%
10	Tobelo	51,89%	52,50%	90,74%	78,2%
11	Tobelo Tengah	27,69%	30,12%	81,87%	48,2%
12	Tobelo Utara	56,57%	57,84%	74,63%	32,1%
13	Galela	84,62%	110,81%	96,22%	73,0%
14	Galela Selatan	63,41%	64,64%	80,11%	195,0%
15	Galela Barat	109,09%	106,75%	80,59%	53,6%

BAPPEDA HALUT

No	Kecamatan	Persentase			
		2020	2021	2022	2023
16	Galela Utara	87,23%	86,34%	69,27%	64,4%
17	Loloda Utara (Dorume)	22,58%	4,98%	60,20%	11,4%
18	Loloda Utara (Supu)	85,53%	83,87%	127,96%	26,9%
19	Loloda Kepulauan	72,73%	73,10%	64,91%	11,7%
Halmahera Utara		**60,86%**	**61,55%**	**80,34%**	**57,2%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024

B9) Cakupan Desa Universal Child Immunization

Indikator ini terhubung dengan indikator sebelumnya. Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun) pada setiap desa. Desa UCI merupakan desa yang minimal memiliki 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Pemberian imunisasi dasar lengkap sangat penting diberikan pada bayi agar bayi dapat terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah kabupaten. Gambaran pencapaian cakupan Desa UCI menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.43. Cakupan Desa Universal Child Immunization Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

No	Kecamatan/Puskesman	Jumlah Desa	Jumlah Desa UCI	Persentase
1	Malifut	22	19	86,36
2	Kao Teluk (Bobaneigo)	3	3	100,0
3	Kao Teluk (Dum-Dum)	9	5	55,56
4	Kao	14	5	35,71
5	Kao Barat	21	6	28,57
6	Kao Utara	12	9	75,00
7	Tobelo Selatan	13	13	100,0
8	Tobelo Barat	5	1	20,00
9	Tobelo Timur	6	3	50,00
10	Tobelo	10	5	50,00
11	Tobelo Tengah	9	1	11,11
12	Tobelo Utara	10	5	50,00
13	Galela	7	6	85,71
14	Galela Selatan	7	1	14,29

BAPPEDA HALUT

No	Kecamatan/Puskesman	Jumlah Desa	Jumlah Desa UCI	Persentase
15	Galela Barat	9	6	66,67
16	Galela Utara	12	4	33,33
17	Loloda Utara (Dorume)	8	4	50,00
18	Loloda Utara (Supu)	10	3	30,00
19	Loloda Kepulauan	10	6	60,00
Halmahera Utara		**197**	**105**	**53,30**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024

B10) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara mersata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. SPM ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Penerapan SPM oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diatur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batasan waktu pencapaian. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, terdapat 12 Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

BAPPEDA HALUT

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Gambaran kinerja pemenuhan SPM bidang kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.44. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

No	Kecamatan	Persentase Pemenuhan Menurut Jenis SPM												Rerata
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Malifut	100	86,5	100,0	97,8	100	25,9	100	220,7	56,5	100	45,5	98,8	94,3
2	Kao Teluk (Bobane Igo)	100	38,5	16,7	96,3	100	77,5	100	77,1	15,9	100	75,0	131,4	77,4
	Kao Teluk (Dum-Dum)	100	57,1	66,7	99,5	100	18,1	100	114,6	16,2	50	60	90,5	72,7
3	Kao	100	90,8	75,0	98,0	100	23,1	100	177,0	42,8	100	103,1	105,9	93,0
4	Kao Barat	100	78,9	93,6	98,4	100	13,6	100	118,1	37,1	100	53,6	52,1	78,8
5	Kao Utara	100	55,7	92,7	94,8	100	9,5	100	98,6	14,6	100	70,5	106,7	78,6
6	Tobelo Selatan	95,0	92,6	93,6	96,7	100	19,5	100	7,1	12,6	100	139,6	81,9	78,2
7	Tobelo Barat	77,3	73,9	93,4	95,0	100	17,7	100	16,8	16,5	100	50,0	116,5	71,4
8	Tobelo Timur	80,7	85,2	89,1	96,1	100	14,9	100	179,1	15,9	100	266,7	31,8	96,6
9	Tobelo	98,8	92,5	97,8	97,0	100	20,6	100	20,0	6,1	80	103,8	146,5	80,3
10	Tobelo Tengah	90,5	92,0	100,9	99,4	100	12,6	100	98,5	38,8	100	58,3	78,5	80,8
11	Tobelo Utara	94,1	90,2	92,1	99,3	100	32,7	100	54,4	33,4	100	42,5	83,4	76,8
12	Galela	97,6	90,7	89,9	98,4	100	11,5	100	53,4	32,2	100	57,1	70,2	75,1
13	Galela Selatan	96,9	88,2	97,9	98,6	100	13,7	100	34,2	4,9	0	46,4	119,9	66,7
14	Galela Barat	94,2	77,8	76,2	95,8	100	7,1	100	24,5	3,6	100	65,0	81,3	68,8
15	Galela Utara	98,1	91,5	93,9	98,7	100	14,1	100	94,5	37,5	100	57,1	71,5	79,7
16	Loloda Utara (Dorume)	94,2	78,6	91,5	95,5	100	18,3	100	115,8	12,5	100	65,0	69,5	78,4
	Loloda Utara (Supu)	95,1	75,5	91,5	97,5	100	41,0	100	148,5	36,4	100	58,3	129,5	89,4

BAPPEDA HALUT

No	Kecamatan	Persentase Pemenuhan Menurut Jenis SPM												Rerata
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
17	Loloda Kepulauan	93	82,2	85,7	98,7	100	15,9	100	89,2	49,8	100	62,5	75,2	79,4
Halmahera Utara		**95,0**	**79,9**	**86,2**	**97,4**	**100**	**21,4**	**100**	**91,7**	**25,4**	**91,1**	**77,9**	**91,6**	**79,8**

[A]Pelayanan kesehatan ibu hamil; **[B]**Pelayanan kesehatan ibu bersalin; **[C]**Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; **[D]**Pelayanan kesehatan balita; **[E]**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; **[F]**Pelayanan kesehatan pada usia produktif; **[G]**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; **[H]**Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; **[I]**Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; **[J]**Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; **[K]**Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; **[L]**Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024

B11) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang disenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Sampai dengan tahun 2022 telah tersedia 2 (dua) Rumah Sakit di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu RSUD Tobelo yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dan RS RS Bethesda GMIH Tobelo yang dimiliki lembaga swasta, serta 8 (delapan) Poliklinik yang tersebar di lima kecamatan. Hingga tahun 2022 di Kabupaten Halmahera Utara telah terdapat 19 Puskesmas berserta jaringannya meliputi 46 Puskesmas Pembantu (Pustu), dan 54 Pos Bersalin Desa (Polindes). Tercatat 8 Puskesmas atau 42,10 persen memiliki fasilitas Rawat Inap, serta 14 Puskesmas atau 73,7 persennya sudah terakreditasi. Perkembangan jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun terakhir tersaji dalam Tabel 2.45, serta sebaran fasilitas pelayanan kesehatan menurut kecamatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2.45. Perkembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	2
Jumlah Tempat Tidur di seluruh RS	-	208	210	210	210
Rasio Daya Tampung RS per satuan penduduk (Standar 1 TT : 1000 Penduduk)	-	1 : 998	1:956	1:958	1:958
Status Akreditasi RSUD	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
Jumlah Puskesmas	19	19	19	19	19
Jumlah Puskesmas Terakreditasi	14	14	14	14	14
Persentase Puskesmas Terakreditasi	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7

BAPPEDA HALUT

Jumlah Puskesmas Rawat Inap	9	9	9	9	9
Persentase Puskesmas Rawat Inap	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4
Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1	1	1	1	1
Persentase Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Kesehatan Tradisional	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Jumlah Poliklinik	8	8	8	9	9
Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	46	46	46	46	46
Jumlah Polindes	54	54	54	54	54

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024

Tabel 2.46. Sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menuurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

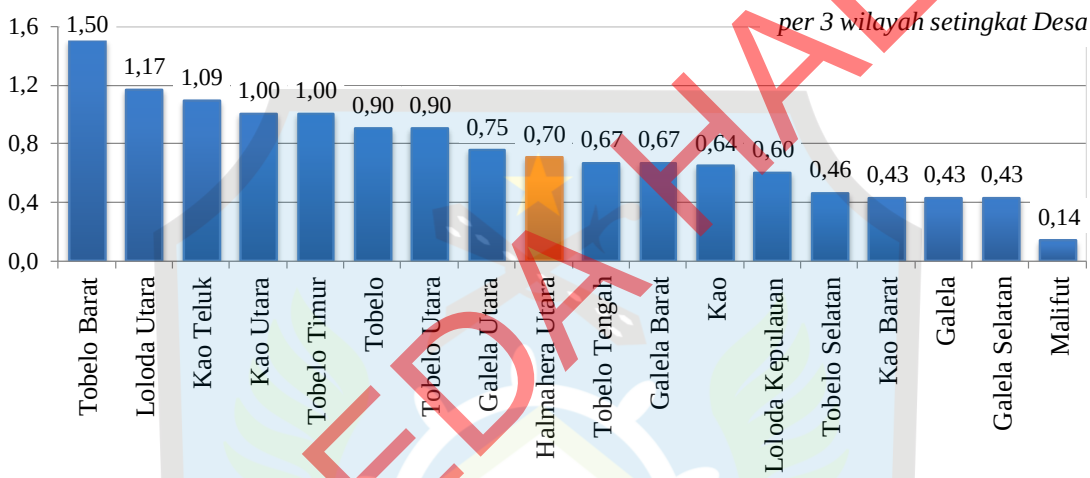
No	Kecamatan	RS	PKM	PKM-RI	Poliklinik	Pustu	Polindes
1	Malifut	-	1	-	-	1	1
2	Kao Teluk	-	2	1	-	4	4
3	Kao	-	1	1	1	3	3
4	Kao Barat	-	1	1	-	3	2
5	Kao Utara	-	1	-	-	4	3
6	Tobelo Selatan	-	1	-	-	2	3
7	Tobelo Barat	-	1	-	1	3	2
8	Tobelo Timur	-	1	-	-	2	1
9	Tobelo	2	1	1	4	3	1
10	Tobelo Tengah	-	1	-	1	2	7
11	Tobelo Utara	-	1	-	-	3	7
12	Galela	-	1	1	-	1	5
13	Galela Selatan	-	1	-	-	1	4
14	Galela Barat	-	1	1	-	2	1
15	Galela Utara	-	1	1	1	3	3
16	Loloda Utara	-	2	1	1	7	7
17	Loloda Kepulauan	-	1	1	-	2	-
Halmahera Utara		**2**	**19**	**9**	**9**	**46**	**54**

PKM (Puskesmas); PKM-RI (Puskesmas Rawat Inap)
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024

Merujuk Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, bahwa fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas di wilayah kerjanya, yang didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Pustu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan. Dari acuan ini maka rasio Pustu per 3 wilayah setingkat desa di

BAPPEDA HALUT

Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 0,71. Tobelo Barat merupakan kecamatan dengan rasio Pustu per 3 wilayah setingkat desa tertinggi, yaitu sebesar 1,50 disusul Kecamatan Kao Utara sebesar 1,25, Kecamatan Loloda Utara sebesar 1,17 dan Kecamatan Tobelo Timur sebesar 1,00. Kecamatan dengan rasio Pustu per 3 wilayah setingkat desa terendah adalah Malifut, yaitu sebesar 0,14 dan Kecamatan Galela Selatan sebesar 0,43. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.

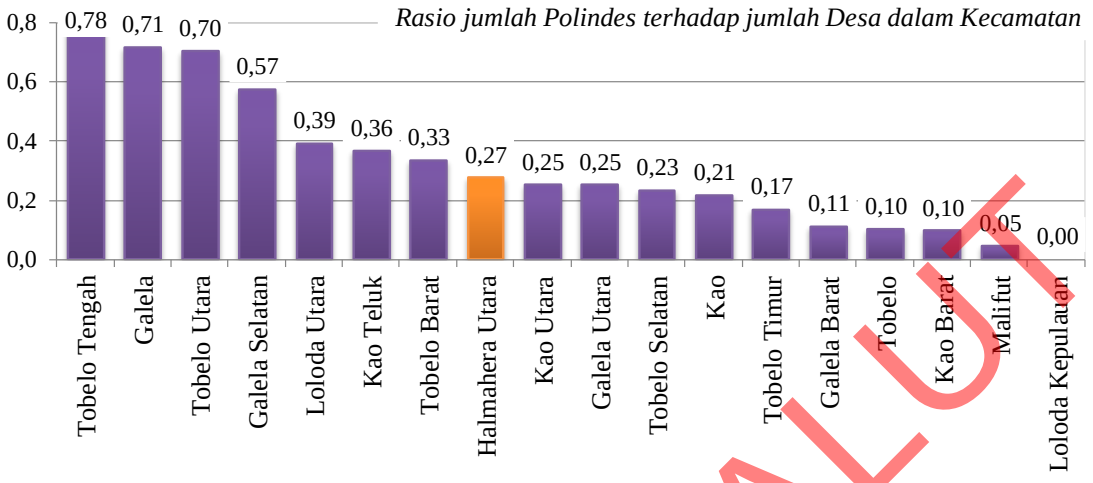


Gambar 2.36 Rasio Pustu per Satuan Wilayah Setingkat Desa Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024, diolah

Adapun Polindes, merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB yang mana tempat dan lokasinya berada di desa. Polindes hanya dapat dirintis di desa yang telah mempunyai bidan yang tinggal di desa tersebut. Polindes dalam pelaksanaan pelayanannya sangat tergantung pada keberadaan bidan. Hal ini karena pelayanan di polindes merupakan pelayanan profesi kebidanan. Sebagaimana halnya Pustu, jumlah Polindes di Kabupaten Halmahera Utara tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir, Grafik berikut menyajikan persentase desa yang memiliki Polindes menurut kecamatan tahun 2023.

BAPPEDA HALUT



Gambar 2.37 Rasio Ketersediaan Polindes
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024, diolah

B12) Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Peran tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam implementasi sistem kesehatan. Di sisi lain tantangan seperti rendahnya komptensi menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan sistem kesehatan. SDMK adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Perkembangan keadaan tenaga kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.47. Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Dokter					
Dokter Umum	50	53	60	55	55
Dokter Spesialis	16	16	16	19	19
Dokter Gigi	8	7	9	10	10
Jumlah	**74**	**76**	**85**	**84**	**84**
Bukan Dokter					
Perawat	90	367	389	215	215
Bidan	171	219	349	405	405
Tenaga Farmasi	n/a	37	47	21	21
Tenaga Kesmas	n/a	51	63	57	57

BAPPEDA HALUT

Tenaga Gizi	n/a	41	44	28	28
Tenaga Tekmed	n/a	1	1	1	1
Tenaga Kesling	n/a	24	24	22	22
ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik)	n/a	40	40	19	19
Jumlah	**261**	**780**	**957**	**768**	**768**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara, 2024

Merujuk pada standar WHO (World Health Organisation) dimana rasio ideal 1 (satu) dokter melayani 2.500 orang, maka rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 sebesar 1 : 2.395 atau telah di bawah (lebih baik) dari target minimum yang disyaratkan WHO. Para tenaga kesehatan sebagaimana tersaji dalam tabel tersebar di RSUD dan 19 puskesmas.

B13) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Upaya pengendalian penyakit penting untuk dilakukan dengan menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Kasus penyakit yang dominan di Kabupaten Halmahara Utara adalah Diare dan TBC. Di beberapa kecamatan masih ditemukan kasus penyakit Malaria. Tabel berikut menyajikan data jumlah kasus penyakit di Kabupaten Halmahera Utara sepanjang tahun 2023, serta sebaran menurut kecamatan untuk tahun 2023.

Tabel 2.48. Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Penyakit dan Jumlah Kasus Tahun 2023						
		Malaria	Kusta	HIV/AIDS (Baru)	HIV/AIDS (Penderita)	IMS	Diare	TBC
1	Malifut	0	1	3	15	0	71	20
2	Kao Teluk (Bobaneigo)	1	0	2	4	0	39	12
3	Kao Teluk (Dum-Dum)	0	2	2	4	0	43	12
4	Kao	6	2	15	31	4	200	33
5	Kao Barat	0	2	3	16	0	73	15
6	Kao Utara	0	32	4	16	0	86	31
7	Tobelo Selatan	0	7	8	35	0	261	40
8	Tobelo Barat	0	6	3	26	0	55	12
9	Tobelo Timur	2	4	3	11	0	50	16
10	Tobelo	1	26	26	147	8	108	81

BAPPEDA HALUT

11	Tobelo Tengah	1	17	6	47	0	245	28
12	Tobelo Utara	0	10	5	16	0	180	17
13	Galela	0	14	8	24	0	128	16
14	Galela Selatan	0	9	3	8	1	46	13
15	Galela Barat	0	13	11	28	0	90	26
16	Galela Utara	0	9	1	9	19	214	16
17	Loloda Utara (Dorume)	1	3	3	5	0	71	13
18	Loloda Utara (Supu)	0	0	2	5	0	39	14
19	Loloda Kepulauan	0	4	2	7	0	92	15
20	Luar Wilayah/ RSUD Tobelo	11	0	0	0	0	0	75
Halmahera Utara		23	161	110	454	38	2091	505

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara, 2024

B14) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita. Pada tahun 2022, jumlah Posyandu di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 280 Posyandu, atau berkurang sebanyak 12 Posyandu dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 292. Namun berkurangnya jumlah posyandu telah meningkatkan keaktifan posyandu, dimana pada tahun 2021 posyandu aktif hanya 73,63 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 100 persen. Tabel berikut menyajikan perkembangan angka persentase posyandu aktif menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2022-2023.

Tabel 2.49. Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	2022			2023		
		Jumlah Posyandu	Posyandu Aktif	Persen Proyandu Aktif	Jumlah Posyandu	Posyandu Aktif	Persen Proyandu Aktif
1	Malifut	22	22	100,0	22	22	100,0
2	Kao Teluk	15	15	100,0	15	15	100,0
3	Kao	18	18	100,0	18	18	100,0
4	Kao Barat	23	23	100,0	23	23	100,0
5	Kao Utara	18	18	100,0	18	18	100,0
6	Tobelo Selatan	19	19	100,0	19	19	100,0
7	Tobelo Barat	13	13	100,0	13	13	100,0

BAPPEDA HALUT

8	Tobelo Timur	12	12	100,0	12	12	100,0
9	Tobelo	35	35	100,0	35	35	100,0
10	Tobelo Tengah	21	21	100,0	21	21	100,0
11	Tobelo Utara	10	10	100,0	10	10	100,0
12	Galela	9	9	100,0	9	9	100,0
13	Galela Selatan	10	10	100,0	10	10	100,0
14	Galela Barat	13	13	100,0	13	13	100,0
15	Galela Utara	12	12	100,0	12	12	100,0
16	Loloda Utara	18	18	100,0	18	18	100,0
17	Loloda Kepulauan	12	12	100,0	12	12	100,0
Halmahera Utara		**280**	**280**	**100,0**	**280**	**280**	**100,0**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024

Dalam mengendalikan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) yang semakin meningkat, pemerintah telah mengembangkan model Pengendalian PTM berbasis masyarakat, yaitu melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM. Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Faktor risiko PTM meliputi merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktifitas fisik, obesitas, stres, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol serta menindak lanjuti secara dini faktor risiko yang ditemukan melalui konseling kesehatan dan segera merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Kelompok PTM Utama adalah diabetes melitus (DM), kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah (PJPD), penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Tabel berikut menyajikan perkembangan Posbindu PTM menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2022-2023.

Tabel 2.50. Posbindu PTM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa	2022		2023	
			Jumlah Posbindu	Proporsi thd Desa (persen)	Jumlah Posbindu	Proporsi thd Desa (persen)
1	Malifut	22	22	100,0	22	100,0
2	Kao Teluk	11	11	100,0	1	9,09
3	Kao	14	14	100,0	14	100,0
4	Kao Barat	21	21	100,0	21	100,0
5	Kao Utara	12	12	100,0	12	100,0
6	Tobelo Selatan	13	13	100,0	13	100,0

BAPPEDA HALUT

7	Tobelo Barat	5	6	100,0	6	120,0
8	Tobelo Timur	6	6	100,0	7	116,67
9	Tobelo	10	10	100,0	12	120,0
10	Tobelo Tengah	9	9	100,0	22	244,44
11	Tobelo Utara	10	10	100,0	10	100,0
12	Galela	7	7	100,0	9	128,57
13	Galela Selatan	7	7	100,0	7	100,0
14	Galela Barat	9	9	100,0	9	100,0
15	Galela Utara	12	12	100,0	12	100,0
16	Loloda Utara	18	18	100,0	10	55,56
17	Loloda Kepulauan	10	10	100,0	0	100,0
	Halmahera Utara	**196**	**197**	**100,0**	**187**	**95,4**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2024

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum mendukung kelancaran aktifitas sosial masyarakat serta produktivitas sektor ekonomi lainnya. Ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Infrastruktur pekerjaan umum dalam kaitannya dengan sektor konstruksi juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah: (1) Sumber Daya Air (SDA) (Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota; Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; 2) Air Minum (Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota); 3) Persampahan (Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota); 4) Air Limbah (Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota); 5) Drainase (Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota); 6) Permukiman (Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota); 7) Bangunan Gedung (Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung); 8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota); 9) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota

BAPPEDA HALUT

(perencanaan, pembangunan, peningkatan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan); 10) Jasa Konstruksi (Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil); Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi); serta 11) Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.

Gambaran kondisi capaian kinerja pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

C1) Sumber Daya Air (SDA)

Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di Kabupaten Halmahera Utara belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk menunjang produksi pangan, serta infrastruktur pengendali banjir dan pencegah bencana (termasuk pengaman pantai) di wilayah sungai kewenangan kabupaten. Perkembangan kinerja pengembangan infrastruktur SDA dalam lima tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.51. Kinerja Pengembangan Sumber Daya Air Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1a	Total Luas Daerah Irigasi Kewengan Kabupaten (Ha)	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
1b	Luas Daerah Irigasi yang telah dialiri air melalui jaringan irigasi (Ha)	1.324,3	1.324,3	1.977,0	2.151,6	2.384,9
1c	**Rasio luas Daerah Irigasi Kewengan Kabupaten yang telah terlayani jaringan irigasi (persen)**	**44,14%**	**44,14%**	**65,90%**	**71,72%**	**79,50%**
1d	Panjang Jaringan Irigasi sesuai kewenangan yang dibangun (meter) –kumulatif	32.410,1	35.928,1	36.984,1	37.217,4	32.410,1
2a	Total Panjang Infrastruktur	13.720,0	16.723,1	24.093,5	27.107,8	28.974,1
	Pengendali banjir/Pengaman Pantai (Talud/ Bronjong) yang Terbangun (meter – kumulatif)					

BAPPEDA HALUT

2b	Kebutuhan pembangunan Infrastruktur Pengendali banjir/ Pengaman Pantai (sesuai Master Plan) (meter)	180.829,0	180.829,0	180.829,0	180.829,0	180.829,0
2c	**Proporsi panjang infrastruktur pengendali banjir/pengaman pantai yang terbangun (persen)**	**7,59%**	**9,25%**	**13,32%**	**14,99%**	**16,02%**
3a	Panjang saluran Drainase yang terbangun (meter – kumulatif)	35.917,4	35.917,4	35.987,4	40.608,6	45.033,0
3b	Panjang saluran Drainase yang terbangun dalam kondisi baik (meter – kumulatif)	35.917,4	35.917,4	35.987,4	40.608,6	45.033,0
3c	**Proporsi panjang saluran Drainase yang terbangun dalam kondisi baik (persen)**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Sumber: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara, 2024

C2) Air Minum dan Sanitasi

Air minum dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. SDGs menyerukan pada negara-negara untuk "Mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi" yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Air minum dan sanitasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap ada air minum atau air bersih maka pasti akan ada air limbah. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen yang sangat penting untuk menunjang kesehatan manusia. Kurangnya memadainya akses pada infrastruktur air dan sanitasi juga memiliki efek kompleks pada pola konsumsi, yang secara signifikan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut, proporsi Rumah Tangga (RT) memiliki akses terhadap sumber air minum bersih dan sanitasi layak di seluruh kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 belum mencapai 100 persen.

Tabel 2.52. Akses Rumah Tangga pada Sumber Air Minum Bersih dan Sanitasi Layak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

No	Kecamatan	RT	Air Minum		Sanitasi	
			RT Mengakses	Proporsi Mengakses	RT Mengakses	Proporsi Mengakses
1	Malifut	2.730	689	25,22%	371	13,59%
2	Kao Teluk	1.959	1.948	99,47%	1.006	51,38%
3	Kao	2.775	2.483	89,47%	1.502	54,12%
4	Kao Barat	1.899	1.520	80,05%	365	19,24%
5	Kao Utara	1.366	1.226	89,77%	1.366	100,00%
6	Tobelo Selatan	6.642	6.153	92,64%	6.511	98,02%

BAPPEDA HALUT

7	Tobelo Barat	3.190	3.215	100,78%	3.190	100,00%
8	Tobelo Timur	2.309	1.955	84,66%	2.432	105,34%
9	Tobelo	3.070	3.059	99,63%	2.617	85,26%
10	Tobelo Tengah	1.436	1.336	93,02%	1.436	100,00%
11	Tobelo Utara	1.232	994	80,72%	1.087	88,27%
12	Galela	1.802	1.962	108,87%	1.763	97,81%
13	Galela Selatan	1.981	1.991	100,51%	173	8,71%
14	Galela Barat	1.786	1.336	74,82%	1.317	73,74%
15	Galela Utara	2.528	2.538	100,40%	1.673	66,18%
16	Loloda Utara	2.380	2.390	100,40%	645	27,09%
17	Loloda Kepulauan	1.640	1.316	80,21%	382	23,29%
Halmahera Utara		**40.725**	**37.117**	**91,14%**	**27,836**	**68,35%**

Sumber: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara, 2024

C3) Penyelenggaraan Jalan

Jaringan jalan merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah, terutama untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Panjang Jalan Kabupaten seluruhnya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 600/210/HU/2018 tanggal 13 Juli 2018 yaitu 301,20 Km. Pada tahun 2021, proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap fungsional dan memenuhi persyaratan teknis (kondisi baik dan sedang) adalah 205,4 Km atau sebesar 68,2 persen dari total Panjang Jalan Kabupaten.

Disamping jalan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Utara juga membangun Jalan lingkungan yang tersebar di Kecamatan Kao Teluk, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah dan Tobelo dengan total panjang 7,87 Km. Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Utara juga melaksanakan Pembangunan Jalan Ruas Dokulamo – Salimuli – Ngajam – Apulea yang berstatus Jalan Provinsi berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Bupati Halmahera Utara dengan DPRD Kabupaten Halmahera Utara nomor 613.34/134.b dan 620/28 tentang Pembiayaan Jalan Secara Tahun Jamak (Multy Years) dengan target penyelesaian sampai dengan tahun 2020, serta disetujui oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Surat Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Nomor 620/001/DPUPR-MU tanggal 2 Januari 2018 perihal Persetujuan Penanganan Ruas Jalan. Sampai tahun 2019 pembangunan jalan Ruas Dokulamo – Salimuli – Ngajam – Apulea telah mencapai 69,53 Km atau 79,43 persen dari total panjang jalan 87,53 Km yang direncanakan.

Dalam rangka meningkatkan konektifitas antar wilayah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga terus berupaya membangun jembatan, terutama di ruas jalan

BAPPEDA HALUT

kabupaten yang menjadi kewenangan. Total kebutuhan pembangunan jembatan di Kabupaten Halmahera Utara adalah sebanyak 99 buah dengan total panjang 1.265,26 meter. Jumlah jembatan telah terbangun sampai dengan tahun 2021 adalah 89 buah, dimana 76 buah atau 85,4 persen diantaranya dalam kondisi baik. Adapun jumlah jembatan belum dilakukan pembangunan sebanyak 10 buah jembatan atau 10,1 persen dari jumlah keseluruhan kebutuhan jembatan. Untuk mempertahankan kondisi jembatan, Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Utara terus melakukan pemeliharaan secara rutin. Pada tahun 2021, proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 80,76 persen atau mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kinerja penyelenggaraan jalan di Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.53. Kinerja Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Klasifikasi/Kondisi	2019	2020	2021	2022	2023
Infrastruktur Jalan					
Jenis Permukaan Jalan					
Asphalt/Penetrasi Macadam (Km)	177,41	188,94	195,498	198,999	202,998
Telford/Kerikil (Km)	102,83	100,803	94,201	91,732	87,733
Tanah (Km)	20,96	11,458	11,502	10,47	10,47
Total (Km)	**301,2**	**301,201**	**301,201**	**301,201**	**301,201**
Proporsi jalan dengan jenis permukaan tanah (persen)	6,96	3,80	3,82	3,48	3,48
Kondisi Jalan					
Baik (Km)	156,48	70,371	154,925	157,042	161,041
Sedang (Km)	75,96	133,148	20,785	19,084	19,084
Rusak Ringan (Km)	33,92	77,851	44,583	35,978	33,518
Rusak Berat (Km)	34,84	19,831	80,90796	89,097	87,558
Total (Km)	**301,2**	**301,201**	**301,2009**	**301,201**	**301,201**
Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap (persen)	77,17	67,57	58,34	58,47	59,80
Kondisi Jembatan					
Baik (m)	853,02	895,32	895,32	895,32	895,32
Rusak Ringan (m)	53,1	124,8	124,8	124,8	124,8
Rusak Berat (m)	86,14	86,14	86,14	86,14	86,14
Total (m)	**992,26**	**1.106,26**	**1.106,26**	**1.106,26**	**1.106,26**
Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik (persen)	85,97	80,93	80,93	80,93	80,93

BAPPEDA HALUT

Klasifikasi/Kondisi	2019	2020	2021	2022	2023
Infrastruktur Jembatan					
Total Kebutuhan Jembatan di Ruas Jalan Kabupaten (Buah)	99	99	99	99	99
Total Jembatan yang telah dibangun di Ruas Jalan Kabupaten (Buah)	81	82	89	89	89
Proporsi jembatan yang sudah terbangun di ruas jalan kabupaten (persen)	81,8	82,8	89,9	89,9	89,9
Jumlah Jembatan dalam kondisi baik (Buah)	77	78	76	76	76
Proporsi jembatan di ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik (persen)	95,1	95,1	85,4	85,4	85,4

Sumber: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara, 2024

C4) Jasa Konstruksi

Menindaklanjuti ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur sub urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Utara telah membangun Sistem Informasi/Data Base Jasa Konstruksi (SIJAKON). Sistem yang dikembangkan secara bertahap ini memuat seluruh layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten menyerupai fungsi SIPJAKI. Dibandingkan tahun 2018 dimana SIJAKON baru memuat data tenaga kerja jasa konstruksi, sistem ini telah terupdate di tahun 2019 melalui kegiatan sertifikasi tenaga terampil. Dinas PUPR juga senantiasa terhubung dengan 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI), yang meliputi: 1) IUJK yang terupdate secara berkala; 2) Data badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala; 3) Data tenaga kerja jasa konstruksi terupdate secara berkala; 4) Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya; 5) Tanda daftar usaha perseorangan yang terupdate secara berkala; 6) Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 (enam) bulan; dan 7) Profil tim pembina jasa konstruksi di setiap kabupaten/kota. Kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.54. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
SIPJAKI (Ada/Tidak),	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
SIPJAKI (Update/Tidak)	Update	Tidak	Tidak	Update	Update
Jumlah paket pekerjaan proyek konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten	45	80	112	304	183
Jumlah paket pekerjaan proyek konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten yang terjadi kasus kecelakaan konstruksi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara, 2024

C5) Penataan Ruang

Sampai dengan tahun 2021, realisasi kinerja meningkatnya luas kawasan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah sebesar 25 persen. Perhitungan kesesuaian dilakukan berdasarkan RDTR yang telah disusun pada tahun 2018 sejalan dengan dilakukannya review terhadap RTRW. Pelayanan Dasar Bidang Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik bidang penataan ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Informasi Penataan Ruang diukur berdasarkan ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Sampai tahun 2019 penyediaan informasi penataan ruang kabupaten di Halmahera Utara khususnya ketersediaan RDTR baru mencapai 17,65 persen dari 30 persen yang ditargetkan, melalui kegiatan penyediaan dokumen RDTR yang meliputi RDTR Kawasan Perkotaan Tobelo, Galela dan Kao, yang kesemuanya masih berupa konsep (draft). Sedangkan untuk RDTR Kawasan Perkotaan Tobelo Selatan, Malifut dan Kao Barat baru tersedia dalam bentuk Peta Dasar.

Merujuk UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terdapat klausul yang mewajibkan penyediaan 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan, terdiri dari 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. RTH publik sebagaimana dimaksud berupa hutan kota, sempadan jalan, makam, sempadan sungai, sempadan jaringan listrik tegangan tinggi (sutet), sempadan pantai atau sempadan mata air. Pada tahun 2019, telah tersusun RTH Kawasan Perkotaan Tobelo, Galela dan Kao, namun masih berupa draft. Kinerja penyelenggaraan penataan ruang di

BAPPEDA HALUT

Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.55. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
RTRW yang telah diPerdakan (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Jumlah Materi Teknis RDTR yang harus disusun/disediakan	17	17	17	17	17
Jumlah Materi Teknis RDTR yang sudah selesai disusun	3	3	3	3	4
Persentase Materi Teknis RDTR yang sudah selesai disusun	17,65	17,65	17,65	17,65	23,52

Sumber: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara, 2024

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah (papan) merupakan kebutuhan primer manusia. Sebagaimana Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Jaminan kesejahteraan bagi setiap warganya terhadap kebutuhan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah yang wajib dipenuhi. Regulasi tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat (*adequate shelter for all*). Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu kabupaten dari 158 kabupaten di Indonesia yang mempunyai lokasi kumuh diperkotaan. Daerah kumuh perkotaan terdapat di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Tobelo dan Tobelo Tengah (Desa Rawajaya, Gosoma, Gamsungi, Gura, MKCM, Wosia, Tanjung Niara, Pitu, Kali Upa, dan Upa).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah: 1) Perumahan (Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota; Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung); 2) Kawasan Permukiman (Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

BAPPEDA HALUT

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha); 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota); 4) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan; dan 5) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil. Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2020, yang meliputi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan, penyediaan rumah layak huni, penataaan kawasan permukiman, serta peningkatan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU), sebagaimana tersaji dalam Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.56. Kinerja Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
A	**Standar Pelayanan Minimal**				
1a	Jumlah rumah korban bencana kabupaten yang harus ditangani pada tahun berkenaan (unit)	795	130	250	670
1b	Jumlah rumah korban bencana kabupaten yang sudah ditangani pada tahun berkenaan (unit)		660	234	664
	Persentase rumah korban bencana kabupaten yang tertangani		507.69	93,61	99,10-
2a	Jumlah rumah korban relokasi kabupaten yang harus ditangani pada tahun berkenaan (unit)	407	n/a	n/a	n/a
2b	Jumlah rumah korban bencana kabupaten yang sudah ditangani pada tahun berkenaan (unit)	94	n/a	n/a	n/a
	Persentase rumah korban relokasi kabupaten yang tertangani	23,10			
B	**Perumahan Rakyat**				
1	Jumlah Rumah (seluruhnya) (unit)	47.748	47.853	48.003	48.632
2	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	39.001	39.054	39.204	39.833
3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	8.747	8.642	8.492	7.863
	Rasio Rumah Layak Huni (persen)	81,68	81,96	81,96	81,96
4	Jumlah Rumah Tangga MBR (KK)	20.016	18.755	18.755	18.755
5	Jumlah Rumah Tangga MBR yang menempati Rumah Layak Huni (KK)	1.261	1.393	1.393	1.393
	Persentase Rumah Tangga MBR yang Menempati Rumah Layak Huni	6,30	7,43	7,43	7,43

BAPPEDA HALUT

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
C	**Kawasan Permukiman**				
1	Total luas kawasan kumuh Perkotaan (Ha) (Sesuai SK)	1.143	1.143	1.143	1.143
2	Total luas kawasan kumuh Perkotaan yang telah ditangani (Ha-kumulatif)	43,12	43,12	43,12	43,12
	Rasio luas kawasan kumuh Perkotaan yang telah ditangani (persen)	3,77	3,77	3,77	3,77
D	**Prasarana Sarana Utilititas (PSU)**				
1	Jumlah satuan permukiman setingkat Desa terfasilitasi peningkatan PSU (kumulatif)	12	n/a	n/a	n/a
	Persentase satuan permukiman setingkat Desa terfasilitasi peningkatan PSU	6,03	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Halmahera Utara, 2024

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah: 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; dan Pembinaan PPNS kabupaten/ kota); 2) Penanggulangan bencana kabupaten/kota; dan 3) Kebakaran (Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Investigasi kejadian kebakaran; dan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran). Capaian kinerja pembangunan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut.

E1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran

Pelayanan Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran di Kabupaten Halmahera Utara diselenggarakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara No. 8 Tahun 2016. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Satpol PP Kabupaten Halmahera Utara hingga tahun 2023 telah diperkuat oleh personil Polisi PP sebanyak

BAPPEDA HALUT

286 orang, bertambah 10 orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 276 orang, serta personil Linmas sebanyak 1.001 orang. Jumlah personil Linmas berkurang 148 orang dari sebelumnya 1.149 orang.

Dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan urusan, Satpol PP pada tahun 2023 telah memiliki PPNS sebanyak 13 orang, bertambah 4 orang dari empat tahun sebelumnya yang konstan berjumlah 9 orang. PPNS tersebut mengikuti pendidikan dan latihan di Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri Megamendung Bogor. Dari 6 orang personil PPNS tersebut telah berkurang sehingga personil PPNS hanya tersisa 3 orang pada tahun 2020. Dengan dukungan personil yang ada, dari 33 laporan pengaduan ganguan ketenteraman dan ketertibum umum yang diterima sepanjang taun 2020 dapat ditindaklanjuti/diselesaikan seluruhnya.

Hingga tahun 2023 Patroli Gabungan bersama TNI dan POLRI rutin dilaksanakan selama 1 tahun sebanyak 12 kali dan penegakan Perda sebanyak 12 perda, serta Pelatihan 1.001 Anggota Linmas Tingkat Kabupaten. Adapun cakupan Pelayanan bencana kebakaran selama 1 tahun di 2023 sebanyak 16 kasus yang terdiri dari 15 kasus dalam daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan 1 kasus terjadi di luar WMK. Rata-rata Tingkat waktu tanggap (*response time*) dalam WMK selalu sekitar 15 menit.

E2) Penanggulangan Bencana

Pelayanan Sub urusan Bencana di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara. BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan fungsi: a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penangganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; b) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara berencana, terpadu dan menyeluruh; c) Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana; serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam membangun sistem kesiapsiagaan bencana, Pemerintah Kabupaten

BAPPEDA HALUT

Halmahera Utara telah memiliki Perda tentang Penanggulangan Bencana. Namun peraturan tersebut belum didukung dengan aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan penanggulangan di Kabupaten Halmahera Utara. Kondisi ini menyebabkan Perda tentang Penanggulangan Bencana belum dapat digunakan sebagai rujukan perencanaan dan penganggaran dalam penyelengaraan penanggulangan bencana. Kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara sudah terlaksana, seperti Pembentukan Desa Tangguh Bencana, serta Pemasangan jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara rutin, sehingga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan.

Kabupaten Halmahera Utara juga belum memiliki mekanisme bersama lintas lembaga dalam menjalankan peran bagi-guna data dan informasi bencana. Kondisi ini mengakibatkan data dan informasi kebencanaan belum dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana. Kabupaten Halmahera Utara juga belum memiliki Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana dengan fasilitas yang memadai mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis. Meskipun demikian, persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB), maupun persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dapat dipertahankan pada angka 100 persen.

F. Sosial

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Sosial adalah: 1) Pemberdayaan Sosial (Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpecil/KAT; Penerbitan izin pengumpulan sumbangan; Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial; Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota;
2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; 3) Rehabilitasi Sosial; 3) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pemeliharaan anak-anak terlantar; Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/ kota); 4) Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota; Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota); dan 5) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

BAPPEDA HALUT

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara, maka Dinas Sosial menangani 3 (tiga) sub urusan yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir Miskin. Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, karang taruna, dan lansia. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, dan lansia rawan sosial.

Capaian kinerja pembangunan bidang Sosial Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.57. Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	**Rehabilitasi Sosial**					
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis **yang harus dipenuhi** kebutuhan dasarnya di luar panti	261	258	255	255	255
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis **yang sudah ditangani atau dipenuhi** kebutuhan dasarnya di luar panti	30	25	350	350	0
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis **yang sudah ditangani atau dipenuhi** kebutuhan dasarnya di luar panti	11,49	9,69	100,0	100,0	0
B	**Penanganan Bencana**					
1	Jumlah korban bencana alam dan sosial **yang harus dipenuhi** kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten (KK)	363	127	310	310	
2	Jumlah korban bencana alam dan sosial **yang ditangani/terpenuhi** kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten (KK)	363	127	310	310	
3	Persentase korban bencana alam dan sosial **yang ditangani/terpenuhi** kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten (KK)	100	100	100	100	
C	**Pemberdayaan Sosial**					

BAPPEDA HALUT

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang sudah dikembangkan atau diberdayakan	4	4	4	5	5
2	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang sudah dikembangkan atau diberdayakan (kelompok)	30	30	30	30	30
D	**Perlindungan Sosial**					
1	Jumlah penerima PKH	7.229	7.071	6.953	6.953	5.710
2	Jumlah PMKS (tidak termasuk penerima PKH)	9.031	7.909	5.249	5.249	
3	Jumlah PMKS yang menerima bantuan	9.031	7.909	5.249	5.249	
4	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Sosial Kab. Halmahera Utara, 2024

Catatan: PSKS yang sudah dikembangkan/diberdayakan meliputi: Taruna Siaga Bencana (Tagana), Panti Sosial Pemerintah (PSPem), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pendamping PKH.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan, yaitu Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Capaian kinerja pada urusan-urusan wajib yang tidak termasuk pelayanan dasar ini diuraikan sebagai berikut.

A. Tenaga Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM), yang tentunya termasuk angkatan kerja kompeten dan produktif, merupakan modal dasar utama suatu bangsa, sehingga kualitas SDM angkatan kerja akan menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Angkatan kerja yang bekerja, yang berkategori unggul, akan mengerjakan pekerjaannya dengan produktif, sehingga usaha yang dikerjakannya juga akan produktif, baik usaha mandiri di sektor informal ataupun usaha di sektor formal di perusahaan tempatnya bekerja bersama pekerja lainnya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Tenaga Kerja meliputi sub urusan: 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas

BAPPEDA HALUT

Tenaga Kerja (Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta; Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil; dan Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota); 2) Penempatan tenaga kerja (Pelayanan antar kerja; Penerbitan izin LPTKS; Pengelolaan informasi pasar kerja; Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan); Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; dan 3) Hubungan industrial (Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota. Gambaran kinerja pembangunan bidang Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.58. Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	**Pelatihan Tenaga Kerja**					
1	Jumlah Peserta yang difasilitasi Pelatihan Kerja (orang)	25	55	18	69	79
	Persentase peningkatan peserta terfasilitasi pelatihan kerja		120,0	-67,3	283,3	14,5
B	**Penempatan Tenaga Kerja**					
1	Jumlah Pencari Kerja (orang)	2.818	3.380	4.165	3.828	2.374
2	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	597	2.812	3596	3.138	692
	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	**21,2**	**83,2**	**86,3**	**82,0**	**29,1**
3	Jumlah TKI asal Halmahera Utara yang bekerja di luar negeri (orang)	11	11	0	0	2
4	Jumlah Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memiliki kerja sama dengan Pemda	3	3	3	3	3
C	**Hubungan Industrial**					
1	Jumlah Kasus Perselisihan Industrial	17	17	21	10	12
2	Jumlah Kasus Perselisihan Industrial yang diselesaikan	17	17	18	8	12
	Persentase penyelesaian Kasus Perselisihan Industrial	**100,0**	**100,0**	**85,7**	**80,0**	**100,0**
3	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	1	13	15	43	44

BAPPEDA HALUT

Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Halmahera Utara, 2024

Dari tabel, jumlah pencari kerja di Kabupaten Halmahera Utara terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 jumlah pencari kerja sebanyak 2.374 orang, dimana hanya 29,1 persen yang memperoleh penempatan kerja. Peningkatan yang terjadi setiap tahun dimungkinkan karena tidak cukup terserapnya pencari kerja pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dikonfirmasi melalui jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan tidak cukup memadai, dimana persentasenya dalam empat tahun cenderung menurun. Dari 12 laporan kasus perselisihan yang terjadi sepanjang tahun 2023 dapat diselesaikan seluruhnya, atau lebih baik dari tahun sebelumnya. Adapun jumlah perusahaan telah memiliki PKB terus menujukan peningkatan dimana pada tahun 2023 sebanyak 44 perusahaan.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi sub urusan: 1) Kualitas Hidup Perempuan (Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah; Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan); 2) Perlindungan Perempuan (Pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan); 3) Kualitas Keluarga (Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak; Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak); 4) Sistem data gender dan anak; 5) Pemenuhan Hak Anak; dan 6) Perlindungan Khusus Anak. Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, berdasarkan peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah. Capaian kinerja pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

BAPPEDA HALUT

B1) Kualitas Hidup Perempuan

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menyatakan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten/kota harus memasukkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada kebijakan program dalam pembangunan. Di sisi ketenagakerjaan, jumlah penduduk perempuan usia kerja di Kabupaten Halmahera Utara terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, sebesar 55,23 persen dibandingkan dengan TPAK laki- laki yang mencapai 83,61 persen.

Meskipun TPAK perempuan pada tahun 2023 masih lebih rendah dari laki-laki, telah terjadi peningkatan dimana pada tahun 2022 TPAK perempuan baru sebesar 50,32 persen. Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada angkatan kerja perempuan pada tahun 2023 sebesar 7,40 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 6,62 persen. Ini mengindikasikan tingkat kesempatan kerja di kalangan perempuan semakin berkurang.

Di sisi kualitas, jumlah ASN perempuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang menempati jabatan struktural (eselon) mengalami penurunan, yaitu 23,02 persen pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 22,17 persen. Demikian pula dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu sebanyak 5 orang atau 25 persen dari total anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara untuk periode 2019-2024 dibandingkan periode 2014-2019 yang berjumlah 4 orang atau 16 persen. Ikhtisar perkembangan indikator kualitas hidup perempuan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2019-2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.59. Ikhtisar Partisipasi dan Peran Perempuan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

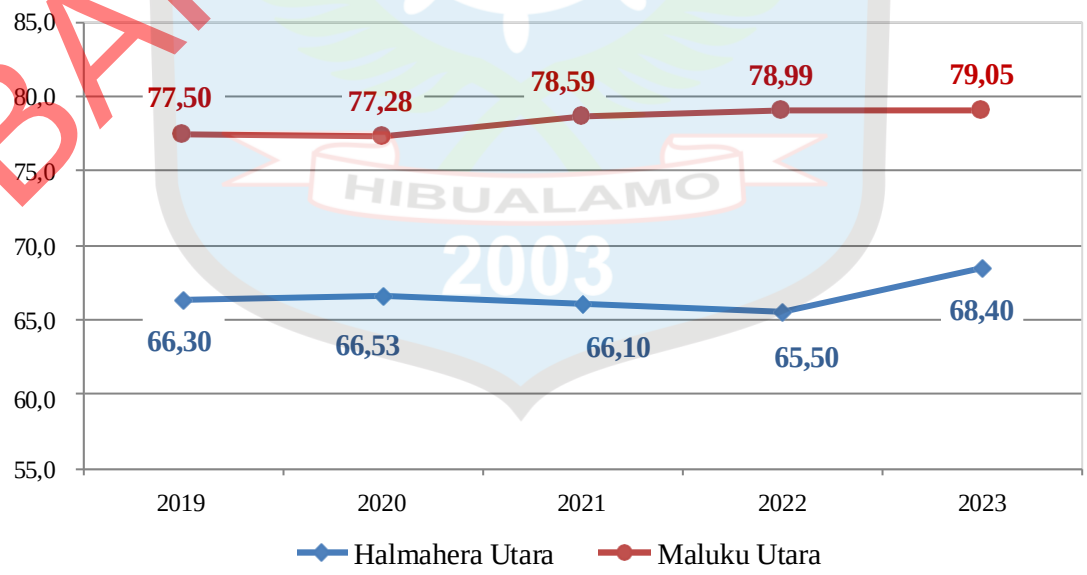
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	**Partisipasi & Kesempatan Kerja**					
1	TPAK Perempuan (persen)	40,05	44,0	47,67	50,32	55,23
2	TPT Perempuan (persen)	6,85	5,95	11,32	6,62	7,40
B	**Partisipasi di Lembaga Pemerintahan**					

BAPPEDA HALUT

1	Jumlah ASN perempuan yang menempati jabatan Eselon II/III/IV	171	172	163	163	157
2	Jumlah jabatan Eselon II/III/IV yang tersedia	704	704	708	708	708
	Persentase ASN perempuan yang menempati jabatan Eselon II/III/IV	24,29	24,43	23,02	23,02	22,17
C	**Partisipasi di Lembaga Perwakilan**					
1	Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten	5	5	5	5	5
2	Jumlah kursi DPRD Kabupaten yang tersedia	25	25	25	25	25
	Persentase wakil perempuan di DPRD Kabupaten	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Halmahera Utara, 2024

Secara keseluruhan apakah perempuan di Kabupaten Halmahera Utara dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah sosial, ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Sebagiamana tersaji dalam grafik di bawah, IDG Kabupaten Halmahera Utara dari tahun ke tahun masih fluktuatif dan konsisten berada di bawah rata-rata IDG Provinsi Maluku Utara.

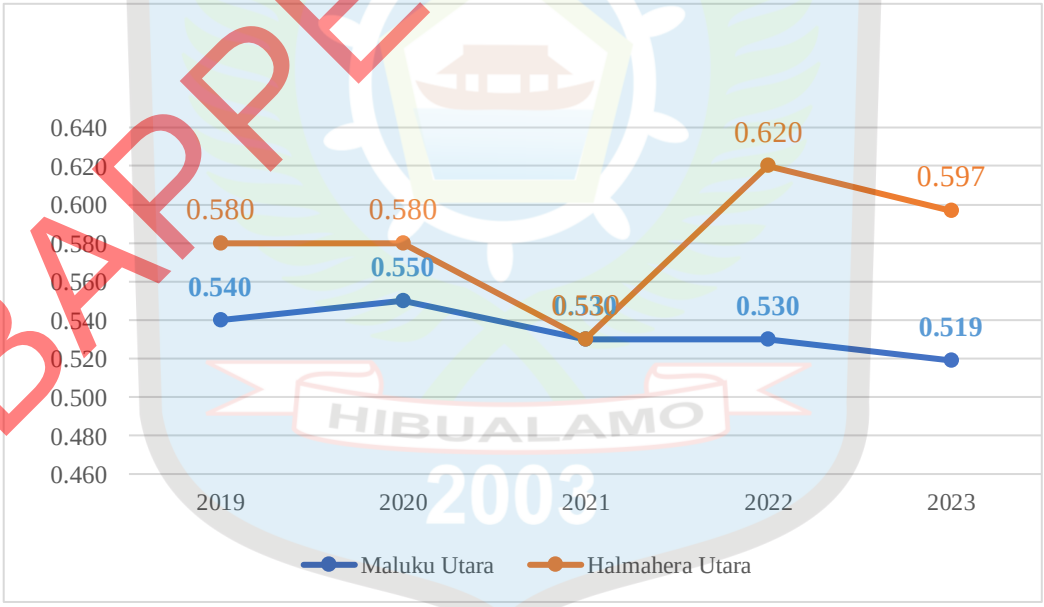


Gambar 2.38 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023
Sumber: BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

Dalam hal pembangunan analisis gender berperan sangat penting. Keseimbangan

BAPPEDA HALUT

antara jumlah laki-laki dan perempuan belum disertai dengan keseimbangan di berbagai aspek pembangunan seperti halnya kesehatan, pendidikan ekonomi, dan politik. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) hadir sebagai salah satu indikator pembangunan yang mengukur ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Capaian IKG Halmahera Utara selama periode 5 tahun terakhir masih berada di atas capaian Provinsi Maluku Utara dan cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Meskipun demikian capaian IKG Halmahera Utara tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,023 poin dengan capaian indeks 0,597 yang mana pada tahun 2022 masih berada pada posisi capaian indeks 0,620. Penurunan indeks ini disebabkan oleh peningkatan dalam dimensi tenaga kerja,pemberdayaan, dan kesehatan reproduksi yang ditandai dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja pada perempuan, peningkatan Persentase Perempuan Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA, serta penurunan proporsi perempuan melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan. Adapun tren IKG Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara tahun 2019-2023 disajikan dalam grafik di bawah



Gambar 2.39 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023
Sumber: BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

B2) Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak

SDGs secara khusus menyerukan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi target yang harus dicapai pada 2030. Perempuan dan anak dalam hal inin paling sering menjadi korban tindak kekerasan dibandingkan laki-

BAPPEDA HALUT

laki. Untuk itu, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi bagian penting yang ingin dicapai dalam SDGs. Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematik yang pada hakekatnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, dengan rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) per 1000 Rumah Tangga mencapai 0,81 pada tahun 2023 atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Adapun kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan ke pihak kepolisian Halmahera Utara pada tahun 2022 dapat ditangani seluruhnya sedangkan pada tahun 2023 dapat ditangani sekitar 70%. Berbeda dengan kasus kekerasan terhadap anak terjadi penurunan kasus yang ditangani tahun 2022 yang hanya sebesar 28,57% sedangkan pada tahun 2023 terdapat kenaikan kasus yang tertangani sebesar 57,58%. Ikhtisar Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak Di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2020-2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.60. Ikhtisar Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus KDRT	36	37	46	50
2	Jumlah Rumah Tangga	45.402	56.869	58.600	61.568
	Rasio KDRT (per 1000 Rumah Tangga)	0,79	0,65	0,78	0,81
3	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan	7	9	11	17
4	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait	7	9	11	12
	Persentase penyelesaian laporan kasus kekerasan terhadap Perempuan oleh instansi terkait	100	100	100	70,59
5	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan	29	30	35	33
6	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait	29	30	10	19
	Persentase penyelesaian laporan kasus kekerasan terhadap Anak oleh instansi terkait	100	100	28,57	57,58

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

B3) Pemenuhan Hak Anak & Layanan Data Gender dan Anak

Pemenuhan hak anak mencakup upaya pemenuhan hak tumbuh kembang, hak kelangsungan hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak identitas, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak. Hak tumbuh kembang meliputi hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Hak kelangsungan hidup meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak partisipasi meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak perlindungan meliputi perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. Hak identitas meliputi hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dengan dokumen akta kelahiran. Pemenuhan hak anak di dapat direpresentasikan melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang meliputi 24 indikator yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tahun 2016 Kabupaten Halmahera Utara telah mencanangkan kabupaten layak anak, yang dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencanangan tersebut. Sampai dengan tahun 2022, telah terpenuhi 10 jenis indikator KLA atau 41,7 persen sedangkan pada tahun 2023 telah terpenuhi 24 indikator dari total 31 indikator atau sebesar 77 persen.

Adapun dari sisi layanan data gender dan anak, sampai dengan tahun 2023 telah seluruhnya dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten, dari 9 jenis data yang diisyaratkan dalam Permen PPPA No. 5/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak. Ikhtisar selengkapnya tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.61. Ikhtisar Pemenuhan Hak Anak dan Layanan Data Gender dan Anak Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
	Pemenuhan Hak Anak				
1	Jumlah jenis indikator Kabupaten Layak Anak yang telah terpenuhi (kumulatif)	10	10	10	24
2	Persentasi jenis indikator Kabupaten Layak Anak yang telah terpenuhi (standar 24) *standar 31	41,7	41,7	41,7	100
	Layanan Data Gender dan Anak				

BAPPEDA HALUT

1	Jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten (kumulatif)	8	8	9	9
2	Persentase jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten (standar 9)	88,9	88,9	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Halmahera Utara, 2022

C. Pangan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pangan meliputi sub urusan: 1) Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian (Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor); 2) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; Pengelolaan cadangan pangan; Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi; Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi); 3) Penanganan Kerawanan Pangan (Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota; Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan); 5) Keamanan Pangan (Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar).

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.62. Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1a	Jumlah desa yang masuk dalam kategori **tidak rentan** rawan pangan	192	192	142	188	171
1b	Jumlah desa yang masuk dalam kategori **rentan** rawan pangan	4	4	54	28	84
2	Jumlah jenis pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten yang telah disertifikasi/diregistrasi (kumulatif)	1	1	1	1	1
3	Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan Tingkat Daerah (Perda/Perbup) (kumulatif)	1	1	1	1	1
4	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	443.778	259.713	98.638	216.069	216.069
	a. Beras (Padi Gogo)	9.457	6.314	10.733	20.535	7.235

BAPPEDA HALUT

	b. Jagung	208.130	111.244	17.606	84.137	85.806
	c. Ubi Kayu	127.206	89.102	33.425	6.508	18.238
	d. Ubi Jalar	60.660	20.610	12.780	2.029	14.997
	e. Beras (Padi Sawah)	38.325	32.443	24.094	28.276	30.283
5	Skor PPH Ketersediaan	76,25	76,24	84,44	85,72	85,72

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Utara, 2022

D. Pertanahan

Dalam memenuhi kebutuhan pembebasan lahan untuk kepentingan umum, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah membebaskan lahan seluas 23.866 m2 dari target sebesar 637.235 m2, untuk kepentingan:

1) Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Tower PLN di desa Gura dengan luas 100 m2
2) Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Masuk Pasar desa Supu Kecamatan Loloda Utara dengan luas 318 m2
3) Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Masuk Pasar desa Supu Kecamatan Loloda Utara dengan luas 665 m2
4) Pembebasan Tanah Pembangunan PLTD desa Kakara Kecamatan Tobelo dengan luas 1.157 m2
5) Pembebasan Tanah Pembangunan SMP Negeri 23 desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan dengan luas 7.600 m2
6) Pembebasan Tanah Pembangunan PLTD desa Tobo-Tobo Kecamatan Loloda Kepulauan dengan luas 4.000 m2
7) Pembebasan Tanah Pembangunan PLTD desa Kakara Kecamatan Tobelo dengan luas 8.175 m2
8) Pembebasan Tanah Pembangunan PLTD desa Kumo Kecamatan Tobelo Selatan dengan luas 100 m2
9) Pembebasan Tanah Pembangunan SD Negeri desa Beringin Jaya Kecamatan Galela Utara dengan luas 1,651 m2
10) Pembebasan Tanah Pembangunan PLTD desa Todokuiha Kecamatan Tobelo Timur dengan Luas 100 m2
11) Pembebasan 150 pohon kelapa perluasan Bandara Kuabang Kao

Secara keseluruhan, hingga tahun 2020 luas lahan yang sudah dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum sudah mencapai 24.494,56 M2, namun

BAPPEDA HALUT

kesemuanya masih belum disertifikasi. Adapun terkait penyelesaian kasus tanah Negara pada tahun 2019 antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan PT. PN XIV Makasar antara lain telah dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat sekitar, tentang tanah negara (tanah avdeling), serta memfalisitasi (mengadakan pertemuan) dengan PT. PN XIV Makasar.

E. Lingkungan Hidup

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten dalam urusan Lingkungan Hidup meliputi sub urusan: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan/ rencana/program; 3) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 4) Pengelolaan Keanegaragaman Hayati; 5) Penyimpanan sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3; 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten; 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH; 8) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan; 9) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten; 10) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH; dan 11) Pengelolaan Persampahan. Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.63. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Udara	84,1	90,11	89,98	89,32
2	Indeks Kualitas Air	33,33	50	49,49	56,98
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	90	71,49	71,49	71,27
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**71,24**	**70,95**	**70,71**	**73,2**
4	Perda tentang RPPLH (Ada/Tidak)	belum terealisasi menjadi Peraturan Daerah	belum terealisasi menjadi Peraturan Daerah	belum terealisasi menjadi Peraturan Daerah	belum terealisasi menjadi Peraturan Daerah
5a	Jumlah Dokumen Kebijakan/ Rencana/Program Pemda yang memerlukan KLHS	1		1	1
5b	Jumlah Dokumen Kebijakan/ Rencana/Program Pemda yang tersusun dokumen KLHS oleh DLH	1			1
	Pengawasan Izin Lingkungan				

BAPPEDA HALUT

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin yang izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	20 (UKL-UPL) 113 (SPPL)	11 (UKL-UPL) 127 (SPPL)	5 (UKL-UPL) 266 (SPPL)	6 (Persetujuan Lingkungan) 1 (Persetujuan Teknis)
2	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang telah diawasi	17	22	5	37
3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang telah diawasi dan PATUH	17	22	5	37
	Pencemaran Lingkungan				
1	Jumlah objek pencemaran/kerusakaan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang dilaporkan			2	
2	Jumlah objek pencemaran/kerusakaan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang dilaporkan dan sudah ditangani			2	
	Pengelolaan Sampah				
1	Volume potensi timbulan sampah perkotaan (M3)	16.622	16.989	17.364	22.033
2	Volume timbulan sampah perkotaan yang sudah ditangani (M3)	11.700	14.700	12.233	15.914
3	jumlah/unit sarana prasarana pengelolaan sampah	-	-	-	28

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Utara, 2023

Berdasarkan tabel diatas., menunjukan bahwa jumlah sampah yang tertangani di Halmahera Utara baru mencapai 30% dan secara khusus pada 3 kecamatan yang mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah (Tobelo, Tobelo Utara, dan Tobelo Tengah) persentasi pengangkutan sampah sebesar 70%. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi sub urusan: 1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan 2) Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

BAPPEDA HALUT

Sipil Kabupaten Halmahera Utara.

Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Peranan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kaitannya dengan fungsi pemerintah kabupaten/kota antara lain ialah: a) Pelayanan publik (*public function*) atas pelaporan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk, dalam pelayanan tersebut memperhatikan kaidah registrasi hingga diterbitkan dokumen penduduk; b) Pemberian dokumen yang mempunyai kepastian hukum serta menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk, hal tersebut merupakan fungsi perlindungan (*protection function*); dan c) Pengelolaan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Adapun peran pendaftaran penduduk dalam pembangunan nasional/daerah adalah terkait pendayagunaan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penduduk dan kondisi daerah setempat. Pendaftaran penduduk menjadi sangat penting mengingat kondisi antara daerah sangat bervariasi. Selain itu data hasil pendaftaran penduduk berupa statistik kependudukan dan laporan-laporan merupakan aset bangsa yang sangat berharga karena dapat didayagunakan oleh semua pihak baik untuk kepentingan pelayanan publik maupun untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan kependuduk (*people centered developement*). Capaian kinerja pembangunan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, yang mencakup administrasi kependudukan, pencatatan sipil serta pengelolaan informasi kependudukan dalam kurun waktu 2020-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.64. Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Penduduk (Sesuai Registrasi Kependudukan)	200.491	200.596	201.343	202.150
A	**Administrasi Kependudukan**				
1a	Jumlah Penduduk Wajib-ber KTP	134.288	137.722	114.975	146.584
1b	Jumlah Penduduk yang sudah ber-KTP	131.242	135.152		
	Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah ber-KTP	**97,73**	**98,13**		
2a	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang wajib ber-KIA	66.203			
2b	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	15.656			

BAPPEDA HALUT

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
	Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	**23,65**	**25,62**		
B	**Pencatatan Sipil**				
1a	Jumlah Akta kelahiran yang sudah diterbitkan (kumulatif)	193.351			
1b	Jumlah Akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun berkenaan	2.909			
2a	Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun	73.559		65.543	63.062
2b	Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	69.992		60.329	58.016
	Persentasi anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran	**95,15**	**100,0**	**92,04**	**92,00**
3a	Jumlah Akta Kematian yang sudah diterbitkan (kumulatif)	6.312	10.906	6.181	6.570
3b	Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan pada tahun berkenaan	673	4.954	6.181	6.570
3c	Jumlah akta kematian diterbitkan pada tahun berkenaan	673	4.954	6.181	6.570
4a	Jumlah akta perkawinan yang sudah diterbitkan/penduduk yang tercatat perkawinannya (kumulatif)	33.278	40.413	41.166	42.294
4b	Jumlah pasangan perkawinan yang dilaporkan pada tahun berkenaan	5975	7135		
4c	Jumlah Akta perkawinan yang diterbitkan pada tahun berkenaan	5975	7135		
5a	Jumlah Akta Perceraian yang sudah diterbitkan (kumulatif)	320	390		807
5b	Jumlah pasangan Perceraian yang dilaporkan pada tahun berkenaan	57	70		807
5c	Jumlah Akta perceraian diterbitkan pada tahun berkenaan	57	70		807
C	**Informasi Kependudukan**				
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	7	7		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional, dimana keberadaan Desa saat ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa dalam konteks kekinian diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Kedudukan

desa saat ini tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Desa juga mendapat rekognisi dan subsidiaritas kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Di samping itu desa akan menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam lingkup dua kewenangan tersebut. Secara umum kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari ikhtiar untuk mencapai keberdayaan negara bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya.

Adapun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi sub urusan: 1) Penyelenggaraan penataan Desa; 2) Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; 3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; dan 4) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Halmahera Utara diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Perda Kabupaten Halmahera Utara No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Sebagaimana Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pemberdayaan masyarakat dan desa, tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas, meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, pengerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta penumbuhan kemampuan berkembang secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat dan desa mengandung makna memampukan masyarakat *(empowerment)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menginisasi Indeks Desa Membangun (IDM), dengan meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa. IDM difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini kategori kemandirian desa di

BAPPEDA HALUT

Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan IDM yang dirinci menurut kecamatan pada tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.65. Ketegori Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa Menurut Kategori					IDM
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	Malifut	0	0	3	18	1	0,6170
2	Kao Teluk	0	0	6	5	0	0,6322
3	Kao	0	1	7	6	0	0,6396
4	Kao Barat	0	0	4	12	5	0,5806
5	Kao Utara	0	1	4	7	0	0,6344
6	Tobelo Selatan	0	0	12	1	0	0,6470
7	Tobelo Barat	0	0	2	3	0	0,5928
8	Tobelo Timur	0	0	0	6	0	0,6024
9	Tobelo	0	1	9	0	0	0,7490
10	Tobelo Tengah	0	3	6	0	0	0,7516
11	Tobelo Utara	0	1	8	1	0	0,6301
12	Galela	0	0	2	5	0	0,6570
13	Galela Selatan	0	0	6	1	0	0,6643
14	Galela Barat	0	0	4	5	0	0,6367
15	Galela Utara	0	0	6	5	1	0,5903
16	Loloda Utara	0	0	1	17	0	0,5549
17	Loloda Kepulauan	0	0	0	10	0	0,5308
Halmahera Utara		**0**	**7**	**80**	**102**	**7**	**0,6234**
Persentase		**0**	**3,6**	**40,8**	**52,0**	**3,6**	

Sumber: https://idm.kemendesa.go.id/status, 2024

Dari tabel, pada tahun 2023 sudah terdapat 4 desa di Kabupaten Halmahera Utara yang berstatus Desa Mandiri yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Tobelo dan Tobelo Tengah. Desa dengan status IDM desa Maju baru berjumlah 15 Desa, yang tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kao, Kao Utara, Tobelo, Tobelo Tengah, Tobelo Utara dan Galela. Lebih dari dari 50 persen desa di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 sudah berstatus desa berkembang. Wilayah kecamatan dengan status desa sangat tertinggal dan tertinggal terbanyak adalah Kecamatan Loloda Utara, Kao Barat dan Loloda Kepulauan.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota

BAPPEDA HALUT

dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) meliputi sub urusan: 1) Pengendalian Penduduk; 2) Keluarga Berencana; dan 3) Keluarga Sejahtera. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, berdasarkan Perda No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah.

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk. Dengan penduduk tumbuh seimbang, daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat tetap terjaga. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan menurunkan rata-rata angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) sampai pada tingkat *replacement rate* yang disyaratkan, yang mana berdasarkan RPJMN 2020- 2024 adalah sebesar 2,1. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, TFR Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2019-2023 berada dalam kisaran 1,63 – 1,96 atau masih berada di bawah target yang diharapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga terus menggalakkan Keluarga Berencana. Keluarga Berencana (KB) merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga Berencana bermakna perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat- alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran.

Gerakan keluarga berencana diartikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tabel berikut menyajikan beberapa pencapaian kinerja dalam bidang pengendalian penduduk dan KB di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2019-2023.

Tabel 2.66. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	1,88	1,63	2,32	1,60	1,96

BAPPEDA HALUT

2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	21,6
3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)	45	58	62	146	392
4	Jumlah Pasangan Usia Subur	32.702	34.793	36.002	37.628	37.628
5	Jumlah Peserta KB Aktif Modern	1.198	1.271	9.230	7.040	2.7075
6	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang siap Melayani KB-MKJP	39	39	39	39	39
7	Jumlah Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	409	435	2.522	1.685	12.432
8	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mau ber-KB tapi tidak terlayani (unmeet need)	6.987	7.315	8.917	10.553	1.056
9	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Jumlah kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya)	42	42	42	54	54
10	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Jumlah kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya)	182	182	182	182	182
11	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) - BKKBN	na	na	na	54,84	64,07

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Halmahera Utara, 2024

H. Perhubungan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perhubungan meliputi sub urusan: 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), meliputi antara lain: Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota; Pengelolaan terminal penumpang tipe C; Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota; 2) Pelayaran, meliputi antara lain: Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha; Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha; Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau; dan 3) Penerbangan, untuk jenis pelayanan Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan 4) Perkeretapian.

Urusan Perhubungan di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, berdasarkan Perda No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas

BAPPEDA HALUT

pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

Di sisi infrastruktur, sampai dengan tahun 2023, jumlah pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 10 pelabuhan, yaitu:

1) Pelabuhan laut di Kecamatan Galela milik perusahaan PT. Global Agronusa Indonesia;
2) Pelabuhan laut di Kecamatan Galela (pelabuhan nasional);
3) Pelabuhan di Kecamatan Tobelo (Pelabuhan Nasional);
4) Pelabuhan di Kecamatan Kao Utara (Pelabuhan regional Pediwang);
5) Pelabuhan khusus PT. NHM Di Gosowong Kecamatan Kao Teluk;
6) Pelabuhan Penyeberangan Ferry Gorua Kecamatan Tobelo Utara (ASDP);
7) Pelabuhan Penyeberangan Feri Doro Kecamatan Kao Utara (ASDP);
8) Pelabuhan Pertamina Kupa-Kupa Tobelo;
9) Pelabuhan Industri Kupa-Kupa Tobelo;
10) Pelabuhan Dama Kecamatan Loloda Kepulauan.

Jumlah terminal angkutan darat yang tersedia dan beroperasi sampai tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) terminal, yaitu:

1) Terminal Galela Tipe C di Kecamatan Galela;
2) Terminal Wosia Tipe C di Kecamatan Tobelo Tengah;
3) Terminal Malifut Tipe C di Kecamatan Malifut.

Adapun jumlah pelabuhan udara sebanyak 3 (tiga) bandara, yaitu:

1) Bandar Udara Gamarmalamo di Kecamatan Galela Barat;
2) Bandar Udara Kuabang di Kecamatan Kao; dan
3) Bandar Udara Khusus PT. NHM Gosowong di Kecamatan Kao Teluk.

Gambaran kinerja secara keseluruhan dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2019-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.67. Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	**Arus Penumpang**					
1	Angkutan Umum/Bis (orang)	43.215	34.407	20.252	22.461	27.178
	Pertumbuhan (persen)		-20,38	-41,14	10,91	21,00
2	Kapal Laut/Pel. Penyeberangan (orang)	186.277	90.898	149.166	158.607	191.914

BAPPEDA HALUT

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Pertumbuhan (persen)		-51,20	64,10	6,33	21,00
3	Pesawat Udara (orang)	31.327	6.299	5.082	24.647	19.127
	Pertumbuhan (persen)		-79,89	-19,32	384,99	-22,40
B	**Arus Barang Kapal Laut**					
1	Muat (ton)	23.044	18.044	11.480	50.018	33.571
2	Bongkar (ton)	29.265	16.265	30.771	141.139	384.760
	Total (Ton)	52.309	34.309	42.251	191.157	418.331
	Pertumbuhan (persen)		-34,41	23,15	352,43	118,84
B	**Kecelakaan LLAJ**					
1	Jumlah Kecelakaan	61	60	33	45	52
2	Kendaraan yang terlibat	70	62	52	70	73
3	Meninggal dunia	34	54	24	32	37
4	Luka berat	17	8	2	4	11
5	Luka ringan	79	70	14	19	31
6	Kerugian materi (Rp. Juta)	154,9	41,95	37,35	72,8325	253,5
	Total kendaraan (unit) (Polda Maluku Utara, 2020)	45.335	50.936	56.594	56.266	56.266
	Rasio kecelakaan LLAJ per 10.000 kendaraan	13,46	11,78	5,83	8,00	9,24
C	**Izin Trayek Angkutan Umum**					
1	Jumlah Izin Trayek	n/a	19	19	19	19
2	Jumlah Desa yang telah terlayani trayek angkutan umum tetap	n/a	139	139	139	139
	Rasio Konektifitas Transportasi Wilayah		70.91	70.91	70.91	70.91
D	**Kir Angkutan Umum**					
1	Jumlah Kir Angkutan Umum	1.233	-	-	-	-
2	Jumlah Kir Bentor	1.750	396	443	499	495

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara, 2024

I. Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Komunikasi dan Informatika meliputi sub urusan: 1) Informasi dan Komunikasi Publik (Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota); dan 2) Aplikasi Informatika (Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota; Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, berdasarkan peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan

BAPPEDA HALUT

fungsi lembaga teknis Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memiliki tupoksi merumuskan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi di lingkup pemerintah daerah; Penyediaan konten lintas sektoral, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan layanan keamanan informasi *e- government*.

Dari sisi Informasi dan Komunikasi Publik, penyebarluasan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dilakukan melalui sejumlah media/sarana, antara lain website pada alamat: http://halmaherautarakab.go.id/; Facebook pada alamat https://www.facebook. com/humaspemda.halut; dan Twitter pada alamat https://twitter.com/halut.

Laman http://halmaherautarakab.go.id/ merupakan sarana utama penyebarluasan informasi meliputi: a) Data SKPD yang memuat data/informasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah; Laporan Kinerja (LKj); Dokumen Perencanaan Bappeda; Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; serta Perjanjian Kinerja SKPD; b) Regulasi yang memuat data/informasi antara lain: Instruksi Bupati, Nota Dinas, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, Standar Operasi Prosedur (SOP), Surat Keputusan, Pedoman, Peraturan Pusat, dan Surat-surat; dan c) Pengumuman, yang memuat data/infomasi agenda atau peristiwa-peristiwa penting di daerah.

Namun demikian, data/informasi yang tersaji dalam webiste belum terkelola secara optimal dimana masih banyak data/informasi dari perangkat daerah yang belum diperbaharui secara reguler. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.68. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
X	Total jumlah Perangkat Daerah Pemda Kabupaten Halmahera Utara	48	48	48	48	48
A	**Informasi dan Komunikasi Publik**					
1	Jumlah Perangkat Daerah memiliki portal dan situs web sesuai standar	7	7	15	31	31
	Persentase Perangkat Daerah memiliki portal dan situs web sesuai standar	**14,58**	**14,58**	**31,25**	**64,58**	**64,58**

BAPPEDA HALUT

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah jenis data/informasi publik sesuai amanat UU 14/2008 yang telah disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfo	4	4	4	4	4
B	**Aplikasi Informatika**					
1a	Jumlah layanan publik yang seharusnya diselenggarakan secara online dan terintegrasi	4	4	4	4	4
1b	Jumlah layanan publik yang sudah diselenggarakan secara online dan terintegrasi	3	3	3	3	3
	Persentase layanan publik yang sudah diselenggarakan secara online dan terintegrasi	**75,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
2	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang sudah memanfaatkan sertifikat elektronik	1	1	1	1	1
3	**Indeks SPBE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,34**
C	**Infrastruktur TIK**					
1	Jumlah Perangkat Daerah terakses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	25	25	25	25	31
	Persentase Perangkat Daerah terakses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	**52,1**	**52,1**	**52,1**	**52,1**	**52,1**
2	Jumlah Operator Telepon Tetap	1	1	1	1	1
3	Jumlah Operator Telepon Seluler	2	2	2	2	2
4	Jumlah Desa **belum terjangkau** jaringan telekomunikasi seluler	53	35	35	35	20
	Persentase Desa terjangkau jaringan telekomunikasi seluler	**72,96**	**82,14**	**82,14**	**82,14**	**89,79**

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara, 2024

J. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi sub urusan: 1) Izin Usaha Simpan Pinjam; 2) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi; 3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; 4) Pendidikan dan latihan perkoperasian; 5) Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi; 6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan 7) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.69. Perkembangan Koperasi dan UKM
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	**Koperasi**					
1	Jumlah Koperasi	151	158	166	166	166
2	Jumlah Anggota Koperasi (orang)	5.875	6.085	7.185	7.185	7.185
3	Jumlah Modal Usaha (Rp Milyar)	8,721	9,11	10,11	10,11	10,11
	Pertumbuhan Modal Usaha Koperasi (persen)	**2,24**	**4,46**	**10,98**	**10,98**	**10,98**
4	Jumlah Koperasi Aktif	64	71	79	79	79
	Persentase Koperasi Aktif	**42,38**	**44,94**	**47,59**	**47,59**	**47,59**
5	Jumlah Koperasi Sehat	18	9	9	9	9
	Persentase Koperasi Sehat (terhadap koperasi aktif)	**28,13**	**12,68**	**11,39**	**11,39**	**11,39**
B	**UMKM**					
1	Jumlah Usaha Mikro	2.079	2.719	4.456	4.456	4.456
2	Jumlah Usaha Kecil	1.241	267	119	119	119
3	Jumlah Usaha Menengah	754	38	38	38	38
4	Total Usaha Mikro Kecil	3.320	2.986	4375	4575	4575
	Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil (persen)	**0,42**	**-10,06**	**30,48**	**-**	**-**
5	Total UMKM	4.074	3.024	4.613	4.613	4.613
	Pertumbuhan UMKM (persen)	**0,34**	**-25,77**	**53,77**	**-**	**-**

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Utara, 2022

Berdasarkan tabel diatas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Halmahera Utara tidak mengalami pertumbuhan atau Stagnan tercatat pada 3 tahun terakhir dari tahun 2021-2023 dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel-tabel di halaman berikut menyajikan kondisi koperasi dan UMKM menurut kecamatan pada tahun 2023.

Tabel 2.70. Sebaran Koperasi Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif		Koperasi Sehat	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Malifut	9	3	33,33	-	-
2	Kao Teluk	4	1	25,00	-	-
3	Kao	7	4	57,14	-	-
4	Kao Barat	5	-	-	-	-
5	Kao Utara	4	3	75,00	1	33,33
6	Tobelo Selatan	11	2	18,18	-	-
7	Tobelo Barat	4	2	50,00	-	-
8	Tobelo Timur	1	0	-	-	-
9	Tobelo	53	26	49,06	4	15,38

BAPPEDA HALUT

10	Tobelo Tengah	14	5	35,71	2	40,00
11	Tobelo Utara	11	7	63,64	-	-
12	Galela	10	5	50,00	1	20,00
13	Galela Selatan	6	3	50,00	-	-
14	Galela Barat	5	1	20,00	-	-
15	Galela Utara	5	2	40,00	-	-
16	Loloda Utara	3	2	66,67	-	-
17	Loloda Kepulauan	6	5	83,33	1	20,00
Halmahera Utara		**158**	**71**	**44,94**	**9**	**12,68**

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Utara, 2024

Sebaran Koperasi dari 17 kecamatan hanya terdapat pada 15 kecamatan yang memiliki koperasi aktif dan tercatat hanya 5 kecamatan yang memenuhi kriteri Koperasi Sehat, ada 2 kecamatan yang memiliki Koperasi namun tidak masuk dalam kategori koperas aktif dan sehat, sesuai dengan penilaian dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Tabel 2.71. Sebaran UMKM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

No	Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Total UMKM
1	Malifut	170	20	-	190
2	Kao Teluk	47	10	-	57
3	Kao	271	30	-	301
4	Kao Barat	108	6	-	114
5	Kao Utara	139	10	-	149
6	Tobelo Selatan	180	10	-	190
7	Tobelo Barat	135	-	-	135
8	Tobelo Timur	107	-	-	107
9	Tobelo	600	80	38	718
10	Tobelo Tengah	150	65	-	215
11	Tobelo Utara	100	16	-	116
12	Galela	92	16	-	108
13	Galela Selatan	111	2	-	113
14	Galela Barat	109	1	-	110
15	Galela Utara	146	-	-	146
16	Loloda Utara	120	-	-	120
17	Loloda Kepulauan	134	1	-	135
Halmahera Utara		**2.719**	**267**	**38**	**3.024**

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Utara, 2024

UMKM menurut data diatas terdapat sebaran pada 17 Kecamatan dimana untuk Usaha Mikro yang tebesar tercatat di Kecamatan Tobelo sebanyak 600, dan Usaha Kecil terdapat pada 13 Kecamatan dengan jumlah terbanyak terdata di Kecamtan Tobelo sebanyak 80, sedangkan Usaha Menengah hanya terdapat di 1 Kecamatan saja yaitu Kecamatan Tobelo sebanyak 38 usaha. Dapat di lihat bahwa untuk UMKM di

BAPPEDA HALUT

Kabupaten Halmahera Utara hanya Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang banyak jumlah sebarannya dibandingkan dengan Usaha Menengah yang hanya tersebar pasa 1 Kecamatan.

K. Penanaman Modal

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Penanaman Modal meliputi sub urusan: 1) Pengembangan IklimPenanaman Modal; 2) Promosi Penanaman Modal; 3) Pelayanan Penanaman Modal; 4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 5) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2019-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.72. Realisasi Investasi PMA Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Sektor	Nilai Investasi (Ribu USD)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertambangan	15.264,5	483,0	516,4	0,4	0,0
2	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	6.992,1	41.086,1	3.788,9	1.972,0	211,1
3	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	3.721,3	144,2
4	Perdagangan dan Reparasi	-	-	-	-	13,6
5	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	326,8	14.813,6	4.940,2	902,4	1.990,3
6	Jasa Lainnya	-	-	-	10,9	0,0
	Total	**22.583,4**	**56.382,7**	**9.245,5**	**6.607,0**	**2.359,2**

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Halmahera Utara, 2024

Tabel 2.73. Realisasi Investasi PMDN Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Sektor	Nilai Investasi (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	-	-	97,8
2	Perikanan	-	-	-	-	267,4
3	Pertambangan		354.858,4	712.539,2	259.978,4	236.971,7
4	Industri Makanan	-	-	-	926.648,8	217.038,8
5	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	-	-	-	150,0	45,6
6	Industri Lainnya	-	-	-	66.532,5	-
7	Listrik, Gas dan Air	6.146,1	2.489,3	20.319,8	0,0	170.721,8
8	Konstruksi	-	-	500,0	15.183,2	12.497,2
9	Perdagangan dan Reparasi	-	105,0	937,5	139.205,8	16.663,0
10	Hotel dan Restoran	-	-	-	55,0	111,2

BAPPEDA HALUT

No	Sektor	Nilai Investasi (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
11	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	14.394,5	9.533,0	6.446,7	497,9	796,3
12	Jasa Lainnya	-	-	40,0	2.410,0	1.479,8
		20.540,6	**366.985,7**	**740.783,2**	**1.410.661,6**	**656.690,6**

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Halmahera Utara, 2024

L. Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga meliputi sub urusan: 1) Kepemudaan; 2) Keolahragaan; dan 3) Kepramukaan. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.74. Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
A	**Kepemudaan**				
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten (Organisasi Nasional yang memiliki perwakilan/ cabang di Kabupaten)	17	17	17	17
2	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Desa/ Kecamatan (Organisasi yang dibentuk dalam skala lokal Kab/Kec/Desa, dan terdaftar atau sepengetahua Pemerintah Kab/Kec/Desa)	418	418	418	418
3	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi	2	2	2	2
B	**Olahraga**				
1	Jumlah Organisasi Olahraga Tingkat Kabupaten (Organisasi Nasional yang memiliki perwakilan/ cabang di Kabupaten)	14	14	14	25
2	Jumlah Klub Olahraga Tingkat Desa/Kecamatan (Klub yang dibentuk dalam skala lokal Kab/Kec/ Desa, dan terdaftar atau sepengetahuan Pemerintah Kab/Kec/Desa)	207	207	207	207
3	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi (PON/Kejurnas/Porprov/Kejurda)	23	5	5	1
4	Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi (POPNAS/ POPDA/dll)	16	-	33	34
5	Perolehan medali pada multi event olahraga tingkat provinsi (PORPROV/dll)	n/a	-	33	34
6	Perolehan medali pada multi event olahraga tingkat pelajar provinsi (POPDA/dll)	n/a	-	33	34
C	**Pramuka**				
1	Jumlah Satuan Karya (SAKA) Pramuka yang telah terbentuk di tingkat Kabupaten	3	3	3	3
2	Jumlah Kecamatan memiliki Kwartir Ranting Pramuka Aktif	17	17	17	17

BAPPEDA HALUT

3	Jumlah Sekolah Memiliki Gugus Depan Pramuka				
	a. SD/sederajat	229	229	229	229
	b. SMP/sederajat	87	87	87	87
	c. SMA/sederajat	60	60	60	60
	d. Perguruan Tinggi	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Utara, 2024

Dari tabel, jumlah organisasi kepemudaan baik tingkat kabupaten dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Organisasi kepemudaan tingkat kabupaten yang aktif di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/ POLRI Indonesia (FKPPI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Pemuda Pancasila, Pemuda Mesjid, Pemuda Gereja, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Purna Paski Indonesia (PPI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Peningkatan terjadi pada organisasi kepemudaan tingkat lokal, namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signfikan. Rata-rata di desa kabupaten Halmahera Utara terdapat 2 (dua) organisasi pemuda lokal. Adapun jumlah pemuda berprestasi tingkat Internasional/Nasional/ Provinsi belum cukup signifikan.

Demikian pula pada jumlah organisasi olahraga nasional yang memiliki cabang di tingkat kabupaten, dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Organisasi olahraga tingkat kabupaten yang saat ini ada, yaitu: Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Persaruan Bola Basket Seluruh Indonesia (PBSI), Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI), Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI), Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI), Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN), Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI), Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA), Taekwondo Indonesia (TI), dan Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Secara keseluruhan, upaya pengembangan kepemudaan dan keolahragaaan di Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti belum optimalnya pembinaan secara berkesinambungan kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada, belum maksimalnya

BAPPEDA HALUT

informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya kepemudaan serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud, serta masih rendahnya minat olah raga di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.

M. Statistik

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Statistik meliputi sub urusan: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Urusan Statistik di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik, berdasarkan peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah. Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik sampai dengan tahun 2020 telah menyajikan statistik sektoral yang faktual pada bidang data : 1) Penduduk; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Infrastruktur; 5) Sosial Budaya; 6) Sumberdaya Alam; 7) PDRB; 8) Kemiskinan; 10) Pertanian; 11) Kebudayaan; dan 12) Data-data lainnya. Upaya penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan pemutakhiran data pada 31 Perangkat Daerah dan 17 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara yang terangkum dalam Buku One Data Mantap. Namun hingga tahun 2021, baru 24 perangkat daerah atau 50 persen yang konsisten menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah.

N. Persandian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Persandian meliputi sub urusan: Persandian untuk Pengamanan Informasi, yaitu: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah serta Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Urusan Persandian di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, berdasarkan peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memiliki tupoksi, diantaranya layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan layanan keamanan informasi *e-government*. Secara keseluruhan penyelenggaraan urusan persandian di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara belum memadai, jika merujuk pada kewenangan pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang meliputi Pengamanan Informasi/penyelenggaraan persandian untuk pengamanan

BAPPEDA HALUT

informasi Pemerintah Daerah serta Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

O. Kebudayaan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Kebudayaan meliputi sub urusan: 1) Kebudayaan (Pengelolaan kebudayaan; Pelestarian tradisi; Pembinaan lembaga adat); 2) Kesenian Tradisional (Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota); 3) Sejarah (Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota); 4) Cagar Budaya (Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota; Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah); dan 5) Pengelolaan museum kabupaten/kota. Urusan Kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah..

Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara memiliki corak budaya yang plural, karena itu masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat yang terbuka (*open minded*), mudah menerima dan menyapa siapa saja yang datang ke daerah. Perbedaan yang beragam dari segala aspek yang dimiliki Kabupaten Halmahera Utara dijadikan kekayaan dan pemersatu sebagai modal dasar untuk membangun daerah ke depan yang lebih cemerlang dan sejahtera. Sinergitas budaya antara nilai-nilai adat dan agama, serta nilai modern universal yang positif, diungkapkan dalam beberapa karya seni. Masyarakat Halmahera Utara sebagai masyarakat yang religius dengan sendirinya menciptakan berbagai kekayaan karya seni dan membentuk tradisi. Beberapa karya seni tradisional yang sangat dikenal bahkan “go international” adalah Cakalele, Tide-Tide dan Yangere. Selain beberapa seni tradisional yg masih eksis di atas, terdapat juga tradisi kesenian yang tetap lestari di antaranya Denge, Tokuwela, dan musik hitadi.

Secara umum, dengan banyaknya potensi keragaman khasanah kebudayaaan daerah, upaya-upaya untuk mewujudkan pelestarian dan pengembannya belum cukup memadai. Hingga tahun 2023, jumlah cagar budaya/warisan budaya yang dilindungi sebanyak 13, jumlah cagar budaya/warisan budaya tak benda yang ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) meliputi Cakalele, Hibualamo, Tide-Tide, Seri Godoba, Kukuhana, dan Yangere; serta jumlah kelompok/sanggar seni budaya sebanyak 13 kelompok. Jumlah pertunjukan/pementasan seni budaya skala kolosal kabupaten tidak terekam dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi prasarana, hingga tahun 2023

BAPPEDA HALUT

baru tersedia 1 (satu) gedung yang representatif untuk memfasilitasi kegiatan seni budaya masyarakat.

P. Perpustakaan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perpustakaan meliputi sub urusan: 1) Pembinaan Perpustakaan (Pengelolaan perpustakaan dan Pembudayaan gemar membaca); dan 2) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Urusan Perpustakaan di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, berdasarkan peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.75. Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	**Perpustakaan**					
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1
2	Jumlah Perpustakaan milik non Pemerintah Daerah (termasuk Perpustakaan di Desa/ atau yang diselenggarakan oleh masyarakat)	135	140	140	140	140
3	**Total Jumlah Perpustakaan (1+2)**	**136**	**141**	**141**	**141**	**141**
4	Jumlah Perpustakaan yang telah dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan	0	0	0	0	0
B	**Koleksi Buku Perpustakaan**					
1	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah	28.479	28.638	29.677	32.597	32.597
2	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Desa	80.050	80.050	80.490	80.490	80.490
3	**Total Koleksi Buku Perpustakaan (1+2)**	**108.529**	**108.688**	**110.167**	**113.087**	**113.087**
C	**Pengunjung Perpustakaan**					
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	12.000	9.360	10.231	12.487	17.026
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Non Pemerintah Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	**Total Pengunjung Perpustakaan (1+2)**	12.000	9.360	10.231	12.487	17.026
D	**Naskah Kuno**					
1	Jumlah Naskah Kuno di masyarakat yang terdata	1	1	1	1	1
2	Jumlah Naskah Kuno di masyarakat yang terdata dan telah dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1	1	1	1	1
E	**Indikator Utama**					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	n/a	n/a	41,09	44,98

BAPPEDA HALUT

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Halmahera Utara, 2024

Tabel berikut menyajikan persentase desa yang memiliki perpustakaan menurut kecamatan pada tahun 2023.

Tabel 2.76. Desa Memiliki Perpustakaan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Desa Memiliki Perpustakaan Desa	
			Jumlah	Persentase
1	Malifut	22	7	31,8
2	Kao Teluk	11	3	27,3
3	Kao	14	5	35,7
4	Kao Barat	21	2	9,5
5	Kao Utara	12	4	33,3
6	Tobelo Selatan	13	7	53,8
7	Tobelo Barat	6	3	60,0
8	Tobelo Timur	6	4	66,7
9	Tobelo	10	6	60,0
10	Tobelo Tengah	9	7	77,8
11	Tobelo Utara	10	3	30,0
12	Galela	7	2	28,6
13	Galela Selatan	7	4	57,1
14	Galela Barat	9	4	44,4
15	Galela Utara	12	1	8,3
16	Loloda Utara	18	9	50,0
17	Loloda Kepulauan	10	3	30,0
Halmahera Utara		**196**	**74**	**37,8**

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Halmahera Utara, 2024

Q. Kearsipan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten dalam urusan Kearsipan meliputi sub urusan: 1) Pengelolaan Arsip; 2) Perlindungan dan Penyelematan Arsip; dan 3) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah. Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Sistem informasi kearsipan sepatutnya tersedia agar dapat mendukung efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah terus berupaya menyelenggarakan kegiatan pembinaan dalam pengelolaan arsip secara baku, dimana pada tahun 2023, persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku telah mencapai 100 persen.

BAPPEDA HALUT

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. Capaian kinerja pada urusan-urusan pilihan ini diuraikan sebagai berikut.

A. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Kelautan dan Perikanan meliputi sub urusan: 1) Perikanan Tangkap (Pemberdayaan nelayan kecil; Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)); dan 2) Perikanan Budidaya (Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan Pengelolaan pembudidayaan ikan).

Hingga tahun 2023, kapal penangkap ikan di Kabupaten Halmahera Utara masih didominasi jenis perahu motor tempel dan perahu tanpa motor. Pada tahun 2023 proporsi perahu motor tempel sebesar 50,8 persen atau telah berkurang dibandingkan proprosi pada tahun 2020 yang sebesar 67,1 persen. Keberadaan kapal penangkap ikan jenis Pajeko/Purse Seine dan Kapal Motor yang memilki produktifitas lebih tinggi juga mengalami peningkatan dibanding empat tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlahnya sebanyak 27 kapal kemudian meningkat sehingga menjadi 160 kapal pada tahun 2023. Semakin baiknya sarana perikanan tangkap diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan daerah.

Pada kurun waktu 2020-2023, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera belum terlihat konsisten. Pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 23,8 ton atau turun 6,28 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi di tahun 2023 belum pulih sebagai ekses dari pembatasan aktifitas dan sebagai respon atas Pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, upaya-upaya untuk meningkatkan keberdayaan nelayan terus dilakukan melalui pembinaan, melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), dan Kelompok Pengolah Pemasar (POKLAHSAR).

Gambaran kinerja sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2020-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.77, sementara sebaran kelompok usaha nelayan menurut kecamatan pada Tabel 2.78.

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.77. Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
A	**Kapal Penangkap Ikan Menurut Jenisnya**				
1	Perahu Motor Tempel	4.110	4.170	4.204	2.921
2	Perahu Tanpa Motor	1.992	2.038	2.078	2.668
3	Pajeko/Purse Seine dan Kapal Motor	27	38	47	160
	Total	**6.129**	**6.246**	**6.329**	**5.749**
B	**Produksi dan Konsumsi**				
1	Perikanan Tangkap (Ton)	23.364	20.659	25.082	23.452
2	Perikanan Budidaya (Ton)	374,42	300,8	333,52	368
	Total Produksi (Ton)	**23.738**	**20.960**	**25.416**	**23.820**
	Pertumbuhan produksi perikanan (persen)		**-11,71**	**21,26**	**-6,28**
3	Produksi Pengolahan Ikan (Ton)	1.100,0	864,1	1.110,5	1.100,0
4	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	60,25	64,6	64,8	55,42
C	**Pemberdayaan Nelayan**				
1	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	7.057	5.798	3.037	3.037
2	Usaha Bersama (KUB)	252	252	252	160
3	Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN)	96	118	123	123
4	Pengolah Pemasar (POKLAHSAR)	42	45	46	46

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Utara, 2024

Tabel 2.78. Kelompok Usaha Nelayan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah RTP	KUB	POK-DAKAN	POK-LAHSAR	POK-MAWAS
1	Malifut	96	-	-	-	-
2	Kao Teluk	252	-	-	7	-
3	Kao	187	-	-	4	-
4	Kao Barat	245	24	22	-	-
5	Kao Utara	173	-		4	-
6	Tobelo Selatan	280	12	15	30	-
7	Tobelo Barat	16	2	-	-	-
8	Tobelo Timur	147	3	3	-	-
9	Tobelo	172	4	4	-	-
10	Tobelo Tengah	201	7	4	-	-
11	Tobelo Utara	106	2	2	10	-
12	Galela	167	5	4	-	-
13	Galela Selatan	392	42	42	-	-
14	Galela Barat	148	7	3	-	-
15	Galela Utara	181	3	1	-	-
16	Loloda Utara	117	-	-	-	-
17	Loloda Kepulauan	157	-	-		-
Halmahera Utara		**3.037**	**111**	**100**	**55**	**4**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Utara, 2024 / RTP=Rumah Tangga Perikanan/Klp=Kelompok

BAPPEDA HALUT

B. Pariwisata

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pariwisata meliputi sub urusan: 1) Destinasi Pariwisata (Pengelolaan daya tarik wisata; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata; Pengelolaan destinasi pariwisata); 2) Pemasaran pariwisata (Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata); 3) Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif; dan 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Urusan Pariwisata di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, berdasarkan Peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah.

Tabel berikut menyajikan gambaran kinerja urusan pariwisata Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun Tahun 2020-2024.

Tabel 2.79. Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
A	**Destinasi**				
1	Jumlah Potensi Destinasi/ODTW	36	36	36	36
2	Jumlah Potensi Destinasi/ODTW yang telah dikembangkan (oleh Pemda/Swasta/ Masyarakat)	6	6	6	6
	Persentase Potensi Destinasi/ODTW yang telah dikembangkan	**16,67**	**16,67**	**16,67**	**16,67**
B	**Kunjungan Wisatawan**				
1	Wisatawan Mancanegara (orang)	63	44	101	892
	Pertumbuhan kunjungan Wisma (persen/tahun)		**-30,16**	**129,55**	**783,17**
2	Wisatawan Nusantara (orang)	31.909	53.890	71.282	183.697
	Pertumbuhan kunjungan Wisnus (persen/tahun)		**68,89**	**32,27**	**157,70**
C	**Rerata Lama Tinggal Wisatawan**				
1	Wisatawan Mancanegara (Hari)	5	5	5	5
2	Wisatawan Nusantara (Hari)	7	7	7	7
D	**Ekonomi Kreatif**				
1	Jumlah Pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

Berdasarkan Tabel 2.79 untuk Potensi Wisata dalam 4 tahun terakhir tidak mengalami perumbuhan dikarenakan belum ada pengembangan potensi wisata yang terbaru di Kabupaten Halmahera Utara, namun untuk Kunjungan Wisatawan mengalami kenaikan. Ekonomi Kreatif di Halmahera Utara tercatat ada 108 kelompok Ekonomi Kreatif di tahun 2023 namun belum ada yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan.

C. Pertanian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pertanian meliputi sub urusan: 1) Sarana Pertanian (Pengawasan penggunaan sarana pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik/SDG hewan; Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak; Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer; Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak; Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak); 2) Prasarana Pertanian (Pengembangan prasarana pertanian; Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak; Pengembangan lahan penggembalaan umum); 3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 4) Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; dan
5) Perizinan Usaha Pertanian. Urusan Pertanian di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan sektor pertanian Kabupaten Halmahera Utara, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, populasi dan produksi komoditas peternakan, serta Kapasitas Penyuluh, Petani dan Kelompok Tani.

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan pertanian dalam kurun waktu 2020-2023 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.80. Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
A	**Produksi Tanaman Pangan**				
1	Padi Sawah (Ton)	24.093,9	29.976,8	34.473,3	30.283,5
2	Padi Ladang (Ton)	10.732,5	7.641,0	4.966,7	7.235,0
3	Jagung (Ton)	17.606,4	79.660,0	59.745,0	85.806,1
4	Kacang Tanah (Ton)	537,0	384,4	442,1	718,3
5	Kacang Hijau (Ton)	260,3	402,8	463,2	1.641,8
6	Ubi Kayu (Ton)	33.425,0	77.588,4	67.501,9	18.238,1

BAPPEDA HALUT

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
7	Ubi Jalar (Ton)	12.780,0	21.203,0	23.959,4	14.997,5
	Total (Ton)	**99.435,1**	**216.856,4**	**191.551,5**	**158.920,2**
	Pertumbuhan produksi (persen/tahun)		**118,09**	**-11,67**	**-17,04**
B	**Produksi Tanaman Hortikultura**				
1	Aneka Cabai	59,1	226,4	135,7	1046,2
2	Bawang	145,8	171,4	183,9	313,7
No	**Uraian**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
3	Tomat	980,6	416,6	1.078,7	2387,4
4	Sayur-sayuran (Ton)	388,4	336,2	641,7	9765,1
5	Buah-buahan (Ton)	3.240,9	15.738,6	16.126,7	1.444,0
	Total (Ton)	**4.814,8**	**16.889,2**	**18.166,7**	**14.956,3**
	Pertumbuhan produksi (persen/tahun)		**250,77**	**7,56**	**-17,67**
C	**Produksi Tanaman Perkebunan**				
1	Kelapa	71.928,0	72.394,2	71.928,0	71.987,4
2	Pala	1.789,3	1.842,2	1.803,4	1.913,9
3	Cengkeh	602,0	635,6	673,8	635,6
4	Kakao	448,0	375,8	447,6	350,4
	Total	**74.767,3**	**75.247,9**	**74.852,8**	**74.887,3**
	Pertumbuhan produksi (persen/tahun)		**0,64**	**-0,52**	**0,05**
D	**Produksi Peternakan**				
1	Daging Sapi (Kg)	263.114	238.560	244.440	246.000
2	Daging Kambing (Kg)	13.100	11.056	11.168	11.304
3	Daging Babi (Kg)	90.445	18.675	19.155	19.335
4	Daging Unggas (Kg)	24.483	24.674	25.189	6.550
	Total (Ton)	**391.142**	**292.965**	**299.952**	**283.189**
	Pertumbuhan produksi (persen/tahun)		**-25,10**	**2,38**	**-5,59**
E	**Produktifitas Tanaman Pangan**				
1	Padi (Ton/Ha)	5,19	5,30	5,98	5,30
2	Jagung (Ton/Ha)	0,92	5,60	5,60	5,60
	Rata-rata Produktifitas (Ton/Ha)	**3,06**	**5,45**	**5,79**	**5,45**
	Peningkatan produktifitas (persen)		78,22	6,25	-5,88
F	**Produktifitas Tanaman Hortikultura**				
1	Cabai dan Bawang (Ton/Ha)	204,88	397,79	319,65	1.359,84
	Rata-rata Produktifitas (Ton/Ha)	102,44	198,89	159,83	679,92
	Peningkatan produktifitas (persen)	-	94,16	-19,64	325,41
G	**Produktifitas Tanaman Perkebunan**				
1	Kelapa	71.928	72.394,2	71.928	71.987
2	Pala	1.789	1.842	1.803	1.914
3	Cengkeh	602	636	674	636
4	Kakao	448	376	448	350
	Rata-rata Produktifitas (Ton/Ha)	**18.692**	**18.812**	**18.713**	**18.722**
	Peningkatan produktifitas (persen)	-	0,64	-0,53	0,05
H	**Populasi Peternakan**				

BAPPEDA HALUT

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Sapi (ekor)	19.844	22.124	23.382	24.326
2	Kambing (ekor)	15.312	15.912	17.359	18.489
3	Babi (ekor)	31.056	31.656	32.224	34.464
4	Ayam Buras (ekor)	93.140	93.840	96.593	98.349
4	Itik (ekor)	16.698	17.348	18.899	20.631

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara, 2024

D. Kehutanan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Kehutanan, yaitu Sub Urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam bentuk Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) kabupaten/kota. Urusan kehutanan di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Sampai dengan tahun 2023, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait penyelenggaraan urusan kehutanan difokuskan pada upaya menjaga kualitas lingkungan hidup, yang termasuk didalamnya adalah kualitas tutupan hutan. Dalam konteks ini, Lahan Kritis yang terehabilitasi sampai dengan dengan tahun 2023 mencapai 10.042 Ha.

E. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yaitu Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, dalam bentuk pelayanan Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota. Urusan ESDM di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dengan tugas pokok “Melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan, Metrologi dan Perlindungan Konsumen, Perindustrian dan ESDM”.

Sampai dengan tahun 2023, sumber pasokan utama tenaga listrik di Kabupaten Halmahera Utara berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada Sistem Tobelo-Malifut dengan daya terpasang sebesar 66.905 KW. Sistem pembangkit PLN yang ada seluruhnya menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), dimana

BAPPEDA HALUT

Pembangkit Listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) belum tersedia. Pemanfaatan EBT masih terbatas pada penggunaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Pelayanan PLN telah menjangkau seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sampai dengan tahun 2023, jumlah desa yang telah teraliri listrik sebanyak 189 desa atau 96,43 persen. Adapun berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 99,87 persen yang terdiri dari 98,08 persen bersumber dari PLN dan sebesar 1,78 persen yang bersumber dari listrik Non PLN. Dengan demikian masih terdapat 0,13 persen rumah tangga di Kabupaten Halmahera Utara yang belum menggunakan listrik, PLN maupun Non PLN.

Tabel 2.81. Distribusi Persentase Rumah Tangga dan Sumber Penerangan di Kabupaten

No	Data Listrik	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Listrik Pln	97,03	95,00	96,12	98,08
2	Listrik Non Pln	0,93	3,47	1,95	1,78
3	Bukan Listrik	2,04	1,53	1,93	0,13

Sumber data: BPS Maluku Utara, Tahun 2024, 2023,2022,2021

Berdasarkan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa terkait kelistrikan sudah bukan menjadi kewenagan kabupaten maka data yang di peroleh hanya bersumber dari BPS Halmahera Utara, terkait data desa yang sudah teraliri listrik untuk tahun 2020-2023

F. Perdagangan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perdagangan meliputi sub urusan: 1) Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan); 2) Sarana Distribusi Perdagangan (Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat); 3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (penjaminan ketersediaan, pemantauan harga dan stok, operasi pasar); 4) Pengembangan Ekspor (promosi dagang, kampanye pencitraan); dan 5) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Urusan Perdagangan di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAPPEDA HALUT

Sampai dengan tahun 2023, di Kabupaten Halmahera Utara telah terdapat 42 pasar modern/pusat perbelanjaan, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 26 buah. Pasar modern adalah pasar dimana penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga. Pasar ini umumnya menjual sembilan bahan poko (sembako) dan alat-alat rumah tangga. Pada Tahun 2023 kenaikan atau penambahan pasar modern berasal dari masuknya *inconvenience-inconvenience strore*, dalam hal ini waralaba nasional Alfamidi dan Indomaret. Terkecuali Tobelo Timur, pada tahun 2023 tersedia sebanyak 23 Pasar rakyat/tradisional di 16 kecamatan, tetapi hanya 14 diantaranya atau 60,87 persen yang beroperasi secara penuh/normal. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar.

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan dalam kurun waktu 2020-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82. Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
A	**Perizinan Usaha Perdagangan**				
1	Jumlah izin usaha perdagangan yang diterbitkan (berdasarkan (IPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan, dll)	863	895	995	997
	Pertumbuhan perizinan usaha perdagangan (persen)	**11,9**	**3,70**	**11,2**	**0,2**
B	**Sarana Perdagangan**				
1	Jumlah Pasar Modern/Pusat Perbelanjaan (kumulatif)	26	42	42	42
2	Jumlah Pasar Tradisional/Rakyat (kumulatif)	23	23	23	23
3	Jumlah Pasar Tradisional/Rakyat yang beroperasi penuh (kumulatif)	10	14	14	14
	Persentase Pasar Tradisional/Rakyat yang beroperasi penuh	**43,5**	**60,9**	**60,9**	**60,9**
C	**Pengawasan Barang**				
1	Jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	40	40	40	40
2	**Persentase jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**	**32,5**	**32,5**	**32,5**	**32,5**

BAPPEDA HALUT

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
D	**Perlindungan Konsumen**				
	Jumlah laporan pengaduan konsumen	9	33	27	125
	Jumlah laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti/diselesaikan	9	33	27	125
	Persentase laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti/diselesaikan	**100**	**100**	**100**	**100**
D	**Ekspor**				
1	Total Nilai ekspor komoditas non migas dan pertambangan (Rp. juta)	2.422,7	n/a	n/a	n/a
	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non migas dan pertambangan (rupiah)	**-46,8**	**n/a**	**n/a**	**n/a**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Utara, 2024

Dari tabel, setiap tahunnnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara terus menerbitkan izin usaha perdagangan, yang meliputi IPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan, dll, sesuai kewenangan. Secara kumulatif dengan tahun dasar 2020 (863 izin), hingga tahun 2023 jumlah izin yang diterbitkan telah mencapai 997 izin, atau meningkat 195,5 persen dalam empat tahun terakhir. Namun secara keseluruhah pertumbuhan perizinan usaha memperlihatkan tren perlambatan setiap tahunnya.

Menidaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara terus melakukan upaya pengawasan atas barang beredar, dalam hal ini terdapat 123 jenis barang yang terdiri dari 105 jenis barang kategori Non Pangan dan 16 jenis barang kategori Pangan. Pada tahun 2020, terdapat 40 atau sekitar 32,5 persen jenis barang yang diawasi meliputi 30 jenis kategori Non Pangan dan 10 jenis kategori Pangan, meningkat dari tahun sebelumnya yang baru mencakup 35 atau 28,5 jenis barang. Belum optimalnya pengawasan karena saat ini Perindustrian dan Perdagangan baru dibekali seorang Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) yang bersertifikat. Pengawasan Barang pangan lebih khusus diserahkan ke Dinas Kesehatan, sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih berfokus pada barang-barang khusus seperti material-material bangunan, sampai peredaran uang palsu. Pengawasan umum dilakukan secara berkala, 3 bulan sekali (terjadwalkan), dengan fokus kepada ke bahan pangan (kadaluarsa), sementara pengawasan khusus bila ada pengaduan ke dinas baik lisan maupun tulisan. Dalam hal

BAPPEDA HALUT

terdapat pengaduan maka dinas akan menindaklanjuti, dengan disertai berita acara hasil pengawasan. Sejauh ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara dapat menindaklanjuti/menyelesaikan seluruh laporan pengaduan konsumen yang diterima.

Upaya pengembangan ekspor, khususnya terhadap komoditas non migas dan pertambangan terus dilakukan. Komoditi ekspor dimaksud adalah komoditas yang dikeluarkan dari daerah asal sampai ke Negara tujuan ekspor, dengar menyertakan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara. Pada tahun 2020 ekspor masih terbatas pada non komoditas yaitu produk ikan fufu ke Jepang, dengan nilai ekspor pada tahun 2020 tercatat senilai 2,42 milyar rupiah atau turun 46,8 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,55 milyar rupiah.

G. Perindustrian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perindustrian meliputi sub urusan: 1) Perencanaan Pembangunan Industri (Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota); 2) Perizinan (Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah; IPUI bagi industri kecil dan menengah; IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota); 3) Sistem Informasi Informasi Nasional (penyampaian laporan industri). Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Berdasarkan kualifikasinya, hingga tahun 2023 terdapat 2.146 perusahaan industri di Kabupaten Halmahera Utara yang didominasi industri mikro. Peningkatan signifikan pada jumlah perusahaan industri mikro karena adanya re-kualifikasi pada industri kecil, yang sebagian besarnya menjadi industri mikro serta sebagian lainnya menjadi perusahaan industri sedang. Gambaran lengkap perkembangan perusahaan industri di Kabupaten Halmahera Utara menurut kualifikas dan klasifikasi usaha dalam kurun waktu 2020-2023 tersaji dalam tabel berikut.

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.83. Perusahaan Industri Menurut Kualifikasi dan Klasifikasi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	**Kualifikasi**				
a	Perusahaan Besar	13	13	73	64
b	Perusahaan Sedang	-	-	19	342
c	Perusahaan Kecil	931	711	1.063	30
d	Perusahaan Mikro	-	-	-	1.710
	Jumlah	**944**	**724**	**1.155**	**2.146**
2	**Klasifikasi (Perusahaan Kecil & Mikro)**				
a	Pangan	245	270	270	284
b	Kimia dan Bahan Bangunan	145	150	150	150
c	Sandang	84	70	70	70
d	Logam/Elektronika	20	18	18	18
e	Kerajinan dan Umum	25	15	15	15
	Jumlah	**519**	**523**	**523**	**537**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Utara, 2024

Ditelusur menurut klasifikasinya, perusahaan industri kecil dan mikro di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 didominasi oleh industri pangan, serta industri kimian dan bahan bangunan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel di berikut.

Tabel 2.84. Perusahaan Industri Kecil Menurut Klasifikasi Industri Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

No	Klasifikasi	Perusahaan		Tenaga Kerja	
		Jml	(%)	Jml	TK/ Perusahaan
1	**Pangan**	**284**	**52,89**	**307**	1,1
	Roti/Kue Kering	254		269	1,1
	Tahu/Tempe	5		8	1,6
	Gula Aren	20		25	1,3
	Pengasapan Ikan	5		5	1,0
2	**Kimia dan Bahan Bangunan**	**150**	**27,93**	**345**	2,3
	Penggergajian Kayu	10		25	2,5
	Perabot Kayu	110		230	2,1
	Percetakan/Fotocopy	5		10	2,0
	Bata Merah dan Press	25		80	3,2
3	**Sandang**	**18**	**3,35**	**24**	1,3
	Penjahitan	18		24	1,3
4	**Logam/Metal**	**70**	**13,04**	**135**	1,9
	Alat Dapur	15		15	1,0
	Reparasi Bengkel Umum	55		120	2,2

BAPPEDA HALUT

5	**Kerajinan dan Umum**	**15**	**2,79**	**23**	1,5
	Kerajinan Anyaman	10		15	1,5
	Kerajinan Lainnya	5		8	1,6
	Total	**537**	**100,00**	**834**	1,6

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Utara, 2024

H. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia, guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Transmigrasi memiliki tujuan yaitu untuk menyeimbangkan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, mempercepat lajunya pembangunan daerah, pemerataan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta meningkatkan taraf hidup para transmigrasi dan memperkuat ketahanan nasional.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Transmigrasi meliputi sub urusan: 1) Perencanaan kawasan transmigrasi; 2) Pembangunan kawasan transmigrasi; dan 3) Pengembangan kawasan transmigrasi.

Dari sisi perencanaan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan pemilihan lokasi transmigrasi di Kecamatan Tobelo Barat, tepatnya di Desa Wangongira ini. Pemilihan didasari oleh adanya aspirasi masyarakat setempat yang kemudian dijembatani oleh Pemerintahan Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni dengan melakukan upaya Pembukaan Unit Permukiman Transmigrasi di Wangongira. Program transmigrasi ini bertujuan untuk penyebaran dan pemerataan penduduk. Masyarakat setempat diharapkan dapat hidup berdampingan dengan masyarakat Transmigran Penduduk Asing (TPA) dilokasi SP Wangongira. Hingga tahun 2023, sejumlah dokumen perencanaan telah tersedian, yaitu Master Plan KTM (Kota Terpadu Mandiri); dan RTSP (Rencana Teknik Satuan Permukiman Transmigrasi).

Dalam membangun pemukiman transmigrasi dengan pola usaha apapun, harus didukung oleh ketersediaan lahan yang memenuhi kriteria kelayakan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi. Kriteria kelayakan meliputi layak huni, layak usaha, layak berkembang, layak lingkungan, dan *clear and clean* (4 L dan 2C). Pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 belum dilaksanakan:

BAPPEDA HALUT

1) Pembangunan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Kawasan Toliwang Kecamatan Kao Barat, disebabkan: Legalitas Lahan yang diperuntuhkan untuk Pusat KTM belum Clear and Clean; belum adanya rekomendasi Gubernur terkait Program KTM Kawasan Toliwang;
2) Pembangunan SP (Satuan Permukiman) Baru Wangongira Kecamatan Tobelo Barat, disebabkan: Legalitas Tanah belum memenuhi kriteria clear and clean (2C), sementara dalam proses usulan HPL ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup; serta terdapat beberapa aspek perencanaan lain lain yang masih harus dilengkapi.

Namun demikian, untuk mewujudkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus melakukan sosialisasi secara intens kepada masyarakat.

Di sisi pengembangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya mengembangkan kawasan transmigrasi. Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) merupakan wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi, yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan, yang diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Kabupaten Halmahera Utara sejak tahun 1982 menjadi kabupaten pengembangan wilayah transmigrasi, yaitu di UPTD Biang Desa Waringin Lamo, Sidodadi di Kecamatan Kao; UPTD Pediwang Desa Sukamaju, UPTD Togoliua Desa Trans Hero di Kecamatan Tobelo yang sekarang menjadi Kecamatan Tobelo Barat; UPTD Toliwang B/SPIV Desa Wonosari, Toliwang, UPTD Toliwang C Desa Beringin Agung, Makarti, Margomulyo, UPTD Leleseng Desa Sangaji Jaya, UPTD Toboulamo Di Kecamatan Kao yang sekarang menjadi Kecamatan Kao Barat, sebagai pengembangan wilayah transmigrasi mandiri dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat transmigrasi dan masyarakat secara umum melalui pengembangan komoditi unggulan khas Kabupaten Halmahera Utara dengan berbagai pembangunan, baik dari pemerintah Pusat maupun pemerintah Kabupaten Halmahera Utara antara lain : Ketahanan Pangan melalui Program Tanaman Pangan dan Perkebunan, Pendidikan, Kesehatan, dan rencana pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Saat ini terdapat 3 (tiga) Satuan Pemukiman (SP) yang masuk dalam binaan yaitu Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, yaitu:

BAPPEDA HALUT

1) UPT Toliwang F SP.5 Kecamatan Kao Barat (sementara dalam proses Desa Definitif);
2) UPT Toliwang Togoliua Kecamatan Tobelo Barat (sementara dalam proses Desa Definitif); dan
3) UPT Toboulamo Kecamatan Kao Barat.

Ketiga Satuan Pemukiman termasuk dalam kategori SP berkembang. Adapun yang menjadi hambatan atau kendalam dalam proses pengembangan kawasan untuk persiapan Desa Definitif, yaitu Penerbitan Sertifikat Hak Milik, yang sementara masih dilakukan Validasi Data secara bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmehara Utara.

2.3.4. Fokus Layanan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

Unsur pendukung, penunjang, pengawasan pemerintahan daerah, kewilayahan, serta pemerintahan umum, meliputi: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat, Kecamatan, serta Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. Unsur Pendukung

Unsur pendukung urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Capaian kinerja dalam penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintaan di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.85. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
A	**Sekretariat Daerah**				
1a	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	B	B	B
1b	Nilai/Skor SAKIP	60,55	60,80	61,85	62,51
2a	Jumlah kerjasama daerah (MoU)	12	4	4	4
2b	Jumlah kerjasama daerah (MoU) yang ditindaklanjuti	12	4	4	4
2c	Persentase kerjasama daerah (MoU) yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
3a	Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa	361	297	300	1.410

BAPPEDA HALUT

3b	Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan Metode Kompetitif (Lelang)	38	74	152	136
3c	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan Metode Kompetitif (Lelang)	10,53	24,91	50,67	9,64
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Hasil Survey)	78,25	83,91	79,54	n/a
B	**Sekretariat DPRD**				
1	Jumlah Ranperda dalam Prolegda	13	10	3	5
2	Jumlah Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	8	7	3	1
3	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	61,54	70,00	100,0	20,0

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Utara, 2024; Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Utara, 2024

B. Unsur Penunjang

Capaian kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintaan bidang perencanaan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2020-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.86. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
A	**Perencanaan***				
1a	Jumlah Program dalam RPJMD tahun berkenaan	500	260	239	275
1b	Jumlah Program dalam RKPD tahun berkenaan yg nomenklaturnya sesuai dengan RPJMD	357	250	238	265
	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah (persen)	71,40	96,15	99,58	96,36
2a	Jumlah Program Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (PMP) dalam RPJMD tahun berkenaan	190	79	78	82
2b	Jumlah Program Bidang PMP dalam RKPD tahun berkenaan yg nomenklaturnya sesuai dengan RPJMD	141	78	78	80
	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah bidang Bidang PMP (persen)	74,21	99,58	100	97,56
3a	Jumlah Program Bidang Perekonomian dan SDA (PSDA) dalam RPJMD tahun berkenaan	94	57	55	60
3b	Jumlah Program Bidang PSDA dalam RKPD tahun berkenaan yg nomenklaturnya sesuai dengan RPJMD	64	56	54	59
	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah bidang Bidang PSDA (persen)	68,09	99,58	99,58	99,58
4a	Jumlah Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IKw) dalam RPJMD tahun berkenaan	216	115	106	133
4b	Jumlah Program Bidang IKw dalam RKPD tahun berkenaan yg nomenklaturnya sesuai dengan RPJMD	152	113	106	126

BAPPEDA HALUT

	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah bidang Bidang IKw (persen)	70,37	98,26	100	98,60
B	**Evaluasi & Pengendalian**				
1	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (seluruh indikator Bab 8 RPJMD) (persen)	72,86	72,86	91,77	80,97
2	Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang PMP (persen)	72,72	72,72	82,33	70,16
3	Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang PSDA (persen)	81,69	81,69	97,2	80,29
4	Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang IKw (persen)	76,28	76,28	95,78	92,46

Sumber: Bappeda Kab. Halmahera Utara, 2024 / *) Termasuk program/kegiatan

Capaian kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2020-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.87. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian & Pengembangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
1	Indeks Inovasi Daerah (dalam Skor/Angka)	6,48	6,48	20,44	16,48
2	Indeks Inovasi Daerah (dalam Predikat)	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif
3	Jumlah Inovasi Daerah yang aktif/dimanfaatkan secara berkelanjutan	13	13	17	21
4	Jumlah Produk/Dokumen Penelitian dan Pengembangan pada tahun berkenaan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah (Perda/Perkada/SK/dll)	-	2	3	2

Sumber: Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kab. Halmahera Utara, 2024
*) https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/

Capaian kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintaan bidang keuangan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2020-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.88. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
A	**Pendapatan**				
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	10,55	10,44	7,21	13,32
2	Rasio Efektifitas PAD (persen)	88,16	89,07	83,85	75,93
3	Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah (persen)	21,31	26,49	15,82	16,41

BAPPEDA HALUT

B	**Pengelolaan Keuangan**				
1	Rasio efektifitas belanja daerah (persen)	82,78	84,09	83,03	77,15
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
C	**Pengelolaan BMD**				
1	Pertumbuhan Nilai Barang Milik Daerah – Audited Neraca (persen)	8,18	1,88		

Sumber: Badan Keuangan & Aset Daerah Kab. Halmahera Utara, 2024

Capaian kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintaan bidang kepegawaian dan diklat di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2020- 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.89. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian & Diklat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
A	**Kepegawaian**				
1	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)	3.476	3.471	3.609	3.525
	– Jumlah ASN berkualifikasi pendidikan tinggi	1.142	1.352	1.680	2.254
	Persentase ASN berkualifikasi pendidikan tinggi	32,85	38,95	46,55	63,94
2	Kedisiplinan Aparatur				
	– Jumlah pelanggaran disiplin (kasus)	3	1	2	3
	– Jumlah pelanggaran disiplin (ASN)	6	1	8	6
	Rasio pelanggaran disipin ASN (per 1000 ASN)	1,73	0,29	2,22	1,70
3	Struktural				
	– Jumlah jabatan eseloneering yang tersedia	704	708	708	709
	– Jumlah jabatan eseloneering yang terisi	531	499	471	446
	Persentase jabatan eseloneering yang terisi	75,43	70,48	66,53	62,91
4	Fungsional				
	– Jumlah ASN Fungsional (Guru dan Tenaga Kesehatan)	2.080	2.074	2.177	1.947
	– Jumlah ASN Fungsional Bukan Guru dan Tenaga Kesehatan	867	898	961	1.132
5	Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	n/a	19	72	76
6	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IPP)	n/a	33	46	60
B	**Pendidikan dan Pelatihan**				

BAPPEDA HALUT

1	Jumlah ASN yang menduduki jabatan struktural tahun berkenaan	531	499	471	446
2	Jumlah ASN yang menduduki jabatan struktural tahun berkenaan telah mengikuti Diklat Struktural	205	205	93	56
	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural tahun berkenaan telah mengikuti Diklat Struktural	38,61	41,08	19,75	12,56
3	Jumlah ASN Fungsional Bukan Guru dan Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	69	59	128	40
	Persentase ASN Fungsional Bukan Guru dan Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	7,96	6,57	13,32	3,53

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Halmahera Utara, 2024

C. Unsur Pengawasan

Unsur pengawasan pemerintahan daerah diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara, dengan capaian kinerja sampai dalam kurun waktu 2020-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.90. Kinerja Layanan Unsur Pengawasan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
A	**Pengawasan**				
1a	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan	1.045	1.063	1.111	1.497
1b	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	751	763	783	490
	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	71,87	71,78	70,48	32,73
2a	Jumlah Pengaduan Masyarakat	24	11	14	15
2b	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	13	2	5	13
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	54,17	18,18	35,71	86,67
B	**Pembinaan**				
3	Level Marturitas Sistem Pengendalian Intern Pemda (SPIP) (berdasarkan hasil QA BPKP)	3	3	3	2
4	Skor Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (berdasarkan hasil QA BPKP)	3,00	3,00	3,028	2,924

Sumber : Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara, 2024

D. Unsur Kewilayahan

Dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Utara dimana seluruh satuan wilayah terkecilnya adalah desa, peran kecamatan menjadi sangat sentral dalam ikut mendorong kemajuan dan kemandirian desa-desa. Sebagaimana

BAPPEDA HALUT

telah diuraikan pada bab terdahulu, sampai dengan tahun 2020 belum ada satupun desa yang berstatus Desa Mandiri. Lebih dari dari 50 persen desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Merujuk UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 226, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat kewenangan dan bertanggung jawab kepada bupati.

Peran pemerintah kecamatan sebagai perpanjangan tangan kepala daerah, meliputi antara lain penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak-pihak terkait, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Dengan kewenangan yang dimiliki, Camat dapat mendorong percepatan perkembangan desa-desa dalam berbagai dimensi, yaitu kelembagaan desa, sosial budaya, ekonomi, jaringan prasarana dan sarana, serta lingkungan. Tabel berikut menyajikan gambaran jumlah desa di 17 kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 menurut perolehan skor IDM level berkembang ke atas (>0,6) pada seluruh dimensi. Data ini setidaknya dapat memberikan gambaran tentang efektifitas penyelenggaraan fungsi unsur kewilayahan di Kabupaten Halmahera Utara.

Tabel 2.91. Proporsi Desa Berkembang – Maju Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

No	Kecamatan	Jml Desa	Desa dengan Indeks >0,6 Menurut Dimensi							
			Sosial		Ekonomi		Lingkungan		IDM	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Malifut	22	22	100	2	9,09	16	72,7,9	16	72,7
2	Kao Teluk	11	11	100	1	4,54	10	90,9	11	100
3	Kao	14	14	100	2	14,3	14	100	12	85,7
4	Kao Barat	21	21	100	0	0,0	16	76,1	12	42,8
5	Kao Utara	12	10	83,3	4	33,3	9	75,0	8	66,6
6	Tobelo Selatan	13	12	92,3	1	7,6	12	92,3	12	92,3
7	Tobelo Barat	5	4	80.0	1	20,0	4	80,0	2	40,0
8	Tobelo Timur	6	5	83,3	0	0,0	5	83,3	3	50,0
9	Tobelo	10	10	100	6	60,0	9	90,0	10	100
10	Tobelo Tengah	9	9	100	5	55,5	9	100	9	100
11	Tobelo Utara	10	10	100	2	20,0	10	100	7	70,0
12	Galela	7	6	85,7	5	71,4	3	42,8	5	71,4

BAPPEDA HALUT

13	Galela Selatan	7	7	100	5	71,4	7	100	7	100
14	Galela Barat	9	9	100	1	11,1	6	66,6	7	77,7
15	Galela Utara	12	5	41,7	1	8,3	12	100	6	50,0
16	Loloda Utara	18	13	72,2	0	0,0	14	77,7	4	22,2
17	Loloda Kepulauan	10	5	50,0	0	0,0	7	70,0	0	0,0
Halmahera Utara		**196**	**173**	**88,2**	**36**	**18,3**	**163**	**83,1**	**131**	**66,8**

Sumber: KemendesPDTTrans, 2024, diolah

E. Unsur Pemerintaan Umum

Unsur pemerintahan umum diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara, dengan capaian kinerja sampai dalam kurun Tahun 2020-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.92. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2023

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah partai politik dan lembaga pendidikan tingkat kabupaten yang memperoleh fasilitasi Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (kumulatif)	3	3	3	3
2	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan (kumulatif)	17	17	17	17
3	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada (persen)	78,12	78,12	78,12	78,12

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Utara, 2024

2.4. ASPEK DAYA SAING

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Kondisi aspek daya saing di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan nilai tukar petani.

A) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga atas

BAPPEDA HALUT

barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga dalam konteks pengeluaran konsumsi berfungsi sebagai konsumen akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita penduduk Kabupaten Halmahera Utara selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.93. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	792.568,1	949.166,5	1.048.042,0	1.055.288,7	1.181.639,0
Pangan (Rp)	429.189,0	485.097,3	541.324,0	575.362,7	615.035,0
Non Pangan (Rp)	363.379,1	464.069,2	506.718,0	479.926,0	566.604,0
Persentasi pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	**45,85**	**48,89**	**49,89**	**45,48**	**47,95**

Sumber: Provinsi Maluku Utara Dalam Angka, 2019-2023

Dari tabel, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.055.288,7 meningkat menjadi Rp. 1.181.639,0 pada tahun 2023. Dibandingkan lima tahun sebelumnya, kondisi pada tahun 2022 telah meningkat 49,1 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun terakhir masih didominasi oleh kelompok makanan (pangan), dengan kecenderungan yang fluktuatif dalam rentang 50 sampai 55 persen. Pada tahun 2023, persentase pengeluaran konsumsi non makanan sebesar 47,95 persen atau meningkat 2,47 persen poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 45,48 persen yang merupakan titik terendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 45,85 persen.

B) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah, karena mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk usaha maupun untuk konsumsi rumahtangga petani. Semakin tinggi NTP atau peningkatan NTP suatu periode, maka makin tinggi pula kenaikan kesejahteraan petani

BAPPEDA HALUT

pada wilayah tersebut. Nilai Tukar Petani yang baik sangat penting bagi Maluku Utara karena sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini. NTP adalah perbandingan indeks harga diterima oleh petani terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani. Istilah yang berkaitan dengan NTP adalah sebagai berikut:

Bila NTP lebih besar dari 100, maka dapat diartikan bahwa perubahan harga yang dibayar petani secara rata-rata lebih kecil dibandingkan yang diterima petani dari usaha pertaniannya,

1) Bila NTP suatu periode lebih besar dibandingkan periode sebelumnya maka dapat diartikan bahwa kemampuan daya beli atau tingkat kesejahteraan petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya,
2) NTP dihitung menurut subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan subsektor perikanan,
3) Bila NTP diperbandingkan antar subsektor atau antar wilayah, NTP dapat diartikan sebagai insentif untuk berusaha. Subsektor atau wilayah dengan NTP yang lebih besar, berarti berusaha di bidang pertanian pada subsektor atau wilayah tersebut lebih menguntungkan dibandingkan pada subsektor atau wilayah lain, karena memberikan insentif yang lebih besar.

Pada tahun 2023 rata-rata NTP Provinsi Maluku Utara adalah 103,37 atau mengalami penurunan sebesar 3,08 poin dibandingkan rata-rata NTP pada tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2021 hingga 2023 telah berada di atas 100 yang artinya petani mengalami surplus. Dalam hal ini perubahan harga yang dibayar petani secara rata-rata lebih kecil dibandingkan yang diterima petani dari usaha pertaniannya. Perkembangan NTP Provinsi Maluku Utara pada kurun tahun 2019-2023 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.94. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks harga yang diterima petani (It)	100,64	101,60	115,58	115,74	120,91
Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	102,70	105,25	109,09	109,82	116,33
Nilai Tukar Petani (NTP)	**97,99**	**96,53**	**105,95**	**104,88**	**103,66**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2024; *) Tahun Dasar 2018=100

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam

BAPPEDA HALUT

mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah dan infrastruktur, maka semakin berdaya saing wilayah tersebut.

A) Fasilitas Akomodasi dan Restoran/Rumah Makan

Fasilitas akomodasi dan restoran/rumah makan merupakan sarana yang penting dalam menunjang pariwisata daerah. Seiring dengan berkembangnya pariwisata di daerah maka permintaan akan fasilitas akomodasi yang memadai juga akan meningkat. Pada tahun 2023, jumlah fasilitas akomodasi (hotel dan penginapan) di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 45 dengan 778 kamar dan 931 tempat tidur, serta restoran/rumah makan sebanyak 111 usaha. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95. Perkembangan Fasilitas Akomodasi/Restoran/Rumah Makan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Restoran/Rumah Makan/Kafe	117	129	108	113	111
2	Hotel/Penginapan	46	49	49	44	45
a	Jumlah Kamar	705	707	707	735	778
b	Jumlah Tempat Tidur	993	1.115	1.115	1.027	931

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Halmahera Utara, 2024

B) Infrastruktur Transportasi

Prasarana transportasi memiliki peran penting dalam menentukan kinerja logistik suatu wilayah. Aktivitas utama logistik yang mencakup transportasi dan pergudangan, memerlukan infrastruktur pelabuhan udara (*airport*), pelabuhan laut (*seaport*), dan jalan raya (*road*). Prasarana jalan penting untuk menghubungkan transportasi antardaerah, terutama dari desa ke kota, dari kota kabupaten ke kota provinsi. Prasarana jalan juga menghubungkan transportasi jalan raya dengan pelabuhan, bandara, untuk transportasi multimoda. Peningkatan kualitas infrastruktur logistik menjadi faktor penting dalam kinerja logistik. Selain menjadi faktor penting dalam logistik, kualitas infrastruktur tersebut menjadi daya tarik bagi investor dalam membangun pabrik, mengembangkan bisnis, dan perdagangan.

Hingga tahun 2023, total panjang jalan yang terbangun di Kabupaten Halmahera Utara sepanjang 691,26 Km, yang meliputi 195,26 Km Jalan Nasional, 194,8 Km Jalan Provinsi dan 301,2 Km Jalan Kabupaten. Grafik di halaman berikut menyajikan

BAPPEDA HALUT

komposisi panjang jalan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 menurut kewenangan pembinaan.



Gambar 2.40 Komposisi Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pembinaan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023
Sumber: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara, 2024

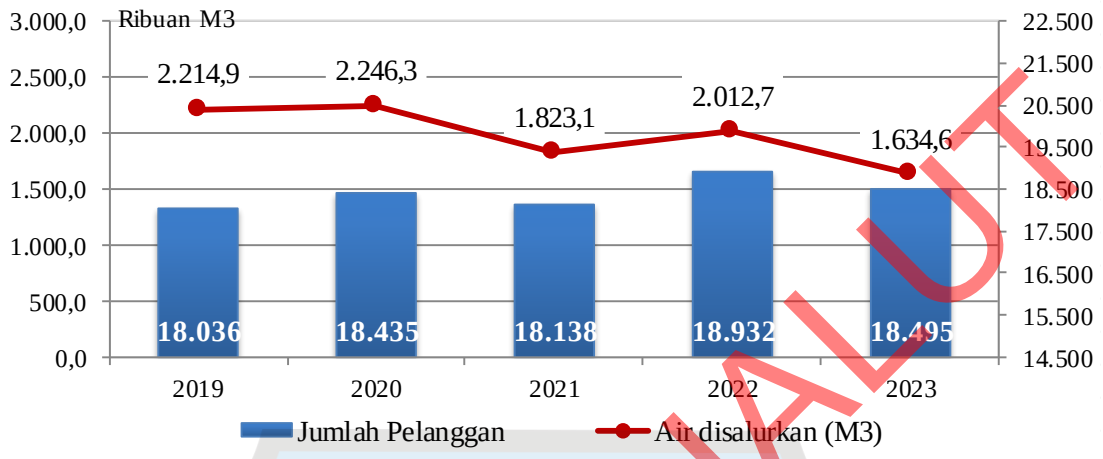
Adapun jumlah kendaraan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 sebanyak 56.266 unit kendaraan, yang meliputi 3.907 unit mobil penumpang, 38 unit Bus, 2.833 unit Truck, dan 49.488 unit sepeda motor. Dengan demikian maka rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 sebesar 81, yang artinya bahwa pada tahun 2023 setiap satu kilometer jalan melayani sebanyak 82 kendaraan. Adapun rasio panjang jalan terhadap luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 sebesar 0,20 yang artinya di setiap Km2 wilayah tersedia infrastruktur jalan sepanjang ± 200 meter. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi tingkat aksesibilitas jalan.

BAPPEDA HALUT

C) Infrastruktur Air Bersih

Sistem pasokan air (*water supply*) yang aman dan terlindungi menjadi salah satu tantangan khas bagi Kabupaten Halmahera Utara. Infrastruktur air bersih yang handal mencakup sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang meliputi intake air baku, storage (penampungan pra pengolahan), transmisi ke instalasi pengolahan, pengolahan air (*water treatment*), transmisi ke penampungan (*reservoir*) distribusi dan distribusi ke pelanggan. Di Kabupaten Halmahera Utara sistem pasokan air perpipaan diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan jumlah pelanggan dan volume air yang disalurkan oleh

PDAM Tobelo dalam kurun waktu 2019-2023.

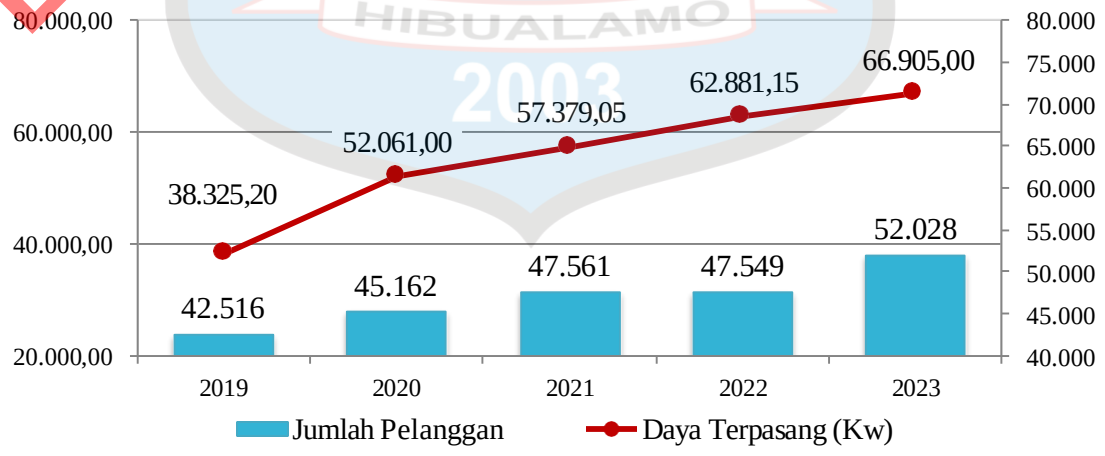


Gambar 2.41 Volume Air Disalurkan dan Jumlah Pelanggan PDAM Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2024

D) Infrastruktur Tenaga Listrik

Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat/mesin industri. Pasokan tenaga listrik (PLN) di Kabupaten Halmahera Utara berasal sistem tenaga listrik dengan beban diatas 1,5 MW yaitu Sistem Tobelo-Malifut. Pelayanan PLN telah mencakupi seluruh kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara. Tabel berikut menyajikan perkembangan daya terpasang dan jumlah pelanggan PLN dalam kurun tahun 2019-2023.



Gambar 2.42 Daya Terpasang dan Jumlah Pelanggan PLN Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2024

BAPPEDA HALUT

E) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membantu pesatnya pertumbuhan industri, mendorong efisiensi dalam pemerintahan, dan operasional bisnis, serta mengembangkan landasan penting menuju perekonomian berbasis teknologi. TIK memiliki kemampuan untuk mengubah cara masyarakat melakukan sesuatu, seperti akses yang lebih cepat terhadap informasi yang relevan, sarana komunikasi yang efisien, peningkatan kemampuan untuk berkomunikasi, serta membuat keputusan berdasarkan informasi. Dalam konteks ini siapapun dapat berkomunikasi dan mengakses segala informasi yang di butuhkan dengan cepat dan dimanapun keberadaannya. Kondisi layanan infrastrukur TIK di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.96. Jangkauan Layanan Infrastruktur TIK Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Operator Telepon Tetap	1	1	1	1	1
2	Jumlah Operator Telepon Seluler	2	2	2	2	2
3	Jumlah Desa **belum terjangkau** jaringan telekomunikasi seluler	53	35	35	35	35
	Persentase Desa terjangkau jaringan telekomunikasi seluler	73,4	82,4	82,4	82,4	82,4
4	Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler	47,93	49,62	61,78	69,15	70,85
5	Persentase Penduduk Mengakses Internet	23,10	29,88	34,78	48,24	48,58

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara, 2023

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

Kondisi iklim berinvestasi di Kabupaten Halmahera Utara dapat dijelaskan melalui beberapa aspek terkait sebagai berikut.

A) Angka Kriminalitas

Secara umum, tindak kejahatan atau kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Tingkat kejahatan yang tinggi dapat mengganggu keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional.

BAPPEDA HALUT

Terciptanya dan terpenuhinya keamanan masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Wilayah yang kondusif pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tabel berikut menyajikan angka kriminalitas di Kabupaten Halmahera Utara yang disajikan menurut kecamatan dalam kurun tahun 2019-2023.

Tabel 2.97. Angka Kriminalitas Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Jenis Kriminal	Frekuensi Kejadian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus Narkoba	n/a	10	-	-	-
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	n/a	1	1	0	3
3	Jumlah Kejahatan Seksual	n/a	29	26	69	62
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	n/a	33	69	108	156
5	Jumlah Kasus Pencurian	n/a	14	27	39	25
6	Jumlah Kasus Penipuan	n/a	2	1	10	8
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	n/a	-	-	-	-
8	Jumlah Kasus Lainnya	n/a	-	-	126	189
9	**Jumlah Kasus/Tindak Kriminal selama 1 Tahun**	178	**89**	**124**	**352**	**443**
10	**Jumlah Kasus/Tindak Kriminal yang diselesaikan (Proses Hukum)**	n/a	**89**	**124**	**349**	**376**
	Penduduk (jiwa)	**193.851**	**197.638**	**199.936**	**201.196**	**203.213**
	Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (per 100rb pddk)	**92**	**45**	**62**	**175**	**218**

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Utara, 2024, diolah

Dari tabel, Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (per 100rb pddk) memperlihatkan tren peningkatan, dari 45 pada 2020 menjadi 218 pada 2023. Adapun persentase penyelesaian kasus tindak kejahatan/pidana pada tahun 2023 adalah sebesar 84,9 persen.

B) Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi turun ke jalan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Namun demikian aksi unjuk rasa yang seringkali

BAPPEDA HALUT

berujung pada kericuhan dipandang dapat mempengaruhi iklim bisnis. Dalam jangka pendek, aksi unjuk rasa yang berlangsung secara masif dapat mempengaruhi keputusan investasi dalam bentuk portofolio di pasar modal dan menekan rupiah di pasar keuangan, bahkan dapat mempengaruhi pada keputusan investasi langsung di sektor riil. Dalam jangka panjang, aksi unjuk rasa yang berlangsung terus-menerus dapat membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif. Tabel berikut menyajikan jumlah aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu Tahun 2019-2023.

Tabel 2.98. Jumlah Aksi Unjuk Rasa Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

No	Kategori Isu/Tuntutan	Jumlah Aksi Unjuk Rasa				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bidang Politik	3	6	12	11	1
2	Bidang Sosial	2	5	7	5	14
3	Bidang Ekonomi	11	5	7	13	12
Total		**16**	**16**	**26**	**29**	**27**

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Utara, 2024

Dari tabel, jumlah aksi unjuk selama setahun dalam empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara ini didominasi oleh isu/ tuntutan terkait bidang ekonomi dan politik.

C) Lama Proses Perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Lama proses perijinan umumnya merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan. Perangkat daerah yang membidangi perizinan di Kabupaten Halmahera Utara terus berusaha menciptakan efisiensi *Busines Process* pengurusan izin, seperti percepatan dalam hal waktu, kemudahan dalam syarat/ prosedur, dan biaya yang proposional. Perkembangan lama proses perizinan investasi

BAPPEDA HALUT

di Kabupaten Halmahera Utara

Tabel 2.99. Lama Proses Perizinan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2022

No	Jenis Izin	Rata-rata Lama Proses Perizinan				
		2019	2020	2021	2022	2022
1	Ijin yang tidak memiliki kajian teknis	50 (Menit)	50 (Menit)	1 (Hari)	1 (Hari	1 (Hari
2	Ijin yang memiliki kajian teknis lingkungan	3 (Bulan)	50 (Menit)	3 (Hari)	3 (Hari	3 (Hari
3	Ijin yang memiliki kajian teknis IMB	5 (Hari)	7 (Hari)	7 (Hari)	21 (Hari)	21 (Hari)

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Halmahera Utara, 2024

Dari tabel, pada tahun 2023, Izin yang tidak memiliki kajian teknis terus mengalami perbaikan, rata-rata hanya memerlukan waktu pengurusan selama 1 hari, Izin yang memiliki kajian teknis lingkungan selama 3 (tiga) hari, dan Izin yang memiliki kajian teknis IMB selama 21 hari.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Pembangunan daerah memerlukan aset yang di sebut sumber daya baik sumber daya alam (SDA), maupun sumber daya manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, menunjukan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

A) Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja yang tersedia pada suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Persentase Penduduk Lulusan S1, S2 dan S3 adalah proporsi penduduk usia 15 ke atas yang tamat S1, S2 dan S3 terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Tabel berikut menyajikan perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun Tahun 2019-2023.

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.100. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah lulusan S1/S2/S3	6.826	7.039	8.321	8.871	13.097
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang termasuk Angkatan Kerja	76.396	85.993	90.801	95.817	103.305
Rasio Lulusan S1/S2/S3 (persen)	**8,94**	**8,19**	**9,16**	**9,26**	**12,7**

Sumber : Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, BPS Provinsi Maluku Utara, 2019-2023

B) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pengelompokan jumlah atau persentase penduduk di tiap kelompok umur, akan dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) termasuk bayi dan anak (usia 0-4 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Di samping itu, melalui rasio ketergantungan juga dapat diketahui berapa persen penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun.

Grafik di halaman berikut menyajikan perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022-2023.

Tabel 2.101. Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022-2023

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase	Rasio Ketergantungan
2023	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	62.082	30,55%	43,99
	Produktif (15 - 64 Tahun)	141.131	69,45%	
	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	68.205	33,64%	

BAPPEDA HALUT

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase	Rasio Ketergantungan
2022	Produktif (15 - 64 Tahun)	134.550	66,36%	50,69

Sumber : Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka 2023 & 2024, diolah

Dari tabel, rasio ketergantungan Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2021 sebesar 51,08 persen. Merujuk definisinya, *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif, dinyatakan dalam persen. Berdasarkan rasio ketergantungan 51,08 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) masih mempunyai tanggungan sebanyak 51-52 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Adapun rasio ketergantungan pada tahun 2022 berkurang menjadi 50,69 persen. Artinya pada tahun 2022 setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kabupaten Halmahera Utara masih mempunyai tanggungan sebanyak 50-51 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi Besaran rasio ketergantungan menunjukkan beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

2.5. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Tabel 2.100 menyajikan hasil analisis terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2023, berdasarkan Target dan Capaian/Realisasi Kinerja Utama/Kinerja Kunci dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023. Interpretasi capaian dilakukan dengan membandingkan capaian pada tahun 2023 dengan target yang ditetapkan untuk tahun tersebut oleh RPJMD/RKPD.

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

Tabel 2.102
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan	Indeks Pendidikan Daerah	73,25	66,83	91,24
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas	Indeks Ketahanan Sosial	68,1	68,66	100,82
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
	Bidang Urusan Pendidikan dan Kebudayaan																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tingkat pencapaian kinerja perangkat derah**	**100,00 %**	**850.493.390.748**	**85,00**	**262.259.390.245**	**90,00**	**140.293.636.659,90**	**54,37**	**129.463.456.516,22**	**54,37**	**92,28**	**69,69**	**391.722.846.761**	**69,69**	**46,06**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	**100,00 %**	**3.228.518.250**	**90,00**	**491.165.000**	**90,00**	**546.979.200**	**86,89**	**200.000.000**	**96,54**	**36,56**	**88,44**	**691.165.000**	**88,44**	**21,41**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32 Dok	2.269.823.250	8	449.470.000	5	385.238.500	1	200.000.000	20,00	51,92	9	649.470.000	28,13	28,61	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dok	126.960.000	0	-	1	31.400.700	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dok	126.960.000	0	-	1	31.693.500	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Lap	514.335.000	6	41.695.000	1	66.932.000	0	-	0,00	0,00	6	41.695.000	33,33	8,11	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi	20 Lap	190.440.000	0	-	4	31.714.500	4	-	100,00	0,00	4	-	20,00	0,00	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**820.256.250.291**	**73,85**	**259.711.301.876**	**78,00**	**136.394.995.497,90**	**25,24**	**128.066.760.881**	**32,36**	**93,89**	**49,54**	**387.778.062.757**	**49,54**	**47,28**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109380 Org	820.112.090.291	1540	259.711.301.876	18620	136.379.704.397,90	24626	128.066.760.881,00	132,26	93,90	26166	387.778.062.757	23,92	47,28	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Org	144.160.000			1	15.291.100	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1,3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja sub kegiatan pengelolaan BMD pada perangkat daerah**	**87,00 %**	**95.220.000**		-	**78,00**	**11.895.400**	**100,00**	**5.261.000**	**128,21**	**44,23**	**50,00**	**5.261.000**	**57,47**	**5,53**	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dok	95.220.000	0	-	1	11.895.400	1	5.261.000	100,00	44,23	1	5.261.000	20,00	5,53	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian**	**87,00 %**	**3.029.614.252**	**75,00**	**269.028.558**	**78,00**	**447.971.900**	**100,00**	**322.401.100**	**128,21**	**71,97**	**87,50**	**591.429.658**	**100,57**	**19,52**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	420 Pkt	845.684.252	57	46.740.000	60	93.472.500	60	93.472.500	100,00	100,00	117	140.212.500	27,86	16,58	
1.3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	675.500.000	4	29.370.000	1	104.540.600	1	7.657.600	100,00	7,33	5	37.027.600	41,67	5,48	
1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1570 Org	960.930.000	450	129.260.000	274	249.958.800	274	221.271.000	100,00	88,52	724	350.531.000	46,11	36,48	
1.3.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Org	547.500.000	5	63.658.558							5	63.658.558	17,24	11,63	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja sub kegiatan**	**87,00 %**	**7.165.567.100**	**72,00**	**720.367.733**	**78,00**	**965.724.900**	**100,00**	**185.590.863**	**128,21**	**19,22**	**86,00**	**905.958.596**	**98,85**	**12,64**	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Pkt	122.000.000	2	1.340.500	1	15.220.300	1	810.000	100,00	5,32	3	2.150.500	60,00	1,76	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Pkt	2.698.150.000	2	206.400.000	4	325.328.000	4	-	100,00	0,00	6	206.400.000	20,00	7,65	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Pkt	398.445.000	11	51.351.300	10	57.387.200	10	19.685.300	100,00	34,30	21	71.036.600	35,00	17,83	
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Pkt	657.781.600	2	41.876.900	12	71.466.200	12	29.756.000	100,00	41,64	14	71.632.900	23,33	10,89	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Pkt	369.360.000	14	25.285.300	12	52.106.500	12	14.739.400	100,00	28,29	26	40.024.700	36,11	10,84	
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	353.400.000	4	5.200.000	2	22.000.000	2	700.000	100,00	3,18	6	5.900.000	50,00	1,67	
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Dok	585.995.500	2	39.535.000	1	97.232.500	1	1.625.700	100,00	1,67	3	41.160.700	50,00	7,02	
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Lap	1.980.435.000	2	349.378.733	1	324.984.200	1	118.274.463	100,00	36,39	3	467.653.196	50,00	23,61	
1,5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Peningkatan Jumlah BMD**	**87,00 %**	**10.247.817.555**	**72**	**154.841.000**	**78,00**	**454.228.500**	**40,00**	**173.692.000**	**51,28**	**38,24**	**56,00**	**328.533.000**	**64,37**	**3,21**	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	507.000.000	2	97.500.000	1	78.000.000	1	58.500.000	100,00	75,00	3	156.000.000	300,00	30,77	
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	180 Pkt	626.742.555	18	57.341.000	40	115.192.000	40	115.192.000	100,00	100,00	58	172.533.000	32,22	27,53	
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	560.000.000	0	-	1	49.803.700	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.5.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7.104.075.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.050.000.000	0	-	1	111.562.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.5.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	400.000.000	0	-	1	99.670.800			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**87,00 %**	**3.076.180.000**	**72,00**	**756.105.244**	**78,00**	**603.735.262**	**100,00**	**186.413.284**	**128,21**	**30,88**	**86,00**	**942.518.528**	**98,85**	**30,64**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	2.201.640.000	2	641.064.550	1	446.200.000	1	129.980.000	100,00	29,13	3	771.044.550	50,00	35,02	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Lap	540.800.000	2	65.240.694	1	95.635.262	1	41.993.284	100,00	43,91	3	107.233.978	50,00	19,83	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap	99.000.000	2	1.300.000	1	13.400.000	1	2.800.000	100,00	20,90	3	4.100.000	50,00	4,14	
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Lap	234.740.000	2	48.500.000	1	48.500.000	1	11.640.000	100,00	24,00	3	60.140.000	50,00	25,62	
1,7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik**	**100,00 %**	**3.394.223.300**	**100,00**	**156.580.834**	**78,00**	**868.106.000**	**100,00**	**323.337.388,22**	**128,21**	**37,25**	**100,00**	**479.918.222**	**100,00**	**14,14**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	734.223.300	2	156.580.834	1	118.106.000	1	27.334.515	100,00	23,14	3	183.915.349	300,00	25,05	
1.7.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	5 Unit	2.300.000.000	0	-	1	750.000.000	1	296.002.873,22	100,00	39,47	1	296.002.873	20,00	12,87	
1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	360.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini**	**76,78 %**	**466.470.112.965**	**76,55**	**155.749.429.610**	**76,38**	**126.316.733.254**	**79,70**	**39.819.858.223**	**104,35**	**31,52**	**78,12**	**195.569.287.833**	**101,75**	**41,93**	
		Tingkat Partisipasi Warga Usia 7- 12 Tahun dalam Sekolah Dasar	**94,04 %**		**70,93**		**80,00**		**73,01**		**91,26**		**71,97**		**76,53**		
		Tingkat Partisipasi Warga Usia 13- 15 Tahun dalam Sekolah Menengah Pertama	**74,31 %**		**54,40**		**69,80**		**60,02**		**85,99**		**57,21**		**76,99**		
		Tingkat Partisipasi Warga Usia 7- 18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan	**5,16 %**		**2,21**		**1,97**		**2,35**		**119,50**		**2,28**		**44,19**		
		Persentase Paud Terakreditasi Minimal B	**23,83 %**		**42,37**		**23,32**		**23,32**		**100,00**		**32,85**		**137,84**		
		Persentase SD Terakreditasi Minimal B	**73,04 %**		**56,74**		**62,02**		**62,02**		**100,00**		**59,38**		**81,30**		
		Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	**84,44 %**		**52,02**		**50,70**		**50,70**		**100,00**		**51,36**		**60,83**		

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase Kesetaraan Terakreditasi Minimal B	**58,06 %**		**28,13**		**56,25**		**56,25**		**100,00**		**42,19**		**72,66**		
2,1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ Mi**	**99,26 %**	**258.009.001.220**	**88,20**	**91.312.860.415**	**93,50**	**74.977.966.352**	**89,13**	**24.951.104.486**	**95,33**	**33,28**	**88,67**	**116.263.964.901**	**89,32**	**45,06**	
2.1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	40 Unit	8.700.000.000	0	-	6	1.800.000.000	6	866.701.983	100,00	48,15	6	866.701.983	15,00	9,96	
2.1.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	124 Ruang	27.683.451.666	25	5.506.270.599	8	3.297.965.000	8	1.217.042.303	100,00	36,90	33	6.723.312.902	26,61	24,29	
2.1.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	24 Ruang	6.537.273.450	4	1.373.437.000	6	1.927.470.000	5	1.279.007.168	83,33	66,36	9	2.652.444.168	37,50	40,57	
2.1.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	33 Ruang	3.357.228.000	7	1.074.726.000	8	1.463.000.000	6	1.150.567.834	75,00	78,64	13	2.225.293.834	39,39	66,28	
2.1.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	15 Ruang	4.389.524.361	2	627.714.000	3	1.000.000.000	3	802.000.000	100,00	80,20	5	1.429.714.000	33,33	32,57	
2.1.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	32 Unit	1.937.105.632	5	1.387.365.000	17	3.521.229.000	11	1.099.000.000	64,71	31,21	16	2.486.365.000	50,00	128,35	
2.1.7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	22 Unit	3.500.000.000	0	-	3	838.400.000	3		100,00	0,00	3	-	13,64	0,00	
2.1.8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	339 Ruang	36.981.636.762	149	14.791.717.300	84	13.405.930.950	10	1.675.887.835	11,90	12,50	159	16.467.605.135	46,90	44,53	
2.1.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat	40 Ruang	4.406.343.000	14	1.325.503.000	9	2.237.400.000	4	463.200.000	44,44	20,70	18	1.788.703.000	45,00	40,59	
2.1.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	137 Unit	777.514.000	6	88.757.000	1	288.757.000	1	114.081.786	100,00	39,51	7	202.838.786	5,11	26,09	
2.1.11	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21 Unit	2.138.400.000	4	591.130.000	3	369.604.000	1	87.500.000	33,33	23,67	5	678.630.000	23,81	31,74	
2.1.12	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2905 Paket	3.685.234.733	0	-	550	499.125.000	550	147.685.500	100,00	29,59	550	147.685.500	18,93	4,01	
2.1.13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	140 Paket	9.368.243.414	201	13.991.816.100	12	15.160.895.900	10	13.035.795.900	83,33	85,98	211	27.027.612.000	150,71	288,50	
2.1.14	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4000 Unit	3.350.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.1.15	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	20 Paket	4.000.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.1.16	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1252 Satuan Pendidikan	2.150.000.000	208	181.080.200	209	449.999.300	208	154.105.300	99,52	34,25	416	335.185.500	33,23	15,59	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.1.17	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1461 Satuan Pendidikan	1.339.385.000	417	228.088.000	209	242.976.600	208	194.121.500	99,52	79,89	625	422.209.500	42,78	31,52	
2.1.18	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2200 Peserta Didik	1.688.000.000	90	58.820.000	500	649.978.500	450	247.762.300	90,00	38,12	540	306.582.300	24,55	18,16	
2.1.19	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6520 Orang	10.601.753.600	2452	3.755.490.000	357	692.580.000			0,00	0,00	2452	3.755.490.000	37,61	35,42	
2.1.20	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	459 Orang	1.208.700.400	210	411.512.730	100	414.535.900	100	81.187.377	100,00	19,59	310	492.700.107	67,54	40,76	
2.1.21	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1463 Satuan Pendidikan	894.500.000	0	-	209	149.822.000	120	86.669.700	57,42	57,85	120	86.669.700	8,20	9,69	
2.1.22	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1459 Satuan Pendidikan	110.912.507.202	207	45.700.533.486	209	22.367.880.002	0		0,00	0,00	207	45.700.533.486	14,19	41,20	
2.1.23	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1045 Orang	502.200.000	208	20.900.000	209	94.731.300	0		0,00	0,00	208	20.900.000	19,90	4,16	
2.1.24	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	7 Ruang	1.600.000.000	0	198.000.000	8	2.810.000.000	8	2.180.000.000	100,00	77,58	8	2.378.000.000	114,29	148,63	
2.1.25	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	836 Orang	1.000.000.000	0	-	209	249.992.800	0		0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2.1.26	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	4 Konten Digital	2.000.000.000	0	-	1	494.663.900	0		0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2.1.27	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	836 Orang	1.200.000.000	0	-	209	297.641.400	208	68.788.000	99,52	23,11	208	68.788.000	24,88	5,73	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.1.28	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	1.200.000.000	0	-	1	253.387.800	0		0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2.1.29	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	90 Orang	900.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2,2	**Pengelolaan Pendidikah Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ Mts**	**99,08 %**	**143.213.256.397**	**83,84**	**44.458.034.105**	**76,08**	**38.401.158.102**	**74,05**	**13.717.900.057**	**97,33**	**35,72**	**78,94**	**58.175.934.162**	**79,68**	**40,62**	
2.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	12 Unit	3.000.000.000	0	-	2	750.000.000	2	296.490.564	100,00	39,53	2	296.490.564	16,67	9,88	
2.2.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	34 Ruang	8.577.355.000	8	1.757.202.000	3	1.600.000.000	3	505.310.200	100,00	31,58	11	2.262.512.200	32,35	26,38	
2.2.3	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8 Ruang	3.200.000.000	0	-	3	1.320.000.000	1	676.043.584	33,33	51,22	1	676.043.584	12,50	21,13	
2.2.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	22 Ruang	1.900.722.000	1	196.722.000	3	836.000.000	3	650.000.000	100,00	77,75	4	846.722.000	18,18	44,55	
2.2.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	3.150.000.000	0	-	1	700.000.000	1	404.000.278	100,00	57,71	1	404.000.278	10,00	12,83	
2.2.6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	31 Ruang	5.993.555.750	4	2.145.989.000	6	3.179.560.350	6	2.265.659.654	100,00	71,26	10	4.411.648.654	32,26	73,61	
2.2.7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Ruang	950.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.2.8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	1.350.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.2.9	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	250.000.000	0	-	6	1.270.000.000	6	891.601.850	100,00	70,20	6	891.601.850	42,86	356,64	
2.2.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat	189 Ruang	21.569.808.600	30	7.655.762.000	30	4.891.822.650	24	1.914.796.866	80,00	39,14	54	9.570.558.866	28,57	44,37	
2.2.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat	6 Ruang	2.024.535.935	1	58.613.000	1	200.000.000			0,00	0,00	1	58.613.000	16,67	2,90	
2.2.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat	7 Ruang	1.757.389.000	2	457.389.000	1	260.000.000	1	100.200.893	100,00	38,54	3	557.589.893	42,86	31,73	
2.2.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	663.378.000	1	363.378.000							1	363.378.000	16,67	54,78	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.2.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/ Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/ Aula SMP yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	452.655.000	1	202.655.000							1	202.655.000	50,00	44,77	
2.2.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat	318 Unit	646.955.000	1	446.955.000							1	446.955.000	0,31	69,09	
2.2.16	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1170 Paket	832.775.612	0	-	254	199.771.000	254	79.801.008	100,00	39,95	254	79.801.008	21,71	9,58	
2.2.17	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	19 Paket	5.375.000.000	53	2.754.140.600	8	6.960.553.800	8	5.617.102.400	100,00	80,70	61	8.371.243.000	321,05	155,74	
2.2.18	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1000 Paket	1.000.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.2.19	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	20 Paket	4.000.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.2.20	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	73710 Peserta Didik	1.800.000.000	9352	170.205.600	10462	223.007.400	9713	48.383.600	92,84	21,70	19065	218.589.200	25,86	12,14	
2.2.21	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	68 Satuan Pendidikan	1.079.892.400	136	190.680.700	71	182.465.200	71	50.484.500	100,00	27,67	207	241.165.200	304,41	22,33	
2.2.22	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	501 Peserta Didik	1.018.890.500	120	84.716.000	100	367.946.300	100	45.833.800	100,00	12,46	220	130.549.800	43,91	12,81	
2.2.23	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7090 Orang	9.436.123.600	2094	1.999.417.000	175	339.500.000			0,00	0,00	2094	1.999.417.000	29,53	21,19	
2.2.24	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	1.190.240.000	60	428.983.110	100	200.410.100	100	31.576.000	100,00	15,76	160	460.559.110	64,00	38,69	
2.2.25	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	337 Satuan Pendidikan	710.000.000	0	-	71	184.292.100	71	140.614.860	100,00	76,30	71	140.614.860	21,07	19,80	
2.2.26	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	68 Satuan Pendidikan	41.723.460.000	68	12.956.248.095	71	13.635.700.002	0		0,00	0,00	68	12.956.248.095	100,00	31,05	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.2.27	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	405 Orang	13.260.520.000	135	12.588.978.000	68	83.636.500	68		100,00	0,00	203	12.588.978.000	50,12	94,94	
2.2.28	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	272 Orang	1.000.000.000	0	-	68	220.275.500	68		100,00	0,00	68	-	25,00	0,00	
2.2.29	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	4 Konten Digital	2.000.000.000	0	-	1	349.322.800	0		0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2.2.30	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	272 Orang	1.200.000.000	0	-	68	195.573.800			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2.2.31	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dok	1.200.000.000	0	-	1	251.320.600			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2.2.32	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	90 Orang	900.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2,3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**	**42,92 %**	**44.436.964.200**	**32,22**	**15.046.241.990**	**55,07**	**7.631.931.900**	**89,92**	**1.150.853.681**	**163,28**	**15,08**	**61,07**	**16.197.095.671**	**142,29**	**36,45**	
		Persentase Desa memiliki layanan PAUD	**76,94 %**		**70,41**		**72,96**		**72,96**		**100,00**		**71,68**		**93,17**		
2.3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	8 Unit	1.646.800.000	1	236.900.000	1	195.486.800	1	185.886.500	100,00	95,09	2	422.786.500	25,00	25,67	
2.3.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	16 Unit	660.000.000	0	-	6	1.004.695.200	6	753.957.680	100,00	75,04	6	753.957.680	37,50	114,24	
2.3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas /Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	52 Unit	3.872.800.000	11	890.200.000	10	343.200.000		135.000.091	0,00	39,34	11	1.025.200.091	21,15	26,47	
2.3.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	440.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.3.5	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	301 Paket	300.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.3.6	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	200 Paket	200.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.3.7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	8 Paket	200.000.000	0	-	2	43.893.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2.3.8	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	339 Ruang	900.000.000	8352	83.670.000	9324	199.333.000	8917	25.874.410	95,63	12,98	17269	109.544.410	5094,10	12,17	
2.3.9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1715 Peserta Didik	896.075.000	347	120.045.000	245	174.815.500	245	25.129.000	100,00	14,37	592	145.174.000	34,52	16,20	
2.3.10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	70 Satuan Pendidikan	1.385.108.200	55	141.304.000	15	29.100.000			0,00	0,00	55	141.304.000	78,57	10,20	
2.3.11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	130 Orang	676.120.000	30	306.938.990	25	199.220.200	25	25.006.000	100,00	12,55	55	331.944.990	42,31	49,10	
2.3.12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1115 Orang	760.000.000	40	100.000.000	218	150.000.000			0,00	0,00	40	100.000.000	3,59	13,16	
2.3.13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	218 Satuan Pendidikan	30.257.661.000	216	13.167.184.000	218	5.192.220.000			0,00	0,00	216	13.167.184.000	99,08	43,52	
2.3.14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1090 Satuan Pendidikan	442.400.000	0	-	218	99.968.200			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2.3.15	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	204 Orang	900.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.3.16	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dok	300.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.3.17	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	600.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2,4	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan**	**8,13 %**	**20.810.891.148**	**7,72**	**4.932.293.100**	**8,07**	**5.305.676.900**		-	**0,00**	**0,00**	**3,86**	**4.932.293.100**	**47,45**	**23,70**	
		Persentase kecamatan memiliki layanan PKBM	**100,00 %**		**85,29**		**89,00**				**0,00**		**42,65**	-	**42,65**		

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.4.1	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Non formal/ Kesetaraan	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	1.350.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.4.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	7 Unit	1.505.151.148	1	168.000.000							1	168.000.000	14,29	11,16	
2.4.3	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	25560 Peserta Didik	581.750.000	5452	55.348.100							5452	55.348.100	21,33	9,51	
2.4.4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	30 Satuan Pendidikan	474.800.000	31	74.545.000	30	99.783.200			0,00	0,00	31	74.545.000	103,33	15,70	
2.4.5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	480 Orang	430.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.4.6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	250.000.000	0	-	20	99.987.100			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2.4.7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidikan	620.000.000	0	-	30	100.000.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2.4.8	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30 Satuan Pendidikan	12.916.290.000	18	4.634.400.000	30	4.955.960.000			0,00	0,00	18	4.634.400.000	60,00	35,88	
2.4.9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	30 Orang	282.900.000	0	-	30	49.946.600			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2.4.10	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	30 Satuan Pendidikan	450.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.4.11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	90 Orang	300.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.4.12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3 Konten Digital	600.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.4.13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	90 Orang	300.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.4.14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dok	300.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.4.15	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	450.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
3	**Program Pengembangan Kurikulum**	**Persentase keterlaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal**	**100,00 %**	**3.400.000.000**		-	**60**	**844.481.200**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
3,1	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan**	**1 Kuri**	**3.400.000.000**		-	**1**	**844.481.200**	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
3.1.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dok	600.000.000			1	149.908.400	0		0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
3.1.2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dok	400.000.000			1	99.608.500	0		0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
3.1.3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	4 Buku	1.000.000.000			1	250.000.000	0		0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
3.1.4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	80 Orang	1.400.000.000			20	344.964.300	0		0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
4	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD (per satuan Pendidikan)**	**1:4 Rasio**	**400.000.000**		-	**1:4**	**99.906.800**	**1:3**	-	**98,44**	**0,00**	**0,02**	-	**49,22**	**0,00**	
		Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SD (per satuan Pendidikan)	**1:12 Rasio**				**1:12**		**1:9**		**95,83**		**0,02**		**47,92**		

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SMP (per satuan Pendidikan)	**1:15 Rasio**				**1:15**		**1:10**		**93,33**		**0,02**		**46,67**		
		Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan Kesetaraan (per satuan Pendidikan)	**1:12 1:15 Rasio**				**1:12 1:15**		**1:1 1:1**								
4,1	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Persentase PAUD yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 1 orang**	**5,39 %**	**400.000.000**			**2,90**	**99.906.800**	**2,90**	-	**100,00**	**0,00**	**1,45**	-	**26,88**	**0,00**	
		Persentase SD yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 2 orang	**37,32 %**				**34,45**		**34,45**		**100,00**		**17,23**		**46,15**		
		Persentase SMP yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 2 orang	**57,97 %**				**49,28**		**49,28**		**100,00**		**24,64**		**42,50**		
		Persentase Kesetaraan yang memiliki pendidik dan tenagakependidikan bersertifikasi minimal 1 orang	**12,90 %**				**6,45**		**6,45**		**100,00**		**3,23**		**24,99**		
4.1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Dok	240.000.000			1	59.996.900			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
4.1.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Lap	160.000.000			1	39.909.900			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
6	**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**	**Persentase keterlaksanaan pengendalian perizinan pendidikan**	**100,00 %**	**830.000.000**	**50**	**20.000.000**	**100**	**179.565.400**		-	**0,00**	**0,00**	**24,95**	**20.000.000**	**24,95**	**2,41**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6,1	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Ijin Pendidikan Dasar yang dikeluarkan**	**100,00 %**	**440.000.000**	**0**	-	**100**	**94.733.800**		-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
6.1.1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dok	235.000.000	0	-	2	49.832.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
6.1.2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dok	205.000.000	0	-	2	44.901.800			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
6,2	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Ijin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang dikeluarkan**	**100,00 %**	**390.000.000**	**100**	**20.000.000**	**100**	**84.831.600**		-	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**20.000.000**	**50,00**	**5,13**	
6.2.1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dok	90.000.000	0	10.000.000	2	9.993.600			0,00	0,00	0	10.000.000	0,00	11,11	
6.2.2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dok	140.000.000	2	10.000.000	2	24.840.000			0,00	0,00	2	10.000.000	20,00	7,14	
6.2.3	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dok	160.000.000	0	-	1	49.998.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
7	**Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**	**Persentase keterlaksanaan pengembangan bahasa dan sastra daerah**	**100,00 %**	**2.600.000.000**	**7,14**	**432.922.000**	**37,50**	**583.140.500**		-	**0,00**	**0,00**	**3,57**	**432.922.000**	3,57	16,65	
7,1	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Bahasa dan Sastra Daerah yang dibina dan dikembangkan**	**100,00 %**	**2.600.000.000**	**0,00**	**432.922.000**	**33,33**	**583.140.500**		-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.922.000**	**0,00**	**16,65**	
7.1.1	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	6 Kamus	925.000.000	1	245.000.000	1	213.729.400			0,00	0,00	1	245.000.000	16,67	26,49	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.1.2	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Publik-asi	450.000.000	1	187.922.000							1	187.922.000	33,33	41,76	
7.1.3	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	10 Orang	190.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
7.1.4	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	4 Buku	455.000.000	0	-	1	199.520.400			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
7.1.5	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Peserta Didik	410.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
7.1.6	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	1 Modul	170.000.000	0	-	1	169.890.700					0	-	0,00	0,00	
8	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase keterlaksanaan pengembangan kebudayaan daerah**	**100,00 %**	**2.201.010.000**	**55,00**	**332.615.700**	**70**	**300.000.000**	**10,00**	**135.583.414**	**14,29**	**45,19**	**32,50**	**468.199.114**	**32,50**	**21,27**	
8,1	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola**	**70,00 %**	**1.539.560.000**	**50,00**	**241.165.700**	**40**	**235.000.000**		**94.612.714**	**0,00**	**40,26**	**25,00**	**335.778.414**	**35,71**	**21,81**	
8.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	36 Objek	1.054.010.000	0	124.890.700	36	148.600.000	16	42.863.035	44,44	28,84	16	167.753.735	44,44	15,92	
8.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	120 Orang	485.550.000	25	116.275.000	20	86.400.000	20	51.749.679	100,00	59,90	45	168.024.679	37,50	34,61	
8,2	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Presentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan**	**100 %**	**471.450.000**	**70,00**	**91.450.000**	**62,50**	**45.000.000**	**40,00**	**40.970.700**	**64,00**	**91,05**	**55,00**	**132.420.700**	**55,00**	**28,09**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
8.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	105.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
8.2.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Lap	95.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
8.2.3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	120 Orang	271.450.000	26	91.450.000	20	45.000.000	20	40.970.700	100,00	91,05	46	132.420.700	38,33	48,78	
8,3	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Lembaga Adat Daerah yang dibina**	**100 %**	**190.000.000**	**0,00**	-	**50**	**20.000.000**		-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
8.3.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	72 Objek	70.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
8.3.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	20 Orang	70.000.000	0	-	10	20.000.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
8.3.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	1 Unit	50.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
9	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Persentase Peningkatan Kelompok kesenian tradisional**	**100,00 %**	**450.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100,00**	**100.000.000**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50.000.000**	**50,00**	**11,11**	
		Presentase Kelompok Kesenian yg Mengikuti Event Skala Nasional					**25**		**0,00**								
9,1	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Presentase tenaga kesenian memiliki kompetensi**	**100,00 %**	**450.000.000**	**0**	**50.000.000**	**28,57**	**100.000.000**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000**	**0,00**	**11,11**	
9.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	280 Org	180.000.000	20	20.000.000	50	40.000.000			0,00	0,00	20	20.000.000	7,14	11,11	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
9.1.2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	200 Sertif	120.000.000	0	-	20	30.000.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
9.1.3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Lmbg	150.000.000	13	30.000.000	12	30.000.000			0,00	0,00	13	30.000.000	21,67	20,00	
10	**Program Pembinaan Sejarah**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan sejarah**	**100,00 %**	**470.000.000**	**0,00**	**70.000.000**	**100,00**	**79.012.000**	**0,00**	**79.012.000**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**149.012.000**	**0,00**	**31,70**	
10,1	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Sejarah Lokal yang dibina**	**100,00 %**	**470.000.000**	**0,00**	**70.000.000**	**100,00**	**79.012.000**	**0,00**	**79.012.000**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**149.012.000**	**0,00**	**31,70**	
10.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 Orang	60.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
10.1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	20 Unit	410.000.000	4	70.000.000	5	79.012.000	5	79.012.000	100,00	100,00	9	149.012.000	45,00	36,34	
11	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Persentase keterlaksanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya**	**100,00 %**	**788.060.000**	**50**	**103.140.000**	**100,00**	**100.000.000**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**103.140.000**	**25,00**	**13,09**	
11,1	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota**	**Persentase Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan**	**100,00 %**	**120.000.000**	**0**	-	**100,00**	**20.000.000**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
11.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek	60.000.000	0	-	1	10.000.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
11.1.2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Objek	60.000.000	0	-	1	10.000.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
11,2	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota**	**Persentase Cagar Budaya peringkat kabupaten yang dikelola**	**100,00 %**	**550.000.000**	**50**	**78.840.000**	**100,00**	**65.000.000**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**78.840.000**	**25,00**	**14,33**	
11.2.1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	31 Objek	320.000.000	16	78.840.000	31	50.000.000			0,00	0,00	16	78.840.000	51,61	24,64	
11.2.2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	31 Objek	135.000.000	0	-	31	15.000.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
11.2.3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	31 Objek	95.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
11,3	**Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penertiban Izin membawa Cagar Budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**	**3,70 %**	**118.060.000**	**3,70**	**24.300.000**	**3,70**	**15.000.000**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**1,85**	**24.300.000**	**50,00**	**20,58**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
11.3.1	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	8 Objek	35.000.000	0	-	2	5.000.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
11.3.2	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	4 Lap	83.060.000	1	24.300.000	1	10.000.000			0,00	0,00	1	24.300.000	25,00	29,26	
12	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase keterlak-sanaan pengelolaan Permuseuman**	**100,00 %**	**7.249.417.550**		-		-		-							
12,1	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Jumlah Museum Daerah yang dikelola Pemerintah Daerah**	**1 Museum**	**7.249.417.550**		-		-		-							
12.1.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	5 Unit	379.417.550									0	-	0,00	0,00	
12.1.2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	15 Orang	308.000.000									0	-	0,00	0,00	
12.1.3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	420 Unit	262.000.000									0	-	0,00	0,00	
12.1.4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	1.800.000.000									0	-	0,00	0,00	
12.1.5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	3 Unit	4.500.000.000									0	-	0,00	0,00	
	Belanja Non Program									45.927.146.051							
										Rata - rata Capaian Kinerja (%)	**54,37**	**25,40**			**55,95**	**19,93**	
										Predikat Kinerja	**R**	**SR**					
Jumlah Total				**1.335.351.991.263**		**419.017.497.555**		**268.896.475.815**		**215.425.056.204**		**80,11**		**588.515.407.708**		**44,07**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan	Indeks Kesehatan Daerah	78,58	79,6	101,30
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
	Bidang Urusan Kesehatan																**Dinas Kesehatan**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**216.053.748.807**	**89,47**	**75.006.820.299**	**100,00**	**46.854.310.723**	**88,67**	**36.235.476.367**	**88,67**	**77,34**	**89,07**	**111.242.296.666**	**89,07**	**51,49**	
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**295.037.222**	**93,84**	**55.472.450**	**100,00**	**33.603.200**	**92,13**	**33.603.200**	**92,13**	**100,00**	**92,99**	**89.075.650**	**92,99**	**30,19**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rerencanaan PD	5 Dok	189.647.972	2	28.163.000	2	14.088.200	2	14.088.200	100,00	100,00	4	42.251.200	80,00	22,28	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	10.550.000	1	2.110.000	1	2.110.000	1	2.110.000	100,00	100,00	2	4.220.000	40,00	40,00	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	10.550.000	1	2.110.000	1	2.110.000	1	2.110.000	100,00	100,00	2	4.220.000	40,00	40,00	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	5 Dok	10.550.000	1	2.110.000	1	2.110.000	1	2.110.000	100,00	100,00	2	4.220.000	40,00	40,00	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	5 Dok	10.550.000	1	2.110.000	1	2.110.000	1	2.110.000	100,00	100,00	2	4.220.000	40,00	40,00	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	46.739.250	1	7.789.500	1	7.785.100	1	7.785.100	100,00	100,00	2	15.574.600	40,00	33,32	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	16.450.000	2	11.079.950	1	3.289.900	1	3.289.900	100,00	100,00	3	14.369.850	60,00	87,35	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**205.312.192.557**	**60,30**	**72.752.222.247**	**100,00**	**45.370.484.723**	**65,64**	**35.088.349.039**	**65,64**	**77,34**	**62,97**	**107.840.571.286**	**62,97**	**52,53**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10380 Org	205.220.094.907	22	72.733.803.397	10380	45.349.577.423	8722	35.070.641.739	84,03	77,33	8744	107.804.445.136	84,24	52,53	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	5 Lap	92.097.650	1	18.418.850	1	20.907.300	1	17.707.300	100,00	84,69	2	36.126.150	40,00	39,23	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah (persen)**	**100,00 %**	**125.000.000**	0	-	**100,00**	**22.450.000**		-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Lap	125.000.000	0	-	2	22.450.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**2.197.500.000**	**0,00**	-	**100,00**	**79.436.500**	**100,00**	**79.436.500**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	**79.436.500**	**50,00**	**3,61**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	265 Pkt	397.500.000	0,00	-	53	79.436.500	53	79.436.500	100,00	100,00	53	79.436.500	20,00	19,98	
1.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dok	200.000.000	0,00	-							0	-	0,00	0,00	
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95 Org	1.600.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**95,00 %**	**4.143.492.900**	**100,00**	**1.256.028.295**	**100,00**	**644.927.900**	**83,33**	**406.478.125**	**83,33**	**63,03**	**91,67**	**1.662.506.420**	**96,49**	**40,12**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	6 Pkt	14.975.000	2	7.281.000	1	68.920.000	1	18.656.000	100,00	27,07	3	25.937.000	50,00	173,20	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	6 Pkt	502.240.000	1	43.056.000	1	99.980.100			0,00	0,00	1	43.056.000	16,67	8,57	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Pkt	242.957.500	2	99.280.000	1	108.802.000	1	106.776.500	100,00	98,14	3	206.056.500	50,00	84,81	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dok	51.473.000	2	20.300.000	1	8.250.000	1	8.250.000	100,00	100,00	3	28.550.000	50,00	55,47	
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Lap	251.970.000	2	86.744.000	1	170.783.400	1	170.674.200	100,00	99,94	3	257.418.200	60,00	102,16	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	3.079.877.400	2	999.367.295	1	188.192.400	1	102.121.425	100,00	54,26	3	1.101.488.720	60,00	35,76	
1,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**2.214.302.128**	**100,00**	**562.800.707**	**100,00**	**398.529.600**	**100,00**	**398.127.453**	**100,00**	**99,90**	**100,00**	**960.928.160**	**100,00**	**43,40**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Lap	727.697.564	2	157.388.900	1	153.840.200	1	153.840.000	100,00	100,00	3	311.228.900	60,00	42,77	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Lap	834.136.000	2	215.691.207	1	125.100.000	1	125.071.753	100,00	99,98	3	340.762.960	60,00	40,85	
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakn	5 Lap	53.950.000	2	30.764.000	1	4.167.400	1	4.022.200	100,00	96,52	3	34.786.200	60,00	64,48	
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Lap	598.518.564	2	158.956.600	1	115.422.000	1	115.193.500	100,00	99,80	3	274.150.100	60,00	45,80	
1,7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.766.224.000**	**100,00**	**380.296.600**	**100,00**	**304.878.800**	**75,00**	**229.482.050**	**75,00**	**75,27**	**87,50**	**609.778.650**	**87,50**	**34,52**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	666.224.000	3	280.296.600	2	209.878.800	1	134.482.050	50,00	64,08	4	414.778.650	80,00	62,26	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	48 Bln	1.100.000.000	2	100.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	100,00	100,00	3	195.000.000	6,25	17,73	
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase rata-rata pemenuhan 12 jenis SPM Bidang Kesehatan**	**100,00 %**	**609.089.420.143**	**95,00**	**135.514.412.755**	**84,40**	**92.368.945.702**	**92,25**	**53.206.832.459**	**109,30**	**57,60**	**93,63**	**188.721.245.214**	**93,63**	**30,98**	
		Persentase Puskesmas terakreditasi	**100,00 %**		**73,84**		**89,47**		**73,68**		**82,36**		**73,76**	-	**73,76**		
		Cakupan Desa Universal Child Immunization (Persen)	**100,00 %**		**58,15**		**81,20**		**53,00**		**65,27**		**55,57**	-	**55,57**		
2,1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah dan Kabupaten Kota**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terstandar**	**80 %**	**164.449.981.892**	**80**	**35.568.063.225**	**82,00**	**26.119.129.784**	**48,22**	**9.028.574.129**	**58,81**	**34,57**	**64,11**	**44.596.637.354**	**80,14**	**27,12**	
2.1.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio Tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1 Unit	11.275.000.000		-							0	-	0,00	0,00	
2.1.2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	20.686.385.251	4	6.500.584.845	1	4.170.000.000	1	1.261.688.490	100,00	30,26	5	7.762.273.335	100,00	37,52	
2.1.3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	10 Unit	8.500.000.000	4	390.505.784	4	81.390.000		56.973.000	0,00	70,00	4	447.478.784	40,00	5,26	
2.1.4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	5 Unit	1.800.000.000		-							0	-	0,00	0,00	
2.1.5	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	15 Unit	19.000.000.000		-	6	666.000.000		666.000.000	0,00	100,00	0	666.000.000	0,00	3,51	
2.1.6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainya	20 Unit	6.500.000.000		-							0	-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.1.7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	8 Unit	3.600.000.000		-	4	450.000.000	1	133.500.137	25,00	29,67	1	133.500.137	12,50	3,71	
2.1.8	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	20 Unit	16.674.158.471	14	6.856.239.000	55	2.447.297.025	25	1.460.136.400	45,45	59,66	39	8.316.375.400	195,00	49,88	
2.1.9	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Palayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Palayanan Kesehatan yang disediakan	114 Unit	39.459.228.084	61	12.196.477.073	19	3.921.689.121	19	489.798.902	100,00	12,49	80	12.686.275.975	70,18	32,15	
2.1.10	Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	5 Pkt	23.295.236.783	2	5.375.256.871	1	7.829.777.867	1	1.678.631.926	100,00	21,44	3	7.053.888.797	60,00	30,28	
2.1.11	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	5 Pkt	13.659.973.303	36	4.248.999.652	35	6.552.975.771	1	3.281.845.274	2,86	50,08	37	7.530.844.926	740,00	55,13	
2,2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif**	**69,00 %**	**442.814.438.251**	**69**	**99.946.349.530**	**65,00**	**66.174.816.218**	**62,00**	**44.178.258.330**	**95,38**	**66,76**	**65,25**	**144.124.607.860**	**94,57**	**32,55**	
		Presntase Desa STBM	**100,00 %**		**21,1**		**0,30**		**0,60**		**200,00**		**10,85**	**-**	**10,85**		
		Angka Prevalensi Malaria	**0,3 /1000 penddk**		**0,3**		**50,0**		**35,00**		**70,00**		**17,65**	**-**	**5883,33**		
		Persentase ibu hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu hamil	**100,00 %**		**86**		**100**		**96,00**		**96,00**		**91,00**	**-**	**91,00**		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan Persalinan	**100,00 %**		**78**		**100**		**87,00**		**87,00**		**82,50**	**-**	**82,50**		
		Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	**100,00 %**		**83**		**100**		**94,00**		**94,00**		**88,50**	**-**	**88,50**		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	**100,00 %**		**90**		**100**		**98,00**		**98,00**		**93,75**	**-**	**93,75**		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar	**100,00 %**		**88**		**100**		**98,00**		**98,00**		**93,00**	**-**	**93,00**		
		Persentase orang usia 15-19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100,00 %**		**68**		**100**		**92,00**		**92,00**		**80,00**	**-**	**80,00**		

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	**100,00 %**		**87**		**100**		**100,00**		**100,00**		**93,50**	-	**93,50**		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100,00 %**		**68**		**100**		**82,00**		**82,00**		**74,75**	-	**74,75**		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100,00 %**		**73**		**100**		**85,00**		**85,00**		**78,75**	-	**78,75**		
		Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	**100,00 %**		**60**		**100**		**77,00**		**77,00**		**68,50**	-	**68,50**		
		Persentase orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	**100,00 %**		**60**		**100**		**100,00**		**100,00**		**79,75**	-	**79,75**		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	**100,00 %**		**50**		**100**		**98,00**		**98,00**		**73,75**	-	**73,75**		
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	6412 Orang	1.850.023.440	6495	330.462.000	4380	481.430.000	3429	348.056.000	78,29	72,30	4962,00	678.518.000	77,39	36,68	
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	6121 Orang	11.205.862.000	6553	1.469.902.000	4181	1.069.220.000	2756	337.780.000	65,92	31,59	9309	1.807.682.000	152,08	16,13	
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	5829 Orang	925.546.000	3143	74.627.000	3981	74.910.000	2691	37.330.000	67,60	49,83	5834	111.957.000	100,09	12,10	
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35692 Orang	777.880.000	0	-	26816	97.270.000	15663	48.750.000	58,41	50,12	15663	48.750.000	43,88	6,27	
2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pendidikan Dasar	94140 Orang	988.639.000	10128	151.634.000	70729	82.667.000	10346	23.988.380	14,63	29,02	20474	175.622.380	21,75	17,76	
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	173260 Orang	468.640.000	0	-	158822	75.000.000	67577	75.000.000	42,55	100,00	67577	75.000.000	39,00	16,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard Lanjut	17710 Orang	895.159.000	6672	68.129.000	13105	151.363.400	9914	144.103.400	75,65	95,20	16586	212.232.400	93,65	23,71	
2.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	3860 Orang	362.400.000	0	-	3397	69.720.000	18420	69.720.000	542,24	100,00	18420	69.720.000	477,20	19,24	
2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1150 Orang	362.400.000	0	-	1012	69.720.000	2094	69.720.000	206,92	100,00	2094	69.720.000	182,09	19,24	
2.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	17 Orang	675.000.000	58	70.860.000	58	75.000.000	118	75.000.000	203,45	100,00	176	145.860.000	1035,29	21,61	
2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	804 Orang	512.400.000	0	36.603	609	69.720.000	3834	69.720.000	629,56	100,00	3834	69.756.603	476,87	13,61	
2.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan resiko Terinfeks HIV	Jumlah Orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	10685 Orang	904.999.800	4479	84.810.000	8826	69.720.000	4542	69.720.000	51,46	100,00	9021	154.530.000	84,43	17,08	
2.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dok	3.205.085.494	2	740.952.000	1	394.056.500	1	143.685.700	100,00	36,46	3	884.637.700	60,00	27,60	
2.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olaraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olaraga	5 Dok	807.823.200	2	73.968.200	1	103.081.000	1	47.185.000	100,00	45,77	3	121.153.200	60,00	15,00	
2.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dok	2.810.420.000	2	323.958.000	1	655.000.000	1	501.260.000	100,00	76,53	3	825.218.000	60,00	29,36	
2.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	5 Dok	200.000.000	0	-	1	50.000.000	1	24.210.000	100,00	48,42	1	24.210.000	20,00	12,11	
2.2.17	Pelayanan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dok	750.288.000	2	85.810.000	1	173.900.000	1		100,00	0,00	3	85.810.000	60,00	11,44	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.2.18	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dok	102.837.324.901	2	45.655.424.775	1	8.244.724.310	1	5.474.456.898	100,00	66,40	3	51.129.881.673	60,00	49,72	
2.2.19	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5 Dok	111.268.592.966	2	28.113.513.500	1	16.986.260.000	1	10.254.998.400	100,00	60,37	3	38.368.511.900	60,00	34,48	
2.2.20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan	Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi Jarak jauh antar Fasyankes melalui Pelayanan Telemedicine untuk mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	15 Unit	2.342.102.000	6	1.141.197.400							6	1.141.197.400	40,00	48,73	
2.2.21	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	95 PKM (Dok)	82.755.626.854	38	18.704.011.800	19	34.654.349.380	19	25.967.124.480	100,00	74,93	57	44.671.136.280	60,00	53,98	
2.2.22	Operasional Pelayanan Puskesmas (BPJS PKM)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (BPJS PKM)	95 PKM (Dok)	83.768.882.151	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.2.23	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Dok	26.397.338.445	4	2.041.773.252	2	2.121.552.628	1	396.450.072	50,00	18,69	5	2.438.223.324	50,00	9,24	
2.2.24	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten Kota	30 Unit	5.342.005.000	20	815.280.000	5	306.152.000			0,00	0,00	20	815.280.000	66,67	15,26	
2.2.25	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam satu sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	400.000.000	0	-	1	100.000.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2,3	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan**	**Presentase Puskesmas yang menerapkan Sitem Informasi Kesehatan**	**82,00 %**	**1.825.000.000**	**0**		**29,00**	**74.999.700**	**26,00**	-	**89,66**	**0,00**	**13,00**	-	**15,85**	**0,00**	
2.3.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehaatn	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehaatn	5 Dok	825.000.000			1	74.999.700	1		100,00	0,00	1	-	20,00	0,00	
2.3.2	Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi	Jumlah Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan internet yang disediakan	15 Unit	1.000.000.000									0	-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Rasio Dokter per satuan penduduk (per 2500 penduduk)**	**1,10 2500/pen ddk**	**48.329.253.070**	**0,35**	**9.392.004.931**	**0,99**	**6.032.037.236**	**0,70**	**4.044.067.989**	**70,83**	**67,04**	**0,53**	**13.436.072.920**	**47,78**	**27,80**	
3,1	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di wilayah Kab/Kota**	**Persentase desa yang memiliki Tenaga Kesehatan**	**80,00 %**	**43.863.126.826**	**80**	**9.392.004.931**	**80**	**5.882.037.236**	**100,00**	**4.004.107.989**	**125,00**	**68,07**	**90,00**	**13.396.112.920**	**112,50**	**30,54**	
		Rasio Bidan per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	**3,88 1000/pen ddk**		**2,23**		**2,79**				**0,00**		**1,12**	**-**	**28,75**		
		Rasio Perawat per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	**4,90 1000/pen ddk**		**2,45**		**3,67**				**0,00**		**1,22**	**-**	**25,00**		
3.1.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1210 Org	43.863.126.826	187	9.392.004.931	180	5.882.037.236	30	4.004.107.989	16,67	68,07	217	13.396.112.920	17,93	30,54	
3,2	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**19 PKM**	**4.466.126.244**	**0**	**-**	**19**	**150.000.000**	**19,00**	**39.960.000**	**100,00**	**26,64**	**9,50**	**39.960.000**	**50,00**	**0,89**	
3.2.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan mutu dan kompetensinya Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1000 Org	4.466.126.244		-	250	150.000.000	45	39.960.000	18,00	26,64	45	39.960.000	4,50	0,89	
4	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat),Usaha mikro obat tradional (UMOT) dan Industri rumah Tangga yang memenuhi standar dan persyaratan Perizinan**	**92,86 %**	**956.906.000**	**35,85**	**140.220.000**	**29,00**	**207.184.000**		**203.584.000**	**0,00**	**98,26**	**17,93**	**343.804.000**	**19,30**	**35,93**	
4,1	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Jumlah P-IRT yang memiliki Sertifikat**	**190 IRT**	**658.148.000**	**38**	**140.220.000**	**38**	**170.334.000**		**170.334.000**	**0,00**	**100,00**	**19**	**310.554.000**	**10,00**	**47,19**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	5 Dok	658.148.000	2	140.220.000	1	170.334.000		170.334.000	0,00	100,00	2	310.554.000	40,00	47,19	
4,2	**Pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Pemeriksaan Post Market PIRT**	**95,00 %**	**298.758.000**	**39**	**-**	**77,00**	**36.850.000**		**33.250.000**	**0,00**	**90,23**	**19,25**	**33.250.000**	**20,26**	**11,13**	
4.2.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar yang dilakukan Pemeriksaan Post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	70 Unit	298.758.000	26,00	-	50	36.850.000		33.250.000	0,00	90,23	26	33.250.000	37,14	11,13	
5	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Posyandu Aktif**	**100,00 %**	**3.376.962.000**	**85,85**	**285.640.000**	**81,10**	**2.304.444.460**	**100,00**	**1.105.500.115**	**123,30**	**47,97**	**92,93**	**1.391.140.115**	**92,93**	**41,20**	
		Rasio jumlah posbindu PTM terhadap jumlah Desa	**100,00 %**		**89,80**		**92,40**		**65,00**		**70,35**		**77,40**	**-**	**77,40**		
5,1	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas**	**90,00 %**	**1.135.437.000**	**78**	**285.640.000**	**78,00**	**1.804.242.160**	**74,00**	**780.661.215**	**94,87**	**43,27**	**76,00**	**1.066.301.215**	**84,44**	**93,91**	
5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Dok	1.135.437.000	2	285.640.000	1	1.804.242.160	1	780.661.215	100,00	43,27	3	1.066.301.215	60,00	93,91	
5,2	**Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota**	**Terlaksananya Pelayanan Promotif dan Preventif**	**95,00 %**	**2.241.525.000**	**0**	**-**	**85,00**	**500.202.300**	**70,00**	**324.838.900**	**82,35**	**64,94**	**35,00**	**324.838.900**	**36,84**	**14,49**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	Jumlah DokumenHasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	5 Dok	2.241.525.000	0	-	1	500.202.300	1	324.838.900	100,00	64,94	1	324.838.900	20,00	14,49	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)											**88,67**	**64,62**			**133,23**	**30,30**	
Predikat Kinerja											**ST**	**S**					
Jumlah Total					**877.806.290.020**		**220.339.097.985**		**147.766.922.121**		**94.795.460.930**		**64,15**		**315.134.558.915**		**35,90**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan	Indeks Kesehatan Daerah	78,58	79,6	101,30
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	Bidang Urusan Kesehatan																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**141.290.786.037**	**81,81**	**47.025.546.876**	**90,00**	**74.350.375.483**	**75,87**	**103.468.962.806**	**84,30**	**139,16**	**78,84**	**150.494.509.682**	**78,84**	**106,51**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**164.955.111**	**96,43**	**15.930.000**	**100,00**	**22.798.300**	**81,82**	**11.720.000**	**81,82**	**51,41**	**89,12**	**27.650.000**	**89,12**	**16,76**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rerencanaan PD	5 Dok	45.788.250	0	-	1	7.500.000	1	7.500.000	100,00	100,00	1	7.500.000	20,00	16,38	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	12.881.761	1	2.110.000	1	2.110.000	1	2.110.000	100,00	100,00	2	4.220.000	40,00	32,76	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	12.881.761	1	2.110.000							1	2.110.000	20,00	16,38	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	12.881.761	1	2.110.000							1	2.110.000	20,00	16,38	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	12.881.761	1	2.110.000	1	2.110.000	1	2.110.000	100,00	100,00	2	4.220.000	40,00	32,76	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian	5 Lap	47.554.038	1	7.490.000	1	7.789.500	1		100,00	0,00	2	7.490.000	40,00	15,75	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	20.085.779	0	-	1	3.288.800	1		100,00	0,00	1	-	20,00	0,00	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**113.792.067.671**	**83,86**	**36.335.281.838**	**100,00**	**15.232.463.483**	**62,27**	**14.255.560.333**	**62,27**	**93,59**	**73,07**	**50.590.842.171**	**73,07**	**44,46**	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5512 Orang	113.646.852.605	4876	36.310.083.006	2968	15.219.865.283	2968	14.255.560.333	100,00	93,66	7844	50.565.643.339	142,31	44,49	
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Lap	55.692.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	5 Lap	89.523.066	2	25.198.832	1	12.598.200	1		100,00	0,00	3	25.198.832	60,00	28,15	
1,3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah (persen)**	**100,00 %**	**55.692.000**	**0,00**	-		-					**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	55.692.000	0,00	-							0	-	0,00	0,00	
1,4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**55.692.000**	**0,00**	-		-					**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
1.4.1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Lap	55.692.000	0,00	-							0	-	0,00	0,00	
1,5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**4.060.811.481**	**100,00**	**1.603.559.060**	**100,00**	**437.721.500**	**100,00**	**361.813.877**	**100,00**	**82,66**	**100,00**	**1.965.372.937**	**100,00**	**48,40**	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	5 Paket	608.511.000	2	47.488.000	1	70.002.000	1	70.002.000	100,00	100,00	3	117.490.000	60,00	19,31	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	5 Paket	1.000.736.205	3	653.414.000	1	60.833.100	1	60.833.100	100,00	100,00	4	714.247.100	80,00	71,37	
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	5 Paket	1.169.944.094	2	341.988.000	1	45.666.000	1	45.666.000	100,00	100,00	3	387.654.000	60,00	33,13	
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	152.658.026	2	275.726.000	1	70.005.400	1	70.005.400	100,00	100,00	3	345.731.400	60,00	226,47	
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dok	140.417.300	2	45.933.000	1	22.957.000	1	22.957.000	100,00	100,00	3	68.890.000	60,00	49,06	
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Lap	173.469.856	2	36.000.000	1	18.014.000	1	18.014.000	100,00	100,00	3	54.014.000	60,00	31,14	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	815.075.000	3	203.010.060	1	150.244.000	1	74.336.377	100,00	49,48	4	277.346.437	80,00	34,03	
1,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**19.422.940.526**	**66,67**	**8.293.967.478**	**100,00**	**3.617.912.000**	**66,67**	**2.199.940.000**	**66,67**	**60,81**	**66,67**	**10.493.907.478**	**66,67**	**54,03**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Lap	16.568.089.108	2	7.550.687.478	12	3.515.280.000	8	2.155.340.000	66,67	61,31	10	9.706.027.478	200,00	58,58	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Lap	2.580.121.918	1	743.280.000	1	58.032.000			0,00	0,00	1	743.280.000	20,00	28,81	
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakn	5 Lap	274.729.500	0	-	1	44.600.000	1	44.600.000	100,00	100,00	1	44.600.000	20,00	16,23	
1,7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**3.738.627.248**	**100,00**	**776.808.500**	**100,00**	**39.480.200**	**50,00**	**19.980.200**	**50,00**	**50,61**	**75,00**	**796.788.700**	**75,00**	**21,31**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	3.738.627.248	4	756.816.000	4	19.500.000			0,00	0,000	4	756.816.000	40,00	20,24	
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	19.992.500	1	19.980.200	1	19.980.200	100,00	100,000	2	39.972.700			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Tenaga Medis Yang Menerima Jasa Pelayanan**	**100 %**	**308.253.967.425**			**85,00**	**55.000.000.000**	**100,00**	**86.619.948.396**	**117,65**	**157,49**	**50,00**	**86.619.948.396**	**50,00**	**28,10**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1	55.000.000.000	1	86.619.948.396	100,00	157,49	1	86.619.948.396			
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase penambahan jumlah tempat tidur RSUD**	**6,40 %**	**596.870.533.178**	**6,30**	**87.797.632.790**	**6,40**	**70.967.642.297**	**5,10**	**37.521.299.266**	**79,69**	**52,87**	**5,70**	**125.318.932.056**	**89,02**	**21,00**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
		Jumlah layanan RSUD yang tersertifikasi ISO (kumulatif)	**2 Layanan**				**1**				**0,00**		**0,00**	**-**	**0,00**		

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2,1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terstandar**	**90 %**	**574.366.648.178**	**75**	**83.321.671.290**	**80**	**68.297.483.297**	**100,00**	**35.912.782.266**	**100,00**	**52,58**	**87,50**	**119.234.453.556**	**97,22**	**20,76**	
2.1.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4 Unit	167.863.002.093	2	22.004.526.812	1	4.765.694.382	1	3.453.112.679	100,00	72,46	3	25.457.639.491	75,00	15,17	
2.1.2	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang di tingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan Rumah Sakit berdasarkan kelas rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	4 Unit	5.250.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	6 Paket	43.705.625.265	0	-							0	-	0,00	0,00	
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasiltas Pelayanan Kesehatan yang disediakan					7	1.418.188.000	7	585.000.000	100,00	41,250	7	585.000.000			
2.1.4	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang di Sediakan.	380 Paket	27.384.499.100	60	5.989.500	2	1.279.375.204	2		100,00	0,000	62	5.989.500	16,32	0,02	
2.1.5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Palayanan Kesehatan yang disediakan	500 Paket	300.712.088.326	138	58.199.127.571	32	57.025.900.721	32	29.716.412.987	100,00	52,110	170	87.915.540.558	34,00	29,24	
2.1.6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	6 Paket	12.255.197.764	2	1.513.628.407	1	100.000.000	1		100,00	0,000	3	1.513.628.407	50,00	12,35	
2.1.7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	6 Paket	13.251.385.630	2	1.598.399.000	1	3.708.324.990	1	2.158.256.600	100,00	58,200	3	3.756.655.600	50,00	28,35	
2.1.8	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit	696.150.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.1.9	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit	1.160.250.000	0	-							0	-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.1.10	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	4 Unit	2.088.450.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2,2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Kesehatan**	**90 %**	**21.343.635.000**	**73**	**4.475.961.500**	**84,00**	**2.670.159.000**	**50,00**	**1.608.517.000**	**50,00**	**60,24**	**61,67**	**6.084.478.500**	**68,52**	**28,51**	
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dok	7.870.620.000	2	2.122.279.000	1	1.705.979.000	1	1.104.367.000	100,00	64,74	3	3.226.646.000	50,00	41,00	
2.2.2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menularr	6 Dok	11.152.515.000	1	950.000.000	1	100.000.000			0,00	0,00	1	950.000.000	16,67	8,52	
2.2.2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	6 Dok		1	936.000.000	1	160.030.000			0,00	0,00	1	936.000.000	16,67		
2.2.2	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 Unit	1.160.250.000	1	467.682.500	1	704.150.000	1	504.150.000	100,00	71,60	2	971.832.500	50,00	83,76	
2.2.2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan	4 Unit	1.160.250.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2,3	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ruangan Pelayanan Yang Memenuhi Indikator Nasional Mutu**	**90 %**	**1.160.250.000**			**85,00**						**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk (per 16ribu penduduk)**	**1,30 %**	**41.293.109.833**	**1,33**	**25.892.149.965**	**1,30**	**18.512.231.760**	**1,30**	**10.989.206.312**	**100,00**	**59,36**	**1,31**	**36.881.356.277**	**101,03**	**89,32**	
3,1	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase desa yang memiliki Tenaga Kesehatan**	**100,00 %**	**40.811.209.229**	**100,77**	**25.818.581.565**	**100,00**	**18.437.231.560**	**100,00**	**10.989.206.312**	**100,00**	**59,60**	**100,38**	**36.807.787.877**	**100,38**	**90,19**	
3.1.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesua Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes	9144 Orang	39.847.408.021	796	25.818.581.565	3372	18.437.231.560	2248	10.989.206.312	66,67	59,60	3044	36.807.787.877	33,29	92,37	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3,2	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK yang mengikuti Bimtek seseuai kompetensi**	**100,00 %**	**481.900.604**	**100,00**	**73.568.400**	**100,00**	**75.000.200**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0**	**50,00**	**73.568.400**	**50,00**	**15,27**	
3.2.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan mutu dan kompetensinya Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	580 Orang	481.900.604	46	73.568.400	46	75.000.200			0,00	0,00	46	73.568.400	7,93	15,27	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)											**84,30**	**62,27**			**#REF!**	**#REF!**	
Predikat Kinerja											**T**	**R**					
Jumlah Total				**779.454.429.048**		**160.715.329.631**		**163.830.249.540**		**151.979.468.384**		**92,77**		**312.694.798.015**		**40,12**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,65	74,06	104,83
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah,	Indeks Ketahanan Lingkungan	70,86	70,71	99,79
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	URUSAN WAJIB PELAYAN DASAR																	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG																	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**100**	**Persen**	**47.489.514.175**	**98,63**	**22.519.251.082**	**90**	**17.349.519.833**	**85,99**	**11.020.314.925**	**95,55**	**63,52**	**92,31**	**33.539.566.007**	**100**	**70,63**	**Dinas PUTR**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**1.421.009.123**	**98,60**	**413.182.423**	**100**	**233.192.200**	**100,00**	**141.208.200**	**100,00**	**60,55**	**99,30**	**554.390.623**	**100**	**39,01**	**Dinas PUTR**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26	Dokumen	267.412.523	10	66.734.323	4	64.422.300	4	45.902.300	100	71	14	112.636.623	53,85	42,12	Dinas PUTR
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	24.468.050	2	8.802.250	1	2.965.800	1	2.965.800	100	100	3	11.768.050	50,00	48,10	Dinas PUTR
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	24.468.050	2	8.802.250	1	2.965.800	1	2.965.800	100	100	3	11.768.050	50,00	48,10	Dinas PUTR
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	24.468.050	2	8.802.250	1	2.965.800	1	2.965.800	100	100	3	11.768.050	50,00	48,10	Dinas PUTR
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	24.468.050	2	8.802.250	1	2.965.800	1	2.965.800	100	100	3	11.768.050	50,00	48,10	Dinas PUTR

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	419.898.150	4	86.434.650	1	81.524.900	1	10.628.900	100	13,04	5	97.063.550	50,00	23,12	Dinas PUTR
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	Laporan	635.826.250	10	224.804.450	4	75.381.800	4	72.813.800	100	97	14	297.618.250	53,85	46,81	Dinas PUTR
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**16.608.033.736**	**90,01**	**5.569.967.289**	**100**	**3.100.315.058**	**60,06**	**2.427.209.278**	**60,06**	**78,29**	**75,04**	**7.997.176.567**	**75**	**48,15**	**Dinas PUTR**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang	16.608.033.736	37	5.569.967.289	37	3.100.315.058	37	2.427.209.278	100	78,29	37	7.997.176.567	112,12	48,15	Dinas PUTR
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**745.087.976**	**45,83**	**307.209.476**	**100**	**142.512.000**	**33,33**	**-**	**33,33**	**0,00**	**39,58**	**307.209.476**	**39,58**	**41,23**	**Dinas PUTR**
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8	Paket	275.502.560	3	52.218.000	2	118.002.500	2	-	100	0,00	5	52.218.000	62,50	18,95	Dinas PUTR
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180	Orang	160.529.416	30	28.252.416	30	24.509.500	0	-	0	0	30	28.252.416	16,67	17,60	Dinas PUTR
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21	Orang	309.056.000	3	226.739.060	6	0	0	-	0	0,00	3	226.739.060	14,29	73,37	Dinas PUTR
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**3.343.395.219**	**91,70**	**981.871.519**	**100**	**596.930.900**	**87,01**	**275.561.300**	**87,01**	**46,16**	**89,35**	**1.257.432.819**	**89,35**	**37,61**	**Dinas PUTR**
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	22.605.000	10	7.070.000	5	3.532.000	5	3.532.000	100	100	15	10.602.000	50,00	46,90	Dinas PUTR
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	1.216.369.300	6	168.631.000	5	206.498.600	5	154.880.000	100	75,00	11	323.511.000	44	26,60	Dinas PUTR
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	21.293.000	23	4.866.000	11	8.045.800	11	8.045.800	100	100	34	12.911.800	56,67	60,64	Dinas PUTR
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	129	Paket	136.476.919	42	311.476.919	7	40.000.000	7	40.000.000	100	100	49	351.476.919	37,98	257,54	Dinas PUTR

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	Paket	80.750.000	6	28.000.000	3	13.408.500	2	10.141.500	67	76	8	38.141.500	44,44	47,23	Dinas PUTR
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Laporan	547.724.000	24	102.400.000	12	108.000.000	12	-	100	0,00	36	102.400.000	50,00	18,70	Dinas PUTR
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Laporan	68.680.000	24	24.000.000	12	8.680.000	12	8.680.000	100	100	36	32.680.000	50,00	47,58	Dinas PUTR
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112	Laporan	1.249.497.000	32	335.427.600	34	208.766.000	10	50.282.000	29	24,09	42	385.709.600	37,50	30,87	Dinas PUTR
1,5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**18.023.011.861**	**74,02**	**11.788.389.825**	**100**	**12.469.523.675**	**100,00**	**7.443.288.103**	**100,00**	**59,69**	**87,01**	**19.231.677.928**	**87,01**	**106,71**	**Dinas PUTR**
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	Unit	2.705.818.861	1	71.500.000	2	1.007.860.000	2	-	100	0,00	3	71.500.000	50,00	2,64	Dinas PUTR
1.5.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	Unit	14.549.950.500	22	11.616.889.825	12	11.414.715.675	12	7.443.288.103	100	65,21	34	19.060.177.928	170,00	131,00	Dinas PUTR
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	Unit	767.242.500	2	100.000.000	6	46.948.000	6	-	100	0	8	100.000.000	67	13	Dinas PUTR
1,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**1.282.494.660**	**100,00**	**388.019.950**	**100**	**187.040.000**	**100**	**131.611.544**	**100,00**	**70,37**	**100,00**	**519.631.494**	**100,00**	**40,52**	**Dinas PUTR**
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laproran Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Laporan	762.397.060	24	254.600.660	12	97.156.400	12	62.737.000	100	65	36	317.337.660	50,00	41,62	Dinas PUTR
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72	Laporan	520.097.600	24	133.419.290	12	89.883.600	12	68.874.544	100	76,63	36	202.293.834	50,00	38,90	Dinas PUTR
1,7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**6.066.481.600**	**99,38**	**3.070.610.600**	**100**	**620.006.000**	**100,00**	**601.436.500**	**100,00**	**97,00**	**99,69**	**3.672.047.100**	**99,69**	**60,53**	**Dinas PUTR**
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	42	Unit	916.481.600	14	297.975.600	7	120.006.000	7	101.436.500	100	84,53	21	399.412.100	50,00	43,58	Dinas PUTR

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	7	Unit	5.150.000.000	8	2.772.635.000	1	500.000.000	1	500.000.000	100	100,00	9	3.272.635.000	128,57	63,55	Dinas PUTR
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Luas Kawasan Pantai Rawan Bencana (abrasi, erosi, akresi) terlindungi infrastruktur pengaman pantai**	**40,20**	**Persen**		**29,30**		**30,53**		**30,53**		**100,00**		**30,53**		**75,95**		
		Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir terlindungi infrastruktur pengaman sungai	**16,84**	**Persen**	**95.794.587.903**	**13,62**	**38.224.406.833**	**14,96**	**17.582.451.615**	**14,96**	**8.241.604.475**	**100,00**	**46,87**	**14,96**	**46.466.011.308**	**88,84**	**48,51**	**Dinas PUTR**
		Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenagan Kabupaten Yang di layani Oleh Jaringan Irigasi	**31,80**	**Persen**		**31,80**		**31,80**		**31,80**		**100,00**		**31,80**		**100**		
2,1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Infrastruktur Pengaman Pantai terbangun**	**39,44**	**Persen**		**30,75**		**30,746**		**30,746**		**100,00**		**30,75**		**77,96**		
		Persentase Panjang Infrastruktur Pengaman Sungai terbangun	**7,43**	**Persen**	**65.506.199.877**	**6,52**	**21.937.528.191**	**7,46**	**14.196.137.615**	**7,46**	**6.006.004.475**	**100,00**	**42,31**	**7,46**	**27.943.532.666**	**100,40**	**42,66**	**Dinas PUTR**
2.1.1	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten /Kota yang Disusun	8	Dokumen	4.295.926.217	7	2.819.053.246	2	735.975.000	2	375.002.100	100	50,95	9	3.194.055.346	112,50	74,35	Dinas PUTR
2.1.2	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	2,53	Km	12.850.000.000	0,54	2.626.553.900	1,11	5.750.000.000	1,11	1.951.803.700	100	33,94	1,65	4.578.357.600	65,22	35,63	Dinas PUTR
2.1.3	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,55	Km	3.400.000.000	0,68	886.680.000	0,17	1.700.000.000	0,14	282.126.060	82	16,60	0,82	1.168.806.060	149	34,38	Dinas PUTR
2.1.4	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	16.729	Km	39.410.273.660	3,19	14.107.011.045	0,87	5.410.162.615	0,87	3.197.072.615	100	59,09	4,06	17.304.083.660	0	43,91	Dinas PUTR
2.1.5	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,36	Km	1.150.000.000	0,13	498.230.000	0,02	200.000.000	0,02	200.000.000	100	100,00	0,15	698.230.000	42,22	60,72	Dinas PUTR
2.1.6	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	2,20	Km	4.400.000.000	0,50	1.000.000.000	0,12	400.000.000	0,12	-	100	0	0,62	1.000.000.000	28,18	22,73	Dinas PUTR

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
2,2	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Jaringan Irigasi terbangun**	**88,85**	**Persen**	**30.288.388.026**	**75,41**	**16.286.878.642**	**76,44**	**3.386.314.000**	**76,44**	**2.235.600.000**	**100,00**	**66,02**	**76,44**	**18.522.478.642**	**86,03**	**61,15**	**Dinas PUTR**
2.2.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	10	Dokumen	5.251.394.966	3	1.324.762.282	1	1.286.314.000	1	1.146.100.000	100	89,10	4	2.470.862.282	40,00	47,05	Dinas PUTR
2.2.2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	24,66	Km	9.949.974.700	0,7	3.918.540.000	0,35	700.000.000	0,35	691.000.000	100	98,71	1,05	4.609.540.000	4	46	Dinas PUTR
2.2.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	28,58	Km	15.087.018.360	5,9	11.043.576.360	5,00	1.400.000.000	5,00	398.500.000	100	28,46	10,93	11.442.076.360	38,24	75,84	Dinas PUTR
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum aman (persen poin dari tahun sebelumnya)**	**-0,28**	**Persen**	**66.545.154.848**	**5,53**	**20.652.480.648**	**3,47**	**11.171.148.100**	**3,47**	**7.164.854.400**	**100,00**	**64,14**	**9,00**	**27.817.335.048**	**-3214**	**41,80**	**Dinas PUTR**
3,1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mnum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penduduk yang memiliki akses pada sumber air minum aman**	**80,86**	**Persen**	**66.545.154.848**	**80,96**	**20.652.480.648**	**84,43**	**11.171.148.100**	**84,43**	**7.164.854.400**	**100,00**	**64,14**	**84,43**	**27.817.335.048**	**104,42**	**41,80**	**Dinas PUTR**
3.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	17	Dokumen	6.421.537.366	9	2.769.848.166	4	918.428.600	4	848.259.900	100	92,36	13	3.618.108.066	76,47	56,34	Dinas PUTR
3.1.2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan /Peningkatan/Perluasan /Optimalisasi SPAM	124	Dokumen	1.226.585.000	38	410.425.000	1	177.360.000	1	177.360.000	100	100	39	587.785.000	31,45	47,92	Dinas PUTR
3.1.3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	31268	SR	7.525.000.000	350	2.313.300.000	134	2.050.000.000	134	673.175.000	100	32,84	484	2.986.475.000	1,55	39,69	Dinas PUTR
3.1.4	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Kawasan Perdesaan	320	SR	1.400.000.000	15	1.249.615.000	160	800.000.000	160	800.000.000	100	100	175	2.049.615.000	54,69	146,40	Dinas PUTR

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
3.1.5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	77	Kelompok Masyarakat	172.641.133	37	51.141.133	28	25.359.500	28	16.059.500	100	63,33	65	67.200.633	84,42	38,93	Dinas PUTR
3.1.6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Kawasan Perdesaan	38435	SR	49.799.391.349	2369	13.858.151.349	1800	7.200.000.000	1800	4.650.000.000	100	64,58	4169	18.508.151.349	10,85	37,17	Dinas PUTR
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Desa yang telah memiliki Sarana dan Prasarana Persampahan yang Memadai**	**6,63**	**Persen**	**4.343.277.000**	**0,51**	**671.777.000**	**0,51**	**25.359.500**	**0,51**	**16.059.500**	**100,00**	**63,33**	**1**	**687.836.500**	**15,38**	**15,84**	**Dinas PUTR**
4,1	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Bangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS terbangun**	**6,63**	**Persen**	**4.343.277.000**	**0,51**	**671.777.000**	**0,51**	**25.359.500**	**0,51**	**16.059.500**	**100,00**	**63,33**	**1**	**687.836.500**	**15,38**	**15,84**	**Dinas PUTR**
4.1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/ TPST/SPA/TPS-3R/ TPS	300	Rumah Tangga	4.200.000.000	40	500.000.000	0	0	0	-	0	0	40	500.000.000	13,33	11,90	Dinas PUTR
4.1.2	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan SaranaTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	5	Kel Masy	143.277.000	1	171.777.000	1	25.359.500	1	16.059.500	100	63,33	2	187.836.500	40,00	131,10	Dinas PUTR
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki Akses Pada Sanitasi Layak (persen poin dari tahun sebelumnya)**	**0,56**	**Persen**	**67.361.152.031**	**0,34**	**27.418.970.974**	**0,41**	**12.723.103.900**	**0,36**	**8.020.978.300**	**87,80**	**63,04**	**0,36**	**35.439.949.274**	**64,29**	**52,61**	**Dinas PUTR**
5,1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk terlayani sistem air limbah memadai**	**56,23**	**Persen**	**67.361.152.031**	**52,91**	**27.418.970.974**	**53,32**	**12.723.103.900**	**53,27**	**8.020.978.300**	**99,91**	**63,04**	**53,27**	**35.439.949.274**	**94,74**	**52,61**	**Dinas PUTR**
5.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	6	Dokumen	4.192.548.124	5	1.466.367.024	8	1.457.044.400	8	1.217.708.800	100	83,57	13	2.684.075.824	216,67	64,02	Dinas PUTR
5.1.2	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	102823	Rumah Tangga	60.646.774.150	615	23.780.918.150	497	11.040.700.000	478	6.587.210.000	96	59,66	1093	30.368.128.150	1,06	50,07	Dinas PUTR

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
5.1.3	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	85	Kelompok Masyarakat	171.829.757	45	71.685.800	27	25.359.500	27	16.059.500	100	63,33	72	87.745.300	84,71	51,07	Dinas PUTR
5.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	20	Unit	2.350.000.000	25	2.100.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	100	100	37	2.300.000.000	185,00	97,87	Dinas PUTR
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Panjang jaringan drainase (skala kota dan desa) terbangun**	**5,64**	**Persen**	**17.484.607.000**	**3,24**	**6.590.452.000**	**3,59**	**4.407.810.000**	**3,59**	**2.918.860.000**	**100,00**	**66,22**	**3,59**	**9.509.312.000**	**63,65**	**54,39**	**Dinas PUTR**
6,1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase Panjang Drainase Perkotaan Terbangun**	**28,15**	**persen**	**17.484.607.000**	**22,89**	**6.590.452.000**	**25,19**	**4.407.810.000**	**25,19**	**2.918.860.000**	**100,00**	**66,22**	**24**	**9.509.312.000**	**85**	**54,39**	**Dinas PUTR**
6.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	10	Dokumen	2.485.360.000	4	1.019.370.000	1	307.810.000	1	227.160.000	100	73,80	5	1.246.530.000	50,00	50,15	Dinas PUTR
6.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	33320	M	13.400.000.000	1930	3.671.835.000	1950	2.900.000.000	1950	1.491.700.000	100	51	3880	5.163.535.000	11,64	38,53	Dinas PUTR
6.1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	10440	M	1.599.247.000	29000	1.899.247.000	200	200.000.000	200	200.000.000	100	100	29200	2.099.247.000	279,69	131,26	Dinas PUTR
6.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara						14000	1.000.000.000	14000	1.000.000.000							
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase Infrastruktur terbangun pada kawasan permukiman (pada tahun berkenaan)**	**58,00**	**Persen**	**110.032.094.000**	**55,30**	**39.427.230.320**	**33,77**	**27.223.539.680**	**33,57**	**17.144.222.750**	**99,41**	**62,98**	**88,87**	**56.571.453.070**	**153,22**	**51,41**	**Dinas PUTR**
7,1	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pembangunan Infrastruktur pada Kawasan Permukiman (tahun berkenaan)**	**58,00**	**Persen**	**110.032.094.000**	**55,30**	**39.427.230.320**	**66,88**	**27.223.539.680**	**66,79**	**17.144.222.750**	**99,87**	**62,98**	**122,09**	**56.571.453.070**	**210,50**	**51,41**	**Dinas PUTR**

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
7.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	94	Sistem Jaringan	110.032.094.000	36	39.427.230.320	14	27.223.539.680	13	17.144.222.750	93	62,98	49	56.571.453.070	52,13	51,41	Dinas PUTR
8	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase SLF yang diterbitkan (pada tahun berkenaan)**	**100**	**Persen**	**3.661.154.050**	**65,00**	**1.376.599.850**	**100**	**854.825.900**	**78,26**	**563.045.900**	**78,26**	**65,87**	**71,63**	**1.939.645.750**	**71,63**	**52,98**	**Dinas PUTR**
8,1	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Permohonan PBG yang mendapatkan Persetujuan (pada tahun berkenaan)**	**100**	**Persen**	**3.661.154.050**	**76,36**	**1.376.599.850**	**100**	**854.825.900**	**75,41**	**563.045.900**	**75,41**	**65,87**	**75,89**	**1.939.645.750**	**75,89**	**52,98**	**Dinas PUTR**
8.1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1450	Dokumen	3.661.154.050	333	1.376.599.850	100	854.825.900	100	563.045.900	100	65,87	433	1.939.645.750	29,86	52,98	Dinas PUTR
9	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Presentase Keterlaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kawasan Strategis Kabupaten**	**100**	**Persen**	**1.385.360.000**	**100,00**	**1.742.680.000**	**100**	**721.340.000**	**40**	**320.000.000**	**40,00**	**44,36**	**70,00**	**2.062.680.000**	**70,00**	**148,89**	**Dinas PUTR**
9,1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang tersusun (tahun berkenaan)**	**100**	**Persen**	**1.385.360.000**	**100,00**	**1.742.680.000**	**100**	**721.340.000**	**33**	**320.000.000**	**33,33**	**44,36**	**66,67**	**2.062.680.000**	**66,67**	**148,89**	**Dinas PUTR**
9.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten /Kota	12	Dokumen	1.385.360.000	5	1.742.680.000	5	621.340.000	3	320.000.000	60	51,50	8	2.062.680.000	66,67	148,89	Dinas PUTR

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						2	100.000.000	0	-							
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik**	**62,46**	**Persen**	**319.811.679.072**	**52,14**	**82.855.072.552**	**53,47**	**51.997.636.910**	**53,47**	**32.811.057.976**	**100,00**	**63,10**	**53,47**	**115.666.130.528**	**85,61**	**36,17**	**Dinas PUIR**
10,1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik**	**62,46**	**Persen**	**319.811.679.072**	**52,14**	**82.855.072.552**	**53,47**	**51.997.636.910**	**53,47**	**32.811.057.976**	**100,00**	**63,10**	**53,47**	**115.666.130.528**	**85,61**	**36,17**	**Dinas PUIR**
		Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	**95,35**	**Persen**		**85,39**		**85,39**		**85,39**		**100,00**		**85,39**		**89,55**		**Dinas PUIR**
10.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	24	Dokumen	9.557.498.968	4	963.995.768	9	3.424.898.000	4	1.513.813.495	44	44,20	8	2.477.809.263	33	25,93	Dinas PUTR
10.1.2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan /Jembatan	7	Dokumen	3.074.530.000	8	751.979.000	1	801.476.000	0	301.476.000	0	37,62	8	1.053.455.000	114	34,26	Dinas PUTR
10.1.3	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	152,17	Km	109.046.507.760	27,83	48.742.738.950	0,00	7.422.332.810	0,00	5.411.018.810	0	72,90	27,83	54.153.757.760	18,29	49,66	Dinas PUTR
10.1.4	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	173131	Km	108.394.510.200	11,05	23.860.631.000	4,00	25.956.699.450	4,00	20.743.665.932	100	79,92	15,05	44.604.296.932	0,01	41,15	Dinas PUTR
10.1.5	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	32,33	Km	9.600.000.000	26,68	1.048.000.000	43,22	2.998.300.000	1,00	793.500.000	2	26,46	27,68	1.841.500.000	85,62	19,18	Dinas PUTR
10.1.6	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	1361,61	M	64.440.364.890	0,00	6.824.961.900	15,06	8.256.099.100	15,06	2.980.010.189	100	36,09	15	9.804.972.089	1,11	15,22	Dinas PUTR
10.1.7	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	348,74	M	12.915.666.563	98,54	529.402.934	249,52	800.000.000	219,52	132.000.000	88	0	318,06	661.402.934	91,20	5,12	Dinas PUTR
10.1.8	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	11	Dokumen	2.782.600.691	2	133.363.000	6	2.337.831.550	4	935.573.550	67	40,02	6	1.068.936.550	54,55	38,42	Dinas PUTR
11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Kecelakaan Konstruksi pada Proyek yang didanai APBD Kabupaten**	**100**	**Persen**	**3.827.251.570**	**50,00**	**1.146.171.500**	**100**	**1.726.919.200**	**100**	**780.638.200**	**100,00**	**45,20**	**75,00**	**1.926.809.700**	**75,00**	**50,34**	**Dinas PUIR**

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
11,1	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Rasio ketersediaan tenaga terampil konstruksi (persen)**	**50,50**	**Persen**	**2.534.341.570**	**26,60**	**701.231.500**	**29,10**	**1.524.582.700**	**29,10**	**593.821.700**	**100,00**	**38,95**	**55,70**	**1.295.053.200**	**110,30**	**51,10**	**Dinas PUIR**
11.1.1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	360	Orang	1.261.238.070	61	124.496.000	60	362.993.700	60	350.993.700	100	97	121	475.489.700	34	37,70	Dinas PUTR
11.1.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	300	Orang	1.273.103.500	150	576.735.500	120	1.161.589.000	60	242.828.000	50	20,90	210	819.563.500	70,00	64,38	Dinas PUTR
11,2	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)**	**100**	**Persen**	**1.007.120.000**	**60,00**	**389.150.000**	**100**	**152.340.000**	**100**	**136.820.000**	**100,00**	**90**	**80,00**	**525.970.000**	**80,00**	**52,23**	**Dinas PUIR**
11.2.1	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	39	Dokumen	1.007.120.000	9	389.150.000	2	152.340.000	2	136.820.000	100	90	11	525.970.000	28,21	52,23	Dinas PUTR
11,3	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Terlaksananya Pengawasan Terhadap Perizinan Jasa Konstruksi**	**100**	**Persen**	**285.790.000**	**100,00**	**55.790.000**	**100**	**49.996.500**	**100**	**49.996.500**	**100,00**	**100**	**100,00**	**105.786.500**	**100,00**	**37,02**	**Dinas PUIR**
11.3.1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	6	Laporan	285.790.000	2	55.790.000	1	49.996.500	1	49.996.500	100	100	3	105.786.500	50,00	37,02	Dinas PUTR
12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Perda tata Ruang yang telah ditetapkan**	**100**	**Persen**	**8.138.792.746**	**25,00**	**1.214.582.164**	**28,57**	**1.629.211.000**	**28,57**	**717.479.300**	**100,00**	**44,04**	**26,79**	**1.932.061.464**	**26,79**	**23,74**	**Dinas PUIR**
12,1	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Materi Teknis RTRW dan RRTR yang telah disusun**	**14**	**Buah**	**6.295.210.646**	**4**	**633.862.164**	**5**	**1.296.882.500**	**5**	**513.250.800**	**100,00**	**39,58**	**9**	**1.147.112.964**	**64,29**	**18,22**	**Dinas PUIR**
12.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	13	Dokumen	6.120.282.646	1	633.862.164	3	1.249.195.000	3	513.250.800	100	41,09	4	1.147.112.964	30,77	18,74	Dinas PUTR

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
12.1.2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	5	Dokumen	174.928.000	0	0	1	47.687.500	0	-	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas PUTR
12,2	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang**	**100**	**Persen**	**701.390.000**	**100,00**	**475.490.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100,00**	**100**	**100,00**	**625.490.000**	**100**	**89,18**	**Dinas PUTR**
12.2.1	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	5	Dokumen	701.390.000	2	475.490.000	1	150.000.000	1	150.000.000	100	100	3	625.490.000	60,00	89,18	Dinas PUTR
12,3	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rekomendasi TKPRD yang diterbitkan (tahun berkenaan)**	**100**	**Persen**	**1.142.192.100**	**50,00**	**105.230.000**	**100**	**182.328.500**	**100**	**54.228.500**	**100,00**	**29,74**	**75,00**	**159.458.500**	**75,00**	**13,96**	**Dinas PUTR**
12.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	14	Dokumen	1.142.192.100	5	105.230.000	12	182.328.500	12	54.228.500	100	29,74	17	159.458.500	121,43	13,96	Dinas PUTR
											Rata - rata Capaian Kinerja (%)	**87,67**	**60,10**					
											Predikat Kinerja	**ST**	**R**					
JUMLAH TOTAL					**745.874.624.395**		**243.839.674.923**		**147.412.865.638**		**89.719.115.726**		**60,86**		**333.558.790.649**			

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,65	74,06	104,83
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Penunjang																	
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**95**	**Persen**	**21.265.753.088**	**87,64**	**6.299.924.404**	**90,00**	**3.380.030.056**	**70,62**	**1.861.826.225**	**78,47**	**55,08**	**79,13**	**8.161.750.629**	**83,30**	**38,38**	
1.1	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**90**	**Persen**	**353.040.000**	**71,18**	**59.644.500**	**90,10**	**28.443.900**	**100,00**	**23.441.600**	**110,99**	**82,41**	**85,59**	**83.086.100**	**95,10**	**23,53**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	Dokumen	169.000.000	5	18.889.500	3	3.444.000	3	3.443.200	100,00	99,98	8	22.332.700	44,44	13,21	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporanhasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	60.300.000	10	40.755.000	1	4.999.900	1	4.999.000	100,00	99,98	11	45.754.000	183,33	75,88	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	6	Dokumen	22.000.000			1	5.000.000	1	4.999.800	100,00	100,00	1	4.999.800	16,67	22,73	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	21.000.000			1	5.000.000	1	4.999.800	100,00	100,00	1	4.999.800	16,67	23,81	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	21.000.000			1	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	59.740.000			1	5.000.000	1	4.999.800	100,00	100,00	1	4.999.800	16,67	8,37	
1.2	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**15.883.056.428**	**79,96**	**4.884.885.091**	**100**	**2.527.617.346**	**56,89**	**1.549.815.399**	**56,89**	**61,32**	**68,43**	**6.434.700.490**	**68,43**	**40,51**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168	Orang/Bulan	15.817.594.428	89	4.869.705.091	28	2.516.636.746	28	1.538.836.399	100,00	61,15	117	6.408.541.490	69,81	40,52	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	45.462.000	7	15.180.000	1	5.981.000	1	5.980.000	100,00	99,98	8	21.160.000	133,33	46,54	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20	Laporan	20.000.000			4	4.999.600	4	4.999.000	100,00	99,99	4	4.999.000	20,00	25,00	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**314.330.765**	**16,50**	**14.500.000**		-		-			**8,25**	**14.500.000**	**8,25**	**4,61**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	Pkt	71.200.000	1	14.500.000							1	14.500.000	50,00	20,37	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	243.130.765									0	-	0,00	0,00	
1.3	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**652.950.000**	**89,29**	**259.548.600**	**100**	**66.985.600**	**87,50**	**31.828.600**	**87,50**	**47,52**	**88,39**	**291.377.200**	**88,39**	**44,62**	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	9.550.000	7	3.365.000	1	1.238.900	1	1.238.000	100,00	99,93	8	4.603.000	133,33	48,20	
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	134.500.000	1	94.202.000	1	6.909.100	1	798.000	100,00	11,55	2	95.000.000	33,33	70,63	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.3.3	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	14.500.000	7	17.898.600	1	1.499.600	1	1.499.600	100,00	100,00	8	19.398.200	133,33	133,78	
1.3.4	Penyediaan bahan bacaan & perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	42	Dokumen	64.900.000	12	20.400.000	6	10.000.000	6	10.000.000	100,00	100,00	18	30.400.000	42,86	46,84	
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Laporan	79.500.000	22	18.000.000	12	4.998.400	12	4.990.000	100,00	99,83	34	22.990.000	47,22	28,92	
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan	350.000.000	6	105.683.000	20	42.339.600	5	13.303.000	25,00	31,42	11	118.986.000	9,17	34,00	
1.4	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH :**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan**	**100**	**Persen**	**2.745.371.895**	**100**	**557.458.113**	**100**	**397.514.900**	**35,57**	**141.406.126**	**35,57**	**35,57**	**67,79**	**698.864.239**	**67,79**	**25,46**	
1.4.1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Laporan	26.180.000	24	262.607.000	12	4.331.900	12	4.329.800	100,00	99,95	36	266.936.800	150,00	1019,62	
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216	Laporan	441.991.895	24	79.880.613	12	86.613.600	12	28.746.326	100,00	33,19	36	108.626.939	16,67	24,58	
1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	Laporan	30.000.000			12	4.790.000	12	3.570.000	100,00	74,53	12	3.570.000	16,67	11,90	
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	102	Laporan	2.247.200.000	28	214.970.500	12	301.779.400	12	104.760.000	100,00	34,71	40	319.730.500	39,22	14,23	
1.5	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan pertanahan**	**100**	**Persen**	**1.317.004.000**	**96,00**	**523.888.100**	**100**	**359.468.310**	**75,00**	**115.334.500**	**75,00**	**32,08**	**85,50**	**639.222.600**	**85,50**	**48,54**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42	Unit	462.600.000	13	69.350.000	7	84.000.000	0	0	0,00	0,00	13	69.350.000	30,95	14,99	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6	Unit	266.000.000	2	101.398.100	1	173.618.000	1	111.884.500	100,00	64,44	3	213.282.600	50,00	80,18	
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	Unit	123.300.000			6	9.550.000	6	3.450.000	100,00	36,13	6	3.450.000	16,67	2,80	
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	465.104.000	3	353.140.000	1	92.300.310	1	0	100,00	0,00	4	353.140.000	40,00	75,93	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni**	**13,94**	**Persen**	**42.395.743.256**	**2,00**	**7.194.056.000**	**17,71**	**5.026.077.000**	**16,00**	**3.976.216.950**	**90,34**	**79,11**	**18,00**	**11.170.272.950**	**129,12**	**26,35**	
2.1	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten**	**Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten /Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani**	**100**	**Persen**	**836.620.988**	**4**	**533.406.000**	**100**	**1.099.426.100**	**92,6258**	**1.018.352.100**	**92,63**	**92,63**	**48,31**	**1.551.758.100**	**48,31**	**185,48**	
2.1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah dilokasi Rawan Beencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	5	Dokumen	294.020.988			1	117.900.000	1	102.000.000	100,00	86,51	1	102.000.000	20,00	34,69	
2.1.2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4	Dokumen	301.600.000	5	533.406.000	1	811.352.100	1	751.352.100	100,00	92,60	6	1.284.758.100	150,00	425,98	
2.1.3	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data calon penerima Rumah bagi Korban Bencana Kaputen /Kota atau yang terkena relokasi progaraam Kabupaten /kota yang terverifikasi	5	Dokumen	241.000.000			1	170.174.000	0	165.000.000	0,00	96,96	0	165.000.000	0,00	68,46	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	**Persentase Calon Penerima Bantuan Rumah Akibat Bencana yang Tersosialisasi**	**100**	**Persen**	**340.604.000**		-		-		-			**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang /sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar Teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban benca Kabupaten /Kota	100	OK	176.354.000									0	-	0,00	0,00	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Koordinasi untuk menyepakati penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah dokumen data penerima bantuan berdasarkan jenis layanan	5	Dok	164.250.000									0	-	0,00	0,00	
2.2	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten**	**Persentasi rumah layak huni bagi korban bencana terkena relokasi program dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)**	**100**	**Persen**	**41.051.318.268**	**51,00**	**6.660.650.000**	**100**	**3.262.487.000**	**74**	**2.854.864.850**	**74,00**	**87,51**	**62,50**	**9.515.514.850**	**62,50**	**23,18**	
2.2.1	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	13,5	Hektar	6.423.978.366	2	405.000.000	1	244.372.000	0	116.549.850			2	521.549.850	14,81	8,12	
2.2.2	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	507	Unit	2.116.217.000									0	-	0,00	0,00	
2.2.3	Penyusunan Site Plan dan / atau Detai Enginnering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atauDetail Enginnnering Design (DED) bagi rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5	Site Plan	213.350.000									0	-	0,00	0,00	
2.2.4	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	luas Lahan yang tersedia untuk pembangunan a rumah bagi korban bencana	13,5	Ha	6.423.978.366									0	-	0,00	0,00	
2.2.5	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun	11	Unit	1.422.400.000									0	-	0,00	0,00	
2.2.6	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus bagi korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terbangun	1137	Unit	24.451.394.536	11	6.255.650.000	11	3.018.115.000	11	2.738.315.000	100,00	90,73	11	8.993.965.000	0,97	36,78	
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Persentase Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupatean /Kota atau yang terkena Relokasi program Kabupaten /Kota yang terbangun**	**100**	**Persen**	**167.200.000**		**0**	**90**	**664.163.900**	**0**	**103.000.000**	**0,00**	**15,51**	**0,00**	**103.000.000**	**0,00**	**61,60**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Milik/Penghuni Rumah susun	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengeloaan kaelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	6	Lap	167.200.000			1	74.999.900	0				0	-	0,00	0,00	
2.2.7	Pembangunan Rumah Khusus							50	589.164.000	0	103.000.000	0,00	17,48	0	103.000.000			
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Rasio Luas Kawasan Kumuh Perkotaan sesuai SK yang telah ditangani (persen)**	**11,31**	**Persen**	**13.581.870.647**	**24,65**	**1.950.877.000**	**6,28**	**2.692.288.200**	**6,28**	**1.289.474.500**	**100,00**	**47,90**	**30,93**	**3.240.351.500**	**273,47**	**23,86**	
3.1	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase luas Kawasan Permukiman Kumuh yang direncanakan untuk penataan dan peningkatan**	**100**	**Persen**	**4.531.515.030**	**50,00**	**1.950.877.000**	**100**	**1.792.288.200**	**72**	**1.289.474.500**	**72,00**	**71,95**	**61,00**	**3.240.351.500**	**61,00**	**71,51**	
3.1.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	12	Dokumen	1.665.435.000	2	154.638.000							2	154.638.000	16,67	9,29	
3.1.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	12	Dokumen	2.866.080.030	4	1.796.239.000	2	1.792.288.200	2	1.289.474.500	100,00	71,95	6	3.085.713.500	50,00	107,66	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	**Persentase Rumah Layak Huni yang terbangun dikawasan Pemukiman Kumuh.**	**100**	**Persen**	**9.050.355.617**			**100**	**900.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	723	Unit	9.050.355.617			10	900.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Persentase Penyelesaian sengketa tanah Garapan melalui Proses Mediasi**	**100**	**Persen**	**1.000.000.000**		**0**	**100**	**2.106.004.000**	**100**	**1.045.365.140**	**100,00**	**49,64**	**50,00**	**1.045.365.140**	**50,00**	**104,54**	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/kota	**Persentase Pelaksanaan Mediasi terhadap Sengketa Tanah Milik Pemda**	**100**	**Persen**	**1.000.000.000**		**0**	**100**	**2.106.004.000**	**100**	**1.045.365.140**	**100,00**	**49,64**	**50,00**	**1.045.365.140**	**50,00**	**104,54**	
	Inventarisasi sengketa/konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Data sengketa, konfik dan perkara dallam (satu) Daerah Kabupaten/kota	4	Dok	390.000.000			1	1.788.104.000	1	727.465.140	100,00	40,68	1	727.465.140	25,00	186,53	
	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam satu daerah kabupaten/kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam (satu) Daerah	8	Berita Acar	610.000.000			1	317.900.000	1	317.900.000	100,00	100,00	1	317.900.000	12,50	52,11	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM**	**Persentase Keterlaksanaan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**	**100**	**Persen**	**1.311.400.000**	**100**	**55.907.000**							**50,00**	**55.907.000**	**50,00**	**4,26**	
4.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Penyelenggaraan PSU perumahan**	**100**	**Persen**	**1.311.400.000**	**100**	**55.907.000**							**50,00**	**55.907.000**	**50,00**	**4,26**	
4.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan	6	Dok	205.000.000									0	-	0,00	0,00	
4.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi Hunian	6	Dok	675.000.000									0	-	0,00	0,00	
4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil koordinasi dan singkonisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Ulitas Umum Perumahan	6	Laporan	286.400.000	3	55.907.000							3	55.907.000	50,00	19,52	
4.1.4	Penyediaan Tenaga Listrik untuk masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari penyediaan jaringan tenaga listrik	29	Unit	145.000.000									0	-	0,00	0,00	
5	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Keterlaksanaan Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum**	**100**	**Persen**	**10.912.149.783**	**20,1626**	**1.851.951.452**	**100**	**1.102.167.000**	**1,49**	**16.466.500**	**1,49**	**1,49**	**10,83**	**1.868.417.952**	**10,83**	**17,12**	
5.1	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah dalam daerah**	**100**	**Persen**	**10.912.149.783**	**20,16**	**1.851.951.452**	**100**	**1.102.167.000**	**1,49**	**16.466.500**	**1,49**	**1,49**	**10,83**	**1.868.417.952**	**10,83**	**17,12**	
5.1.1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	6	Dokumen	6.398.145.204	2	1.271.721.752	1	66.109.000	0	-	0,00	0,00	2	1.271.721.752	33,33	19,88	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	390 Dokumen	4.514.004.579	1	580.229.700	120	1.036.058.000	120	16.466.500	100,00	1,59	121	596.696.200	31,03	13,22	
											Rata - rata Capaian Kinerja (%)		74,54	57,96			43,59	54,13	
											Predikat Kinerja		T	R					
Jumlah				90.466.916.774		17.352.715.856		14.306.566.256		8.189.349.315		57,24		25.542.065.171		28,23	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**16.560.674.546**	**39,35**	**3.865.937.157**	**100,00**	**3.775.448.969**		**2.879.380.124**	**0,00**	**76,27**	**19,68**	**6.745.317.281**	**19,68**	**40,73**	
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**79.499.500**	**40,00**	**10.999.000**	**100,00**	**2.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**10.999.000**	**20,00**	**13,84**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra			2	3.250.000	3	1.000.000			0,00	0,00	2	3.250.000			
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD												-			
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD												-			
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA SKPD											0	-			
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD											0	-			
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKj			1	7.749.000	1	1.000.000			0,00	0,00	1	7.749.000			
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja											0	-			
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**10.867.031.222**	**35,38**	**2.941.922.996**	**100,00**	**3.167.992.682**		**2.514.577.824**	**0,00**	**79,37**	**17,69**	**5.456.500.820**	**17,69**	**50,21**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN			35	2.939.572.996	35	3.166.492.682		2.514.516.824	0,00	79,41	35	5.454.089.820			
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Laporan pelaksanaan tugas ASN											0	-			

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											0	-			
1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											0	-			
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan	Tersedianya Laporan			1	2.350.000	1	500.000			0,00	0,00	1	2.350.000			
1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan											0	-			
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1	500.000		61.000	0,00	12,20	0	61.000			
1.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1	500.000			0,00	0,00	0	-			
1,3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah**	**100,00 %**	**37.250.000**	**50,00**	**5.250.000**	**100,00**	**1.000.000**		**181.000**	**0,00**	**18,10**	**25,00**	**5.431.000**	**25,00**	**14,58**	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen kebutuhan barang milik daerah			1	5.250.000							1	5.250.000			
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											0	-			
1.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					1	500.000		84.000	0,00	16,80	0	84.000			
1.3.4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang milik daerah											0	-			
1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1	500.000		97.000	0,00	19,40	0	97.000			

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											0	-			
1.3.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD											0	-			
1,4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.560.813.678**	**16,67**	**20.346.252**		**-**		**-**			**8,33**	**20.346.252**	**8,33**	**1,30**	
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											0	-			
1.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											0	-			
1.4.3	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Tersedianya data administrasi kepegawaian yang memadai											0	-			
1.4.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											0	-			
1.4.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											0	-			
1.4.6	Sosialisasi peraturan perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-Undangan											0	-			
1.4.7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis			1	20.346.252							1	20.346.252			
1,5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.533.823.000**	**44,64**	**261.131.962**	**100,00**	**73.859.800**		**62.561.500**	**0,00**	**84,70**	**22,32**	**323.693.462**	**22,32**	**21,10**	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor			1	1.053.000	1	4.995.000		1.405.000	0,00	28,13	1	2.458.000			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1	1.994.600			0,00	0,00	0	-			
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga Kantor			1	4.997.000	1	4.927.800		4.900.000	0,00	99,44	1	9.897.000			
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK Kantor yang memadai			1	10.575.000	1	2.990.000		2.990.000	0,00	100,00	1	13.565.000			
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			1	2.695.000	4	6.000.000		5.999.500	0,00	99,99	1	8.694.500			

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12	10.250.000	12	5.000.000		1.250.000	0,00	25,00	12	11.500.000			
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Pelayanan Fasilitasi Kunjungan Tamu			5	16.160.000	5	5.846.400		5.820.000	0,00	99,55	5	21.980.000			
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Perjalanan koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah dan dalam Daerah			5	215.401.962	5	42.106.000		40.197.000	0,00	95,47	5	255.598.962			
1,6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**349.941.000**	**50**	**124.272.000**	**100**	**53.566.100**		**-**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**124.272.000**	**25,00**	**35,51**	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional											0	-			
1.6.2	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya kendaraan Pemadam Kebakaran											0	-			
1.6.3	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja, kursi dan lemari arsip dan mebeler lainnya					1	19.515.500			0,00	0,00	0	-			
1.6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya kebutuhan peralatan dan mesin			1	124.272.000	1	24.128.500			0,00	0,00	1	124.272.000			
1.6.5	Pengadaan Aset tetap lainnya	Tersedianya aset tetap lainnya											0	-			
1.6.6	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya yang memadai					1	4.961.000			0,00	0,00	0	-			
1.6.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0	-			
1.6.8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1	4.961.100			0,00	0,00	0	-			
1,7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**295.157.146**	**50,00**	**46.964.217**	**100,00**	**87.075.900**		**47.640.744**	**0,00**	**54,71**	**25,00**	**94.604.961**	**25,00**	**32,05**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK, Perangko, Materai dan benda pos lainnya			1	6.083.000	1	5.842.300		3.934.000	0,00	67,34	1	10.017.000			
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1	40.881.217	1	79.233.600		41.706.744	0,00	52,64	1	82.587.961			
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor					1	1.000.000		1.000.000	0,00	100,00	0	1.000.000			

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor					1	1.000.000		1.000.000	0,00	100,00	0	1.000.000			
1,8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.837.159.000**	**16,67**	**455.050.730**	**100,00**	**389.954.487**		**254.419.056**	**0,00**	**65,24**	**8,33**	**709.469.786**	**8,33**	**38,62**	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan			10,00	455.050.730	10	51.548.000		18.118.144	0,00	35,15	10	473.168.874			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga						1	199.996.500		99.569.151	0,00	49,79	0	99.569.151			
1.8.2	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Terlaksananya Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan Mobil Damkar					1	74.220.000		73.717.261	0,00	99,32	0	73.717.261			
1.8.3	Pemeliharaan mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebeler kantor					1	2.960.000		2.960.000	0,00	100,00	0	2.960.000			
1.8.4	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya peralatan mesin lainnya					1	4.960.000		4.960.000	0,00	100,00	0	4.960.000			
1.8.5	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Terlaksananya pemeliharaan aset tetap lainnya					1	2.000.000		2.000.000	0,00	100,00	0	2.000.000			
1.8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-	1	49.999.987		49.894.500	0,00	99,79	0	49.894.500			
1.8.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	1	4.270.000		3.200.000	0,00	74,94	0	3.200.000			
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penegakan PERDA (atas kasus pelanggaran Perda)**	**90,00 %**	**31.940.745.672**	**14,83**	**4.991.843.642**	**10,00**	**5.402.544.610**		**4.613.110.198**	**0,00**	**85,39**	**7,42**	**9.604.953.840**	**8,24**	**30,07**	
		Rasio Personil Linmas per satuan penduduk (per 10ribu penduduk)	**59,70 %**	**1.071.169.491**									**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Rasio Personil Satpol-PP per satuan penduduk (per 10ribu penduduk)	**17,31 %**	**24.536.445.244**									**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
2,1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan**	**95,00 %**	**25.607.614.735**	**99**	**4.402.811.818**	**100**	**4.385.970.570**		**3.935.665.911**	**0,00**	**89,73**	**49,38**	**8.338.477.729**	**51,97**	**32,56**	
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Kegiatan pencegahan gangguan trantibum			8	2.658.222.998	60	2.281.115.270		2.093.038.680	0,00	91,76	8	4.751.261.678			
2.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penindakan yang dilakukan terhadap gangguan trantibum			45	959.562.344	45	1.117.877.480		994.292.374	0,00	88,94	45	1.953.854.718			
2.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan trantibum dan linmas			12	2.880.000	12	21.144.500			0,00	0,00	12	2.880.000			
2.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pelatihan dan sosialisasi terhadap tenaga Linmas di desa untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum			2	30.000.000	12	25.187.200			0,00	0,00	2	30.000.000			
2.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Anggota SATPOL PP dan Linmas yang mengikuti pelatihan					50	217.915.000		193.909.697	0,00	88,98	0	193.909.697			
2.1.6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dalam upaya penanganan terhadap gangguan trantibum			10	752.146.476	6	691.732.420		654.425.160	0,00	94,61	10	1.406.571.636			

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.1.7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya SOP tentang trantibum yang memadai					20	19.031.100			0,00	0,00	0	-			
2.1.8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyaraka						12	5.989.200			0,00	0,00	0	-			
2.1.9	Penyedia layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Tersedianya layanan pengaduan baik manual maupun secara online					12	5.978.400			0,00	0,00	0	-			
2,2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentasi penyelesaian penegakan Perda dan perkada**	**90 %**	**5.196.630.937**	**47,22**	**589.031.824**	**85,00**	**830.034.040**		**574.814.287**	**0,00**	**69,25**	**23,61**	**1.163.846.111**	**26,23**	**22,40**	
2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					2	15.300.000			0,00	0,00	0	-			
2.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12	277.022.912	12	444.814.700		314.049.367	0,00	70,60	12	591.072.279			
2.2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah peraturan daerah, peraturan kepala daerah yang ditegakan			5	312.008.912	12	369.919.340		260.764.920	0,00	70,49	5	572.773.832			
2,3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah PPNS yang mengikuti diklat**	**100 %**	**1.136.500.000**			**100,00**	**186.540.000**		**102.630.000**	**0,00**	**55,02**	**0,00**	**102.630.000**	**0,00**	**9,03**	
2.2.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengukuti Bimtek/Diklat pengembangan kapasitas					12	186.540.000		102.630.000	0,00	55,02	0	102.630.000			
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON**	**Tingkat Waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**	**15,00 Menit**	**4.486.401.337**	**5**	**21.448.500**	**5**	**1.088.291.740**		**819.192.236**	**0,00**	**75,27**	**2,50**	**840.640.736**	**16,67**	**18,74**	
3,1	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kejadian kebakaran yang tertangani**	**100,00 %**	**4.163.331.962**	**50**	**-**	**100**	**1.051.508.140**		**804.292.236**	**0,00**	**76,49**	**25,00**	**804.292.236**	**25,00**	**19,32**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						12	19.970.400			0,00	0,00	0	-			
3.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pemadaman dan pengendalian terhadap kejadian kebakaran					12	975.848.040		779.642.236	0,00	79,89	0	779.642.236			
3.1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						12	20.003.600		12.330.000	0,00	61,64	0	12.330.000			
3.1.4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						1	1.971.600			0,00	0,00	0	-			
3.1.5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						1	1.971.600			0,00	0,00	0	-			
3.1.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung						1	9.984.500			0,00	0,00	0	-			
3.1.7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						20	6.868.800		6.860.000	0,00	99,87	0	6.860.000			
3.1.8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)						1	4.920.000			0,00	0,00	0	-			
3.1.9	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga						50	9.969.600		5.460.000	0,00	54,77	0	5.460.000			
3,2	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran yang dilakukan**	**100,00 %**	**29.382.750**		**-**	**100**	**5.870.000**		**4.916.000**	**0,00**	**83,75**	**0,00**	**4.916.000**	**0,00**	**16,73**	
3.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						1	4.916.000		4.916.000	0,00	100,00	0	4.916.000			
3.2.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						1	954.000			0,00	0,00	0	-			
3,3	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Persentase kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran**	**95,00 %**	**25.250.000**	**50**	**1.730.000**	**100**	**2.999.000**		**-**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**1.730.000**	**26,32**	**6,85**	
3.3.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran			6	1.730.000	5	2.999.000			0,00	0,00	6	1.730.000			

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3,4	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**100,00 %**	**255.506.250**	**50**	**19.718.500**	**100**	**14.938.400**		**9.984.000**	**0,00**	**66,83**	**25,00**	**29.702.500**	**25,00**	**11,62**	
3.4.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi			1	19.718.500	50	9.984.400		9.984.000	0,00	100,00	1	29.702.500			
3.4.2	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana						5	4.954.000			0,00	0,00	0	-			
3,5	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang dilakukan**	**100,00 %**	**12.930.375**			**100**	**12.976.200**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
3.1.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia						5	2.989.200			0,00	0,00	0	-			
3.1.1	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						1	9.987.000			0,00	0,00	0	-			
								Rata - rata Capaian Kinerja (%)			**0,00**	**46,72**					
								Predikat Kinerja			**SR**	**SR**					
Jumlah Total				**78.595.436.290**		**8.879.229.299**		**10.266.285.319**		**8.311.682.558**		**80,96**		**17.190.911.857**		**21,87**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas	Indeks Ketahanan Sosial	68,10	68,66	100,82
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	Bidang Urusan Sosial																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah**	**90,00 %**	**15.232.979.459**	**66,65**	**4.226.937.151**	**90,00**	**2.342.769.273**	**51,58**	**1.674.442.389**	**57,31**	**71,47**	**59,11**	**5.901.379.540**	**65,68**	**38,74**	
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	**100,00 %**	**281.354.509**	**97,44**	**20.685.734**	**100,00**	**21.499.300**	**77,55**	**5.637.500**	**77,55**	**26,22**	**87,49**	**26.323.234**	**87,49**	**9,36**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	140.610.954	2	15.467.734	3	20.000.100	3	4.180.000	100,00	20,90	5	19.647.734	500,00	13,97	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	29.151.958	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	29.151.958	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	29.151.958	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen	1 Dok	29.151.958	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kenerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	16.105.611	1	5.218.000	4	1.499.200	4	1.457.500	100,00	97,22	5	6.675.500	250,00	41,45	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(9/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	8.030.112	0	-							0	-	0,00	0,00	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**11.410.562.598**	**51,57**	**3.800.523.991**	**100,00**	**1.899.633.173**	**40,37**	**1.472.509.678**	**40,37**	**77,52**	**45,97**	**5.273.033.669**	**45,97**	**46,21**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2340 Org	11.386.079.110	437	3.800.523.991	468	1.897.139.373	216	1.470.189.678	46,15	77,50	653	5.270.713.669	27,91	46,29	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6 Lap	24.483.488	1	-	1	2.493.800	1	2.320.000	100,00	93,03	2	2.320.000	33,33	9,48	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Sosial**	**100,00 %**	**295.000.000**	**0,00**	-		-		-			**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang - undangan	13 Org	295.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**95,00 %**	**1.536.111.183**	**73,61**	**106.704.526**	**100,00**	**120.781.600**	**83,33**	**60.622.445**	**83,33**	**50,19**	**78,47**	**167.326.971**	**82,60**	**10,89**	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik disediakan	6 Pkt	15.268.000	0	-	1	1.993.200	1	1.800.000	100,00	90,31	1	1.800.000	16,67	11,79	
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27 Pkt	610.896.000	0	-	1	20.985.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 Pkt	79.681.000	1	19.910.450	1	12.005.600	1	12.005.315	100,00	100,00	2	31.915.765	33,33	40,05	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	36 Dok	110.460.665	1	6.100.000	1	18.801.000	1	9.720.000	100,00	51,70	2	15.820.000	5,56	14,32	
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	5 Lap	115.523.518	1	20.452.000	1	17.956.800	1	17.187.130	100,00	95,71	2	37.639.130	40,00	32,58	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Lap	604.282.000	1	60.242.076	1	49.040.000	1	19.910.000	100,00	40,60	2	80.152.076	33,33	13,26	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(9/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1,5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**795.749.165**	**83,33**	**113.320.900**	**100,00**	**148.984.400**	**100,00**	**67.192.766**	**100,00**	**45,10**	**91,67**	**180.513.666**	**91,67**	**22,68**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	604.951.161	1	84.495.900	1	99.429.800	1	54.358.766	100,00	54,67	2	138.854.666	33,33	22,95	
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap	35.000.000	0	2.600.000	1	30.360.000	1	5.350.000	100,00	17,62	1	7.950.000	16,67	22,71	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Lap	155.798.004	1	26.225.000	1	19.194.600	1	7.484.000	100,00	38,99	2	33.709.000	33,33	21,64	
1,6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**914.202.004**	**66,67**	**185.702.000**	**100,00**	**151.870.800**	**100,00**	**68.480.000**	**100,00**	**45,09**	**83,33**	**254.182.000**	**83,33**	**27,80**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang disediakan di bayar pajaknya	16 Unit	914.202.004	1	185.702.000	1	151.870.800	1	68.480.000	100,00	45,09	2	254.182.000	12,50	27,80	
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Jumlah jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang telah di kembangkan atau diberdayakan (kumulatif)**	**9 PKS**	**9.757.200.000**	**4**	**2.451.218.000**	**6**	**229.297.400**	**0,00**	**143.700.000**	**0,00**	**62,67**	**1,75**	**2.594.918.000**	**19,44**	**26,59**	
2,1	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**100,00 %**	**9.757.200.000**	**100,00**	**2.451.218.000**	**80,00**	**229.297.400**	**50,00**	**143.700.000**	**62,50**	**62,67**	**75,00**	**2.594.918.000**	**75,00**	**26,59**	
2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Org	1.019.541.104	35	237.170.000	420	141.133.500	315	102.600.000	75,00	72,70	350	339.770.000	166,67	33,33	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(9/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/kota	102 Org	632.749.396	17	121.230.000	408	88.163.900	102	41.100.000	25,00	46,62	119	162.330.000	116,67	25,65	
2.1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	5340 Kel	8.104.909.500	1000	2.092.818.000							1000	2.092.818.000	18,73	25,82	
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentasi penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100,00 %**	**4.338.520.000**	**100,00**	**803.247.000**	**100,00**	**469.836.700**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**803.247.000**	**50,00**	**18,51**	
3,1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti**	**100,00 %**	**4.338.520.000**	**97,75**	**803.247.000**	**100,00**	**469.836.700**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**48,88**	**803.247.000**	**48,88**	**18,51**	
3.1.1	Penyediaan Permakanan	Jumkah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar Gizi minimal kewenangan Kabupaten/kota	4200 Org	2.243.111.680	700	515.000.000	700	200.000.300			0,00	0,00	700	515.000.000	16,67	22,96	
3.1.2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Org	2.095.408.320	455	288.247.000	85	269.836.400			0,00	0,00	455	288.247.000	15,17	13,76	
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase penurunan jumlah PMKS (terhadap tahun sebelumnya)**	**-10,00 %**	**5.752.885.027**	**-6**	**519.127.000**	**-10,00**	**526.214.000**		**3.208.000**	**0,00**	**0,61**	**-3,22**	**522.335.000**	**32,21**	**9,08**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(9/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4,1	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase jumlah PMKS yang memiliki kemandirian ekonomi**	**95,00 %**	**5.752.885.027**	**72**	**519.127.000**	**100,00**	**526.214.000**		**3.208.000**	**0,00**	**0,61**	**36,11**	**522.335.000**	**38,01**	**9,08**	
4.1.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/kota	1250 Org	1.141.648.027	204	69.380.000	88574	526.214.000		3.208.000	0,00	0,61	204	72.588.000	16,32	6,36	
4.1.2	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Org	2.731.237.000	638	449.747.000							638	449.747.000	12,76	16,47	
		Jumlah Penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	275 Org	1.880.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten**	**100,00 %**	**12.515.560.000**	**100,00**	**10.091.660.000**	**100,00**	**499.952.100**		**100.060.000**	**0,00**	**20,01**	**50,00**	**10.191.720.000**	**50,00**	**81,43**	
5,1	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota**	**100,00 %**	**12.515.560.000**	**75**	**10.091.660.000**	**100**	**350.060.000**	**50,00**	**100.060.000**	**50,00**	**28,58**	**62,50**	**10.191.720.000**	**62,50**	**81,43**	
5.1.1	Penyedian Makanaan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/kota	2000 Org	1.000.000.000	0	-	800	250.000.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
5.1.2	Penyedian Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Org	400.000.000	0	-	200	100.060.000	200	100.060.000	100,00	100,00	200	100.060.000	10,00	25,02	
5.1.3	Pelayanaan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 %	335.220.000	0	-							0	-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(9/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5,2	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Fasilitas yang diterima oleh masyarakat yang berperan dalam lembagakesejahteraan sosial**	**95,00 %**	**5.390.170.000**	**72**	**5.045.830.000**	**95,00**	**149.892.100**		**-**	**0,00**	**0,00**	**36,11**	**5.045.830.000**	**38,01**	**93,61**	
5.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	18 Kamp	5.206.520.000	3	5.015.300.000	4	119.469.700			0,00	0,00	3	5.015.300.000	16,67	96,33	
5.2.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	240 Org	183.650.000	40	30.530.000	45	30.422.400			0,00	0,00	40	30.530.000	16,67	16,62	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)											**57,31**	**40,37**			**47,21**	**22,88**	
Predikat Kinerja											**R**	**SR**					
Jumlah Total				**47.597.144.486**		**18.092.189.151**		**4.068.069.473**		**1.921.410.389**		**47,23**		**20.013.599.540**		**42,05**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah,	Indeks Ketahanan Lingkungan	70,86	70,71	99,79
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	Bidang Urusan Sosial																
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**	**90,00 %**	**22.666.538.432**	**93,18**	**6.236.176.644**	**90,00**	**3.546.922.804**	**89,70**	**2.321.630.370**	**99,67**	**65,45**	**91,44**	**8.557.807.014**	**101,60**	**37,76**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**552.776.796**	**93,06**	**82.170.212**	**100,00**	**36.320.900**	**78,26**	**17.030.500**	**78,26**	**46,889**	**85,66**	**99.200.712**	**85,66**	**17,95**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dok	451.599.300	6	63.263.800	3	17.442.900	1	5.501.500	33,33	31,5401	7	68.765.300	233,33	15,23	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	6.000.000	0	-	1	1.499.600	1	1.494.000	100,00	99,6266	1	1.494.000	16,67	24,90	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	6.000.000	0	-	1	1.499.600	1	1.494.500	100,00	99,6599	1	1.494.500	16,67	24,91	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-	6 Dok	6.000.000	0	-	1	1.499.600	1	1.494.000	100,00	99,6266	1	1.494.000	16,67	24,90	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dok	6.000.000	0	-	1	1.499.600	1	1.494.500	100,00	99,6599	1	1.494.500	16,67	24,91	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Lap	77.177.496	8	18.906.412	4	12.879.600	4	5.552.000	100,00	43,1069	12	24.458.412	50,00	31,69	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**16.248.762.023**	**61,89**	**5.167.185.732**	**100,00**	**2.855.160.104**	**72,34**	**1.930.524.585**	**72,34**	**67,62**	**67,11**	**7.097.710.317**	**67,11**	**43,68**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Org	16.197.269.526	49	5.163.694.532	378	2.845.560.104	350	1.925.837.585	92,59	67,68	399	7.089.532.117	306,92	43,77	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Lap	51.492.497	2	3.491.200	1	9.600.000	1	4.687.000	100,00	48,8229	3	8.178.200	50,00	15,88	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.585.629.849**	**100,00**	**143.043.100**	**100,00**	**71.035.800**		-	**0,00**	**0**	**50,00**	**143.043.100**	**50,00**	**9,02**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Pcs	150.000.000	0	-		-					0	-	0,00	0,00	
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Org	638.629.849	100	131.143.100	50	71.035.800			0,00	0	100	131.143.100	40,00	20,54	
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Org	797.000.000	2	11.900.000							2	11.900.000	10,00	1,49	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.928.789.742**	**83,17**	**329.564.400**	**100,00**	**268.371.600**	**83,33**	**145.272.220**	**83,33**	**54,13**	**83,25**	**474.836.620**	**83,25**	**24,62**	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	42 Jenis	14.969.742	8	4.935.000	1	2.498.200	1	2.485.000	100,00	99,47	9	7.420.000	21,43	49,57	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Unit	311.940.000	7	-	1	30.477.100			0,00	0	7	-	18,92	0,00	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	42 Jenis	179.980.000	13	36.710.000	1	29.999.900	1	29.888.500	100,00	99,63	14	66.598.500	33,33	37,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Expl	23.650.000	4	7.756.000	2	3.750.000	1	3.750.000	50,00	100	5	11.506.000	41,67	48,65	
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 Bln	72.000.000	13	16.800.000	1	11.956.800	1	10.845.000	100,00	90,70	14	27.645.000	19,44	38,40	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147 OK	1.326.250.000	13	263.363.400	1	189.689.600	1	98.303.720	100,00	51,82	14	361.667.120	9,52	27,27	
1,5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.097.685.450**	**100,00**	**273.730.900**	**100,00**	**158.039.400**	**100,00**	**113.194.514**	**100,00**	**71,62**	**100,00**	**386.925.414**	**100,00**	**35,25**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	130.378.490	2	69.322.103	1	7.503.200	1	7.151.500	100,00	95,31	3	76.473.603	50,00	58,66	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Lap	615.600.000	2	70.726.797	1	103.799.700	1	60.772.014	100,00	58,55	3	131.498.811	50,00	21,36	
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap	66.000.000	2	21.000.000	1	10.760.000	1	9.420.000	100,00	87,55	3	30.420.000	50,00	46,09	
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Lap	285.706.960	2	112.682.000	1	35.976.500	1	35.851.000	100,00	99,65	3	148.533.000	50,00	51,99	
1,6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.252.894.572**	**100,00**	**240.482.300**	**100,00**	**157.995.000**	**100,00**	**115.608.551**	**100,00**	**73,17**	**100,00**	**356.090.851**	**100,00**	**28,42**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	1.002.894.572	14	240.482.300	7	157.995.000	7	115.608.551	100,00	73,17	21	356.090.851	50,00	35,51	
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Gedung	250.000.000	0	-		-					0	-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase keterlaksanaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana**	**100,00 %**	**23.235.322.366**	**83,33**	**7.577.172.370**	**100,00**	**1.273.435.080**	**113,02**	**1.155.468.793**	**113,02**	**90,74**	**98,18**	**8.732.641.163**	**98,18**	**37,58**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
2,1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (%)**	**100,00 %**	**595.239.526**	**50,00**	**46.904.000**	**100,00**	**-**		**-**	**0,00**		**25,00**	**46.904.000**	**25,00**	**7,88**	
2.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana	1 Dok	150.000.000	0	-		-					0	-	0,00	0,00	
2.1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	250 Org	445.239.526	50	46.904.000							50	46.904.000	20,00	10,53	
2,2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)**	**100,00 %**	**14.324.435.114**	**100,00**	**5.717.610.312**	**100,00**	**80.120.000**	**100,00**	**50.000.000**	**100,00**	**62,4064**	**100,00**	**5.767.610.312**	**100,00**	**40,26**	
2.2.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB)	75 Org	350.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.2.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana	75 Org	420.254.310	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.2.3	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	4 Dok	480.242.200	0	-	1	80.120.000	1	50.000.000	100,00	62,41	1	50.000.000	25,00	10,41	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.2.4	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak Pascabencana (Paket)	10 Pkt	11.453.938.604	3	5.717.610.312							3	5.717.610.312	30,00	49,92	
		Jumlah Kegiatan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna)	6 Keg		1	-							1	-	16,67		
2.2.5	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	85 Org	400.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.2.6	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	6 Dok	400.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.2.7	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	130 Org	470.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.2.8	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	120 KK	350.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2,3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)**	**100,00 %**	**7.225.647.726**	**100,00**	**1.812.658.058**	**100,00**	**1.025.879.880**	**139,07**	**943.180.313**	**139,07**	**91,94**	**119,53**	**2.755.838.371**	**119,53**	**38,14**	
2.3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	300 Dok	4.104.120.530	100	903.624.092	50	625.885.680	28	555.904.113	56,00	88,82	128	1.459.528.205	42,67	35,56	
2.3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	6000 Org	523.517.026	0	-	1500	99.994.400	291	90.666.400	19,40	90,67	291	90.666.400	4,85	17,32	
2.3.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	9000 Org	2.598.010.170	3000	909.033.966	1500	299.999.800	291	296.609.800	19,40	98,87	3291	1.205.643.766	36,57	46,41	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2,4	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase kerjasama antar lembaga/ insansi yang di tetapkan MOU**	**100,00 %**	**1.090.000.000**	**0**	**-**	**100**	**167.435.200**	**100,00**	**162.288.480**	**100,00**	**96,93**	**50,00**	**162.288.480**	**50,00**	**14,89**	
2.4.1	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4 Dok	95.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.4.2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten /Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	4 Dok	525.000.000	0		1	167.435.200	1	162.288.480	100,00	96,93	1	162.288.480	25,00	30,91	
		Jumlah Paket Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak Pascabencana	1 Pkt	100.000.000	0		1	-			0,00		0	-	0,00	0,00	
		Jumlah Aparatur yang mengikuti Kegiatan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna)	200 Org	370.000.000	0		40	-			0,00		0	-	0,00	0,00	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)											**99,67**	**72,34**			**44,01**	**22,68**	
Predikat Kinerja											**ST**	**S**					
Jumlah Total				**45.901.860.798**		**13.813.349.014**		**4.820.357.884**		**3.477.099.163**		**72,13**		**17.290.448.177**		**37,67**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya transformasi struktural dan daya	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,86	6,53	48,14
2	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta	Tingkat Kemiskinan (persen)	3,8	4,62	78,42
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar																
	Bidang Urusan Tenaga Kerja																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah**	**90,00 %**	**16.878.167.131**	**77,05**	**3.865.160.588**	**90,00**	**2.654.025.823**	**66,64**	**1.577.367.361**	**74,05**	**59,43**	**71,85**	**5.442.527.949**	**79,83**	**32,25**	**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmingrasi**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	**100,00 %**	**97.938.599**	**97,46**	**33.555.200**	**100,00**	**15.500.000**	**95,24**	**14.200.000**	**95,24**	**91,61**	**96,35**	**47.755.200**	**96,35**	**48,76**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dok	27.649.599	2	10.509.000	3	4.000.000	1	2.700.000	33,33	67,50	3	13.209.000	15,79	47,77	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	11.120.800	1	2.775.000	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	2	4.775.000	40,00	42,94	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	11.320.800	1	3.200.000	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	2	5.200.000	40,00	45,93	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	11.520.800	1	3.400.000	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	2	5.400.000	40,00	46,87	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	12.044.000	1	3.600.000	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	2	5.600.000	40,00	46,50	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kenerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	24.282.600	1	10.071.200	1	3.500.000	1	3.500.000	100,00	100,00	2	13.571.200	40,00	55,89	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah**	**100,00 %**	**11.987.047.071**	**79,72**	**3.135.326.782**	**100,00**	**2.071.821.123**	**41,04**	**1.169.738.761**	**41,04**	**56,46**	**60,38**	**4.305.065.543**	**60,38**	**35,91**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Org	11.972.396.071	21	3.130.826.782	21	2.069.321.123	21	1.167.238.761	100,00	56,41	42	4.298.065.543	33,33	35,90	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Lap	14.651.000	5	4.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	100,00	100,00	10	7.000.000	40,00	47,78	
1,3	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Rasio efektifitas retribusi daerah bidang penempatan tenaga kerja**		**1.200.000.000**		-		-					**0,00**	-		**0,00**	
1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Bln	1.200.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1,4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100,00 %**	**402.875.099**	**100,00**	**32.907.400**	**100,00**	**32.678.100**	**66,67**	**31.407.600**	**66,67**	**96,11**	**83,33**	**64.315.000**	**83,33**	**15,96**	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Pkt	186.800.000			3	32.678.100	2	31.407.600	66,67	96,11	2	31.407.600	66,67	16,81	
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6 Org	216.075.099	2	32.907.400							2	32.907.400	33,33	15,23	
1,5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**100,00 %**	**1.152.795.393**	**93,06**	**146.865.100**	**100,00**	**168.852.500**	**87,50**	**127.534.400**	**87,50**	**75,53**	**90,28**	**274.399.500**	**90,28**	**23,80**	
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72 Bln	523.658.616	0	-	12	69.604.500	12	68.554.500	100,00	98,49	12	68.554.500	16,67	13,09	
1.5.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan & penggandaan yang disediakan	72 Bln	67.636.000	12	33.860.000	12	8.000.000	12	7.999.000	100,00	99,99	24	41.859.000	33,33	61,89	
1.5.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang Disediakan	72 Bln	60.034.000	7	12.372.000	12	6.969.000	6	1.200.000	50,00	17,22	13	13.572.000	18,06	22,61	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Lap	501.466.777	10	100.633.100	10	84.279.000	10	49.780.900	100,00	59,07	20	150.414.000	33,33	29,99	
1,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.128.579.844**	**100,00**	**291.025.988**	**100,00**	**207.510.600**	**100,00**	**129.763.600**	**100,00**	**62,53**	**100,00**	**420.789.588**	**100,00**	**37,28**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	516.029.480	1	124.957.770	1	109.229.300	1	47.144.800	100,00	43,16	2	172.102.570	33,33	33,35	
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap	182.107.988	1	47.108.600	1	23.000.000	1	22.998.800	100,00	99,99	2	70.107.400	33,33	38,50	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Lap	430.442.376	1	118.959.618	1	75.281.300	1	59.620.000	100,00	79,20	2	178.579.618	33,33	41,49	
1,6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**908.931.125**	**100,00**	**225.480.118**	**100,00**	**157.663.500**	**100,00**	**104.723.000**	**100,00**	**66,42**	**100,00**	**330.203.118**	**100,00**	**36,33**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	880.846.125	2	213.727.118	2	154.133.500	2	101.193.000	100,00	65,65	4	314.920.118	33,33	35,75	
1.6.1	Pemerliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	28.085.000	3	11.753.000	3	3.530.000	3	3.530.000	100,00	100,00	6	15.283.000	33,33	54,42	
2	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Presentase Keterlaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro**	**100 %**	**300.000.000**	**0**	**-**	**25**	**54.870.000**	**2,00**	**800.000**	**8,00**	**1,46**	**1,00**	**800.000**	**1,00**	**0,27**	
2,1	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Tingkat Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro**	**100,00 %**	**300.000.000**	**0,00**	**-**	**100,00**	**54.870.000**	**2,00**	**800.000**	**2,00**	**1,46**	**1,00**	**800.000**	**1,00**	**0,27**	
2.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	70 Dok	150.000.000									0	-	0,00	0,00	
2.1.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahan Yang Menyusun RTK Mikro	70 Prsh	150.000.000			50	54.870.000	1	800.000	2,00	1,46	1	800.000	1,43	0,53	
3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peningkatan peserta terfasilitasi pelatihan kerja**	**14,30 %**	**2.804.744.580**	**35,59**	**564.182.080**	**33,30**	**625.539.500**	**14,49**	**127.517.400**	**43,52**	**20,39**	**25,04**	**691.699.480**	**175,12**	**24,66**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3,1	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Tingkat Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**100,00 %**	**2.354.744.580**	**100,00**	**559.802.080**	**100,00**	**569.218.000**	**33,33**	**127.517.400**	**33,33**	**22,40**	**66,67**	**687.319.480**	**66,67**	**29,19**	
3.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	65 Org	757.470.000	10	101.850.000	10	127.517.400	10	127.517.400	100,00	100,00	20	229.367.400	30,77	30,28	
3.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Penigkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	18 Lbg	602.330.500	3	84.990.000	3	86.221.400			0,00	0,00	3	84.990.000	16,67	14,11	
3.1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	85 Unit	994.944.080	10	372.962.080	10	355.479.200			0,00	0,00	10	372.962.080	11,76	37,49	
3,2	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**Tingkat pengukuran Produktivitas tenaga kerja tingkat daerah**	**100,00 %**	**450.000.000**	**50**	**4.380.000**	**100**	**56.321.500**		**-**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**4.380.000**	**25,00**	**0,97**	
3.2.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kompetensi dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	60 Dok	450.000.000	10	4.380.000	1	56.321.500			0,00	0,00	10	4.380.000	16,67	0,97	
4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**51,74 %**	**747.551.882**	**41,60**	**32.452.700**	**44,66**	**87.241.000**	**20,55**	**16.300.000**	**46,01**	**18,68**	**31,07**	**48.752.700**	**60,05**	**6,52**	
4,1	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**275.000.000**	**25,00**	**12.452.700**	**100**	**26.756.000**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**12,50**	**12.452.700**	**12,50**	**4,53**	
4.1.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Daya Pelayanan antar Kerja yang Mendapat Pelatihan Melalui Bimtek dan Lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	12 Org	275.000.000	1	12.452.700	2	26.756.000			0,00	0,00	1	12.452.700	8,33	4,53	
4,2	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase Terwujudya Informasi Pasar Kerja**	**100 %**	**472.551.882**	**25,00**	**20.000.000**	**100**	**60.485.000**	**100,00**	**16.300.000**	**100,00**	**26,95**	**62,50**	**36.300.000**	**62,50**	**7,68**	
4.2.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Keja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	110 Org	233.655.000	10	20.000.000	15	29.595.000	15	16.300.000	100,00	55,08	25	36.300.000	22,73	15,54	
4.2.2	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	110 Org	238.896.882	0	-	15	30.890.000	15		100,00	0,00	15	-	13,64	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase penyelesaian Kasus Perselisihan Industrial**	**100,00 %**	**1.276.986.150**	**95,00**	**89.696.050**	**100,00**	**160.313.400**		**30.653.900**	**0,00**	**19,12**	**47,50**	**120.349.950**	**47,50**	**9,42**	
5,1	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusana dan pendaftara perjanjian kerja bersama**	**100,00 %**	**721.500.000**	**100**	**53.825.000**	**100**	**90.187.400**	**100,00**	**30.653.900**	**100,00**	**33,99**	**100,00**	**84.478.900**	**100,00**	**11,71**	
5.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahan bagi perusahan	Jumlah Perusahan Yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WKLP Online	30 Prsh	220.000.000	5	11.800.000	5	21.727.400	5		100,00	0,00	10	11.800.000	33,33	5,36	
5.1.2	Pendaftara Perjanjian Kerjasama bagi perusahan	Pendaftara Perjanjian Kerjasama bagi perusahan	5 Prsh	220.000.000	1	4.200.000	1	29.580.000	1	11.820.000	100,00	39,96	2	16.020.000	40,00	7,28	
5.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek Serta Pengupahan	3060 Lap	281.500.000	510	37.825.000	510	38.880.000	510	18.833.900	100,00	48,44	1020	56.658.900	33,33	20,13	
5,2	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**555.486.150**	**97**	**35.871.050**	**100**	**70.126.000**	**100,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**98,61**	**35.871.050**	**98,61**	**6,46**	
5.2.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	70 Kasus	177.712.000	10	-	12	25.690.000	12		100,00	0,00	22	-	31,43	0,00	
5.2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	6 Lmbg	220.000.000	1	12.496.900	1	28.156.000	1		100,00	0,00	2	12.496.900	33,33	5,68	
5.2.3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlasananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	1500 Org	157.774.150	250	23.374.150	250	16.280.000	250		100,00	0,00	500	23.374.150	33,33	14,81	
	Bidang Urusan Trasmigrasi																

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase keterlaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi**	**100 %**	**720.000.000**	**0**	**-**	**100**	**111.899.600**		**10.974.500**	**0,00**	**9,81**	**0,00**	**10.974.500**	**0,00**	**1,52**	
6,1	**Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi**	**Tingkat konsistensi Pelaksanaan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi**	**100 %**	**720.000.000**	**0**	**-**	**100**	**111.899.600**		**10.974.500**	**0,00**	**9,81**	**0,00**	**10.974.500**	**0,00**	**1,52**	
6.1.1	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	12 Dok	720.000.000	0	-	2	111.899.600		10.974.500	0,00	9,81	0	10.974.500	0,00	1,52	
7	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase keterlaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi**	**100 %**	**1.072.000.000**	**50**	**69.464.000**	**100**	**133.800.800**		**-**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**69.464.000**	**25,00**	**6,48**	
7,1	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Tingkat Persebaran Penduduk di kawasan transmigrasi**	**100 %**	**1.072.000.000**	**50**	**69.464.000**	**100**	**133.800.800**		**-**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**69.464.000**	**25,00**	**6,48**	
7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 Lap	1.072.000.000	10	69.464.000	10	133.800.800			0,00	0,00	10	69.464.000	16,67	6,48	
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase keterlaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi**	**100 %**	**1.322.920.000**	**50,00**	**184.715.000**	**100**	**213.996.000**	**66,67**	**26.607.800**	**66,67**	**12,43**	**58,33**	**211.322.800**	**58,33**	**15,97**	
8,1	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Tingkat konsistensi pelaksanaan Pembangunan Kota terpadu Mandiri**	**100 %**	**1.322.920.000**	**42**	**184.715.000**	**100**	**213.996.000**	**66,67**	**26.607.800**	**66,67**	**12,43**	**54,17**	**211.322.800**	**54,17**	**15,97**	
8.1.1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi yang di Bina	291 KK	500.000.000	47	25.660.000	47	79.136.000	47	15.047.800	100,00	19,02	94	40.707.800	32,30	8,14	
8.1.2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	3 UPT	822.920.000	1	159.055.000	3	134.860.000	1	11.560.000	33,33	8,57	2	170.615.000	66,67	20,73	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)											**74,05**	**41,04**			**40,03**	**20,41**	
Predikat Kinerja											**S**	**SR**					
Jumlah Total				**25.122.369.743**		**4.805.670.418**		**4.041.686.123**		**1.790.220.961**		**44,29**		**6.595.891.379**		**26,26**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan	Indeks Kesehatan Daerah	78,58	79,60	101,30
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas	Indeks Pembangunan Gender	89,75	89,73	99,98
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar																
	Bidang Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak																**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkat Daerah**	**100,00 %**	**13.984.924.278**	**78,54**	**4.741.336.370**	**90,00**	**3.212.715.294**	**93,54**	**2.051.183.953**	**103,93**	**63,85**	**86,04**	**6.792.520.323**	**86,04**	**48,57**	
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentasi capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas**	**100,00 %**	**168.799.561**	**98,88**	**23.012.600**	**100,00**	**28.032.000**	**83,00**	**27.954.400**	**83,00**	**99,72**	**90,94**	**50.967.000**	**90,94**	**30,19**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dok	88.999.661	9	15.778.800	3	14.000.000	3	14.000.000	100,00	100,00	12	29.778.800	50,00	33,46	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	15.800.000	1	1.675.000	1	3.000.000	1	3.000.000	100,00	100,00	2	4.675.000	33,33	29,59	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	6.000.000	0	-	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00	100,00	1	1.000.000	16,67	16,67	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dok	6.000.000	0	-	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00	100,00	1	1.000.000	16,67	16,67	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dok	6.000.000	0	-	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00	100,00	1	1.000.000	16,67	16,67	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Lap	45.999.900	7	5.558.800	4	8.032.000	4	7.954.400	100,00	99,03	11	13.513.200	45,83	29,38	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**10.380.120.997**	**67,13**	**4.038.330.000**	**100,00**	**2.783.074.582**	**70,75**	**1.860.516.676**	**70,75**	**66,85**	**68,94**	**5.898.846.676**	**68,94**	**56,83**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1750 Org	10.343.261.002	350	4.028.551.800	350	2.776.774.582	364	1.854.310.576	104,00	66,78	714	5.882.862.376	40,80	56,88	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17 Lap	36.859.995	8	9.778.200	4	6.300.000	4	6.206.100	100,00	98,51	12	15.984.300	70,59	43,36	
1,3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**100,00 %**	**87.500.000**		**-**	**100,00**	**21.500.000**	**100,00**	**21.409.400**	**100,00**	**99,58**	**50,00**	**21.409.400**	**50,00**	**24,47**	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Lap	3.500.000			1	500.000	1	500.000	100,00	100,00	1	500.000	16,67	14,29	
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Lap	4.000.000			1	1.000.000	1	909.400	100,00	90,94	1	909.400	16,67	22,74	
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada DKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Lap	80.000.000			1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	100,00	1	20.000.000	16,67	25,00	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase capaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**100,00 %**	**310.192.000**	**100,00**	**20.613.000**		**-**		**-**			**50,00**	**20.613.000**	**50,00**	**6,65**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Pkt	60.000.000		-		-					0	-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Org	250.192.000	4	20.613.000							4	20.613.000	23,53	8,24	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**1.207.470.038**	**96,53**	**265.004.900**	**100,00**	**185.117.400**	**97,22**	**60.990.839**	**97,22**	**32,95**	**96,88**	**325.995.739**	**96,88**	**27,00**	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Pkt	149.009.138	24	48.957.000	12	14.390.300	2	-	16,67	0,00	26	48.957.000	36,11	32,86	
1.4.2	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Pkt	64.782.000	12	9.978.000	12	10.000.000	12	8.011.200	100,00	80,11	24	17.989.200	33,33	27,77	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Pkt	67.999.900	24	17.146.400	12	8.669.500	12	976.400	100,00	11,26	36	18.122.800	50,00	26,65	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Pkt	52.458.000	24	5.750.000	12	6.000.000	12	150.000	100,00	2,50	36	5.900.000	50,00	11,25	
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 Pkt	49.495.000	24	10.310.000	12	8.073.600	12	8.073.600	100,00	100,00	36	18.383.600	50,00	37,14	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Lap	823.726.000	32	172.863.500	12	137.984.000	10	43.779.639	83,33	31,73	42	216.643.139	23,33	26,30	
1,5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase capain ketersediaan Barang Milik Daerah**	**85,00 %**	**423.648.000**	**64**	**35.571.000**	**100**	**78.000.000**	**100,00**	**19.500.000**	**100,00**	**25,00**	**82,14**	**55.071.000**	**96,64**	**13,00**	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	312.000.000	0	-	1	78.000.000	1	19.500.000	100,00	25,00	1	19.500.000	25,00	6,25	
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	111.648.000	9	35.571.000		-					9	35.571.000	28,13	31,86	
1,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian Penyediaan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00 %**	**872.508.182**	**75,00**	**180.058.000**	**100,00**	**70.991.312**	**62,50**	**40.918.900**	**62,50**	**57,64**	**68,75**	**220.976.900**	**68,75**	**25,33**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Lap	504.253.182	24	121.423.000	12	32.584.408	7	24.568.400	58,33	75,40	31	145.991.400	43,06	28,95	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Lap	67.200.000	24	3.125.000	12	7.262.800	12	1.628.000	100,00	22,42	36	4.753.000	50,00	7,07	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Lap	162.000.000	13	18.400.000	12	7.870.000	4	2.840.000	33,33	36,09	17	21.240.000	23,61	13,11	
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Lap	139.055.000	23	37.110.000	12	23.274.104	7	11.882.500	58,33	51,05	30	48.992.500	41,67	35,23	
1,7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capain Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00 %**	**534.685.500**	**66,67**	**178.746.870**	**100,00**	**46.000.000**	**100,00**	**19.893.738**	**100,00**	**43,25**	**83,33**	**198.640.608**	**83,33**	**37,15**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	534.685.500	10	178.746.870	5	46.000.000	5	19.893.738	100,00	43,25	15	198.640.608	46,88	37,15	
2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD**	**46,70 %**	**2.934.362.249**	**33,30**	**713.997.378**	**45,30**	**289.460.000**	**55,84**	**256.080.000**	**123,28**	**88,47**	**44,57**	**970.077.378**	**95,44**	**33,06**	
2,1	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100,00 %**	**183.362.600**	**100,00**	**25.824.000**	**100,00**	**39.460.000**	**100,00**	**6.080.000**	**100,00**	**15,41**	**100,00**	**31.904.000**	**100,00**	**17,40**	
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		-			2	30.000.000	2	6.080.000	100,00	20,27	2	6.080.000			
2.1.2	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUGTermasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	124 OPD	183.362.600	20	25.824.000	4	9.460.000	4		100,00	0,00	24	25.824.000	19,35	14,08	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2,2	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**100 %**	**2.399.999.649**	**100**	**681.993.378**	**100**	**250.000.000**	**100,00**	**250.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**931.993.378**	**100,00**	**38,83**	
2.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten /Kota	6 Dok	2.249.999.649	3	681.993.378	2	250.000.000	2	250.000.000	100,00	100,00	5	931.993.378	83,33	41,42	
2.2.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten /Kota	6 Organis	150.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2,3	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**24 Lbg**	**351.000.000**	**11**	**6.180.000**		-		-			**5,50**	**6.180.000**	**22,92**	**1,76**	
2.3.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Dok	351.000.000	1	6.180.000							1	6.180.000	16,67	1,76	
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentasi korban kekerasan perempuan yang terlayani /ditangani hingga selesai**	**100,00 %**	**371.128.000**	**100**	**26.394.000**	**100**	**254.504.000**	**100,00**	**82.310.236**	**100,00**	**32,34**	**100,00**	**108.704.236**	**100,00**	**29,29**	
3,1	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pencegahan kekerasa terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten /kota**	**100,00 %**	**180.000.000**		-	**100**	**254.504.000**	**100,00**	**82.310.236**	**100,00**	**32,34**	**50,00**	**82.310.236**	**50,00**	**45,73**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	60.000.000			1	254.504.000	1	82.310.236	100,00	32,34	1	82.310.236	100,00	137,18	
3.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 OPD	120.000.000									0	-	0,00	0,00	
3,3	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capain layanan pendampingan perlindungan Perempuan**	**0,108 %**	**191.128.000**	**0,08**	**26.394.000**		-		-			**0,04**	**26.394.000**	**38,43**	**13,81**	
3.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Org	191.128.000	20	26.394.000							20	26.394.000	100,00	13,81	
4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**15,00 %**	**1.071.650.732**	**38,59**	**67.254.500**	**26,10**	**472.697.466**		**182.502.162**	**0,00**	**38,61**	**19,29**	**249.756.662**	**128,63**	**23,31**	
4,1	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00 %**	**801.650.732**	**100**	**67.254.500**	**100**	**472.697.466**	**100,00**	**182.502.162**	**100,00**	**38,61**	**100,00**	**249.756.662**	**100,00**	**31,16**	
4.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	6 OPD	801.650.732	2	67.254.500	1	472.697.466	1	182.502.162	100,00	38,61	3	249.756.662	50,00	31,16	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4,2	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capain desa yang memiliki PATBM**	**100,00 %**	**150.000.000**	**0**	-		-		-			**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
4.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lbg	150.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
4,3	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian Keluarga yang mendapatkan Layanan Komprehensif dalam Mewujudkan KG**	**100,00 %**	**120.000.000**	-		-		-				**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
4.3.1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Layan	120.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten**	**100,00 %**	**330.000.000**	**0,00**	**23.750.000**		-		-			**0,00**	**23.750.000**	**0,00**	**7,20**	
5,1	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capain data terpilah gender dan anak**	**100,00 %**	**330.000.000**	**100**	**23.750.000**		-		-			**50,00**	**23.750.000**	**50,00**	**7,20**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.1.1	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dok	330.000.000	1	23.750.000							1	23.750.000	20,00	7,20	
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Skor Nilai Indikator Kabupaten Layak Anak yang Telah terpenuhi**	**1000 Indik**	**2.307.026.610**	**12**	**224.070.650**	**501**	**170.870.000**		**61.460.000**	**0,00**	**35,97**	**6,00**	**285.530.650**	**0,60**	**12,38**	
6,1	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha**	**1,00 %**	**1.546.612.500**	**0,63**	**150.000.000**	**0,63**	**108.750.000**		-	**0,00**	**0,00**	**0,32**	**150.000.000**	**31,50**	**9,70**	
6.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Orgainisasi	850.000.000	0	-	35	108.750.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
6.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dok	696.612.500	1	150.000.000	1						1	150.000.000	20,00	21,53	
6,2	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**15 Lbg**	**760.414.110**	**2**	**74.070.650**	**3**	**62.120.000**	**2**	**61.460.000**	**66,67**	**98,94**	**2,00**	**135.530.650**	**13,33**	**17,82**	
6.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	175 Anak	273.387.500	0	-	35	52.340.000	0	52.340.000	0,00	100,00	0	52.340.000	0,00	19,14	
6.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dok	160.000.000	0	-	1	9.780.000	1	9.120.000	100,00	93,25	1	9.120.000	25,00	5,70	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6.2.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	6 Dok	177.026.610	2	44.070.650							2	44.070.650	33,33	24,89	
6.2.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	5 Dok	150.000.000	2	30.000.000							2	30.000.000	40,00	20,00	
7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentasi korban kekerasan anak yang terlayani/ditangani hingga selesai oleh instansi terkait**	**100,00 %**	**259.747.580**	**100,00**	**19.643.800**	**100,00**	**184.296.000**	**100,00**	**183.728.500**	**100,00**	**99,69**	**100,00**	**203.372.300**	**100,00**	**78,30**	
7,1	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian layananpendampingan anak korban kekerasan**	**0,05 %**	**259.747.580**	**0,052**	**19.643.800**		-		-			**0,03**	**19.643.800**	**53,06**	**7,56**	
7.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	20 OPD	60.000.000	1	4.563.800		-					1	4.563.800	5,00	7,61	
7.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	6 Dok	199.747.580	1	15.080.000							1	15.080.000	16,67	7,55	
7,2	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase capain Layanan pendampingan bagi Anak korban kekerasan yang Memerlukan Penaganan Khusus (Anak disabilitas)**					**100**	**109.700.000**	**100**	**109.700.000**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	**109.700.000**			

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota					1	109.700.000	1	109.700.000	100,00	100,00	1	109.700.000			
7,3	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga yang menyediakan pendampingan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**4 %**	**150.000.000**	**4**	**-**	**4**	**74.596.000**	**4,00**	**74.028.500**	**100,00**	**99,24**	**4,00**	**74.028.500**	**100,00**	**49,35**	
7.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					1	74.596.000	1	74.028.500	100,00	99,24	1	74.028.500			
7.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota	5 Dok	150.000.000									0	-	0,00	0,00	
8	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)**	**11**	**6.391.944.256**	**15**	**1.082.305.000**	**11**	**311.400.000**	**15,50**	**311.400.000**	**140,91**	**100,00**	**15,45**	**1.393.705.000**	**140,45**	**21,80**	
8,1	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase capaian ketersediaan data Remaja umur 15-19 tahun**	**100 %**	**6.391.944.256**	**50**	**1.082.305.000**	**100**	**311.400.000**	**100,00**	**311.400.000**	**100,00**	**100,00**	**75,00**	**1.393.705.000**	**75,00**	**21,80**	
8.1.1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	85 Dok	2.278.019.256	0	-	17	64.200.000	17	64.200.000	100,00	100,00	17	64.200.000	20,00	2,82	
8.1.2	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	5 Data	11.525.000	1	2.305.000		-					1	2.305.000	20,00	20,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					1	145.200.000	1	145.200.000	100,00	100,00	1	145.200.000			
8.1.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	980 Dok	4.102.400.000	392	1.080.000.000	196	102.000.000	196	102.000.000	100,00	100,00	588	1.182.000.000	60,00	28,81	
9	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**persentase pemakaian kontrasepsi moderan (mCPR)**	**21 %**	**28.150.103.754**	**18,61**	**6.681.250.414**	**18,90**	**3.514.454.000**	**59,18**	**3.045.807.016**	**313,12**	**86,67**	**38,90**	**9.727.057.430**	**185,21**	**34,55**	
		Persentasi kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	**7,4 %**		**28,05**	-	**14,70**		**10,00**		**68,03**		**19,03**	-	**257,09**		
9,1	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**100 %**	**9.579.662.742**	**100**	**2.654.576.969**	**100**	**1.349.550.000**	**83,33**	**1.159.509.000**	**83,33**	**85,92**	**91,67**	**3.814.085.969**	**91,67**	**39,81**	
9.1.1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	140 Organ	159.875.000	28	4.375.000	28	80.000.000	28	59.927.400	100,00	74,91	56	64.302.400	40,00	40,22	
9.1.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	85 Data	225.789.584	17	25.000.000		-					17	25.000.000	20,00	11,07	
9.1.3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, danKeluarga Berencana)	3 Unit	801.964.867	1	204.220.500		-					1	204.220.500	33,33	25,47	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
9.1.4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	85 Dok	512.420.000	17	70.640.000	17	150.000.000	17	150.000.000	100,00	100,00	34	220.640.000	40,00	43,06	
9.1.5	Pelaksanaan Mekanisme Operasional ProgramKKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	140 Lap	1.599.894.692	28	265.200.000	28	221.000.000	28	221.000.000	100,00	100,00	56	486.200.000	40,00	30,39	
9.1.6	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	102 Lap	4.723.541.267	34	1.598.248.984	17	818.550.000	17	648.581.600	100,00	79,24	51	2.246.830.584	50,00	47,57	
9.1.7	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	102 lap	1.556.177.332	34	486.892.485	17	80.000.000	17	80.000.000	100,00	100,00	51	566.892.485	50,00	36,43	
9,2	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**100 %**	**7.074.610.792**	**100**	**940.800.000**	**100**	**738.000.000**	**100,00**	**590.400.000**	**100,00**	**80,00**	**100,00**	**1.531.200.000**	**100,00**	**21,64**	
9.2.1	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	140 Organ	1.708.216.000	0	-	1	346.000.000	1	276.800.000	100,00	80,00	1	276.800.000	0,71	16,20	
9.2.2	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	980 Kader	5.366.394.792	196	940.800.000	196	392.000.000	196	313.600.000	100,00	80,00	392	1.254.400.000	40,00	23,38	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
9,3	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota**	**100 %**	**5.877.180.220**	**70**	**1.689.543.445**	**100**	**983.904.000**	**100,00**	**957.898.016**	**100,00**	**97,36**	**85,00**	**2.647.441.461**	**85,00**	**45,05**	
9.3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	195 Lap	508.636.811	78	84.450.426	39	20.700.000	39	20.694.016	100,00	99,97	117	105.144.442	60,00	20,67	
9.3.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5997 Org	1.975.143.700	1489	422.543.884	1127	518.389.000	1127	517.398.000	100,00	99,81	2616	939.941.884	43,62	47,59	
9.3.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	164 Unit	2.969.654.000	80	1.160.509.335	17	401.915.000	17	388.578.000	100,00	96,68	97	1.549.087.335	59,15	52,16	
9.3.4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 Lap	75.000.000	0	-	1	14.100.000	1	14.098.000	100,00	99,99	1	14.098.000	20,00	18,80	
9.3.5	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	150 Org	348.745.709	5	22.039.800	25	28.800.000	25	17.130.000	100,00	59,48	30	39.169.800	20,00	11,23	
9,4	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**100,00 %**	**5.618.650.000**	**100,00**	**1.396.330.000**	**100,00**	**443.000.000**	**100,00**	**338.000.000**	**100,00**	**76,30**	**100,00**	**1.734.330.000**	**100,00**	**30,87**	
9.4.1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					1	9.000.000	1	9.000.000	100,00	100,00	1	9.000.000			

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
9.4.2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPKdi Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	157 Kamp KB	5.618.650.000	45	1.396.330.000	28	434.000.000	28	329.000.000	100,00	75,81	73	1.725.330.000	46,50	30,71	
10	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**100 %**	**1.250.000.000**	**100,00**	**1.453.356.900**	**100,00**	**1.970.956.000**	**100,00**	**1.316.902.700**	**100,00**	**66,82**	**100,00**	**2.770.259.600**	**100,00**	**221,62**	
10,1	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase capaian keluarga yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**100 %**	**1.250.000.000**	**100**	**1.453.356.900**	**100**	**1.970.956.000**	**100,00**	**1.316.902.700**	**100,00**	**66,82**	**100,00**	**2.770.259.600**	**100,00**	**221,62**	
10.1.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	67 Unit	500.000.000	28	304.461.900	28	360.000.000	20	356.000.000	71,43	98,89	48	660.461.900	71,64	132,09	
10.1.2	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	980 Lap	555.000.000	196	1.123.660.000	196	1.234.800.000	196	943.662.700	100,00	76,42	392	2.067.322.700	40,00	372,49	
10.1.3	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah orang yang megikuti Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	100 Org	195.000.000	10	25.235.000	10	376.156.000	10	17.240.000	100,00	4,58	20	42.475.000	20,00	21,78	
											103,93	**70,75**			**49,52**	**32,43**	
											ST	**S**					
Jumlah Total				**57.050.887.459**		**15.033.359.012**		**10.381.352.760**		**7.491.374.567**		**72,16**		**22.524.733.579**		**39,48**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta	Indeks Ketahanan Ekonomi	47,1	49,64	105,39
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar																
	Bidang Urusan Pangan																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**90,00 %**	**19.543.833.589**	**76,99**	**6.059.948.783**	**90,00**	**2.565.821.022**	**66,64**	**1.826.558.031**	**74,04**	**71,19**	**71,81**	**7.886.506.814**	**79,79**	**40,35**	**Dinas Ketahanan Pangan**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**140.552.781**	**92,50**	**36.192.000**	**85,00**	**12.701.200**	**91**	**7.147.500**	**106,81**	**56,27**	**91,64**	**43.339.500**	**91,64**	**30,84**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	45.783.981	4	12.734.000	2	5.147.500,00	2	5.147.500	100,00	100,00	6	17.881.500	50,00	39,06	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	11 Dok	18.084.800	3	3.844.800	2	2.703.700	2	-	100,00	0,00	5	3.844.800	45,45	21,26	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	649.800	1	649.800							1	649.800	100,00	100,00	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	584.800	1	584.800							1	584.800	100,00	100,00	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	584.800	1	584.800							1	584.800	100,00	100,00	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	31.584.800	2	8.184.800							2	8.184.800	33,33	25,91	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Lap	43.279.800	5	9.609.000	4	4.850.000	4	2.000.000	100,00	41,24	9	11.609.000	42,86	26,82	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**16.202.024.558**	**75,25**	**5.184.262.583**	**100,00**	**2.201.587.022**	**62,47**	**1.659.840.565**	**62,47**	**75,39**	**68,86**	**6.844.103.148**	**68,86**	**42,24**	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Org	16.130.815.158	43	5.168.771.183	23	2.196.087.022	19	1.654.340.565	82,61	75,33	62	6.823.111.748	52,10	42,30	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	6 Dok	32.594.800	2	6.826.800	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	3	8.826.800	50,00	27,08	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Lap	22.594.800	2	5.594.800	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	3	7.594.800	50,00	33,61	
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dok	16.019.800	2	3.069.800	1	1.500.000	1	1.500.000	100,00	100,00	3	4.569.800	50,00	28,53	
1,3	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengadaan BMD pada perangkat Daerah**	**100,00 %**	**32.544.365**	**100,00**	**1.543.700**	**100,00**	**3.000.000**	**100,00**	**3.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.543.700**	**100,00**	**13,96**	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Lap	16.579.565	2	1.078.900	1	1.500.000	1	1.500.000	100,00	100,00	3	2.578.900	50,00	15,55	
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Dok	15.964.800	2	464.800	1	1.500.000	1	1.500.000	100,00	100,00	3	1.964.800	50,00	12,31	
1,4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**491.319.365**	**100,00**	**5.579.300**	**100,00**	**4.000.000**	**100,00**	**4.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**9.579.300**	**100,00**	**1,95**	
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dok	12.279.365	1	1.079.300	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	2	3.079.300	33,33	25,08	
1.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	84 OP	103.040.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.4.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dok	16.000.000	1	4.500.000	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	2	6.500.000	40,00	40,63	
1.4.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 OK	360.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1,5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.242.819.449**	**93,08**	**365.885.000**	**100,00**	**126.876.400**	**80,00**	**40.251.000**	**80,00**	**31,72**	**86,54**	**406.136.000**	**86,54**	**32,68**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.175.000	2	2.050.000	1	1.500.000	1	1.500.000	100,00	100,00	3	3.550.000	50,00	34,89	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	310.100.500	4	34.708.000	4	24.585.900	0	-	0,00	0,00	4	34.708.000	19,05	11,19	
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	24.880.000	4	10.219.000	3	3.000.000	3	2.990.000	100,00	99,67	7	13.209.000	63,64	53,09	
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket	41.436.999	13	3.032.000	1	9.000.000	1	9.000.000	100,00	100,00	14	12.032.000	19,44	29,04	
1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	53.249.950	11	26.237.000	1	5.000.000	1	4.818.600	100,00	96,37	12	31.055.600	240,00	58,32	
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dok	63.250.000	12	16.725.000	12	3.920.400	12	3.920.400	100,00	100,00	24	20.645.400	40,00	32,64	
1.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Lap	35.110.000	1	10.078.000	6	4.872.000	6	4.872.000	100,00	100,00	7	14.950.000	17,50	42,58	
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 Lap	704.617.000	28	262.836.000	25	74.998.100	10	13.150.000	40,00	17,53	38	275.986.000	38,78	39,17	
1,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**750.644.000**	**89,58**	**210.598.200**	**100,00**	**107.599.900**	**50,00**	**52.411.419**	**50,00**	**48,71**	**69,79**	**263.009.619**	**69,79**	**35,04**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180 OB	386.100.000	21	121.570.000	12	58.200.000	6	27.160.000	50,00	46,67	27	148.730.000	15,00	38,52	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Bln	179.299.000	20	41.495.000	12	29.999.900	12	25.251.419	100,00	84,17	32	66.746.419	44,44	37,23	
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Bln	63.250.000	13	9.549.200	-	-	-	-	-	-	13	9.549.200	18,06	15,10	
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 OB	121.995.000	11	37.984.000	12	19.400.000	0	-	0,00	0,00	11	37.984.000	18,33	31,14	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1,6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**683.929.071**	**100,00**	**255.888.000**	**100,00**	**110.056.500**	**75,00**	**59.907.547**	**75,00**	**54,43**	**87,50**	**315.795.547**	**87,50**	**46,17**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	72 Bln	468.000.000	12	136.500.000	1	78.000.000	1	39.000.000	100,00	50,00	1	175.500.000	1,39	37,50	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Bln	215.929.071	12	119.388.000	2	32.056.500	1	20.907.547	50,00	65,22	1	140.295.547	1,39	64,97	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan**	**33,70 %**	**3.171.642.350**	**11,73**	**20.123.500**	**31,70**	**32.702.500**	**22,45**	**17.782.500**	**70,82**	**54,38**	**22,45**	**37.906.000**	**66,61**	**1,20**	
2,1	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan Kewenangan Daerah**	**100 %**	**3.171.642.350**	**60**	**20.123.500**	**100**	**32.702.500**	**50,00**	**17.782.500**	**50,00**	**54,38**	**55,00**	**37.906.000**	**55,00**	**1,20**	
2.1.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	6 Unit	1.236.999.850	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.1.2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	6 Unit	701.950.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.1.3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	11 Unit	940.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	6 Lap	132.708.600	**1**	10.123.500	1	14.920.000	0	-	0,00	0,00	1	10.123.500	16,67	7,63	
2.1.5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	6 Dok	159.983.900	1	10.000.000	1	17.782.500	1	17.782.500	100,00	100,00	2	27.782.500	33,33	17,37	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase DesaBerkategori Cukup/Tahan/Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan**	**74,40 %**	**4.459.854.349**	**57,14**	**1.144.808.750**	**74,40**	**648.870.500**	**83,16**	**457.802.600**	**111,78**	**70,55**	**83,16**	**1.602.611.350**	**111,78**	**35,93**	
3,1	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya**	**100 %**	**1.064.847.849**	**57,75**	**73.599.850**	**100**	**81.306.500**	**33,33**	**16.872.900**	**33,33**	**20,75**	**45,54**	**90.472.750**	**45,54**	**8,50**	
3.1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Lap	69.154.900	1	5.000.000	2	7.910.000	0	-	0,00	0,00	1	5.000.000	8,33	7,23	
3.1.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	6 Lap	371.455.000	0	-	1	36.030.800	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
3.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	6 Lap	92.082.099	1	15.000.000	1	11.040.000	1	11.040.000	100,00	100,00	2	26.040.000	33,33	28,28	
3.1.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	18 Lap	186.099.850	6	46.099.850	3	10.665.800	3	5.832.900	100,00	54,69	9	51.932.750	50,00	27,91	
3.1.5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	6 KT	157.056.100	1	7.500.000	1	7.160.000	0	-	0,00	0,00	1	7.500.000	16,67	4,78	
3.1.6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	10 Unit (TTI)	131.999.900	0	-							0	-	0,00	0,00	
3.1.7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	14 KK	57.000.000	0	-	10	8.499.900	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
3,2	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota**	**Tersedianya Cadangan Beras Kabupaten**	**100 %**	**1.049.829.850**	**83,33**	**156.334.000**	**100,00**	**125.802.700**	**96,38**	**97.429.700**	**96,38**	**77,45**	**89,86**	**253.763.700**	**89,86**	**24,17**	
3.2.1	Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	6 Lap	39.637.950	0	-	1	6.000.000	1	6.000.000	100,00	100,00	1	**6.000.000**	16,67	15,14	
3.2.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	6 Dok	39.271.900	1	4.414.000	1	4.999.700	1	4.999.700	100,00	100,00	2	9.413.700	33,33	23,97	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.2.3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota	50 Ton	628.920.000	11	151.920.000	5	86.430.000	3,6	86.430.000	72,00	100,00	15	238.350.000	29,20	37,90	
3.2.4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota yang Terpelihara	27 Ton	342.000.000	0	-	5	28.373.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
3,3	**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	**Tersedianya Harga Referensi Daerah untuk Pangan Lokal**	**100 %**	**40.300.800**	**50,00**	**1.494.400**	**100**	**5.100.000**	**100**	**5.100.000**	**100,00**	**100,00**	**75,00**	**6.594.400**	**75,00**	**16,36**	
3.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	6 Lap	40.300.800	1	1.494.400	1	5.100.000	1	5.100.000	100,00	100,00	2	6.594.400	33,33	16,36	
3,4	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Cakupan Pencapaian target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi**	**100 %**	**2.304.875.850**	**73,64**	**913.380.500**	**100**	**436.661.300**	**0,00**	**338.400.000**	**0,00**	**77,50**	**36,82**	**1.251.780.500**	**36,82**	**54,31**	
3.4.1	Penetapan dan Penyusunan Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Skor PPH Tingkat Konsumsi)	78	249.209.800	81	28.700.000	1	19.419.800	0	-	0,00	0,00	81	**28.700.000**	103,85	11,52	
3.4.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penganeka ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6 Lap	2.012.375.550	2	881.590.000	1	411.772.100	0	338.400.000	0,00	82,18	2	1.219.990.000	33,33	60,62	
3.4.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita pertahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	6 Dok	43.290.500	1	3.090.500	1	5.469.400	0	-	0,00	0,00	1	3.090.500	16,67	7,14	
4	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani**	**100 %**	**1.019.539.950**	**28,46**	**219.539.950**	**100**	**124.864.400**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**14,23**	**219.539.950**	**14,23**	**21,53**	
4,1	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**	**6 Dok**	**320.800.000**	**1**	**20.800.000**	**1**	**54.455.300**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**20.800.000**	**16,67**	**6,48**	
4.1.1	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisa Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	6 Dok	320.800.000	1	20.800.000	1	54.455.300	0	-	0,00	0,00	1	20.800.000	16,67	6,48	
4,2	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa Rawan Pangan yang Tertangani**	**100 %**	**698.739.950**	**63**	**198.739.950**	**100**	**70.409.100**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**31,25**	**198.739.950**	**31,25**	**28,44**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	6 Lap	62.249.000	2	12.249.000	1	10.000.000	0	-	0,00	0,00	2	12.249.000	33,33	19,68	
4.2.2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dok	636.490.950	3	186.490.950	1	60.409.100	0	-	0,00	0,00	3	186.490.950	50,00	29,30	
5	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Presentase Pengawasan Keamanan Pangan (Persentase terhadap Rencana Tahun Berkenaan)**	**100 %**	**913.875.244**	**52,50**	**220.875.244**	**100,00**	**116.291.900**	**100,00**	**115.759.200**	**100,00**	**99,54**	**76,25**	**336.634.444**	**76,25**	**36,84**	
5,1	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pengawasan Keamanan PSAT Distribusi Lintas Wilayah Kabupaten**	**100 %**	**913.875.244**	**78**	**220.875.244**	**100**	**116.291.900**	**100,00**	**115.759.200**	**100,00**	**99,54**	**88,75**	**336.634.444**	**88,75**	**36,84**	
5.1.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	6 Dok	135.767.200	1	48.767.200	1	21.000.000	1	21.000.000	100,00	100,00	2	69.767.200	33,33	51,39	
5.1.2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	80.878.150	4	40.878.150	2	4.950.000	2	4.950.000	100,00	100,00	6	45.828.150	50,00	56,66	
5.1.3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dok	112.275.799	4	64.275.799	2	7.400.000	2	7.400.000	100,00	100,00	6	71.675.799	50,00	63,84	
5.1.4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dok	104.954.095	4	66.954.095	2	12.000.000	2	11.510.300	100,00	95,92	6	78.464.395	50,00	74,76	
5.1.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dok	480.000.000		-	1	70.941.900	1	70.898.900	100,00	99,94	1	70.898.900	9,09	14,77	
											Rata - rata Capaian Kinerja (%)		**65,29**	**60,88**	**44,85**	**28,62**	
											Predikat Kinerja		**S**	**R**			
Jumlah Total				**29.108.745.482**		**7.665.296.227**		**3.488.550.322**		**2.417.902.331**		**69,31**		**10.083.198.558**		**34,64**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta	Indeks Ketahanan Lingkungan	70,86	70,71	99,79
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar																
	Bidang Urusan Lingkungan Hidup																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**90,00 %**	**33.125.968.118**	**80,32**	**11.513.954.448**	**100,00**	**7.138.185.961**	**87,30**	**5.905.188.399**	**87,30**	**82,73**	**83,81**	**17.419.142.847**	**93,12**	**52,58**	**Dinas Lingkungan Hidup**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**230.281.213**	**100,00**	**54.778.000**	**100,00**	**20.315.900**	**57,95**	**20.315.900**	**57,95**	**100,00**	**78,98**	**75.093.900**	**78,98**	**32,61**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dok	81.210.886	5	26.180.000	1	2.096.100	1	2.096.100	100,00	100,00	6	28.276.100	30,00	34,82	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	12.749.303	2	2.055.000							2	2.055.000	33,33	16,12	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	12.749.303	2	4.110.000	1	2.096.100	1	2.096.100	100,00	100,00	3	6.206.100	50,00	48,68	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dok	12.749.303	2	2.055.000							2	2.055.000	33,33	16,12	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dok	12.749.303	2	-							2	-	33,33	0,00	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	69.720.653	2	11.238.000	1	11.462.300	1	11.462.300	100,00	100,00	3	22.700.300	50,00	32,56	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Lap	28.352.464	2	9.140.000	1	4.661.400	1	4.661.400	100,00	100,00	3	13.801.400	50,00	48,68	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**17.154.640.500**	**71,92**	**6.492.144.133**	**100,00**	**3.251.209.661**	**70,75**	**2.857.084.312**	**70,75**	**87,88**	**71,34**	**9.349.228.445**	**71,34**	**54,50**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Bln	17.093.208.695	24	6.485.609.133	12	3.241.109.661	12	2.850.480.212	100,00	87,95	36	9.336.089.345	50,00	54,62	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dok	20.888.603	2	-	1	3.434.300	1	-	100,00	0,00	3	-	50,00	0,00	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Lap	40.543.202	2	6.535.000	1	6.665.700	1	6.604.100	100,00	99,08	3	13.139.100	50,00	32,41	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**486.425.410**	**75,00**	**97.848.720**							**37,50**	**97.848.720**	**37,50**	**20,12**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	164 Org	252.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 OP	234.425.410	5	97.848.720							5	97.848.720	14,29	41,74	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.138.393.008**	**90,00**	**340.240.865**	**100,00**	**207.883.800**	**100,00**	**184.732.000**	**100,00**	**88,86**	**95,00**	**524.972.865**	**95,00**	**46,12**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	114 Pkt	18.557.120	38	5.935.000	19	3.025.000	19	3.025.000	100,00	100,00	57	8.960.000	50,00	48,28	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Pkt	280.541.249	7	48.624.000	7	2.220.400	0	-	0,00	0,00	7	48.624.000	16,67	17,33	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Pkt	71.442.624	2	23.030.500	1	11.742.600	1	3.000.000	100,00	25,55	3	26.030.500	50,00	36,44	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dok	111.812.177	13	16.450.000	1	17.500.000	1	6.510.000	100,00	37,20	14	22.960.000	233,33	20,53	
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Lap	34.112.221	2	6.850.000	1	5.596.800	1	5.000.000	100,00	89,34	3	11.850.000	53,33	34,74	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Lap	621.927.616	1	239.351.365	1	167.799.000	1	167.197.000	100,00	99,64	2	406.548.365	33,33	65,37	
1,5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.436.328.427**	**87,50**	**353.926.165**	**100,00**	**230.887.500**	**75,00**	**147.789.984**	**75,00**	**64,01**	**81,25**	**501.716.149**	**81,25**	**34,93**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	708.597.612	2	188.619.000	1	115.742.700	1	59.582.700	100,00	51,48	3	248.201.700	50,00	35,03	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Lap	311.285.273	13	87.116.165	12	46.749.300	12	40.461.784	100,00	86,55	25	127.577.949	416,67	40,98	
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap	43.428.281	1	4.485.000	1	7.070.000	0	-	0,00	0,00	1	4.485.000	16,67	10,33	
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Lap	373.017.261	2	73.706.000	1	61.325.500	1	47.745.500	100,00	77,86	3	121.451.500	50,00	32,56	
1,6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**12.679.899.560**	**100,00**	**4.175.016.565**	**100,00**	**3.427.889.100**	**100,00**	**2.695.266.203**	**100,00**	**78,63**	**100,00**	**6.870.282.768**	**100,00**	**54,18**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	300 Unit	11.629.899.560	12	4.175.016.565	12	3.427.889.100	12	2.695.266.203	100,00	78,63	12	6.870.282.768	4,00	59,07	
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Pkt	1.050.000.000											0,00	0,00	
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase ketersediaan dokumen PPLH (terhadap jumlah KRP yang wajib menyediakan dokumen PPLH)**	**100,00 %**	**1.144.715.359**	**50,00**	**342.458.000**	**100,00**	**499.999.800**	**100,00**	**349.926.600**	**100,00**	**69,99**	**75,00**	**692.384.600**	**75,00**	**60,49**	
2,1	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten /Kota**	**Cakupan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**100 %**	**344.715.359**	**100**	**342.458.000**	**100**	**199.999.800**	**100,00**	**49.926.600**	**100,00**	**24,96**	**100,00**	**392.384.600**	**100,00**	**113,83**	
2.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	6 Dok	344.715.359	2	342.458.000	1	199.999.800	1	49.926.600	100,00	24,96	3	392.384.600	50,00	113,83	
2.1.2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	4 Lap	-						-							
2,2	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**	**100 %**	**800.000.000**	**0**	**-**	**100**	**300.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	**300.000.000**	**50,00**	**37,50**	
2.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	4 Dok	400.000.000	**0**	-	1	300.000.000	1	300.000.000	100,00	100,00	1	300.000.000	25,00	75,00	
2.2.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun															
2.2.3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	4 Dok	400.000.000		-				-				-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase objek pencemaran/kerusakaan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang ditangani**	**100 %**	**3.607.902.479**	**75,00**	**2.473.365.979**	**100**	**603.852.200**	**100,00**	**176.355.200**	**100,00**	**29,21**	**87,50**	**2.649.721.179**	**87,50**	**73,44**	
3,1	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota**	**Cakupan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**100 %**	**2.987.979.979**	**75,00**	**2.323.365.979**	**100**	**150.000.000**	**100,00**	**150.000.000**	**100,00**	**100,00**	**87,50**	**2.473.365.979**	**87,50**	**82,78**	
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,dan Laut	6 Lap	736.211.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00	100,00	2	250.000.000	33,33	33,96	
3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Lap	-	-	-								-			
3.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	7 Pkt	2.251.768.979	2	2.223.365.979							2	2.223.365.979	28,57	98,74	
3,2	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota**	**Presentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**100 %**	**424.986.500**		-		-		-			**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
3.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	6 Lap	200.000.000		-							0,00	-	0,00	0,00	
3.2.2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	22 Titik	224.986.500		-							0,00	-	0,00	0,00	
3,3	**Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota**	**Presentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota**	**100 %**	**194.936.000**	**25,00**	**150.000.000**	**100**	**453.852.200**	**0**	**26.355.200**	**0,00**	**5,81**	**12,50**	**176.355.200**	**12,50**	**90,47**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	4 Lap	60.000.000			4	453.852.200	1	26.355.200	25,00	5,81	1	26.355.200	25,00	43,93	
3.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Tersedianya Laporan Sosialisasi Pembersihan Unsur Pencemar	4 Lap	89.936.000	1	150.000.000							1	150.000.000	25,00	166,79	
3.3.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	4 Lap	45.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati (persen)**	**95 %**	**622.581.000**	**13**	**79.976.000**	**100**	**99.999.800**	**25,00**	**99.903.500**	**25,00**	**99,90**	**18,75**	**179.879.500**	**19,74**	**28,89**	
4,1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota**	**100 %**	**622.581.000**	**13**	**79.976.000**	**100**	**99.999.800**	**25,00**	**99.903.500**	**25,00**	**99,90**	**18,75**	**179.879.500**	**18,75**	**28,89**	
4.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		-													
4.1.2	PengelolaanTaman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten /Kota	10 Ha	100.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
4.1.3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Ha	522.581.000	5	79.976.000	20	99.999.800	5	99.903.500	25,00	99,90	10	179.879.500	33,33	34,42	
4.1.4	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		-													
4.1.5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		-		-											

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Cakupan pengendalian B3dan limbah B3 (persen)**	**100 %**	**2.008.999.650**	**75**	**1.137.119.520**	**100**	**17.248.000**	**100,00**	**14.355.700**	**100,00**	**83,23**	**87,50**	**1.151.475.220**	**87,50**	**57,32**	
5,1	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Presentase Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**100 %**	**149.999.650**	**50**	-		-		-			**25,00**	-	**25,00**	**0,00**	
5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan /Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		-													
5.1.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	6 Lap	149.999.650	1								1	-	16,67	0,00	
5,2	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) DaerahKabupaten /Kota**	**100 %**	**1.859.000.000**	**50**	**1.137.119.520**	**100**	**17.248.000**	**92,9605**	**14.355.700**	**92,96**	**83,23**	**71,48**	**1.151.475.220**	**71,48**	**61,94**	
5.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	3 Pkt	1.859.000.000	1	1.137.119.520	1	17.248.000	1	14.355.700	100,00	83,23	2	1.151.475.220	66,67	61,94	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang diawasi**	**100 %**	**595.000.000**	**50**	**35.000.000**	**100**	**49.882.800**	**100,00**	**49.622.800**	**100,00**	**99,48**	**75,00**	**84.622.800**	**75,00**	**14,22**	
6,1	**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**persentase jumlah ketaatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbit kan oleh Pemerintah Daerah**	**100 %**	**595.000.000**	**50**	**35.000.000**	**100**	**49.882.800**	**100,00**	**49.622.800**	**100,00**	**99,48**	**75,00**	**84.622.800**	**75,00**	**14,22**	
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/ atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 Pkt	175.000.000													
6.1.2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/ atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberian	10 Org	-													
6.1.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Lap	270.000.000	1	35.000.000	1	49.882.800	1	49.622.800	100,00	99,48	2	84.622.800	50,00	31,34	
6.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	2 Lap	150.000.000													
7	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Peningkata rintisan kelompok/organisasi/ lembaga kemasyarakatan tingkat dusun/desa /kecamatan / kabupaten peduli lingkungan hidup (jumlah, kumulatif)**	**16 Lbg**	**500.000.000**									**0,00**				

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7,1	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**Presentase jumlah Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan Penyuluh Lingkungan Hidup**	**100 %**	**500.000.000**									**0,00**				
7.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dok	250.000.000													
7.1.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200 Org.	250.000.000													
8	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan fasilitasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat (persen)**	**100 %**	**534.999.850**	**0**			**-**		**-**			**0,00**				
8,1	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**534.999.850**	**0**			**-**		**-**			**0,00**				
8.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat /Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan /Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 Entitas	534.999.850													
9	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Cakupan pengelolaan persampahan (persen)**	**95 %**	**38.539.913.680**	**98**	**9.348.409.180**	**95**	**12.072.290.636**	**82,07**	**10.894.651.460**	**86,39**	**90,25**	**89,79**	**20.243.060.640**	**94,51**	**52,52**	
9,1	**Pengelolaan Sampah**	**Presentase Pengelolaan Sampah**	**100 %**	**38.539.913.680**	**100**	**9.348.409.180**	**100**	**12.072.290.636**	**82,07**	**10.894.651.460**	**82,07**	**90,25**	**91,04**	**20.243.060.640**	**91,04**	**52,52**	
9.1.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota yang Disusun dan Ditetapkan	3 Dok	331.117.093													
9.1.2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	5 Ton	145.000.000													

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
9.1.3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST /SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	Ton	-													
9.1.4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalamPengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	120 Kel	224.965.832	30	30.000.000							30	30.000.000	25,00	13,34	
9.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten /Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		-													
9.1.6	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA /TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	21 Dok	29.831.510.148	2	8.755.972.180	1	9.871.073.136	1	8.807.817.460	100,00	89,23	3	17.563.789.640	14,29	58,88	
9.1.7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST /SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan , Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	11 Unit	8.007.320.607	1	562.437.000	1	2.201.217.500	1	2.086.834.000	100,00	94,80	2	2.649.271.000	18,18	33,09	
9,2	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**Jumlah Pihak Swasta yang dibina dan diawasi pengelolaan sampah yang diselenggarakan**		-													

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
9.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan StandarTeknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah															
9.1.2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/ Usaha/ Swasta /Kelompok Masyarakat / Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja															
9.1.3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota															
9.1.4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota															
9.1.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota															
											Rata - rata Capaian Kinerja (%)		**84,09**	**74,65**			**51,65**	**39,32**	
											Predikat Kinerja		**T**	**S**					
		Jumlah Total				**80.680.080.136**		**24.930.283.127**		**20.481.459.197**		**17.490.003.659**		**85,39**		**42.420.286.786**		**52,58**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar																
	Bidang Urusan Kependudukan																**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**90,00 %**	**16.150.907.309**	**85,53**	**5.202.307.487**	**90,00**	**2.948.078.997**	**83,15**	**1.780.300.074**	**92,39**	**60,39**	**84,34**	**6.982.607.561**	**93,71**	**43,23**	
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	**100,00 %**	**138.730.016**	**92,14**	**9.222.000**	**100,00**	**13.226.800**	**85,00**	**7.635.000**	**85,00**	**57,72**	**88,57**	**16.857.000**	**88,57**	**12,15**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dok	112.515.150	3	2.834.000	4	9.526.900	1	3.965.000	25,00	41,62	4	6.799.000	26,67	6,04	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	26.214.866	2	6.388.000	1	3.699.900	1	3.670.000	100,00	99,19	3	10.058.000	60,00	38,37	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkata Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah**	**100,00 %**	**11.615.726.969**	**55,09**	**4.149.466.398**	**100,00**	**2.594.775.860**	**49,58**	**1.584.452.574**	**49,58**	**61,06**	**52,34**	**5.733.918.972**	**52,34**	**49,36**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Org	11.615.726.969	40	4.149.466.398	520	2.594.775.860	280	1.584.452.574	53,85	61,06	320	5.733.918.972	266,67	49,36	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100,00 %**	**508.061.900**	**22,33**	**-**	**100,00**	**42.132.000**		**-**	**0,00**	**0,00**	**11,16**	**-**	**11,16**	**0,00**	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Org	406.934.235	0	-	3	42.132.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.3.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dok	101.127.665	0	-	0						0	-	0,00	0,00	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**100,00 %**	**1.853.532.849**	**83,33**	**454.654.179**	**100,00**	**153.657.100**	**100,00**	**130.554.500**	**100,00**	**84,96**	**91,67**	**585.208.679**	**91,67**	**31,57**	
1.4.1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dok	67.221.350	0	-	1	6.881.500	1	6.785.000	100,00	98,60	1	6.785.000	20,00	10,09	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Pkt	506.700.000	15	343.217.000	3	54.054.000	3	54.054.000	100,00	100,00	18	397.271.000	30,00	78,40	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Pkt	92.980.000	0	-	4	9.247.600	4	9.190.000	100,00	99,38	4	9.190.000	6,67	9,88	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	60 Dok	142.333.335	3	1.250.000	3	2.500.000	3	-	100,00	0,00	6	1.250.000	10,00	0,88	
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	60 Lap	114.100.000	4	2.039.000	4	8.680.000	4	-	100,00	0,00	8	2.039.000	13,33	1,79	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dok	930.198.164	2	108.148.179	1	72.294.000	1	60.525.500	100,00	83,72	3	168.673.679	50,00	18,13	
1,5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00 %**	**901.456.175**	**100,00**	**371.180.400**	**100,00**	**24.217.100**	**66,67**	**7.018.000**	**66,67**	**28,98**	**83,33**	**378.198.400**	**83,33**	**41,95**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	35.065.650	1	3.162.000	1	6.360.900	1	6.268.000	100,00	98,54	2	9.430.000	33,33	26,89	
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	35.013.264	4	5.595.000	2	2.840.000	2	750.000	100,00	26,41	6	6.345.000	50,00	18,12	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	831.377.261	4	362.423.400	2	15.016.200		-	0,00	0,00	4	362.423.400	33,33	43,59	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1,6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.133.399.400**	**100,00**	**217.784.510**	**100,00**	**120.070.137**	**100,00**	**50.640.000**	**100,00**	**42,18**	**100,00**	**268.424.510**	**100,00**	**23,68**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	1.133.399.400	2	217.784.510	1	120.070.137	1	50.640.000	100,00	42,18	3	268.424.510	25,00	23,68	
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah ber-KTP**	**97,83 %**	**3.508.644.958**	**98,43**	**789.942.002**	**98,32**	**210.209.974**	**86,25**	**91.245.680**	**87,72**	**43,41**	**92,34**	**881.187.682**	**94,39**	**25,11**	
		Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	**97,83 %**		**25,47**		**34,91**		**9,58**				**17,52**	**-**	**17,91**		
2,1	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Terpenuhi Dokumen KK, Ktp dan KIA untuk masrakakat**	**97,83 %**	**3.508.644.958**	**100,00**	**789.942.002**	**97,83**	**210.209.974**	**100,00**	**91.245.680**	**102,22**	**43,41**	**100,00**	**881.187.682**	**102,22**	**25,11**	
2.1.1	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan PelayananPenyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	6000 Org	1.364.739.341	3000	450.716.602	1500	77.116.900	1500	60.598.680	100,00	78,58	4500	511.315.282	75,00	37,47	
2.1.1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6 Lap	1.229.193.159	2	109.575.420	1	89.217.574	1	20.338.000	100,00	22,80	3	129.913.420	50,00	10,57	
2.1.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	6000 Lap	914.712.458	1195	229.649.980	5000	43.875.500	5000	10.309.000	100,00	23,50	6195	239.958.980	103,25	26,23	
2.1.3	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil pelaporan Peristiwa Kependudukan		-	0	-							0	-			
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentasi anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir**	**98,18 %**	**1.816.187.778**	**93,65**	**183.772.360**	**96,01**	**106.919.000**	**92,04**	**16.703.000**		**15,62**	**92,85**	**200.475.360**	**94,57**	**11,04**	
3,1	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Terpenuhi Dokumen Akte Nikah, Akte Lahir, Akte Kematia dan Perceraian**	**95,29 %**	**1.816.187.778**	**96,65**	**183.772.360**	**100,00**	**106.919.000**	**100,00**	**16.703.000**		**15,62**	**98,33**	**200.475.360**	**103,19**	**11,04**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7000 Dok	1.687.502.437	2000	183.772.360	3000	106.919.000	3000	16.703.000	100,00	15,62	5000	200.475.360	71,43	11,88	
3.1.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	17 Kec	128.685.341	0	-							0	-	0,00	0,00	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentasi Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama**	**27,20 %**	**4.990.908.826**	**19,89**	**1.338.963.678**	**20,80**	**758.056.918**	**23,68**	**559.501.400**	**113,85**	**73,81**	**21,78**	**1.898.465.078**	**80,09**	**38,04**	
4,1	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Update Data Kependudukan dan Pemeliharaan Server Jaringan**	**27,20 %**	**4.990.908.826**	**58,35**	**1.338.963.678**	**100,00**	**758.056.918**	**140,00**	**559.501.400**	**140,00**	**73,81**	**99,18**	**1.898.465.078**	**364,61**	**38,04**	
4.1.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	250 Buku	1.873.696.504	65	656.200.678	50	404.676.900	50	398.700.400	100,00	98,52	115	1.054.901.078	46,00	56,30	
4.1.2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	25 Dok	2.490.370.553	6	682.763.000	5	353.380.018	9	160.801.000	180,00	45,50	15	843.564.000	60,00	33,87	
4.1.3	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk		5 Dok	520.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
4.1.4	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil		5 Dok	106.841.769	0	-							0	-	0,00	0,00	
4,2	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Meninkatnaya Pengetahuan Tentang UU Admiinitrasi Kependudukan**	**100 %**	**633.630.879**	**50**	**122.455.750**		-		-			**25,00**	**122.455.750**	**25,00**	**19,33**	
4.2.1	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Lap	633.630.879	1	122.455.750							1	122.455.750	20,00	19,33	
										Rata - rata Capaian Kinerja (%)		**92,39**		**49,58**			
										Predikat Kinerja		**ST**		**SR**			
Jumlah Total				**26.466.648.871**		**7.514.985.527**		**4.023.264.889**		**2.447.750.154**		**60,84**		**9.962.735.681**			

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta	Indeks Ketahanan Ekonomi	47,10	49,64	105,39
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar																
	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**90,00 %**	**35.692.582.448**	**84,01**	**10.294.267.143**	**90,00**	**6.422.727.349**		**4.404.594.528**	**0,00**	**68,58**	**42,00**	**14.698.861.671**	**46,67**	**41,18**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**523.184.994**	**98,72**	**116.889.856**		-		-			**49,36**	**116.889.856**	**49,36**	**22,34**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	10 Dok	463.168.604	4	89.940.056							4	89.940.056	40,00	19,42	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian hasil kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 Lap	60.016.390	8	26.949.800							8	26.949.800	40,00	44,90	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**31.330.739.104**	**78,41**	**9.411.768.867**	**100,00**	**5.444.552.825**		**3.680.311.760**	**0,00**	**67,60**	**39,20**	**13.092.080.627**	**39,20**	**41,79**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	60 Bln	31.263.047.104	12	9.403.521.867	12	5.444.552.825		3.680.311.760	0,00	67,60	12	13.083.833.627	20,00	41,85	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan	90 Lap	67.692.000	22	8.247.000							22	8.247.000	24,44	12,18	
1,3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah (persen)**			**0,00**	-		-		-			**0,00**	-			
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD			0,00	-							0	-			

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00	-							0	-			
1,4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**446.755.296**	**12,50**	**31.065.729**	**100,00**	**47.222.000**		**-**	**0,00**	**0,00**	**6,25**	**31.065.729**	**6,25**	**6,95**	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	160 Pkt	185.640.000	0,00	-	30	47.222.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Org	261.115.296	2,00	31.065.729							2	31.065.729	10,00	11,90	
1,5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95,00 %**	**1.612.837.145**	**81,67**	**346.643.612**	**100,00**	**519.350.000**		**438.010.095**	**0,00**	**84,34**	**40,83**	**784.653.707**	**42,98**	**48,65**	
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Pkt	266.004.000	1	23.750.000							1	23.750.000	20,00	8,93	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	5 Pkt	122.478.212	2	46.523.262	1	70.662.800		70.518.595	0,00	99,80	2	117.041.857	40,00	95,56	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Pkt	96.914.600	2	36.055.600	1	49.547.600		25.022.500	0,00	50,50	2	61.078.100	40,00	63,02	
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dok	84.636.200	2	22.069.750	1	27.000.000		18.000.000	0,00	66,67	2	40.069.750	40,00	47,34	
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Lap	68.334.614	2	25.315.000	1	86.489.600		38.887.000	0,00	44,96	2	64.202.000	40,00	93,95	
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	974.469.519	2	192.930.000	1	285.650.000		285.582.000	0,00	99,98	2	478.512.000	40,00	49,10	
1,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100,00 %**	**955.212.576**	**100,00**	**167.407.929**	**100,00**	**152.108.024**		**55.061.175**	**0,00**	**36,20**	**50,00**	**222.469.104**	**50,00**	**23,29**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Lap	700.150.666	2	149.147.679	1	117.040.020		39.013.340	0,00	33,33	2	188.161.019	40,00	26,87	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Lap	78.228.000	2	2.412.000	1	4.800.000		2.700.000	0,00	56,25	2	5.112.000	40,00	6,53	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Lap	111.050.540	2	7.506.000	1	6.860.000		3.594.500	0,00	52,40	2	11.100.500	40,00	10,00	
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Lap	65.783.370	2	8.342.250	1	23.408.004		9.753.335	0,00	41,67	2	18.095.585	40,00	27,51	
1,7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00 %**	**823.853.333**	**100,00**	**220.491.150**	**100,00**	**259.494.500**		**231.211.498**	**0,00**	**89,10**	**50,00**	**451.702.648**	**50,00**	**54,83**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Tahun Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Tahun	823.853.333	2	220.491.150	1	259.494.500		231.211.498	0,00	89,10	2	451.702.648	40,00	54,83	
2	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa berstatus IDM Tertinggal dan Sangat Tertinggal**	**2,76 %**	**1.517.153.400**	**51,53**	**585.000.000**		-		-			**25,76**	**585.000.000**	**933,43**	**38,56**	
2,1	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase Capaian Penataan Desa kategori Kurang Berkembang**	**100,00 %**	**1.517.153.400**	**105,88**	**585.000.000**		-		-			**52,94**	**585.000.000**	**52,94**	**38,56**	
2.1.1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	55 Desa	400.000.000	0	530.000.000							0	530.000.000	0,00	132,50	
2.1.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	11 Desa	886.828.500	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.1.3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	10 Desa	35.000.000	0	55.000.000							0	55.000.000	0,00	157,14	
2.1.4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	11 Desa	195.324.900	0	-							0	-	0,00	0,00	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Desa berstatus IDM Maju dan Mandiri**	**25 %**	**953.450.000**	**4,59**	**192.476.000**	**8,57**	**236.095.000**		**228.239.463**	**0,00**	**96,67**	**2,30**	**420.715.463**	**9,18**	**44,13**	
3,1	**Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Kerja Sama Antar Desa**	**100,00 %**	**953.450.000**	**50**	**192.476.000**	**100**	**236.095.000**		**228.239.463**	**0,00**	**96,67**	**25,00**	**420.715.463**	**25,00**	**44,13**	
3.1.1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dok	400.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.1.2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dok	553.450.000	1	192.476.000	1	236.095.000		228.239.463	0,00	96,67	1	420.715.463	20,00	76,02	
4	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa berstatus IDM minimal Berkembang**	**72,4 %**	**6.673.180.560**	**46,18**	**1.657.332.760**	**58,60**	**1.424.720.000**		**207.283.685**	**0,00**	**14,55**	**23,09**	**1.864.616.445**	**31,89**	**27,94**	
4,1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Capaian Administrasi Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi Penyelenggaraannya**	**100,00 %**	**6.673.180.560**	**83**	**1.657.332.760**	**100**	**1.424.720.000**		**207.283.685**	**0,00**	**14,55**	**41,67**	**1.864.616.445**	**41,67**	**27,94**	
4.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	5 Dok	1.200.000.000	1	350.350.000	1	1.424.720.000		207.283.685	0,00	14,55	1	557.633.685	20,00	46,47	
4.1.2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	900 Org	630.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
4.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4 Lap	363.750.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
4.1.4	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	3 Lap	3.399.999.560	1	992.957.760							1	992.957.760	33,33	29,20	
4.1.5	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kec	-	0	58.723.000							0	58.723.000			
4.1.6	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dok	1.079.431.000	2	255.302.000							2	255.302.000	40,00	23,65	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Desa berkategori IDM dimensi Ekonomi minimal Berkembang**	**60,20 %**	**5.492.919.000**	**30,63**	**1.072.271.000**	**35,70**	**736.872.500**		**444.525.500**	**0,00**	**60,33**	**15,31**	**1.516.796.500**	**25,44**	**27,61**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5,1	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Ketersediaan Dokumen dan Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Halmahera Utara**	**100,00 %**	**5.492.919.000**	**100,00**	**1.072.271.000**	**100**	**736.872.500**		**444.525.500**	**0,00**	**60,33**	**50,00**	**1.516.796.500**	**50,00**	**27,61**	
5.1.1	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Lap	150.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
5.1.2	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 Lap	800.000.000	0	-	1	147.588.500		106.075.500	0,00	71,87	0	106.075.500	0,00	13,26	
5.1.3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dok	4.542.919.000	2	1.072.271.000	1	589.284.000		338.450.000	0,00	57,43	2	1.410.721.000	40,00	31,05	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)											**0,00**	**58,27**			**47,00**	**35,62**	
Predikat Kinerja											**SR**	**SR**					
Jumlah Total				**50.329.285.408**		**13.801.346.903**		**8.820.414.849**		**5.284.643.176**		**59,91**		**19.085.990.079**		**37,92**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,65	74,06	104,83
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Penunjang																	
	Dinas Perhubungan																	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (persen)**	**90**	**Persen**	**29.252.759.985**	**79**	**9.775.492.629**	**90**	**6.306.408.905**	**71,47**	**4.685.316.267**	**79,41**	**74,29**	**75,07**	**14.460.808.896**	**83,41**	**49,43**	**DISHUB**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (persen)**	**100**	**Persen**	**58.292.901**	**98**	**19.522.500**	**100**	**9.506.900**	**100,00**	**9.506.900**	**100,00**	**100,00**	**98,89**	**29.029.400**	**98,89**	**49,80**	**DISHUB**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	31.217.593	5	10.322.500	2	5.038.600	2	5.038.600	100,00	100,00	7	15.361.100	70,00	49,21	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	27.075.308	3	9.200.000	2	4.468.300	2	4.468.300	100,00	100,00	5	13.668.300	50,00	50,48	
1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**130.000.000**	**0**	-							**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**DISHUB**
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Besert	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**2**	Paket	130.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.3	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**24.389.310.608**	**72,54**	**8.749.602.865**	**100**	**4.101.474.910**	**59,45**	**3.473.532.578**	**59,45**	**84,69**	**66,00**	**12.223.135.443**	**66,00**	**50,12**	**DISHUB**
3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	256	Orang	24.389.310.608	102	8.749.602.865	50	4.101.474.910	50	3.473.532.578	100,00	84,69	152	12.223.135.443	59,38	50,12	
1.3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**prosentase BMD pada perangkat daerah yg tercatat pada SIMDA (persen)**						**100**	**4.468.395**	**100**	**4.468.395**	**100,00**	**100,00**	**100**	**4.468.395**			**DISHUB**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						8	4.468.395	8	4.468.395	100,00	100,00	8	4.468.395			
1.4.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)**						**100**	**79.436.500**	**100**	**79.326.000**	**100,00**	**99,86**	**100**	**79.326.000**			**DISHUB**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						1	79.436.500	1	79.326.000	100,00	99,86	1	79.326.000			
14	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**2.342.670.382**	**50**	**600.829.000**	**100**	**338.009.200**	**98,18**	**270.425.975**	**98,18**	**80,01**	**73,89**	**871.254.975**	**73,89**	**37,19**	**DISHUB**
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	28.245.000	2	8.613.000	1	4.625.000	1	4.625.000	100,00	100,00	3	13.238.000	60,00	46,87	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	315.745.000	1	66.072.000	1	34.551.400	1	29.675.100	100,00	85,89	2	95.747.100	40,00	30,32	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kant	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	139.826.113	2	36.631.000	1	25.062.800	1	25.057.800	100,00	99,98	3	61.688.800	60,00	44,12	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	362.791.269	2	113.425.000	1	62.788.000	1	62.788.000	100,00	100,00	3	176.213.000	60,00	48,57	
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dokumen	100.922.000	5	21.500.000	2	16.000.000	2	13.000.000	100,00	81,25	7	34.500.000	70,00	34,18	
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	122.305.000	2	38.520.000	1	19.680.000	1	19.660.000	100,00	99,90	3	58.180.000	60,00	47,57	
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188	Laporan	1.272.836.000	56	316.068.000	55	175.302.000	48	115.620.075	87,27	65,95	52	431.688.075	27,53	33,92	
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Peningkatan Jumlah BMD**	**100**	**Persen**	**325.000.000**	**0**	-	**100**	**703.089.000**	**50,00**	**312.143.770**	**50,00**	**44,40**	**25,00**	**312.143.770**	**0,00**	**0,00**	**DISHUB**
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1	354.547.000	0,00		0,00	0,00	0				
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13	Paket	195.000.000	0	-	13	65.000.000	13	64987170,00	100,00	99,98	13	64.987.170	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor bangunan lainnya yang disediakan	2	Unit	130.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.5.4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan						1	283.542.000	1	247156600,00	100,00	87,17	1				
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**1.260.241.104**	**100**	**257.944.412**	**100**	**205.083.300**	**100,00**	**106.034.649**	**100,00**	**51,70**	**100,00**	**363.979.061**	**100,00**	**28,88**	**DISHUB**
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54	Laporan	436.368.104	18	119.390.000	9	69.840.000	9	29.100.000	100,00	41,67	27	148.490.000	50,00	34,03	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	Laporan	421.199.000	6	35.220.412	3	67.858.000	3	44.129.349	100,00	65,03	9	79.349.761	60,00	18,84	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	402.674.000	2	103.334.000	1	67.385.300	1	32.805.300	100,00	48,68	3	136.139.300	60,00	33,81	
1,7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**747.244.990**	**89**	**147.593.852**	**100**	**865.340.700**	**100,00**	**429.878.000**	**100,00**	**49,68**	**94,44**	**577.471.852**	**94,44**	**77,28**	**DISHUB**
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45	Unit	635.244.990	17	124.593.852	9	99.395.700	9	66.868.000	100,00	67,27	26	191.461.852	57,78	30,14	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74	Unit	112.000.000	39	23.000.000	14	17.910.000	14	7.910.000	100,00	44,17	53	30.910.000	71,62	27,60	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi						1	748.035.000	1	355.100.000	100,00	47,47	1	355.100.000			
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio Izin Trayek (per 1000 Penduduk)**	**1,1**	**Persen**	**6.204.757.180**	**1,20**	**3.639.083.000**	**1,0**	**3.503.927.200**	**0,94**	**1.699.447.000**	**98,95**	**48,50**	**2,14**	**5.338.530.000**	**194,55**	**86,04**	**DISHUB**
2,1	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Terminal PenumpanTipe C yang dikelola (persen)**	**100**	**Persen**	**1.756.370.000**	**80**	**874.791.000**	**100**	**359.164.000**	**100,00**	**313.664.000**	**100,00**	**87,33**	**90,00**	**1.188.455.000**	**90,00**	**67,67**	**DISHUB**

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara)	24	Unit	1.756.370.000	9	874.791.000	4	359.164.000	4	313.664.000	100,00	87,33	13	1.188.455.000	54,17	67,67	DISHUB
2,2	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji KIR (persen)**	**89,10**	**Persen**	**406.274.000**	**59,53**	**260.150.000**	**88,20**	**1.952.969.400**	**26,60**	**937.491.200**	**30,16**	**48,00**	**86,13**	**1.197.641.200**	**96,67**	**294,79**	**DISHUB**
2.2.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	**1**	Unit	201.000.000	1	194.000.000							1	194.000.000	100,00	96,52	DISHUB
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						1	23.999.400	0	0	0,00	0,00	0	-			
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara						7	1.894.240.000	7	902.761.200	100,00	47,66	7	902.761.200			
2.2.2	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6	Laporan	205.274.000	3	66.150.000	1	34.730.000	1	34.730.000	100,00	100,00	4	100.880.000	66,67	49,14	
2,3	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase berkurangnya lokasi rawan kecelakaan (persen)**	**60,9**	**Persen**	**974.833.180**	**33,16**	**1.216.202.000**	**26,10**	**158.502.000**	**21,74**	**105.000.000**	**83,29**	**66,25**	**54,90**	**1.321.202.000**	**90,15**	**135,53**	**DISHUB**
2.3.1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	294	Unit	974.833.180	89	1.216.202.000	35	53.502.000	0	0	0,00	0,00	89	1.216.202.000	30,27	124,76	DISHUB
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						1	105.000.000	1	105.000.000	100,00	100,00	1	105.000.000			
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Jumlah pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**						**1**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	-			**DISHUB**

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor						1	10.000.000	0	0	0,00	0,00	0	-			
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						1	15.000.000	0	0	0,00	0,00	0	-			
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten (persen)**						**100**	**350.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	-			**DISHUB**
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia						1	350.000.000	0	0	0,00	0,00	0	-			
2,4	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten (persen)**	**17,4**	**Persen**	**3.067.280.000**	**33,5**	**1.287.940.000**	**100,00**	**658.291.800**		**343.291.800**	**0,00**	**52,15**	**33,53**	**1.631.231.800**	**192,70**	**53,18**	**DISHUB**
2.4.1	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12	Laporan	2.515.840.000	4	1.104.210.000							4	1.104.210.000	33,33	43,89	DISHUB

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.4.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Laporan	551.440.000	4	183.730.000	2	658.291.800	2	343.291.800	100,00	52,15	6	527.021.800	50,00	95,57	DISHUB
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Pertumbuhan volume penumpang angkutan laut/pelayaran (persen)**	**21**	**Persen**	**62.570.317.843**	**18,16**	**16.997.868.776**	**21,00**	**3.572.699.553**	**19,10**	**3.425.409.553**	**90,95**	**95,88**	**18,63**	**20.423.278.329**	**88,71**	**32,64**	**DISHUB**
		Pertumbuhan Volume barang angkutan laut/pelayaran	**11**		-	**11**	-	**11**		**13**		**118,18**		**11,75**	-	**106,82**		**DISHUB**
3,1	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten /Kota**						**1**	**22.500.000**	**0,00**	-							
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota						1	22.500.000	0,00	-							
3,2	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten /Kota**	**Prosentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten /Kota (persen)**						**100**	**25.852.000**		-							
3.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						1	25.852.000		-							

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3,3	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Tingkat ketersediaan pelabuhan pengumpan lokal**	**37,5**	**Persen**	**8.733.802.177**	**0**	-	**12,50**	**98.938.000**		-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**DISHUB**
3.3.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	10	Unit	8.733.802.177	0	-							0	-	0,00	0,00	
3.3.2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun						1	98.938.000	0,00	-							
3,4	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana transportasi angkutan Sungai dan Danau (persen)**	**100**	**Persen**	**53.836.515.666**	**50**	**16.997.868.776**	**80,00**	**3.425.409.553**	**80,00**	**3.425.409.553**	**100,00**	**100,00**	**65,00**	**20.423.278.329**	**65,00**	**37,94**	**DISHUB**
3.4.1	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	4	Unit	11.772.420.000	1	247.803.203	1	79.616.797	1	79.616.797	100,00	100,00	2	327.420.000	50,00	2,78	
3.4.2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	6	Unit	42.064.095.666	2	16.750.065.573	1	3.345.792.756	1	3.345.792.756	100,00	100,00	3	20.095.858.329	50,00	47,77	
											RATA- RATA CAPAIAN KINERJA %	**77,28**	**65,17**			**62,09**	**49,03**	
											PREDIKAT KERJA	**T**	**T**					
					98.027.835.008		**30.412.444.405**		**13.383.035.658**		**9.810.172.820**		**73,30**		**40.222.617.225**		**41,03**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,65	74,06	104,83
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(9/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**	**90**	**Persen**	**18.257.226.629**	**64,44**	**4.437.981.622**	**90,00**	**2.683.839.458**	**63,83**	**1.765.310.841**	**70,92**	**65,78**	**64,14**	**6.203.292.463**	**71,26**	**33,98**	
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**63.090.000**	**100**	**12.050.000**	**100,00**	**8.990.400**	**100,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**12.050.000**	**100,00**	**19,10**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	16	Dokumen	17.000.000	0	-	3	2.998.600	2	-	66,67	0,00	1	-	6,25	0,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	23.130.000	1	6.090.000	4	2.996.400	4	-	100,00	0,00	5	6.090.000	83,33	26,33	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daer	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Laporan	22.960.000	1	5.960.000	4	2.995.400	4	-	100,00	0,00	5	5.960.000	20,83	25,96	
2,1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**11.544.224.815**	49,87	**3.233.931.587**	**100,00**	**2.027.320.134**	**30,55**	**1.371.963.954**	**30,55**	**67,67**	**40,21**	**4.605.895.541**	**40,21**	**39,90**	
2.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	orang/bln	11.518.224.815	18	3.233.931.587	19	2.024.325.034	18	1.371.963.954	94,74	67,77	18	4.605.895.541	100,00	39,99	
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	24	Laporan	26.000.000	1	-	4	2.995.100	4		100,00	0,00	5	-	20,83	0,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**29.000.000**		-	**100,00**	**5.999.000**	**100,00**	**1.600.000**	**100,00**	**26,67**	**50,00**	**1.600.000**	**50,00**	**5,52**	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	29.000.000			100	5.999.000	1	1.600.000	1,00	26,67	1	1.600.000	100,00	5,52	
3,1	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**583.299.782**	**83,50**	**44.133.254**		-		-			**41,75**	**44.133.254**	**41,75**	**7,57**	
3.1.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16	Paket	207.299.782									0	-	0,00	0,00	
3.1.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19	Orang	376.000.000	4	44.133.254							4	44.133.254	21,05	11,74	
4,1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**3.067.564.013**	**74,70**	**617.904.651**	**100,00**	**315.792.600**	**56,25**	**228.405.887**	**56,25**	**72,33**	**65,48**	**846.310.538**	**65,48**	**27,59**	
4.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	Paket	50.000.000	16	4.327.000	4	4.996.200	4	1.171.000	100,00	23,44	20	5.498.000	83,33	11,00	
4.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Paket	460.558.935	12	256.600.000	4	9.937.700	0	-	-	0,00	12	256.600.000	50,00	55,71	
4.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	Paket	77.831.585	12	2.325.000	4	5.996.600	1	1.500.000	25,00	25,01	13	3.825.000	54,17	4,91	
4.1.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	Paket	86.630.295	16	18.678.000	4	10.000.000	1	5.984.600	25,00	59,85	17	24.662.600	70,83	28,47	
4.1.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18	Dokumen	41.000.000	12	-	3	4.959.500	0	-	-	0,00	12	-	66,67	0,00	
4.1.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	150.000.000	16	17.406.000	4	24.996.000	4	16.706.000	100,00	66,83	20	34.112.000	83,33	22,74	
4.1.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270	Laporan	1.940.301.626	33	318.568.651	4	249.926.000	4	203.044.287	100,00	81,24	37	521.612.938	13,70	26,88	
4.1.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dok	261.241.572			1	4.980.600	1	-	100,00	0,00	1	-	25,00	0,00	
5,1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**2.147.449.000**	**100**	**325.567.000**	**100,00**	**229.738.724**	**100,00**	**88.741.000**	**100,00**	**38,63**	**100,00**	**414.308.000**	**100,00**	**19,29**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Laporan	1.004.444.000	16	308.022.000	4	69.839.700	4	32.819.000	100,00	46,99	20	340.841.000	83,33	33,93	
5.1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Laporan	99.000.000	16	6.950.000	4	9.900.000	4	4.800.000	100,00	48,48	20	11.750.000	83,33	11,87	
5.1.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	1.044.005.000	16	10.595.000	4	149.999.024	4	51.122.000	100,00	34,08	20	61.717.000	83,33	5,91	
6,1	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**822.599.019**	**66,83**	**204.395.130**	**100,00**	**95.998.600**	**66,67**	**74.600.000**	**66,67**	**77,71**	**66,75**	**278.995.130**	**66,75**	**33,92**	
6.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	569.700.000	13	159.575.000	1	78.000.000	1	58.500.000	100,00	75,00	14	218.075.000	233,33	38,28	
6.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	187.899.019	13	44.820.130	1	17.998.600	1	16.100.000	100,00	89,45	14	60.920.130	233,33	32,42	
6.1.3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4	Unit	20.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
6.1.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	45.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PERSENTASE MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEBAR LUASAN INFORMASI PEMERINTAH**	**58,30**	**Persen**	**3.536.550.000**	**83,55**	**472.556.574**	**27,10**	**500.735.900**	**87,42**	**360.632.471**	**322,58**	**72,02**	**85,48**	**833.189.045**	**146,63**	**23,56**	
2,1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**3.536.550.000**	**79,03**	**472.556.574**	**100,00**	**500.735.900**	**47,33**	**360.632.471**	**47,33**	**72,02**	**63,18**	**833.189.045**	**63,18**	**23,56**	
2.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	6	Dokumen	100.000.000	1	10.000.000							1	10.000.000	16,67	10,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.1.2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	6	Dokumen	95.000.000	0	0	1	9.987.000	1	2.910.000	100,00	29,14	1	2.910.000	16,67	3,06	
2.1.3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	51	Dokumen	255.000.000	22	57.640.000	10	15.999.600	0	-	-	0,00	22	57.640.000	43,14	22,60	
2.1.4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	11	Dokumen	309.600.000	2	18.000.000			2				4	18.000.000	36,36	5,81	
2.1.5	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	11	Dokumen	722.750.000	14	124.739.574	2	169.998.600	2	75.172.471	100,00	44,22	16	199.912.045	145,45	27,66	
2.1.6	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	54	Layanan	869.200.000	21	246.217.000	9	115.000.000	9	114.500.000	100,00	99,57	30	360.717.000	55,56	41,50	
2.1.7	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4	Dok	70.000.000									0	-	0,00	0,00	
2.1.8	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12	Dokumen	260.000.000	2	15.960.000	2	4.999.200	2	-	100,00	0,00	4	15.960.000	33,33	6,14	
2.1.9	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas													0	-			
2.1.10	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11	unit	855.000.000	0	-	15	184.751.500	11	168.050.000	73,33	90,96	11	168.050.000	100,00	19,65	
3	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TERAKSES INTERNET MILIK PEMERINTAH**	**96**	**Persen**	**13.296.652.741**	**85,98**	**2.886.382.012**	**64,60**	**1.703.793.200**	**71,95**	**867.604.181**	**111,38**	**50,92**	**78,96**	**3.753.986.193**	**82,43**	**28,23**	
3,1	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**6.924.667.000**	**86,99**	**1.783.969.597**	**100,00**	**819.993.900**	**94,87**	**813.608.251**	**94,87**	**99,22**	**90,93**	**2.597.577.848**	**90,93**	**37,51**	
3.1.1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	1	Domain	87.000.000	1	1.553.516	1	9.995.500	1	4.169.051	100,00	41,71	1	5.722.567	100,00	6,58	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.1.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	Dokumen	87.000.000	1	9.554.000	1	9.999.200	1	9.440.000	100,00	94,41	2	18.994.000	33,33	21,83	
3.1.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	48	unit	6.750.667.000	34	1.772.862.081	26	799.999.200	22	799.999.200	84,62	100,00	56	2.572.861.281	116,67	38,11	
3,2	**Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SPBE (penilaian Menpan-RB Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**Persen**	**6.371.985.741**	**83,89**	**1.102.412.415**	**100,00**	**883.799.300**	**67,79**	**53.995.930**	**67,79**	**6,11**	**75,84**	**1.156.408.345**	**75,84**	**18,15**	
3.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	245.000.000	1	19.936.000	1	29.999.900	1	-	100,00	0,00	2	19.936.000	40,00	8,14	
3.2.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	5	Dok	148.675.000			1	19.989.900	0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	
3.2.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	84	Unit	2.019.504.000	12	119.220.000	14	404.000.000	0	-	-	0,00	12	119.220.000	14,29	5,90	
3.2.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	5	Dokumen	185.000.000	1	49.500.000	1	29.999.900	1	-	100,00	0,00	2	49.500.000	40,00	26,76	
3.2.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	5	Dok	180.000.000			1	19.941.000	1	7.980.000	100,00	40,02	1	7.980.000	20,00	4,43	
3.2.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	41	Perangkat Daerah	250.000.000	24	66.181.329	25	19.941.000	25	15.075.514	100,00	75,60	49	81.256.843	119,51	32,50	
3.2.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	115	Unit	150.000.000	19	49.500.000	19	20.000.000	19	-	100,00	0,00	38	49.500.000	33,04	33,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.2.8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	29	Layanan	150.000.000	17	37.440.000	17	20.000.000	5	4.091.000	29,41	20,46	22	41.531.000	75,86	27,69	
3.2.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	48	Dokumen	2.248.806.741	32	705.560.086	31	279.998.600	4	26.849.416	12,90	9,59	36	732.409.502	75,00	32,57	
		Jumlah Desa Terjangkau Layanan Seluler 4G Untuk menunjang Infrastruktur Ekosisten Kabupaten Cerdas	196	Desa	180.000.000													
3.2.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5	Dok	175.000.000			1	14.973.800	0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	
3.2.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	5	Dok	150.000.000			1	9.957.800	1	-	100,00	0,00	1	-	20,00	0,00	
3.2.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	6	Dokumen	290.000.000	13	55.075.000	1	14.997.400	1	-	100,00	0,00	14	55.075.000	233,33	18,99	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERIMA LAYANAN KEAMANAN INFORMASI DARI DISKOMINFO DAN**	**32**	**Perangkat Daerah**	**1.304.000.000**	**1**	**54.625.051**	**2**	**57.942.000**	**2**	**12.087.486**	**100,00**	**20,86**	**3**	**66.712.537**	**9,38**	**5,12**	
4,1	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Persentase pelaksanaan pelatihan/sosialisasi persandian dan pengamanan informasi pada perangkat daerah**	**32**	**Perangkat Daerah**	**789.000.000**	**1**	**54.625.051**	**2**	**27.992.000**	**2**	**12.087.486**	**100,00**	**43,18**	**3**	**66.712.537**	**9,38**	**8,46**	
4.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5	Dokumen	400.000.000	1	54.625.051							1	54.625.051	20,00	13,66	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	Laporan	229.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
4.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6	Laporan	80.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
4.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15	Perangkat Daerah	80.000.000	0	-	3	27.992.000	2	12.087.486	66,67	43,18	2	12.087.486	13,33	15,11	
4,2	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten**	**Persentase Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten**	**100**	**Persen**	**515.000.000**	**0**	-	**100,00**	**29.950.000**	**0,00**	-	-	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
4.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	15	Perangkat Daerah	515.000.000	0	-	3	29.950.000	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**76,28**	**35,91**			*57,81*	*16,69*	
											Predikat Kinerja	**1**	**SR**					
JUMLAH					**36.394.429.370**		**7.851.545.259**		**4.946.310.558**		**3.005.634.979**		**60,77**		**10.857.180.238**	**57,81**	**29,83**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta	Indeks Ketahanan Ekonomi	47,1	49,64	105,39
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**90,00 %**	**17.473.649.011**	**80,73**	**5.667.671.263**	**90,00**	**3.344.089.156**	**82,98**	**2.240.454.430**	**92,20**	**67,00**	**81,86**	**7.908.125.693**	**90,95**	**45,26**	**Dinas Koperasi dan UKM**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**117.946.108**	**100,00**	**61.580.280**	**100,00**	**12.011.608**	**64,44**	**12.008.000**	**64,44**	**99,97**	**82,22**	**73.588.280**	**82,22**	**62,39**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dok	84.545.206	6	46.569.280	3	8.503.588	3	8.502.000	100,00	99,98	9	55.071.280	50,00	65,14	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dok	33.400.902	2	15.011.000	1	3.508.020	1	3.506.000	100,00	99,94	3	18.517.000	50,00	55,44	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**14.256.012.645**	**68,44**	**4.915.370.455**	**100,00**	**2.965.623.526**	**69,33**	**1.987.584.430**	**69,33**	**67,02**	**68,89**	**6.902.954.885**	**68,89**	**48,42**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	14.223.743.891	12	4.902.120.455	12	2.961.810.426	12	1.983.771.430	100,00	66,98	12	6.885.891.885	100,00	48,41	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Lap	32.268.754	2	13.250.000	1	3.813.100	1	3.813.000	100,00	100,00	3	17.063.000	50,00	52,88	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**577.395.549**	**26,67**	**106.717.520**				-			**13,33**	**106.717.520**	**13,33**	**18,48**	
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	82 Orang	577.395.549	8,00	106.717.520							8	106.717.520	9,76	18,48	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.019.099.530**	**60,00**	**184.915.420**	**100,00**	**124.583.800**	**100**	**107.067.000**	**100,00**	**85,94**	**80,00**	**291.982.420**	**80,00**	**28,65**	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Item	153.000.000	6	55.193.600							0	55.193.600	0,00	36,07	
1.4.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Thn	73.459.146	1	9.200.000	1	12.000.000	1	10.201.000	100,00	85,01	1	19.401.000	100,00	26,41	
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bln	77.442.629	0	1.300.000	12	12.000.000	0	-	0,00	0,00	0	1.300.000	0,00	1,68	
1.4.4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	360 Tamu	36.000.000	1	2.235.000	1	5.985.600	1	5.372.000	100,00	89,75	2	7.607.000	0,56	21,13	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Lap	679.197.755	23	116.986.820	1	94.598.200	1	91.494.000	100,00	96,72	24	208.480.820	51,61	30,70	
1,5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**945.570.698**	**75,00**	**212.205.728**	**100,00**	**159.885.022**	**100,00**	**90.889.000**	**100,00**	**56,85**	**87,50**	**303.094.728**	**87,50**	**32,05**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	671.859.522	12	161.040.000	12	114.885.985	12	60.003.000	100,00	52,23	12	221.043.000	100,00	32,90	
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bln	273.711.176	12	51.165.728	12	44.999.037	12	30.886.000	100,00	68,64	12	82.051.728	100,00	29,98	
1,6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**557.624.481**	**75,00**	**186.881.860**	**100,00**	**81.985.200**	**50,00**	**42.906.000**	**50,00**	**52,33**	**62,50**	**229.787.860**	**62,50**	**41,21**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Bln	550.524.481	12	186.731.860	12	81.985.200	6	42.906.000	50,00	52,33	6	229.637.860	50,00	41,71	
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bln	7.100.000	0	150.000							0	150.000	0,00	2,11	
	Bidang Urusan Koperasi					-								-			
2	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Presentase permohonan perizinan usaha simpan pinjam yang ditidaklanjuti /selesaikan**	**100,00 %**	**904.990.833**	**100,00**	**229.718.000**	**100,00**	**136.280.000**	**100,00**	**54.500.000**	**100,00**	**39,99**	**100,00**	**284.218.000**	**100,00**	**31,41**	
2,1	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan**	**100,00 %**	**904.990.833**	**100,00**	**167.158.000**	**100**	**136.280.000**	**100,00**	**54.500.000**	**100,00**	**39,99**	**100,00**	**221.658.000**	**100,00**	**24,49**	
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	109 Usaha	904.990.833	19	167.158.000	15	136.280.000	15	54.500.000	100,00	39,99	34	221.658.000	31,19	24,49	
2,2	**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Rekomendasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang yang diterbitkan**			**50**	**62.560.000**							**25,00**	**62.560.000**			
2.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2	62.560.000							2	62.560.000			
3	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Presentasi koperasi aktif**	**60,22 %**	**1.313.338.250**	**49,42**	**829.812.250**	**52,02**	**299.999.200**	**52,46**	**53.500.000**	**100,84**	**17,83**	**52,46**	**883.312.250**	**87,11**	**67,26**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3,1	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Anggota Koperasi yang Mengikuti Pelatihan**	**450 Orsng**	**1.313.338.250**	**270**	**829.812.250**	**90**	**299.999.200**	**90,00**	**53.500.000**	**100,00**	**17,83**	**360**	883.312.250	80,00	67,26	
3.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	520 Orang	1.313.338.250	270	829.812.250	90	299.999.200	90	53.500.000	100,00	17,83	360	883.312.250	69,23	67,26	
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Pertumbhan volume usaha koperasi**	**9,05 %**	**950.000.000**	**5,65**	-							**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
4,1	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi**	**60,00 %**	**950.000.000**	**40,00**	-							**0,00**	-	0,00	0,00	
4.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaa	225 Orang	950.000.000	45	124.946.842							45	124.946.842	20,00	13,15	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Pertumbuhan jumlah usaha kecil mikro (persen)**	**10,26 %**	**1.321.052.499**		**395.522.499**	**46,54**	**124.946.842**	**5,00**	**124.946.842**	**10,74**	**100,00**		**520.469.341**	**0,00**	**39,40**	
5,1	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifakasi produk usaha**	**40,00 %**	**1.321.052.499**		**395.522.499**	**30,00**	**124.946.842**	**0,00**	**124.946.842**	**0,00**	**100,00**		**520.469.341**	**0,00**	**39,40**	
5.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1702 Usaha	946.052.499	1131	293.647.499	4800	124.946.842,00	4456	124.946.842,00	92,83	100,00	5587	418.594.341	328,26	44,25	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.1.2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	600 Usaha	300.000.000	45	101.875.000							45	101.875.000	7,50	33,96	
5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	20 orang	75.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Perkembangan jumlah UMKM (kumulatif)**	**5317 UKM**	**11.569.002.498**	**4613**	**3.274.680.000**							**0,00**	**3.274.680.000**	**0,00**	**28,31**	
6,1	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**38,00 %**	**11.569.002.498**	**0,00**	**3.274.680.000**							**0,00**	**3.274.680.000**	**0,00**	**28,31**	
6.1.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	937 Unit	11.569.002.498	100	3.274.680.000							100	3.274.680.000	10,67	28,31	
7	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi aktif yang diawasi**	**60 %**	**1.355.350.000**	**26**	**124.748.000**							**0,00**	124.748.000	**0,00**	**9,20**	
7,1	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan koperasi aktif yang diperiksa dan diawasi**	**0,60 %**	**1.355.350.000**	**0,20**	**124.748.000**							**0,00**	124.748.000	**0,00**	**9,20**	
7.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	266 Usaha	675.350.000	17	124.748.000							17	124.748.000	6,39	18,47	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten /Kota Kinerja	225 Usaha	680.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
8	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase koperasi sehat**	**17 %**	**738.000.000**	**15,50**	**-**	**14,68**	**127.000.000**	**12,50**	**125.490.000**	**85,15**	**98,81**	**28**	**125.490.000**	**164,80**	**17,00**	
8,1	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya**	**100 %**	**738.000.000**	**0**	**-**	**100,00**	**127.000.000**	**100,00**	**125.490.000**	**100,00**	**98,81**	**50,00**	**125.490.000**	**50,00**	**17,00**	
8.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	266 Usaha	623.000.000	0	-	191	127.000.000	191	125.490.000	100,00	98,81	191	125.490.000	71,80	20,14	
8.1.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	15 Kop	115.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
										Rata - rata Capaian Kinerja (%)	**83,29**	**69,33**			**49,44**	**29,73**	
										Predikat Kinerja	**T**	**S**					
Jumlah Total				**35.625.383.091**		**10.522.152.012**		**4.032.315.198**		**2.598.891.272**		**64,45**		**13.121.043.284**		**36,83**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya transformasi struktural dan daya	Pertumbuhan investasi PMTB (persen)	6,49	-32,1	-20,22
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar																
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**90,00 %**	**20.825.077.933**	**77,86**	**6.034.434.039**	**90,00**	**3.890.041.300**	**N/A**	**2.381.118.296**	**N/A**	**61,21**	**38,93**	**8.415.552.335**	**43,26**	**40,41**	**DPM-PTSP**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**203.918.281**	**100,00**	**13.060.000**	**100,00**	**31.577.500**	**N/A**	**11.944.000**	**N/A**	**37,82**	**50,00**	**25.004.000**	**50,00**	**12,26**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dok	62.402.527	7	9.100.000	3	8.673.600	N/A	6.422.100	N/A	74,04	7	15.522.100	35,00	24,87	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	8.025.690	1	-	1	935.700	N/A	935.700	N/A	100,00	1	935.700	16,67	11,66	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	3.866.803	0	-	1	935.700	N/A	935.700	N/A	100,00	0	935.700	0,00		
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dok	3.871.478	0	-		935.700	N/A	935.700	N/A	100,00	0	935.700	0,00		
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dok	3.867.290	0	-		935.700	N/A	935.700	N/A	100,00	0	935.700	0,00		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	104.679.897	1	3.960.000	1	15.023.100	N/A	1.779.100	N/A	11,84	1	5.739.100	16,67	5,48	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Lap	17.204.595	0	-	N/A	4.138.000	N/A	-	N/A	0,00	0	-	0,00	0,00	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**14.272.509.627**	**86,13**	**4.579.458.533**	**N/A**	**2.859.589.700**	**N/A**	**1.827.770.634**	**N/A**	**63,92**	**43,06**	**6.407.229.167**	**43,06**	**44,89**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2044 Org	14.250.165.560	644	4.579.458.533	N/A	2.857.718.900	N/A	1.826.244.734	N/A	63,91	644	6.405.703.267	31,51	44,95	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Lap	12.686.974	2	-	N/A	935.400	N/A	935.400	N/A	100,00	2	935.400	33,33	7,37	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	108 Lap	9.657.093	36	-	N/A	935.400	N/A	590.500	N/A	63,13	36	590.500	33,33	6,11	
1,3	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengadaan BMD pada perangkat Daerah**	**100,00 %**	**333.584.338**	**83,34**	**182.360.000**	**N/A**	**23.240.000**	**N/A**	**21.176.000**	**N/A**	**91,12**	**41,67**	**203.536.000**	**41,67**	**61,01**	
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dok	329.734.040	2	182.360.000	N/A	**23.240.000**	N/A	**21.176.000**	N/A	91,12	2	203.536.000	33,33	61,73	
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Lap	3.850.298	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
1,4	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Rasio Efektifitas retribusi IMB /Minuman beralkohol Trayek (persen)**	**100 %**	**533.438.827**	**54**	**136.698.000**	**N/A**	**72.922.000**	**N/A**	-	**N/A**	**0,00**	**27,18**	**136.698.000**	**27,18**	**25,63**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.4.1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	6 Dok	50.000.000			N/A	71.767.200	N/A	-	N/A	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.4.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebar luasan Kebijakan Retribusi Daerah	6 Lap	54.309.857			-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
1.4.3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan data objek retribusi	18 Lap	424.485.675	3		-	-	-	-	-	-	3,00	-	16,67	0,00	
1.4.4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	6 Dok	4.643.295			N/A	1.154.800	N/A	-	N/A	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1,5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**64.266.300**	**65,82**	**29.588.000**	-	-	-	-	-	-	**32,91**	**29.588.000**	**32,91**	**46,04**	
1.5.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Org	64.266.300	2	29.588.000	-	-	-	-	-	-	**2**	29.588.000	5,56	46,04	
1,6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.582.541.515**	**100,00**	**350.017.000**	**N/A**	**238.224.300**	**N/A**	**114.431.070**	**N/A**	**48,04**	**50,00**	**464.448.070**	**50,00**	**29,35**	
1.6.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	103.329.021	0	-			-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
1.6.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	300.129.780	2	39.750.000	N/A	50.400.000	N/A	33.376.250	N/A	66,22	2	73.126.250	33,33	24,36	
1.6.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	88.344.733	4	7.700.000	N/A	14.910.000	N/A	3.691.000	N/A	24,76	4	11.391.000	33,33	12,89	
1.6.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Lap	298.104.000	2	74.530.000	N/A	50.392.800	N/A	16.612.100	N/A	32,97	2	91.142.100	33,33	30,57	
1.6.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Lap	792.633.981	6	228.037.000	N/A	122.521.500	N/A	60.751.720	N/A	49,58	6	288.788.720	33,33	36,43	
1,7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**3.166.554.701**	**100,00**	**624.322.506**	**N/A**	**551.802.700**	**N/A**	**376.355.368**	**N/A**	**68,20**	**50,00**	**1.000.677.874**	**50,00**	**31,60**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	1.493.949.539	2	447.445.288	N/A	242.326.600	N/A	191.381.250	N/A	78,98	2	638.826.538	33,33	42,76	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Lap	444.000.020	2	95.397.218	N/A	71.328.600	N/A	42.084.118	N/A	59,00	2	137.481.336	33,33	30,96	
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap	377.442.200	2	81.480.000	N/A	51.907.500	N/A	3.210.000	N/A	6,18	2	84.690.000	33,33	22,44	
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Lap	851.162.942	0	-	N/A	186.240.000	N/A	139.680.000	N/A	75,00	0	139.680.000	0,00	16,41	
1,8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**668.264.344**	**50,00**	**118.930.000**	**N/A**	**112.685.100**	**N/A**	**29.441.224**	**N/A**	**26,13**	**25,00**	**148.371.224**	**25,00**	**22,20**	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	627.067.144	1	116.740.000	N/A	105.758.100	N/A	22.514.224	N/A	21,29	1	139.254.224	16,67	22,21	
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	12 Unit	41.197.200	0	2.190.000	N/A	6.927.000	N/A	6.927.000	N/A	100,00	0	9.117.000	0,00	22,13	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMA MODAL**	**Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMA) (M Rupiah)**	**4392,60 Rp**	**850.000.000**	**0,00**	**-**	**N/A**	**49.999.600**	**N/A**	**49.999.600**	**N/A**	**100,00**	**0**	**49.999.600**	**0,00**	**5,88**	
		Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN) (M Rupiah)	1888,82 Rp		0,00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00		
2,1	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah jenis fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang telah ditetapkan melalui perda/perbup**	**6 Dok**	**450.000.000**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.1.1	Penetapan Kebijakan daerah Mengenai Pembrian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	12 Dok	250.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
2.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	18 Keg	200.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
2,2	**Pembuatan Peta Potensi Insestasi**	**Tersedianya peta potensi investasi**	**6 Peta**	**400.000.000**	**0**	**-**	**N/A**	**49.999.600**	**N/A**	**49.999.600**	**N/A**	100,00	**0**	**49.999.600**	**0,00**	**12,50**	
2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	6 Dok	200.000.000			-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
2.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	6 Dok	200.000.000	0	-	N/A	49.999.600	N/A	49.999.600	N/A	100,00	0	49.999.600	0,00	25,00	
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor berskala nasional (PMA dan PMDN)**	**1641 Invest**	**900.000.000**	**0,00**	**-**	**N/A**	**199.999.200**	**N/A**	**-**	**N/A**	0,00	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	
3,1	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal**	**100 %**	**900.000.000**	**0,00**	**-**	**N/A**	**199.999.200**	**N/A**	**-**	**N/A**	0,00	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	
3.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten /Kota	6 Dok	300.000.000	0	-	N/A	99.999.600	N/A	-	N/A	0,00	0	-	0,00	0,00	
3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dok	600.000.000	0	-	N/A	99.999.600	N/A	-	N/A	0,00	0	-	0,00	0,00	
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP**	**92,50 %**	**465.151.000**	**43**	**65.146.500**	**N/A**	**79.999.900**	**N/A**	**79.999.900**	**N/A**	**100,00**	**21**	**145.146.400**	**23,09**	**31,20**	
4,1	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinana Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal**	**Persentase pengajuan perijinan yang ditindak lanjuti**	**100,00 %**	**465.151.000**	**50**	**65.146.500**	**N/A**	**79.999.900**	**N/A**	**79.999.900**	**N/A**	**100,00**	**25**	**145.146.400**	**25,00**	**31,20**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1010 Org	115.151.000	168	65.146.500	N/A	50.000.000	N/A	50.000.000	N/A	100,00	168	115.146.500	16,67	100,00	
4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1010 Org	113.000.000			-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1010 Org	125.705.280			N/A	29.999.900	N/A	29.999.900	N/A	100,00	0	29.999.900	0,00	23,87	
4.1.4	Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	7 Keg	111.294.720			-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase perusahaan bermasalah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan**	**100 %**	**2.787.604.300**	**100,00**	**522.169.400**	**N/A**	**522.169.400**	**N/A**	**522.169.400**	**N/A**	**100,00**	**50**	1.044.338.800	**50,00**	**37,46**	
5,1	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase penanaman modal yang terpantau dan taat aturan**	**95 %**	**2.787.604.300**	**100**	**522.169.400**	**N/A**	**522.169.400**	**N/A**	**522.169.400**	**N/A**	**100,00**	**50**	1.044.338.800	**52,63**	**37,46**	
5.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelakasanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	109 Pelaku Usaha	352.075.000	15	64.269.300	N/A	64.269.300	N/A	64.269.300	N/A	100,00	15	128.538.600	13,76	36,51	
5.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelakasanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1535 Pelaku Usaha	1.648.711.300	250	303.081.800	N/A	303.081.800	N/A	303.081.800	N/A	100,00	250	606.163.600	16,29	36,77	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.1.3	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelakasanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	109 Pelaku Usaha	786.818.000	26	154.818.300	N/A	154.818.300	N/A	154.818.300	N/A	100,00	26	309.636.600	23,85	39,35	
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Prentase data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sisstem informasi penanaman modal**	**100 %**	**367.500.000**	**85**	**70.799.700**	**N/A**	**70.799.700**	**N/A**	**70.799.700**	**N/A**	**100,00**	**43**	**141.599.400**	**42,50**	**38,53**	
6,1	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi**	**Tersedianya data/informasi perizinan dan non perizinan**	**6964 Izin**	**367.500.000**	**1076**	**70.799.700**	**N/A**	**70.799.700**	**N/A**	**70.799.700**	**N/A**	**100,00**	1076	**141.599.400**	**15,45**	**38,53**	
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Bebasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dok	367.500.000	2	70.799.700	N/A	70.799.700	N/A	70.799.700	N/A	100,00	2	141.599.400	16,67	38,53	
										Rata - rata Capaian Kinerja (%)	**9,00**	**64,29**			**17,95**	**22,30**	
										Predikat Kinerja	**SR**	**R**					
Jumlah Total				**26.195.333.233**		**6.692.549.639**		**4.813.009.100**		**3.104.086.896**		**64,49**		**9.796.636.535**		**37,40**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

c

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas	Indeks Ketahanan Sosial	68,10	68,66	100,82
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar																
	Bidang Pemuda Dan Olah Raga																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**15.752.371.385**	**85,72**	**5.230.102.662**	**100,00**	**2.758.019.999**	**58,07**	**1.594.762.583**	**58,07**	**57,82**	**71,89**	**6.824.865.245**	**71,89**	**43,33**	**Dinas Pemuda Dan Olahraga**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**124.501.650**	**91,25**	**32.501.650**		-		-			**45,63**	**32.501.650**	**45,63**	**26,11**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	18 Dok	35.956.650	6	11.956.650							6	11.956.650	33,33	33,25	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian hasil kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 Lap	43.545.000	6	15.545.000							6	15.545.000	33,33	35,70	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	12 Dok	25.000.000	2	5.000.000							2	5.000.000	16,67	20,00	
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Lap	20.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**12.742.475.470**	**78,45**	**4.402.472.383**	**100,00**	**2.234.097.937**	**60,60**	**1.420.440.482**	**60,60**	**63,58**	**69,52**	**5.822.912.865**	**69,52**	**45,70**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	2990 Bln	12.711.204.470	12	4.391.201.383	598	2.231.397.937	322	1.420.440.482	53,85	63,66	334	5.811.641.865	11,17	45,72	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Dok	31.271.000	2	11.271.000	1	2.700.000	1		100,00	0,00	3	11.271.000	60,00	36,04	
1,3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah (persen)**	**100,00 %**	**24.000.000**	**0,00**	-		-		-			**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	1 Lap	12.000.000	0,00	-							0	-	0,00	0,00	
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	12.000.000	0,00	-							0	-	0,00	0,00	
1,4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**325.923.290**	**50,00**	**29.700.000**		-		-			**25,00**	**29.700.000**	**25,00**	**9,11**	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	1 Pkt	76.959.702	0,00	-							0	-	0,00	0,00	
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumalh orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Org	248.963.588	2,00	29.700.000							2	29.700.000	20,00	11,93	
1,5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**95,00 %**	**775.085.615**	**90,00**	**194.212.158**	**100,00**	**165.400.900**	**59,17**	**60.253.600**	**59,17**	**36,43**	**74,58**	**254.465.758**	**78,51**	**32,83**	
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	30.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12	11.996.700	1	1.997.000	8,33	16,65	1	1.997.000			
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12	4.990.100	2	1.609.300	16,67	32,25	2	1.609.300			
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Pkt	29.000.000	2	6.144.000	12	4.999.900	12	3.999.900	100,00	80,00	14	10.143.900	233,33	34,98	
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dok	29.000.000	2	4.400.000	12	5.000.000	12	5.000.000	100,00	100,00	14	9.400.000	280,00	32,41	
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Lap	60.000.000	2	22.000.000	12	11.971.200	12	8.978.400	100,00	75,00	14	30.978.400	280,00	51,63	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Lap	627.085.615	7	161.668.158	10	126.443.000	3	38.669.000	30,00	30,58	10	200.337.158	33,33	31,95	
1,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.175.554.000**	**100,00**	**464.385.111**	**100,00**	**338.527.562**	**22,22**	**108.274.250**	**22,22**	**31,98**	**61,11**	**572.659.361**	**61,11**	**48,71**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Lap	714.954.000	2	380.400.664	12	229.017.700	6	93.701.650	50,00	40,91	8	474.102.314	160,00	66,31	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	5 Lap	224.180.000	2	25.022.975	12	38.554.362			0,00	0,00	2	25.022.975	40,00	11,16	
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 Lap	77.000.000	1	3.045.000							1	3.045.000	20,00	3,95	
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	5 Lap	159.420.000	2	55.916.472	12	70.955.500	2	14.572.600	16,67	20,54	4	70.489.072	80,00	44,22	
1,7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**584.831.360**	**50,00**	**106.831.360**	**100,00**	**19.993.600**	**100,00**	**5.794.251**	**100,00**	**28,98**	**75,00**	**112.625.611**	**75,00**	**19,26**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	5 Unit	530.000.000	1,00	52.000.000	1	19.993.600	1	5.794.251	100,00	28,98	2	57.794.251	40,00	10,90	
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	54.831.360	0	54.831.360							0	54.831.360	0,00	100,00	
2	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional/ Provinsi**	**23 Org**	**6.735.320.469**	**3**	**1.668.781.000**	**7**	**1.099.998.300**	**32,00**	**1.042.315.685**	**457,14**	**94,76**	**17,50**	**2.711.096.685**	**76,09**	**40,25**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2,1	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Presentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota**	**100,00 %**	**6.400.320.469**	**200,00**	**1.533.781.000**	**100**	**1.099.998.300**	**52,50**	**1.042.315.685**	**52,50**	**94,76**	**126,25**	**2.576.096.685**	**126,25**	**40,25**	
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Yang Ditingkatkan Kapsitas Daya Saingnya	17 Pmd	200.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Yang Ditingkatkan Daya Saingnya	17 Wirausaha	225.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Yang Ditingkatkan Daya Saingnya	17 Pmd	53.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.1.4	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda Yang Berjasa dan/Berprestasi Penerima Penghargaan	150 Pmd	453.000.000	1	36.745.000	20	99.998.300	1	45.000.000	5,00	45,00	2	81.745.000	1,33	18,05	
2.1.5	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota Yang Diseleksi Sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	3500 Pmd	5.469.320.469	1504	1.497.036.000	752	1.000.000.000	60	997.315.685	7,98	99,73	1564	2.494.351.685	44,69	45,61	
2,2	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Peran Aktif Organisasi Pemuda**	**100,00 %**	**335.000.000**	**50,00**	**135.000.000**		-		-			**25,00**	**135.000.000**	**25,00**	**40,30**	
2.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader Yang Terfasilitasi Kemitraan Dengan Dunia Usaha	25 Pmd	200.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2.2.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dok	135.000.000	1	135.000.000							1	135.000.000	100,00	100,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Jumlah Atlet/Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi**	**95 Altet**	**15.371.419.242**	**43**	**8.777.905.120**	**51**	**4.141.979.100**		**3.305.271.400**	**0,00**	**79,80**	**21,50**	**12.083.176.520**	**22,63**	**78,61**	
3,1	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00 %**	**4.849.000.000**	**0**	-	-		-				**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan Dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan	1 Pusat	1.200.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Peyelenggaran Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dok	2.599.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1.050.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
3,2	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00 %**	**3.423.345.022**	**50**	**907.575.900**	**100**	**66.985.800**	**100,00**	**54.280.800**	**100,00**	**81,03**	**75,00**	**961.856.700**	**75,00**	**28,10**	
3.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Pusat	2.299.000.000	1	907.575.900	1	66.985.800	1	54.280.800	100,00	81,03	2	961.856.700	40,00	41,84	
3.2.2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	624.345.022	0	-							0	-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.2.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta Yang Berpartisipasi dalam kegiatan Penyelenggaran Kejuaraan	50 Unit	500.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
3,3	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Presentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**100,00 %**	**1.874.074.220**	**50**	**335.329.220**	**100**	**149.993.300**	**5,00**	**100.990.600**	**5,00**	**67,33**	**27,50**	**436.319.820**	**27,50**	**23,28**	
3.3.1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Altet	400.000.000	0	-							0	-		0,00	
3.3.2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Unit	150.000.000	0	-							0	-		0,00	
3.3.3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	5 Altet	553.140.220	1	233.140.220							1	233.140.220	20,00	42,15	
3.3.4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	5 Altet	570.934.000	1	102.189.000	20	149.993.300	1	100.990.600	5,00	67,33	2	203.179.600	40,00	35,59	
3.3.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Lap	200.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
3,4	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persetase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**100,00 %**	**4.925.000.000**	**63**	**7.535.000.000**	**100**	**3.925.000.000**	**57,14**	**3.150.000.000**	**57,14**	**80,25**	**59,82**	**10.685.000.000**	**59,82**	**216,95**	
3.4.1	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja sama Organisasi Olahraga	40 Dok	4.925.000.000	10	7.535.000.000	14	3.925.000.000	8	3.150.000.000	57,14	80,25	18	10.685.000.000	45,00	216,95	
3,5	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Presentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100,00 %**	**300.000.000**	**0**	-		-		-			**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
3.5.1	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lpaoran Hasil Pembinaan dalm rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Pusat	300.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
4	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Persentase kecamatan yang mempunyai Kwartir Ranting Pramuka aktif**	**100,00 %**	**1.950.000.000**	**100,00**	**495.000.000**	**100**	**510.000.000**	**100,00**	**510.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.005.000.000**	**100,00**	**51,54**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4,1	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Presentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**100,00 %**	**1.950.000.000**	**100,00**	**495.000.000**	**100**	**510.000.000**	**100,00**	**510.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.005.000.000**	**100,00**	**51,54**	
4.1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat daerah yang meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1.600.000.000	3	145.000.000	1	510.000.000	1	510.000.000	100,00	100,00	1	655.000.000	100,00	40,94	
4.1.2	Partisipasi dan Keikut sertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	3 Organisasi	350.000.000	1	350.000.000							1	350.000.000	33,33	100,00	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)											**58,07**	**60,60**			**46,74**	**32,37**	
Predikat Kinerja											**R**	**R**					
Jumlah Total				**39.809.111.096**		**16.171.788.782**		**8.509.997.399**		**6.452.349.668**		**75,82**		**22.624.138.450**		**56,83**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas	Indeks Ketahanan Sosial	68,10	68,66	100,82
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(9/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar																
	Bidang Urusan Perpustakaan																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**30.384.343.895**	**80,01**	**16.114.674.257**	**90,00**	**3.454.827.273**	**84,72**	**2.958.451.393**	**94,13**	**85,63**	**82,36**	**19.073.125.650**	**82,36**	**62,77**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**252.746.586**	**98,72**	**42.571.050**	**100,00**	**10.000.000**	**53,19**	**10.000.000**	**53,19**	**100,00**	**75,95**	**52.571.050**	**75,95**	**20,80**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dok	75.724.086	4	17.217.000	2	5.000.000	2	5.000.000	100,00	100,00	6	22.217.000	54,55	29,34	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	67.003.068	4	15.965.200	1	5.000.000	2	5.000.000	200,00	100,00	6	20.965.200	100,00	31,29	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Lap	110.019.432	2	9.388.850							2	9.388.850	33,33	8,53	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**14.444.504.928**	**83,36**	**4.633.705.923**	**100,00**	**2.482.053.073**	**68,24**	**2.416.200.622**	**68,24**	**97,35**	**75,80**	**7.049.906.545**	**75,80**	**48,81**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang	1800 Org	14.113.822.928	360	4.567.545.923	884	2.429.722.073	465	2.376.960.622	52,60	97,83	825	6.944.506.545	45,83	49,20	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dok	313.985.000	2	66.160.000	1	49.889.000	1	39.240.000	100,00	78,65	3	105.400.000	50,00	33,57	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	16.697.000	0	-	1	2.442.000	1	-	100,00	0,00	1	-	50,00	0,00	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**685.000.000**	**64,29**	**27.403.005**	**100,00**	**111.024.900**		-	**0,00**	**0,00**	**32,14**	**27.403.005**	**32,14**	**4,00**	
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Org	285.000.000	2	27.403.005							2	27.403.005	7,69	9,62	
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan peundang undangan	300 Org	400.000.000			1	111.024.900			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**95,00 %**	**1.361.885.939**	**78,57**	**148.988.193**	**100,00**	**261.590.700**	**80,00**	**159.828.834**	**80,00**	**61,10**	**79,29**	**308.817.027**	**83,46**	**22,68**	
1.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Pkt	209.337.309	2	16.780.000	1	15.000.000	1	15.000.000	100,00	100,00	3	31.780.000	50,00	15,18	
1.4.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Pkt	154.432.370	1	10.900.000	1	6.999.700	1	6.000.000	100,00	85,72	2	16.900.000	33,33	10,94	
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dok	180.617.260	0	-	4	15.000.000		-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Lap	195.200.000	2	28.000.000	1	19.195.000	1	18.000.000	100,00	93,77	3	46.000.000	50,00	23,57	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	622.299.000	6	93.308.193	1	205.396.000	1	120.828.834	100,00	58,83	7	214.137.027	140,00	34,41	
1,5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**10.994.276.552**	**100**	**10.519.472.000**		-		-			**50,00**	**10.519.472.000**	**50,00**	**95,68**	
1.5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.349.999.902	2	10.019.472.000							2	10.019.472.000	66,67	96,81	
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	644.276.650	1	500.000.000							1	500.000.000	25,00	77,61	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**2.034.787.490**	**97,92**	**572.554.086**	**100,00**	**480.764.800**	**100,00**	**273.421.937**	**100,00**	**56,87**	**98,96**	**845.976.023**	**98,96**	**41,58**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Lap	1.170.442.490	23	370.600.000	1	277.420.000	1	192.060.000	100,00	69,23	24	562.660.000	40,00	48,07	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap	719.997.000	12	102.714.086	1	203.344.800	1	81.361.937	100,00	40,01	13	184.076.023	21,67	25,57	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Lap	144.348.000	12	99.240.000							12	99.240.000	20,00	68,75	
1,7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**611.142.400**	**100,00**	**169.980.000**	**100,00**	**109.393.800**	**100,00**	**99.000.000**	**100,00**	**90,50**	**100,00**	**268.980.000**	**100,00**	**44,01**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	527.964.800		-	1	109.393.800	1	99.000.000	100,00	90,50	1	99.000.000	20,00	18,75	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	83.177.600	1	169.980.000							1	169.980.000	100,00	204,36	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	48 Bln	-		-							0	-	0,00		
2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah (Persen)**	**10,00 %**	**5.271.056.267**	**14,83**	**435.611.270**	**10,00**	**1.021.932.200**	**36,39**	**1.021.932.200**	**363,90**	**100,00**	**25,61**	**1.457.543.470**	**256,10**	**27,65**	
2,1	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten**	**Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**17700 Org**	**3.349.604.649**	**13121**	**174.134.990**	**12379**	**1.021.932.200**	**0,00**	**1.021.932.200**	**0,00**	**100,00**	**6561**	**1.196.067.190**	**37,06**	**35,71**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.1.1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya.	40 Perpus Desa	791.800.000		-							0	-	0,00	0,00	
2.1.2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten /Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40 Perpus Sekolah	259.938.084		-							0	-	0,00	0,00	
2.1.3	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpus PT	269.070.660		-							0	-	0,00	0,00	
2.1.4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	150 Org	295.550.000		-							0	-	0,00	0,00	
2.1.5	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	10000 Ekspl	1.351.000.000	1039	99.900.000	1500	1.000.000.000		1.000.000.000	0,00	100,00	1039	1.099.900.000	10,39	81,41	
2.1.6	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	10000 Ekspl	41.968.479	1039	19.984.990	1500	21.932.200	1500	21.932.200	100,00	100,00	2539	41.917.190	25,39	99,88	
2.1.7	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Dok	340.277.426	1	54.250.000							1	54.250.000	20,00	15,94	
2,2	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten**	**Persentase Masyarakat Gemar Membaca**	**100 %**	**1.921.451.618**	**6**	**261.476.280**		-		-			**2,98**	**261.476.280**	**2,98**	**13,61**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.2.1	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	30 Perpus Desa	1.205.079.556	10	261.476.280							10	261.476.280	33,33	21,70	
2.2.2	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	12 Org	716.372.062		-		-					0	-	0,00	0,00	
3	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase keterlaksanaan pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**100,00 %**	**400.000.000**	**0**	-		-					**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
3,1	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Meningkatnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara**	**100,00 %**	**400.000.000**	**0**	-		-					**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
3.1.1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	3000 Org	400.000.000		-							0	-	0,00	0,00	
	Bidang Urusan Kearsipan					-											
4	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah mengelola arsip secara baku (kumulatif)**	**48 PD**	**659.441.835**	**54**	**127.219.000**		-		-			**27,00**	**127.219.000**	**56,25**	**19,29**	
4,1	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten**	**Jumlah Perangkat Daerah yang mengelolah dan Mengakses Arsip melalui Teknologi Informasi SRIKANDI**	**100,00 %**	**302.737.166**	**66**	**58.515.000**		-		-			**33,00**	**58.515.000**	**33,00**	**19,33**	
4.1.1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	6 Berkas	302.737.166	2	58.515.000							2	58.515.000	33,33	19,33	
4,2	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten**	**Jumlah Perangkat Penunjang SRIKANDI (Server, Laptop dll)**	**100,00 %**	**356.704.669**	**8**	**68.704.000**		-		-			**3,75**	**68.704.000**	**3,75**	**19,26**	
4.2.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	48 PD	356.704.669	15	68.704.000							15	68.704.000	31,25	19,26	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase keterlaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip**	**100,00 %**	**455.431.300**	**4**	**55.431.000**		-					**2,08**	**55.431.000**	**2,08**	**12,17**	
5,1	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Meningkatnya Dokumen Arsip Kecamatan yang didata sesuai JRA (Persen)**		-		-		-					**0,00**	-			
5.1.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi diBawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				-							0	-			
5,2	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan**	**Persentase Penyelamatan Dokumen Arsip OPD, Kecamatan, Desa yang Dibubarkan dan dimekarkan**	**100,00 %**	**455.431.300**	**4**	**55.431.000**		-					**2,08**	**55.431.000**	**2,08**	**12,17**	
5.2.1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Daftar	455.431.300	1	55.431.000							1	55.431.000	1,67	12,17	
								Rata - rata Capaian Kinerja (%)			**94,13**	**72,24**			**39,53**	**30,49**	
								Predikat Kinerja			**ST**	**S**					
Jumlah Total				**37.170.273.296**		**16.732.935.527**		**4.476.759.473**		**3.980.383.593**		**88,91**		**20.713.319.120**		**55,73**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya transformasi struktural dan daya	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan	5,14	4,79	93,19
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Pilihan																
	Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**90,00 %**	**23.332.820.584**	**81,65**	**6.762.897.819**	**90,00**	**4.009.557.478**	**68,13**	**2.844.427.817**	**75,70**	**70,94**	**74,89**	**9.607.325.636**	**83,21**	**41,18**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.168.562.822**	**100,00**	**382.132.500**	**100,00**	**307.673.250**	**95**	**289.252.850**	**95,08**	**94,01**	**97,54**	**671.385.350**	**97,54**	**57,45**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dok	358.333.636	6	100.396.500	3	189.631.450	3	186.444.550	100,00	98,32	9	286.841.050	50,00	80,05	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	6 Dok	9.999.900	2	3.999.000	1	1.000.000	1	940.600	100,00	94,06	3	4.939.600	50,00	49,40	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	8.000.000	2	1.360.000	1	1.000.000	1	-	100,00	0,00	3	1.360.000	50,00		
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	6 Dok	6.000.000	2	2.000.000	1	1.000.000	1	745.600	100,00	74,56	3	2.745.600	50,00		
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6 Dok	5.999.850	2	1.999.000	1	999.500	1	-	100,00	0,00	3	1.999.000	50,00		
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	53.307.166	2	8.900.000	1	7.000.000	1	4.081.800	100,00	58,31	3	12.981.800	50,00	24,35	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93 Lap	726.922.270	34	263.478.000	16	107.042.300	16	97.040.300	100,00	90,66	50	360.518.300	53,76	49,60	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**15.081.619.383**	**63,64**	**5.281.518.089**	**100,00**	**3.295.716.680**	**53,31**	**2.209.774.483**	**53,31**	**67,05**	**58,47**	**7.491.292.572**	**58,47**	**49,67**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 OB	15.055.759.534	58	5.279.178.089	32	3.293.466.680	32	2.209.031.683	100,00	67,07	90	7.488.209.772	52,94	49,74	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	6 Lap.	9.499.849	2	600.000	1	750.000	1	-	100,00	0,00	3	600.000	50,00	6,32	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	93 Lap.	9.500.000	21	400.000	18	750.000	18	371.400	100,00	49,52	39	771.400	41,94	8,12	
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dok.	6.860.000	2	1.340.000	1	750.000	1	371.400	100,00	49,52	3	1.711.400	50,00	24,95	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**238.233.302**	**103,57**	**63.926.200**							**103,57**	**63.926.200**	**103,57**	**26,83**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	188 Paket.	86.233.302	30	17.500.000							30	17.500.000	15,96	20,29	
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Org.	152.000.000	3	46.426.200							3	46.426.200	12,50	30,54	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**843.957.386**	**55,32**	**373.018.100**	**100,00**	**99.600.900**	**64,58**	**90.982.800**	**64,58**	**91,35**	**59,95**	**464.000.900**	**59,95**	**54,98**	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	96 Paket.	13.999.992	28	34.999.000	16	1.499.600	12	1.499.600	75,00	100,00	40	36.498.600	41,67	260,70	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	12.000.000	0	-	4	2.499.300	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket	69.189.347	22	14.566.000	12	9.189.200	10	9.070.400	83,33	98,71	32	23.636.400	44,44	34,16	
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dok	52.716.667	24	10.164.000	12	6.000.000	12	-	100,00	0,00	36	10.164.000	50,00	19,28	
1.5.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	138 Lap	38.451.380	25	11.954.000	24	5.996.800	7	5.996.800	29,17	100,00	32	17.950.800	23,19	46,68	
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92 Lap.	657.600.000	9	301.335.100	18	74.416.000	18	74.416.000	100,00	100,00	27	375.751.100	29,35	57,14	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pengadaan Barang Milik Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00 %**	**4.420.000.000**	**100,00**	**50.000.000**							**100,00**	**50.000.000**	**100,00**	**1,13**	
	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya pembangunan gedung kantor	1 Unit.	4.420.000.000	1	50.000.000							1,00	50.000.000	100,00	1,13	
1,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**855.314.687**	**97,92**	**252.562.818**	**100,00**	**151.170.711**	**100,00**	**110.941.234**	**100,00**	**73,39**	**98,96**	**363.504.052**	**98,96**	**42,50**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62 Lap	271.921.224	24	88.557.500	12	58.172.474	12	28.301.400	100,00	48,65	36	116.858.900	58,06	42,98	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Lap	394.400.000	24	107.028.318	12	64.000.000	12	55.090.434	100,00	86,08	36	162.118.752	50,00	41,11	
1.6.3	Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Lap.	17.000.000	10	6.000.000	6	998.500	6	-	100,00	0,00	16	6.000.000	47,06	35,29	
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Lap	171.993.463	23	50.977.000	12	27.999.737	12	27.549.400	100,00	98,39	35	78.526.400	48,61	45,66	
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**725.133.004**	**100,00**	**359.740.112**	**100,00**	**155.395.937**	**100,00**	**143.476.450**	**100,00**	**92,33**	**100,00**	**503.216.562**	**100,00**	**69,40**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1	277.480.024	1	40.000.000	1	40.000.000	100,00	100,00	2	317.480.024			
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	725.133.004	1	82.260.088	1	115.395.937	1	103.476.450	100,00	89,67	2	185.736.538	200,00	25,61	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)**	**174,45 Ton**	**19.414.677.684**	**25082**	**7.212.014.400**	**28223**	**2.724.866.400**	**25082**	**2.573.740.100**	**88,87**	**94,45**	**50164**	**9.785.754.500**	**28756**	**50,40**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2,1	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainya yang dapat Diusahakakn dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase pengelolaan usaha penangkapan ikan serta ketersediaan sarana perikanan tangkap di daerah dalam setahun**	**100 %**	**17.063.935.921**	**88**	**7.135.717.400**	**100**	**2.481.119.900**	**60,00**	**2.329.993.600**	**60,00**	**93,91**	**74,03**	**9.465.711.000**	**74,03**	**55,47**	
2.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten /Kota yang Tersedia	19 Dok.	373.465.462	3	7.393.000	4	9.019.900	2	2.851.500	50,00	31,61	5	10.244.500	26,32	2,74	
2.1.2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	971 Unitt.	16.690.470.459	128	7.128.324.400	180	2.472.100.000	118	2.327.142.100	65,56	94,14	246	9.455.466.500	25,33	56,65	
2,2	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemberdayaan nelayan kecil di daerah**	**100 %**	**2.350.741.763**	**50**	**76.297.000**	**100**	**243.746.500**	**6**	**243.746.500**	**6,00**	**100,00**	**28,00**	**320.043.500**	**28,00**	**13,61**	
2.2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	3351 Orang	461.903.817	0	-	600	29.234.000	0	29.234.000	0,00	100,00	0	29.234.000	0,00	6,33	
2.2.2	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	96 Unit Usaha	1.888.837.946	13	76.297.000	20	214.512.500	12	214.512.500	60,00	100,00	25	290.809.500	26,04	15,40	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)**	**5567 Ton**	**13.211.097.734**	**334**	**3.998.684.750**	**459,28**	**1.674.492.144**	**333,52**	**1.226.684.759**	**72,62**	**73,26**	**667**	**5.225.369.509**	**11,98**	**39,55**	
3,1	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase izin usaha yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah bagi pelaku usaha pembudidaya ikan dlm setahun**	**100 %**	**100.000.000**	**100,00**	**10.000.000**	**100**	**7.941.300**	**12**	**-**	**12,00**	**0,00**	**56,00**	**10.000.000**	**56,00**	**10,00**	
3.1.1	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Izin Usaha Perikanan Pembudidaya Ikan yang Usahanya, Lokasi atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	87 Rekom	100.000.000	12	10.000.000	15	7.941.300	12	-	80,00	0,00	24	10.000.000	27,59	10,00	
3,2	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Persentase upaya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil di daerah**	**100 %**	**701.227.225**	**90**	**134.704.000**	**100**	**84.415.700**	**9**	**75.481.900**	**9,00**	**89,42**	**49,50**	**210.185.900**	**49,50**	**29,97**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.2.1	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	74 Kel	405.029.908	16	30.704.000	15	47.621.900	15	47.621.900	100,00	100,00	31	78.325.900	41,89	19,34	
3.2.2	Pembinaan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Tegnologi dan Informasi Serta Penyelanggaran Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	32 Kel	296.197.317	3	104.000.000	5	36.793.800	3	27.860.000	60,00	75,72	6	131.860.000	18,75	44,52	
3,3	**Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**Persentase Pengelolaan Usaha Pembudidaya Ikan di Daerah Dalam Setahun**	**100 %**	**12.409.870.509**	**12**	**3.853.980.750**	**100**	**1.582.135.144**	**5**	**1.151.202.859**	**5,25**	**72,76**	**8,72**	**5.005.183.609**	**8,72**	**40,33**	
3.3.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	19 Dok.	117.500.000	1	2.500.000	1	7.000.000	1	-	100,00	0,00	2	2.500.000	10,53	2,13	
3.3.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	355 Unit.	9.887.333.750	24	3.237.673.750	15	1.202.000.000	15	1.028.791.980	100,00	85,59	39	4.266.465.730	10,99	43,15	
3.3.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	6 Unit	2.339.330.459	2	608.807.000	1	366.635.144	1	120.811.579	100,00	32,95	3	729.618.579	50,00	31,19	
3.3.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	28 Dok.	65.706.300	4	5.000.000	4	6.500.000	4	1.599.300	100,00	24,60	8	6.599.300	28,57	10,04	
4	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Cakupan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan (%)**	**100 %**	**430.000.000**	**100**	**30.000.000**	**100**	**7.500.000**	**100**	**-**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**30.000.000**	**100,00**	**6,98**	
4,1	**Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota**	**Persentase pengawasan upaya pengelolaan sumberdaya perikanan secara terpadu, berdasarkan peraturan perundang-undangan**	**100 %**	**430.000.000**	**100,00**	**30.000.000**	**100**	**7.500.000**	**4**	**-**	**4,00**	**0,00**	**4**	**30.000.000**	**4,00**	**6,98**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota	84 Dok	215.000.000	7	15.000.000	8	5.000.000	4	-	50,00	0,00	11	15.000.000	13,10	6,98	
4.1.2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten /Kota	84 Dok	215.000.000	6	15.000.000	8	2.500.000	4	-	50,00	0,00	10	15.000.000	11,90	6,98	
5	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Peningkatan produksi pengolahan hasil ikan (ton)**	**8195 Ton**	**2.571.100.800**	**1975**	**214.888.580**	**1340**	**548.304.900**	**1110**	**303.333.600**	**82,84**	**55,32**	**3085**	**518.222.180**	**37,64**	**20,16**	
5,1	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah rekomendasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi penerbitannya**	**36 Rekon**	**102.500.000**	**6**	**2.500.000**	**6**	**5.000.000**	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**6**	**2.500.000**	**16,67**	**2,44**	
5.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasarandan Pengola han Hasil Peri kanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	27 Dok	102.500.000	2	2.500.000	6	5.000.000	0	-	0,00	0,00	2	2.500.000	7,41	2,44	
5,2	**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	**Tersedianya Harga Referensi Daerah untuk Pangan Lokal**	**35 Dok**	**40.300.800**	**0**	**8.100.000**							0	**8.100.000**	**0,00**	**20,10**	
3.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	6 Lap	40.300.800	1	8.100.000							1	8.100.000	16,67	20,10	
5,3	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah pengujian produk hasil perikanan (Dok)**	**35 Dok**	**593.900.000**	**4,00**	**59.855.080**	**6**	**62.351.300**	**4**	**22.380.000**	**66,67**	**35,89**	**8**	**82.235.080**	**22,86**	**13,85**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.3.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	35 Unit Usaha	593.900.000	4	59.855.080	6	62.351.300	4	22.380.000	66,67	35,89	8	**82.235.080**	22,86	13,85	
5,4	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota**	**Jumlah ikan yang tersalurkan sebagai bahan baku industri (Ton)**	**99798 Ton**	**1.834.400.000**	**1308**	**144.433.500**	**16370**	**480.953.600**	**1110**	**280.953.600**	**6,78**	**58,42**	**2418**	**425.387.100**	**2,42**	**23,19**	
5.4.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	99798 Ton	1.834.400.000	1308	144.433.500	16370	480.953.600	1110	280.953.600	6,78	58,42	2418	425.387.100	2,42	23,19	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)											**70,33**	**56,98**			**491,87**	**31,87**	
Predikat Kinerja											**S**	**K**					
Jumlah Total				**58.959.696.802**		**18.218.485.549**		**8.964.720.922**		**6.948.186.276**		**77,51**		**25.166.671.825**		**42,68**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya transformasi struktural dan daya	Pertumbuhan PDRB pariwisata (persen)	2,48	1,38	55,65
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Pilihan																
	Bidang Urusan Pariwisata																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**90,00 %**	**15.979.631.589**	**97,77**	**5.277.952.350**	**90,00**	**2.997.576.473**	**N/A**	**1.805.537.588**	**N/A**	**60,23**	48,89	**7.083.489.938**	**54,32**	**44,33**	**Dinas Pariwisata**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**86.964.966**	**88,96**	**28.701.666**	**100,00**	**14.056.200**	**N/A**	**-**	**N/A**	**0,00**	44,48	**28.701.666**	**44,48**	**33,00**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkar daerah	12 Dok	29.092.766	4	11.345.666	2	3.596.200	**N/A**	-	**N/A**	0,00	4	11.345.666	33,33	39,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dok	22.795.200	4	6.093.000	2	4.047.400	**N/A**	-	**N/A**	0,00	4	6.093.000	33,33	26,73	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	35.077.000	2	11.263.000	1	6.412.600	**N/A**	-	**N/A**	0,00	2	11.263.000	33,33	32,11	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**12.726.638.055**	**77,26**	**4.478.912.150**	**100,00**	**2.513.822.573**	**N/A**	**1.655.889.388**	**N/A**	**65,87**	38,63	**6.134.801.538**	**38,63**	**48,20**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/Bulan	12.659.253.299	53	4.467.698.818	23	2.509.520.773	**N/A**	1.653.037.588	**N/A**	65,87	53	6.120.736.406	35,33	48,35	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Lap	33.222.330	2	5.811.666	1	4.301.800	**N/A**	2.851.800	**N/A**	66,29	2	8.663.466	33,33	26,08	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Lap	34.162.426	2	5.401.666							2	5.401.666	33,33	15,81	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**498.623.052**	**75,00**	**82.434.469**	**100,00**	**19.650.100**	**N/A**	**-**	**N/A**	**0,00**	37,50	**82.434.469**	**37,50**	**16,53**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	94.469.464	25,00	45.000.000	25	19.650.100	**N/A**	-	**N/A**	0,00	25	45.000.000	45,45	47,63	
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Org	404.153.588	5	37.434.469							5	37.434.469	20,83	9,26	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.149.372.719**	**90,00**	**243.867.941**	**100,00**	**202.640.000**	**N/A**	**59.089.692**	**N/A**	**29,16**	45,00	**302.957.633**	**45,00**	**26,36**	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	169.035.125	5	24.527.000	5	30.475.000	**N/A**	-	**N/A**	0,00	5	24.527.000	16,67	14,51	
1.4.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	86.339.470	6	26.069.900	20	14.509.000	**N/A**	14.509.000	**N/A**	100,00	6	40.578.900	60,00	47,00	
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dok	75.175.650	2	23.466.000	1	13.000.000	**N/A**	13.000.000	**N/A**	100,00	2	36.466.000	33,33	48,51	
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Lap	90.792.000	2	28.300.850	1	14.704.000	**N/A**	1.465.800	**N/A**	9,97	2	29.766.650	33,33	32,79	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Lap	728.030.474	7	141.504.191	4	129.952.000	**N/A**	30.114.892	**N/A**	23,17	7	171.619.083	29,17	23,57	
1,5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**865.737.485**	**100,00**	**260.259.994**	**100,00**	**139.945.300**	**N/A**	**43.018.400**	**N/A**	**30,74**	50,00	**303.278.394**	**50,00**	**35,03**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbayarnya Biaya Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Kantor, dan Tenaga Caraka	1500 Surat	762.615.000	244	218.657.000		124.947.100	**N/A**	35.087.100	**N/A**	28,08	244	253.744.100	16,27	33,27	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Lap	103.122.485	9	41.602.994	5	14.998.200	N/A	7.931.300	N/A	52,88	9	49.534.294	30,00	48,03	
1,6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**652.295.313**	**100,00**	**183.776.130**	**100,00**	**107.462.300**	**N/A**	**47.540.108**	**N/A**	**44,24**	50,00	**231.316.238**	**50,00**	**35,46**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	89.710.350	6	14.806.000	3	14.569.600	N/A	7.040.108	N/A	48,32	6	21.846.108	50,00	24,35	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	562.584.963	2	168.970.130	1	92.892.700	N/A	40.500.000	N/A	43,60	2	209.470.130	33,33	37,23	
2	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Presentase Potensi Destinasi / ODTW yang telah dikembangkan**	**44,60 %**	**29.466.566.170**	**30,56**	**4.878.601.159**	**22,00**	**3.385.683.100**	**N/A**	**1.595.500.000**	**N/A**	**47,12**	15,28	**6.474.101.159**	**34,26**	**21,97**	
		Presentase lahan kawasan destinasi berstatus clean and clear	**19,44 %**		**11,11**	-	**11,11**		N/A		N/A		5,56	-			
2,1	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Presentase Jumlah Daya tarik wisata dalam kondisi terawat/baik**	**60 %**	**1.006.742.276**	25	**151.884.000**	**25**	**67.791.500**	N/A	-	N/A	**0,00**	12,50	**151.884.000**	**20,83**	**15,09**	
2.1.1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah loksiDTW Kabupaten Kota yang ditetapkan	10 Desti	1.006.742.276	4	151.884.000	2	67.791.500	N/A	-	N/A	0,00	4	151.884.000	40,00	15,09	
2,2	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Presentase kawasan strategi pariwisata yang terkelola**	**80 %**	**27.025.263.894**	**51,39**	**4.677.157.159**	**100**	**3.228.661.600**	N/A	**1.526.000.000**	N/A	**47,26**	25,69	**6.203.157.159**	**32,12**	**22,95**	
2.2.1	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan strategi pariwisata	6 Dok	200.000.000		-	1	25.778.900	N/A	-	N/A	0,00	0	-	0,00	0,00	
2.2.2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Dok	1.300.000.000		-	3	250.000.000	N/A	250.000.000	N/A	100,00	0	250.000.000	0,00	19,23	
2.2.3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	18 Kaw	1.611.501.002	4	217.638.150	1	100.000.000	N/A	-	N/A	0,00	4	217.638.150	22,22	13,51	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.2.4	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Unit	22.301.386.892	10	4.127.217.509	24	2.852.882.700	N/A	1.276.000.000	N/A	44,73	10	5.403.217.509	100,00	24,23	
2.2.5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	24 Kel	1.612.376.000	2	332.301.500							2	332.301.500	8,33	20,61	
2,3	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah destinasi pariwisata yang telah dikelola**	**6 Desti**	**1.434.560.000**	**70,59**	**49.560.000**	**100**	**89.230.000**	**N/A**	**69.500.000**	**N/A**	**77,89**	35,29	**119.060.000**	**588,24**	**8,30**	
2.3.1	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Dok	254.560.000	4	49.560.000	4	15.630.000	N/A	-	N/A	0,00	4	**49.560.000**	40,00	19,47	
2.3.2	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Lokasi	750.000.000	-		1	73.600.000	N/A	69.500.000	N/A	94,43	0	69.500.000	0,00	9,27	
2.3.3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Jumlah Usaha pariwisata yang memiliki Tansa daftar usaha	12 Dok	215.000.000		-							0	-	0,00	0,00	
2.3.4	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha PariwisataKabupaten /Kota	6 Dok	100.000.000		-							0	-	0,00	0,00	
2.3.5	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	6 Lap	115.000.000		-							0	-	0,00	0,00	
3	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing**	**3524 Org**	**1.069.756.000**	**490**	**569.739.000**	**326**	**96.696.800**	**N/A**	**96.696.800**	**N/A**	**100,00**	490	**666.435.800**	**13,90**	**62,30**	
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	**328757 Org**		96258	-	52014		N/A		N/A		96258	-			
3,1	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota**	**Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri**	**12 event**	**1.069.756.000**	**3**	**569.739.000**	**3**	**96.696.800**	**N/A**	**96.696.800**	**N/A**	**100,00**	3	**666.435.800**	**25,00**	**62,30**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.1.1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dok	280.352.000	2	480.335.000							2	480.335.000	40,00	171,33	
3.1.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Lap	489.404.000	1	89.404.000							1	89.404.000	25,00	18,27	
3.1.3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dok	300.000.000		-	1	96.696.800	N/A	96.696.800	N/A	100,00	0	96.696.800	0,00	32,23	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Presentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan/pengembangan**	**90 % persen**	**1.305.214.000**	**35,00**	**145.299.600**	**75,00**	**208.586.000**	N/A	**64.888.400**	N/A	**31,11**	18	210.188.000	**1944**	**16,10**	
4,1	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**jumlah peserta Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**130 orang**	**1.165.214.000**	**90**	**145.299.600**	**94**	**143.697.600**	N/A	-	N/A	**0,00**	90	145.299.600	**69,23**	**12,47**	
4.1.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	140 orang	200.000.000		-	20	100.000.000	N/A	-	N/A	0,00	0	-	0,00	0,00	
4.1.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	80 orang	160.000.000		-	80	43.697.600	N/A	-	N/A	0,00	0	-	0,00	0,00	
4.1.3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	70 orang	85.000.000		-							0	-	0,00	0,00	
4.1.4	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	70 orang	185.000.000		-							0	-	0,00	0,00	
4.1.5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	20 laporan	375.214.000	5	61.739.000							5	61.739.000	25,00	16,45	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.1.6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 orang	160.000.000	60	83.560.600							60	83.560.600	75,00	52,23	
4,2	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Presentase pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**100 %**	**140.000.000**	**0,00**	-		**64.888.400**	**N/A**	**64.888.400**	**N/A**	**100,00**	0	64.888.400	**0,00**	**46,35**	
4.2.1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	60 orang	140.000.000			80	64.888.400	N/A	64.888.400	N/A	100,00	0	64.888.400	0,00	46,35	
											Rata - rata Capaian Kinerja (%)	**N/A**	**40,74**		**73,96**	**28,13**	
											Predikat Kinerja	**N/A**	**K**				
Jumlah Total				**47.821.167.759**		**10.871.592.109**		**6.688.542.373**		**3.562.622.788**		**53,26**		**14.434.214.897**		**30,18**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya transformasi struktural dan daya	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan	5,14	4,79	93,19
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Pilihan																
	Bidang Urusan Pertanian																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**90,00 %**	**59.459.848.879**	**106,40**	**23.358.797.138**	**90,00**	**11.298.807.797**	**56,60**	**9.409.313.377**	**62,89**	**83,28**	**81,50**	**32.768.110.515**	**90,55**	**55,11**	**Dinas Pertanian**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**315.000.000**	**0,00**	**41.628.000**	**100,00**	**96.984.600**	**100,00**	**65.444.800**	**100,00**	**67,48**	**50,00**	**107.072.800**	**50,00**	**33,99**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dok	215.000.000	6	16.828.000	3	74.999.700	3	58.782.700	100,00	78,38	9	75.610.700	60,00	35,17	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	11.500.000	1	1.200.000	1	2.499.700	1	-	100,00	0,00	2	1.200.000	40,00	10,43	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1	2.499.800	1	-	100,00	0,00	1	-			
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1	1.499.700	1	1.462.100	100,00	97,49	1	1.462.100			
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1	1.499.700	1	-	100,00	0,00	1	-			

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	45.000.000	2	15.975.000	1	7.986.000	1	5.200.000	100,00	65,11	3	21.175.000	60,00	47,06	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Lap	43.500.000	8	7.625.000	4	6.000.000	4	-	100,00	0,00	12	7.625.000	60,00	17,53	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**51.662.177.873**	**80,05**	**19.545.969.783**	**100,00**	**10.019.131.628**	**45,93**	**8.433.781.535**	**45,93**	**84,18**	**62,99**	**27.979.751.318**	**62,99**	**54,16**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	149 Org	51.603.677.873	141	19.534.591.783	149	10.009.209.328	137	8.423.938.535	91,95	84,16	278	27.958.530.318	186,58	54,18	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	8 Dok	35.000.000	4	11.378.000	1	6.424.300	1	6.366.000	100,00	99,09	5	17.744.000	62,50	50,70	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	90 Dok	23.500.000	0	-	18	3.498.000	18	3.477.000	100,00	99,40	18	3.477.000	20,00	14,80	
1,3	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengadaan BMD pada perangkat Daerah**	**100,00 %**	**21.000.000**	**100,00**	**11.260.000**	**100,00**	**6.974.300**	**100,00**	**6.848.800**	100,00	98,20	**100,00**	**18.108.800**	**100,00**	**86,23**	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dok	17.500.000	1	460.000	1	3.489.300	1	3.377.200	100,00	96,79	2	3.837.200	40,00	21,93	
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	20 Lap	3.500.000	1	10.800.000	12	3.485.000	12	3.471.600	100,00	99,62	13	14.271.600	65,00	407,76	
1,4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**995.000.000**	**75,00**	**80.510.799**	**100,00**	**117.186.900**	**50,00**	**51.408.900**	50,00	43,87	**62,50**	**131.919.699**	**62,50**	**13,26**	
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	250 Dok	250.000.000	151	38.893.000	16	49.995.000	16	49.316.900	100,00	98,64	167	88.209.900	66,80	35,28	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2	4.959.300	2	2.092.000	100,00	42,18	2	2.092.000			
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang trampil berdasarkan tugas dan fungsi	15 Org	375.000.000	1	41.617.799	2	44.746.000	0		0,00	0,00	1	41.617.799	6,67	11,10	
1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Org	370.000.000	0	-	2	17.486.600	0		0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1,5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.383.707.028**	**100,00**	**711.448.888**	**100,00**	**397.367.075**	**80,00**	**390.622.847**	**80,00**	**98,30**	**90,00**	**1.102.071.735**	**90,00**	**79,65**	
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	340.000.000	5	82.760.000	12	165.595.275	12	165.537.000	100,00	99,96	17	248.297.000	340,00	73,03	
1.5.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	35.000.000	13	10.169.000	1	6.999.800	1	4.311.500	100,00	61,59	14	14.480.500	77,78	41,37	
1.5.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dok	18.000.000	24	2.850.000	12	3.000.000	0		0,00	0,00	24	2.850.000	40,00	15,83	
1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Lap	80.000.000	32	70.440.000	1	43.400.000	1	43.370.000	100,00	99,93	33	113.810.000	165,00	142,26	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Lap	910.707.028	45	545.229.888	18	178.372.000	18	177.404.347	100,00	99,46	63	722.634.235	70,00	79,35	
1,6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**2.940.000.000**	**100**	**2.359.700.000**	**100**	**252.498.234**	**100**	**250.273.000**	**100,00**	**99,12**	**100,00**	**2.609.973.000**	**100,00**	**88,77**	
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit	195.000.000			10	74.999.800	10	73.075.000	100,00	97,43	10	73.075.000	35,71	37,47	
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	110.000.000									0	-	0,00	0,00	
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.370.000.000	1	2.359.700.000	1	177.498.434	1	177.198.000	100,00	99,83	2	2.536.898.000	200,00	107,04	
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	65.000.000									0	-	0,00	0,00	
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	200.000.000									0	-	0,00	0,00	
1,7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**887.975.735**	**100,00**	**277.763.514**	**100,00**	**199.534.260**	**83,33**	**121.886.325**	**83,33**	**61,09**	**91,67**	**399.649.839**	**91,67**	**45,01**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Bln	379.894.932	24	137.918.500	12	74.447.860	12	49.845.000	100,00	66,95	36	187.763.500	60,00	49,43	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Bln	250.000.000	24	65.967.014	12	73.993.000	12	48.231.925	100,00	65,18	36	114.198.939	60,00	45,68	
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Bln	104.080.803	24	21.287.000	12	20.300.000	4	5.700.000	33,33	28,08	28	26.987.000	46,67	25,93	
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Bln	154.000.000	24	52.591.000	12	30.793.400	12	18.109.400	100,00	58,81	36	70.700.400	60,00	45,91	
1,8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.254.988.243**	**100,00**	**330.516.154**	**100,00**	**209.130.800**	**100,00**	**89.047.170**	**100,00**	**42,58**	**100,00**	**419.563.324**	**100,00**	**33,43**	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	391.560.000	2	245.800.319	1	78.000.000	1	39.000.000	100,00	50,00	3	284.800.319	300,00	72,73	
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	443.428.243	1	84.715.835	1	84.090.800	1	50.047.170	100,00	59,52	2	134.763.005	200,00	30,39	
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	120.000.000									0	-	0,00	0,00	
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	300.000.000	0	-	1	47.040.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas tanaman pangan - padi dan jagung**	**4,71 Ton/Ha**	**6.086.839.736**	**4,76**	**4.225.931.905**	**4,54**	**4.863.293.900**	**4,80**	**1.179.679.818**	**105,73**	**24,26**	**4,80**	**5.405.611.723**	**101,91**	**88,81**	
		Produktivitas tanaman hortikultura - cabai dan bawang merah	**0,62 Ton/Ha**		**2,93**		**0,60**		**3,95**		**658,33**		**3,95**		**637,10**		
		Produktivitas perkebunan	**0,87 Ton/Ha**		**0,89**		**0,79**		**0,73**		**92,41**		**0,73**		**83,91**		
		Produktivitas peternakan - Populasi Ternak	**209857 ekor**		**208869**		**202480**		**218539**		**107,93**		**218539**		**104,14**		

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2,1	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase kelompok tani menggunakan bantuan sarana pertanian yang diberikan terawasi**	**100 %**	**950.000.000**	**100**	**673.318.000**	**100**	**1.595.848.500**	**100**	**195.090.000**	**100,00**	**12,22**	**100,00**	**868.408.000**	**100,00**	**91,41**	
2.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	60 Lap	600.000.000	13	673.318.000	12	1.541.868.500	12	165.790.000	100,00	10,75	25	839.108.000	41,67	139,85	
2.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	230 Lap	350.000.000	0	-	12	53.980.000	12	29.300.000	100,00	54,28	12	29.300.000	5,22	8,37	
2,2	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitas pengelolaan sumber daya genetik hewan dan tumbuhan yang dikelola**	**1 Unit**	**1.639.906.758**	**1**	**3.552.613.905**	**1**	**2.013.605.400**	**1**	**838.384.818**	**100,00**	**41,64**	**1**	**4.390.998.723**	**100,00**	**267,76**	
2.2.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dok	550.000.000	1	1.198.768.840	1	1.830.139.900	1	723.914.560	100,00	39,56	1	1.922.683.400	100,00	349,58	
2.2.2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dok	1.089.906.758	1	2.353.845.065	1	183.465.500	1	114.470.258	100,00	62,39	1	2.468.315.323	100,00	226,47	
2,3	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Benih/bibit ternak berkualitas yang disediakan**	**170 Ekor**	**3.496.932.978**			**25**	**1.253.840.000**	**15**	**146.205.000**	**60,00**	**11,66**	**15,00**	**146.205.000**	**8,82**	**4,18**	
2.3.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	170 ekor	3.496.932.978			25	1.253.840.000	15	146.205.000	60,00	11,66	15,00	146.205.000	8,82	4,18	
3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Produksi tanaman pangan (Ton)**	**523275 Ton**	**53.735.825.447**	**191696**	**16.153.999.400**	**166250**	**5.688.290.150**	**102635**	**1.779.699.928**	**61,74**	**31,29**	**294332**	**17.933.699.328**	**56,25**	**33,37**	
		Produksi tanaman hortikultura (Ton)	**15784 Ton**		**18167**		**5896**		**25569,71**		**433,68**		**43736**		**277,09**		
		Produksi tanaman perkebunan (Ton)	**151024 Ton**		**74853**		**92003**		**74799,9**		**81,30**		**149653**		**99,09**		
		Produksi peternakan (Kg)	**1130560 Ton**		**299952**		**686124**		**302092**		**44,03**		**602044**		**53,25**		
3,1	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Cakupan prasarana pertanian yang digunakan**	**80 %**	**1.870.600.000**	**100,00**	**120.250.000**	**80**	**559.910.000**	**100**	**192.275.928**	**125,00**	**34,34**	**100**	**312.525.928**	**125,00**	**16,71**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.1.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan kelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dok	560.000.000	0	-	1	360.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Lap	1.310.600.000	1	120.250.000	12	199.910.000	12	192.275.928	100,00	96,18	13	312.525.928	108,33	23,85	
3,2	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah prasarana pertanian yang dibangun**	**182 Unit**	**48.895.225.447**	**54**	**16.032.255.000**	**23**	**5.038.680.150**	**1**	**1.581.764.000**	**4,35**	**31,39**	**55**	**17.614.019.000**	**30,22**	**36,02**	
3.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	47 Unit	9.268.743.000	33	5.885.153.000	7	976.365.800	1	61.630.000	14,29	6,31	34	5.946.783.000	72,34	64,16	
3.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	47 Unit	9.590.000.000	6	3.178.195.000	6	1.000.000.000	0	-	0,00	0,00	6	3.178.195.000	12,77	33,14	
3.2.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	1.068.120.000									0	-	0,00	0,00	
3.2.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	1.068.120.000									0	-	0,00	0,00	
3.2.5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	703.500.000	0	201.650.000							0	201.650.000	0,00	28,66	
3.2.6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	300.000.000									0	-	0,00	0,00	
3.2.7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	14 Unit	4.100.000.000	3	3.408.563.000							3	3.408.563.000	21,43	83,14	
3.2.8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	43 Unit	22.796.742.447	16	3.358.694.000	10	3.062.314.350	0	1.520.134.000	0,00	49,64	16	4.878.828.000	37,21	21,40	
3,3	**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**	**Cakupan lahan penggembalaan umum yang dikembangkan**	**100 %**	**2.970.000.000**	**0,00**	**1.494.400**	**20**	**89.700.000**	**0**	**5.660.000**	0,00	6,31	**0**	**7.154.400**	**0,00**	**0,24**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.3.1	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	6 Lap	150.000.000	1	1.494.400	1	89.700.000	0	5.660.000	0,00	6,31	1	7.154.400	16,67	4,77	
3.3.2	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola		2.700.000.000									0	-		0,00	
3.3.3	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum		120.000.000									0	-		0,00	
4	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**	**82 %**	**500.000.000**	**0,00**	**152.210.000**	**80,50**	**246.153.300**	**80**	**29.690.000**	**99,38**	**12,06**	**40**	**181.900.000**	**48,78**	**36,38**	
4,1	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota**	**Cakupan kecamatan yang terjamin kesehatan hewannya**	**82,35 %**	**450.000.000**	**47,06**	**104.740.000**	**80,50**	**95.578.300**	**23,53**	**29.690.000**	**29,23**	**31,06**	**35**	**134.430.000**	**42,86**	**29,87**	
4.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	72 Lap	450.000.000	24	104.740.000	12	95.578.300	4	29.690.000	33,33	31,06	28	134.430.000	38,89	29,87	
4,2	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah ternak besar, ternak kecil, unggas dan Hewan Pembawa Rabies (HPR) yang dilayani**	**1500 ekor**	**50.000.000**	**445**	**47.470.000**	**1000**	**150.575.000**	**445**	**-**	**44,50**	**0,00**	**890**	**47.470.000**	**59,33**	**94,94**	
4.2.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Lap	50.000.000	12	47.470.000	12	150.575.000	12	-	100,00	0,00	24	47.470.000	200,00	94,94	
5	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT -Tanaman Pangan**	**95 %**	**513.580.000**	**0,00**	**89.168.000**	**95,00**	**70.061.000**		**19.230.000**	**0,00**	**27,45**	**0**	108.398.000	**0,00**	**21,11**	
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT - Tanaman Hortikultura	**92 %**		**0,00**		**92,00**				**0,00**		**0**		**0,00**		
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT -Tanaman Perkebunan	**80 %**		**120,00**		**80,00**		**0**		**0,00**		**0**		**0,00**		

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5,1	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Jumlah luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang dikendalikan/ditangani**	**155 Ha**	**513.580.000**	**60,00**	**89.168.000**	**50**	**70.061.000**	**0**	**19.230.000**	**0,00**	**27,45**	**60**	**108.398.000**	**38,71**	**21,11**	
5.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	750 Ha	388.580.000	60	89.168.000	50	70.061.000	0	19.230.000	0,00	27,45	60	108.398.000	8,00	27,90	
5.1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura ,dan Perkebunan yang Ditangani	25 Ha	125.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
6	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase perizinan usaha pertanian yang diterbitkan rekomendasi teknisnya**	**100 %**	**240.000.000**	**0**	**-**	**100**	**22.162.800**	**0**	**-**	0,00	0,00	0	-	**0,00**	**0,00**	
6,1	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**Jumlah rekomendasi izin usaha peternakan yang diterbitkan**	**8 Rekon**	**140.000.000**			**2**	**22.162.800**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	0	-	**0,00**	**0,00**	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	8 Lap	140.000.000			2	22.162.800	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
6,2	**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	**Jumlah rekomendasi izin usaha (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang diterbitkan**	**8 Rekon**	**100.000.000**									0	-	0,00	0,00	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	8 Lap	100.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya**	**15 %**	**3.000.000.000**	**3**	**468.372.731**	**10,93**	**1.042.756.600**	**10,36**	**509.002.820**	**94,82**	**48,81**	**7**	**977.375.551**	**45,61**	**32,58**	
7,1	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani yang difasilitasi**	**290 Unit**	**3.000.000.000**	**37**	**468.372.731**	**58**	**1.042.756.600**	**89**	**509.002.820**	**153,45**	**48,81**	**126**	**977.375.551**	**43,45**	**32,58**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 unit	500.000.000	12	97.654.700	12	236.684.800	12	90.044.800	100,00	38,04	24	187.699.500	200,00	37,54	
7.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	240 unit	2.000.000.000	25	290.638.031	45	786.986.200	77	399.940.420	171,11	50,82	102	690.578.451	42,50	34,53	
7.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	72 unit	250.000.000	0	80.080.000	12	19.085.600	12	19.017.600	100,00	99,64	12	99.097.600	16,67	39,64	
7.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 unit	250.000.000									0	-	0,00	0,00	
										Rata - rata Capaian Kinerja (%)	81,98	45,93			67,65	47,31	
										Predikat Kinerja	T	K					
	Jumlah Total			123.536.094.062		44.448.479.174		23.231.525.547		12.926.615.943		55,64		57.375.095.117		46,44	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,65	74,06	104,83
2	Meningkatnya transformasi struktural dan daya	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (persen)	12,58	3,68	29,25
3	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta	Indeks Ketahanan Ekonomi	47,1	49,64	105,39
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Pilihan																
	Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**90,00 %**	**23.038.711.324**	**81,46**	**6.477.059.516**	**90,00**	**3.722.653.296**	**62,89**	**2.403.280.090**	**69,88**	**64,56**	**72,17**	**8.880.339.606**	**80,19**	**38,55**	**Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**179.125.024**	**100,00**	**58.522.652**	**100,00**	**29.260.400**	**100,00**	**29.260.400**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**87.783.052**	**100,00**	**49,01**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dok	123.622.979	6	40.389.166	3	20.194.200	3	20.194.200	100,00	100,00	9	60.583.366	50,00	49,01	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	55.502.045	2	18.133.486	1	9.066.200	1	9.066.200	100,00	100,00	3	27.199.686	50,00	49,01	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**15.382.507.123**	**68,41**	**4.895.613.859**	**100,00**	**2.680.858.852**	**45,27**	**1.666.039.290**	**45,27**	**62,15**	**56,84**	**6.561.653.149**	**56,84**	**42,66**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/Bulan	15.256.361.140	46	4.854.330.177	26	2.660.085.652	26	1.659.786.990	100,00	62,40	72	6.514.117.167	46,15	42,70	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Lap	51.025.576	2	16.449.300	1	8.388.700	1	6.252.300	100,00	74,53	3	22.701.600	50,00	44,49	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	108 Lap	75.120.406	36	24.834.382	18	12.384.500	0	-	0,00	0,00	36	24.834.382	33,33	33,06	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**889.435.741**	**50,00**	**133.656.500**	**100,00**	**109.874.800**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**133.656.500**	**25,00**	**15,03**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket	95.200.000		-							0	-	0,00	0,00	
1.3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	33.720.450		-	1	8.224.200	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.3.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dok	50.776.450		-	1	12.384.400	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	709.738.841	8	133.656.500	8	89.266.200	0	-	0,00	0,00	8	133.656.500	20,00	18,83	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.384.707.331**	**98,00**	**550.404.000**	**100**	**184.315.700**	**67,78**	**132.252.000**	**67,78**	**71,75**	**82,89**	**682.656.000**	**82,89**	**49,30**	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	243.437.868	2	74.886.000	1	37.480.000	0	0	0,00	0,00	2	74.886.000	33,33	30,76	
1.4.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	73.459.296	2	18.324.000	1	11.999.700	1	7.070.000	100,00	58,92	3	25.394.000	50,00	34,57	
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dok	185.625.852	2	60.378.000	1	30.323.000	1	26.000.000	100,00	85,74	3	86.378.000	50,00	46,53	
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Lap	71.512.625	2	21.237.000	1	11.682.000	1	11.682.000	100,00	100,00	3	32.919.000	50,00	46,03	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Lap	810.671.690	2	375.579.000	1	92.831.000	1	87.500.000	100,00	94,26	3	463.079.000	50,00	57,12	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1,5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**2.347.601.591**	**75,00**	**517.144.000**	**100**	**261.014.744**	**32,47**	**144.839.600**	**32,47**	**55,49**	**53,74**	**661.983.600**	**53,74**	**28,20**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	1.125.611.396	2	279.029.000	1	183.866.344	1	120.093.900	100,00	65,32	3	399.122.900	50,00	35,46	
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap	709.342.991	1	108.644.000							1	108.644.000	16,67	15,32	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Lap	512.647.204	2	129.471.000	1	77.148.400	1	24.745.700	100,00	32,08	3	154.216.700	50,00	30,08	
1,6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**2.855.334.515**	**100,00**	**321.718.505**	**100**	**457.328.800**	**93,37**	**430.888.800**	**93,37**	**94,22**	**96,69**	**752.607.305**	**96,69**	**26,36**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	1.123.965.043	8,00	303.768.505	4	173.328.800	4	147.328.800	100,00	85,00	12	451.097.305	50,00	40,13	
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	55.094.472	38	17.950.000	20	9.000.000	20	8.560.000	100,00	95,11	58	26.510.000	53,70	48,12	
1.6.3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	1.526.275.000	0	-	20	275.000.000	20	275.000.000	100,00	100,00	20	275.000.000	25,00	18,02	
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Paket	150.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
	Bidang Urusan Perdagangan					-								-			
2	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**Presentase permohonan perijinan usaha perdagangan (IPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) yang diterbit kan rekomendasi teknisnya.**	**11,90 %**	**867.178.506**	**5,00**	**122.500.000**	**11,90**	**160.378.800**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	122.500.000	**21,01**	**14,13**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2,1	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Presentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan**	**87 %**	**118.875.706**	**38**	**21.000.000**	**80**	**20.519.600**	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**18,75**	21.000.000	**21,55**	**17,67**	
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dok	118.875.706	4	21.000.000	4	20.519.600	0	-	0,00	0,00	4	21.000.000	20,00	17,67	
2,2	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Presentase penerbitan TDG**	**85 %**	**215.117.300**	**33**	**42.000.000**	**75**	**43.079.200**	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**16,50**	42.000.000	**19,41**	**19,52**	
2.2.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	20 Dok	215.117.300	2	42.000.000	2	43.079.200	0	-	0,00	0,00	2	42.000.000	**10,00**	**19,52**	
2,3	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	**Presentase penerbitan STPW**	**50 %**	**48.311.100**	**0**	-	**50**	**7.041.000**	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
2.3.1	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dok	48.311.100	0	-	2	7.041.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2,4	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**Presentase penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C**	**90 %**	**68.291.100**	**0**	-	**85**	**13.911.000**	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
2.4.1	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dok	68.291.100	0	-	4	13.911.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2,5	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**Presentase pengendalian /pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota**	**100 %**	**56.916.000**	**0**	-	**100**	**11.594.000**	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
2.5.1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	5 Lap	56.916.000	0	-	1	11.594.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2,6	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten /Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**	**Presentase penerbitan SPKA yang tepat waktu**	**100 %**	**359.667.300**	**50**	**59.500.000**	**100**	**64.234.000**	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**25,00**	59.500.000	**25,00**	**16,54**	
2.6.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbit an Surat Keterangan Asal	15 Lap	359.667.300	3	59.500.000	3	64.234.000	0	-	0,00	0,00	3	59.500.000	20,00	16,54	
3	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Pasar Rakyat /Tradisional yang beroperasi secara normal**	**82,60 %**	**20.316.431.096**	**45,00**	**1.198.396.750**	**60,59**	**1.303.444.500**	**60,59**	**789.709.600**	**100,00**	**60,59**	**52,80**	**1.988.106.350**	**63,92**	**9,79**	
3,1	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**100 %**	**17.547.921.725**	**0**	-	**100**	**513.734.900**	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
3.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	17.547.921.725	0	-	1	513.734.900	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3,2	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Presentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**80 %**	**2.768.509.371**	**55,00**	**1.198.396.750**	**75**	**789.709.600**	**75**	**789.709.600**	**100,00**	**100,00**	**65,00**	**1.988.106.350**	**81,25**	**71,81**	
3.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6 Dok	2.768.509.371	2	1.198.396.750	1	789.709.600	1	789.709.600	100,00	100,00	3	1.988.106.350	50,00	71,81	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**	**57,60 %**	**3.507.988.100**	**36,15**	**809.999.100**	**43,30**	**655.799.500**	**25,00**	**563.539.500**	**57,74**	**85,93**	**30,58**	**1.373.538.600**	**53,08**	**39,15**	
4,1	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan keamanan level stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Halmahera Utara**	**100 %**	**430.466.462**	**0**	-	**100**	**93.398.500**	**18**	**17.038.000**	**18,24**	**18,24**	**9,12**	17.038.000	9,12	3,96	
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Lap	286.995.372	0	-	1	57.799.500	0	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Lap	71.553.990		-	1	17.799.500	1	17.038.000				17.038.000	0,00	23,81	
4.1.3	Pengendalian Ketersediaan Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Lap	71.917.100		-	1	17.799.500	0	0				-	0,00	0,00	
4,2	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian Harga dan Stok Bapokting**	**100 %**	**2.956.622.148**	**95,00**	**769.899.600**	**100**	**546.501.500**	**100**	**546.501.500**	**100,00**	**100,00**	**97,50**	**1.316.401.100**	**97,50**	**44,52**	
4.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	6 Dok	355.374.148	2	249.650.000	1	26.252.000	1	26.252.000	100,00	100,00	3	275.902.000	50,00	77,64	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.2.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Lap	2.601.248.000	2	520.249.600	2	520.249.500	2	520.249.500	100,00	100,00	4	1.040.499.100	40,00	40,00	
4,3	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pemantuan /pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi**	**100 %**	**120.899.490**	**50**	**40.099.500**	**100**	**15.899.500**	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**25,00**	40.099.500	**25,00**	**33,17**	
4.3.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Lap	120.899.490	1	40.099.500	1	15.899.500	0	-	0,00	0,00	1	40.099.500	20,00	33,17	
5	**Program Pengembangan Ekspor**	**Pertumbuhan nilai ekspor non komoditas migas dan pertambangan yang SKA-nya diterbitkan Disperindag (persen)**	**39,50 %**	**1.707.602.000**	**2**	**22.261.000**	**24,50**	**20.830.900**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**0**	**22.261.000**	**0,00**	**1,30**	
5,1	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota**	**100 %**	**1.707.602.000**	**4**	**22.261.000**	**100**	**20.830.900**	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**22.261.000**	**1,75**	**1,30**	
5.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten /Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	50 Pelaku Usaha	129.645.160	10	22.261.000	10	20.830.900	0	-	0,00	0,00	10	22.261.000	20,00	17,17	
5.1.2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	1.139.352.560	0	-							0	-	0,00	0,00	
5.1.3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	438.604.280	0	-							0	-	0,00	0,00	
6	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**1.226.913.500**	**50,00**	**186.914.000**	**100,00**	**202.183.300**	**100,00**	**202.183.300**	**100,00**	**100,00**	**75,00**	389.097.300	**75,00**	**31,71**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6,1	**Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan**	**97,00 %**	**1.226.913.500**	**47**	**186.914.000**	**94**	**202.183.300**	**94**	**202.183.300**	**100,00**	**100,00**	**70,25**	389.097.300	**72,42**	**31,71**	
6.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2220 Unit	613.399.500	259	73.400.000	40	77.183.300	200	77.183.300	500,00	100,00	459	150.583.300	20,68	24,55	
6.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	250 Unit	613.514.000	259	113.514.000	50	125.000.000	135	125.000.000	270,00	100,00	394	238.514.000	157,60	38,88	
7	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (persentase terhadap rencana tahun berkenaan)**	**100 %**	**465.520.000**	**50**	**65.120.500**	**100**	**80.499.800**	**50**	**40.799.400**	**50,00**	**50,68**	**50,00**	105.919.900	**50,00**	**22,75**	
7,1	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Presentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**100 %**	**465.520.000**	**50**	**65.120.500**	**100**	**80.499.800**	**50**	**40.799.400**	**50,00**	**50,68**	**50,00**	105.919.900	**50,00**	**22,75**	
7.1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50 UMKM	262.322.540	50	25.520.500	10	39.700.400	0	0	0,00	0,00	50	25.520.500	100,00	9,73	
7.1.2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5 Dok	203.197.460	1	39.600.000	1	40.799.400	1	40.799.400	100,00	100,00	2	80.399.400	40,00	39,57	
	Bidang Urusan Perindustrian													-			
8	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Pertumbuhan jumlah industri kecil (persen)**	**7,20 %**	**8.265.250.883**	**6**	**2.800.548.700**	**7,0**	**524.298.100**	**5,0**	**239.639.700**	**71,43**	**45,71**	**5,0**	**3.040.188.400**	**69,44**	**36,78**	
8,1	**Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Presentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**99 %**	**8.265.250.883**	**75**	**2.800.548.700**	**94**	**524.298.100**	**94**	**239.639.700**	**100,00**	**45,71**	**84,50**	**3.040.188.400**	**85,35**	**36,78**	
8.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	5 Dok	335.446.548	0	-	1	43.449.400	1	43.449.400	100,00	100,00	1	43.449.400	20,00	12,95	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
8.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan,Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6 Dok	403.140.939	2	68.000.000	1	36.359.000	0	0	0,00	0,00	2	68.000.000	33,33	16,87	
8.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 Dok	1.379.960.120	1	248.299.500	1	248.299.400	0	0	0,00	0,00	1	248.299.500	20,00	17,99	
8.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dok	3.630.690.296	1	2.067.749.200	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00	100,00	2	2.217.749.200	40,00	61,08	
8.1.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dok	2.289.612.500	1	416.500.000							1	416.500.000	20,00	18,19	
8.1.6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Dok	226.400.481	-		1	46.190.300	1	46.190.300	100,00	100,00	1	46.190.300	20,00	20,40	
9	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota**	**Presentase permohonan perijinan usaha industri yang diterbitkan rekomendasi teknisnya**	**100 %**	**457.799.500**	**0**	**-**	**100**	**32.200.400**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
9,1	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota**	**Presentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota yang diterbitkan**	**75 %**	**457.799.500**	**0**	**-**	**75**	**32.200.400**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
9.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	4 Dok	128.802.000		-	1	32.200.400	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
9.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten /Kota	5 Dok	328.997.500	0	-							0	-	0,00	0,00	
10	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Presentase jumlah industri kecil dan sedang yang terdaftar dalam basis data SIINAS**	**100 %**	**440.099.500**	25	**39.600.000**	**100**	**77.180.000**	**65**	**50.099.500**	**64,91**	**64,91**	**44,96**	89.699.500	**44,96**	**20,38**	
10,1	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Presentase data perusahaan industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota**	**90 %**	**440.099.500**	**40**	**39.600.000**	**84**	**77.180.000**	**65**	**50.099.500**	**77,27**	**64,91**	**52,46**	89.699.500	**58,28**	**20,38**	
10.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5 Dok	240.497.500	1	39.600.000	1	50.099.500	1	50.099.500	100,00	100,00	2	89.699.500	40,00	37,30	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
10.1.2	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten /Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data keSIINas	4 Dok	199.602.000		-	1	27.080.500	1	0				-	0,00	0,00	
	Bidang Urusan Energi Sumber Daya Mineral					-								-			
11	**Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**	**Cakupan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (persentase terhadap rencana tahun berkenaan)**	**100 %**	**1.101.698.500**	**25**	**30.449.500**	**100**	**206.821.100**	**50**	**102.750.800**	**49,68**	**49,68**	**37,34**	**133.200.300**	**37,34**	**12,09**	
11,1	**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten /Kota**	**Presentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kab /Kota**	**100 %**	**1.101.698.500**	**25**	**30.449.500**	**100**	**206.821.100**	**50**	**102.750.800**	**49,68**	**49,68**	**37,34**	**133.200.300**	**37,34**	**12,09**	
11.1.1	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 Dok	448.247.500	1	30.449.500	1	61.271.200	1	45.000.000	100,00	73,44	2	75.449.500	40,00	16,83	
11.1.2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	5 Dok	408.997.500	0	-	1	87.799.100	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
11.1.3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten /Kota	5 Lap	244.453.500	0	-	1	57.750.800	1	57.750.800	100,00	100,00	1	57.750.800	20,00	23,62	
											Rata - rata Capaian Kinerja (%)	**57,10**	**45,77**		**33,60**	**22,93**	
											Predikat Kinerja	**K**	**K**				
Jumlah Total				**61.395.192.908**		**11.752.849.066**		**6.986.289.696**		**4.392.001.890**		**62,87**		**16.144.850.956**		**26,30**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																
	Bidang Urusan Pemerintahan																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**158.586.663.234**	**89,19**	**50.935.533.631**	**90,00**	**37.720.046.627**	**72,55**	**29.013.431.399**	**80,61**	**76,92**	**80,87**	**79.948.965.030**	**80,87**	**50,41**	**Sekretariat DPRD**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**143.480.126**	**94,57**	**21.825.000**	**100,00**	**16.079.700**	**87,93**	**-**	**87,93**	**0,00**	**91,25**	**21.825.000**	**91,25**	**15,21**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	8 dok	9.254.363			2	2.297.100	2		100,00	0,00	2	-	25,00	0,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil kooordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4 dok	9.254.363			1	2.297.100	1		100,00	0,00	1	-	25,00	0,00	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA_SKPD	4 dok	9.254.363			1	2.297.100	1		100,00	0,00	1	-	25,00	0,00	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dok	9.254.363			1	2.297.100	1		100,00	0,00	1	-	25,00	0,00	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen DPA-	4 d	9.254.363			2	2.297.100	2		100,00	0,00	2	-	50,00	0,00	
1.1.6	Koordinasi Dan Penyususnan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian hasil kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 laporan	87.953.972	6	21.825.000	7	2.297.100	7		100,00	0,00	13	21.825.000	72,22	24,81	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	9.254.339			1	2.297.100	1		100,00	0,00	1	-	25,00	0,00	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**16.468.749.959**	**91,77**	**5.968.241.277**	**100,00**	**2.560.430.209**	**52,24**	**2.212.223.545**	**52,24**	**86,40**	**72,01**	**8.180.464.822**	**72,01**	**49,67**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4290 Bln	16.468.749.959	24	5.968.241.277	858	2.560.430.209	379	2.212.223.545	44,17	86,40	403	8.180.464.822	9,39	49,67	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.663.054.757**		-	**100,00**	**253.069.900**	**50,00**	**77.227.400**	**50,00**	**30,52**	**25,00**	**77.227.400**	**25,00**	**4,64**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	10 pkt	218.087.227		-	4	124.657.900	4	77.227.400	100,00	61,95	4	77.227.400	40,00	35,41	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti pendidikan dan pelatihan	68 org	863.800.000		-	10	128.412.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	45 org	581.167.530		-							0	-	0,00	0,00	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**95,00 %**	**8.661.435.563**	**100,00**	**2.671.382.000**	**100,00**	**2.794.273.800**	**60,00**	**2.366.115.500**	**60,00**	**84,68**	**80,00**	**5.037.497.500**	**84,21**	**58,16**	
1.4.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlebgkapan kantor yang disediakan	15 Paket	109.615.663	4	29.190.000	3	31.500.000	0		0,00	0,00	4	29.190.000	26,67	26,63	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paketbahan logistik kantor yang disediakan	48 Paket	5.204.670.300	16	1.814.760.000	8	1.429.347.000	8	1.400.050.000	100,00	97,95	24	3.214.810.000	50,00	61,77	
1.4.3	Penyediaan Barang cetakan dan penggadaan	Jumlah Paket barang cetakan danpenggadaan yang disediakan	18 Paket	1.824.749.600	6	389.082.000	5	359.716.300	3	248.333.000	60,00	69,04	9	637.415.000	50,00	34,93	
1.4.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	6 Dokumen	836.400.000	6	124.500.000	5	200.000.000	2	81.000.000	40,00	40,50	8	205.500.000	133,33	24,57	
1.4.5	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah laporan kunjungan Tamu	24 Laporan	686.000.000	8	313.850.000	4	773.710.500	4	636.732.500	100,00	82,30	12	950.582.500	50,00	138,57	
1,5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**9.870.022.828**	**88**	**2.650.794.604**	**100**	**9.016.554.768**	**25,00**	**4.435.660.300**	**25,00**	**49,19**	**56,25**	**7.086.454.904**	**56,25**	**71,80**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2 unit	87.000.000			2	52.000.000	1	52.000.000	50,00	100,00	1	52.000.000	50,00	59,77	
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29 Unit	9.783.022.828	7	2.650.794.604	3	8.964.554.768		4.383.660.300	0,00	48,90	7	7.034.454.904	24,14	71,90	
1,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**10.355.228.942**	**100,00**	**3.687.764.894**	**100,00**	**2.375.673.600**	**100,00**	**1.537.911.059**	**100,00**	**64,74**	**100,00**	**5.225.675.953**	**100,00**	**50,46**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	2.876.977.009	2	1.369.564.000	1	551.589.000	1	308.932.800	100,00	56,01	3	1.678.496.800	50,00	58,34	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Lap	3.040.803.511	2	710.281.373	1	304.989.300	1	235.829.397	100,00	77,32	3	946.110.770	50,00	31,11	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	4.437.448.422	2	1.607.919.521	1	1.519.095.300	1	993.148.862	100,00	65,38	3	2.601.068.383	25,00	58,62	
1,7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**3.862.000.550**	**100,00**	**1.421.769.000**	**100,00**	**593.905.000**	**100,00**	**403.623.000**	**100,00**	**67,96**	**100,00**	**1.825.392.000**	**100,00**	**47,27**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	1.237.230.000	7	370.540.000	5	199.680.000	5	106.700.000	100,00	53,44	12	477.240.000	33,33	38,57	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	1.750.422.550	7	541.233.000	5	281.825.000	5	187.973.000	100,00	66,70	12	729.206.000	50,00	41,66	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	11 unit	774.348.000	4	439.446.000	1	112.400.000	1	108.950.000	100,00	96,93	5	548.396.000	45,45	70,82	
1.7.4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 unit	100.000.000	3	70.550.000		-					3	70.550.000	100,00	70,55	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1,8	**Layanan Keuangan dan kesejatraan DPRD**	**Cukupan Layanan keuangan dan kesejatraan DPRD**	**100,00 %**	**97.134.650.896**	**75,00**	**32.291.574.356**	**100,00**	**16.120.607.750**	**50,00**	**14.852.688.745**	**50,00**	**92,13**	**62,50**	**47.144.263.101**	**62,50**	**48,53**	
1.8.1	Penyelengaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	1500 orang	95.441.625.700	300	32.181.574.356	300	15.961.554.250	300	14.852.688.745	100,00	93,05	600	47.034.263.101	40,00	49,28	
1.8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	26 pkt	868.025.196			100	159.053.500		-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.8.3	pelaksanaan medicasl check up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	1500 orang	825.000.000	300	110.000.000							300	110.000.000	20,00	13,33	
1,9	**Layanan Administrasi DPRD**	**Cukupan layanan administrasi DPRD**	**100,00 %**	**10.428.039.613**	**100,00**	**2.222.182.500**	**100,00**	**3.989.451.900**	**100,00**	**3.127.981.850**	**100,00**	**78,41**	**100,00**	**5.350.164.350**	**100,00**	**51,31**	
1.9.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	6 Lap	331.440.000	1	115.200.000	1	88.955.000	1	35.480.000	100,00	39,89	2	150.680.000	33,33	45,46	
1.9.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	32 Pkt	10.096.599.613	12	2.106.982.500	8	3.900.496.900	8	3.092.501.850	100,00	79,28	20	5.199.484.350	62,50	51,50	
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Presentasi terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	**100,00 %**	**94.392.248.839**	**100,97**	**37.351.561.772**	**100,00**	**18.671.441.500**	**74,17**	**17.201.751.539**	**74,17**	**92,13**	**87,57**	**54.553.313.311**	**87,57**	**57,79**	
2,1	**Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD**	**Cukupan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD**	**100,00 %**	**4.920.466.150**	**155,00**	**983.720.000**	**100,00**	**475.200.000**	**80,00**	**150.000.000**	**80,00**	**31,57**	**117,50**	**1.133.720.000**	**117,50**	**23,04**	
2.1.1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahsan program pembentukan peraturan daerah	30 Dok	4.834.066.150	3	954.920.000	5	450.000.000	3	150.000.000	60,00	33,33	6	1.104.920.000	20,00	22,86	
2.1.2	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Katerangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dok	86.400.000	3	28.800.000	5	25.200.000	5	-	100,00	0,00	8	28.800.000	160,00	33,33	
2,2	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Cukupan Ketersediaan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100,00 %**	**12.165.360.000**	**163,89**	**2.839.396.873**	**100,00**	**990.794.700**	**83,33**	**682.782.000**	**83,33**	**68,91**	**123,61**	**3.522.178.873**	**123,61**	**28,95**	
2.2.1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 Keg	8.037.650.000	1	1.797.627.473	2	737.219.700	2	475.782.000	100,00	64,54	3	2.273.409.473	25,00	28,28	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.2.2	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	15 OK	1.637.950.000	1	278.029.400	3	169.575.000	3	165.000.000	100,00	97,30	4	443.029.400	26,67	27,05	
2.2.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	840 OB	2.489.760.000	7	763.740.000	14	84.000.000	7	42.000.000	50,00	50,00	14	805.740.000	1,67	32,36	
2,3	**Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Cukupan Terpenuhinya Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disampaikan Kepada Anggota DPRD**	**100,00 %**	**20.040.388.000**	**200,00**	**5.562.090.000**	**100,00**	**4.513.972.800**	**33,33**	**4.244.210.000**	**33,33**	**94,02**	**116,67**	**9.806.300.000**	**116,67**	**48,93**	
2.3.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Lap	403.760.000	1	49.600.000	1	65.900.000			0,00	0,00	1	49.600.000	16,67	12,28	
2.3.2	Penyusunana Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok - Pokok pikiran DPRDyang disusun	3 dokumen	28.000.000			3	7.003.400			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2.3.3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	18 Dok	19.608.628.000	3	5.512.490.000	3	4.441.069.400	3	4.244.210.000	100,00	95,57	6	9.756.700.000	33,33	49,76	
2,4	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Presentasi Fasilitasi Tugas DPRD**	**100 %**	**57.266.034.689**	**100,00**	**27.966.354.899**	**100,00**	**12.691.474.000**	**100,00**	**12.124.759.539**	**100,00**	**95,53**	**100,00**	**40.091.114.438**	**100,00**	**70,01**	
2.4.1	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18 Dok	57.266.034.689	3	27.966.354.899	2	12.691.474.000	2	12.124.759.539	100,00	95,53	5	40.091.114.438	27,78	70,01	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)											**80,61**	**52,24**			**52,20**	**37,21**	
Predikat Kinerja											**T**	**R**					
Jumlah Total				**252.978.912.073**		**88.287.095.403**		**56.391.488.127**		**46.215.182.938**		**81,95**		**134.502.278.341**		**53,17**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																
	Bidang Urusan Pemerintahan																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**238.640.702.886**	**90,92**	**66.009.586.045**	**90,00**	**42.074.332.546**	**80,43**	**30.137.697.290**	**89,36**	**71,63**	**85,67**	**96.147.283.335**	**85,67**	**40,29**	
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase konsistensi Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan Renja Terhadap Renstra**	**100,00 %**	**644.489.159**	**98,41**	**413.327.159**		-		-			**49,21**	**413.327.159**	**49,21**	**64,13**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	20.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	21.500.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dok	21.500.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	21.500.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dok	21.500.000	0	-							0	-	0,00	0,00	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Lap	515.489.159	4	413.327.159							4	413.327.159	57,14	80,18	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	23.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah**	**100,00 %**	**64.763.493.745**	**88,54**	**18.931.919.904**	**100,00**	**10.745.787.850**	**60,25**	**7.673.853.475**	**60,25**	**71,41**	**74,40**	**26.605.773.379**	**74,40**	**41,08**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15132 OB	64.091.493.956	2231	18.931.919.904	2522	10.739.790.750	1358	7.673.853.475	53,85	71,45	3589	26.605.773.379	23,72	41,51	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 lLap	671.999.789	0	-	3	5.997.100	0		0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase capaian indikator kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian**	**100,00 %**	**2.914.490.934**	**75,00**	**475.161.172**	**100,00**	**65.000.000**	**100,00**	**39.580.000**	**100,00**	**60,89**	**87,50**	**514.741.172**	**87,50**	**17,66**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Org	219.994.500	0,00	-							0	-	0,00	0,00	
1.3.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Org	499.370.000	2	229.131.172	1	65.000.000	1	39.580.000	100,00	60,89	3	268.711.172	50,00	53,81	
1.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Org	682.212.602	3	50.000.000							3	50.000.000	3,90	7,33	
1.3.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1070 Org	923.128.832	100,00	196.030.000							100	196.030.000	9,35	21,24	
1.3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	183 Org	589.785.000	0,00	-							0	-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase capaian indikator kinerja sub kegiatan Administrasi Umum Sekretariat Daerah**	**100,00 %**	**30.519.377.713**	**100,00**	**11.370.568.642**	**100,00**	**5.462.027.300**	**100,00**	**5.121.780.519**	**100,00**	**93,77**	**100,00**	**16.492.349.161**	**100,00**	**54,04**	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Pkt	1.490.050.000	2	487.966.000	1	249.999.200	1	249.999.000	100,00	100,00	3	737.965.000	50,00	49,53	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Pkt	8.648.526.721	2	2.822.515.910	1	1.385.022.500	1	1.192.239.875	100,00	86,08	3	4.014.755.785	50,00	46,42	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Pkt	1.691.024.700	2	632.743.100	1	415.551.800	1	365.642.000	100,00	87,99	3	998.385.100	50,00	59,04	
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Lap	5.229.622.000	2	2.084.850.169	1	1.161.500.000	1	1.065.235.053	100,00	91,71	3	3.150.085.222	50,00	60,24	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Lap	13.460.154.292	460	5.342.493.463	1	2.249.953.800	1	2.248.664.591	100,00	99,94	461	7.591.158.054	7683,33	56,40	
1,5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian indikator kinerja sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah**	**100,00 %**	**6.555.940.000**	**50**	**1.486.400.000**	**100**	**449.526.000**		-	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**1.486.400.000**	**25,00**	**22,67**	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan	4 Unit	2.755.940.000	2	1.486.400.000							2	1.486.400.000	50,00	53,93	
1.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	3.800.000.000	0	-	2	449.526.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;**	**100,00 %**	**36.811.723.723**	**100,00**	**10.307.143.454**	**100,00**	**6.274.642.200**	**100,00**	**4.184.504.906**	**100,00**	**66,69**	**100,00**	**14.491.648.360**	**100,00**	**39,37**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	385.000.000	2	141.970.000	1	62.000.000	1	34.000.000	100,00	54,84	3	175.970.000	50,00	45,71	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Lap	11.863.913.000	2	2.494.676.097	1	1.588.777.200	1	904.513.789	100,00	56,93	3	3.399.189.886	50,00	28,65	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Lap	926.000.000	2	103.850.000	1	152.000.000	1	55.960.000	100,00	36,82	3	159.810.000	50,00	17,26	
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Lap	23.636.810.723	2	7.566.647.357	1	4.471.865.000	1	3.190.031.117	100,00	71,34	3	10.756.678.474	50,00	45,51	
1,7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00 %**	**36.948.704.576**	**100,00**	**6.648.246.864**	**100,00**	**9.218.319.100**	**100,00**	**4.666.160.554**	**100,00**	**50,62**	**100,00**	**11.314.407.418**	**100,00**	**30,62**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	979.125.000	3,00	244.184.000	3	125.700.000	3	125.700.000	100,00	100,00	6	369.884.000	33,33	37,78	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	13.915.885.500	15	3.035.087.331	15	1.892.253.100	15	1.847.786.688	100,00	97,65	30	4.882.874.019	33,33	35,09	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	30 Bln	22.053.694.076	5	3.368.975.533	3	7.200.366.000	3	2.692.673.866	100,00	37,40	8	6.061.649.399	26,67	27,49	
1,8	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tingkat realisasi indikator kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100,00 %**	**5.246.138.288**	**100,00**	**1.568.899.325**	**100,00**	**852.491.496**	**100,00**	**667.269.028**	**100,00**	**78,27**	**100,00**	**2.236.168.353**	**100,00**	**42,63**	
1.8.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240 OB	2.314.000.019	72,00	1.391.761.056	24	177.491.496	24	171.269.028	100,00	96,49	96	1.563.030.084	40,00	67,55	
1.8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Unit	327.138.269	0	177.138.269							0	177.138.269	0,00	54,15	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.8.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	96 Unit	905.000.000	0	-	2	275.000.000	2	100.000.000	100,00	36,36	2	100.000.000	2,08	11,05	
1.8.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	96 Bln	1.700.000.000	0	-	24	400.000.000	24	396.000.000	100,00	99,00	24	396.000.000	25,00	23,29	
1,9	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase capaian indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100,00 %**	**19.537.739.600**	**100,00**	**4.839.249.875**	**100,00**	**3.249.991.000**	**100,00**	**2.827.215.421**	**100,00**	**86,99**	**100,00**	**7.666.465.296**	**100,00**	**39,24**	
1.9.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Pkt	9.963.932.800	1,00	2.687.507.718	1	1.649.997.300	1	1.453.750.950	100,00	88,11	2	4.141.258.668	33,33	41,56	
1.9.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Pkt	8.023.189.050	1	1.775.393.997	1	1.349.997.300	1	1.126.787.941	100,00	83,47	2	2.902.181.938	33,33	36,17	
1.9.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	6 Pkt	1.550.617.750	1	376.348.160	1	249.996.400	1	246.676.530	100,00	98,67	2	623.024.690	33,33	40,18	
1.10	**Penataan Organisasi**	**Persentase Penataan organisasi**	**100,00 %**	**5.548.636.934**	**100,00**	**1.171.358.275**	**100,00**	**746.000.000**	**60,00**	**273.888.472**	**60,00**	**36,71**	**80,00**	**1.445.246.747**	**80,00**	**26,05**	
1.10.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dok	1.984.152.467	1,00	393.285.815	1	225.000.000	0	-	0,00	0,00	1	393.285.815	8,33	19,82	
1.10.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Lap	932.774.991	1,00	286.663.490	1	156.000.000	1	32.887.000	100,00	21,08	2	319.550.490	33,33	34,26	
1.10.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dok	892.143.000	1	37.410.980	1	175.000.000	1	121.022.332	100,00	69,16	2	158.433.312	16,67	17,76	
1.10.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Dok	800.315.830	1	134.638.000	1	70.000.000	0	-	0,00	0,00	1	134.638.000	16,67	16,82	
1.10.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Dok	939.250.646	2	319.359.990	2	120.000.000	2	119.979.140	100,00	99,98	4	439.339.130	33,33	46,78	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.11	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Tingkat realisasi indikator kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100,00 %**	**29.149.968.214**	**100,00**	**8.797.311.375**	**100,00**	**5.010.547.600**	**100,00**	**4.683.444.915**	**100,00**	**93,47**	**100,00**	**13.480.756.290**	**100,00**	**46,25**	
1.11.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Lap	6.119.998.050	2,00	1.655.258.000	3	941.248.200	3	729.909.000	100,00	77,55	5	2.385.167.000	41,67	38,97	
1.11.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Lap	23.029.970.164	6	7.142.053.375	6	4.069.299.400	6	3.953.535.915	100,00	97,16	12	11.095.589.290	33,33	48,18	
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah**	**89,45 Nilai**	**47.287.632.170**	**30,40**	**19.975.651.953**	**75,84**	**12.660.729.322**	**62,51**	**9.292.097.864**	**82,42**	**73,39**	**46,46**	**29.267.749.817**	**51,93**	**61,89**	
		Persentase keterlaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan Koordinasi hukum serta kerjasama daerah	**100,00 %**		**97,94**	**-**	**100,00**		**69,17**		**69,17**		**83,55**	**-**	**83,55**		
2,1	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan yang terlaksana**	**100,00 %**	**7.472.645.343**	**200,00**	**1.481.262.959**	**100,00**	**1.074.663.600**	**100,00**	**946.820.264**	**100,00**	**88,10**	**150,00**	**2.428.083.223**	**150,00**	**32,49**	
2.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	24 Dok	2.534.034.068	4	576.284.809	4	691.305.700	4	601.153.425	100,00	86,96	8	1.177.438.234	33,33	46,46	
2.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dministrasi Kewilayahan	4 Dok	1.340.000.000	0	-	0	-					0	-	0,00	0,00	
2.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	36 Dok	3.598.611.275	6	904.978.150	6	383.357.900	6	345.666.839	100,00	90,17	12	1.250.644.989	33,33	34,75	
2,2	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Fasilitasi dan pelaksanaan kebijkan kesejahteraan rakyat**	**100,00 %**	**27.465.000.166**	**200,00**	**15.227.561.013**	**100,00**	**10.072.661.555**	**100,00**	**7.000.652.749**	**100,00**	**69,50**	**150,00**	**22.228.213.762**	**150,00**	**80,93**	
2.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	36 Dok	9.871.573.500	6	4.832.549.763	6	2.683.411.555	6	2.217.402.749	100,00	82,63	12	7.049.952.512	33,33	71,42	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dok	565.000.000	0	-	0	-					0	-	0,00	0,00	
2.2.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	336 Dok	17.028.426.666	52	10.395.011.250	56	7.389.250.000	56	4.783.250.000	100,00	64,73	108	15.178.261.250	32,14	89,13	
2,3	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase pemenuhan fasilitasi dan koordinasi hukum**	**100 %**	**10.856.986.661**	**92**	**3.016.905.154**	**100,00**	**1.513.400.400**	**100,00**	**1.344.624.851**	**100,00**	**88,85**	**95,87**	**4.361.530.005**	**95,87**	**40,17**	
2.3.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	18 Produk	3.025.924.995	7	911.450.654	5	514.999.900	5	347.319.100	100,00	67,44	12	1.258.769.754	66,67	41,60	
2.3.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	60 Kasus	6.469.911.666	8	1.537.644.500	10	873.400.500	10	872.305.751	100,00	99,87	18	2.409.950.251	30,00	37,25	
2.3.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2700 Dok	1.361.150.000	903,00	567.810.000	3	125.000.000	3	125.000.000	100,00	100,00	906	692.810.000	33,56	50,90	
2,3	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase kerjasama yang terlaksana**	**100 %**	**1.493.000.000**	**50**	**249.922.827**	**100,00**	**3.767**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**249.922.827**	**25,00**	**16,74**	
2.3.1	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dok	1.493.000.000	1	249.922.827	1	3.767			0,00	0,00	1	249.922.827	20,00	16,74	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase keterlaksanaan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan**	**100,00 %**	**1.956.688.274**	**115,7292**	**366.511.850**	**100**	**360.838.500**	**77,78**	**140.671.760**	**77,78**	**38,98**	**96,75**	**507.183.610**	**96,75**	**25,92**	
		Presentase jumlah paket pengadaan barang/ jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif (lelang)	**18,60 %**	**7.150.580.025**	**16,95**	**795.196.000**	**14,00**	**1.055.078.800**	**23,05**	**45.000.000**	**164,64**	**4,27**	**20,00**	**840.196.000**	**107,53**	**11,75**	
3,1	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Presentase pelaksanaan kebijakan perekonomian**	**100,00 %**	**245.000.000**	**0**	-	**100**	**49.668.000**	**100,00**	**49.319.560**	**100,00**	**99,30**	**50,00**	**49.319.560**	**50,00**	**20,13**	
3.1.1	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dok	245.000.000	0	-	1	49.668.000	1	49.319.560	100,00	99,30	1	49.319.560	25,00	20,13	
3,2	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Presentasi terlaksananya administrasi pembangunan**	**100,00 %**	**1.711.688.274**	**100**	**366.511.850**	**100**	**311.170.500**	**100,00**	**91.352.200**	**100,00**	**29,36**	**100,00**	**457.864.050**	**100,00**	**26,75**	
3.2.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	16 Dok	615.517.426	8	366.511.850	4	95.000.000	4	27.603.500	100,00	29,06	12	394.115.350	75,00	64,03	
3.2.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Lap	871.170.848	0	-	4	131.170.500	4	51.221.400	100,00	39,05	4	51.221.400	100,00	5,88	
3.2.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Lap	225.000.000	0	-	3	85.000.000	3	12.527.300	100,00	14,74	3	12.527.300	25,00	5,57	
3,3	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Meningkatnya pengguna layanan secara elektronik**	**100,00 %**	**7.150.580.025**	**81**	**795.196.000**	**100**	**1.055.078.800**	**33,33**	**45.000.000**	**33,33**	**4,27**	**57,40**	**840.196.000**	**57,40**	**11,75**	
3.3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	479 Dok	4.922.457.027	225	498.000.000	80	725.078.800		-	0,00	0,00	225	498.000.000	46,97	10,12	
3.3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dok	1.868.526.547	4	272.196.000	2	285.000.000	2	45.000.000	100,00	15,79	6	317.196.000	50,00	16,98	
3.3.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	192 Org	359.596.451	60	25.000.000	30	45.000.000		-	0,00	0,00	60	25.000.000	31,25	6,95	
								Rata - rata Capaian Kinerja (%)			**89,36**	**60,25**			**138,13**	**31,78**	
								Predikat Kinerja			**T**	**R**					
Jumlah Total				**295.035.603.355**		**87.146.945.848**		**56.150.979.168**		**39.615.466.914**		**70,55**		**126.762.412.762**		**42,97**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Penunjang																
	Bidang Urusan Keuangan																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**90,00 %**	**75.122.598.575**	**91,82**	**28.591.985.864**	**100,00**	**16.720.851.486**	**95,12**	**11.866.533.921**	**95,12**	**70,97**	**93,47**	**40.458.519.785**	**103,85**	**53,86**	**Badan Keuangan Dan Aset Daerah**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.848.824.595**	**100,00**	**688.306.329**	**100,00**	**451.962.800**	**97,12**	**451.843.000**	**97,12**	**99,97**	**98,56**	**1.140.149.329**	**98,56**	**61,67**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlahn Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dok	476.788.284	6	154.736.332	3	151.092.200	3	150.990.000	100,00	99,93	9	305.726.332	50,00	64,12	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	1.016.036.191	2	416.148.998	1	228.866.000	1	228.853.800	100,00	99,99	3	645.002.798	50,00	63,48	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	45.183.872	2	15.360.000	1	15.004.600	1	14.999.600	100,00	99,97	3	30.359.600	50,00	67,19	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dok	70.633.716	2	23.814.999	1	12.000.000	1	12.000.000	100,00	100,00	3	35.814.999	50,00	50,71	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dok	45.902.472	2	14.016.000	1	15.000.000	1	15.000.000	100,00	100,00	3	29.016.000	50,00	63,21	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	126.996.702	2	40.940.000	1	20.000.000	1	19.999.600	100,00	100,00	3	60.939.600	50,00	47,99	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Lap	67.283.358	2	23.290.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00	100,00	3	33.290.000	50,00	49,48	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**59.027.596.438**	**92,87**	**21.072.076.570**	**100,00**	**13.680.129.420**	**96,71**	**8.954.380.373**	**96,71**	**65,46**	**94,79**	**30.026.456.943**	**94,79**	**50,87**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Org	58.336.257.803	106	20.843.857.496	53	13.438.485.420	53	8.723.859.673	100,00	64,92	159	29.567.717.169	44,17	50,68	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dok	226.572.311	2	72.195.498	1	45.249.400	1	45.173.500	100,00	99,83	3	117.368.998	50,00	51,80	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Lap	323.422.146	2	110.048.664	1	129.867.000	1	118.980.000	100,00	91,62	3	229.028.664	50,00	70,81	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	6 Lap	82.104.822	2	26.647.998	1	48.550.800	1	48.550.000	100,00	100,00	3	75.197.998	50,00	91,59	
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	6 Dok	59.239.356	2	19.326.914	1	17.976.800	1	17.817.200	100,00	99,11	3	37.144.114	50,00	62,70	
1,3	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengadaan BMD pada perangkat Daerah**	**100,00 %**	**424.022.623**	**100,00**	**177.921.295**	**100,00**	**116.543.500**	**100**	**108.542.500**	**100,00**	**93,13**	**100,00**	**286.463.795**	**100,00**	**67,56**	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Lap	87.554.952	2	43.349.200	1	24.090.600	1	24.090.600	100,00	100,00	3	67.439.800	50,00	77,03	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.3.2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6 Lap	72.520.745	2	33.892.745	1	9.999.900	1	9.999.900	100,00	100,00	3	43.892.645	50,00	60,52	
1.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Dok	263.946.927	2	100.679.350	1	82.453.000	1	74.452.000	100,00	90,30	3	175.131.350	50,00	66,35	
1,4	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Rasio efektifitas retribusi Daerah PAD (Presen) rumus nilai realisasi retribusi /nilai targer retribusi x 100 persen**	**100 %**	**257.692.274**	**100**	**84.493.749**	**100**	**46.533.200**	**100**	**46.498.400**	**100,00**	**99,93**	**100,00**	**130.992.149**	**100,00**	**50,83**	
1.4.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Dok	33.755.134	2	10.880.500	1	10.033.600	1	9.998.800	100,00	99,65	3	20.879.300	50,00	61,86	
1.4.2	Pendaftaran Wajip Pajak Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	6 Dok	53.463.310	2	17.234.499	1	8.500.000	1	8.500.000	100,00	100,00	3	25.734.499	50,00	48,13	
1.4.3	Pengolahan Data PAD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	6 Lap	90.396.408	2	29.743.500	1	14.999.600	1	14.999.600	100,00	100,00	3	44.743.100	50,00	49,50	
1.4.4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Lap	80.077.422	2	26.635.250	1	13.000.000	1	13.000.000	100,00	100,00	3	39.635.250	50,00	49,50	
1,5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.155.736.004**	**115,00**	**506.126.287**	**100,00**	**77.026.000**	**100,00**	**47.457.000**	**100,00**	**61,61**	**107,50**	**553.583.287**	**107,50**	**47,90**	
1.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Pkt	80.000.000		-							0	-	0,00	0,00	
1.5.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	135.910.469	3	42.063.989	2	27.000.000	2	26.999.000	100,00	100,00	5	69.062.989	41,67	50,82	
1.5.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dok	95.046.813	1	32.064.849							1	32.064.849	33,33	33,74	
1.5.4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dok	96.513.722	2	25.568.849	1	20.458.000	1	20.458.000	100,00	100,00	3	46.026.849	50,00	47,69	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.5.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Org	675.400.000	5	26.801.100	2	29.568.000	0	-	0,00	0,00	5	26.801.100	8,77	3,97	
1.5.6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	57 Org	72.865.000	2	379.627.500							2	379.627.500	3,51	521,00	
1,6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**4.507.062.284**	**100,00**	**2.133.348.594**	**100,00**	**1.308.070.300**	**100,00**	**1.290.353.100**	**100,00**	**98,65**	**100,00**	**3.423.701.694**	**100,00**	**75,96**	
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	95 Paket	214.636.000	6	36.116.000	3	24.996.300	3	24.996.300	100,00	100,00	9	61.112.300	9,47	28,47	
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	1.167.446.500	6	783.763.500	3	220.280.300	3	202.745.200	100,00	92,04	9	986.508.700	25,71	84,50	
1.6.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	18 Paket	1.202.623.500	15	469.035.200	12	576.921.700	12	576.740.200	100,00	99,97	27	1.045.775.400	150,00	86,96	
1.6.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Paket	293.358.333	6	152.106.000	1	86.500.000	1	86.500.000	100,00	100,00	7	238.606.000	23,33	81,34	
1.6.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Paket	293.900.000	2	116.900.000	1	80.744.000	1	80.743.400	100,00	100,00	3	197.643.400	50,00	67,25	
1.6.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselengaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330 Org	1.335.097.952	71	575.427.894	46	318.628.000	46	318.628.000	100,00	100,00	117	894.055.894	35,45	66,97	
1,7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presen)**	**100 %**	**2.785.674.503**	**0**	-							**0,00**	-	0,00	0,00	
1.7.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Jumlah unit bangunan gedung/kantor laiinnya yang disediakan	2 Unit	2.785.674.503	0	-							0	-	0,00	0,00	
1,8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**4.574.052.919**	**100,00**	**1.434.908.240**	**100,00**	**807.843.058**	**100,00**	**781.581.101**	**100,00**	**96,75**	**100,00**	**2.216.489.341**	**100,00**	**48,46**	
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	2.553.360.616	2	885.457.411	1	486.100.000	1	486.092.000	100,00	100,00	3	1.371.549.411	50,00	53,72	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Lap	611.660.800	2	180.054.144	1	117.063.400	1	91.049.843	100,00	77,78	3	271.103.987	50,00	44,32	
1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap	276.080.400	2	95.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	100,00	100,00	3	145.000.000	50,00	52,52	
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Lap	1.132.951.103	2	274.396.685	1	154.679.658	1	154.439.258	100,00	99,84	3	428.835.943	50,00	37,85	
1,9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**3.327.611.437**	**100,00**	**2.494.804.800**	**100,00**	**232.743.208**	**50,00**	**185.878.447**	**50,00**	**79,86**	**75,00**	**2.680.683.247**	**75,00**	**80,56**	
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	1.049.473.061	2	173.984.600	2	232.743.208	2	185.878.447	100,00	79,86	2	359.863.047	16,67	34,29	
1.9.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	2.278.138.376	1	2.320.820.200							0	2.320.820.200	0,00	101,87	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Rasio efektifitas belanja daerah (persentase realisasi terhadap target) (Rumus: realisasi PAD tahun berkenaan dibagi anggaran dikali 100%)**	**100,00 %**	**29.846.166.104**	**38,20**	**11.031.076.357**	**86,25**	**7.328.276.100**	**74,09**	**7.155.845.090**	**85,90**	**97,65**	**56,15**	**18.186.921.447**	**56,15**	**60,94**	
		Indeks predikat LKPD sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2020	**100,00 %**		**50,00**		**100,00**		**0**		**0,00**		**25,00**		**25,00**		
2,1	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah Dokumen Anggaran Daerah**	**6 Dok**	**12.287.031.716**	**2**	**4.920.543.043**	**2**	**2.489.486.400**	**2**	**2.485.847.390**	**100,00**	**99,85**	**2**	**7.406.390.433**	**33,33**	**60,28**	
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	12 Dok	1.616.577.188	4	559.013.757	2	231.800.000	2	231.736.000	100,00	99,97	6	790.749.757	50,00	48,92	
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	12 Dok	1.324.736.164	4	464.491.082	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00	100,00	6	664.491.082	50,00	50,16	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikas	6 Dok	376.000.000	2	159.770.000	1	50.000.000	1	50.000.000	100,00	100,00	3	209.770.000	50,00	55,79	
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikas	6 Dok	376.000.000	2	147.500.000	1	50.000.000	1	50.000.000	100,00	100,00	3	197.500.000	50,00	52,53	
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikas	6 Dok	376.000.000	2	125.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	100,00	100,00	3	175.000.000	50,00	46,54	
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikas	6 Dok	376.000.000	2	106.250.000	1	50.000.000	1	50.000.000	100,00	100,00	3	156.250.000	50,00	41,56	
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	12 Dok	3.187.499.000	4	1.371.125.740	2	758.292.500	2	756.731.000	100,00	99,79	6	2.127.856.740	50,00	66,76	
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Dok	3.366.498.700	4	1.301.721.800	2	762.492.000	2	761.974.000	100,00	99,93	6	2.063.695.800	50,00	61,30	
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dok	687.720.664	2	287.720.664	1	131.848.700	1	131.844.390	100,00	100,00	3	419.565.054	50,00	61,01	
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6 Dok	300.000.000	**2**	297.950.000	1	100.202.400	1	98.711.200	100,00	98,51	3	396.661.200	50,00	132,22	
2.1.11	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	300 Org	300.000.000	150	100.000.000	50	104.850.800	50	104.850.800	100,00	100,00	200	204.850.800	66,67	68,28	
2,2	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**IndeksDokumenpengelolaan perbendahaaran daerah**	**100 %**	**5.787.806.046**	**100**	**2.052.956.046**	**100**	**1.827.031.300**	**100**	**1.712.953.900**	**100,00**	**93,76**	**100,00**	**3.765.909.946**	**100,00**	**65,07**	
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dok	278.051.997	2	75.031.997	1	146.093.000	1	146.020.900	100,00	99,95	3	221.052.897	50,00	79,50	
2.2.2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dok	753.009.950	2	342.790.950	1	569.986.800	1	475.847.900	100,00	83,48	3	818.638.850	50,00	108,72	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.2.3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6 Dok	150.504.950	2	39.994.950	1	50.440.000	1	50.440.000	100,00	100,00	3	90.434.950	50,00	60,09	
2.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Lap	170.504.950	4	40.004.950	2	63.300.000	2	63.300.000	100,00	100,00	6	103.304.950	50,00	60,59	
2.2.5	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	6 Dok	161.609.800	2	31.079.800	1	78.040.000	1	78.040.000	100,00	100,00	3	109.119.800	50,00	67,52	
2.2.6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dok	2.810.966.000	4	888.821.000	2	552.231.500	2	532.707.600	100,00	96,46	6	1.421.528.600	50,00	50,57	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.2.7	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan denganPenerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	12 Dok	271.584.500	4	81.084.500	2	116.000.000	2	115.660.000	100,00	99,71	6	196.744.500	50,00	72,44	
2.2.8	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota	588 Org	1.191.573.899	196	554.147.899	100	250.940.000	98	250.937.500	98,00	100,00	294	805.085.399	50,00	67,56	
2,3	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah Dokumen pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten /Kota**	**6 Dok**	**9.400.806.430**	**4**	**3.029.396.048**	**2**	**2.163.911.200**	**2**	**2.161.516.800**	**100,00**	**99,89**	**6**	**5.190.912.848**	**100,00**	**55,22**	
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6 Lap	280.720.600	2	74.610.000	1	153.664.800	1	153.664.000	100,00	100,00	3	228.274.000	50,00	81,32	
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	6 Dok	1.882.246.332	2	506.875.836	1	471.000.000	1	471.000.000	100,00	100,00	3	977.875.836	50,00	51,95	
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Lap	398.723.132	6	131.722.450	3	162.764.600	3	162.659.000	100,00	99,94	9	294.381.450	50,00	73,83	
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Lap	2.402.826.464	4	776.413.232	2	607.268.000	2	607.268.000	100,00	100,00	6	1.383.681.232	50,00	57,59	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota	12 Dok	2.281.630.502	4	620.675.250	2	350.000.000	2	349.553.200	100,00	99,87	6	970.228.450	50,00	42,52	
2.3.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan /Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	6 Dok	262.850.000	2	59.830.000	1	49.924.000	1	49.924.000	100,00	100,00	3	109.754.000	50,00	41,76	
2.3.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dok	170.315.000	2	43.805.000	1	25.000.000	1	25.000.000	100,00	100,00	3	68.805.000	50,00	40,40	
2.3.8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dok	164.940.000	2	39.440.000	1	24.774.800	1	23.428.800	100,00	94,57	3	62.868.800	50,00	38,12	
2.3.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	12 Dok	262.280.000	4	59.260.000	2	119.515.000	2	119.468.200	100,00	99,96	6	178.728.200	50,00	68,14	
2.3.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Dok	261.285.000	2	58.265.000	1	50.000.000	1	50.000.000	100,00	100,00	3	108.265.000	50,00	41,44	
2.3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten /Kota	588 Org	658.499.400	198	584.009.280	100	100.000.000	98	100.000.000	98,00	100,00	296	684.009.280	50,34	103,87	
2.3.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten /Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	6 Lbg	190.205.000	2	40.205.000	1	25.000.000	1	24.551.600	100,00	98,21	3	64.756.600	50,00	34,05	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.3.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Lap	184.285.000	2	34.285.000	1	25.000.000	1	25.000.000	100,00	100,00	3	59.285.000	50,00	32,17	
2,4	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Terkelolanya Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**100 %**	**2.370.521.912**	**100**	**1.028.181.220**	**100**	**847.847.200**	**100**	**795.527.000**	**100,00**	**93,83**	**100,00**	**1.823.708.220**	**100,00**	**76,93**	
2.4.1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5 Dok	2.370.521.912	2	1.028.181.220	1	847.847.200	1	795.527.000	100,00	93,83	3	1.823.708.220	60,00	76,93	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Pertumbuhan Nilai Barang Milik Daerah (persen) Rumus (kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya) Tahun 2020 /2021**	**100 %**	**6.753.189.453**	**1**	**2.722.506.496**	**8,59**	**1.968.780.800**	**0**	**1.833.434.238**	**0,00**	**93,13**	**0,47**	**4.555.940.734**	**0,47**	**67,46**	
3,1	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Dokumen Standar Harga dan Dokumen BMD**	**12 Dok**	**6.753.189.453**	**4**	**2.722.506.496**	**2**	**1.968.780.800**	**2**	**1.833.434.238**	**100,00**	**93,13**	**6**	**4.555.940.734**	**50,00**	**67,46**	
3.1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dok	900.890.313	2	303.967.000	1	210.000.000	1	209.985.000	100,00	99,99	3	513.952.000	50,00	57,05	
3.1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dok	-	2	159.925.000	1	100.000.000	1	99.993.000	100,00	99,99	3	259.918.000	50,00	0,00	
3.1.3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	6 Dok	331.010.000	2	104.909.400	1	62.570.900	1	61.775.000	100,00	98,73	3	166.684.400	50,00	50,36	
3.1.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penata usahaan Barang Milik Daerah	6 Lap	1.232.355.000	2	879.004.296	1	200.000.000	1	181.944.000	100,00	90,97	3	1.060.948.296	50,00	86,09	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Lap				1	150.159.300	1	140.503.600	100,00	93,57	1	140.503.600			
3.1.5	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 Lap	621.724.000	2	163.216.000	1	165.000.000	1	73.617.500	100,00	44,62	3	236.833.500	50,00	38,09	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.1.6	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 Dok	730.865.000	2	253.500.000	1	170.229.600	1	162.481.900	100,00	95,45	3	415.981.900	50,00	56,92	
3.1.7	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Lap	221.595.140	2	73.707.000	1	80.000.000	1	79.754.200	100,00	99,69	3	153.461.200	50,00	69,25	
3.1.8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	6 Lap	1.650.480.000	2	542.474.800	1	369.679.000	1	369.537.800	100,00	99,96	3	912.012.600	50,00	55,26	
3.1.9	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	1.064.270.000	160	241.803.000	100	461.142.000	60	453.842.238	60,00	98,42	220	695.645.238	36,67	65,36	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (persentase realisasi terhadap target) (Rumus: Total PAD dibagi Total Pendapatan Transfer Pusat & Provinsi dan Pinjaman, dikali 100%)**	**100 Rasio**	**14.767.764.973**	**11**	**7.481.763.080**	**90**	**4.176.240.700**	**91,69**	**3.579.523.406**	**101,88**	**85,71**	**103**	**11.061.286.486**	**102,74**	**74,90**	
4,1	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan pendapatan Daerah**	**12 Dok**	**14.767.764.973**	**4**	**7.481.763.080**	**2**	**4.176.240.700**	**2**	**3.579.523.406**	**100,00**	**85,71**	**6**	**11.061.286.486**	**50,00**	**74,90**	
4.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Dok	10.465.631.899	2	6.167.842.251	1	3.215.343.900	1	2.624.004.946	100,00	81,61	3	8.791.847.197	50,00	84,01	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok				1	24.999.900	1	24.999.900	100,00	100,00	1	24.999.900			
4.1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebar luasan Kebijakan Pajak Daera	6 Lap	439.776.250	2	143.776.250	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00	100,00	3	293.776.250	50,00	66,80	
4.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daer	24 Unit	439.004.999	4	67.376.870	4	74.999.900	4	74.999.000	100,00	100,00	8	142.375.870	33,33	32,43	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	6 Lap	586.474.168	2	184.870.000	1	109.600.000	1	109.561.060	100,00	99,96	3	294.431.060	50,00	50,20	
4.1.5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daera	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0 Lap	190.000.000	0	-	1	40.719.300	1	40.443.900	100,00	99,32	1	40.443.900		21,29	
4.1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	6 Lap	1.278.310.329	2	467.853.129	1	204.035.900	1	199.900.800	100,00	97,97	3	667.753.929	50,00	52,24	
4.1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	6 Dok	599.159.160	2	197.063.160	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00	100,00	3	297.063.160	50,00	49,58	
4.1.8	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pajak terutang dan tunggakan	6 Dok	769.408.167	2	252.981.420	1	256.541.800	1	255.613.800	100,00	99,64	3	508.595.220	50,00	66,10	
											Rata - rata Capaian Kinerja (%)		95,99	94,83			
											Predikat Kinerja		ST	ST			
Jumlah Total				126.489.719.104		49.827.331.797		30.194.149.086		24.435.336.655		80,93		74.262.668.452		58,71	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	PERENCANAAN																	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**95**	**Persen**	**45.518.447.737**	**69,03**	**12.783.536.190**	**90**	**6.662.170.063**	**70,27**	**5.048.000.048**	**78,07**	**75,77**	**69,65**	**17.831.536.238**	**73,31**	**39,17**	**BAPPEDA**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Konsistensi Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA Bappeda terhadap RKPD**	**100**	**Persen**	**178.978.398**	**100**	**45.963.500**	**90**	**32.948.600**	**100**	**7.729.300**	**110,86**	**23,46**	**100,00**	**53.692.800**	**100,00**	**30,00**	
		Persentase Konsistensi Penganggaran Renja Bappeda terhadap RKPD	**95**	**Persen**		**95**		**89**		**100**		**112,36**		**97,50**		**102,63**		
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dokumen	72.104.500	5	20.578.500	2	12.249.900	2	2.350.900	100,00	19,19	7	22.929.400	50,00	31,80	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	Dokumen	7.136.300	2	235.000	1	935.400	1	935.400	100,00	100,00	3	1.170.400	25,00	16,40	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12	Dokumen	7.136.300	2	117.000	1	935.400	1	935.400	100,00	0,00	3	1.052.400	25,00	14,75	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	Dokumen	7.136.300	2	234.000	1	935.400	1	-	100,00	0,00	3	234.000	25,00	3,28	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12	Dokumen	7.136.300	2	-	1	935.400	1	-	100,00	0,00	3	-	25,00		

1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	49.533.200	2	21.911.000	1	12.757.600	3	3.507.600	300,00	27,49	5	25.418.600	41,67	51,32	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Laporan	28.795.498	8	2.888.000	5	4.199.500	5	-	100,00	0,00	13	2.888.000	54,17	10,03	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**31.982.172.261**	**53,99**	**10.124.061.718**	**100**	**4.520.804.863**	**37,38**	**3.954.548.721**	**37,38**	**87,47**	**45,69**	**14.078.610.439**	**45,69**	**44,02**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5772	Orang/Bln	31.894.620.461	1586	10.112.571.718	40	4.501.652.263	28	3.948.471.121	70,00	87,71	1614	14.061.042.839	27,96	44,09	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	32.915.500	2	9.250.000	2	13.075.000	1	-	50,00	0,00	3	9.250.000	25,00	28,10	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	54.636.300	8	2.240.000	8	6.077.600	4	6.077.600	50,00	100,00	12	8.317.600	100,00	15,22	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**2.906.459.251**	**55,86**	**658.927.060**	**100**	**310.834.100**	**58,93**	**18.397.501**	58,93	**5,92**	**57,39**	**677.324.561**	**57,39**	**23,30**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	244.768.651	1	48.000.000	1	13.312.000	1	-	100,00	0,00	2	48.000.000	40,00	19,61	
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	2.661.690.600	71	610.927.060	56	297.522.100	10	18.397.501	17,86	6,18	81	629.324.561	27,00	23,64	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**5.504.108.786**	**100**	**835.480.318**	**100**	**1.058.629.300**	**64,76**	**577.730.552**	**64,76**	**54,57**	**82,38**	**1.413.210.870**	**82,38**	**25,68**	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	136.371.300	2	2.330.000	1	9.654.600	0	-	0,00	0,00	2	2.330.000	33,33	1,71	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	1.626.025.400	2	183.039.000	1	107.910.100	0	-	10,00	0,00	2	183.039.000	35,00	11,26	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	610.136.076	1	80.527.000	1	114.711.600	1	73.324.500	100,00	63,92	2	153.851.500	40,00	25,22	

BAPPEDA HALUT

1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	379.264.250	2	36.215.000	1	33.752.000	1	22.291.650	100,00	66,05	3	58.506.650	50,00	15,43	
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	503.840.160	5	48.568.000	4	82.500.000	4	81.670.000	100,00	98,99	9	130.238.000	37,50	25,85	
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Laporan	150.395.600	24	17.262.000	12	21.594.000	10	18.958.500	83,33	87,80	34	36.220.500	47,22	24,08	
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Laporan	2.098.076.000	10	467.539.318	5	688.507.000	3	381.485.902	60,00	55,41	13	849.025.220	43,33	40,47	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-								-			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan													-			
1,5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**2.450.864.111**	**100**	**515.921.104**	**100**	**321.403.600**	**100,00**	**198.900.184**	**100,00**	**61,88**	**100,00**	**714.821.288**	**100,00**	**29,17**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Laporan	967.726.330	2	270.772.000	1	104.760.000	1	75.660.000	100,00	72,22	3	346.432.000	50,00	35,80	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Laporan	535.746.800	2	63.220.104	1	86.473.600	1	37.900.184	100,00	43,83	3	101.120.288	50,00	18,87	
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	132.050.900	2	11.100.000	1	19.050.000	1	6.500.000	100,00	34,12	3	17.600.000	50,00	13,33	
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Laporan	815.340.081	2	170.829.000	1	111.120.000	1	78.840.000	100,00	70,95	3	249.669.000	50,00	30,62	
1,6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**2.495.864.930**	**100**	**603.182.490**	**100**	**417.549.600**	**50,00**	**290.693.790**	**50,00**	**69,62**	**25**	**893.876.280**	**25,00**	**35,81**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	64	Unit	1.481.517.930	20	304.152.490	10	247968800	10	140.996.029	100,00	56,86	30	445.148.519	46,88	30,05	
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	30.500.000	0	-					0,00	0,00	0	-	0,00		
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	Unit	759.013.000	1	299.030.000	1	149996000	1	149.697.761	100,00	99,80	2	448.727.761	40,00	59,12	

BAPPEDA HALUT

1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	Unit	224.834.000	0	-	1	19584800	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00		
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan**	**90**	**Persen**	**31.295.122.044**	**86**	**6.246.153.414**	**90**	**4.736.304.200**		**2.871.837.776**	**0,00**	**60,63**	**43,08**	**9.117.991.190**	**47,87**	**29,14**	
		Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	**90**	**Persen**		**94**		**90**				**0,00**		**46,80**		**52,00**		
		Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**90**	**Persen**		**93**		**90**				**0,00**		**46,45**		**51,61**		
2,1	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Presentase Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan**	**15**	**Persen/dok**	**24.125.573.104**	**100**	**5.358.633.769**	**100**	**4.135.428.900**	**118,93**	**2.605.610.394**	**118,93**	**63,01**	**119**	**7.964.244.163**	**792,84**	**33,01**	
2.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	9	Dokumen	612.590.190	2	-	1	77.880.300	2	16.597.324	200,00	21,31	4	16.597.324	44,44	2,71	
2.1.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	14	Dokumen	4.839.325.329	3	1.450.421.812	2	817.925.200	2	324.912.204	100,00	39,72	5	1.775.334.016	35,71	36,69	
2.1.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8	Berita Acara	2.206.672.000	2	294.171.000	1	637.058.200	1	338.689.104	100,00	53,16	3	632.860.104	37,50	28,68	
2.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	8	Berita Acara	1.126.346.329	2	218.773.900	1	203.754.900	1	191.674.159	100,00	94,07	3	410.448.059	37,50	36,44	
2.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten /Kota	8	Berita Acara	4.666.133.510	2	858.749.653	1	813.940.000	1	770.727.903	100,00	94,69	3	1.629.477.556	37,50	34,92	
2.1.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	3528	Usulan	4.541.710.213	910	1.156.839.000	588	714.128.600	779	713.559.700	132,48	99,92	1689	1.870.398.700	47,87	41,18	
2.1.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD/RKPD)	15	Dokumen	6.132.795.533	5	1.379.678.404	2	870.741.700	2	249.450.000	100,00	28,65	7	1.629.128.404	46,67	26,56	
2.2.	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah**	**12**	**Lap**	**2.725.295.000**	**50**	**-**	**100**	**71.624.000**	**33,33**	**63.859.182**	**33,33**	**89,16**	**33**	**63.859.182**	**277,78**	**2,34**	

BAPPEDA HALUT

1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	306	Dokumen (masukan)	287.799.500	102	-							102	-	33,33	0,00	
2.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	336	Orang	1.053.289.500	0	-	56	71.624.000	56	63.859.182	100,00	0,00	56	63.859.182	16,67	6,06	
2.2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5	Buku	1.384.206.000	0	-						0,00	0	-	0,00	0,00	
2,3	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Presentase Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja minimal 80%**	**95**	**Persen**	**4.444.253.940**	**89**	**887.519.645**	**90**	**529.251.300**	**0**	**202.368.200**	**0,00**	**38,24**	**44,27**	**1.089.887.845**	**46,60**	**24,52**	
2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	15	Laporan	760.744.098	2	189.715.645	2	82.286.200	0	-	0,00	0,00	2	189.715.645	13,33	24,94	
2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	42	Laporan	3.683.509.842	13	697.804.000	7	446.965.100	4	202.368.200	57,14	45,28	17	900.172.200	40,48	24,44	
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMD-RKPD) Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan**	**95**	**Persen**	**8.228.692.372**	**96**	**309.835.153**	**95**	**495.063.300**	**95,12**	**126.295.638**	**100,13**	**25,51**	**95,67**	**436.130.791**	**100,70**	**5,30**	
		Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMD-RKPD) Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	**95**	**Persen**		**96**	**272.798.604**	**95**	**318.153.700**	**100,00**	**155.141.358**	**105,26**	**48,76**	**98,04**	**427.939.962**	**103,20**		
		Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMD-RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**95**	**Persen**		**97**	**340.619.073**	**95**	**928.533.700**	**100,00**	**251.389.364**	**105,26**	**27,07**	**98,30**	**592.008.437**	**103,47**		
3,1	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**95**	**Persen**	**2.361.408.422**	**100**	**309.835.153**	**95**	**495.063.300**	**94**	**126.295.638**	**98,88**	**25,51**	**96,97**	**436.130.791**	**102,07**	**18,47**	
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	Dokumen	331.996.000	4	81.355.270	2	74.504.800	2	-	100,00	0,00	6	81.355.270	40,00	24,50	

BAPPEDA HALUT

1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	24	Laporan (PD)	58.589.400	8	6.735.000	4	3.879.600	0	-	0,00	0,00	8	6.735.000	33,33	11,50	
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	24	Laporan (PD)	35.550.500	8	-	4	2.180.000	4	-	100,00	0,00	12	-	50,00	0,00	
3.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8	Laporan	646.581.372	2	51.606.414	1	102.231.800	1	77.073.102	100,00	75,39	3	128.679.516	37,50	19,90	
3.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15	Dokumen	393.607.000	4	78.852.169	2	72.499.900	2	14.529.325	100,00	20,04	6	93.381.494	40,00	23,72	
3.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	78	Laporan (PD)	109.994.000	26	3.920.000	13	19.843.200	0	9.921.600	0,00	50,00	26	13.841.600	33,33	12,58	
3.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	78	Laporan (PD)	47.956.250	26	-	13	3.197.600	13	-	100,00	0,00	39	-	50,00	0,00	
3.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8	Laporan	737.133.900	3	87.366.300	1	216.726.400	1	24.771.611	100,00	11,43	4	112.137.911	50,00	15,21	
3,2	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Presentase Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA terhadap RKPD Bidang Perekonomian dan SDA**	**95**	**Persen**	**2.260.900.350**	**100**	**272.798.604**	**95**	**318.153.700**	**50**	**155.141.358**	**52,63**	**48,76**	**50**	**427.939.962**	**52,63**	**18,93**	
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	Dokumen	332.816.000	4	63.944.204	2	52.189.800	2	16.905.321	100,00	32,39	6	80.849.525	40,00	24,29	

BAPPEDA HALUT

1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	Laporan (PD)	62.722.800	10	5.475.000	5	7.950.000	0	3.498.000	0,00	44,00	10	8.973.000	33,33	14,31	
3.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	Laporan (PD)	39.388.200	10	-	5	3.416.100	5	-	100,00	0,00	15	-	50,00	0,00	
3.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	8	Laporan	746.198.600	3	72.191.760	1	90.142.300	0	30.099.959	0,00	33,39	3	102.291.719	37,50	13,71	
3.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	Dokumen	314.711.700	4	63.358.720	2	83.527.300	2	44.116.329	100,00	52,82	6	107.475.049	40,00	34,15	
3.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	24	Laporan (PD)	48.350.300	8	1.330.000	4	3.816.000	0	-	0,00	0,00	8	1.330.000	33,33	2,75	
3.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	24	Laporan (PD)	33.838.250	8	-	4	1.846.900	4	-	100,00	0,00	12	-	50,00	0,00	
3.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8	Laporan	682.874.500	3	66.498.920	1	75.265.300	0	60.521.749	0,00	80,41	3	127.020.669	37,50	18,60	
3,3	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Presentase Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA terhadap RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**95**	**Persen**	**3.606.383.600**	**100**	**340.619.073**	**95**	**928.533.700**	**50,00**	**251.389.364**	**52,63**	**27,07**	**75**	**592.008.437**	**78,95**	**16,42**	
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	Dokumen	344.966.300	4	89.594.000	2	57.841.600	2	4.490.000	100,00	7,76	6	94.084.000	40,00	27,27	

BAPPEDA HALUT

1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	36	Laporan (OPD)	69.725.600	12	7.270.000	6	10.875.600	0	4.833.600	0,00	44,44	12	12.103.600	33,33	17,36	
3.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	36	Laporan (OPD)	43.480.950	12	-	6	3.085.500	6	-	100,00	0,00	18	-	50,00	0,00	
3.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8	Laporan	1.876.725.450	3	90.532.360	1	703.820.100	0	218.785.770	0,00	31,09	3	309.318.130	37,50	16,48	
3.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	Dokumen	389.287.800	4	82.033.133	2	71.583.700	2	17.959.994	100,00	25,09	6	99.993.127	40,00	25,69	
3.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	85	Laporan	123.945.600	34	-	17	7.950.000	0	-	0,00	0,00	34	-	40,00	0,00	
3.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	85	Laporan	45.311.250	34	-	17	2.116.400	17	-	100,00	0,00	51	-	60,00	0,00	
3.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	8	Laporan	712.940.650	2	71.189.580	1	71.260.800	0	5.320.000	0,00	7,47	2	76.509.580	25,00	10,73	
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**72,97**	**36,90**			
												PREDIKAT KINERJA						
JUMLAH TOTAL					**85.042.262.153**		**19.339.524.757**		**13.140.224.963**		**8.452.664.184**		**64,33**		**27.792.188.941**		**32,68**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Ststistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Komulatif)**	**48**	**PD**	**1.000.118.500**	**26**	**216.804.000**	**100**	**150.000.000**	**81,25**	**84.595.000**	**81,25**	**56,40**	**54**	**301.399.000**	**111,72**	**30,14**	
1.1	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah yang di Manfaatkan dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**48**	**PD**	**1.000.118.500**	**85,61**	**216.804.000**	**100,00**	**150.000.000**	**81,25**	**84.595.000**	**81,25**	**56,40**	**83,43**	**301.399.000**	**173,81**	**30,14**	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	48	Dokumen	825.118.500	9	216.804.000	8	150.000.000	8	84.595.000	100,00	56,40	17	301.399.000	35,42	36,53	
1.1.2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	96	Orang	175.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
2	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Presentase keterlaksanaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**100**	**Persen**	**2.976.255.625**	**58**	**816.877.000**	**100,00**	**424.975.000**	**66,67**	**332.504.000**	**66,67**	**78,24**	**62,51**	**1.149.381.000**	**62,51**	**38,62**	
2,1	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di Tindak Lanjuti**	**100**	**Persen**	**341.325.000**	**70**	**341.325.000**	**100,00**	**-**	**62,50**	**-**	**62,50**		**66,25**	**341.325.000**	**66,25**	**100,00**	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	
2.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketata laksanaan	Jumlah Rekomendasi Kajian Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembaagaan dan Ketatalaksanaan yang di Hasilkan	1	Laporan	225.675.000	1	225.675.000							1	225.675.000	100,00	100,00	
2.1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	Laporan	115.650.000	1	115.650.000							1	115.650.000	100,00	100,00	
2,2	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan yang di Tindak Lanjuti**	**100**	**Persen**	**329.150.000**	**0**	**115.675.000**		-		-			**0,00**	**115.675.000**	**0,00**	**35,14**	
2.2.1	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Kajian di Bidang Pariwisata yang di Hasilkan	2	Laporan	329.150.000	0	115.675.000							0,00	115.675.000	0,00	35,14	
2,3	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di Tindak Lanjuti**	**100**	**Persen**	**542.600.000**	**30**	**349.861.000**	**100,00**	**344.725.000**	**62,50**	**330.000.000**	**62,50**	**95,73**	**46,25**	**679.861.000**	**46,25**	**125,30**	
2.3.1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	Laporan	213.475.000	1	234.211.000	1	179.725.000	1	165.000.000	100,00	91,81	2	399.211.000	200,00	187,01	
2.3.2	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	Laporan	213.475.000	0	-	1	165.000.000	1	165.000.000	100,00	100,00	1	165.000.000	100,00	77,29	
2.3.3	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	Laporan	115.650.000	1	115.650.000							1	115.650.000	100,00	100,00	
2,4	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Produk Inovasi Daerah Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang di Hasilkan dan Terindeks dalam sistim Inovasi**	**100**	**Persen**	**1.763.180.625**	**19**	**10.016.000**	**100,00**	**80.250.000**	**23,53**	**2.504.000**	**23,53**	**3,12**	**21,38**	**12.520.000**	**21,38**	**0,71**	
2.4.1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5	Laporan	769.342.125	0	10.016.000							0	10.016.000	0,00	1,30	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.4.2	Deseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inofatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	6	Laporan	993.838.500	0	0	1	80.250.000	0	2.504.000	0,00	3,12	0	2.504.000	0,00	0,25	
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**	**90**	**Persen**	**18.928.877.791**	**79**	**5.186.332.812**	**90,00**	**3.056.295.419**	**71,66**	**1.957.939.883**	**79,62**	**64,06**	**75,45**	**7.144.272.695**	**83,83**	**37,74**	
3,1	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**337.315.166**	**54**	**72.665.333**	**100,00**	**46.724.000**	**100,00**	**24.700.000**	**100,00**	**52,86**	**76,75**	**97.365.333**	**76,75**	**28,86**	
3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan	18	Dokumen	264.662.000	5	52.467.000	3	33.801.000	3	11.777.000	100,00	34,84	8	64.244.000	44,44	24,27	
3.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Laporan	72.653.166	8	20.198.333	4	12.923.000	4	12.923.000	100,00	100,00	12	33.121.333	50,00	45,59	
3,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**14.417.871.210**	**28**	**4.472.899.779**	**100,00**	**2.564.567.119**	**52,19**	**1.705.874.824**	**52,19**	**66,52**	**40,09**	**6.178.774.603**	**40,09**	**42,85**	
3.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138	Orang/Bulan	14.275.485.810	42	4.450.511.779	21	2.552.329.119	23	1.693.636.824	109,52	66,36	65	6.144.148.603	47,10	43,04	
3.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	92.925.000	2	15.138.000	1	9.488.000	1	9.488.000	100,00	100,00	3	24.626.000	50,00	26,50	
3.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	49.460.400	2	7.250.000	2	2.750.000	2	2.750.000	100,00	100,00	4	10.000.000	33,33	20,22	
3,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**778.000.000**	**34**	**40.969.218**		**0**		**-**			**16,92**	**40.969.218**	**16,92**	**5,27**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang/kegiatan	365.000.000	1	15.219.613							1	15.219.613	8,33	4,17	
3.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang/kegiatan	413.000.000	2	25.749.605							2	25.749.605	13,33	6,23	
3,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**1.765.169.859**	**24**	**196.004.082**	**100,00**	**166.603.700**	**55,48**	**145.957.875**	**55,48**	**87,61**	**39,66**	**341.961.957**	**39,66**	**19,37**	
3.4.1	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	Paket	38.500.000	8	7.162.750	5	5.749.800	4	5.604.800	80,00	97,48	12	12.767.550	50,00	33,16	
3.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26	Paket	380.303.336	2	40.560.000	4	33.246.000	2	25.896.000	50,00	77,89	4	66.456.000	15,38	17,47	
3.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	Paket	113.031.106	6	44.486.746	4	14.556.100	1	14.556.000	25,00	100,00	7	59.042.746	29,17	52,24	
3.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	Paket	44.718.750	14	20.598.200	12	4.530.000	1	4.530.000	8,33	100,00	15	25.128.200	20,83	56,19	
3.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360	Dokumen	80.471.667	40	15.851.000	60	12.702.600	15	3.702.000	25,00	29,14	55	19.553.000	15,28	24,30	
3.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	32.225.000	2	3.205.800	4	1.985.200	4	1.985.200	100,00	100,00	6	5.191.000	25,00	16,11	
3.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	Laporan	1.075.920.000	13	64.139.586	18	93.834.000	18	89.683.875	100,00	95,58	31	153.823.461	32,63	14,30	
3,5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**1.162.521.556**	**70**	**267.294.400**	**100,00**	**200.400.600**	**57,39**	**42.407.184**	**57,39**	**21,16**	**63,91**	**309.701.584**	**63,91**	**26,64**	
3.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66	Laporan	647.780.500	9	151.135.500	11	106.700.000	3	15.520.000	27,27	14,55	12	166.655.500	18,18	25,73	
3.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	47.701.056	12	8.718.900	12	20.330.600	12	15.487.184	100,00	76,18	24	24.206.084	33,33	50,75	
3.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34	Laporan	33.000.000	4	8.500.000	4	3.530.000	3	1.700.000	75,00	48,16	7	10.200.000	20,59	30,91	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	66	Laporan	434.040.000	9	98.940.000	11	69.840.000	3	9.700.000	27,27	13,89	12	108.640.000	18,18	25,03	
3,6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan BMD Urusan Pemerintahan daerah**	**100**	**Persen**	**468.000.000**	**100**	**136.500.000**	**100,00**	**78.000.000**	**100,00**	**39.000.000**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**175.500.000**	**100,00**	**37,50**	
3.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	468.000.000	2	136.500.000	1	78.000.000	1	39.000.000	100,00	50,00	3	175.500.000	50,00	37,50	
											Rata - rata Capaian Kinerja (%)	**71,21**	**65,23**			**49,15**	**40,69**	
											Predikat Kinerja	**S**	**R**					
					22.905.251.916		**6.220.013.812**		**3.631.270.419**		**2.375.038.883**		**65,41**		**8.595.052.695**	**44,70**	**37,52**	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
	Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**24.667.771.487**	**92,96**	**7.066.663.223**	**90,00**	**4.291.187.356**	**82,00**	**2.752.714.209**	**91,11**	**64,15**	**87,48**	**9.819.377.432**	**87,48**	**39,81**	
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**90,00 %**	**759.701.796**	**100,00**	**101.768.348**	**100,00**	**76.800.400**	**98,00**	**17.218.200**	**98,00**	**22,42**	**99,00**	**118.986.548**	**110,00**	**15,66**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dok	375.140.000	3	37.544.000	4	55.968.200	1	3.348.200	25,00	5,98	4	40.892.200	26,67	10,90	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6 Dok	25.509.000	2	8.503.000	0	-					2	8.503.000	33,33	33,33	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Lap	359.052.796	9	55.721.348	3	20.832.200	1	13.870.000	33,33	66,58	10	69.591.348	45,45	19,38	
1,2	**Administrasi Keuangan**	**Tingkat Realisasi**	**100,00 %**	**17.912.849.619**	**61,34**	**5.672.083.932**	**100,00**	**3.573.996.278**	**38,56**	**2.363.091.777**	**38,56**	**66,12**	**49,95**	**8.035.175.709**	**49,95**	**44,86**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5616 Org	17.522.787.619	897	5.627.472.092	1014	3.538.612.878	546	2.356.464.777	53,85	66,59	1443	7.983.936.869	25,69	45,56	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	65 Lap	390.062.000	13	44.611.840	13	35.383.400	13	6.627.000	100,00	18,73	26	51.238.840	40,00	13,14	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.162.119.842**	**76,36**	**194.788.642**	**100,00**	**12.100.000**		**-**	**0,00**	**0,00**	**38,18**	**194.788.642**	**38,18**	**16,76**	
1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	200.000.000	0,00	-							0	-	0,00	0,00	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	240 Paket	138.346.642	39,00	58.381.642	5	12.100.000			0,00	0,00	39	58.381.642	16,25	42,20	
1.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang	823.773.200	13	136.407.000							13	136.407.000	19,70	16,56	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**95,00 %**	**2.721.784.202**	**87,44**	**487.881.738**	**100,00**	**310.159.050**	**73,21**	**195.638.604**	**73,21**	**63,08**	**80,33**	**683.520.342**	**84,56**	**25,11**	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Pkt	543.289.999	4	70.055.000	4	75.385.150	0	-	0,00	0,00	4	70.055.000	6,67	12,89	
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	72 Pkt	29.090.000	24	5.367.300	12	3.485.000	12	3.485.000	100,00	100,00	36	8.852.300	50,00	30,43	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Pkt	294.526.878	24	72.460.514	12	47.308.700	12	32.998.818	100,00	69,75	36	105.459.332	50,00	35,81	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan yang Disediakan	72 Pkt	74.520.000	24	20.879.913	12	10.564.200	12	4.772.000	100,00	45,17	36	25.651.913	50,00	34,42	
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	288 Dok	179.571.500	78	28.360.000	48	13.000.000	12	4.500.000	25,00	34,62	90	32.860.000	31,25	18,30	
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 Lap	214.395.000	24	26.598.356	12	21.552.000	12	11.901.000	100,00	55,22	36	38.499.356	50,00	17,96	
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	93 Lap	1.386.390.825	14	264.160.655	8	138.864.000	7	137.981.786	87,50	99,36	21	402.142.441	22,58	29,01	
1,5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**1.602.599.328**	**97,92**	**481.623.825**	**100,00**	**242.981.628**	**58,33**	**133.345.600**	**58,33**	**54,88**	**78,13**	**614.969.425**	**78,13**	**38,37**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Lap	1.108.599.328	25	338.623.825	12	164.981.628	6	81.345.600	50,00	49,31	31	419.969.425	43,06	37,88	
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Lap	494.000.000	22	143.000.000	12	78.000.000	8	52.000.000	66,67	66,67	30	195.000.000	41,67	39,47	
1,6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**508.716.700**	**100,00**	**128.516.738**	**100,00**	**75.150.000**	**60,00**	**43.420.028**	**60,00**	**57,78**	**80,00**	**171.936.766**	**80,00**	**33,80**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	475.923.700	5,00	125.016.738	5	69.000.000	5	42.440.028	100,00	61,51	10	167.456.766	33,33	35,19	
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	32.793.000	5	3.500.000	5	6.150.000	1	980.000	20,00	15,93	6	4.480.000	14,29	13,66	
2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Pegawai ASN berkualifikasi Pendidikan Tinggi**	**33,70 %**	**8.499.097.087**	**39,83**	**1.110.316.919**	**33,30**	**641.327.500**	**46,98**	**91.500**	**141,08**	**0,01**	**43,40**	**1.110.408.419**	**128,79**	**13,07**	
		Persentase Jabatan Eseloneering yang Terisi	**87,30 %**	**20.539.774.779**	**69,77**	**3.001.799.487**	**82,30**	**2.281.352.300**	**62,91**	**731.284.059**	**76,44**	**32,05**	**66,34**	**3.733.083.546**	**75,99**	**18,17**	
2,1	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Capaian Kinerja Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**100,00 %**	**8.855.810.881**	**265,68**	**1.151.817.081**	**100,00**	**806.788.200**	**202,63**	**554.523.070**	**202,63**	**68,73**	**234,16**	**1.706.340.151**	**234,16**	**19,27**	
2.1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (NIP, Karis /Karsu)	743 Dok	1.075.844.997	330	247.121.190	140	92.957.800	469	31.421.250	335,00	33,80	799	278.542.440	107,54	25,89	
2.1.2	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	6 Lap	4.626.918.151	1	774.378.276	1	503.114.400	1	497.092.491	100,00	98,80	2	1.271.470.767	33,33	27,48	
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	385 Dok	1.038.665.647	103	102.353.540	49	133.967.300	135	8.814.200	275,51	6,58	238	111.167.740	61,82	10,70	
2.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dok	2.114.382.086	1	27.964.075	1	76.748.700	1	17.195.129	100,00	22,40	2	45.159.204	33,33	2,14	
2,2	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Capaian Kinerja Layanan Mutasi Kepangkatan**	**100,00 %**	**3.821.999.848**	**163,71**	**779.664.027**	**100,00**	**524.773.700**	**89,42**	**159.174.340**	**89,42**	**30,33**	**126,56**	**938.838.367**	**126,56**	**24,56**	
2.2.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3600 Dok	1.893.366.948	1046	203.685.520	600	223.364.800	473	150.729.840	78,83	67,48	1519	354.415.360	42,19	18,72	
2.2.2	Pengeloaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengeloaan Promosi ASN	18 Dok	1.928.632.900	16	575.978.507	3	301.408.900	3	8.444.500	100,00	2,80	19	584.423.007	105,56	30,30	
2,3	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Capaian Kinerja Pengembangan Kompetensi ASN**	**100,00 %**	**12.075.933.682**	**61,67**	**1.642.410.929**	**100,00**	**1.080.372.500**	**0,00**	**91.500**	**0,00**	**0,01**	**30,83**	**1.642.502.429**	**30,83**	**13,60**	
2.3.1	Pengelolaan Assessment Centre	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Centre	6 Dok	3.576.836.595	1	532.094.010	1	439.045.000		-	0,00	0,00	1	532.094.010	16,67	14,88	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.3.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	90 Org	8.499.097.087	22	1.110.316.919	15	641.327.500		91.500	0,00	0,01	22	1.110.408.419	24,44	13,07	
2,4	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Capaian Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**100,00 %**	**4.285.127.455**	**66,92**	**538.224.369**	**100,00**	**510.745.400**	**70,83**	**17.586.649**	**70,83**	**3,44**	**68,88**	**555.811.018**	**68,88**	**12,97**	
2.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 Dok	2.065.119.599	2	182.816.239	1	243.073.700	1	1.110.500	100,00	0,46	3	183.926.739	50,00	8,91	
2.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	360 Org	515.136.683	0	40.128.570	60	26.603.900	0	-	0,00	0,00	0	40.128.570	0,00	7,79	
2.4.3	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	36 Org	713.810.574	8	180.847.000	6	79.534.800	5	284.949	83,33	0,36	13	181.131.949	36,11	25,38	
2.4.4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Lap	991.060.599	2,00	134.432.560	1,00	161.533.000	1	16.191.200	100,00	10,02	3	150.623.760	50,00	15,20	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun Berkenaan Telah Mengikuti Diklat Struktural**	**80,10 %**	**29.955.923.131**	**58**	**4.723.953.300**	**51,00**	**1.860.425.200**	**12,56**	**1.330.371.500**	**24,63**	**71,51**	**35,16**	**6.054.324.800**	**43,89**	**20,21**	
3,1	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN Daerah yang Lulus Ujian Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**100,00 %**	**29.955.923.131**	**103**	**4.723.953.300**	**100**	**1.860.425.200**	**100,00**	**1.330.371.500**	**100,00**	**71,51**	**101,45**	**6.054.324.800**	**101,45**	**20,21**	
3.1.1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	846 Org	3.615.467.346	152	474.850.000	142	362.100.000	113	362.100.000	79,58	100,00	265	836.950.000	31,32	23,15	
3.1.2	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	6 Lap	546.575.000	2	50.160.800	1	67.264.000	1	1.351.500	100,00	2,01	3	51.512.300	50,00	9,42	
3.1.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	12 Lap	25.793.880.785	2	4.198.942.500	1	1.431.061.200	1	966.920.000	100,00	67,57	3	5.165.862.500	25,00	20,03	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)											91,11	38,56			53,19	22,36	
Predikat Kinerja																	
Jumlah Total					83.662.566.484		15.902.732.929		9.074.292.356		4.814.461.268		53,06		20.717.194.197		24,76	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Urusan Pengawasan																
	Bidang Urusan Pengawasan																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase capaian kinerja sasaran Inspektorat**	**100,00 %**	**34.849.734.222**	**95,75**	**9.654.151.800**	**90,00**	**6.296.466.225**	**70,83**	**3.782.156.243**	**78,70**	**60,07**	**83,29**	**13.436.308.043**	**83,29**	**38,55**	
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan Renja terhadap Renstra**	**90,00 %**	**739.612.418**	**99,00**	**117.265.500**	**100,00**	**116.863.400**	**100,00**	**23.499.000**	**100,00**	**20,11**	**99,50**	**140.764.500**	**110,56**	**19,03**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dok	375.154.644	6	69.217.000	3	59.278.900	2	4.066.000	66,67	6,86	8	73.283.000	44,44	19,53	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	43.730.247	1	1.800.000	1	6.909.500	1	1.207.000	100,00	17,47	2	3.007.000	33,33	6,88	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	45.628.811	1	4.640.000	1	7.209.600	1	1.390.000	100,00	19,28	2	6.030.000	33,33	13,22	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dok	45.628.811	1	4.640.000	1	7.209.800	1		100,00	0,00	2	4.640.000	33,33	10,17	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dok	45.628.811	1	-	1	7.209.500	1	1.195.000	100,00	16,58	2	1.195.000	33,33	2,62	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian	6 Lap	81.888.216	2	18.668.500	1	12.939.400	1	12.936.000	100,00	99,97	3	31.604.500	50,00	38,59	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Lap	101.952.878	2	18.300.000	1	16.106.700	1	2.705.000	100,00	16,79	3	21.005.000	50,00	20,60	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja Indikator sub kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah**	**100,00 %**	**22.960.200.866**	**74,64**	**6.597.399.051**	**100,00**	**4.095.573.333**	**52,10**	**2.331.322.983**	**52,10**	**56,92**	**63,37**	**8.928.722.034**	**63,37**	**38,89**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org	22.872.740.371	690	6.571.959.051	676	4.081.753.433	27	2.331.322.983	3,99	57,12	717	8.903.282.034	2757,69	38,93	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	41.831.677	2	5.100.000	1	6.609.900	0	-	0,00	0,00	2	5.100.000	200,00	12,19	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Lap	45.628.817	1	20.340.000	2	7.210.000	0	-	0,00	0,00	1	20.340.000	50,00	44,58	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja Indikator sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100,00 %**	**1.868.455.992**	**204,17**	**752.520.480**	**100,00**	**292.107.500**	**126,28**	**228.506.965**	**126,28**	**78,23**	**165,22**	**981.027.445**	**165,22**	**52,50**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Org	46.856.667		-	26	11.249.900	27	11.121.165	103,85	98,86	27	11.121.165	150,00	23,73	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Org	540.701.593	17	383.052.332	3	79.000.000	6	63.000.000	200,00	79,75	23	446.052.332	127,78	82,50	
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Org	1.280.897.732	30	369.468.148	12	201.857.600	9	154.385.800	75,00	76,48	39	523.853.948	54,17	40,90	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja Indikator sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	**95,00 %**	**4.019.665.662**	**100,69**	**759.260.169**	**100,00**	**845.050.200**	**90,97**	**745.743.542**	**90,97**	**88,25**	**95,83**	**1.505.003.711**	**100,88**	**37,44**	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Pkt	8.622.336	4	2.922.000	2	1.397.000	2	1.390.000	100,00	99,50	6	4.312.000	50,00	50,01	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Pkt	2.372.482.283	13	135.782.186	12	257.184.600	4	257.031.333	33,33	99,94	17	392.813.519	23,61	16,56	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Pkt	51.844.185	24	17.318.000	12	53.494.500	12	53.381.000	100,00	99,79	36	70.699.000	50,00	136,37	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dok	324.843.888	24	114.060.000	12	116.459.500	12	52.213.000	100,00	44,83	36	166.273.000	50,00	51,19	
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 Lap	92.580.555	24	31.400.000	12	21.799.600	12	21.745.000	100,00	99,75	36	53.145.000	50,00	57,40	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Lap	1.169.292.414	48	457.777.983	24	394.715.000	27	359.983.209	112,50	91,20	75	817.761.192	52,08	69,94	
1,6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentasecapaian kinerja Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00 %**	**3.444.079.633**	**100,00**	**1.014.402.400**	**100,00**	**581.184.588**	**58,33**	**154.978.085**	**58,33**	**26,67**	**79,17**	**1.169.380.485**	**79,17**	**33,95**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Lap	2.427.471.148	24	638.387.500	12	351.120.060	2	76.076.013	16,67	21,67	26	714.463.513	36,11	29,43	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Lap	185.843.333	24	59.039.900	12	59.988.500	12	41.591.400	100,00	69,33	36	100.631.300	50,00	54,15	
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Lap	38.266.630	24	12.200.000	12	6.100.000	12	6.100.000	100,00	100,00	36	18.300.000	50,00	47,82	
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Lap	792.498.522	24	304.775.000	12	163.976.028	2	31.210.672	16,67	19,03	26	335.985.672	36,11	42,40	
1,7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian Indikator sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**38,46 %**	**1.817.719.650**	**76,92**	**413.304.200**	**100,00**	**365.687.204**	**69,23**	**298.105.668**	**69,23**	**81,52**	**73,08**	**711.409.868**	**190,01**	**39,14**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	93 Unit	1.725.084.420	7	413.304.200	13	365.687.204	9	298.105.668	69,23	81,52	16	711.409.868	17,20	41,24	
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	92.635.230		-							0	-	0,00	0,00	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK**	**73,00 %**	**20.525.722.943**	**71,24**	**4.433.230.700**	**73,50**	**3.172.665.900**	**32,77**	**1.538.903.600**	**44,59**	**48,51**	**52,01**	**5.972.134.300**	**71,24**	**29,10**	
		Presentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti selesai	**56,50 %**		**38,08**	-	**55,00**		**0,00**		**0,00**		**19,04**	-	**33,70**		
		Persentase OPD dengan nilai Sakip > = B	**92,00 %**		**6,12**	-	**77,00**		**0,00**		**0,00**		**3,06**	-	**3,33**		
		Presentase OPD yang Zero Nilai temuan kerugian material	**95,00 %**		**91,78**	-	**92,50**		**0,00**		**0,00**		**45,89**	-	**48,31**		
2,1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase OPD yang di Awasi**	**100 %**	**14.760.144.692**	**83**	**3.924.797.700**	**100**	**2.813.721.300**	**100,00**	**1.257.134.600**	**100,00**	**44,68**	**91,33**	**5.181.932.300**	**91,33**	**35,11**	
		Persentase Desa yang di awasi	**16 %**		**7,40**	-	**12,00**		**0,00**		**0,00**		**3,70**	-	**23,11**		
		Persentase Pelaksanaan Evaluasi SAKIP OPD	**80 %**		**25**	-	**100,00**		**0,00**		**0,00**		**12,50**	-	**15,63**		
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	68 Lap	2.027.773.419	17	627.590.000	8	292.213.000	6	115.841.000	75,00	39,64	23	743.431.000	33,82	36,66	
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Lap	2.123.402.088	14	582.030.000	9	317.235.200	0	21.175.000	0,00	6,67	14	603.205.000	21,54	28,41	
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	94 Lap	3.621.696.355	46	900.852.500	9	674.066.000	7	497.400.000	77,78	73,79	53	1.398.252.500	56,38	38,61	
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	92 Lap	4.166.395.711	25	1.154.315.200	12	949.632.300	10	590.598.600	83,33	62,19	35	1.744.913.800	38,04	41,88	
2.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	64 Lap	1.963.717.127	10	182.450.000	4	457.882.000	0	-	0,00	0,00	10	182.450.000	15,63	9,29	
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24 Dok	857.159.992	6	477.560.000	4	122.692.800	2	32.120.000	50,00	26,18	8	509.680.000	33,33	59,46	
2,2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Penanganan Kasus/Pengaduan**	**100 %**	**5.765.578.251**	**68**	**508.433.000**	**100**	**358.944.600**	**40,00**	**281.769.000**	**40,00**	**78,50**	**53,93**	**790.202.000**	**53,93**	**13,71**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	16 Lap	1.071.160.720		-	1	71.949.400	1	-	100,00	0,00	1	-	6,25	0,00	
2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	126 Lap	4.694.417.531	25	508.433.000	16	286.995.200	6	281.769.000	37,50	98,18	31	790.202.000	24,60	16,83	
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Tingkat Kapabilitas APIP (berdasarkan hasil QA BPKP)**	**100,00 %**	**7.739.731.342**	**50**	**1.865.771.386**	**100**	**1.271.238.700**	**100,00**	**611.890.363**	**100,00**	**48,13**	**75,00**	**2.477.661.749**	**75,00**	**32,01**	
3,1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan yang ditetapkan**	**100,00 %**	**67.822.690**	**100**	**16.940.000**	**100**	**10.212.000**	**100,00**	**3.099.000**	**100,00**	**30,35**	**100,00**	**20.039.000**	**100,00**	**29,55**	
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	36 Rekon	67.822.690	13	16.940.000	6	10.212.000	1	3.099.000	16,67	30,35	14	20.039.000	38,89	29,55	
3,2	**Asistensi dan Pendampingan**	**Presentase OPD yang didampingi/diasistensi pelaksanaan tugasnya**	**100,00 %**	**7.671.908.652**	**100**	**1.848.831.386**	**100**	**1.261.026.700**	**100,00**	**608.791.363**	**100,00**	**48,28**	**100,00**	**2.457.622.749**	**100,00**	**32,03**	
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47 OPD	590.290.652	49	257.300.000	49	156.914.300	49	153.960.000	100,00	98,12	98	411.260.000	208,51	69,67	
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	47 OPD	1.958.614.594	26	384.600.000	49	295.072.100	32	155.920.000	65,31	52,84	58	540.520.000	123,40	27,60	
3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	54 Keg	4.467.568.238	25	1.019.341.386	9	667.288.000	9	215.841.200	100,00	32,35	34	1.235.182.586	62,96	27,65	
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verivikasi Penegakan Integritas	49 OPD	655.435.167	48	187.590.000	49	141.752.300	49	83.070.163	100,00	58,60	97	270.660.163	197,96	41,29	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)											**78,70**	**52,10**			**113,43**	**35,47**	
Predikat Kinerja											**T**	**R**					
Jumlah Total				**63.115.188.507**		**15.953.153.886**		**10.740.370.825**		**5.932.950.206**		**55,24**		**21.886.104.092**		**34,68**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
1	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas	Indeks Ketahanan Sosial	68,10	68,66	100,82
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Inovasi Daerah	50,12	16,48	32,88

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(9/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum																
	Kesatuan Bangsa dan Politik																
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**20.762.144.813**	**77,74**	**4.968.143.060**	**100,00**	**2.934.689.472**	**63,45**	**1.801.555.981**	**63,45**	**61,39**	**70,59**	**6.769.699.041**	**70,59**	**32,61**	**Badan Kesatuan Bagsa Dan Politik**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**141.850.000**	**98,75**	**28.909.500**	**100,00**	**17.000.000**	**87,50**	**13.000.000**	**87,50**	**76,47**	**93,13**	**41.909.500**	**93,13**	**29,54**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dok	32.190.000	3	7.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	100,00	100,00	6	14.000.000	24,00	43,49	
1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok.	13.777.500		-	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	1	2.000.000	25,00	14,52	
1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dok.	13.777.500		-	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	1	2.000.000	25,00	14,52	
1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok.	13.777.500		-	1	2.000.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan	Jumlah Dokumen	4 Dok.	13.777.500		-	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	1	2.000.000	25,00	14,52	
1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	35.725.000	4	21.909.500	1	2.000.000			0,00	0,00	4	21.909.500	33,33	61,33	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Lap	18.825.000		-							0	-	0,00	0,00	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**17.205.650.458**	**58,11**	**4.207.380.060**	**100,00**	**2.413.294.613**	**55,66**	**1.508.458.181**	**55,66**	**62,51**	**56,89**	**5.715.838.241**	**56,89**	**33,22**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	3094 Org	17.205.650.458	437	4.207.380.060	494	2.413.294.613	252	1.508.458.181	51,01	62,51	689	5.715.838.241	22,27	33,22	
1,3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**270.177.382**	**66,50**	**31.900.000**	**100,00**	**71.411.500**		-	**0,00**	**0,00**	**33,25**	**31.900.000**	**33,25**	**11,81**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	20	14.943.500			0,00	0,00	0	-			
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya kegiatan Diklat				-							0	-			
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Org	270.177.382	2	31.900.000	3	56.468.000			0,00	0,00	2	31.900.000	7,69	11,81	
1,4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**95,00 %**	**1.271.350.310**	**90,00**	**230.766.600**	**100,00**	**145.176.000**	**80,00**	**120.846.800**	**80,00**	**83,24**	**85,00**	**351.613.400**	**89,47**	**27,66**	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Pkt	250.586.808	5	53.548.000	7	24.321.000	0		0,00	0,00	5	53.548.000	10,87	21,37	
1.4.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Pkt	93.249.700	2	19.555.600	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00	100,00	3	29.555.600	50,00	31,70	
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dok	85.150.000	2	17.372.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00	100,00	3	27.372.000	50,00	32,15	
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Lap	93.743.836	2	27.970.000	1	19.984.000	1	19.984.000	100,00	100,00	3	47.954.000	50,00	51,15	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Lap	748.619.966	2	112.321.000	1	80.871.000	1	80.862.800	100,00	99,99	3	193.183.800	50,00	25,81	
1,5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**916.281.663**	**100,00**	**234.368.900**	**100,00**	**126.940.359**	**100,00**	**75.531.000**	**100,00**	**59,50**	**100,00**	**309.899.900**	**100,00**	**33,82**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	611.001.699	2	175.147.900	1	92.000.259	1	40.590.900	100,00	44,12	3	215.738.800	50,00	35,31	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap	64.000.000	2	12.990.000	1	9.940.000	1	9.940.000	100,00	100,00	3	22.930.000	50,00	35,83	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Lap	241.279.964	2	46.231.000	1	25.000.100	1	25.000.100	100,00	100,00	3	71.231.100	50,00	29,52	
1,6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**100,00 %**	**956.835.000**	**100,00**	**234.818.000**	**100,00**	**160.867.000**	**100,00**	**83.720.000**	**100,00**	**52,04**	**100,00**	**318.538.000**	**100,00**	**33,29**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	756.585.000	1	234.818.000	1	110.880.000	1	62.280.000	100,00	56,17	2	297.098.000	33,33	39,27	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	200.250.000		-	1	49.987.000	1	21.440.000	100,00	42,89	1	21.440.000	25,00	10,71	
2	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**10,00 %**	**2.984.110.340**	**4,42**	**781.671.900**	**10,00**	**581.496.600**	**62,50**	**394.985.000**	**625,00**	**67,93**	**33,46**	**1.176.656.900**	**334,60**	**39,43**	
2,1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**10,00 %**	**2.984.110.340**	**8,84**	**781.671.900**	**10,00**	**581.496.600**	**62,50**	**394.985.000**	**625,00**	**67,93**	**35,67**	**1.176.656.900**	**356,71**	**39,43**	
2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	19 Dok	320.000.000	1	275.000.000							1	275.000.000	5,26	85,94	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun.	10 Dok	319.110.340	1	196.672.000	2	30.000.000	1	30.000.000	50,00	100,00	2	226.672.000	20,00	71,03	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	120 Org	1.400.000.000			30	354.066.900	30	199.985.400	100,00	56,48	30	199.985.400	25,00	14,28	
2.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70 OK	820.000.000	9	234.999.900	10	164.999.600	10	164.999.600	100,00	100,00	19	399.999.500	27,14	48,78	
2.1.4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Lap	125.000.000	1	75.000.000	1	32.430.100			0,00	0,00	1	75.000.000	16,67	60,00	
3	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik.**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik**	**100,00 %**	**20.237.365.728**	**100,00**	**6.759.431.150**	**100,00**	**13.660.753.400**	**56,25**	**4.190.782.000**	**56,25**	**30,68**	**78,13**	**10.950.213.150**	**78,13**	**54,11**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3,1	**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**100,00 %**	**20.237.365.728**	**100,00**	**6.759.431.150**	**100,00**	**13.660.753.400**	**56,25**	**4.190.782.000**	**56,25**	**30,68**	**78,13**	**10.950.213.150**	**78,13**	**54,11**	
3.1.1	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Yang Disusun .	8 Org	80.000.000	1	467.695.000							1	467.695.000	12,50	584,62	
3.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	6 Lap	16.534.270.828	1	2.632.520.500	1	13.199.663.800	1	3.805.605.000	100,00	28,83	2	6.438.125.500	33,33	38,94	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.1.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120 Org	865.405.001	0	61.533.450	20	88.889.600	5	25.177.000	25,00	28,32	5	86.710.450	4,17	10,02	
3.1.4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	104 Org	2.617.690.200	12	3.572.792.200	12	360.000.000	12	360.000.000	100,00	100,00	24	3.932.792.200	23,08	150,24	
3.1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Lap	139.999.699	0	24.890.000	1	12.200.000			0,00	0,00	0	24.890.000	0,00	17,78	
4	**Pogram Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**100,00 %**	**420.000.000**	**0**	**-**	**100**	**62.566.000**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4,1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**100,00 %**	**420.000.000**	**0**	**-**	**100**	**62.566.000**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
4.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	10 Dok	110.000.000		-							0	-	0,00	0,00	
4.1.2	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Dok	110.000.000		-							0	-	0,00	0,00	
4.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Org	200.000.000		-	3	62.566.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
5	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya**	**100,00 %**	**1.000.000.000**	**0**	**-**	**100**	**310.871.200**	**100**	**295.239.000**	**100,00**	**94,97**	**50,00**	**295.239.000**	**50,00**	**29,52**	
5,1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemetaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial**	**100,00 %**	**1.000.000.000**	**0**	**-**	**100**	**310.871.200**	**100**	**295.239.000**	**100,00**	**94,97**	**50,00**	**295.239.000**	**50,00**	**29,52**	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.1.1	Penyusunan Bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	5 Dok.	1.000.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
5.1.2	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah				-	30	310.871.200	30	295.239.000	100,00	94,97	30	295.239.000			
6	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**	**100,00 %**	**3.345.011.493**	**50**	**1.173.987.500**	**100**	**622.373.600**	**44,44**	**376.480.000**	**44,44**	**60,49**	**47,22**	**1.550.467.500**	**47,22**	**46,35**	
6,1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial,**	**Persentasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemetaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial**	**100,00 %**	**3.345.011.493**	**50**	**1.173.987.500**	**100**	**622.373.600**	**44,44**	**376.480.000**	**44,44**	**60,49**	**47,22**	**1.550.467.500**	**47,22**	**46,35**	
6.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Dokumen program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	4 Dok.	80.000.000		-							0	-	0,00	0,00	

BAPPEDA HALUT

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (AKHIR PELAKSANAAN RKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(7+5)		10=(91/4)*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	56 Org	1.440.000.000		-	14	409.396.200	14	311.480.000	100,00	76,08	14	311.480.000	25,00	21,63	
6.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	72 Org	1.745.011.493	29	1.173.987.500	12	192.910.400	4	65.000.000	33,33	33,69	33	1.238.987.500	45,83	71,00	
6.1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	4 Laporan	80.000.000		-	1	20.067.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
								Rata - rata Capaian Kinerja (%)			**63,45**	**55,66**			**44,53**	**41,13**	
								Predikat Kinerja			**R**	**R**					
Jumlah Total				**48.748.632.374**		**13.683.233.610**		**18.172.750.272**		**7.059.041.981**		**38,84**		**20.447.036.591**		**41,94**	

BAPPEDA HALUT

2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi nyata saat perencanaan disusun. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah dapat dielaborasi dari pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta permasalahan-permasalahan dalam aspek pelayanan umum berkaitan dengan belum tercapainya target atau belum sesuainya pencapaian dengan standar terbaik yang disarankan/syaratkan dari target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, yang diuraikan sebagai berikut.

Sejalan dengan arahan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 difokuskan pada tujuh agenda pembangunan daerah, yaitu: 1) Peningkatan kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat; 2) Peningkatan kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat; 3) Peningkatan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi; 4) Peningkatan kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim; 5) Peningkatan transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak; 6) Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif; serta 7) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan. Ketujuh agenda prioritas pembangunan daerah tersebut diturunkan dari tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagaiman tercantum dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026, yang selanjutnya diturunkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahah daerah diuraikan sebagai berikut.

BAPPEDA HALUT

A) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

a) Masih terdapat siswa SD dan SMP yang mengalami putus sekolah dan mengulang;

b) Masih banyak anak usia 4-6 tahun belum menikmati pendidikan anak usia dini, yang disebabkan: 1) belum seluruh desa tersedia sarana prasarana PAUD; dan 2) masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini;

c) Masih ada lebih dari 10 persen ruang kelas (SD dan SMP) dalam kondisi rusak berat/rusak total;

d) Masih ada sekolah yang belum terakreditasi, yang disebabkan: 1) sejumlah sekolah baru didirikan kurang dari empat tahun; dan 2) masih ada sekolah yang belum memenuhi standar pendidikan;

e) Masih banyak guru SD dan SMP yang belum bersertifikasi pendidik, yang disebabkan: 1) kualifikasi pendidikan yang tidak memenuhi syarat; dan 2) kompetensi guru di bawah standar yang disyaratkan;

f) Belum meratanya ketersediaan guru di setiap sekolah (PAUD, SD dan SMP) dikarenakan kurangnya tenaga pendidik;

g) Belum meratanya akses pendidikan non formal yang ditandai dengan masih ada kecamatan yang belum memiliki PKBM; di sisi lain ada PKBM yang tidak memiliki siswa;

2) Kesehatan

a) Masih terjadi kasus kematian Ibu, disebabkan: 1) Persalinan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan; 2) Persalinan tidak dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3) Ibu hamil yang melahirkan dengan komplikasi penyakit bawaan; 4) Ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan K4; 5) Ada ibu hamil yang belum mendapatkan Fe 90 tablet; 6) Belum semua Bidan terlatih dalam hal Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal

(PPGDON); 7) Belum semua bidan terlatih Asuhan Persalinan Normal (APN);

b) Masih ada kematian Bayi, disebabkan: 1) Masih ada Puskesmas belum mampu melayani pelayanan neonatal esensial; 2) Bayi lahir dengan

BAPPEDA HALUT

komplikasi yang tidak mampu ditangani; 3) Alat resusitasi bayi yang rusak; dan 4) Petugas belum terlatih penggunaan Alat Resusitasi;

c) Prevalensi Balita Underweight, Stunting dan Wasting di beberapa Kecamatan masih tinggi, disebabkan: 1) Masih ada ibu Nifas yang tidak mendapatkan Vit A; 2) Balita yang tidak datang ke Posyandu; 3) Balita yang tidak mendapatkan Vit A; 4) Bayi yang tidak mendapatkan ASI Ekslusif; 5) Ibu hamil yang Kekurangan Energi Kalori (KEK); 6) Masih kurangnya tenaga Nutrition di Puskesmas; dan 7) Balita yang Gizi Buruk tidak mendapatkan penangan;

d) Masih kurangnya SDM kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas;

e) Masih tingginya Angka Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, disebabkan belum optimalnya Pelayanan, penanganan dan pencegahan, khususnya yang melibatkan masyarakat;

f) Belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar, yang disebabkan: 1) belum semua Puskesmas terakreditasi; 2) Tenaga Medik Spesialis dan Sub Spesialist belum terpenuhi di RS; 3) Fasilitas Penunjang Pelayanan Medik belum terpenuhi; 4) Masih ada puskesmas yang belum melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional;

g) Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Belum optimalnya layanan jaringan irigasi, disebabkan terbatasnya sarana prasarana (jaringan irigasi sekunder) yang tersedia; di sisi lain Menurunnya fungsi jaringan irigasi terbangun, disebabkan karena kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pengairan dan konservasi sumber daya air;

b) Masih tingginya potensi bencana (tanah longsor, banjir, erosi dan abrasi pantai) pada daerah pesisir pantai dan sungai, disebabkan belum optimalnya konservasi daerah-daerah aliran sungai, kawasan pesisir pantai dan daerah rawan longsor;

c) Masih banyak masyarakat yang belum mengakses sumber air minum aman, dikarenakan masih terbatasnya terbatasnya jaringan SPAM; di sisi lain

BAPPEDA HALUT

jaringan SPAM terbangun tidak terpelihara dengan baik, dikarenakan Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas SPAM;

d) Masih banyak masyarakat yang belum mengakses sanitasi layak, dikarenakan masih terbatasnya terbatasnya sistem air limbah domestik; di sisi lain fasilitas air limbah terbangun tidak terpelihara dengan baik, dikarenakan Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas air limbah;

e) Masih banyak terdapat titik genangan pada saat hujan di kawasan perkotaan, disebabkan belum tersedianya sistem drainase perkotaan yang memadai;

f) Masih terdapat pembangunan gedung tidak sesuai standar, dikarenakan terbatasnya pengawasan bangunan gedung;

g) Belum optimalnya penyelenggaraan jaringan jalan untuk mendukung konektifitas wilayah, disebabkan belum seluruh jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, serta masih terdapat jalan dan jembatan rencana yang belum terbangun;

h) Masih lemahnya tata kelola pengembangan jasa konstruksi daerah, yang disebabkan salah satunya belum tersedianya basis data jasa konstruksi yang memadai sesuai standar pelayanan minimal;

i) Masih terdapat kawasan yang peruntukannya tidak sesuai dengan tata ruang, disebabkan belum tersedianya RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) dan RTRW revisi sesuai dengan kondisi terkini, serta belum optimalnya sistem informasi penataan.

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Masih terdapat Kawasan Kumuh di Daerah Perkotaan, dikarenakan belum optimalnya penataan kawasan, PSU (prasarana, sarana dan utilitas) di daerah perkotaan serta belum tersedianya dokumen Perencanaan RP3KP;

b) Belum terlaksanya penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat korban bencana;

c) Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dikarenakan kurang akuratnya basis data masyarakat berpneghasilan rendah;

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a) Belum optimalnya pemeliharaan ketenteraman lingkungan berbasis

BAPPEDA HALUT

masyarakat, disebabkan kurangnya Pos Siskamling dan SDM satlimas yang didukung sarana dan prasarana;

b) Belum optimalnya penegakan Perda, disebabkan kurangnya SDM yang mempunyai sertifikasi PPNS, serta belum tersedianya sekretariat PPNS;

c) Belum meratanya jangkauan pelayanan Satpol PP untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3) di wilayah kerja, disebabkan kurang memadainya fasilitas pendukung pelayanan, serta jumlah personil Satpol PP;

d) Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya Kebakaran termasuk SDM yang mempunyai standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran.

e) Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana, disebabkan luasnya cakupan wilayah risiko bencana serta belum tersedianya rencana aksi pengelolaan risiko bencana di setiap kecamatan dan desa;

6) Sosial

a) Masih banyaknya masalah kesejahteraan sosial, disebabkan terbatasnya kegiatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial melalui Lembaga Kesejateraan Sosial maupun Pembinaan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;

b) Belum efektifnya upaya-upaya rehabilitasi dan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.

B) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

a) Terbatasnya pembinaan dan pelatihan berbasis kompetensi dan keterampilan bagi pekerja maupun pencari kerja, disebabkan terbatasnya akses pelatihan kerja di daerah;

b) Masih banyak pencari kerja yang belum bekerja; di sisi lain kompetensi pekerja tidak sesuai dengan lowongan kerja yang tersedia yang menjadi indikasi kurangnya *link-and-match* antara lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja;

c) Masih terdapat pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan pekerja dengan perusahaan, disebabkan kurang

BAPPEDA HALUT

efektifinya sosialisasi serta pembinaan dan pengawasan.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   a) Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang ditandai dengan masih terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   b) Belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak anak, dikarenakan belum padunya kerangka kerja pemenuhan hak-hak anak pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha;
3) Pangan
   a) Belum efektifnya tata kelola ketahanan pangan di daerah, disebabkan kurangnya Regulasi Ketahana Pangan Daerah, serta kurang memadainya SDM Ketahanan Pangan;
   b) Ketersediaan Pangan Utama belum memadai, yang ditandai dengan masih tingginya Pasokan Pangan utama dari luar daerah (Beras); produksi pangan lokal belum mampu mendukung kebutuhan pangan daerah; belum meratanya pengelolaan distribusi pangan yang menyebabkan disparitas harga pangan antar wilayah;
   c) Belum terpenuhinya ketersediaan energi dan protein per kapita masyarakat, dikarenakan belum beragamnya komsumsi pangan masyarakat, yang ditandai masih tingginya ketergantungan masyarakat pada beras (nasi) sebagai sumber karbohidrat, dan rendahnya komsumsi masyarakat terhadap pangan lokal selain beras;
4) Pertanahan
   a) Masih terdapat Lahan milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, dikarenakan belum selesainya pengukuran lahan;
   b) Belum selesainya kasus sengketa tanah negara tahun 2019 antara Pemerintah Dearah dengan PTPN XIV Makassar;
   c) Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
5) Lingkungan Hidup
   a) Belum tersedianya regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dikarenakan belum diperdakannya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   b) Masih lemahnya pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, dikarenakan belum dilakukannya pengawasan terhadap izin Lingkungan

BAPPEDA HALUT

bagi Usaha yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten;

c) Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

d) Belum optimalnya pengelolaan persampahan, yang ditandai dengan masih banyaknya timbulan sampah yang belum terangkut, dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana persampahan;

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Belum optimalnya inovasi pelayanan kependudukan, yang ditandai dengan masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman e- KTP, termasuk mutu pelayanan penerbitan KK, Akta Pencatatan Sipil, dan Kartu Identitas Anak (KIA);

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal masih di atas 50%, disebabkan masih lemahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, belum efektifnya sistem pendataan profil desa sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan; terbatasnya kapasitas PADes dikarenakan masih adanya tumpang tindih kewenangan Desa dan Kabupaten dalam pungutan PADes; serta belum berkembangnya BUMDes dan usaha ekonomi produktif di desa;

b) Belum adanya desa berstatus mandiri, disebabkan belum adanya kerangka kerja terpadu yang melibatkan lintas sektor untuk pengembangan kawasan desa mandiri;

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Meningkatnya Totat Fertility Rate (TFR), disebabkan masih kurangnya kesadaan masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB, serta masih tingginya *unmet need* KB;

9) Perhubungan

a) Meningkatnya kasus kecelakaan LLAJ, yang diantaranya disebabkan belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu jalan, markah jalan, guadrail);

b) Masih rendahnya tingkat pelayanan di terminal angkutan darat, disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib di terminal, kurangnya memadainya SDM pengelola terminal, terbatasnya fasilitas terminal, serta belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan terminal;

BAPPEDA HALUT

c) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum, yang ditandai dengan masih kurangnya rasio ijin trayek untuk melayani kebutuhan pelayanan angkutan umum;

d) Belum efisien dan efektifnya layanan pelaksanaan uji kir, dikarenakan kurangnya kuantitas dan kualitas dan SDM bidang transportasi, fasilitas pengujian kendaraan bermotor belum berfungsi dengan baik, serta pelaksanaan uji kir terhadap fisik kendaraan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP pengujian kendaraan bermotor;

e) Belum optimalnya pengawasan dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat, termasuk masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penertiban izin usaha penyelenggaran angkutan sungai dan danau;

10) Komunikasi dan Informatika

a) Masih rendahnya informasi pelayanan publik kepada masyarakat, disebabkan belum tersedianya media komunikasi publik pemda yang memadai, belum tersedianya kelompok informasi masyarakat, serta rendahnya kapasitas SDM komunikasi publik;

b) Belum memadainya sistem informasi pemerintah berbasis elektronik, yang ditandai dengan belum seluruh perangkat daerah menggunakan aplikasi yang terintegrasi, belum semua perangkat daerah memiliki sub domain, masih kurangnya tenaga IT, serta infrastruktur jaringan yang belum memadai;

c) Masih terdapat wilayah/desa yang belum tekoneksi dengan jaringan telekomunikasi/internet;

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Minimnya pertumbuhan koperasi, yang ditenggarai karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat koperasi;

b) Masih banyak koperasi yang tidak aktif, dikarenakan koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara maksimal, serta terbatasnya SDM koperasi;

c) Rendahnya kualitas produk usaha mikro, dikarenakan sarana pendukung pengolahan yang masih sederhana/tradisional dan keterbatasan modal usaha;

12) Penanaman Modal

a) Menurunnya minat Investor di kabupaten Halmahera Utara, disebabkan kurangnya fasilitas insentif penanaman modal, terbatasnya sarana informasi

BAPPEDA HALUT

penanaman modal, kurang lengkapnya basis data penanaman modal, belum tersedianya rencana umum penanaman modal (RUPM), serta minimya promosi investasi daerah;

b) Belum maksimalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, disebabkan belum memadainya SDM dan fasilitas pelayanan;

13) Kepemudaan dan Olahraga

a) Belum optimalnya pengembangan daya saing kepemudaan, disebabkan kurangnya kordinasi, sinkronisasi dan pelaksanan pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan;

b) Belum optimalnya pengembangan daya saing keolahragaan, disebabkan kurangnya pembinaan bagi klub orahraga, terbatasnya sarana dan prasara olahraga yang memadai serta SDM olahraga dalam sentra pendidikan seperti guru olahraga pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

c) Kurangnya pembinaan organisasi kepramukaan, disebabkan semakin menurunnya minat masyarakat terhadap gerakan pramuka, serta kurangnya pengembangan kapasitas SDM kepramukaan

14) Statistik

a) Belum optimalnya penyelenggaraan satu data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019, dikarenakan masih lemahnya penyelenggaraan statistik sektoral di daerah;

15) Persandian

a) Masih lemahnya tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemda, disebabkan belum tersedianya infrastruktur persandian yang memadai serta kurangnya sumberdaya sandiman, serta belum fokusnya penyelenggaraan urusan persandian sebagai salah satu urusan wajib non pelayanan dasar;

16) Kebudayaan

a) Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian seni budaya, serta benda cagar budaya di daerah;

17) Perpustakaan

a) Berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan, disebabkan kurangnya kesadaran Pemerintah Desa/Masyarakat terhadap pengembangan

BAPPEDA HALUT

Perpustakaan di Desa;

b) Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat;

c) Belum adanya upaya pelestarian Naskah Kuno;

18) Kearsipan

a) Masih terdapat perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku, disebabkan terbatasnya SDM kearsipan, serta kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menyampaikan Arsip Statis perangkat daerah kepada Lembaga Kearsipan;

b) Masih lemahnya Penerapan SOP dan Perda tentang Kearsipan, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap SOP dan Perda tentang Kerasipan di Daerah;

C) Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

a) Belum optimalnya produksi perikanan, disebabkan terbatasnya jumlah armada tangkap untuk penangkapan jarak jauh (lebih besar dari 12 mil); serta keterampilan SDM perikanan tangkap jarak jauh;

b) Masih rendahnya produksi perikanan budidaya dibandingakn dengan potensi pengembangan yang ada, antara lain disebabkan kurang memadainya sarana produksi perikanan budidaya air tawar, meliputi antara lain benih dan pakan;

2) Pariwisata

a) Masih rendahnya kunjungan pariwisata di daerah dibandingkan dengan kawasan sekitar seperti Bitung Sulawesi Utara dan Raja Ampat Papua Barat, disebabkan kurangnya promosi pariwisata, terbatasnya kapasitas pelaku pariwisata yang umumnya masih dalam skala rumah tangga, tidaknya adanya puast Informasi pariwisata/TIC, belum adanya Biro Perjalanan wisata, Tour Operator yang menjual paket wisata di Halmahera Utara;

b) Belum optimalnya pngelolaan destinasi wisata, disebabkan kurangnya insentif Pengelola (fasilitas banyak yang sudah rusak, terabaikan), kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan laut, lingkungan destinasi wisata, dan terumbu karang;

c) Kurang berkembangnya ekonomi kreatif yang dapat mendukung usaha pariwisata, yang ditandai dengan belum adanya kios cenderamata yang dapat menampung hasil kerajinan khas daerah; serta masih kurangnya minat

BAPPEDA HALUT

generasi muda dalam berkreasi, berinovasi dan berkarya terhadap hasil kerajinan ekonomi kreatif.

3) Pertanian
   a) Belum optimalnya produksi pertanian/peternakan, yang disebabkan terbatasnya sarana produksi pertanian/peternakan meliputi bibit/benih serta belum memadainya sarana di Balai Penyuluhan Pertanian, Puskeswan, instalasi pembibitan; kurangnya penangkar benih yang bersertifikasi; serta kurangnya prasarana pertanian meliputi (jaringan irigasi usaha tani, Pintu Air, jalan usaha tani/produksi, Alat dan mesin pertanian, Puskeswan, instalasi pembibitan);
   b) Belum optimalnya pengelolaan produk pertanian, yang disebabkan terbatasnya fasilitas pengolahan hasil pertanian yang bersertifikasi;
   c) Belum optimalnya pengendalian kesehatan hewan dan pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner, dikarenakan kurangnya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyakarat veteriner; belum tersedianya fasilitas pengolahan hasil peternakan yang bersertifikasi, serta kurangnya fasilitas di RPH;
   d) Belum optimalnya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, disebabkan kurangnya Petugas POPT di kecamatan;
   e) Masih rendahnya kapasitas SDM pertanian/peternakan, disebabkan terbatasnya fasilitasi pelatihan bagi petani/peternak dan petugas meliputi (Magang, bimtek, workshop, diklat teknis);
4) Kehutanan
   a) Belum berjalannya upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura);
5) Energi dan Sumber Daya Mineral
   a) Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya yang bersumber panas bumi.
6) Perdagangan
   a) Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
   b) Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, meliputi ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
   c) Masih rendahnya volumen maupun nilai produk ekspor daerah;

BAPPEDA HALUT

7) Perindustrian
   a) Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil;
   b) Masih rendahnya kapasitas industri yang memiliki standar produksi layak;

8) Transmigrasi
   a) Terhambatnya perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi baru, disebabkan belum adanya pengalihan status kawasan hutan/Ijin prinsip merujuk pada calon kawasan transmigrasi tidak masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL) tetapi masuk di Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
   b) Belum teealisasinya pengembangan Kawasan Transmigrasi, disebabkan belum adanya pengalihan status HPK ke APL untuk perluasan kawasan transmigrasi;
   c) Belum berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM), disebabkan masih rendahnya pemahaman para pemangku kepentingan untuk pembangunan KTM yang berdampak pada pengembangan kawasan transmigrasi.

D) Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawasan Urusan Pemerintahan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

1) Sekretariat Daerah
   a) Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang disebabkan karena belum adanya instrumen internal yang baku untuk memfasilitasi pendampingan dan pengawasan pelaporan akuntabilitas kinerja dari setiap perangkat daerah;
   b) Masih minimnya jumlah kerjasama daerah yang dapat mendorong peningkatan investasi, perdagangan antar daerah, dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2) Sekretariat DPRD
   a) Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas legislasi, penganggaran daerah, serta pengawasan;

3) Perencanaan
   a) Belum konsistennya penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, yang disebabkan: minimnya SDM aparatur perencana, belum efektifnya proses

BAPPEDA HALUT

pengendalian perencanaan, belum optimalnya analisis data dan informasi (data PD yang belum valid), kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam perencanaan;

b) Masih kurangnya capaian target perencanaan, yang disebabkan: penetapan target yang terlalu tinggi tanpa dilandasi metode/asumsi yang kuat, serta indikator yang belum memenuhi unsur SMART;

4) Keuangan

a) Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah merujuk pada rasio PAD terhadap dana transfer masih di bawah 10 persen;

b) Belum efektifnya pengelolaan keuangan daerah merujuk pada rasio efektifitas PAD masih di bawah 75 persen, yang disebabkan belum optimalnya pemanfatan potensi pajak dan retribusi daerah, masih belum memadainya kualitas SDM pemungut pajak, serta kurangnya kesadaran dari pembayar pajak;

5) Kepegawaian

a) Belum optimalnya manajemen Disiplin Aparatur Sipil Negara merujuk pada belum adanya Sistem Pengawasan Disiplin dan Pengawasan Kinerja, yang disebabkan antara lain belum tersedianya aplikasi Presensi Kehadiran Pegawai selama jam kerja secara real time dan aplikasi pemantauan kinerja berjenjang secara harian, bulanan dan tahunan yang efektif dan efisien;

b) Belum efektifnya kinerja pemerintah daerah merujuk pada masih adanya jabatan struktural maupun fungsional yang belum seluruhnya terisi sesuai kebutuhan Perangkat Daerah, yang disebabkan antara lain: belum lengkapnya data Talent/Profil Pegawai untuk keperluan suksesi, rotasi dan promosi, serta belum dimilikinya *Assessment Centre* secara mandiri untuk Penilaian Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Bagi setiap Jabatan yang diperlukan;

6) Pendidikan dan Pelatihan

a) Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi aparatur dalam tugas dan fungsi, baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosiokultural, yang disebabkan kurangnya pengembangan kompetensi bagi aparatur secara berkelanjutan sesuai tupoksi sejalan dengan dinamika permasalahan daerah, dan belum

BAPPEDA HALUT

terkelolanya dengan baik pengembangan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan organisasi/daerah;

b) Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi manajerial kepemimpinan pejabat struktural merujuk masih banyaknya pejabat struktural yang belum memiliki sertifikat Diklat PIM, sebagai bagian persyaratan kompetensi jabatan, yang disebabkan batalnya pelaksanaan diklat kepemimpinan selama beberapa tahun terakhir karena berbagai kendala dan kurangnya minat pejabat struktural untuk mengikuti diklat karena waktu diklat yang lama dan lokasi kegiatan yang diluar daerah;

7) Penelitian dan Pengembangan
   a) Masih mininmya produk/hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan daerah;
   b) Masih belum optimalnya upaya perbaikan atau peningkatan indikator-indikator Inovasi Daerah.

8) Inspektorat Daerah
   a) Pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya sesuai standar, dikarenakan SOP belum memadai;
   b) Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama teknis dengan aparat pengawas lainnya, merujuk pada masih minimnya tindaklanjut Kesepakatan kerja sama secara teknis dan operasional antara APIP dan APH lainnya;
   c) Masih kurangnya ketersediaan Tenaga APIP bersertifikat, sarana/ prasarana penunjang pengawasan yang memadai, disebabkan anggaran pengawasan yang belum sesuai dengan mandatori;
   d) Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan inspektorat;
   e) Hasil pemeriksaan APIP Maupun Pengawasan Eksternal (BPK) belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh para penanggungjawab, disebabkan Penanggung jawab temuan sulit untuk ditemui, meninggal, atau mutasi ke luar daerah;

9) Kecamatan
   a) Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di desa, disebabkan narkoba, tawuran, serta perselisihan tapal batas desa;
   b) Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan desa, disebabkan

BAPPEDA HALUT

rendahnya kualitas SDM pengelola keuangan Desa dan seringnya penggantian perangkat desa;

c) Masih kurangnya usaha ekonomi produktif desa merujuk pada masih banyaknya desa yang belum terbentuk BUMDes;

10) Kesatuan Bangsa dan Politik

a) Masih adanya potensi konflik di Masyarakat;

b) Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat;

BAPPEDA HALUT

BAB 3
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAPPEDA HALUT

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada kerangka analisis terhadap ekonomi secara makro untuk memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Halmahera Utara, baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain kondisi perekonomian daerah, perekonomian regional, nasional maupun global.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari kondisi ekonomi pada tingkat global, nasional maupun regional Maluku Utara. Laporan Bank Indonesia (Januari, 2024) menyebutkan bahwa dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian yang tinggi. Optimisme pemulihan pada awal 2023 berangsur meredup. Kenaikan permintaan, khususnya di sektor jasa, setelah pulihnya mobilitas manusia pasca-Covid-19 menghadapi keterbatasan sisi penawaran karena dampak luka memar (*scarring effect*) di sisi korporasi maupun pembatasan imigrasi dari kebijakan politik di sejumlah negara maju (Advanced Economies, AEs). Fragmentasi geopolitik-ekonomi juga meningkat dengan berlangsungnya perang Rusia di Ukraina yang menyebabkan keterbatasan pasokan serta tetap tingginya harga energi dan pangan global. Berlanjutnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berdampak pada penurunan tidak hanya ekspor-impor kedua negara tersebut, tetapi juga volume perdagangan dunia. Ketegangan Israel dan Palestina sejak awal Oktober 2023 menambah ketegangan geopolitik di Kawasan Timur Tengah dan juga dunia.

Hal tersebut mengakibatkan proses pemulihan ekonomi global melambat, disertai dengan berlanjutnya tekanan inflasi karena harga energi dan pangan dunia, serta keketatan pasar tenaga kerja di sejumlah negara maju. Perlambatan ekonomi dunia juga disebabkan oleh pengetatan moneter yang harus ditempuh bank-bank sentral untuk menurunkan inflasi, dengan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi di negara maju, khususnya AS. Melonjaknya utang pemerintah untuk membiayai ekspansi kebijakan fiskal di negara maju, khususnya AS, makin mendorong suku bunga dan kuatnya dolar AS di pasar keuangan global sehingga menarik aliran modal dunia dalam jumlah besar.

Di negara Emerging Market and Developing Economies (EMDEs), otoritas moneter diharuskan memperkuat respons kebijakan untuk menjaga stabilitas eksternal dari dampak negatif rambatan global tersebut, termasuk pembalikan aliran investasi portofolio dan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar. Proses pemulihan ekonomi global juga dipengaruhi oleh permasalahan perubahan iklim, struktur demografi, dan digitalisasi.

Adapun ekonomi Indonesia tumbuh kuat dan stabil di tengah risiko perlambatan ekonomi global (Badan Kebijakan Fiskal Kementeria Keuangan, Maret, 2024). Perekonomian tumbuh 5,04 persen (yoy) pada triwulan IV 2023 dan 5,05 persen (yoy) secara full year. Hal tersebut didukung oleh konsumsi domestik yang kuat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, termasuk dengan adanya momentum hari besar keagamaan, liburan akhir tahun, serta aktivitas menjelang pemilu. Di sisi lain, tingkat inflasi yang relatif terkendali turut menjaga daya beli masyarakat. Dari sisi kebijakan fiskal, penyerapan belanja negara yang optimal mampu menopang konsumsi pemerintah serta masyarakat. Pada aktivitas investasi, investasi bangunan dan nonbangunan menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan tahapan realisasi proyek strategis nasional (PSN).

Hingga akhir tahun 2023, indikator ekonomi menunjukkan perkembangan yang stabil dan kuat. Hal tersebut dicerminkan oleh perkembangan berbagai indikator perekonomian yang masih solid, seperti optimisme masyarakat, perkembangan konsumsi, dan penjualan ritel. PMI manufaktur juga terus ekspansif, terlihat dari tren yang konsisten meningkat dalam 28 bulan berturut-turut. Ekspansi sektor manufaktur sejalan dengan kinerja indikator lain yang juga dalam tren kuat, seperti konsumsi listrik dan penjualan semen.

BAPPEDA HALUT

Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi tumbuh didukung sektor konsumsi PK-LNPRT dan rumah tangga. Di sepanjang tahun 2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,8 persen (yoy). Tingkat inflasi yang terkendali menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, berbagai kebijakan APBN seperti penebalan bansos untuk mitigasi dampak El Nino, percepatan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tengah peningkatan suku bunga, serta kebijakan penguatan sektor perumahan turut menopang daya beli masyarakat. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK- LNPRT) melonjak tinggi, tumbuh 9,8 persen (yoy) pada tahun 2023. Perkembangan positif ini turut didorong oleh meningkatnya aktivitas umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) terus melanjutkan tren perbaikan dengan tumbuh menguat 4,4 persen (yoy) pada 2023. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh komponen investasi bangunan serta investasi mesin dan perlengkapan. Tingginya aktivitas belanja modal Pemerintah, penyelesaian proyek strategis nasional, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mendorong kinerja investasi. Keyakinan investor juga terus terjaga, terlihat dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang masing-masing tumbuh 22,1 persen (yoy) dan 13,7 persen (yoy). Meskipun dinamika global masih menjadi tantangan, kinerja infrastruktur Indonesia terpantau semakin baik. Di samping itu, stabilitas makroekonomi dan sosial politik yang terjaga turut menjadi faktor esensial dalam upaya menjaga iklim investasi di Indonesia.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) pada triwulan IV 2023 kembali tumbuh sebesar 2,81 persen setelah sempat terkontraksi pada triwulan sebelumnya. Dengan demikian, konsumsi pemerintah sepanjang tahun 2023 tumbuh sebesar 2,95 persen. Adapun kinerja ekspor neto riil masih positif sehingga menopang laju pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Pada tahun 2023, ekspor neto riil tumbuh sebesar 17,8 persen (yoy) dengan share-to-growth sebesar 0,7 persen terhadap pertumbuhan agregat. Kinerja ekspor neto riil yang masih positif ini terutama didorong oleh pertumbuhan ekspor barang dan jasa riil yang dapat mengimbangi kontraksi impor barang dan jasa riil. Ekspor barang dan jasa pada tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 1,3 persen (yoy), ditopang oleh peningkatan ekspor barang migas.

BAPPEDA HALUT

Dari sisi produksi, sektor pertanian yang merupakan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDB mencatatkan pertumbuhan terbatas di 1,3 persen (yoy). El Nino menjadi penyebab utama rendahnya pertumbuhan di sektor ini. Selain itu, faktor cuaca juga mengakibatkan penurunan produksi komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, dan produk tanaman hortikultura semusim, seperti sayur- sayuran. Sektor pertambangan mencatatkan pertumbuhan signifikan di tahun 2023 hingga 6,1 persen (yoy). Subsektor pertambangan batu bara merupakan penyumbang pertumbuhan terbesar dengan tumbuh signifikan 10 persen (yoy) seiring peningkatan ekspor batu bara. Subsektor bijih logam dan galian lainnya tumbuh masing-masing sebesar 8,5 persen (yoy) dan 5,4 persen (yoy) didorong meningkatnya produksi mineral seperti emas, tembaga, dan nikel serta peningkatan ekspor komoditas galian seperti batu hias, kerikil, dan pasir. Dari sisi bobot, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB pada tahun 2023 mencapai 10,5 persen (yoy).

Sektor manufaktur tumbuh 4,07 persen pada triwulan IV (4,64 persen full year), diikuti sektor perdagangan yang tumbuh 4,09 persen (4,85 persen full year). Peningkatan permintaan domestik maupun global menjadi penopang pertumbuhan, terutama untuk produk industri logam dasar, barang logam, dan alat angkutan. Sejalan dengan kinerja sektor manufaktur, sektor perdagangan turut tumbuh positif, didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik dan penjualan sepeda motor.

Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor transportasi sepanjang tahun 2023. Pada triwulan IV 2023, sektor transportasi tumbuh sebesar 10,33 persen dan 13,96 persen secara tahunan. Sejalan dengan pertumbuhan sektor transportasi, sektor akomodasi dan makan minum juga tumbuh positif sebesar 7,89 persen pada triwulan IV 2023 atau secara tahunan tumbuh 10,01 persen. Penyelenggaraan berbagai acara baik level nasional maupun internasional mendorong daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Selain itu, peningkatan mobilitas juga dipengaruhi oleh musim liburan nataru dan persiapan penyelenggaraan pemilu. Sejalan dengan pertumbuhan sektor transportasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga tumbuh positif sebesar 10 persen (yoy) di tahun 2023. Sementara sektor konstruksi dan real estat mampu tumbuh masing-masing sebesar 4,9 persen (yoy) dan 1,4 persen (yoy) di tahun 2023. Percepatan penyelesaian PSN, aktivitas belanja modal Pemerintah untuk konstruksi dan pembangunan infrastruktur dasar kawasan IKN telah mampu mengungkit pertumbuhan sektor konstruksi.

BAPPEDA HALUT

Adapun perekonomian daerah Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV 2023, kembali tumbuh tinggi yaitu sebesar 17,99% (yoy), meskipun mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 25,13% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan IV 2023 tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi di Indonesia melanjutkan capaian pada triwulan III 2023. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya dialami oleh Provinsi Papua yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,79% (yoy) dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 9,73% (yoy). Pertumbuhan yang tinggi pada ketiga provinsi tersebut ditopang oleh pertumbuhan pada sektor industri pengolahan dan pertambangan. Secara nasional, mayoritas provinsi mengalami akselerasi pertumbuhan sejalan dengan pertumbuhan nasional yang mengalami akselerasi pada triwulan IV 2023.



Gambar 3.1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2023
Sumber : Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, 2024

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang tumbuh tinggi pada triwulan IV 2023 masih digerakkan oleh sektor pertambangan dan pengolahan komoditas nikel. Dilihat dari sisi pengeluaran, komponen ekspor kembali mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 42,40% (yoy), melanjutkan tren pertumbuhan positif pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh realisasi ekspor produk olahan nikel di Maluku Utara yang mengalami peningkatan dipengaruhi oleh optimalisasi produksi smelter eksisting dan eskpor perdana produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) oleh smelter hidrometalurgi di Halmahera Tengah pada triwulan IV 2023. Berikutnya, seluruh komponen konsumsi tetap mengalami pertumbuhan positif pada triwulan IV 2023. Komponen konsumsi pemerintah mengalami akselerasi pertumbuhan sejalan dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah pada akhir tahun 2023.

BAPPEDA HALUT

Komponen konsumsi Rumah Tangga (RT) tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pola konsumsi masyarakat pada momen HBKN Natal 2023 dan tahun baru 2024. Di sisi lain, konsumsi LNPRT mengalami akselerasi sejalan dengan gencarnya kampanye menjelang pemilu legislatif dan presiden 2024.

Sementara itu, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kontraksi pertumbuhan pada triwulan IV 2023, melanjutkan tren kontraksi pada triwulan sebelumnya. Kontraksi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh penurunan realisasi pembangunan smelter nikel maupun infrastruktur pendukungnya pada triwulan IV 2023. Kontraksi pertumbuhan pada komponen PMTB seiring dengan catatan realisasi impor luar negeri Maluku Utara yang tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 27,62% (yoy) pada triwulan IV 2023. Kontraksi pertumbuhan impor LN disebabkan oleh penurunan kebutuhan bahan baku pembangunan smelter nikel di Maluku Utara. Komoditas utama yang mendorong kontraksi pertumbuhan, yaitu komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya dan mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya yang mengalami kontraksi pertumbuhan pada triwulan IV 2023.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, terdapat 10 (sepuluh) lapangan usaha (LU) yang mengalami akselerasi pertumbuhan, 6 (enam) LU mengalami deselerasi pertumbuhan, sementara 1 (satu) LU mengalami kontraksi pertumbuhan pada triwulan IV 2023. Dari lima lapangan usaha yang menjadi penyumbang struktur ekonomi tertinggi di Maluku Utara, 3 (tiga) mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan IV 2023. LU Industri Pengolahan beserta LU Pertambangan dan Penggalian tetap tumbuh tinggi namun mengalami deselerasi dimana masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 34,97% (yoy) dan 29,62% (yoy).

Kedua lapangan usaha tersebut masih tumbuh tinggi sejalan dengan optimalisasi produksi smelter pirometalurgi dan hidrometalurgi eksisting yang berada di Maluku Utara. Selain itu, realisasi ekspansi smelter hidrometalurgi yang telah berhasil dilakukan dengan produk akhir nikel sulfat dan kobalt sulfat yang memiliki harga jual yang lebih tinggi sehingga meningkatkan nilai tambah dalam negeri untuk produk olahan nikel. Kedua produk tersebut merupakan ekspansi dari produk akhir MHP dari smelter hidrometalurgi yang telah beroperasi sejak tahun 2021. Kemudian, terdapat realiasi ekspor perdana MHP dari smelter hidrometalurgi di Halmahera Tengah juga turut mendorong kinerja LU Industri Pengolahan.

BAPPEDA HALUT

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh masing-masing 4,9% dan 24,3% (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih kuat terutama didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR. Secara tak langsung, belanja Pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu juga turut mendorong konsumsi rumah tangga melalui pemberian honorarium petugas Pemilu. Sementara itu, konsumsi oleh LNPRT melonjak tinggi terutama didorong oleh berbagai aktivitas terkait Pemilu 2024.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh dua digit sebesar 19,9% (yoy). Kinerja belanja pegawai dalam APBN yang sangat kuat menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100% pada triwulan I 2024. Di sisi lain, belanja barang dan belanja sosial yang merupakan bagian dari PKP juga meningkat cukup signifikan. PKP menyumbang 1,1% terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 terbesar ketiga setelah konsumsi masyarakat dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Pertumbuhan PMTB atau investasi tercatat sebesar 3,8% (yoy). Aktivitas belanja modal pemerintah terkait infrastruktur turut mendorong aktivitas investasi bangunan. Keberlanjutan hilirisasi SDA yang semakin meningkat, kinerja ekonomi makro yang sangat baik, serta stabilitas sosial politik menjaga daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi. Kinerja investasi sektor swasta juga tergambar dari realisasi PMA dan PMDN triwulan I yang tumbuh tinggi 22,1% (yoy) dengan sebaran investasi antara Jawa dan Luar Jawa yang berimbang.

Tren perlambatan ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia. Pada triwulan I 2024, ekspor riil masih tumbuh sebesar 0,5% (yoy) ditopang oleh peningkatan ekspor jasa seiring kuatnya arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Di sisi lain, volume ekspor produk utama seperti besi baja dan bahan bakar mineral tetap kuat, masingmasing tumbuh sebesar 35,8% dan 5,4% (yoy) pada triwulan I 2024.

BAPPEDA HALUT

Sementara, impor riil juga tumbuh 1,8% (yoy) pada triwulan I 2024. Secara keseluruhan, kontribusi net ekspor (ekspor–impor) terhadap pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar 0,2%.

Dari sisi produksi atau penawaran, sektor-sektor unggulan tetap tumbuh positif. Sektor manufaktur pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,1% (yoy), didorong masih kuatnya permintaan domestik dan kebijakan hilirisasi. Keberhasilan kebijakan hilirisasi tercermin dari sub sektor industri logam dasar yang tetap tumbuh dua digit, yaitu sebesar 16,6% (yoy) pada triwulan I 2024. Kuatnya permintaan domestik terutama ditopang oleh peningkatan industri pengolahan makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,9% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan positif sektor manufaktur, sektor perdagangan juga tumbuh sebesar 4,6% (yoy), terutama didorong oleh meningkatnya permintaan selama Ramadan. Sementara itu, sektor pertanian mencatatkan kontraksi sebesar 3,5% (yoy), dipengaruhi oleh bergesernya musim panen akibat kekeringan panjang akibat El Nino yang menyebabkan tertundanya musim tanam.

Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata. Sektor transportasi dan akomodasi masing-masing tumbuh sebesar 8,7% (yoy) dan 9,4% (yoy). Arus wisatawan baik dari domestik maupun asing semakin menguat terlihat dari jumlah perjalanan wisatawan nusantara Indonesia yang meningkat sebesar 15,7% (yoy) dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh 25,4% (yoy). Selain itu, aktivitas kegiatan Pemilu, liburan tahun baru, dan aktivitas selama bulan Ramadan mendorong tumbuhnya kedua sektor tersebut.

Secara spasial, tren pertumbuhan ekonomi yang positif juga terjadi di semua wilayah. Pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian nasional, tumbuh relatif kuat di level 4,8% (yoy). Aktivitas sektor manufaktur dan jasa yang terus meningkat menopang pertumbuhan ekonomi pada wilayah ini. Sementara itu, keberlanjutan pengembangan industri hilirisasi SDA menjadi faktor utama bagi pertumbuhan kawasan Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh masing-masing 6,4% dan 12,2% (yoy).

Bank Indonesia (Januari, 2024) memproyeksikan bahwa prospek perbaikan ekonomi nasional akan terus berlanjut dengan stabilitas yang tetap terjaga. Dalam jangka menengah panjang, pertumbuhan akan terus membaik ditopang konsumsi swasta yang meningkat sejalan dengan terjaganya daya beli, dukungan kebijakan fiskal dan moneter, serta makin besarnya peran generasi muda milenial.

BAPPEDA HALUT

Investasi akan meningkat seiring dengan peningkatan ekspor dan juga berlanjutnya PSN. Kinerja ekspor juga akan makin meningkat seiring dengan perbaikan prospek ekonomi global dan makin maraknya program hilirisasi di berbagai sektor. Konsistensi implementasi reformasi struktural, termasuk melalui pembangunan infrastruktur, implementasi UU Cipta Kerja, berbagai program hilirisasi, akselerasi digitalisasi, dan penguatan sumber daya manusia akan mampu memperkuat kapasitas perekonomian sehingga ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi tanpa memberikan tekanan yang signifikan pada stabilitas.

Namun demikian, Bank Indonesia (Januari, 2024) juga menyebutkan sejumlah risiko dari dinamika ketidakpastian global yang tinggi perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan respons bauran kebijakan nasional yang tepat untuk memitigasi dampak rambatannya pada ekonomi domestik. Pertama, pertumbuhan ekonomi global diprakirakan melemah dan disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang makin melebar. Kedua, lambatnya penurunan inflasi global karena masih tingginya harga energi dan pangan dunia, serta keketatan pasar tenaga kerja di negara maju. Ketiga, suku bunga kebijakan moneter dan yield obligasi di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR) dan US Treasury, diprakirakan akan tetap bertahantinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Keempat, pelarian arus modal dalam jumlah besar dari negara EMDEs ke negara maju dan ke aset yang lebih likuid. Kelima, nilai tukar dolar AS menguat secara tajam (strong dollar) dan memberikan tekanan pelemahan terhadap berbagai mata uang dunia.

Adapun Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Februari, 2024) memproyeksikan perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 tetap tumbuh tinggi, namun mengalami deselerasi dibandingkan tahun 2023. Apabila dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diproyeksikan masih didorong oleh tingginya aktivitas ekspor. Aktivitas ini sejalan dengan masih tingginya kebutuhan dunia akan produk nikel sebagai bahan baku industri besi dan baja serta baterai kendaraan listrik. Hal ini juga dipengaruhi oleh optimalisasi produksi smelter pirometalurgi dan hidrometalurgi eksisting, serta realisasi hilirisasi olahan nikel yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Realisasi pembangunan smelter yang akan memasuki fase commissioning pada tahun 2024 akan berdampak positif pada naiknya angka ekspor Maluku Utara secara keseluruhan. Komponen konsumsi rumah tangga diperkirakan akan mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2023 seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat ke depan.

BAPPEDA HALUT

Pendapatan masyarakat selama tahun 2024 juga diprakirakan akan semakin meningkat sejalan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 di Maluku Utara yang mengalami peningkatan sebesar 7,5%, lebih tinggi dibandingkan peningkatan tahun 2023 yang sebesar 4%.

Dari sisi PMTB, diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi smelter baru pada tahun 2024 meskipun diperkirakan tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya di mana pembangunan smelter oleh pelaku usaha sangat masif dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, impor untuk bahan modal seperti mesin dan pesawat mekanik sebagai pendukung pembangunan smelter diperkirakan mengalami tren perlambatan pada tahun 2024. Lebih lanjut, risiko pelemahan permintaan domestik industri besi dan baja di tiongkok serta ketergantungan akan permintaan dari Tiongkok diperkirakan akan mempengaruhi kinerja industri pengolahan maupun ekspor LN. Selain itu, terdapat potensi penurunan harga nikel dunia yang diakibatkan oleh terjadinya oversupply akibat pasokan olahan nikel yang melimpah di Tiongkok. Hal tersebut dapat menjadi penahan laju pertumbuhan perekonomian Maluku Utara lebih lanjut.

Apabila dilihat dari sisi Lapangan Usaha, industri pengolahan dan pertambangan masih akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kinerja produksi produk olahan nikel di Maluku Utara yang semakin optimal. Realisasi ekspansi dan konversi produk olahan nikel yang memiliki nilai jual tinggi sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, serta realisasi smelter hidrometalurgi yang telah memasuki fase commissioning diprakirakan akan mendorong industri pertambangan dan pengolahan kembali tumbuh seiring masih tingginya kebutuhan bahan baku pembuatan baterai untuk keperluan kendaraan listrik.

Lebih lanjut, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan akan tetap tumbuh positif sejalan dengan perkiraan mulai meredanya fenomena El Nino pada tahun 2024. Dengan demikian, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Februari, 2024) memproyeksikan bahwa pada tahun 2024 perekonomian Maluku Utara akan tetap tumbuh tinggi dengan rentang pertumbuhan sebesar 16,39% - 20,39% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 dari sisi pengeluaran diproyeksikan akan tetap tumbuh dan ditopang oleh Ekspor dan Investasi PMTB. Ekspor LN pada tahun 2024 diprakirakan mengalami akselerasi dibandingkan dengan tahun 2023.

BAPPEDA HALUT

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsipprinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Kebijakan keuangan daerah merupakan bentuk upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengoptimalkan belanja daerah. Secara umum, pelaksanaan kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Halmahera Utara mengedepankan prinsip *money follow program* dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran yang lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan RKPD 2023. Dengan demikian kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025 dapat diuraikan pada bagian berikut.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Seiring dengan perkembangan dan dinamikan masyarakat maka kebutuhan akan pendanaan pembangunan daerah juga semakin meningkat. Kabupaten Halmahera Utara saat ini dihadapkan pada ketersediaan anggaran pendapatan dari sumber- sumber pendapatan yang sudah ada yang sangat terbatas. Penyebaran virus covid-19 yang begitu masif, diperkirakan pada tahun 2025 akan semakin berkurang seiring dengan telah dilakukannya vaksinasi secara bertahap.

BAPPEDA HALUT

Namun ekses-ekses dari dampak penyebaraannya diperkirakan masih akan tetap dirasakan dan mempengaruhi aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Dalam upaya memaksimalkan potensi pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Utara maka dilakukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

a) Melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah;
b) Memperbaiki tata kelola pendapatan asli daerah dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus administrasi perpajakan dan retribusi daerah;
c) Mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d) Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah;
e) Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
f) Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dan antar instansi pengelola pendapatan daerah.
g) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama menyangkut dengan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
h) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terutama menyangkut dengan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah;

Berdasarkan kebijakan-kebijakan pendapatan daerah maka kerangka proyeksi pendapatan daerah untuk RKPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022-2026

URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TAHUN BERJALAN 2024	TAHUN 2025	2026
2	*3*	*4*	*5*	*6*	
PENDAPATAN	**1,064,740,284,609.33**	**1,023,446,268,035.79**	**1,230,215,695,694.00**	**1,181,351,461,953.44**	**1,241,419,035,051.11**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**71,426,717,476.33**	**119,927,834,855.79**	**114,701,281,335.00**	**135,973,844,120.00**	**143,272,536,326.00**
Pendapatan Pajak Daerah	19,163,821,412.90	21,631,324,723.00	36,638,000,000.00	29,200,000,000.00	31,160,000,000.00
Pendapatan Retribusi Daerah	1,553,971,673.00	2,486,540,470.00	10,738,281,335.00	32,473,844,120.00	34,097,536,326.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,008,789,017.00	1,960,644,414.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,100,000,000.00
Lain-lain PAD Yang Sah	49,700,135,373.43	93,849,325,248.79	65,325,000,000.00	72,300,000,000.00	75,915,000,000.00
PENDAPATAN TRANSFER	**991,301,567,133.00**	**900,642,433,180.00**	**1,023,769,206,771.00**	**1,023,144,301,760.44**	**1,074,301,516,848.46**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	822,543,814,086.00	710,348,096,197.00	776,944,396,000.00	794,819,857,830.00	834,560,850,721.50
Bagi Hasil Pajak	202,534,390,057.00	18,431,130,400.00	8,717,747,000.00	13,500,000,000.00	14,175,000,000.00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0.00	32,408,769,400.00	37,958,216,000.00	37,958,216,000.00	39,856,126,800.00
Dana Alokasi Umum (DAU)	449,676,532,753.00	483,899,040,276.00	503,106,961,000.00	516,200,169,830.00	542,010,178,321.50
Dana Alokasi Khusus (DAK)	170,332,891,276.00	175,609,156,121.00	227,161,472,000.00	227,161,472,000.00	238,519,545,600.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	143,654,906,000.00	153,552,221,500.00	156,511,459,000.00	153,453,193,000.00	161,125,852,650.00
Dana Penyesuaian	3,000,100,000.00	2,928,504,500.00	7,208,266,000.00	4,150,000,000.00	4,357,500,000.00
Dana Desa	140,654,806,000.00	150,623,717,000.00	149,303,193,000.00	149,303,193,000.00	156,768,352,650.00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya	25,102,847,047.00	36,742,115,483.00	90,313,351,771.00	74,871,250,930.44	78,614,813,476.96
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25,102,847,047.00	36,742,115,483.00	90,313,351,771.00	74,871,250,930.44	78,614,813,476.96
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**2,012,000,000.00**	**2,876,000,000.00**	**91,745,207,588.00**	**22,233,316,073.00**	**23,844,981,876.65**
Pendapatan Hibah	2,012,000,000.00	2,876,000,000.00	60,043,644,803.00	6,274,000,000.00	6,587,700,000.00
Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	31,701,562,785.00	15,959,316,073.00	17,257,281,876.65

BAPPEDA HALUT

3.2.1. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 diarahkan sebagai berikut:

a) Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, penyediaan belanja tidak terduga terutama untuk penyediaaan penanggulangan Covid-19, apabila belum selesai, belanja bantuan sosial untuk menangani dampak Pandemi Covid-19, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun berkenaan;
b) Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
c) Belanja operasi pada setiap Perangkat Daerah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
d) Belanja Bantuan Keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya;
e) Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu: 1) Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum; 2) Dana Alokasi Khusus; untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu sarana/ prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, meningkatkan dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan belanja daerah maka kerangka proyeksi belanja daerah untuk RKPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.2.

BAPPEDA HALUT

Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022-2026

URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TAHUN BERJALAN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6
BELANJA	**1,129,131,160,187.11**	**1,028,482,634,557.46**	**1,244,201,567,287.00**	**1,181,351,461,953.44**	**1,246,506,285,051.11**
BELANJA OPERASI	**714,255,025,196.11**	**689,727,779,760.88**	**816,143,270,688.00**	**770,679,133,757.75**	**808,163,090,445.64**
Belanja Pegawai	323,983,409,049.00	289,377,749,171.86	338,494,587,994.00	371,454,826,499.94	390,027,567,824.94
Belanja Barang dan Jasa	351,938,978,117.11	357,058,816,782.70	407,302,936,512.00	360,869,507,257.81	376,654,585,431.78
Belanja Bunga	4,935,823,755.00	6,129,121,706.32	10,200,000,000.00	0	2,258,397,188.93
Belanja Subsidi	0.00	-	-	1,000,000,000.00	0.00
Belanja Hibah	30,441,207,275.00	37,063,592,100.00	59,023,946,182.00	36,354,000,000	38,171,700,000.00
Belanja Bantuan Sosial	2,955,607,000.00	98,500,000.00	1,121,800,000.00	1,000,800,000.00	1,050,840,000.00
Belanja Bantuan Keuangan	0.00	-			
BELANJA MODAL	**208,910,870,694.00**	**146,506,029,482.58**	**225,294,879,599.00**	**196,397,688,362.69**	**210,307,770,675.58**
Belanja Modal Tanah	273,000,000	-	210,450,000.00	2,000,000,000.00	2,100,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53,766,098,913	55,625,978,000.00	41,389,340,161.00	53,117,793,160.42	60,062,793,160.42
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,074,117,474	22,630,387,226.58	63,410,987,198.00	45,149,788,913	47,407,278,358.65
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	127,797,654,307	65,422,820,256.00	118,113,560,640.00	94,151,857,344.83	98,859,450,212.07

BAPPEDA HALUT

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	2,826,844,000.00	2,170,541,600.00	1,978,248,944.44	1,878,248,944.44
BELANJA TAK TERDUGA	**5,505,608,250.00**	**4,217,582,161.00**	**10,518,000,000.00**	**8,005,608,250.00**	**8,405,888,662.50**
Belanja Tak Terduga	5,505,608,250	4,217,582,161.00	10,518,000,000.00	8,005,608,250	8,405,888,662.50
TRANSFER	**200,459,656,047.00**	**188,031,243,153.00**	**192,245,417,000.00**	**206,269,031,583.00**	**219,629,535,267.39**
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**200,459,656,047.00**	**188,031,243,153.00**	**192,245,417,000.00**	**206,269,031,583.00**	**219,629,535,267.39**
Transfer Bantuan Keuangan umum ke Desa	200,233,322,247.00	37,267,167,953.00	192,245,417,000.00	206,269,031,583	216,582,483,162.15
Transfer Bantuan Keuangan Khusus Lainnya	226,333,800.00	150,764,075,200.00			3,047,052,105.24

BAPPEDA HALUT

3.2.2. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimanaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SILPA). Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah untuk RKPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3.

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022-2026

URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TAHUN BERJALAN 2024	TAHUN 2025	2026
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**122,440,728,438.58**	**25,782,095,261.64**	**55,365,181,937.00**	**3,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**
Penggunaan SiLPA	20,690,728,438.58	25,782,095,261.64	55,365,181,937.00	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00
Pinjaman Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00	
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100,000,000,000.00		0.00	0.00	
penerimaan Pebbiyaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1,750,000,000.00			0.00	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**23,689,655,171.00**	**41,379,310,344.00**	**41,379,310,344.00**	**3,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00		0.00	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	20,689,655,171.00	41,379,310,344.00	41,379,310,344.00	0.00	
PEMBIAYAAN NETTO	**98,751,073,267.58**	**(15,597,215,082.36)**	**13,985,871,593.00**	**0.00**	**0.00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**34,360,197,689.80**	**(20,633,581,604.03)**	**0.00**	**(0.00)**	**(5,087,250,000.00)**

BAB 4
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir efektif pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 mengusung visi "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan". Makna kata yang terkandung dalam Visi tersebut, diuraikan sebagai berikut.

Kesejahteraan Masyarakat: merujuk kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Pembangunan Berkelanjutan: merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Inovasi: merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

BAPPEDA HALUT

Investasi: diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*) atas pemanfaatan dan pendayagunaan potensi wilayah dan sektor-sektor ungulan daerah. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara degan mendorong transformasi peralihan dari masyarakat tradisional (pertanian) menuju ke arah masyarakat modern (industri) dan kreatif. Dalam konteks ini peningkatan investasi produktif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi unggulan daerah menjadi prasyarat utama untuk mempercepat transformasi struktural.

Kebersamaan yang Berkeadilan: melalui pembangunan inklusif yang tidak hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tanpa diiringi pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan. Pembangunan inklusif atas dasar kebersamaan dan berkeadilan bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; dimana seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, mekanisme partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.

Dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;

BAPPEDA HALUT

Secara rinci, pelaksanaan keempat misi pembangunan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran sebagai berikut:

Tujuan-1: Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter, dengan indikator untuk mengukur keberhasilannya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan pertama ini berada di bawah Misi-1, yaitu Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah. Sasaran-sasaran pokok pada tujuan pertama ini terdiri dari:

1) Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat, dengan indikator kinerja: Indeks Kesehatan Daerah; Indeks Pendidikan Daerah; dan
2) Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat, dengan indikator kinerja: Indeks Pembangunan Gender; Indeks Ketahanan Sosial.

Pencapaian sasaran-sasaran pokok tersebut didukung oleh sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah, meliputi: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan; Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan khusus serta pemenuhan hak anak; Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat; Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga; Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan perlindungan sosial; Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat; Meningkatnya apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah.

Kerangka logis perencanaan integratif yang mengkonsolidasikan sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok dalam Tujuan-1, sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.

BAPPEDA HALUT

Tujuan / Ind Kinerja	Sasaran / Ind Kinerja	Sub Sasaran / Ind Kinerja	Lead Urusan
Tujuan 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter (*Indeks Pembangunan Manusia*)	**Sasaran 1:** Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat (*Indeks Kesehatan Daerah; Indeks Pendidikan Daerah*)	**SS-1:** Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan (*Angka Kematian Ibu; Angka Kematian Neonatal; Prevalensi stunting/wasting pada balita; Rasio daya tampung Rumah Sakit; Rasio Puskesmas terakreditasi*)	Kesehatan
		SS-2: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (*Total Fertility Rate*)	Pengendalian Penduduk & KB
		SS-3: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan (*Rata-rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Persentase PAUD/ SD/SMP/ Kesetaraan Terakreditasi*)	Pendidikan
	Sasaran 2: Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat (*Indeks Pembangunan Gender; Indeks Ketahanan Sosial*)	**SS-4:** Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan khusus anak serta pemenuhan hak anak (*Indeks Pemberdayaan Gender; Indeks Kabupaten Layak Anak*)	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		SS-5: Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat (*Angka Melek Huruf*)	Perpustakaan
		SS-6 : Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga (*Indeks Pemuda Produktif; Indeks Prestasi Olahraga*)	Kepemudaan & Olahraga
		SS-7: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan perlindungan sosial (*Indeks Keparahan Kemiskinan*)	Sosial
		SS-8: Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat (*Persentase desa yang bebas potensi kerawanan konflik sosial*)	Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
		SS-9: Meningkatnya apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah (*Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah*)	Kebudayaan

BAPPEDA HALUT

Gambar 4.1 Logframe Perencanaan Integratif Tujuan/Sasaran-1

Tujuan-2: Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan indikator untuk mengukur keberhasilannya: Indeks Perkembangan Wilayah. Tujuan kedua ini berada di bawah Misi-2, yaitu Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup. Sasaran-sasaran pokok pada tujuan kedua ini terdiri dari:

1) Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi, dengan indikator kinerja: Indeks Pembangunan Infrastruktur;
2) Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan indikator kinerja: Indeks Ketahanan Lingkungan.

Pencapaian sasaran-sasaran pokok tersebut didukung oleh sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah, meliputi: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada perumahan dan lingkungan permukiman yang layak; Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber air minum bersih dan sanitasi layak; Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber energi ketenagalistrikan yang ramah lingkungan; Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten; Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah; Meningkatnya pemerataan akses infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh wilayah; Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; Meningkatnya kapasitas infrastruktur penunjang ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Kerangka logis perencanaan integratif yang mengkonsolidasikan sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok dalam Tujuan-2 sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.

BAPPEDA HALUT

Tujuan / Ind Kinerja	Sasaran / Ind Kinerja	Sub Sasaran / Ind Kinerja	Lead Urusan
Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim (*Indeks Perkembangan Wilayah*)	**Sasaran 3:** Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi (*Indeks Pembangunan Infrastruktur*)	**SS-10:** Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada perumahan dan lingkungan permukiman yang layak (*Rasio Rumah Tinggal Layak Huni*)	Perumahan & Kawasan Permukiman
		SS-11: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber air minum bersih dan sanitasi layak (*Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih; Cakupan Rumah Tangga memiliki askes pada sanitasi layak*)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		SS-12: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber energi ketenagalistrikan yang ramah lingkungan (*Persentase rumah tangga menggunakan listrik*)	Energi & Sumber Daya Mineral
		SS-13: Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten (*Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap*)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		SS-14: Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah (*Rasio konektifitas transportasi wilayah*)	Perhubungan
		SS-15: Meningkatnya pemerataan akses infrastruktur TIK di seluruh wilayah (*Rasio ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi*)	Komunikasi & Informatika
		SS-16: Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah (*Rasio penyelesaian materi teknis dan legalisasi RTRW dan RRTR Kabupaten*)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Sasaran 4: Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim (*Indeks Ketahanan Lingkungan*)	**SS-17:** Meningkatnya kapasitas infrastruktur penunjang ketahanan bencana dan perubahan iklim (*Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas; Rasio luasan kawasan rawan bencana terlindungi infrastruktur pengaman pantai dan sungai*)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		SS-18: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim (*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Indeks Risiko Bencana Kabupaten*)	Lingkungan Hidup & Kehutanan Trantibumlinmas (Bencana)

BAPPEDA HALUT

Gambar 4.2 Logframe Perencanaan Integratif Tujuan/Sasaran-2

Tujuan-3: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas, dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya: Laju pertumbuhan ekonomi; Pendapatan per Kapita; dan Indeks Rasio Gini. Tujuan ketiga ini berada di bawah Misi-3, yaitu Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi. Sasaran-sasaran pokok pada tujuan ketiga ini terdiri dari:

1. Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak, dengan indikator kinerja: Pertumbuhan investasi PMTB; Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan; Pertumbuhan PDRB Pariwisata; Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan; Tingkat Pengangguran Terbuka;
2. Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif, dengan indikator kinerja: Indeks Ketahanan Ekonomi; Tingkat Kemiskinan.

Pencapaian sasaran-sasaran pokok tersebut didukung oleh sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah, meliputi: Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian; Meningkatnya produksi serta mutu serta dan saing produk hasil kelautan dan perikanan; Meningkatnya iklim investasi dan usaha di daerah; Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri daerah; Meningkatnya daya saing pariwisata daerah; Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja daerah; Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat; Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan Koperasi dan UMKM; Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat; Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendorong kemandirian ekonomi desa; Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hunian layak usaha bagi transmigran; Meningkatnya efeketifitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu.

Kerangka logis perencanaan integratif yang mengkonsolidasikan sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok dalam Tujuan-3 sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.

BAPPEDA HALUT

Tujuan / Ind Kinerja	Sasaran / Ind Kinerja	Sub Sasaran / Ind Kinerja	Lead Urusan
Tujuan 3: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas (*Laju pertumbuhan ekonomi; Pendapatan per Kapita; dan Indeks Rasio Gini*)	**Sasaran 5:** Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak (*Pertumbuhan investasi PMTB; Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan; Pertumbuhan PDRB Pariwisata; Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan; Tingkat Pengangguran Terbuka*)	**SS-19:** Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian (*Pertumbuhan produksi pertanian/ peternakan; Peningkatan produktifitas pertanian/peternakan*)	Pertanian
		SS-20: Meningkatnya produksi serta mutu dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan (*Produksi perikanan tangkap & budidaya; Konsumsi ikan per kapita*)	Kelautan & Perikanan
		SS-21: Meningkatnya iklim investasi dan usaha di daerah (*Pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional PMA/PMDN*)	Penanaman Modal
		SS-22: Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri daerah (*Kontribusi PDRB Industri Pengolahan*)	Perindustrian
		SS-23: Meningkatnya daya saing pariwisata daerah (*Kontribusi PDRB pariwisata*)	Pariwisata
		SS-24: Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja daerah (*Tingkat Kesempatan Kerja; Produktifitas Tenaga Kerja*)	Tenaga Kerja
	Sasaran 6: Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif (*Indeks Ketahanan Ekonomi; Tingkat Kemiskinan*)	**SS-25:** Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (*Skor Pola Pangan Harapan/PPH*)	Pangan
		SS-26: Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan Koperasi dan UMKM (*Pertumbuhan jumlah Koperasi Sehat; Koperasi; Pertumbuhan jumlah UMKM*)	Koperasi UKM
		SS-27: Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat (*Pertumbuhan PDRB Perdagangan*)	Perdagangan
		SS-28: Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendorong kemandirian ekonomi desa (*Peningkatan rasio IKE Desa terhadap IDM*)	Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		SS-29: Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hunian layak usaha bagi transmigran (*Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan*)	Transmigrasi
		SS-30: Meningkatnya efeketifitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu (*Indeks Kedalaman Kemiskinan*)	Sosial

BAPPEDA HALUT

Gambar 4.3 Logframe Perencanaan Integratif Tujuan/Sasaran-3

Tujuan-4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan, dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya: Indeks Inovasi Daerah. Tujuan keempat ini berada di bawah Misi-4, yaitu Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan. Sasaran pokok pada tujuan keempat ini, yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja: Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun).

Pencapaian sasaran pokok tersebut didukung oleh sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah, yang didominasi fungsi pendukung dan penunjang pemerintahan meliputi: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan manajemen kinerja pemerintah daerah serta tata kelola koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah; Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan dalam rangka pembangunan bagi kepentingan umum; Meningkatnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah; Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik, keterbukaan informasi dan layanan keamanan inforomasi; Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data dan informasi kependudukan; Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah; Meningkatnya keterterapan hasil litbang serta dayaguna statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah serta kebersinambungan pemanfaatan produk inovasi daerah; Meningkatnya kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah; Meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian dan diklat yang memperkuat kompetensi dan profesionalisme aparatur; Meningkatnya kualitas peran kecamatan dalam mengakselerasi perkembangan, kemajuan dan kemandirian desa; dan Meningkatnya efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kerangka logis perencanaan integratif yang mengkonsolidasikan sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok dalam Tujuan-4 sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.

BAPPEDA HALUT

Tujuan / Ind Kinerja	Sasaran / Ind Kinerja	Sub Sasaran / Ind Kinerja	Lead Urusan
Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan (*Indeks Inovasi Daerah*)	**Sasaran 7:** Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan (*Peningkatan Indeks Daerah-basis poin per tahun*)	**SS-30:** Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan manajemen kinerja pemerintah daerah serta tata kelola koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah (*Indeks Kepuasan Masyarakat; Predikat SAKIP; Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda*)	Pendukung (Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD)
		SS-32: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan dalam rangka pembangunan bagi kepentingan umum (*Rasio bidang tanah milik Pemda untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang telah disertifikasi*)	Pertanahan
		SS-33: Meningkatnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah (*Persentase Perangkat daerah mengelola arsip secara baku*)	Kearsipan
		SS-34: Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik, keterbukaan informasi dan layanan keamanan informasi (*Persentasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi; Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi-dari Kominfo*)	Komunikasi & Informatika; Persandian
		SS-35: Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data dan informasi kependudukan (*Rasio efektifitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*)	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
		SS-36: Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (*Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan; Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran yang tertangani*)	Trantibumlinmas (Satpol PP)
		SS-37: Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah *(Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah; Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah*)	Penunjang (Perencanaan)
		SS-38: Meningkatnya keterterapan hasil litbang serta dayaguna statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah serta kebersinambungan pemanfaatan produk inovasi daerah (*Rasio jumlah produk inovasi daerah yang dimanfaatkan secara berkelanjutan; Persentase Perangkat Daerah menggunakan yang data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah*)	Penunjang (Penelitian & Pengembangan) Statistik
		SS-39: Meningkatnya kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah (*Rasio kemandirian keuangan daerah; Predikat LKPD-Opini BPK*)	Penunjang (Keuangan)
		SS-40: Meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian dan diklat yang memperkuat kompetensi dan profesionalisme aparatur (*Rasio pelanggaran disiplin pegawai ASN; Rasio pegawai fungsional-bukan guru dan tenaga kesehata yang memiliki sertifikat kompetensi*)	Penunjang (Kepegawaian & Diklat)
		SS-41: Meningkatnya kualitas peran kecamatan dalam mengakselerasi perkembangan, kemajuan dan kemandirian desa (*Rerata IDM Tingkat Kecamatan*)	Kewilayahan (Kecamatan)
		SS-42: Meningkatnya efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi (*Level Maturitas SPIP-QA BPKP*)	Pengawasan (Inspektorat)

BAPPEDA HALUT

Gambar 4.4 Logframe Perencanaan Integratif Tujuan/Sasaran-4

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan tahapan pertama RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang merupakan Tahap Perkuatan Fondasi Transformasi. Adapun Transformasi Indonesia dan Landasan transformasi untuk tahap pertama RPJPN diuraikan sebagai berikut.

Indonesia Emas 2045 merupakan tujuan kolektif bagi masyarakat Indonesia. Indonesia melalui visi "Indonesia Emas 2045" bercita-cita menjadi negara dengan pandapatan per kapita yang setara dengan negara maju, sehingga dapat keluar dari Middle Income Trap (MIT). Untuk itu Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui 3 (tiga) area perubahan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola. Visi Indonesia Emas 2045, oleh RPJPN 2025-2045 di terjemahkan dalam Visi: Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi ini dicerminkan dalam 5 (lima) sasaran yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan jangka panjang, yaitu:
(i) Pendapatan per kapita setara negara maju; (ii) Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang; (iii) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (iv) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan (v) Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission.

Dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 tersebut, RPJPN 2025-2045 menetapkan 8 (delapan) Misi atau agenda pembangunan yang dijabarkan dalam 17 Arah Pembangunan. Langkah reformasi tidak akan cukup untuk pendekatan pembangunan Indonesia, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi yang menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Tiga fokus utama transformasi ini meliputi "Transformasi Sosial", "Transformasi Ekonomi", dan "Transformasi Tata Kelola". Ketiga transformasi ini dapat berjalan dengan baik dengan ditunjang oleh landasan stabilitas nasional yang kuat, yang meliputi "Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia". Selain itu, landasan transformasi "Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologi" juga diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan ke depan. Transformasi dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 diterjemahkan ke dalam pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, yang didukung penuh oleh pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kaidah pelaksanaan untuk kesinambungan pembangunan.

BAPPEDA HALUT

Secara ringkas, prioritas pembangunan nasional tercermin dari 17 tujuan (arah) pembangunan nasional, sebagai berikut:

1. Kesehatan untuk Semua
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
4. Transformasi Ekonomi
5. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
6. Penerapan Ekonomi Hijau
7. Transformasi Digital
8. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
9. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
10. Transformasi Tata Kelola
11. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
12. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
13. Stabilitas Ekonomi Makro
14. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
15. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
16. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
17. Lingkungan Hidup Berkualitas

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan",** diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Sasaran pembangunan nasional tahun 2025, yaitu: Rasio PDB Industri Pengolahan 20,8 persen; Proporsi PDB Ekonomi Kreatif 7,9 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,0 persen; Tingkat Inflasi 2,5 ± 1,0 persen; Indeks Ketimpangan Gender 0,458 poin; Persentase Penurunan Emisi GRK: a) Kumulatif 28,12 persen; b) Tahunan 32,65 persen; serta Tingkat kemiskinan 6,0-7,0 persen.

BAPPEDA HALUT

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara

Agenda prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2025 disusun selaras dengan upaya untuk mewujudkan tujuan (arah) pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2026, yang meliputi: Penyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif; Penyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan; Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi; Terwujudnya Keamanan Daerah yang Tangguh, demokratis, dan Stabilitas Ekonomi; Tewujudnya Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Sasaran-sasaran pembangunan diuraikan sebagai berikut.

Tujuan 1: Penyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif, dengan sasaran: Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat; meningkatnya pendidikan yang inklusif dan adaptif, berkualitas dan relevan; Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif; Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak; serta Meningkatkan tingkat pengeluaran masyarakat.

Tujuan 2: Penyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan, dengan sasaran: Berkembangnya industri pengolahan yang mencakup hilirisasi industri prioritas hingga produk akhir yang berbasis sumberdaya alam tambang, critical minerals, serta sumberdaya alam agro dan maritim (laut) serta menguatnya industri dasar prioritas; Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani; Menjadikan Maluku Utara sebagai destinasi unggulan yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi; Menguatnya ekosistem ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan mengangkat nilai-nilai unggul budaya, seni dan kearifan masyarakat, serta kreativitas talenta Maluku Utara ke Nasional bahkan global; Berkembangnya UMKM dan Koperasi menjadi penopang ekonomi produktivitas tinggi, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan, serta BUMD sebagai value creator maupun agent of development; Terbentuknya tenaga kerja (baik laki maupun perempuan) yang berkeahlian tangguh, adaptif, inovatif, kompeten dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global; Meningkatnya efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju energi baru terbarukan, serta penerapan prinsip

BAPPEDA HALUT

ekonomi hijau (terwujudnya investasi hijau) di berbagai sektor; Terbangunnya sinergi prasyarat pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat dan berkelanjutan; Terbangunnya integrasi ekonomi domestik Maluku Utara dan konektivitas naional maupun global; serta Menguatnya konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan.

Tujuan 3: Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi, dengan sasaran: Terciptanya lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Tujuan 4: Terwujudnya Keamanan Daerah yang Tangguh, demokratis, dan Stabilitas Ekonomi, dengan sasaran: Terciptanya Lingkungan masyarakat yang kondusif dan demokratis; serta Terciptanya stabilitas ekonomi makro.

Tujuan 5: Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk Pembangunan Berkelanjutan, dengan sasaran: meningkatnya peran agama sebagai landasan spritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan; serta

memajukan dan melestarikannya kebudayaan untuk menguatkan karakter, jati diri bangsa, meningkatknya kesejahteraan maupun memantapkan peran dan posisi Maluku Utara dan Indonesia dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia; Meningkatnya ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumberdaya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan; dan Menguatnya pengarusutamaan gender (PUG) dan iklusi sosial; Meningkatnya kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati daerah secara berkelanjutan; Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; Meningkatnya diversifikasi dan konservasi energi; Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya air; Terbangunnya transformasi sistem pangan menuju eco-region sistem pangan berkelanjutan, sehat dan tangguh berbasis sumberdaya dan kearifan lokal; Terlaksananya pembangunan rendah karbon, berketahanan iklim serta penanggulangan bencana.

Adapun Tema RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 adalah **"Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Penyiapan Pondasi Transformasi".** Sasaran-sasaran pokok makro yang ingin dicapai pada tahun 2025, yaitu: a) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,12 poin; b) Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 17,2-17,25 persen; c) Pendapatan per Kapita sebesar Rp. 89,52- 89,71 juta; d) Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,1-3,8 persen; dan e) Tingkat kemiskinan sebesar 2,43-2,93 persen.

BAPPEDA HALUT

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara

Tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 merupakan acuan dalam penetapan prioritas daerah dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya, disamping memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi Maluku Utara dalam RKP/RKPD Provinsi Maluku Utara tahun berkenaan. Prioritas daerah Kabupaten Halmahera Utara yaitu:

1) Peningkatan kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat;
2) Peningkatan kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat;
3) Peningkatan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi;
4) Peningkatan kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim;
5) Peningkatan transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak;
6) Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif; dan
7) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan.

Prioritas Daerah merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas daerah akan menjadi pemandu program-program unggulan Perangkat Daerah yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas daerah merupakan operasionalisasi dari tujuan strategis daerah dengan mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Sebagai bentuk pendukungan daerah Kabupaten Halmahera Utara terhadap prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2025 dan Provinsi Maluku Utara dalam RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2025, RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 mengusung tema **"Memperkuat Transformasi Struktural untuk Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan"**.

BAPPEDA HALUT

Sasaran-sasaran pokok makro yang ingin dicapai pada tahun 2025, yaitu: a) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,88 poin; b) Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,21 persen; c) Pendapatan per Kapita sebesar Rp. 19,85 juta; d) Indeks Rasio Gini sebesar 0,260; e) Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,39 persen; dan f) Tingkat kemiskinan sebesar 4,41 persen. Adapun arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang sesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut.

PD-1 Peningkatan kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat

1) Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, dengan program:
   a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
   d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2) Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, dengan program:
   a) Program Pengendalian Penduduk
   b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KA)
3) Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan, dengan program:
   a) Program Pengelolaan Pendidikan
   b) Program Pengembangan Kurikulum
   c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   d) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
   e) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

PD-2 Peningkatan kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat

1) Meningkatkan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan khusus serta pemenuhan hak anak, dengan program:
   a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   b) Program Perlindungan Perempuan

BAPPEDA HALUT

c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
f) Program Perlindungan Khusus Anak

2) Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, dengan program:
a) Program Pembinaan Perpustakaan
b) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

3) Meningkatkan peran dan produktifitas pemuda, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga
a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

4) Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan perlindungan sosial
a) Program Pemberdayaan Sosial
b) Program Rehabilitasi Sosial
c) Program Penanganan Bencana

5) Meningkatkan kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat
a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

6) Meningkatkan apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah
a) Program Pengembangan Kebudayaan
b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
c) Program Pembinaan Sejarah
d) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
e) Program Pengelolaan Permuseuman

BAPPEDA HALUT

PD-3 Peningkatan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi

1) Meningkatkan pemerataan akses penduduk pada perumahan dan lingkungan permukiman yang layak
   a) Program Pengembangan Perumahan
   b) Program Kawasan Permukiman
   c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
   d) Program Pengelolaan Persampahan Regional
   e) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
   f) Program Pengembangan Permukiman
   g) Program Penataan Bangunan Gedung
   h) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2) Meningkatkan pemerataan akses penduduk pada sumber air minum bersih dan sanitasi layak
   a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3) Meningkatkan pemerataan akses penduduk pada sumber energi ketenagalistrikan yang ramah lingkungan
   a) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten
   a) Program Penyelenggaraan Jalan
5) Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah
   a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
   b) Program Pengelolaan Pelayaran
6) Meningkatkan pemerataan akses infrastruktur TIK di seluruh wilayah
   a) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

PD-4 Peningkatan kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim

1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
   a) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   b) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
2) Meningkatkan kapasitas infrastruktur penunjang ketahanan bencana dan perubahan iklim

BAPPEDA HALUT

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

3) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim
   a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   b) Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
   d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
   e) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
   f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
   g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
   h) Program Pengelolaan Persampahan
   i) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
   j) Program Penanggulangan Bencana

PD-5 Peningkatan transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak

1) Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian
   a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   e) Program Perizinan Usaha Pertanian
   f) Program Penyuluhan Pertanian
2) Meningkatkan produksi serta mutu dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan
   a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
   d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

BAPPEDA HALUT

3) Meningkatkan iklim investasi dan usaha di daerah
   a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   b) Program Promosi Penanaman Modal
   c) Program Pelayanan Penanaman Modal
   d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
4) Meningkatkan kemandirian dan daya saing industri daerah
   a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
   b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
   c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
5) Meningkatkan daya saing pariwisata daerah
   a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   b) Program Pemasaran Pariwisata
   c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6) Meningkatkan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja daerah
   a) Program Perencanaan Tenaga Kerja
   b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   c) Program Penempatan Tenaga Kerja
   d) Program Hubungan Industrial

PD-6 Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif

1) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
   a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
   b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   c) Program Penanganan Kerawanan Pangan
   d) Program Pengawasan Keamanan Pangan
2) Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan Koperasi dan UMKM
   a) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
   b) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
   c) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
   d) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
   e) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

BAPPEDA HALUT

f) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
g) Program Pengembangan UMKM

3) Meningkatkan peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat
a) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
b) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
c) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
d) Program Pengembangan Ekspor
e) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
f) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

4) Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendorong kemandirian ekonomi desa
a) Program Penataan Desa
b) Program Peningkatan Kerjasama Desa
c) Program Administrasi Pemerintahan Desa
d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

5) Meningkatkan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hunian layak usaha bagi transmigran
a) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
b) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
c) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

6) Meningkatkan efektifitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu
a) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

PD-7 Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan.

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen kinerja pemerintah daerah serta tata kelola koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah
a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

BAPPEDA HALUT

c) Program Perekonomian dan Pembangunan
d) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertanahan dalam rangka pembangunan bagi kepentingan umum
   a) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
   b) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
3) Meningkatkan tata kelola kearsipan pemerintah daerah
   a) Program Pengelolaan Arsip
4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik, keterbukaan informasi dan layanan keamanan inforomasi
   a) Program Informasi dan Komunikasi Publik
   b) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5) Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data dan informasi kependudukan
   a) Program Pendaftaran Penduduk
   b) Program Pencatatan Sipil
   c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6) Meningkatkan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
   a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   b) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
7) Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah
   a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
8) Meningkatkan keterterapan hasil litbang serta dayaguna statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah serta kebersinambungan pemanfaatan produk inovasi daerah
   a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
   b) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

BAPPEDA HALUT

9) Meningkatkan kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah
   a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   c) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
10) Meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian dan diklat yang memperkuat kompetensi dan profesionalisme aparatur
   a) Program Kepegawaian Daerah
   b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
11) Meningkatkan kualitas peran kecamatan dalam mengakselerasi perkembangan, kemajuan dan kemandirian desa
   a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
12) Meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi
   a) Program Penyelenggaraan Pengawasan
   b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Dalam pelaksanaannya, seluruh program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai kesatuan rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berbasis nomenklatur, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, melalui sistem informasi perencanaan daerah (SIPD).

BAPPEDA HALUT

BAB 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAPPEDA HALUT

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 merupakan dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026. Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 untuk RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025. Musrenbang merupakan salah satu media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan para pemangku kepentingan yang terdiri dari akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Halmahera Utara. Rencana program dan kegiatan pembangunan yang disajikan dalam RKPD tahun 2025 juga memperhatikan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Kabupaten Halmahera Utara, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026, memperhatikan keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 serta keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di daerah.

5.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari Tanggungjawab Sosial Perusahaan, serta sumber pendanaan lainnya. Kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Pagu per prioritas pembangunan dijabarkan dedalam Rencana Kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah

sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1. Pagu Indikatif RKPD Tahun 2025 Perangkat Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PAGU INDIKATIF (SIPD MUSRENBANG)
1	*2*	*3*
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR**	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	250,121,906,263
2	Dinas Kesehatan	83,234,987,003
	Puskesmas	25,959,316,073
3	RSUD	**62,581,792,082**
	BLUD	70,000,000,000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115,957,812,813
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	23,717,495,086
6	Satuan Polisi Pamong Praja	10,584,860,360
7	Dinas Sosial	4,174,774,814
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,381,538,487
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR**	
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,453,015,526
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB	4,962,283,044
11	Dinas Ketahanan Pangan	4,348,621,197
12	Dinas Lingkungan Hidup	25,118,345,728
13	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	5,286,783,124
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10,388,890,230
15	Dinas Perhubungan	9,589,464,092
16	Dinas Komunikasi,Informatika dan Persandian	4,381,177,887
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	2,682,181,830

BAPPEDA HALUT

18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5,027,855,566
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4,130,241,625
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4,825,926,731
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	
21	Dinas Kelautan & Perikanan	7,254,231,844
22	Dinas Pariwisata	5,487,352,689
23	Dinas Pertanian	21,671,897,710
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3,823,852,077
D	**URUSAN PENDUKUNG**	
25	Sekretariat Daerah	45,343,725,613
26	Sekretariat DPRD	42,571,158,702
E	**URUSAN PENUNJANG**	
27	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	14,864,623,882
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	25,143,716,975
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD)	215,000,000,000
30	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	11,279,723,822
31	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik	3,452,981,369
F	**URUSAN PENGAWAS**	
32	Inspektorat	9,515,705,328
G	**URUSAN KEWILAYAHAN**	
33	Kecamatan Galela	1,833,928,663
34	Kecamatan Galela Barat	1,456,832,705
35	Kecamatan Galela Utara	1,383,241,218
36	Kecamatan Galela Selatan	2,279,065,201
37	Kecamatan Tobelo	1,882,346,771
38	Kecamatan Tobelo Selatan	2,205,018,093
39	Kecamatan Tobelo Utara	2,015,780,577
40	Kecamatan Tobelo Tengah	2,210,218,246
41	Kecamatan Tobelo Timur	1,895,838,016
42	Kecamatan Tobelo Barat	935,138,271
43	Kecamatan Kao	1,813,784,141
44	Kecamatan Kao Utara	1,693,095,507
45	Kecamatan Kao Barat	1,875,753,968
46	Kecamatan Kao Teluk	1,800,266,877
47	Kecamatan Malifut	2,511,535,170
48	Kecamatan Loloda Utara	1,839,612,435
49	Kecamatan Loloda Kepulauan	1,613,424,623
H	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	

BAPPEDA HALUT

50	Badan Kesatuan bangsa dan Politik	8,788,341,901
JUMLAH		**1,181,351,461,953.44**

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif berdasarkan Perangkat Daerah penanggungjawab akan disajikan secara terperinci dalam matrix tersendiri pada Buku II dalam dalam Tabel program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021 Tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BAPPEDA dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAPPEDA HALUT

BAB 6
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAPPEDA HALUT

6.1. HIRARKI INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026. Dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik sebagaimana PermenPAN No. 09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, indikator kinerja diformulasikan secara hirarkis sehingga membentuk pohon kinerja, sebagai berikut:

a) Indikator kinerja makro, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan pembangunan sesuai Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b) Indikator kinerja utama, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang dimanifestasikan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang disajikan sebagaimana ketentuan Permendagri No. 86 tahun 2017;
c) Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing, yang disajikan sebagaimana ketentuan Permendagri No. 86 tahun 2017; dengan ketentuan seluruh indikator pada aspek pelayanan umum akan menjadi bagian dari indikator kinerja kunci (IKK) Perangkat Daerah dibawah tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;

6.2. PENETAPAN TARGET KINERJA

Target capaian indikator kinerja yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 disajikan pada Tabel 6.1 (Indikator Kinerja Makro); Tabel 6.2 (Indikator Kinerja Utama) dan Tabel 6.3 (Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Makro RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,50	70,88	71,56
2	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	-0,15	5,21*	9,43
3	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta/Tahun)	19,04	19,85*	23,77
4	Indeks Rasio Gini	0,280	0,260	0,257
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,49	5,39*	2,74
6	Tingkat kemiskinan (persen)	4,45	4,41*	3,57

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,50	70,88	71,56
2	Indeks Kesehatan Daerah	78,17	78,86	78,99
3	Indeks Pendidikan Daerah	70,26	75,30	76,33
4	Indeks Pembangunan Gender	89,44	89,93	90,02
5	Indeks Ketahanan Sosial	65,32	72,45	75,50
6	Indeks Perkembangan Wilayah	58,98	66,92	70,44
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,52	76,52	80,66
8	Indeks Ketahanan Lingkungan	68,98	73,76	75,75
9	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	-0,15	5,21*	9,43

BAPPEDA HALUT

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
10	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta/Tahun)	19,04	19,85*	23,77
11	Indeks Rasio Gini	0,280	0,260	0,257
12	Pertumbuhan investasi PMTB (persen)	4,62	9,80	11,30
13	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	2,53	6,57	7,28
14	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)	-4,12	10,29	14,19
15	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (persen)	-9,59	12,58	12,58
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,49	5,39*	2,74
17	Indeks Ketahanan Ekonomi	42,64	54,54	60,07
18	Tingkat Kemiskinan (persen)	4,45	4,41*	3,57
19	Indeks Inovasi Daerah	6,56	71,92	90,90

Tabel 6.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	-0,15	5,21*	9,43
2	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	19,04	19,85*	23,77
3	Indeks Rasio Gini	0,280	0,260	0,257
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,49	5,39*	2,74
5	Tingkat Kemiskinan (persen)	4,45	4,41*	3,57
6	Indeks Pembangunan Manusia	67,50	70,88	71,56
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
B.1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**			
1	**Pendidikan**			
1.1	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,51	8,84	8,92
1.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,60	14,96	15,22
1.3	Persentase PAUD Terakreditasi	34,40	43,36	45,31

BAPPEDA HALUT

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
1.4	Persentase SD Terakreditasi	94,30	100	100
1.5	Persentase SMP Terakreditasi	90,80	100	100
1.6	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	51,61	83,87	90,32
2	**Kesehatan**			
2.1	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	111	94	90
2.2	Angka Kematian Neonatal (per 1000 KH)	6	6	6
2.3	Prevalensi stunting pada balita (persen)	20,14	15,02	14,00
2.4	Prevalensi wasting pada balita (persen)	8,93	5,66	5,00
2.5	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk)	1,05	1,18	1,21
2.6	Rasio Puskesmas terakreditasi terhadap jumlah penduduk (per 16ribu penduduk)	1,13	1,33	1,37
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	31,80	47,63	55,97
3.2	Rasio luasan kawasan rawan bencana terlindungi infrastruktur pengaman pantai dan sungai (persen)	18,69	30,10	33,11
3.3	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen)	76,61	86,52	88,00
3.4	Cakupan Rumah Tangga memiliki askes pada sanitasi layak (persen)	59,72	70,71	75,59
3.5	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen)	75,60	76,74	77,20
3.6	Rasio penyelesaian materi teknis dan legalisasi RTRW dan RRTR Kabupaten (persen)	25,0	100	100
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**			
4.1	Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)	81,68	84,79	86,06
5	**Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat**			
5.1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100	100	100

BAPPEDA HALUT

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
5.2	Indeks Risiko Bencana Kabupaten	162,7	135,4	125,6
5.3	Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	100	100	100
6	**Sosial**			
6.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,38	0,30	0,27
6.2	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,09	0,06	0,05
B.2	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**			
1	**Tenaga Kerja**			
1.1	Tingkat Kesempatan Kerja (persen)	93,51	96,75	97,26
1.2	Produktifitas tenaga kerja (Rp. Juta)	46,77	50,38	51,89
2	**Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak**			
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,53	72,72	75,34
2.2	Indeks Kabupaten Layak Anak	41,67	70,83	83,33
3	**Pangan**			
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,44	86,36	87,13
4	**Pertanahan**			
4.1	Rasio bidang tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang telah disertifikasi (persen)	-	13,7	27,3
5	**Lingkungan Hidup & Kehutanan**			
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,20	80,30	82,60
6	**Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil**			
6.1	Rasio efektifitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	60,69	79,76	92,73
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
7.1	Peningkatan rasio Indeks Ketahanan Ekonomi Desa terhadap Indeks Desa Membangun	72,30	95,38	100
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	1,63	2,30	2,25
9	**Perhubungan**			
9.1	Rasio konektifitas transportasi wilayah (persen)	56,1	73,5	76,2

BAPPEDA HALUT

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
10	**Komunikasi dan Informatika**			
10.1	Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi (persen)	82,1	94,1	99,3
10.2	Persentasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75,0	100	100
10.3	Indeks Sistem Pemenerintan Berbasis Elektronik (SPBE)**	-	3,15	3,5
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**			
11.1	Pertumbuhan jumlah Koperasi Sehat (persen)	-50,00	10,26	10,24
11.2	Pertumbuhan jumlah UMKM (persen)	-25,77	8,92	10,26
12	**Penanaman Modal**			
12.1	Pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional PMA/PMDN (persen)	195,8	24,5	29,4
13	**Kepemudaan dan Olahraga**			
13.1	Indeks Pemuda Produktif	81,5	90,3	92,6
13.2	Indeks Prestasi Olahraga (Tahun Dasar: 2017)	41,1	78,2	100
14	**Statistik**			
14.1	Persentasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	50,0	89,6	100
15	**Persandian**			
15.1	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi (dari Kominfo)	2,1	33,3	66,7
16	**Kebudayaan**			
16.1	Indeks Pemajuan Kebudayaan (Tahun Dasar 2018)	96,6	127,6	137,9
17	**Perpustakaan**			
17.1	Angka Melek Huruf (persen)	99,16	99,68	99,89
18	**Kearsipan**			
18.1	Persentase Perangkat daerah mengelola arsip secara baku	41,7	89,6	100
B.3	**Urusan Pilihan**			
1	**Kelautan dan Perikanan**			
1.1	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)	23.364	31.354	33.078

BAPPEDA HALUT

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
1.2	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	52,40	60,44	62,05
2	**Pariwisata**			
2.1	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,28	1,70	2,10
3	**Pertanian**			
3.1	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (persen)	-61,69	46,75	56,1
3.2	Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura (persen)	-51,20	42,5	46,8
3.3	Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan (persen)	-0,36	18,00	21,6
3.4	Pertumbuhan Produksi Peternakan (persen)	8,19	18,15	21,8
3.5	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	n/a	2,00	2,00
3.6	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	n/a	1,20	1,20
3.7	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	n/a	3,28	3,28
3.8	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	n/a	4,10	5,20
5	**Energi dan Sumber Daya Mineral**			
5.1	Persentasi rumah tangga menggunakan listrik	97,96	98,84	99,20
6	**Perdagangan**			
6.1	Pertumbuhan PDRB Perdagangan	-2,13	11,82	12,18
7	**Perindustrian**			
7.1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)	2,95	4,85	4,99
8	**Transmigrasi**			
8.1	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan	100	100	100
B.4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**			
1	**Sekretariat Daerah**			
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,25	84,33	86,89
1.2	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	A	A

BAPPEDA HALUT

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
2	**Sekretariat DPRD**			
2.1	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	23,1	100	100
B.5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**			
1	**Perencanaan**			
1.1	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah (persen)	71,40	95,0	95,0
1.2	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	72,86	90,0	90,0
2	**Keuangan**			
2.1	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	10,55	12,91	12,99
2.2	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP
3	**Kepegawaian**			
3.1	Rasio pelanggaran disiplin pegawai ASN (per 1000 pegawai ASN)	1,73	1,54	1,50
4	**Pendidikan dan Pelatihan**			
4.1	Rasio pegawai fungsional bukan guru dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi (persen)	7,57	13,70	15,14
5	**Penelitian dan Pengembangan**			
5.1	Rasio jumlah produk inovasi daerah yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (persen)	90,5	100	100
B.6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**			
1	**Pengawasan**			
1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP)	3	3	4
B.7	**Unsur Kewilayahan**			
1	**Kecamatan**			
1.1	Rerata Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,5943	0,6861	0,7044
B.8	**Unsur Pemerintahan Umum**			
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**			
1.1	Persentase desa yang bebas potensi kerawanan konflik sosial (Podes 2018, BPS)	75,5	82,1	86,2

BAPPEDA HALUT

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
C	**ASPEK DAYA SAING**			
1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	48,89	50,75	51,13
2	Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah (Km/Km2)	0,20	0,22	0,22
3	Persentase penduduk menggunakan telepon seluler	49,62	57,61	61,15
4	Persentase penduduk mengakses internet	29,88	32,20	33,18
5	Rasio penduduk berkualifikasi pendidikan minimal S1 (persen)	8,19	14,16	15,79
6	Rasio ketergantungan (persen)	51,53	49,00	48,51

*) Penyesuaian target sesuai hasil proyeksi terkini.
**)Indikator tambahan menyesuaikan indikator RKP 2025

BAPPEDA HALUT

BAB 7
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain, baik perencanaan tingkat Nasional, Provinsi Maluku Utara maupun tingkat Perangkat Daerah (PD). Oleh karena itu, dalam penyusunannya telah diselaraskan dengan dokumen yang ada pada tingkatan tersebut. Penyusunan RKPD juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD dalam menjawab tantangan dan permasalahan daerah tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa wajib menerapkan prinsip- prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing- masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Halmahera Utara,

FRANS MANERY

BAPPEDA HALUT

BAPPEDA HALUT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
2024

PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2025

BUKU II

BAPPEDA HALUT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2025

BAPPEDA HALUT

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2024

DAFTAR TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Nomor	Perangkat Daerah	Halaman
	A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1-1
2	Dinas Kesehatan	1-12
3	RSUD	1-24
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1-30
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1-44
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	1-51
7	Dinas Sosial	1-60
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1-66
	B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT BUKAN PELAYANAN DASAR	
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2-1
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan KB	2-7
11	Dinas Ketahanan Pangan	2-18
12	Dinas Lingkungan Hidup	2-25
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-33
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2-37
15	Dinas Perhubungan	2-41
16	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	2-50

BAPPEDA HALUT

17 Dinas Koperasi dan UKM 2-56
18 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2-61
19 Dinas Pemuda dan Olahraga 2-69
20 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2-73

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

21 Dinas Kelautan dan Perikanan 3-1
22 Dinas Pariwisata 3-8
23 Dinas Pertanian 3-13
24 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3-20

D. URUSAN PENDUKUNG

25 Sekretariat Daerah 4-1
26 Sekretariat DPRD 4-10

E. URUSAN PENUNJANG

27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5-1
28 Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)..... 5-9
29 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur 5-19
30 Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik 5-23

F. URUSAN PENGAWAS

31 Inspektorat 6-1

BAPPEDA HALUT

G. URUSAN KEWILAYAHAN

32 Kantor Camat Galela 7-1

33 Kantor Camat Galela Barat 7-8

34 Kantor Camat Galela Utara 7-13

35 Kantor Camat Gelale Selatan 7-18

36 Kantor Camat Tobelo 7-23

37 Kantor Camat Tobelo Selatan 7-29

38 Kantor Camat Tobelo Utara 7-35

39 Kantor Camat Tobelo Tengah 7-42

40 Kantor Camat Tobelo Timur 7-46

41 Kantor Camat Tobelo Barat 7-52

42 Kantor Camat Kao 7-57

43 Kantor Camat Kao Utara 7-62

44 Kantor Camat Kao Barat..... 7-67

45 Kantor Camat Kao Teluk 7-73

46 Kantor Camat Malifut 7-79

47 Kantor Camat Loloda Utara 7-83

48 Kantor Camat Loloda Kepulauann..... 7-89

49 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7-95

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**249.471.906.263,00**				**294.574.174.500,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**249.471.906.263,00**				**294.574.174.500,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat pencapaian kinerja perangkat derah**		**90 %**	**178.293.962.345,33**			**90 %**	**206.574.918.500,00**
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**		**90 %**	**538.000.000**			**90 %**	**785.540.000**
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dok	500.000.000	DAU		3 Dok	585.000.000
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	5.000.000	DAU		1 Dok	31.740.000
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Lap	28.000.000	DAU		4 Lap	168.800.000
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Lap	5.000.000	DAU		1 Lap	55.545.000
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**		**81 %**	**172.786.319.845**			**81 %**	**200.000.000.000**
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		28336 Org/Bln	172.786.319.845	DAU/DAK NON FISIK		28336 Org/Bln	200.000.000.000
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**81 %**	**400.000.000**			**81 %**	**400.000.000**
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dok	100.000.000	DAU		1 Dok	100.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		200 Orang	200.000.000	DAU		200 Orang	200.000.000
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 Orang	100.000.000	DAU		10 Orang	100.000.000
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja administrasi umum perangkat daerah**		**81 %**	**577.938.500**			**81 %**	**577.938.500**
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	267.938.500	DAU		1 Paket	267.938.500
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	DAU		1 Paket	10.000.000
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	50.000.000	DAU		1 Paket	50.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	20.000.000	DAU		1 Paket	20.000.000
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		1 Dok	10.000.000	DAU		1 Dok	10.000.000,00
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Lap	20.000.000	DAU		1 Lap	20.000.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Lap	200.000.000	DAU		1 Lap	200.000.000
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Peningkatan Jumlah BMD**		**81 %**	**3.573.264.000**			**81 %**	**4.393.000.000**
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		256 Unit	208.725.000	DAU		256 Unit	143.000.000
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DIKBUD	1 Unit	2.565.000.000	DAU		2 Unit	2.700.000.000
1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DIKBUD	3 Unit	799.539.000	DAU		3 Unit	1.550.000.000
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**81 %**	**318.440.000**			**81 %**	**318.440.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Lap	100.000.000	DAU		1 Lap	100.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Lap	85.000.000	DAU		1 Lap	85.000.000
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Lap	133.440.000	DAU		1 Lap	133.440.000
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik**		**81 %**	**100.000.000**			**81 %**	**100.000.000**
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	100.000.000	DAU		1 Unit	100.000.000
1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini**		**79,64 %**	**71.077.943.918**			**79,64 %**	**87.499.256.000**
		Tingkat Partisipasi Warga Usia 7- 12 Tahun dalam Sekolah Dasar		**72,80 %**				**72,80 %**	
		Tingkat Partisipasi Warga Usia 13- 15 Tahun dalam Sekolah Menengah Pertama		**54,40 %**				**54,40 %**	
		Tingkat Partisipasi Warga Usia 7- 18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan		**2,04 %**				**2,04 %**	
		Persentase Paud Terakreditasi Minimal B		**40,32 %**				**40,32 %**	
		Persentase SD Terakreditasi Minimal B		**98,56 %**				**98,56 %**	
		Persentase SMP Terakreditasi Minimal B		**90,14 %**				**90,14 %**	
		Persentase Kesetaraan Terakreditasi Minimal B		**59,38 %**				**59,38 %**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ Mi**		**88,20 %**	**31.098.231.500**			**88,20 %**	**44.833.630.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		400 Orang	500.000.000	DAU PERUNTUKAN		400 Orang	500.000.000
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		211 Satpen	250.000.000	DAU PERUNTUKAN		211 Satpen	250.000.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		211 Satpen	15.802.431.500	DAK NON FISIK		211 Satpen	23.325.910.000
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		100 Orang	250.000.000	DAU PERUNTUKAN		100 Orang	250.000.000
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		1 Konten Digital	250.000.000	DAU PERUNTUKAN		200 Konten Digital	250.000.000
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1 Dok	300.000.000	DAU PERUNTUKAN		1 Dok	300.000.000
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		2 Keg	250.000.000	DAU PERUNTUKAN		2 Keg	250.000.000
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	SD Inpres 3 Wosia SD Rajawali	7 Ruang	1.842.560.000	DAU PERUNTUKAN		9 Ruang	2.744.560.000
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		200 Orang	500.000.000	DAU PERUNTUKAN		200 Orang	500.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	SD Muhammadiyah 1 Igobula SD Muhammadiyah 3 Togawa SD GMIH 4 Tobelo SD GMIH Dowonggila SD GMIH Tobe SD KGBI Leleoto SD Inpres Akesahu SD Inpres Tape Jere SD Inpres Jikolamo	39 Ruang	10.653.240.000	DAK FISIK/DAU PERUNTUKAN		57 Ruang	16.463.160.000
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	17 Kecamatan	22 Paket	500.000.000	DAU PERUNTUKAN		11 Paket	1.902.240.000
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP**		**73,30 %**	**25.705.947.696**			**73,30 %**	**31.662.380.000**
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	SMP Negeri 1 Halut	1 Ruang	772.800.000	DAK FISIK		1 Ruang	772.800.000
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	SMP Negeri 4 Halut SMP Negeri 16 Halut SMP Negeri 6 Halut	12 Ruang	5.744.160.000	DAK FISIK/DAU PERUNTUKAN		26 Ruang	8.968.080.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	SMP Negeri 1 Halut SMP Negeri 6 Halut	2 Ruang	1.768.800.000	DAK FISIK		2 Ruang	1.768.800.000
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		300 Orang	500.000.000	DAU PERUNTUKAN		300 Orang	500.000.000
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		70 Satpen	350.000.000	DAU PERUNTUKAN		200 Satpen	350.000.000
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		72 Satpen	11.309.667.696	DAK NON FISIK		72 Satpen	14.230.700.000
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		100 Orang	250.000.000	DAU PERUNTUKAN		100 Orang	250.000.000
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1 Dok	300.000.000	DAU PERUNTUKAN		1 Dok	300.000.000
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		2 Keg	250.000.000	DAU PERUNTUKAN		2 Keg	300.000.000
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		9312 Orang	150.000.000	DAU PERUNTUKAN		9312 Orang	250.000.000
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	SMP Negeri Satap Cera SMP Kristen Roriwo SMP Laboratorium Uniera	8 Ruang	3.310.520.000	DAK FISIK/DAU PERUNTUKAN		8 Ruang	3.472.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		300 Orang	500.000.000	DAU PERUNTUKAN		300 Orang	500.000.000
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		22 Paket	500.000.000	DAU PERUNTUKAN		11 Paket	1.902.240.000
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**		**42,00 %**	**10.615.969.079**			**42,00 %**	**10.903.246.000**
		Persentase Desa memiliki layanan PAUD		**72,96 %**				**72,96 %**	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	TK Karmel TK Kasih Armita	2 Unit	154.560.000	DAU PERUNTUKAN		6 Unit	463.680.000
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		200 Orang	250.000.000	DAU PERUNTUKAN		200 Orang	250.000.000
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		150 Satpen	100.000.000	DAU PERUNTUKAN		150 Satpen	100.000.000
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		261 Satpen	5.172.249.999	DAK NON FISIK		261 Satpen	5.172.250.000
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1 Dok	200.000.000	DAU PERUNTUKAN		1 Dok	200.000.000
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		100 Dok	200.000.000	DAU PERUNTUKAN		100 Dok	200.000.000
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	TK Harapan Baru Pitago TK Karmel TK Rajawali	2 Ruang	744.525.000	DAK FISIK		4 Ruang	992.700.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		10 Komunitas	200.000.000	DAU PERUNTUKAN		10 Komunitas	350.000.000
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	TK Kamel TK Kasih Armita	4 Ruang	1.648.640.000	DAU PERUNTUKAN		4 Ruang	1.729.468.000
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		250 Orang	250.000.000	DAU PERUNTUKAN		250 Orang	500.000.000
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	TK Pembina Perencanaan DAU & DAK	1 Ruang	1.033.240.000	DAU PERUNTUKAN		4 Ruang	945.148.000
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	17 Kecamatan	40 Paket	662.754.080	DAU PERUNTUKAN		132 Paket	1.650.000.000
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan**		**8,09 %**	**3.657.795.643**			**8,09 %**	**100.000.000**
		Persentase kecamatan memiliki layanan PKBM		**88,24 %**				**88,24 %**	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		30 Satuan Pendidikan	3.457.795.643	DAK NON FISIK		Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1 Dok	100.000.000	DAU PERUNTUKAN		1 Dok	100.000.000
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		30 Orang	100.000.000	DAU PERUNTUKAN		Orang	150.000.000
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD (persatuan Pendidikan)**		**1:4 1:4 Rasio**	**100.000.000**			**1:4 1:4 Rasio**	**500.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SD (persatuan Pendidikan)		**1:12 1:12 Rasio**				**1:12 1:12 Rasio**	
		Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SMP (persatuan Pendidikan)		**1:15 1:15 Rasio**				**1:15 1:15 Rasio**	
		Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan Kesetaraan (persatuan Pendidikan)		**1:12 Rasio 1:15 1:15 Rasio 1:33 1:33 Rasio**				**1:12 Rasio 1:15 1:15 Rasio 1:33 1:33 Rasio**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase PAUD yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 1 orang**		**3,73 %**	**100.000.000**			**3,73 %**	**500.000.000**
		Persentase SD yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 2 orang		**35,41 %**				**35,41 %**	
		Persentase SMP yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 2 orang		**52,17 %**				**52,17 %**	
		Persentase Kesetaraan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 1 orang		**9,68 %**				**9,68 %**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1 Dok	50.000.000	DAU PERUNTUKAN		1 Dok	250.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1 Lap	50.000.000	DAU PERUNTUKAN		1 Lap	250.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**650.000.000**				**900.000.000,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**650.000.000**				**900.000.000,00**
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase keterlaksanaan pengembangan kebudayaan daerah**		**80,00 %**	**300.000.000**			**80,00 %**	**400.000.000,00**
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola**		**50,00 %**	**150.000.000**			**50,00 %**	**200.000.000**
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		36 Objek	50.000.000	DAU		36 Objek	100.000.000
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		30 Orang	100.000.000	DAU		30 Orang	100.000.000
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan**		**75,00 %**	**150.000.000**			**75,00 %**	**200.000.000**
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		5 Objek	50.000.000	DAU		5 Objek	100.000.000
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		1 Lap	100.000.000	DAU		1 Lap	100.000.000
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase keterlaksanaan pengembangan kesenian tradisional**		**42,86 %**	**100.000.000**			**42,86 %**	**100.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga Kesenian Memiliki Kompetensi**		**42,86 %**	**100.000.000**			**42,86 %**	**100.000.000**
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		35 Orang	100.000.000	DAU		35 Orang	100.000.000
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan sejarah**		**100 %**	**100.000.000**			**100 %**	**100.000.000**
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sejarah Lokal yang dibina**		**1**	**100.000.000**			**1**	**100.000.000**
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		30 Orang	100.000.000	DAU		30 Orang	100.000.000
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase keterlaksanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya**		**100 %**	**150.000.000**			**100 %**	**300.000.000**
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan**		**4 Cagar**	**100.000.000**			**4 Cagar**	**200.000.000**
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		5 Objek	100.000.000	DAU		5 Objek	200.000.000
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang dikelola**		**1 Cagar**	**50.000.000**			**1 Cagar**	**100.000.000**
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		**1 Objek**	50.000.000	DAU		**1 Objek**	100.000.000
		JUMLAH			**250.121.906.263**				**295.474.174.500**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (persen)**	Dinkes	**100%**	**51.365.326.662**	**DAU**		**100%**	**37.521.368.473**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase konsistensi Dokumen renja terhadap resntra (persen)**	Dinkes	**100%**	**75.873.274**	**DAU**		**100%**	**47.696.612**
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes	2 Dokumen	56.353.324	**DAU**		1 Dokumen	28.176.662
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinkes	1 Dokumen	2.110.000	**DAU**		1 Dokumen	2.110.000
2	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinkes	1 Dokumen	2.110.000	**DAU**		1 Dokumen	2.110.000
3	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinkes	1 Dokumen	2.110.000	**DAU**		1 Dokumen	2.110.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinkes	1 Dokumen	2.110.000	**DAU**		1 Dokumen	2.110.000
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinkes	1 Laporan	7.789.950	**DAU**		1 Laporan	7.789.950
6	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	1 Laporan	3.290.000	**DAU**		1 Laporan	3.290.000
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)**	Dinkes	**100%**	**47.915.799.700**	**DAU**		**100%**	**35.575.018.173**
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes	16.198 Orang	47.897.380.000	**DAU**		16.198 Orang	35.556.598.473
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinkes	1 Laporan	18.419.700	**DAU**		1 Laporan	18.419.700
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Simda BMD**	Dinkes	**100%**	**50.000.000**	**DAU**		**100%**	**25.000.000**
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinkes	1 Laporan	50.000.000	**DAU**		2 Laporan	25.000.000
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Subkegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Dinkes	**100%**	**150.000.000**	**DAU**		**100%**	**400.000.000**
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	RSUD	1 Dokumen	50.000.000	**DAU**		1 Dokumen	50.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	8 Orang	100.000.000	**DAU**		19 Orang	350.000.000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Adminitarsi Umum Perangkat Daerah**	Dinkes	**100%**	**633.823.000**	**DAU**		**100%**	**633.823.000**
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Dinkes	1 Paket	2.723.000	**DAU**		1 Paket	2.723.000
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Dinkes	1 Paket	100.000.000	**DAU**		1 Paket	100.000.000
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinkes	1 Paket	40.500.000	**DAU**		1 Paket	40.500.000
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinkes	1 Dokumen	8.600.000	**DAU**		1 Dokumen	8.600.000
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinkes	1 Laporan	42.000.000	**DAU**		1 Laporan	42.000.000
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	1 Laporan	440.000.000	**DAU**		1 Laporan	440.000.000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dinkes	**100%**	**424.626.688**	**DAU**		**100%**	**424.626.688**
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	1 Laporan	153.842.594	**DAU**		1 Laporan	153.842.594
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinkes	1 Laporan	145.400.000	**DAU**		1 Laporan	145.400.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinkes	1 Laporan	9.950.000	**DAU**		1 Laporan	9.950.000
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinkes	1 Laporan	115.434.094	**DAU**		1 Laporan	115.434.094
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	Dinkes	**100%**	**2.115.204.000**	**DAU**		**100%**	**415.204.000**
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinkes	1 Unit	115.204.000	**DAU**		1 Unit	115.204.000
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Dinkes	1 Unit	2.000.000.000	**DAU**		1 Unit	300.000.000
1	**02**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase rata-rata Pemenuhan 12 jenis SPM Bidang Kesehatan**	**kesmas,P2p**	**92,3**	**26.845.884.247**	**DAU/DAK**		**92,3**	**68.681.861.240**
						Persentase Puskesmas terakreditasi	**yankes**	**100**	-			**100**	
						Cakupan Desa Universal Child Immunization (Persen)	**p2p**	**65**	-			**65**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah dan Kabupaten Kota**	**Persentase Rata-Rata Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terstandar**		**50%**	**9.040.448.785**	**DAU/DAK**		**50%**	**18.019.000.000**
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Labkesda	1 unit	1.500.000.000	**DAK**		1 unit	3.000.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	19 PKM	11 Unit	1.600.000.000	**DAK**		5 Unit	4.000.000.000
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	Galela	1 Unit	500.000.000	**DAU**		2 Unit	1.200.000.000
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainya	Rehab Pustu Ruko dan Pediwang	2 Unit	500.000.000	**DAK**		6 Unit	2.100.000.000
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	19 PKM	1 Paket	4.721.448.785	**DAU/DAK**		1 Paket	7.500.000.000
1	02	02	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi ke obat dan vaksin ke 19 PKM dan Pengambilan Vaksin ke propinsi	2 Paket	219.000.000	**DAU**		2 Paket	219.000.000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Bayi Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif**	**19 Puskesmas**	**68%**	**17.555.435.462**	**DAU/DAK**		**68%**	**50.412.861.240**
						Presntase Desa STBM	**19 Puskesmas**	45%	-			45%	
						Angka Prevalensi Malaria	**19 Puskesmas**	0.3/1000 pddk	-			0.3/1000 pddk	
						Persentase ibu hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu hamil	**19 Puskesmas**	100	-			100	

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase ibu bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan Persalinan	**19 Puskesmas**	100	-			100	
						Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	**19 Puskesmas**	100	-			100	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	**19 Puskesmas**	100	-			100	
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar	**19 Puskesmas**	100	-			100	
						Persentase orang usia 15-19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**19 Puskesmas**	100	-			100	
						Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	**19 Puskesmas**	100	-			100	
						Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**19 Puskesmas**	100	-			100	
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**19 Puskesmas**	100	-			100	
						Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	**19 Puskesmas**	100	-			100	
						Persentase orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	**19 Puskesmas**	100	-			100	

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	**19 Puskesmas**	100	-			100	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19 PKM	3499 Orang	226.870.000	**DAU**		4303 Orang	1.349.386.860
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19 PKM	2773 Orang	587.170.000	**DAU/DAK**		3962 Orang	1.000.000.000
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19 PKM	2691 Orang	367.325.000	**DAU/DAK**		3773 Orang	299.640.000
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19 PKM	15700 Orang	200.000.000	**DAU**		22313 Orang	226.870.000
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19 PKM	11621 Orang	200.000.000	**DAU**		12202 Orang	200.000.000
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19 PKM	68000 Orang	200.000.000	**DAU**		173.260 Orang	200.000.000
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19 PKM	9950 Orang	200.000.000	**DAU**		12483 Orang	200.000.000
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19 PKM	18450 Orang	200.000.000	**DAU**		3320 Orang	200.000.000
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19 PKM	2300 Orang	429.323.741	**DAU/DAK**		1060 Orang	200.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	19 PKM	120 Orang	150.000.000	**DAU**		40 Orang	200.000.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19 PKM	3850 Orang	322.792.700	**DAU/DAK**		630 Orang	200.000.000
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19 PKM	4550 Orang	454.936.000	**DAU/DAK**		6085 Orang	400.000.000
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19 PKM	1 Dokumen	277.773.500	**DAU/DAK**		1 Dokumen	597.879.934
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19 PKM	1 Dokumen	415.710.000	**DAU/DAK**		1 Dokumen	1.186.258.000
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	19 PKM	1 Dokumen	96.278.400	**DAK**		1 Dokumen	96.278.400
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	19 PKM	1 Dokumen	150.000.000	**DAU**		1 Dokumen	250.000.000
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19 PKM	1 Dokumen	409.900.000	**DAU/DAK**		1 Dokumen	200.000.000
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalagunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	19 PKM	11.500 Orang	102.632.000	**DAK**		11.500 Orang	102.632.000
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 PKM	1 Dokumen	1.118.430.000	**DAU/DAK**		1 Dokumen	7.750.000.000
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19 PKM	1 Dokumen	10.369.765.496	**DAU**		1 Dokumen	18.969.765.496

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen Penyakit Potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	19 PKM	19 Paket	91.640.000	**DAK**		19 Paket	91.640.000
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Klinik Kao	1 Dokumen	300.000.000	**DAU**		1 Dokumen	300.000.000
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten Kota	Puskesmas	5 Unit	330.160.000	**DAU/DAK**		5 Unit	1.268.955.000
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	19 PKM	1 Laporan	135.780.000	**DAK**		1 Laporan	135.780.000
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	19 PKM	25 Orang	68.908.625	**DAK**		5.850 Orang	68.908.625
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	19 PKM	1 Dokumen	150.040.000	**DAK**		1 Dokumen	150.040.000
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Presentase Puskesmas yang Memiliki Sistem Informasi Kesehatan**	**Dinas kesehatan**	26%	250.000.000	**DAU**		26%	250.000.000
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas kesehatan	1 Dokumen	250.000.000	**DAU**		1 Dokumen	250.000.000
1	**02**	**03**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Per 2500 Penduduk)**	Yankes	**0,9**	**4.772.754.796**	**DAU**		**0,9**	**6.197.695.036**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di wilayah Kab/Kota**	**Persentase Desa yang Memiliki Tenaga Kesehatan**	19 PKM	**100%**	**4.572.754.796**	**DAU**		**100%**	**5.829.443.773**
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19 PKM	50 Orang	4.495.999.396	**DAU**		50 Orang	5.752.688.373

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	19 PKM	1 Dokumen	76.755.400	**DAU**		1 Dokumen	76.755.400
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat Kesehatan**	19 PKM	**60%**	200.000.000	**DAU**		**60%**	368.251.263
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	19 PKM	19 Orang	200.000.000	**DAU**		250 Orang	368.251.263
1	**02**	**04**			**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan**	Yankes	**92,31%**	**50.000.000**	**DAU**		**92,31%**	**150.000.000**
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase peningkatan Jumlah P-IRT yang memiliki Sertifikat**	19 Kecamatan	38%	**25.000.000**	**DAU**		38%	**100.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	19 Kecamatan	1 Dokumen	25.000.000	**DAU**		1 Dokumen	100.000.000
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase P-IRT yang Dimonitoring**	19 Kecamatan	**79%**	**25.000.000**	**DAU**			**50.000.000**
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga beredar yang dilakukan Pemeriksaan *Post market* dalam rangka tindak lanjut pengawasan	19 Kecamatan	30 Unit	25.000.000	**DAU**		30 Unit	50.000.000
1	**02**	**05**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Posyandu Aktif**	Kesmas	**100**	**201.021.298**	**DAU**		**100**	**625.000.000**
						Rasio Jumlah Posbindu PTM Terhadap Jumlah Desa	P2P	**65**	-	**DAU**		**65**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Minimal 5 (lima) Tema Kampanye Germas**	19 PKM	**75%**	50.000.000	**DAU**		**75%**	239.588.000
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	19 PKM	1 Dokumen	50.000.000	**DAU**		1 Dokumen	239.588.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota**	**Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Promotif dan Preventif pada Desa Binaan**	19 PKM	**70%**	**151.021.298**	**DAU**		**70%**	**385.412.000**
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	19 PKM	1 Dokumen	151.021.298	**DAU**		1 Dokumen	385.412.000
JUMLAH									**83.234.987.003**				**113.175.924.749**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD TOBELO

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**RSUD**	**100%**	**24.336.789.492**			**100%**	**26.737.208.434**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**RSUD**	**100%**	**41.743.900**			**100%**	**44.735.790**
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD	1 Dokumen	11.825.000	DAU		1 Dokumen	11.825.000
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD	1 Dokumen	3.531.000	DAU		1 Dokumen	3.884.100
2	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RSUD	1 Dokumen	3.531.000	DAU		1 Dokumen	3.884.100
3	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	RSUD	1 Dokumen	3.531.000	DAU		1 Dokumen	3.884.100

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	RSUD	1 Dokumen	3.531.000	DAU		1 Dokumen	3.884.100
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD	1 Laporan	11.433.400	DAU		1 Dokumen	12.576.740
6	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD	1 Laporan	4.361.500	DAU		1 Dokumen	4.797.650
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**RSUD**	**100%**	**19.243.365.582**			**100%**	**21.167.702.140**
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	RSUD	272 Orang / Bulan	19.214.925.082	DAU		220/Bulan	21.136.417.590
1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	RSUD	1 Dokumen	14.580.685	DAU		1 Dokumen	16.038.753
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	RSUD	1 Laporan	13.859.815	DAU		1 Dokumen	15.245.797
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah**	**RSUD**	**100%**	**14.580.685**				**16.038.753**
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD	1 Laporan	14.580.685	DAU		1 Laporan	16.038.753
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**RSUD**	**100%**	**14.580.685**				**16.038.753**
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	RSUD	1 Laporan	14.580.685	DAU		1 Dokumen	16.038.753

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**678.258.640**			**100%**	**746.084.504**
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	RSUD	1 Paket	70.000.000	DAU		1 Paket	77.000.000
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	RSUD	1 Paket	150.000.000	DAU		1 Paket	165.000.000
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	RSUD	1 Paket	210.000.000	DAU		1 Paket	231.000.000
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	RSUD	1 Paket	110.000.000	DAU		1 Paket	121.000.000
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	RSUD	1 Dokumen	25.258.640	DAU		1 Dokumen	27.784.504
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	RSUD	1 Laporan	38.000.000	DAU		1 Laporan	41.800.000
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD	1 Laporan	75.000.000	DAU		1 Laporan	82.500.000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**		**100%**	**4.324.760.000**			100%	**4.757.236.000**
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD	1 Laporan	3.469.760.000	DAU		1 Laporan	3.816.736.000
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	RSUD	1 Laporan	800.000.000	DAU		1 Laporan	880.000.000
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	RSUD	1 Laporan	55.000.000	DAU		1 Laporan	60.500.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**		**100%**	**19.500.000**			100%	**21.450.000**
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	RSUD	1 Unit	19.500.000	DAU		1 Unt	21.450.000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Tenaga Medis yang Menerima Jasa Pelayanan**	**RSUD**	**100%**	**70.000.000.000**	**BLUD**		**100%**	**77.000.000.000**
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD	1 Unit Kerja	70.000.000.000	BLUD		1 Unit Kerja	77.000.000.000
1	**02**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase Penambahan Jumlah Tempat Tidur RSUD**		**100**	**21.913.471.030**			**100**	**24.104.818.133**
						Jumlah Layanan RSUD yang Tersertifikasi ISO (kumulatif							
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah dan Kabupaten Kota**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terstandar**		**80%**	**21.313.471.030**			80%	**23.444.818.133**
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	RSUD	1 Unit	4.366.867.000	DAK		1 Unit	4.803.553.700
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitas dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD	2 Unit	146.604.030	DAU		1 Unit	161.264.433

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Palayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	RSUD	1 Paket	8.000.000.000	DAK		1 Unit	8.800.000.000
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	RSUD	1 Unit	1.200.000.000	DAU		1 Unit	1.320.000.000
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	RSUD	1 Unit	3.500.000.000	DAU		1 Unit	3.850.000.000
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	RSUD	1 Paket	4.100.000.000	DAU		1 Paket	4.510.000.000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Kesehatan**		**80%**	**600.000.000**			80%	**660.000.000**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD	1 Dokumen	600.000.000	DAU		1 Dokumen	660.000.000
1	**02**	**03**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Rasio Dokter Spesialis per Satuan Penduduk (per 16ribu penduduk)**		**80%**	**16.331.531.560**			**80%**	**17.964.684.716**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar**		**80%**	**16.246.531.560**			80%	**17.871.184.716**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	RSUD	410 Orang	16.246.531.560	DAU	410	Orang	17.871.184.716
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK yang mengikuti Bimtek Seseuai Kompetensi**		**100%**	**85.000.000**			**100%**	**93.500.000**
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	RSUD	580 Orang	85.000.000	DAU		580 Orang	93.500.000
JUMLAH									**132.581.792.082**				**145.806.711.283**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	4	3	6	7	8	9	6	11
1					**WAJIB PELAYANAN DASAR**								
1	03				**PEKERJAAN UMUM**								
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**		**100 %**	**6.211.059.175,00**	**DAU**		**100 %**	**6.832.165.092,50**
1	03	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Dinas PUTR**	**100 %**	**291.399.600,00**	**DAU**		**100 %**	**320.539.560,00**
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PUTR	4 Dokumen	112.282.000,00	DAU		4 Dokumen	123.510.200,00
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PUTR	1 Dokumen	2.965.500,00	DAU		1 Dokumen	3.262.050,00
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PUTR	1 Dokumen	2.965.500,00	DAU		1 Dokumen	3.262.050,00
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas PUTR	1 Dokumen	2.965.500,00	DAU		1 Dokumen	3.262.050,00
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas PUTR	1 Dokumen	2.965.500,00	DAU		1 Dokumen	3.262.050,00
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PUTR	1 Laporan	91.874.400,00	DAU		1 Laporan	101.061.840,00
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PUTR	4 Laporan	75.381.200,00	DAU		4 Laporan	82.919.320,00
1	03	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Dinas PUTR**	**100 %**	**4.331.495.660,00**	**DAU**		**100 %**	**4.764.645.226,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PUTR	37 Orang/bulan	4.331.495.660,00	DAU		37 Orang/bulan	4.764.645.226,00
1	03	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas PUTR**	**100**	**153.180.000,00**	**DAU**		**100 %**	**168.498.000,00**
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas PUTR	1 Paket	67.760.000,00	DAU		1 Paket	74.536.000,00
1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PUTR	30 Orang	16.500.000,00	DAU		30 Orang	18.150.000,00
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Lembaga Pelaksana	2 Orang	68.920.000,00	DAU		2 Orang	75.812.000,00
1	03	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas PUTR**	**100 %**	**611.832.800,00**	**DAU**		**100 %**	**673.016.080,00**
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas PUTR	5 Paket	103.529.300,00	DAU		5 Paket	113.882.230,00
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas PUTR	4 Paket	97.885.800,00	DAU		4 Paket	107.674.380,00
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas PUTR	11 Paket	8.028.700,00	DAU		11 Paket	8.831.570,00
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas PUTR	32 Paket	39.995.300,00	DAU		32 Paket	43.994.830,00
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas PUTR	3 Paket	12.999.700,00	DAU		3 Paket	14.299.670,00
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas PUTR	3 Dokumen	107.500.000,00	DAU		3 Dokumen	118.250.000,00
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PUTR	12 Laporan	8.600.000,00	DAU		12 Laporan	9.460.000,00
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	4 Laporan	233.294.000,00	DAU		4 Laporan	256.623.400,00
1	03	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Kab. Halut**	**100 %**	**19.783.500,00**	**DAU**		**100 %**	**21.761.850,00**
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Halut	0 Unit	-	DAU		0 Unit	-

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Halut	0 Unit	-	DAU		0 Unit	-
1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas PUTR	3 Unit	19.783.500,00	DAU		2 Unit	21.761.850,00
1	03	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas PUPR**	**100 %**	**283.363.115,00**	**DAU**		**100 %**	**311.699.426,50**
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PUTR	12 Laporan	193.829.900,00	DAU		12 Laporan	213.212.890,00
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas PUTR	12 Laporan	89.533.215,00	DAU		12 Laporan	98.486.536,50
1	03	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas PUTR**	**100 %**	**520.004.500,00**	**DAU**		**100 %**	**572.004.950,00**
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dinas PUTR	7 Unit	120.004.500,00	DAU		7 Unit	132.004.950,00
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas PUTR	2 Unit	400.000.000,00	DAU		1 Unit	440.000.000,00
					- Renovasi Gedung Kantor Palang Merah indonesia (PMI)	Terlaksananya Rehabilitasinya Gedung Kantor	Kab. Halut	1 Unit	200.000.000,00	DAU			
					- Renovasi Gedung Kantor Dinas PUTR (Lanjutan)	Terlaksananya Rehabilitasinya Gedung Kantor	Kab. Halut	1 Unit	200.000.000,00	DAU			
1	03	02			**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase Luas Kawasan Pantai Rawan Bencana (abrasi, erosi, akresi) terlindungi infrastruktur pengaman pantai**	**Kab. Halut**	**37,61 %**	**16.496.539.000,00**	**DAU/DAK**		**40,20 %**	**18.146.192.900,00**
						Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir terlindungi infrastruktur pengaman sungai		**15,96 %**				**16,84 %**	
						Persentase Luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang Teraliri Aliran Air dengan Debit Minimal 1,2 l/dt/ha		**31,8 %**				**31,80 %**	

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	03	02	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Infrastruktur Pengaman Pantai terbangun**	**Kab. Halut**	**37,07 %**	**3.050.421.000,00**	**DAU**		**39,44 %**	**3.355.463.100,00**
						Persentase Panjang Infrastruktur Pengaman Sungai terbangun		**7,18 %**				**7,43 %**	
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Halut	1 Dokumen	350.421.000,00	DAU		1 Dokumen	385.463.100,00
					- Honorarium PPK SDA		Kab. Halut		39.840.000,00	DAU			
					- Jasa Tenaga Administrasi		Kab. Halut		46.560.000,00	DAU			
					- Pengawasan pembangunan Bidang SDA		Kab. Halut	1 Dokumen	100.000.000,00	DAU			
					- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Koordinasi Kegiatan DAK)				164.021.000,00	DAU			
1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Kab. Halut	0,1 Km	600.000.000,00	DAU		0,10 Km	660.000.000,00
					- Pembangunan Tanggul Sungai Desa Tanjung Niara		Kab. Halut	0,1 Km	600.000.000,00	DAU			
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Kab. Halut	0,04 Km	200.000.000,00	DAU		0,04 Km	220.000.000,00
					- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Desa Bale		Kab. Halut	0,04 Km	200.000.000,00	DAU			
1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Kab. Halut	0,3 Km	1.500.000.000,00	DAU		0,04 Km	1.650.000.000,00
					- Pembangunan Talud Desa Gura		Kab. Halut	0,1 Km	-	DAU		0 Km	
					- Pembangunan Talud Desa Efi-Efi		Kab. Halut	0,3 Km	1.500.000.000,00	DAU			
1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Kab. Halut	1 Dokumen	200.000.000,00	DAU		1 Dokumen	220.000.000,00
					- Penyusunan Database Potensi Air Baku		Kab. Halut	1 Dokumen	200.000.000,00	DAU			
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kab. Halut	0,2 Km	200.000.000,00	DAU		0 Km	220.000.000,00
					- Normalisasi Sungai Kali Seratus		Kab. Halut	0,1 Km	200.000.000,00	DAU			
					- Normalisasi Sungai Mumulati		Kab. Halut	0,1 Km	-	DAU		0 Km	

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Jaringan Irigasi terbangun**	**Kab. Halut**	**85,92 %**	**13.446.118.000,00**	**DAU/DAK**		**88,85 %**	**14.790.729.800,00**
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kab. Halut	3,03 Km	8.199.558.000,00	DAK		3,03 Km	9.019.513.800,00
					- Pembangunan Jaringan Irigasi DI Paca - Leleoto (DAK)		Kab. Halut	3,03 Km	8.199.558.000,00	DAK			
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Kab. Halut	1 Dokumen	2.046.560.000,00	DAU		1 Dokumen	2.251.216.000,00
					- Jasa Tenaga Administrasi		Kab. Halut	1 Dokumen	46.560.000,00	DAU			
					- Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan Daerah Irigasi Kabupaten Halmahera Utara		Kab. Halut	1 Dokumen	2.000.000.000,00	DAU			
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Halut	0,692 Km	3.000.000.000,00	DAU/DAK		0,692 Km	3.300.000.000,00
					- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gagaapok (DAK)		Kab. Halut	0,692 Km	3.000.000.000,00	DAK			
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Halut	0,2 Km	200.000.000,00	DAU		0,2 Km	220.000.000,00
					- Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Tolabit		Kab. Halut	0,2 Km	200.000.000,00	DAU			
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**PENINGKATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA MEMILIKI AKSES PADA SUMBER AIR MINUM BERSIH (PERSEN POIN DARI TAHUN**	**Kab. Halut**	**-0,28 %**	**15.324.141.208,00**	**DAU/DAK/ HAMP**		**-0,28 %**	**16.856.555.328,80**
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mnum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penduduk yang memiliki akses pada sumber air minum aman**	**Kab. Halut**	**81,14 %**	**15.324.141.208,00**	**DAU/DAK/ HAMP**		**80,86 %**	**16.856.555.328,80**
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kab. Halut	4 Dokumen	1.563.545.700,00	DAU		2 Dokumen	1.719.900.270,00
					- Belanja Barang Pakai Habis		Kab. Halut		22.004.700,00	DAU			
					- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		Kab. Halut		218.160.000,00	DAU			
					- Belanja Jasa Tenaga Administrasi		Kab. Halut		23.280.000,00	DAU			

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
					- Penyusunan DED Air Bersih		Kab. Halut	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU			
					- Pemutakhiran Database Air Minum		Kab. Halut	1 Dokumen	300.000.000,00	DAU			
					- Perencanaan Pemasangan Pipa Jaringan Dalam Kota Tobelo		Kab. Halut	1 Dokumen	350.000.000,00	DAU			
					- Review Dokumen RISPAM		Kab. Halut	1 Dokumen	350.000.000,00	DAU			
					- Pengawasan Kegiatan Bidang Air Minum		Kab. Halut		100.000.000,00	DAU			
					- Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Air Minum		Kab. Halut		100.000.000,00	DAU			
					- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Koordinasi Kegiatan DAK)				50.101.000,00	DAU			
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kab. Halut	10 Liter/Detik	9.778.734.236,00	DAU/DAK		10 Liter/Detik	10.756.607.659,60
					- Peningkatan SPAM Dalam Kota Tobelo		Kab. Halut	10 Liter/Detik	9.778.734.236,00	DAK			
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kab. Halut	10 Liter/Detik	2.747.361.272,00	DAU		10 Liter/Detik	3.022.097.399,20
					- Pengadaan Instalasi Produksi PDAM		Kab. Halut		2.247.361.272,00	DAU			
					- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bobane Igo		Kab. Halut		500.000.000,00	DAU			
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Halut	5 Unit	834.500.000,00	DAU		4 Unit	917.950.000,00
					- Renovasi Rumah Pompa Pusat Operasi		Kab. Halut		34.500.000,00	DAU			
					- Pemeliharaan SPAM Desa Apulea		Kab. Halut		200.000.000,00	DAU Peruntukan			
					- Pemeliharaan SPAM Desa Posi Posi		Kab. Halut		200.000.000,00	DAU Peruntukan			
					- Pemeliharaan SPAM Desa Gonga		Kab. Halut		200.000.000,00	DAU Peruntukan			
					- Pemeliharaan SPAM Desa Katana		Kab. Halut		200.000.000,00	DAU Peruntukan			
1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kab. Halut	30 Orang	50.000.000,00	DAU		30 Orang	55.000.000,00
					- Sosialisasi Bidang Air Minum		Kab. Halut	30 Orang	50.000.000,00	DAU			

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Halut	100 SR	350.000.000,00	DAU/DAK/ HAMP		100 SR	385.000.000,00
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Limau		Kab. Halut	100 SR	350.000.000,00	DAU			
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**PERSENTASE DESA YANG TELAH MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI**	**Kab. Halut**	**5,1 %**	**754.981.286,00**	**DAU/DAK**		**6,63 %**	**830.479.414,60**
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Bangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS terbangun**	**Kab. Halut**	**5,1 %**	**754.981.286,00**	**DAU/DAK**		**6,63 %**	**830.479.414,60**
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kab. Halut	1 Ton/Hari	615.900.000,00	DAK		1 Ton/Hari	677.490.000,00
					- Pembangunan TPS-3R Desa Usulan DAK (DAK)		Kab. Halut	1 Unit	615.900.000,00	DAK			
1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Kab. Halut	1 Unit	139.081.286,00	DAU		1 Unit	152.989.414,60
					- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		Kab. Halut		-	DAU			
					- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		Kab. Halut		60.000.000,00	DAU			
					- Belanja Tagihan Listrik		Kab. Halut		29.081.286,00	DAU			
					- Sosialisasi Bidang Persampahan		Kab. Halut		50.000.000,00	DAU			
1	03	05			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**PENINGKATAN CAKUPAN RUMAH TANGGA MEMILIKI AKSES PADA SANITASI LAYAK (PERSEN POIN DARI TAHUN**	**Kab. Halut**	**0,59 %**	**10.850.510.727,00**	**DAU/DAK/ HALS**		**0,56 %**	**11.935.561.799,70**
1	03	05	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk terlayani sistem air limbah memadai**	**Kab. Halut**	**55,67 %**	**10.850.510.727,00**	**DAU/DAK/ HALS**		**56,23 %**	**11.935.561.799,70**
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah (SPALD) yang Disusun		3 Dokumen	2.636.916.215,00	DAU		3 Dokumen	2.900.607.836,50
					- Belanja Barang Pakai Habis (UPTD PALD)		Kab. Halut		111.891.000,00	DAU			
					- Belanja Jasa Kantor		Kab. Halut		360.663.215,00	DAU			
					- Penyusunan DED Air Limbah		Kab. Halut	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU			

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
					- Pemutakhiran Database Sanitasi		Kab. Halut	1 Dokumen	300.000.000,00	DAU			
					- Penyusunan Dokumen RISPALD		Kab. Halut	1 Dokumen	750.000.000,00	DAU			
					- Studi Referensi Bidang Sanitasi		Kab. Halut		100.000.000,00	DAU			
					- Studi Referensi UPTD PALD		Kab. Halut		150.000.000,00	DAU			
					- Penyusunan dokumen roadmap sanitasi		Kab. Halut		400.000.000,00	DAU			
					- Pengawasan Kegiatan HALS		Kab. Halut		200.000.000,00	DAU			
					- Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Sanitasi		Kab. Halut		100.000.000,00	DAU			
					- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Koordinasi Kegiatan DAK)		Kab. Halut		114.362.000,00	DAU			
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar (RT)	Kab. Halut	600 Rumah Tangga	7.550.000.000,00	DAU/DAK/ HALS		600 Rumah Tangga	8.305.000.000,00
					- Pembangunan Tangki Septik Desa Usulan DAK (DAK)		Kab. Halut		3.550.000.000,00	DAK			
					- Pembangunan Tangki Septik (DAU Peruntukan) (SPM)		Kab. Halut		4.000.000.000,00	DAU Peruntukan			
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Halut	30 Orang	50.000.000,00	DAU		30 Orang	55.000.000,00
					- Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Kegiatan Air Limbah		Kab. Halut	30 Orang	50.000.000,00	DAU			
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Kab. Halut	1 Unit	613.594.512,00	DAU		1 Unit	674.953.963,20
					- Pemeliharaan MCK Desa Dokulamo				200.000.000,00	DAU Peruntukan			
					- Pemeliharaan MCK Desa Dodowo				200.000.000,00	DAU Peruntukan			
					- Pemeliharaan MCK Desa Soakonora				213.594.512,00	DAU Peruntukan			
1	03	06			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**PERSENTASE PANJANG JARINGAN DRAINASE (SKALA KOTA DAN DESA) TERBANGUN**	**Kab. Halut**	**5,14 %**	**1.455.240.000,00**	**DAU**		**5,64 %**	**1.600.764.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	03	06	2.01		**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Drainase Perkotaan Terbangun**	**Kab. Halut**	**26,94 %**	**1.455.240.000,00**	**DAU**		**28,15 %**	**1.600.764.000,00**
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (m)	Kab. Halut	- Meter	200.000.000,00	DAU		100 Meter	220.000.000,00
					- Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalipitu-Jiko Leleani		Kab. Halut		200.000.000,00	DAU			
					- Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Gamsungi		Kab. Halut			DAU			
					- Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Rawajaya		Kab. Halut		-	DAU			
					- Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Gosoma		Kab. Halut		-	DAU			
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun (dokumen)	Kab. Halut	1 Dokumen	405.240.000,00	DAU		1 Dokumen	445.764.000,00
					- Belanja Barang Pakai Habis		Kab. Halut		69.240.000,00	DAU			
					- Perencanaan Sistem Drainase Kawasan Perkotaan		Kab. Halut		300.000.000,00	DAU			
					- Belanja Operasional (Tim Reaksi Cepat) TRC Petarung		Kab. Halut		36.000.000,00	DAU			
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kab. Halut	1 Sistem drainase perkotaan	200.000.000,00	DAU		1 Sistem drainase perkotaan	220.000.000,00
					- Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Gamsungi		Kab. Halut		200.000.000,00	DAU			
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Kab. Halut	1 Sistem drainase perkotaan	650.000.000,00	DAU		1 Sistem drainase perkotaan	715.000.000,00
					- Pemeliharaan Drainase Desa Gosoma		Kab. Halut		200.000.000,00	DAU			
					- Rehabilitasi Drainase Desa Gura		Kab. Halut		450.000.000,00	DAU			
1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**PERSENTASE SLF YANG DITERBITKAN (PADA TAHUN BERKENAAN)**	**Kab. Halut**	**100 %**	**774.147.000,00**	**DAU**		**100 %**	**851.561.700,00**
1	03	08	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Permohonan PBG yang mendapatkan Persetujuan (pada tahun berkenaan)**	**Kab. Halut**	**100 %**	**774.147.000,00**	**DAU**		**100 %**	**851.561.700,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Halut	100 Dokumen	774.147.000,00	DAU		100 Dokumen	851.561.700,00	
					Belanja Barang Pakai Habis		Kab. Halut		71.827.000,00	DAU		100 Dokumen	79.009.700,00	
					- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		Kab. Halut		352.320.000,00	DAU		100 Dokumen	387.552.000,00	
					- Studi Referensi Bangunan Gedung		Kab. Halut		100.000.000,00	DAU		100 Dokumen	110.000.000,00	
					- Penyusunan Database Bangunan Gedung		Kab. Halut		200.000.000,00	DAU		100 Dokumen	220.000.000,00	
					- Biaya Kunjungan Lapangan Kegiatan PBG		Kab. Halut		50.000.000,00	DAU		100 Dokumen	55.000.000,00	
1	03	09			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**	**Kab. Halut**	**100 %**	**200.000.000,00**	**DAU**		**100**	**220.000.000,00**	
1	03	09	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang tersusun (tahun berkenaan)**	**Kab. Halut**	**100 %**	**200.000.000,00**	**DAU**		**100**	**220.000.000,00**	
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen	-	DAU		0 Dokumen	-	
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kab. Halut	1 Kawasan	200.000.000,00	DAU		1 Kawasan	220.000.000,00	
					- Pembuatan Building Garden Dalam Kota Tobelo		Kab. Halut		200.000.000,00	DAU				
1	03	10			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**PERSENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK**	**Kab. Halut**	**61,47 %**	**61.769.290.469,00**	**DAU/DAK**		**62,46 %**	**67.345.207.015,90**	

BARTEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik**	**Kab. Halut**	**61,47 %**	**61.769.290.469,00**	**DAU/DAK**		**62,46 %**	**67.345.207.015,90**
						Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		**95,29 %**				**95,35 %**	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kab. Halut	8 Dokumen	2.481.096.000,00	DAU		9 Dokumen	2.729.205.600,00
					- Belanja Jasa Kantor		Kab. Halut		136.200.000,00	DAU			
					- Perencanaan Preservasi Jalan Ruas Kusuri - Tolabit		Kab. Halut	1 Dokumen	350.000.000,00	DAU			
					- Perencanaan Jalan Ruas Ngajam - Apulea		Kab. Halut	1 Dokumen	500.000.000,00	DAU			
					- Perencanaan Jalan Ruas Gamsungi II - Warudu		Kab. Halut	1 Dokumen	300.000.000,00	DAU			
					- Perencanaan Jalan Ruas Kusuri - Trans Sukamaju		Kab. Halut	1 Dokumen	300.000.000,00	DAU			
					- Perencanaan Jembatan Ruas Ngajam - Apulea		Kab. Halut	1 Dokumen	-	DAU			
					- Perencanaan Jembatan Ake Wangongira		Kab. Halut	1 Dokumen	250.000.000,00	DAU			
					- Perencanaan Jembatan Ruas Gamsungi II - Warudu		Kab. Halut	1 Dokumen	150.000.000,00	DAU			
					- Perencanaan Jembatan (Ruas Pitago - Takimo)		Kab. Halut	1 Dokumen	250.000.000,00	DAU			
					- Perencanaan Penggantian Jembatan Ake Bao		Kab. Halut	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	
					- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Koordinasi Kegiatan DAK)				244.896.000,00	DAU			
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kab. Halut	301,2 Km	750.000.000,00	DAU/DAK		##### Km	825.000.000,00
					- Survey Kondisi Ruas Jalan dan Jembatan Kabupaten		Kab. Halut		750.000.000,00	DAU			
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Kab. Halut	18,24 Km	57.386.608.469,00	DAU/DAK		9,7 Km	63.125.269.315,90
					- Preservasi Jalan Dalam Kota Tobelo		Kab. Halut	1 Kegiatan	3.151.700.009,00	DAK			
					- Peningkatan Struktur Jalan Ruas Wateto - Warudu - Dowongimaiti		Kab. Halut	1 Kegiatan	7.354.587.509,00	DAK			
					- Peningkatan Jalan Ruas Ngajam - Apulea		Kab. Halut	1 Kegiatan	7.354.587.509,00	DAK			
					- Peningkatan Struktur Jalan Kecamatan Tobelo Tengah		Kab. Halut	0,34 Km	1.000.000.000,00	DAU			

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
					- Peningkatan Jalan ruas Desa Tioua - Efi-efi		Kab. Halut	3,2	Km	7.733.472.800,00	DAU			
					- Peningkatan Struktur Jalan Desa Luari		Kab. Halut	0,28	Km	816.885.440,00	DAU			
					- Peningkatan Struktur Jalan Desa Jere Tua		Kab. Halut	0,73	Km	2.366.934.140,00	DAU			
					- Peningkatan Struktur Jalan Desa Tabobo		Kab. Halut	0,4	Km	1.120.243.860,00	DAU			
					- Peningkatan Struktur Jalan ruas Desa Kupa Kupa - Kupa Kupa Selatan		Kab. Halut	2,13	Km	5.488.197.202,00	DAU			
					- Peningkatan Struktur Jalan Jiko Leleani -Lanjutan		Kab. Halut	5	Km	21.000.000.000,00	DAU			
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kab. Halut	36,43	Km	546.375.000,00	DAU			
					- Pemeliharaan Jalan Kusuri - Wangongira		Kab. Halut	13	Km	195.000.000,00	DAU			
					- Pemeliharaan Jalan Sp. Tobe - Katana		Kab. Halut	12,57	Km	188.550.000,00	DAU			
					- Pemeliharaan Jalan Sp. Biang - Popon		Kab. Halut	10,86	Km	162.825.000,00	DAU			
1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Kab. Halut	3,67	Km	605.211.000,00	DAU		3,67	Km	665.732.100,00
					- Pengawasan Preservasi Jalan Dalam Kota Tobelo		Kab. Halut	1	Kegiatan	94.551.000,00	DAU			
					- Pengawasan Peningkatan Struktur Jalan Ruas Wateto - Warudu - Dowongimaiti		Kab. Halut	1	Kegiatan	255.330.000,00	DAU			
					- Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Ngajam - Apulea		Kab. Halut	1	Kegiatan	255.330.000,00	DAU			
1	03	11			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**PERSENTASE KECELAKAAN KONSTRUKSI PADA PROYEK YANG DIDANAI APBD KABUPATEN**	**Kab. Halut**	**0**	**%**	**1.117.116.848,00**	**DAU**		**0**	**%**	**1.228.828.532,80**
1	03	11	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Rasio ketersediaan tenaga terampil konstruksi (persen)**	**Kab. Halut**	**44,5**	**%**	**697.640.948,00**	**DAU**		**50,50**	**%**	**767.405.042,80**
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Kab. Halut	90	Orang	383.342.948,00	DAU		90	Orang	421.677.242,80
					- Kegiatan Sertifikasi K3		Kab. Halut	30	Orang	100.000.000,00	DAU			
					- Kegiatan Sertifikasi Tenaga Terampil Jenjang 6		Kab. Halut	30	Orang	100.000.000,00	DAU			

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
					- Kegiatan Sertifikasi Tenaga Terampil Jenjang 3		Kab. Halut	30 Orang	100.000.000,00	DAU			
					- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Koordinasi kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi)			1 Kegiatan	83.342.948,00	DAU			
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Halut	50 Lembaga	314.298.000,00	DAU		100 Lembaga	345.727.800,00
					- Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Jasa Konstruksi		Kab. Halut	1 Kegiatan	40.000.000,00	DAU			
					- Bimbingan Teknis Direksi dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi		Kab. Halut	1 Kegiatan	200.000.000,00	DAU			
					- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi		Kab. Halut	1 Kegiatan	50.000.000,00	DAU			
					- Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Jasa Konstruksi)		Kab. Halut	1 Kegiatan	24.298.000,00	DAU			
1	03	11	2.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)**	**Kab. Halut**	**100 %**	**369.480.000,00**	**DAU**		**100 %**	**406.428.000,00**
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Kab. Halut	2 Perangkat Pendukung	369.480.000,00	DAU		2 Perangkat Pendukung	406.428.000,00
					- Belanja Jasa Kantor		Kab. Halut	1 Kegiatan	69.480.000,00	DAU			
					- Penyusunan HSPK		Kab. Halut	1 Kegiatan	200.000.000,00	DAU			
					- Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi		Kab. Halut	1 Kegiatan	50.000.000,00	DAU			
					- Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Bangunan/Konstruksi		Kab. Halut	1 Kegiatan	50.000.000,00	DAU			
1	03	11	2.04		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Terlaksananya Pengawasan Terhadap Perizinan Jasa Konstruksi**	**Kab. Halut**	**100 %**	**49.995.900,00**	**DAU**		**100 %**	**54.995.490,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kab. Halut	100 Paket Pekerjaan		49.995.900,00	DAU	100 Paket Pekerjaan	54.995.490,00
1	03	12			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**PERSENTASE PERDA TATA RUANG YANG TELAH DITETAPKAN**	**Kab. Halut**	**75**	**%**	**1.004.787.100,00**	**DAU**	**100**	**%**	**1.105.265.810,00**
1	03	12	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Materi Teknis RTRW dan RRTR yang telah disusun**	**Kab. Halut**	**10**	**Buah**	**40.000.000,00**	DAU	**10**	**Buah**	**44.000.000,00**
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Kab. Halut	1	Orang	40.000.000,00	DAU	1	Orang	44.000.000,00
1	03	12	2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang**	**Dinas PUTR**	**100**		**617.485.000,00**	**DAU**	**100**	**%**	**679.233.500,00**
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dinas PUTR	1	Dokumen	617.485.000,00	DAU	1	Dokumen	679.233.500,00
					- Belanja Jasa Kantor					46.560.000,00	DAU			
					- Penyusunan RDTR Kao Barat			1	Dokumen	500.000.000,00	DAU			
					- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					70.925.000,00	DAU			
1	03	12	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang**	**Dinas PUTR**	**100**	**%**	**150.000.000,00**	**DAU**	**100**	**%**	**165.000.000,00**
1	03	12	2.03	0007	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang komunikasi penataan ruang	Dinas PUTR	1	Dokumen	150.000.000,00	DAU	1	Dokumen	165.000.000,00
1	03	12	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rekomendasi TKPRD yang diterbitkan (tahun berkenaan)**	**Kab. Halut**	**100**	**%**	**197.302.100,00**	**DAU**	**100**	**%**	**217.032.310,00**
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Halut	1	Dokumen	197.302.100,00	DAU	1	Dokumen	217.032.310,00
JUMLAH										**115.957.812.813,00**				**126.952.581.594,30**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kantor DPKPP**	**90 Persen**	**3.456.255.375**	**DAU**	**-**	**90 Persen**	**3.625.665.738,00**
5.01.01. 2.01.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kantor DPKPP**	**93 Persen**	**34.172.800**	**DAU**	**-**	**100 Persen**	**63.500.000**
5.01.01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor DPKPP	3 Dok	**9.174.200**	DAU	-	3 Dok	26.500.000
5.01.01. 2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor DPKPP	1 Dok	**4.999.600**	DAU	-	2 Dok	11.000.000
5.01.01. 2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	Kantor DPKPP	1 Dok	4.999.600	DAU	-	1 Dok	5.000.000
5.01.01. 2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kantor DPKPP	1 Dok	4.999.800	DAU	-	1 Dok	5.000.000
5.01.01. 2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kantor DPKPP	1 Dok	4.999.800	DAU	-	1 Dok	5.000.000
5.01.01. 2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor DPKPP	10 Lap	4.999.800	DAU		10 Lap	11.000.000
5.01.01. 2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kantor DPKPP**	**100 Persen**	**2.675.604.875**	**DAU**	**-**	**100 Persen**	**2.649.765.738**
5.01.01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor DPKPP	28 Orang/ Bulan	2.664.624.775	DAU	-	392 Orang/ Bulan	2.636.265.738

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
5.01.01. 2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor DPKPP	5 Lap	5.980.700	DAU	-	5 Lap		8.500.000
5.01.01. 2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dalam dan Luar Daerah	4 Lap	4.999.400	DAU	-	14 Lap		5.000.000
5.01.01. 2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kantor DPKPP**	**100 Persen**	**45.000.000**	**DAU**		**100 Persen**		**85.000.000,00**
5.01.01. 2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kantor DPKPP	- -	-	DAU	-	28 Paket		40.000.000
5.01.01. 2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor DPKPP	2 Orang	45.000.000	DAU	-	6 Orang		45.000.000
5.01.01. 2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kantor DPKPP**	**100 Persen**	**216.937.800**	**DAU**		**100 Persen**		**123.000.000,00**
5.01.01. 2.06. 01	Penyediaan Komponen Instasi Listrik/Penerangan bagunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor DPKPP	1 Paket	**1.496.100**	DAU	-	1 Paket		2.000.000
5.01.01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor DPKPP	1 Paket	**100.000.000**	DAU	-	1 Paket		24.000.000
5.01.01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor DPKPP	1 Paket	**2.499.700**	DAU	-	1 Paket		3.000.000
5.01.01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kantor DPKPP	7 Dok	**27.400.000**	DAU	-	7 Dok		12.000.000
5.01.01. 2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor DPKPP	12 Lap	**9.992.000**	DAU	-	12 Lap		12.000.000
5.01.01. 2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor DPKPP	6 Lap	**75.550.000**	DAU	-	6 Lap		70.000.000
5.01.01. 2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dalam & Luar Daerah**	**100 Persen**	**219.139.900**	**DAU**		**100 Persen**		**464.900.000,00**

BAPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01. 2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor DPKPP	12 Lap	10.259.900	DAU	-	12 Lap	5.000.000
5.01.01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor DPKPP	12 Lap	63.630.000	DAU	-	12 Lap	78.900.000
5.01.01. 2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor DPKPP	12 Lap	5.570.000	DAU	-	12 Lap	6.000.000
5.01.01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor DPKPP	12 Lap	139.680.000	DAU	-	16 Lap	375.000.000
5.01.01. 2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Halut**	**100 Persen**	**265.400.000**	**DAU**		**100 Persen**	**239.500.000,00**
5.01.01. 2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Halut	7 Unit	88.000.000	DAU	-	7 Unit	88.000.000
5.01.01. 2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Halut	6 Unit	9.900.000	DAU	-	6 Unit	60.000.000
5.01.01. 2.09. 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Halut	1 Unit	17.500.000	DAU	-	6 Unit	13.300.000
5.01.01. 2.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Halut	1 Unit	150.000.000	DAU	-	2 Unit	78.200.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**PERSENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**15,21 Persen**	**545.946.900**	**DAU**		**13,94 Persen**	**6.029.970.988,00**
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	**Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**100 Persen**	**175.148.400**			**100 Persen**	**271.520.988,00**
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah dilokasi Rawan Beencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupten/Kota	Kabupaten Halmahera Utara	- -	-	**DAU**		2 Dok	99.020.988
1 04 02 2.01 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	Jumlah Dokumen data Rumah Korban bencana Kabupaten/ Kota kejadian sebelumnya yang beelum tertangani	Kabupaten Halmahera Utara	1 Dok	90.148.400	**DAU**	-	1 Dok	95.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data calon penerima Rumah bagi Korban Bencana Kaputen/Kota atau yang terkena relokasi progaraam Kabupaten/kota yang terverifikasi	Kabupaten Halmahera Utara	2 Dok	85.000.000	DAU	-	2 Dok	77.500.000
1 04 02 2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten**	**Persentase pelaksanaan Persiapan Penyediaan perumahan bagi korban Bencana, terkena Relokasi Program dan Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR)**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**100 Persen**	**10.000.000**	DAU	-	**100 Persen**	**93.450.000**
1 04 02 2.02 01	Sosialisai Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar Teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban benca Kabupaten/Kota	Kabupaten Halmahera Utara	20 Orang	10.000.000	DAU	-	20 Orang	50.700.000
1 04 02 2.02 06	Koordinasi untuk menyepakati penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah dokumen data penerima bantuan berdasarkan jenis layanan	Kabupaten Halmahera Utara	1 Dok	-	DAU	-	1 Dok	42.750.000
1 04 02 2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten**	**Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Terkena Relokasi Program dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**100 Persen**	**345.400.000**	**DAU**	**-**	**100Persen Persen**	**5.605.000.000**
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terrehabilitasi	Kabupaten Halmahera Utara	- -	-	DAU	-	250 Unit -	1.000.000.000
1 04 02 2.03 03	Pengadaan Lahan untuk Pembanguanan Rumah Bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Kabupaten Halmahera Utara	4,3 Ha	-	DAU		3 Ha	700.000.000
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban beencana Kabupaten/Kota yang terbangun	Kabupaten Halmahera Utara	1 Unit	150.000.000	DAU		Unit	405.000.000
1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus bagi korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokaasi Program Kabupaten/Kota yang terbangun	Kabupaten Halmahera Utara	1 Unit Rumah	195.400.000	DAU	-	3 Unit Rumah	
			Kabupaten Halmahera Utara			DAU	-	175 Unit Rumah	3.500.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 04 02 2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/Atau Rumah Khusus**	**Persentase Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupatean /Kota atau yang terkena Relokasi program Kabupaten/Kota yang terbangun**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**90 Persen**	**15.398.500**	**DAU**	**-**	**90 Persen**	**60.000.000**
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengeloaan kaelembagaan bagi paemilik,penghuni rumah susun	Kabupaten Halmahera Utara	1 Lap	15.398.500	DAU	-	1 Lap	60.000.000
1 04 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**RASIO LUAS KAWASAN KUMUH PERKOTAAN SESUAI SK YANG TERLAH DITANGANI (PERSEN)**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**10,5 Persen**	**16.239.999.700**	**DAU**		**11.31 Persen**	**6.516.075.030,00**
1 04 03 2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase luas Kawasan Permukiman Kumuh yang direncanakan untuk penataan dan peningkatan**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**100 Persen**	**60.000.000**	**DAU**		**100 Persen**	**3.516.075.030,00**
1 04 03 2.02 0014	Suvei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lahan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Halmahera Utara	1 Dok	60.000.000			1 Dok	300.000.000
1 04 03 2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha**	**Persentase Rumah Layak Huni yang terbangun dikawasan Pemukiman Kumuh.**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**100 Persen**	**16.179.999.700**	**DAU/DAK**		**100 Persen**	**3.000.000.000,00**
1 04 03 2.02 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Kabupaten Halmahera Utara	5 Unit Rumah	130.000.000	DAU		5 Unit	216.075.030
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang terverifikasi	Kabupaten Halmahera Utara	1 Dok	49.999.700	DAU		1 Dok	
1 04 03 2.03 0009	Pelaksanaan Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Kabupaten Halmahera Utara	10 Ha	16.000.000.000	**DAK**		10 Ha	3.000.000.000
1 04 05	**PROGRAM PENINGAKATAN PRASARAN, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**PERSENTASE KETERLAKSAAN PENINGKATAN PRASARANA, SARANADAN UTILITAS UMUM**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**100 Persen**	**2.309.055.711**	**DAU**	**-**	**95,0 Persen**	**500.000.000**
1 04 05 2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU perumahan**	**Persentase Keterlaksanaan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**100 Persen**	**2.309.055.711**			**100 Persen**	**500.000.000**
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Halmahera Utara	1 Dok	400.000.000	DAU		1 Dok	100.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi Hunian	Kabupaten Halmahera Utara	1 Lokasi	1.898.560.711	DAU	-	2 Lokasi	300.000.000
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Jumlah Laporan Hasil koordinasi dan singkonisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Ulitas Umum Perumahan	Kabupaten Halmahera Utara	1 Lap	10.495.000	DAU	-	1 Lap	100.000.000
2 10 03	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**PRESENTASE PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**100 Persen**	**260.239.000**	**DAU**	-	**100 Persen**	**100.000.000**
2 10 03 3.01	**Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Presentase Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**100 Persen**	**250.009.000**	**DAU**		**100 Persen**	**100.000.000**
2 10 03 3.01 0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Kabupaten Halmahera Utara	1 Dok	250.009.000	DAU	-	1 Dok	150.000.000
2 10 03 4.03	**Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota**	**Presentase Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**100 Persen**	**10.230.000**	**DAU**		**100 Persen**	
2 10 03 4.03 0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Halmahera Utara	1 Dok	10.230.000	DAU	-	1 Dok	100.000.000
2 10 05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBAGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**100 Persen**	**905.998.400,00**	**DAU**	-	**95 Persen**	**2.500.000.000**
2 10 05 2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah**	**Presentase Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**100 Persen**	**905.998.400,00**	**DAU**		100 Persen	**2.500.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 10 05 2.01 01	Penetapan daftar Masyarakat penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Keputusan Bupati/wali Kota tentang penetapan Penerima Santunan Tanah	Kabupaten Halmahera Utara	1 Dok	50.000.000,00	DAU	-	1 Dok	1.728.392.086
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sngkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen dan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Halmahera Utara	1 Dok	Rp 105.998.400	DAU	-	1 Dok	771.607.914
2 10 05 2.01 04	Penyelesaian Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Kabupaten Halmahera Utara	1 Lap	Rp 750.000.000	DAU	-	1 Lap	750.000.000
J U M L A H					**23.717.495.086,00**				**19.271.711.756,00**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**TOBELO**	**90%**	**5.060.998.935**			**100%**	**5.512.258.829**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	**TOBELO**	**100%**	**19.000.000**			**100%**	**19.380.000**
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TOBELO	3 Dokumen	10.000.000	DAU		3	10.200.000
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TOBELO	1 Dokumen	1.000.000	DAU		2	1.020.000
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TOBELO	1 Dokumen	1.000.000	DAU		1	1.020.000
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	TOBELO	1 Dokumen	1.000.000	DAU		1	1.020.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	TOBELO	1 Dokumen	1.000.000	DAU		1	1.020.000
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TOBELO	2 Laporan	4.000.000	DAU		1	4.080.000
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TOBELO	1 Laporan	1.000.000	DAU		1	1.020.000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**TOBELO**	**100%**	**4.382.498.935**			**100%**	**4.820.188.829**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	TOBELO	1534 Orang/Bulan	4.375.498.935	DAU		70	4.813.048.829
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	TOBELO	1 Dokumen	2.000.000	DAU		1 Dok.	2.040.000
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TOBELO	1 Laporan	5.000.000	DAU		1	5.100.000
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan BMD Pada Perangkat Daerah**	**TOBELO**	**100%**	**6.500.000**			**100%**	**6.630.000**
1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	TOBELO	1 Dokumen	5.500.000	DAU		1	5.610.000
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	TOBELO	12 Laporan	1.000.000	DAU		12	1.020.000
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**TOBELO**	**95%**	**129.500.000**			**100%**	**132.090.000**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	TOBELO	1 Paket	50.000.000	DAU		1	51.000.000
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	TOBELO	2 Orang	30.000.000	DAU		2	30.600.000
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi peraturan perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	TOBELO	50 Orang	19.500.000	DAU		50	19.890.000
1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	TOBELO	2 Orang	30.000.000	DAU		2	30.600.000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**TOBELO**	**100%**	**172.000.000**			**100%**	**175.440.000**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	TOBELO	1 Paket	5.000.000	DAU		1	5.100.000
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TOBELO	1 Paket	12.000.000	DAU		1	12.240.000
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	TOBELO	1 Paket	5.000.000	DAU		1	5.100.000
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	TOBELO	1 Paket	5.000.000	DAU		1	5.100.000
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	TOBELO	12 Paket	6.000.000	DAU		12	6.120.000
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	TOBELO	6 Dokumen	21.000.000	DAU		6	21.420.000
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	TOBELO	1 Paket	6.000.000	DAU		1	6.120.000
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	TOBELO	12 Laporan	12.000.000	DAU		12	12.240.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TOBELO	12 Laporan	100.000.000	DAU		12	102.000.000
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**TOBELO**	**95%**	**60.000.000**			**100%**	**61.200.000**
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	TOBELO	1 Unit	60.000.000	DAU		1	61.200.000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**TOBELO**	**95%**	**54.000.000**			**100%**	**55.080.000**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TOBELO	12 Laporan	19.000.000	DAU		12	19.380.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	TOBELO	12 Laporan	35.000.000	DAU		12	35.700.000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**TOBELO**	**90%**	**237.500.000**			**100%**	**242.250.000**
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	TOBELO	5 Unit	150.000.000	DAU		6	153.000.000
1	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	TOBELO	2 Unit	12.500.000	DAU		2	12.750.000
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TOBELO	1 Unit	50.000.000	DAU		1	51.000.000
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TOBELO	2 Unit	25.000.000	DAU		2	25.500.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	**05**	**02**			**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	**Rasio Personil Satpol-PP per Satuan Penduduk (per 10 ribu Penduduk)**		**17,18**	**4.575.781.385**			**17,31**	**4.667.297.013**
						Rasio Personil Linmas persatuan penduduk (per 10 ribu penduduk)		**59,7**				**59,7**	
						Persentase Penegakan PERDA (atas kasus pelenggaran Perda)		**90%**				**90%**	
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan**	**Halut**	**95%**	**3.485.317.385**			**95%**	**3.555.023.733**
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan PerlindunganMasyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Halut	12 Dokumen	24.000.000	DAU		12	24.480.000
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Halut	12 Dokumen	75.000.000	DAU		12	76.500.000
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	TOBELO	100 Orang	100.000.000	DAU		100	102.000.000
1	05	02	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	TOBELO	6 Dokumen	90.000.000	DAU		6	91.800.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	TOBELO	12 Dokumen	6.000.000	DAU		2	6.120.000
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Halut	60 Laporan	2.970.880.440	DAU		60	3.030.298.049
1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	TOBELO	48 Laporan	119.436.945	DAU		48	121.825.684
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Halut	12 Laporan	20.000.000	DAU		12	20.400.000
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	TOBELO	50 Unit	80.000.000	DAU		10	81.600.000
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentasi penyelesaian penegakan Perda dan perkada**	**Halut**	**90%**	**810.464.000**			**90%**	**826.673.280**
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	TOBELO	3 Laporan	110.000.000	DAU		3	112.200.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	TOBELO	12 Laporan	266.000.000	DAU		12	271.320.000
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	TOBELO	12 Laporan	434.464.000	DAU		12	443.153.280
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah PPNS yang mengikuti diklat**	**Halut**	**100%**	**280.000.000**			**100%**	**285.600.000**
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	TOBELO	3 Laporan	280.000.000	DAU		3	285.600.000
1	05	04			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Tingkat Waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**		**15 menit**	**948.080.040**			**15 menit**	**969.687.541**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kejadian kebakaran yang tertangani**	**Halut**	**100%**	**876.500.040**			**100%**	**894.030.041**
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	TOBELO	12 Dokumen	257.920.000	DAU		12	263.078.400
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	TOBELO	12 Laporan	448.580.040	DAU		12	457.551.641

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	TOBELO	5 Orang	70.000.000	DAU		5	71.400.000
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	TOBELO	10 Unit	100.000.000	DAU		10	102.000.000
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran yang dilakukan**	**Halut**	**100%**	**7.455.000**			**100%**	**10.250.000**
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	TOBELO	1 Dokumen	2.205.000	DAU		1	5.000.000
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	TOBELO	1 Dokumen	5.250.000	DAU		1	5.250.000
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Persentase kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Halut**	**95%**	**5.000.000**			**100%**	**5.100.000**
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	TOBELO	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1	5.100.000
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Halut**	**100%**	**55.125.000**			**100%**	**56.227.500**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	TOBELO	50 Orang	55.125.000,00	DAU		50	56.227.500
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang dilakukan**	**Halut**	**100%**	**4.000.000,00**			**100%**	**4.080.000,00**
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	TOBELO	5 Laporan	4.000.000,00	DAU		5 Laporan	4.080.000
JUMLAH									**10.584.860.360**				**11.149.243.382**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKSI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 . 06	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial**								
1 . 06 . 01	**DINAS SOSIAL**								
1. 06. 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian Kinerja perangkat Daerah**		**90,0**	**2.713.374.814**	**DAU**		**90,0**	**2.904.462.696**
1 . 06 .01. 2 . 01	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**		**100%**	**12.618.600**	**DAU**		**100%**	**57.497.500**
1 .06 .01.2.01.0001	penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	3 Dok	4.118.600	DAU		2 Dok	48.997.500
1.06 .01. 2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 Dok	2.500.000	DAU		1 Dok	2.500.000
1.06 .01. 2 .01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 Dok	1.500.000	DAU		1 Dok	1.500.000
1.06 .01. 2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 Dok	1.500.000	DAU		1 Dok	1.500.000
1.06 .01. 2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 Dok	1.500.000	DAU		1 Dok	1.500.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKSI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01. 2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kenerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	4 Lap	1.500.000	DAU		4 Lap	1.500.000
1 . 06 .01. 2 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**tingkat realisasi pelaksanaan anggaran prangkat daerah**		**100%**	**2.026.515.536**	**DAU**		**100%**	**1.968.047.482**
1 .06 .01. 2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	546 OB	2.025.015.536	DAU		624 OB	1.963.504.985
1 .06 .01. 2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 Lap	1.500.000	DAU		1 Lap	4.542.497
1 . 06 .01. 2 . 05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**cakupan administrasi kepegawaian perangkat Daerah**		**95%**	**96.000.000**	**DAU**		**95%**	**111.000.000**
1. 06 .01. 2 .05.0002	Pengadaan pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 paket	36.000.000	DAU		1 paket	36.000.000
1. 06 .01. 2 .05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang - undangan	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	4 orang	60.000.000	DAU		5 orang	75.000.000
1 . 06 . 01 . 2 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**cakupan administrasi umum perangkat daerah(persen)**		**95%**	**335.369.878**	**DAU**		**95%**	**476.417.284**
1 .06 . 01 .2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 paket	1.300.000	DAU		1 paket	2.796.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKSI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 .06 .01 .2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 paket	85.069.878	DAU		1 paket	199.398.833
1 .06 .01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 paket	13.000.000	DAU		1 paket	15.025.600
1 .06 .01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 Dok	18.000.000	DAU		1 Dok	17.983.333
1. 06 .01 .2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 Lap	18.000.000	DAU		1 Lap	21.213.518
1 .06 .01 .2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 Lap	200.000.000	DAU		1 Lap	220.000.000
1 .06 . 01 .2 .08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**cakupan penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)**		**100%**	**90.000.000**	**DAU**		**100%**	**137.629.630**
1 .06 .01 .2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 Lap	50.000.000	DAU		1 Lap	102.434.630
1 .06 .01 .2 .08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 Lap	15.000.000	DAU		12 Lap	6.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKSI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 .06 .01 .2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyedian jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	1 Lap	25.000.000	DAU		1 Lap	29.195.000
1 . 06 . 01 .2 .09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah(persen)**		**100%**	**152.870.800**	**DAU**		**100%**	**153.870.800**
1 .06 .01 .2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	3 Unit	152.870.800	DAU		3 Unit	153.870.800
1 .06. 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Jumlah jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang telah di kembangkan atau diberdayakan (kumulatif)**		**8 Jenis**	**361.400.000**	**DAU**		**9 Jenis**	**372.322.906**
1.06. 02. 2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**terlaksannya pemberdayaan bagi masyarakat yang berperan dalam kelembagaan kesejahteraan sosial**		**80%**	**361.400.000**	**DAU**		**100%**	**372.322.906**
1.06. 02. 2.03. 0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	30 Orang	109.800.000	DAU		35 Org	175.487.906
1 06 02 2.03 .0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	17 orang	81.600.000	DAU		17 orang	95.952.500
1 06 02 2.03 .0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	17 Keluarga	170.000.000	DAU		17 Keluarga	100.882.500

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKSI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 06. 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentasi penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**		**100%**	**500.000.000**	**DAU**		**100%**	**662.339.180**
1 06 04 2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti**		**100%**	**500.000.000**	**DAU**		**100%**	**662.339.180**
1 06 04 2.01 .0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	700 orang	250.000.000	DAU		700 orang	364.241.680
1 06 04 2.01 .0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	85 orang	250.000.000	DAU		500 orang	298.097.500
1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase penurunan jumlah PMKS (terhadap tahun sebelumnya)**		**-0,10**	**200.000.000**	**DAU**		**-0,10**	**1.481.719.508**
1 06 05 2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah PMKS yang memiliki kemandirian ekonomi**		**100%**	**200.000.000**	**DAU**		**100%**	**1.481.719.508**
1 06 05 2.02 0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	250 orang	100.000.000	DAU		250 orang	318.000.000
1 06 05 2.02 0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	250 orang	100.000.000	DAU		250 orang	1.163.719.508

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKSI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten**		**100%**	**400.000.000**	**DAU**		**100%**	**140.000.000**
1 06 06 2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**presentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**100%**	**200.000.000**	**DAU**		**100%**	**90.000.000**
1 06 06 2.01 0001	Penyedian Makanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	500 orang	100.000.000	DAU		500 orang	40.000.000
1 06 06 2.01 0002	Penyedian Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	500 orang	100.000.000	DAU		500 orang	50.000.000
1 06 06 2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**fasilitas yang diterima oleh masyarakat yang berperan dalam lembaga kesejahteraan sosial.**		**100%**	**200.000.000**	**DAU**		**100%**	**50.000.000**
1 06 06 2.02 0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	3 kampung	100.000.000	DAU		1 kampung	50.000.000
1 06 06 2.02 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Halmahera Utara, Tobelo, Gamsungi	40 orang	100.000.000	DAU		40 orang	50.000.000
JUMLAH					**4.174.774.814**				**5.560.844.290**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**		**90%**	**3.733.672.506,50**			**90%**	**4.010.545.787,00**
1 05 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**		**100%**	**41.964.600**		**1**	**100%**	**100.690.000**
1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tobelo	3 Dok	30.000.200		1	3 Dok	81.810.000
1 05 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tobelo	1 Dok	1.499.900		1	1 Dok	1.500.000
1 05 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tobelo	1 Dok	1.499.900		1	1 Dok	1.500.000
1 05 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tobelo	1 Dok	1.499.500		1	1 Dok	1.500.000
1 05 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tobelo	1 Dok	1.499.500		1	1 Dok	1.500.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobelo	4 Lap	5.965.600		1	4 Lap	12.880.000
1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**		**100%**	**3.179.616.791,50**		**1**	**100%**	**3.180.978.919**
1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tobelo	378 OB	3.171.378.918,600		1	378 OB	3.171.378.919
1 05 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tobelo	1 Lap	8.237.872,900		1	1 Lap	9.600.000
1 05 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**		**100%**	**100.000.000**		**2**	**100%**	**118.130.000**
1 05 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	100.000.000		2	50 Orang	118.130.000
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**		**100%**	**138.572.900,00**		**2**	**100%**	**294.460.000**
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kantor BPBD	1 Paket	2.498.200		2	1 Paket	2.500.000
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kantor BPBD	1 Paket	18.465.700		2	1 Paket	30.000.000
1 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kantor BPBD	2 Dok	3.800.000		2	2 Dok	3.960.000
1 05 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor BPBD	1 Lap	7.560.000		2	1 Lap	12.000.000
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	1 Lap	106.249.000		2	1 Lap	246.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**		**100%**	**158.002.815,00**		**2**	**100%**	**158.281.868**
1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor BPBD	1 Lap	7.503.500,00		2	1 Lap	7.503.500
1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kantor BPBD	1 Lap	103.779.115,00		2	1 Lap	103.800.000
1 05 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kantor BPBD	1 Lap	10.760.000		2	1 Lap	11.000.000
1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kantor BPBD	1 Lap	35.960.200		2	1 Lap	35.978.368
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**		**100%**	**115.515.400**		**2**	**100%**	**158.005.000**
1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kantor BPBD	7 Unit	115.515.400,00		2	7 Unit	158.005.000
1 05 03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase keterlaksanaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana**		**100%**	**1.647.865.980**		**I**	**100%**	**2.150.000.000**
1 05 03 2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (%)**		**100%**	**200.000.000**		**1**	**100%**	**93.517.026**
1 05 03 2.01 0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		1 Dok	100.000.000		1	0 Dok	-

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 03 2.01 0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		30 Orang	100.000.000		1	30 Orang	93.517.026
1 05 03 2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)**		**0%**	**100.000.000**		**1**	**0%**	**150.000.000**
1 05 03 2.02 0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelesaian akar masalah risiko bencana (Per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kab. Halut	1 Keg	100.000.000		1	1 Keg	150.000.000
1 05 03 2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)**		**100%**	**1.294.860.080**		**1**	**100%**	**1.671.482.974**
1 05 03 2.03 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 Jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Kab. Halut	1 Dok	601.343.054,00		1	1 Dok	871.482.974
1 05 03 2.03 0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Kab. Halut	1500 Org	123.517.026,00		1	1500 Org	200.000.000
1 05 03 2.03 0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Halut	1500 Org	570.000.000,00		1	1500 Org	600.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 03 2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Cakupan penataan sistem dasar penanggulangan bencana (%)**		**100%**	**53.005.900**		**2**	**100%**	**235.000.000**
1 05 03 2.04 0003	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Halut	1 Dok	-		2	1 Dok	35.000.000
1 05 03 2.04 0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		1 Keg	53.005.900,00		1	1 Keg	200.000.000
JUMLAH					**5.381.538.486,50**				**6.160.545.787,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobelo	4 Lap	5.965.600		1	4 Lap	12.880.000
1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**		**100%**	**3.179.616.791,50**		**1**	**100%**	**3.180.978.919**
1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tobelo	378 OB	3.171.378.918,600		1	378 OB	3.171.378.919
1 05 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tobelo	1 Lap	8.237.872,900		1	1 Lap	9.600.000
1 05 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**		**100%**	**100.000.000**		**2**	**100%**	**118.130.000**
1 05 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	100.000.000		2	50 Orang	118.130.000
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**		**100%**	**138.572.900,00**		**2**	**100%**	**294.460.000**
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kantor BPBD	1 Paket	2.498.200		2	1 Paket	2.500.000
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kantor BPBD	1 Paket	18.465.700		2	1 Paket	30.000.000
1 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kantor BPBD	2 Dok	3.800.000		2	2 Dok	3.960.000
1 05 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor BPBD	1 Lap	7.560.000		2	1 Lap	12.000.000
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	1 Lap	106.249.000		2	1 Lap	246.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**		**100%**	**158.002.815,00**		**2**	**100%**	**158.281.868**
1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor BPBD	1 Lap	7.503.500,00		2	1 Lap	7.503.500
1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kantor BPBD	1 Lap	103.779.115,00		2	1 Lap	103.800.000
1 05 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kantor BPBD	1 Lap	10.760.000		2	1 Lap	11.000.000
1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kantor BPBD	1 Lap	35.960.200		2	1 Lap	35.978.368
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**		**100%**	**115.515.400**		**2**	**100%**	**158.005.000**
1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kantor BPBD	7 Unit	115.515.400,00		2	7 Unit	158.005.000
1 05 03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase keterlaksanaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana**		**100%**	**1.647.865.980**		**I**	**100%**	**2.150.000.000**
1 05 03 2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (%)**		**100%**	**200.000.000**		**1**	**100%**	**93.517.026**
1 05 03 2.01 0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		1 Dok	100.000.000		1	0 Dok	-

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 03 2.01 0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		30 Orang	100.000.000		1	30 Orang	93.517.026
1 05 03 2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)**		**0%**	**100.000.000**		**1**	**0%**	**150.000.000**
1 05 03 2.02 0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelesaian akar masalah risiko bencana (Per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kab. Halut	1 Keg	100.000.000		1	1 Keg	150.000.000
1 05 03 2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)**		**100%**	**1.294.860.080**		**1**	**100%**	**1.671.482.974**
1 05 03 2.03 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 Jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Kab. Halut	1 Dok	601.343.054,00		1	1 Dok	871.482.974
1 05 03 2.03 0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Kab. Halut	1500 Org	123.517.026,00		1	1500 Org	200.000.000
1 05 03 2.03 0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Halut	1500 Org	570.000.000,00		1	1500 Org	600.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 03 2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Cakupan penataan sistem dasar penanggulangan bencana (%)**		**100%**	**53.005.900**		**2**	**100%**	**235.000.000**
1 05 03 2.04 0003	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Halut	1 Dok	-		2	1 Dok	35.000.000
1 05 03 2.04 0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		1 Keg	53.005.900,00		1	1 Keg	200.000.000
JUMLAH					**5.381.538.486,50**				**6.160.545.787,00**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE	URUSN / BIANG URUSN PMERINTAH DARAH DN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.07	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRSI**		**Disnakertrans**						
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTH RAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah**	**Disnakertrans**	**90,0**	**2.629.909.726,00**			**90,0**	**2.870.158.495**
2.07.01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	**Disnakertrans**	**100%**	**15.500.000,00**			**100%**	**15.500.000**
2.07.01 2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnakertrans	3 Dok	4.000.000,00			3 Dok	4.000.000
2.07.01 2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disnakertrans	1 Dok	2.000.000,00			1 Dok	2.000.000
2.07.01 2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disnakertrans	1 Dok	2.000.000,00			1 Dok	2.000.000
2.07.01 2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Disnakertrans	1 Dok	2.000.000,00			1 Dok	2.000.000
2.07.01 2.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Disnakertrans	1 Dok	2.000.000,00			1 Dok	2.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSN / BIANG URUSN PMERINTAH DARAH DN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01 2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kenerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnakertrans	1 Lap	3.500.000,00			1 Lap	3.500.000
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah**	**Disnakertrans**	**100%**	**2.068.515.526**			**100%**	**2.244.151.490**
2.07.01.2.02. .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disnakertrans	21 Org/12 Bln	2.066.015.526			21 Org/12 Bln	2.241.651.490
2.07.01.2.02. .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnakertrans	5 Lap	2.500.000			5 Lap	2.500.000
2.07.01 2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Rasio efektifitas retribusi daerah bidang penempatan tenaga kerja**	**Disnakertrans**		**100.000.000**				
2.07.01 2.04 .0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Disnakertrans	1 Dokumen	100.000.000			12 Bln	100.000.000
01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Disnakertrans**	**100%**	**34.228.000**			**100%**	**68.456.000**
2.01.01.2.05. .0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah	2 Org	34.228.000			4 Org	68.456.000
2.07.01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**Disnakertrans**	**100%**	**143.527.500**			**100%**	**169.856.905**
2.07.01 2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Disnakertrans	12 Paket	36.266.000			12 Bln	70.577.905
2.07.01 2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan & penggandaan yang disediakan	Disnakertrans	12 Paket	8.000.000			12 Bln	8.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSN / BIANG URUSN PMERINTAH DARAH DN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01 2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang Disediakan	Disnakertrans	12 Paket	14.982.500			12 Bln	7.000.000
2.07.01 2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	10 Laporan	84.279.000			10 Laporan	84.279.000
2.07.01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Disnakertrans**	**100%**	**218.322.700**			**100%**	**207.510.600**
2.07.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnakertrans	1 Lap	109.229.300			1 Lap	109.229.300
2.07.01.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disnakertrans	1 Lap	33.828.400			1 Lap	23.000.000
2.07.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disnakertrans	1 Lap	75.265.000			1 Lap	75.281.300
2.07.01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Disnakertrans**	**100%**	**149.816.000**			**100%**	**164.683.500**
2.07.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Disnakertrans	2 Unit	139.266.000			2 Unit	154.133.500
2.07.01.2.09. .0006	Pemerliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Disnakertrans	10 Unit	10.550.000			10 Unit	10.550.000
2 07	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA**								
2 07 03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peningkatan peserta terfasilitasi pelatihan kerja**	**Disnakertrans**	**25,0**	**615.380.000**			**25,0**	**785.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSN / BIANG URUSN PMERINTAH DARAH DN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 03 2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Tingkat Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Disnakertrans**	**100%**	**565.380.000**			**100%**	**685.000.000**
2 07 03 2.01 .0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Halut	10 Org	200.000.000			10 Org	250.000.000
2 07 03 2.01 .0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Penigkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Luar Daerah	3 Lmbga	50.000.000			3 Lmbga	80.000.000
2 07 03 2.01 .0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kec. Tobelo utara (Desa Kokotajaya 1 unit), Kec. Loloda Kepulauan (Desa Salube 1 unit), Kec. Tobelo (Desa Gamsungi 4 unit , gura 3 unit) Kec.Kao Utara (Desa Gamlaha 1 unit)	10 Unit	315.380.000			10 Unit	355.000.000
2 07 03 2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat pengukuran Produktivitas tenaga kerja tingkat daerah**	**Disnakertrans**	**100%**	**50.000.000**			**100%**	**100.000.000**
2 07 03 2.05 .0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kompetensi dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Disnakertrans	1 Dok	50.000.000			1 Dok	100.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSN / BIANG URUSN PMERINTAH DARAH DN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentasi jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**Halut**	**49,27%**	**30.000.000**			**45,78**	**100.000.000**
2 07 04 2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase(%) Informasi Pasar Kerja**	**Halut**	**100%**	**30.000.000**			**100%**	**100.000.000**
2 07 04 2.03 .0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Keja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Halut	15 Org	20.000.000			15 Org	50.000.000
2 07 04 2.03 .0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Halut	15 Org	10.000.000			15 Org	50.000.000
2 07 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase penyelesaian Kasus Perselisihan Industrial**	**Halut**	**100%**	**90.000.000**			**100%**	**200.000.000**
2 07 05 2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama**	**Halut**	**100%**	**60.000.000**			**100%**	**150.000.000**
2 07 05 2.01 .0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek Serta Pengupahan	Halut	510 Lap	60.000.000			510 Lap	150.000.000
2 07 05 2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Halut**	**100%**	**30.000.000**			**100%**	**50.000.000**
2 07 05 2.02 .00 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Halut	12 kasus	30.000.000			12 kasus	50.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSN / BIANG URUSN PMERINTAH DARAH DN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								
3 32 03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Keterlaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Kab Halut**	**100%**	**31.499.800**			**100%**	**250.000.000**
3 32 03 2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Persebaran Penduduk di kawasan transmigrasi**	**Kab Halut**	**100%**	**31.499.800**			**100%**	**250.000.000**
3.32 03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Luar Provinsi**	10 Lap	31.499.800			10 Lap	250.000.000
3 32 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Keterlaksanaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Kao Barat**	**100%**	**56.226.000**			**100%**	**150.000.000**
3 32 04 2.01	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Terlaksananya Pengembangan Satuan Pemukiman**	**Kao Barat**	**100%**	**56.226.000**			**100%**	**150.000.000**
3 32 04 2.01 .0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kao Barat	3 SP	56.226.000			3 SP	150.000.000
JUMLAH					**3.453.015.526**				**4.355.158.495**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERNGKAT DAERAH: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkat Daerah**	**DP3AKB**	**90%**	**3.460.283.043**			**90%**	**3.505.595.947**
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentasi capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas**	**DP3AKB**	**100%**	**31.000.000**			**100%**	**36.000.000**
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP3AKB	4 dok	18.000.000	DAU		4 dok	18.500.000
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3AKB	1 dok	3.000.000	DAU		1 dok	3.500.000
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DP3AKB	1 dok	1.000.000	DAU		1 dok	2.000.000
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DP3AKB	1 dok	1.000.000	DAU		1 dok	2.000.000
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DP3AKB	1 dok	1.000.000	DAU		1 dok	2.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3AKB	4 lap	7.000.000	DAU		4 lap	8.000.000
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**DP3AKB**	**100%**	**2.878.095.947**			**100%**	**2.878.595.947**
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DP3AKB	406 org	2.870.095.947	DAU		406 org	2.870.095.947
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3AKB	4 lap	8.000.000	DAU		4 lap	8.500.000
2.08.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**DP3AKB**	**100%**	**32.000.000**			**100%**	**34.000.000**
2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DP3AKB	1 dok	1.000.000	DAU		1 dok	2.000.000
2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DP3AKB	12 lap	1.000.000	DAU		12 lap	2.000.000
2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DP3AKB	12 lap	30.000.000	DAU		12 lap	30.000.000
2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase capaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**DP3AKB**	**100%**	**115.000.000**			**100%**	**125.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DP3AKB	29 Paket	25.000.000	DAU		29 Paket	25.000.000
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DP3AKB	4 org	90.000.000	DAU		4 org	100.000.000
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DP3AKB**	**100%**	**182.400.000**			**100%**	**198.000.000**
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DP3AKB	12 paket	15.400.000	DAU		12 paket	**17.000.000**
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DP3AKB	12 paket	15.000.000	DAU		12 paket	**16.000.000**
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DP3AKB	12 paket	8.000.000	DAU		12 paket	**10.000.000**
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DP3AKB	12 dok	6.000.000	DAU		12 dok	**7.000.000**
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP3AKB	12 lap	8.000.000	DAU		12 lap	**8.000.000**
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3AKB	30 lap	130.000.000	DAU		30 lap	**140.000.000**
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase capain ketersediaan Barang Milik Daerah**	**DP3AKB**	**85%**	**78.000.000**			**85%**	**78.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	DP3AKB	1 unit	78.000.000	DAU		1 unit	**78.000.000**
2.08.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian Penyediaan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DP3AKB**	**100%**	**97.787.096**			**100%**	**106.000.000**
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3AKB	12 lap	26.787.096	DAU		12 lap	**30.000.000**
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DP3AKB	12 lap	20.000.000	DAU		12 lap	25.000.000
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DP3AKB	12 lap	27.000.000	DAU		12 lap	27.000.000
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DP3AKB	12 lap	24.000.000	DAU		12 lap	24.000.000
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capain Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DP3AKB**	**100%**	**46.000.000**			**100%**	**50.000.000**
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DP3AKB	5 unit	46.000.000	DAU		5 unit	50.000.000
02:08:02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD**	**DP3AKB**	**46,2**	**197.000.000,00**			**46,70**	**200.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**persentase capain perempuan di Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**DP3AKB**	**6%**	**57.000.000,00**			**6,7%**	**50.000.000,00**
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	1 dok	57.000.000,00	DAU		1 dok	50.000.000,00
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase capain perempuan yang menduduki di lembaga legislatif daerah**	**DP3AKB**	**30%**	**100.000.000**			**30%**	**100.000.000**
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga yang menerima Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**DP3AKB**	**15**	**40.000.000**			**16**	**50.000.000**
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	DP3AKB	1 dok	40.000.000	DAU		1 dok	50.000.000
02:08:03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentasi korban kekerasan perempuan yang terlayani/ditangani hingga selesai**	**DP3AKB**	**100%**	**50.000.000,00**			**100%**	**60.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase desa yang mendapat layanan sosialisa pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**DP3AKB**	**15%**	**50.000.000,00**			**20%**	**60.000.000,00**
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	30 prgkt daerah	50.000.000,00	DAU		30 prgkt daerah	60.000.000,00
02:08:04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**DP3AKB**	**18,7**	**150.000.000,00**			**15,0**	**200.000.000,00**
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**DP3AKB**	**40%**	**150.000.000,00**			**41%**	**200.000.000,00**
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	1 Perangkat Daerah (uptd)	150.000.000,00	DAU		1 uptd	200.000.000,00
02:08:05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten**	**DP3AKB**	**100%**	**50.000.000,00**			**100**	**55.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian data terpilah gender dan anak**	**DP3AKB**	**100%**	**50.000.000,00**			**100%**	**55.000.000,00**
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	1 dok	50.000.000,00	DAU		1 dok	55.000.000,00
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah jenis indikator Kabupaten Layak Anak yang terpenuhi**	**DP3AKB**	**20**	**325.000.000,00**			**24**	**255.000.000,00**
2.08.06.2.01	**Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase PHA yang terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**DP3AKB**	**1%**	**150.000.000**			**1%**	**200.000.000**
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	DP3AKB	2 org	150.000.000	DAU		2 org	200.000.000
2.08.06.2.02	**Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**DP3AKB**	**8**	**175.000.000,00**			**23**	**55.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	35 org	175.000.000,00	DAU		35 org	55.000.000,00
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentasi korban kekerasan anak yang terlayani/ ditangani hingga selesai oleh instansi terkait**	**DP3AKB**	**100%**	**30.000.000,00**			**100%**	**50.000.000,00**
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian layanan pendampingan anak korban kekerasan**	**DP3AKB**	**0,049%**	**30.000.000,00**			**0,048%**	**50.000.000,00**
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	DP3AKB	20 orang	30.000.000,00	DAU		1 Perangkat Daerah	50.000.000,00
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)**	**DP3AKB**	**11**	**50.000.000,00**			**11**	**50.000.000,00**
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Remaja umur 15-19 tahun**	**DP3AKB**	**100%**	**50.000.000,00**			**100%**	**50.000.000,00**
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	17 kec	12 dok	50.000.000,00	DAK		12 dok	50.000.000,00
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**	**persentase pemakaian kontrasepsi moderan (mCPR)**	**DP3AKB**	**20,3**	**330.000.000,00**			**21,0**	**250.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03	KELUARGA BERENCANA (KB)	**Persentasi kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmeet need)**	**DP3AKB**	**9,8**				**7,4**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persentase capaian desa yang mendapatkan sosialisasi**	**DP3AKB**	**100%**	**100.000.000,00**			**100%**	**100.000.000,00**
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	DP3AKB	17 lap	100.000.000,00	DAK		17 lap	100.000.000,00
2.14.03.2.03	**Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi KB di Fasilitas Kesehatan**	**DP3AKB**	**85%**	**130.000.000,00**			**85%**	**150.000.000,00**
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3AKB	400 org	100.000.000,00	DAK		400 org	100.000.000,00
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP3AKB	39 lap	30.000.000,00	DAU		39 lap	50.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-Kb**	**persentase kampung kb yang menerima pelayanan**	**DP3AKB**	**14,29%**	**100.000.000,00**			**14,29%**	**100.000.000,00**
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	DP3AKB	28 unit	100.000.000,00	DAK		28 unit	100.000.000,00
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**DP3AKB**	**100%**	**320.000.000,00**			**100%**	**350.000.000,00**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**DP3AKB**	**100%**	**220.000.000,00**			**100%**	**250.000.000,00**
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3AKB	1 lap	170.000.000,00	DAU		1 lap	200.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3AKB	20 unit	50.000.000,00	DAK		20 unit	50.000.000,00
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**DP3AKB**	**100%**	**100.000.000,00**			**100%**	**100.000.000,00**
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	DP3AKB	196 lap	100.000.000,00	DAK		196 lap	100.000.000,00
JUMLAH					**4.962.283.043**				**4.975.595.947**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	DESA GURA KEC. TOBELO	**90%**	**3.533.170.197**	**DAU**		**90%**	**3.743.128.707**
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	DESA GURA KEC. TOBELO	**85%**	**22.500.000**	**DAU**		**85%**	**23.625.000**
2.09.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	DESA GURA KEC. TOBELO	2 Dok	10.000.000	DAU		2 Dok	10.500.000
2.09.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Dok	2.500.000	DAU		1 Dok	2.625.000
2.09.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	-	-	-	-		-	-
2.09.01.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-		-	-
2.09.01.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Peerubahan DPA- SKPD	-	-	-	-		-	-
2.09.01.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (dokumen)	DESA GURA KEC. TOBELO	1 lap	5.000.000	DAU		1 Lap	5.250.000
2.09.01.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	Tersedianya Laporan kinerja Perangkat Daerah	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Lap	5.000.000	DAU		1 Lap	5.250.000
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	DESA GURA KEC. TOBELO	**100%**	**2.635.804.197**	**DAU**		**100%**	**2.767.594.407**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.202. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DESA GURA KEC. TOBELO	25 OB	2.626.804.197	DAU		25 OB	2.758.144.407
2.09.01.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Lap	3.000.000	DAU		1 Lap	3.150.000
2.09.01.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Lap	4.000.000	DAU		1 Lap	4.200.000
2.09.01.2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Dok.	2.000.000	DAU		1 Dok.	2.100.000
2.09.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengadaan BMD pada perangkat Daerah**	DESA GURA KEC. TOBELO	**100%**	**3.000.000**	DAU		**100%**	**3.150.000**
2.09.01.2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Dok.	1.000.000	DAU		1 Dok.	1.050.000
2.09.01.2.03. 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Lap	2.000.000	DAU		1 Lap	2.100.000
2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Adminnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	DESA GURA KEC. TOBELO	**100%**	**117.920.000**	DAU		**100%**	**123.816.000**
2.09.01.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DESA GURA KEC. TOBELO	25 OP	10.000.000	DAU		29 OP	10.500.000
2.09.01.2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Dok.	10.000.000	DAU		1 Dok.	10.500.000
2.09.01.2.05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Dok.	10.000.000	DAU		1 Dok.	10.500.000
2.09.01.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DESA GURA KEC. TOBELO	5 OK	87.920.000	DAU		5 Ok	92.316.000
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DESA GURA KEC. TOBELO	**100%**	**506.846.000**	DAU		**100%**	**532.188.300**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Paket	5.000.000	DAU		1 Paket	5.250.000
2.09.01.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DESA GURA KEC. TOBELO	6 Paket	76.100.000	DAU		6 Paket	79.905.000
2.09.01.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Paket	6.711.000	DAU		1 Paket	7.046.550
2.09.01.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DESA GURA KEC. TOBELO	12 Paket	25.000.000	DAU		12 Paket	26.250.000
2.09.01.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Paket	15.000.000	DAU		1 Paket	15.750.000
2.09.01.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DESA GURA KEC. TOBELO	12 Lap	20.000.000	DAU		1 Lap	21.000.000
2.09.01.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JAKARTA, PROVINSI MALUKU UTARA DAN SELURUH KECAMATAN DI HALUT	64 Lap	359.035.000	DAU		64 Lap	376.986.750
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang**	DESA GURA KEC. TOBELO	**100%**	**95.100.000**	DAU		**100%**	**137.055.000**
2.09.01.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Lap	20.000.000	DAU		1 Lap	58.200.000
2.09.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DESA GURA KEC. TOBELO	12 Lap	25.500.000	DAU		12 Lap	26.775.000
2.09.01.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Lap	10.600.000	DAU		1 Lap	11.130.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DESA GURA KEC. TOBELO	10 Lap	39.000.000	DAU		10 Lap	40.950.000
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya Jumlah Barang Milik Daerah**	DESA GURA KEC. TOBELO	**100%**	**152.000.000**	DAU		**100%**	**155.700.000**
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Unit/12 bln	78.000.000	DAU		1 Unit/12 bln	78.000.000
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DESA GURA KEC. TOBELO	2 Unit/12 bln	74.000.000	DAU		2 Unit/12 bln	77.700.000
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan**	KAB. HALMAHERA UTARA	**33,20%**	**16.253.000**	DAU		**33,2%**	**17.065.650**
2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah**	**Cakupan Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan Kewenangan Daerah**	KAB. HALMAHERA UTARA	**100%**	**16.253.000**	DAU		**100%**	**17.065.650**
2.09.02.2.01 . 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		Unit		DAU		1 Unit	-
2.09.02.2.01 . 04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	SOFIFI	1 Laporan	16.253.000	DAU		1 Laporan	17.065.650
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Desa Berkategori Cukup/Tahan/Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan**	KAB. HALMAHERA UTARA	**74,4%**	**445.193.000**	DAU		**74,4%**	**320.452.650**
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya**	KAB. HALMAHERA UTARA	**100%**	**185.000.000**	DAU		**100%**	**47.250.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03.2.01 . 01	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Dokumen	25.000.000	DAU		1 Dokumen	26.250.000
2.09.03.2.01 . 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	10.500.000
2.09.03.2.01 . 03	Koordinasi, dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	SOFIFI	1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	10.500.000
2.09.03.2.01 . 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	DESA KAO…	1 UNIT	10.000.000	DAU		1 UNIT	10.500.000
2 09 03 2.01. 08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	KECAMATAN TOBELO	2 Laporan	90.000.000	DAU		2 Laporan	94.500.000
2 09 03 2.01. 013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Dokumen	25.000.000	DAU		1 Dokumen	26.250.000
2 09 03 2.01. 014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	TOBELO, GALELA, GALELA BARAT MALIFUT, KAO DAN KAO UTARA	12 Laporan	15.000.000	DAU		12 Laporan	15.750.000
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Cadangan Beras Kabupaten**	KAB. HALMAHERA UTARA	**100%**	**115.000.000**	DAU		**100%**	**120.750.000**
2.09.03.2.02. 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.250.000
2.09.03.2.02. 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	DESA GURA KEC. TOBELO	4 Ton	100.000.000	DAU		4 Ton	105.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03.2.02. 05	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	SELURUH KEC. KAB. HALUT (DARURAT)	4 Ton	10.000.000	DAU		4 Ton	10.500.000
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Cakupan Pencapaian target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi**	DESA GURA KEC. TOBELO	**100%**	**145.193.000**	DAU		**100%**	**152.452.650**
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Skor PPH Tingkat Konsumsi)	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Dokumen	25.000.000	DAU		1 Dokumen	26.250.000
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeka ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KECAMATAN TOBELO	1 Laporan	100.000.000	DAU		1 Laporan	105.000.000
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	SOFIFI DAN 7 KECAMATAN DI HALUT	1 Laporan	20.193.000	DAU		1 Laporan	21.202.650
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani**	DESA GURA KEC. TOBELO	**100%**	**221.253.000**	DAU		**100%**	**232.315.650**
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kewenangan Kabupaten**	**Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**	DESA GURA KEC. TOBELO	**1 Dok**	**45.000.000**	DAU		**1 Dok**	**47.250.000**
2.09.04. 201. 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Dok	45.000.000	DAU		1 Dok	47.250.000
2.09.04. 202	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa Rawan Pangan yang Tertangani**	DESA GURA KEC. TOBELO	**100%**	**176.253.000**	DAU		**100%**	**185.065.650**
2.09.04. 202. 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KAB. HALMAHERA UTARA (4 DESA RAWAN PANGAN)	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	105.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.04. 202. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gzi Kabupaten/Kota	KAB. HALMAHERA UTARA (4 DESA RAWAN PANGAN)	1 Laporan	16.253.000	DAU		1 Laporan	17.065.650
2.09.04. 202. 04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	KAB. HALMAHERA UTARA	1 Dokumen	40.000.000	DAU		1 Dokumen	42.000.000
2.09.04. 202. 05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	DESA GURA KEC. TOBELO	12 Dokumen	20.000.000	DAU		12 Dokumen	21.000.000
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase keterlaksanaan pengawasan keamanan pangan**	DESA GURA KEC. TOBELO	**100%**	**132.752.000**	**DAU**		**100%**	**139.389.600**
2.09.05.201	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pengawasan Keamanan Pangan (Persentase terhadap Rencana Tahun Berkenaan)**	DESA GURA KEC. TOBELO	**100%**	**132.752.000**	**DAU**		**100%**	**139.389.600**
2.09.05.201. 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KEC. MALIFUT	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	15.750.000
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	TOBELO DAN TOBELO TENGAH	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	15.750.000
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	DESA GURA KEC. TOBELO	1 Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokumen	52.500.000
2.09.05.2.01.09	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	JAKARTA	1 Dokumen	52.752.000	DAU		1 Dokumen	55.389.600
JUMLAH TOTAL					**4.348.621.197**				**4.452.352.257**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
2	11				Dinas Lingkungan Hidup								
2	11	00	4		**Pendapatan**				**300.000.000,00**				**300.000.000**
2	11	01	07		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Mendorong pendapatan Hasil Daerah	DLH	100%	300.000.000,00			100%	300.000.000
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (persen)**	DLH	**100%**	**11.194.806.601,40**			100%	**11.937.073.851,60**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)**	DLH	**100%**	**37.860.360,00**			100%	**75.720.720,00**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	3 Dok	13.351.800,00	DAU		3 Dok	26.703.600
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH	1 Dok	2.096.100,00	DAU		1 Dok	4.192.200
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DLH	1 Dok	2.096.100,00	DAU		1 Dok	4.192.200
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DLH	1 Dok	2.096.100,00	DAU		1 Dok	4.192.200
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DLH	1 Dok	2.096.100,00	DAU		1 Dok	4.192.200
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH	1 Laporan	11.462.760,00	DAU		1 Laporan	22.925.520

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	1 Laporan	4.661.400,00	DAU		1 Laporan	9.322.800
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)**		**100%**	**4.927.670.484,80**			100%	**6.006.382.214,40**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	41 Orang/bulan	4.811.198.444,00	DAU		41 Orang/bulan	5.773.438.133
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH	1 Lap	3.503.026,80	DAU		1 Lap	7.006.054
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH	1 Lap	112.969.014,00	DAU		1 Lap	225.938.028
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)**	DLH	**100%**	**192.000.000,00**	DAU		100%	**384.000.000,00**
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		41 Paket	72.000.000,00			41 Paket	144.000.000
	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6 Orng	120.000.000,00			6 Orng	240.000.000
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah (persen)**		**100%**	**385.685.787,80**	DAU		100%	**623.614.155,60**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		19 Paket	3.121.200,00			19 Paket	6.242.400
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Paket	50.588.409,60			7 Paket	101.176.819
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DLH	1 Paket	11.980.726,20	DAU		1 Paket	23.961.452
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DLH	1 Dokumen	18.758.412,00	DAU		1 Dokumen	37.516.824

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH	1 Laporan	5.722.200,00	DAU		1 Laporan	11.444.400
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	1 Laporan	295.514.840,00	DAU		1 Laporan	443.272.260
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	DLH	**100%**	**239.943.616,80**	DAU		100%	**479.887.233,60**
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH	12 Lap	118.069.080,00	DAU		12 Lap	236.138.160
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Lap	52.036.646,40	DAU		12 Lap	104.073.293
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Lap	7.282.800,00	DAU		6 Lap	14.565.600
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DLH	12 Lap	62.555.090,40	DAU		12 Lap	125.110.181
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	DLH	**100%**	**5.411.646.352,00**	DAU		100%	**4.367.469.528,00**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DLH	60 Unit	2.911.646.352,00	DAU		60 Unit	4.367.469.528
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DLH	2 Unit	2.500.000.000,00	DAU		2 Unit	
					URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							0%	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase ketersediaan dokumen PPLH (terhadap jumlah KRP yang wajib menyediakan dokumen PPLH**	DLH	**100%**	**500.000.000,00**	DAU		100%	**500.000.000,00**
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**			**500.000.000,00**	DAU		0%	**500.000.000,00**
2	**11**	**02**	**2.02**	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Halut	1 Dok	500.000.000,00	DAU		1 Dok	500.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase objek pencemaran/kerusakaan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang ditangani**	Kab. Halut	**100%**	**541.510.925,00**	DAU		100%	**250.000.000,00**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	Kab. Halut	**100%**	**441.510.925,00**	DAU		100%	**150.000.000,00**
2	**11**	**03**	**2.01**	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1 Dok	150.000.000,00	DAU		1 Dok	150.000.000
2	**11**	**03**	**2.01**	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 Dok	61.373.200,00	DAU			
2	**11**	**03**	**2.01**	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		1 Dok	230.137.725,00	DAU			
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Presentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**		**100%**	**100.000.000,00**	DAU		100%	**100.000.000,00**
2	**11**	**03**	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		1 Lap	50.000.000,00	DAU		1 Lap	50.000.000
2	**11**	**03**	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		4 Titik	50.000.000,00	DAU		4 Titik	50.000.000
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Presentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		100%	-				

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		1 Dok	-	DBH			
2	11	04			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati (persen)**		**100%**	**1.050.000.000,00**	DAU		100%	**150.000.000,00**
2	11	04	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		**100%**	**1.050.000.000,00**	DAU		100%	**150.000.000,00**
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Unit	50.000.000,00	DAU			50.000.000
					pembanguan tempat duduk								
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		1 Dok	900.000.000,00	DBH			
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Ha	100.000.000,00	DAU		5 Ha	100.000.000
					Penanaman taman di ruas jalan								
2	11	05			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Cakupan pengendalian B3 dan limbah B3 (persen)**		**100%**	**150.000.000,00**	DAU		100%	**150.000.000,00**
2	11	05	2.01		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Presentase Penyimpanan Sementara Limbah B3**		**100%**	**25.000.000,00**	DAU		100%	**25.000.000,00**
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		1 Laporan	25.000.000,00	DAU		1 Laporan	25.000.000
2	11	05	2.02		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**125.000.000,00**	DAU		100%	**125.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		1 Dok	125.000.000,00	DAU		1 Dok	125.000.000
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang diawasi**		**100%**	**100.000.000,00**	DAU		100%	100.000.000
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase jumlah ketaatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**		**100%**	**100.000.000,00**	DAU		100%	**100.000.000,00**
2	**11**	**06**	**2.01**	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		1 Dok	50.000.000,00	DAU		1 Dok	50.000.000
2	**11**	**06**	**2.01**	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5 Lap	50.000.000,00	DAU		5 Lap	50.000.000
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Peningkata rintisan kelompok/organisasi/lembaga kemasyarakatan tingkat dusun/desa/kecamatan/kabupaten peduli lingkungan hidup (jumlah, kumulatif)		**70%**	**100.000.000,00**	DAU		70%	**100.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase jumlah Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan Penyuluh Lingkungan Hidup		**100%**	**100.000.000,00**	DAU		100%	**100.000.000,00**
2	**11**	**08**	**2.01**	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 Dok	50.000.000,00	DAU		1 Dok	50.000.000
2	**11**	**08**	**2.01**	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		10 Orang	50.000.000,00	DAU		10 Orang	50.000.000
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**		**100%**	**50.000.000,00**	DAU		100%	**50.000.000,00**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pemberian Penghargaan Lingkungan HidupTingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**50.000.000,00**	DAU		100%	**50.000.000,00**
2	**11**	**09**	**2.01**	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		4 Entitas	50.000.000,00	DAU		4 Entitas	50.000.000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase volume timbulan sampah perkotaan yang tertangani**		**95%**	**11.432.028.202,00**	DAU		95%	**13.192.948.749,00**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Presentase Pengelolaan Sampah**		**100%**	**11.432.028.202,00**	DAU		100%	**13.192.948.749,00**
2	**11**	**11**	**2.01**	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		1 Dokumen	75.000.000,00			1 Dokumen	75.000.000
2	**11**	**11**	**2.01**	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		2 Kelompok	150.000.000,00	DAU		2 Kelompok	150.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		4 Dok	10.806.710.772,00	DAU		4 Dok	11.406.710.772
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		4 Unit	400.317.430,00	DAK		4 Unit	1.561.237.977
JUMLAH BELANJA									**25.118.345.728,40**				**26.430.022.600,60**
TOTAL PENDAPATAN, DAN BELANJA									**25.418.345.728,40**				**26.730.022.600,60**

BAPPEDA HALUT

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kinerja Perangkat Daerah sesuai Laporan Kinerja (LKj)**	**Disdukcapil**	**100%**	**3.211.432.624,00**				**3.372.004.255,20**
2	12	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	**Disdukcapil**	**100%**	**22.700.000,00**	**DAU**		**100%**	**23.835.000,00**
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapil	4 Dok	19.000.000,00	DAU		4 Dok	19.950.000,00
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapil	1 Dok	3.700.000,00	DAU		1 Dok	3.885.000,00
2	12	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah**	**Disdukcapil**	**100%**	**2.566.747.794,00**	**DAU**		**100%**	**2.695.085.183,70**
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil	546 OB	2.566.747.794,00	DAU		546 OB	2.695.085.183,70
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Disdukcapil**	**100%**	**45.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**47.250.000,00**
2	**12**	**01**	**2.05**	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdukcapil	3 Org	45.000.000,00	DAU		8 Org	47.250.000,00
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**Disdukcapil**	**100%**	**339.464.000,00**	**DAU**		**100%**	**356.437.200,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disdukcapil	3 dok	12.500.000,00	DAU		3 dok	13.125.000,00
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	2 Paket	100.000.000,00	DAU		3 Paket	105.000.000,00
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Disdukcapil	5 Paket	15.000.000,00	DAU		4 Paket	15.750.000,00
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Disdukcapil	3 Dok	4.969.000,00	DAU		3 Dok	5.217.450,00
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Disdukcapil	1 Laporan	16.995.000,00	DAU		4 Laporan	17.844.750,00
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapil	1 Laporan	190.000.000,00	DAU		1 Laporan	199.500.000,00
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Disdukcapil**	**100%**	**117.450.693,00**	**DAU**		**100%**	**123.323.227,65**
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdukcapil	1 Laporan	6.500.000,00	DAU		1 Laporan	6.825.000,00
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	2 Laporan	5.600.000,00	DAU		2 Laporan	5.880.000,00
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	2 Laporan	105.350.693,00	DAU		2 Laporan	110.618.227,65
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Disdukcapil**	**100%**	**120.070.137,00**	**DAU**		**100%**	**126.073.643,85**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Disdukcapil	1 unit	120.070.137,00	DAU		1 unit	126.073.643,85
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah ber-KTP**	**Disdukcapil**	**98,71**	**720.000.000,00**	**DAU**		**99,80**	**756.000.000,00**
						Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	**Disdukcapil**	**44,68**	**303.350.500,00**	**DAU**		**60,32**	**318.518.025,00**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Terpenuhi Dokumen KK, Ktp dan KIA untuk masrakakat**	**Disdukcapil**	**100%**	**720.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**756.000.000,00**
2	**12**	**02**	**2.01**	**0003**	**Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk**	**Disdukcapil**	**1500 orang**	**303.350.500,00**	**DAU**		**1500 orang**	**318.518.025,00**
2	**12**	**02**	**2.01**	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	1 Laporan	450.000.000,00	DAU		1 Laporan	472.500.000,00
2	**12**	**02**	**2.01**	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Disdukcapil	5000 Dokumen	270.000.000,00	DAU		5000 Dokumen	283.500.000,00
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentasi anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir**	**Disdukcapil**	**100%**	**400.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**420.000.000,00**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Terpenuhi Dokumen Akte Nikah, Akte Lahir, Akte Kematia dan Perceraian**	**Disdukcapil**	**100%**	**400.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**420.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
2	**12**	**03**	**2.01**	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	3000 Dok	400.000.000,00	DAU		3000 Dok	420.000.000,00
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentasi Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama**	**Disdukcapil**	**100%**	**652.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**684.600.000,00**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Update Data Kependudukan dan Pemeliharaan Server Jaringan**	**Disdukcapil**	**100%**	**552.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**579.600.000,00**
2	**12**	**04**	**2.01**	0004	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Disdukcapil	50 Dokumen	400.000.000,00	DAU		50 Dokumen	420.000.000,00
2	**12**	**04**	**2.01**	0005	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	5 Dok	152.000.000,00	DAU		5 Dok	159.600.000,00
2	12	04	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kab. Halut	1 Laporan	**100.000.000,00**	**DAU**		1 Laporan	105.000.000,00
2	12	04	2.03	0008	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Halut	1 Laporan	100.000.000,00	DAU		1 Laporan	105.000.000,00
					JUMLAH				**5.286.783.124,00**				**5.445.386.617,72**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN, RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**		**90%**	**6.277.150.230**			**90%**	**8.348.069.780**
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Kinerja PerencanaanPerangkat Daerah**		**100%**	**6.000.000**			**100%**	**94.565.020**
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMD	3 Dokumen	2.000.000	DAU		2 Dokumen	5.000.000
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMD	2 Dokumen	2.000.000	DAU		2 Dokumen	5.000.000
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMD	4 Laporan	2.000.000	DAU		4 Laporan	5.000.000
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**		**100%**	**5.379.742.230**			**100%**	**6.671.008.108**
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMD	910 Orang/ Bulan	5.379.742.230	DAU		910 Orang/ Bulan	5.917.716.453
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**60.000.000**			**100%**	**240.957.200**
2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas PMD	1 Paket	25.000.000	DAU		1 Paket	89.447.400
2	13	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PMD	2 Orang	35.000.000	DAU		2 Orang	70.000.000
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**512.804.000**			**100%**	**915.210.230**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	1 Paket	50.000.000	DAU		1 Paket	201.266.940
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	1 Paket	72.804.000	DAU		1 Paket	65.057.895
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas PMD	1 Paket	20.000.000	DAU		1 Paket	52.121.475
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas PMD	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	46.200.000
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMD	12 Laporan	130.000.000	DAU		12 Laporan	120.206.400
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMD	12 Laporan	220.000.000	DAU		12 Laporan	242.000.000
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**		**100%**	**88.604.000**			**100%**	**173.250.022**
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMD	12 Laporan	24.408.000	DAU		12 Laporan	57.676.818
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PMD	12 Laporan	7.380.000	DAU		12 Laporan	8.487.000
2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	12 Laporan	8.000.000	DAU		12 Laporan	15.479.000
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	12 Laporan	48.816.000	DAU		12 Laporan	53.838.409
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**230.000.000**			**100%**	**253.079.200**
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas PMD	2 Unit	230.000.000	DAU		2 Unit	255.925.450
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa berstatus IDM Tertinggal dan Sangat Tertinggal**		**32,20%**	**150.000.000**			**27,60%**	**150.000.000**
2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase Capaian Penataan Desa kategori Kurang Berkembang**		**100%**	**150.000.000**			**100%**	**225.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Dinas PMD	3 Desa	100.000.000	DAU		3 Desa	150.000.000
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Dinas PMD	10 Desa	50.000.000	DAU		10 Desa	75.000.000
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase desa berstatus IDM maju dan mandiri**		**16,80%**	**208.500.000**			**25,00%**	**260.000.000**
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa**	**Terlaksananya Kerja Sama Antar Desa**		**100%**	**208.500.000**			**100%**	**260.000.000**
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD	1 Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokumen	55.000.000
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD	1 Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokumen	55.000.000
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dinas PMD	1 Dokumen	108.500.000	DAU		1 Dokumen	150.000.000
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa berstatus IDM minimal berkembang**		**67,8%**	**3.153.240.000**			**72,4%**	**3.975.184.000**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Capaian Administrasi Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi Penyelenggaraannya**		**100%**	**3.153.240.000**			**100%**	**3.975.184.000**
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dinas PMD	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	120.000.000
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dinas PMD	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	250.000.000
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas PMD	1 Dokumen	1.153.240.000	DAU		1 Dokumen	1.845.184.000
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Dinas PMD	55 Orang	100.000.000	DAU		55 Orang	300.000.000
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dinas PMD	1 Dokumen	80.000.000	DAU		1 Dokumen	250.000.000
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dinas PMD	1 Laporan	1.200.000.000	DAU			
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang Tersusun	Dinas PMD	1 Dokumen	80.000.000	DAU		1 Dokumen	200.000.000

BAPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dinas PMD	1 Dokumen	80.000.000	DAU		1 Dokumen	200.000.000
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Angggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Dinas PMD	55 Orang	80.000.000	DAU		55 Orang	240.000.000
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tobelo	10 Desa	80.000.000	DAU		10 Desa	320.000.000
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dinas PMD	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	250.000.000
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase desa berkategori IDM dimensi ekonomi minimal berkembang**		**51,5%**	**600.000.000**			**60,2%**	**880.000.000**
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Ketersediaan Dokumen dan Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Halmahera Utara**		**100%**	**600.000.000**			**100%**	**880.000.000**
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dinas PMD	1 Laporan	100.000.000	DAU		1 Laporan	80.000.000
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMD	1 Dokumen	500.000.000	DAU		1 Dokumen	800.000.000
TOTAL									**10.388.890.230**				**13.613.253.780**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (PERSEN)**	**Kab. Halut**	**90 Persen**	**5.456.192.118**	**DAU**		**90 %**	**5.689.563.166**
2 15 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (persen)**	**Kantor DISHUB**	**100 Persen**	**15.037.100**	**DAU**		**100 %**	**15.037.795,00**
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tobelo	2 Dok	10.569.400	DAU		2 Dok	10.569.400,00
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobelo	2 Lap	4.467.700	DAU		2 Lap	4.468.395,00
2 15 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (persen)**	**Tobelo**	**100 Persen**	**4.716.358.418**	**DAU**		**100 %**	**4.716.358.913**
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tobelo	50 OB	4.711.890.518	DAU		50 OB	4.711.890.518,00
2 15 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tobelo	2 Lap	4.467.900	DAU		2 Lap	4.468.395
2 15 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**prosentase BMD pada perangkat daerah yg tercatat pada SIMDA (persen)**	**Tobelo**	**100 Persen**	**4.467.900**	**DAU**		**100 %**	**4.468.395,00**
2 15 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobelo	2 Lap	4.467.900	DAU		2 Lap	4.468.395
2 15 01 2.02	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)**	**Tobelo**	**100 Persen**	**51.332.000**	**DAU**		**100 %**	**65.000.000,00**

BAPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 01 2.02 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tobelo	2 orang	29.628.000	DAU		2 OK	30.000.000
2 15 01 2.02 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tobelo	2 orang	21.704.000	DAU		3 OK	35.000.000
2 15 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi umum Perangkat Daerah (persen)**	**Tobelo**	**100 Persen**	**384.144.900**	**DAU**		**100 %**	**447.405.763,00**
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tobelo	1 Paket	4.846.000	DAU		1 Paket	4.625.000,00
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tobelo	1 Paket	41.187.000	DAU		1 Paket	67.949.000,00
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tobelo	1 Paket	26.327.500	DAU		1 Paket	25.063.763,00
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tobelo	1 Paket	65.926.400	DAU		1 Paket	62.788.000,00
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tobelo	2 Dok	16.900.000	DAU		2 Dok	16.200.000,00
2 15 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tobelo	1 Lap	20.674.000	DAU		1 Lap	19.680.000,00
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobelo	36 Lap	208.284.000	DAU		39 Lap	251.100.000,00
2 15 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)**	**Tobelo**	**100 Persen**	**-**	**DAU**		**100 %**	**75.000.000,00**
2 15 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tobelo	- -	-	DAU		6 Paket	75.000.000
2 15 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Tobelo**	**100 Persen**	**139.553.600**	**DAU**		**100 %**	**220.600.000,00**
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tobelo	9 Lap	34.920.000,00	DAU		9 Lap	74.200.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tobelo	3 Lap	60.825.000,00	DAU		3 Lap	72.500.000,00
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tobelo	1 Lap	43.808.600,00	DAU		1 Lap	73.900.000,00
2 15 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Tobelo**	**100 Persen**	**145.298.200**	**DAU**		**100 %**	**145.692.300,00**
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tobelo	9 Unit	122.688.200	DAU		9 Unit	122.692.300
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tobelo	16 Unit	22.610.000	DAU		16 Unit	23.000.000
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**RASIO IZIN TRAYEK (PER 1000 PENDUDUK)**	**Kab. Halut**	**1,05 Persen**	**1.588.756.177**	**DAU**		**1,10 %**	**3.561.869.000**
2 15 02 2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan**	**Tobelo**	**1 Dok**	**65.043.000**	**DAU**		- -	-
2 15 02 2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tobelo	1 Dok	65.043.000	DAU		- -	
2 15 02 2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (persen)**	**Tobelo**	**47,4 Persen**	**500.500.000**	**DAU**		**51,5 %**	**508.000.000,00**
2 15 02 2.02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Tobelo	1 Unit	500.500.000	DAU		1 Unit	98.000.000
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	Tobelo	- -	-	DAU		28 Unit	345.000.000
2 15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang direhab atau dipelihara	Tobelo	- -	-	DAU		3 Unit	65.000.000
2 15 02 2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Terminal PenumpanTipe C yang dikelola (persen)**	**Kab. Halut**	**100 Persen**	**130.000.000**	**DAU**		**100 %**	**1.385.000.000,00**
2 15 02 2.03 02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Tobelo	- -	-	DAU		1 Unit	1.190.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara)	Galela, Tobelo Utara, Tobelo, Malifut	- -	130.000.000	DAU		4 Unit	195.000.000,00
2 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji KIR (persen)**	**Tobelo**	**89,1 Persen**	**109.781.000**	**DAU**		**89,1 %**	**249.781.000,00**
2 15 02 2.05 01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto yang ditingkatkan kapasitasnya	Tobelo	- -	-	DAU		2 OK	30.000.000,00
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	1 dok	24.000.000	DAU		1 Dok	24.000.000,00
2 15 02 2.05 05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	- -	-	DAU		1 Lap	100.000.000,00
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Tobelo	7 Unit	50.000.000	DAU		7 Unit	50.000.000,00
2 15 02 2.05 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	1 Lap	35.781.000	DAU		1 Lap	35.781.000,00
2 15 02 2.05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	- -		DAU		1 Lap	10.000.000,00
2 15 02 2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase berkurangnya lokasi rawan kecelakaan (persen)**	**Kab. Halut**	**52,2 Persen**	**206.259.177**	**DAU**		**60,9 %**	**180.593.000,00**
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tobelo	2 Lap	30.000.000	DAU		1 Lap	20.000.000,00
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Galela, Tobelo, Tobelo Tengah Kao , Malifut	40 Unit	176.259.177	DAU		40 Unit	160.593.000,00

BAPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 02 2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaksanaan rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Kab. Halut**	**1 keg**	**15.000.000**	**DAU**		**1 Keg**	**15.000.000,00**
2 15 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Tobelo	1 Lap	15.000.000	DAU		1 Lap	15.000.000
2 15 02 2. 08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Kab. Halut**	**1 keg**	**80.000.000**	**DAU**		**1 Keg**	**25.000.000,00**
2 15 02 2. 08 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Tobelo	1 Lap	40.000.000	DAU		1 Lap	10.000.000
2 15 02 2. 08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Tobelo	1 Lap	40.000.000	DAU		1 Lap	15.000.000
2 15 02 2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten (persen)**	**Kab. Halut**	**26,8 Persen**	**-**	**DAU**		**27,2 %**	**620.000.000,00**
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tobelo	- -	-	DAU		2 Unit	600.000.000
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tobelo	- -	-	DAU		1 Lap	20.000.000
2 15 02 2.12	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jaringan Trayek Perkotaan**	**Kab. Halut**	**32 Trayek**	**-**	**DAU**		**34 Trayek**	**50.000.000,00**
2 15 02 2.12 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	- -	-	DAU		1 Dok	35.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 02 2.12 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	- -	-	DAU		1 Lap	15.000.000
2 15 02 2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten (persen)**	**Kab. Halut**	**17,1 Persen**	**467.173.000**	**DAU**		**17,4 %**	**563.495.000,00**
2 15 02 2.14 01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tobelo	2 Lap	375.687.000	DAU		2 Lap	471.570.000,00
2 15 02 2.14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Tobelo	2 Lap	91.486.000	DAU		2 Lap	91.925.000,00
2 15 02 2.16	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya regulasi Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Halut**	**1 dok**	**15.000.000**	**DAU**		**1 Dok**	**30.000.000,00**
2 15 02 2.16 02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	1 dok	15.000.000	DAU		1 Dok	15.000.000
2 15 02 2.16 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	- -	-	DAU		1 Lap	15.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**PERTUMBUHAN VOLUME PENUMPANG ANGKUTAN LAUT/PELAYARAN (PERSEN)**	**Kab. Halut**	**21,0 Persen**	**2.544.515.797**	**DAU**		**21,0 %**	**20.272.480.625**
		PERTUMBUHAN VOLUME BARANG ANGKUTAN LAUT/PELAYARAN (PERSEN)		**11 Persen**				**11 %**	
2 15 03 2.01	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Halut**	1 keg	**15.000.000**	**DAU**		- -	-
2 15 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tobelo	1 lap Lap	15.000.000	DAU		- -	-
2 15 03 2.02	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Halut**	**1 keg**	**15.000.000**	**DAU**		**1 Keg**	**20.000.000,00**
2 15 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tobelo	1 Lap	15.000.000	DAU		1 Lap	20.000.000,00
2 15 03 2.06	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)**	**Kab. Halut**	**100 Persen**	**15.000.000**	**DAU**		**100 %**	**60.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 03 2.06 01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	1 dok	15.000.000	DAU		1 Dok	25.000.000
2 15 03 2.06 02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	- -	-	DAU		1 Lap	35.000.000
2 15 03 2.09	**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Halut**	**1 Dok**	**-**	**DAU**		**1 Dok**	**20.000.000,00**
2 15 03 2.09 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	- -				1 Lap	20.000.000
2 15 03 2.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Tingkat Realisasi Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (persen)**	**Kab. Halut**	**37,5 Persen**	**2.499.515.797**	**DAU**		**37,5 %**	**10.096.875.856,00**
2 15 03 2.12 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	- -		DAU		1 Dok	25.000.000,00
2 15 03 2.12 02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Kec. Tobelo, Lokep, Kao Utara	3 Unit	1.876.903.974	DAU/DAK		3 Unit	6.411.162.000,00
2 15 03 2.12 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Kec. Tobelo	3 Unit	562.599.000	DAU/DAK		3 Unit	3.600.713.856

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 03 2.12 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	1 Lap	60.012.823	DAU		3 Lap	60.000.000
2 15 03 2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana transportasi angkutan Sungai dan Danau (persen)	**Kab. Halut**	**100 Persen**	-			**100 %**	**10.075.604.769,00**
2 15 03 2.13 02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Tobelo Utara	- -	-			1 Unit	6.000.000.000,00
2 15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Tobelo Utara	- -	-			1 Unit	4.075.604.769,00
JUMLAH					**9.589.464.092**				**29.523.912.791,0**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Nama Peragkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*9*	*10*	*11*
2	**16**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**		**90%**	**2.642.473.962**			*92%*	**3.244.115.329**
2	**16**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**		**100%**	**28.500.000**			**100%**	**12.000.000**
2	16	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		3 Dok	3.000.000			3 Dok	4.000.000
2	16	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobelo	1 Lap	1.500.000			1 Lap	4.000.000
2	16	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tobelo	4 Lap	4.000.000			4 Lap	4.000.000
2	16	01	2	01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Tobelo	1 BA	20.000.000			1 BA	20.000.000
2	**16**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (persen)**	**Tobelo**	**100%**	**2.236.973.962**			**100%**	**1.940.473.962**
2	16	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tobelo	20 OB	2.233.473.962			20 OB	1.933.473.962
2	16	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tobelo	4 Lap	3.500.000			4 Lap	7.000.000
2	**16**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah(Persen)**	**Tobelo**	**100%**	**3.000.000**			**100%**	**6.000.000**
2	16	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobelo	1 Lap	3.000.000			1 Lap	6.000.000
2	**16**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tobelo**	**100%**	**30.000.000**			**100%**	**133.499.782**
2	16	01	2	05	0000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tobelo	0	-			1 Paket	43.499.782

BAPPEDA HALUT

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*9*	*10*	*11*
2	16	01	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tobelo	4 Orang	30.000.000			4 Orang	90.000.000
2	**16**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tobelo**	**100%**	**142.000.000**			***100%***	**652.621.585**
2	16	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tobelo	4 Paket	5.000.000			4 Paket	5.000.000
2	16	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tobelo	4 Paket	10.000.000			4 Paket	120.000.000
2	16	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tobelo	4 Paket	5.000.000			4 Paket	20.621.585
2	16	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tobelo	4 Paket	10.000.000			4 Paket	12.000.000
2	16	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tobelo	3 Dok	5.000.000			3 Dok	10.000.000
2	16	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tobelo	4 Lap	2.000.000			4 Lap	25.000.000
2	16	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobelo	50 Lap	100.000.000			50 Lap	360.000.000
2	16	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tobelo	1 Dokumen	5.000.000			1 Dokumen	100.000.000
2	**16**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tobelo**	**100%**	**135.000.000**			**100%**	**335.920.000**
2	16	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tobelo	4 Lap	50.000.000			4 Lap	69.840.000
2	16	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tobelo	4 Lap	10.000.000			4 Lap	10.000.000
2	16	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tobelo	4 Lap	75.000.000			4 Lap	256.080.000
2	**16**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tobelo**	**100%**	**32.000.000**			***100%***	**133.600.000**
2	16	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tobelo	1 Unit	7.000.000			1 Unit	100.600.000

BAPPEDA HALUT

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*9*	*10*	*11*
2	16	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tobelo	1 Unit	15.000.000			1 Unit	18.000.000
2	16	01	2	09	0003	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Tobelo	1 Unit				1 Unit	5.000.000
2	16	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Halut	1 Unit	10.000.000			1 Unit	10.000.000
2	**16**	**01**	**2**	**13**		**Penataan Organisasi**				**20.000.000**				**15.000.000**
2	16	01	2	13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Dok	20.000.000			1 Dok	15.000.000
2	**16**	**01**	**2**	**14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**				**15.000.000**				**15.000.000**
2	16	01	2	14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 Lap	15.000.000			1 Lap	15.000.000
2	**16**	**02**				**PROGRAM PENGGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH MEMILIKI PORTAL DAN SITUS WEB SESUAI STANDAR**	**Halut**	**27,1 %**	**180.000.000**			**85%**	**287.914.421**
2	**16**	**02**	**2**	**01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	**Halut**	**100%**	**180.000.000**			**85%**	**180.000.000**
2	16	02	2	01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Halut	9 Lap	50.000.000			9 Lap	50.000.000
2	16	02	2	01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Halut	1 Komunitas	10.000.000			1 Komunitas	10.000.000
2	16	02	2	01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Halut	2 Lap	5.000.000			2 Lap	5.000.000
2	16	02	2	01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Halut	2 Permohonan	50.000.000			2 Permohonan	50.000.000
2	16	02	2	01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Halut	1 Persentase	10.000.000			1 Persentase	10.000.000

BAPEDA HALUT

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*9*	*10*	*11*
2	16	02	2	01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Halut	1 Rekomendasi	10.000.000			1 Rekomendasi	10.000.000
2	16	02	2	01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Halut	2 Media	20.000.000			2 Media	20.000.000
2	16	02	2	01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Tobelo	2 Dok	10.000.000			2 Dok	10.000.000
2	16	02	2	01	002	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Halut	10 Konten	10.000.000			10 Konten	10.000.000
2	16	02	2	01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Halut	1 Orang	5.000.000			1 Orang	5.000.000
2	**16**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH TERAKSES INTERNET DAN TERHUBUNG DENGAN JARINGAN INTRA**	**Halut**	**64,6 %**	**1.533.703.925**			**66,6 %**	**1.348.000.000**
2	**16**	**03**	**2**			**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Halut**	**100%**	**5.000.000**			**100%**	**5.000.000**
2	16	03	2	01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Halut	1 Dok	5.000.000			1 Dok	5.000.000
2	**16**	**03**	**2**	**02**		**Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Halut**	**100%**	**1.528.703.925**			**86%**	**1.343.000.000**
2	16	03	2	02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Halut	**1 Aplikasi**	10.000.000			**1 Aplikasi**	
2	16	03	2	02	0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	Halut	1 Dok	25.000.000			1 Dok	65.000.000
2	16	03	2	02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Halut	1 Lap	15.000.000			1 Lap	65.000.000
2	16	03	2	02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Halut	1 Dok	100.000.000			1 Dok	425.000.000
2	16	03	2	02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Halut	1 Dok	25.000.000			1 Dok	125.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*9*	*10*	*11*
2	16	03	2	02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Halut	1 Aplikasi	15.000.000			1 Aplikasi	150.000.000
2	16	03	2	02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Halut	1 Dok	15.000.000			1 Dok	45.748.000
2	16	03	2	02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Halut	1 Unit	150.000.000			1 Unit	50.000.000
							Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Halut	1 Dok				1 Dok	402.252.000
2	16	03	2	02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Tobelo	1 Perangkat Daerah	1.173.703.925			1 Perangkat Daerah	80.000.000
2	**21**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERIMA LAYANAN KEAMANAN INFORMASI DARI DISKOMINFO DAN**	**Halut**	**50%**	**25.000.000**			**4 PD**	**250.000.000**
2	**21**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Halut**	**4 PD**	**20.000.000**			**4 PD**	**150.000.000**
2	21	02	2	01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Halut	1 Dok	5.000.000			1 Dok	80.000.000
2	21	02	2	01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Halut	1 Lap	5.000.000			1 Lap	46.000.000
2	21	02	2	01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Halut	1 Lap	5.000.000			1 Lap	12.000.000

BAPEDA HALUT

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*9*	*10*	*11*
2	21	02	2	01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Halut	1 PD	5.000.000			6 PD	12.000.000
2	**21**	**02**	**2**	**02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten**	**Persentase Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten**	**Halut**	**100%**	**5.000.000**			**100%**	**100.000.000**
2	21	02	2	02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Halut	6 PD	5.000.000			6 PD	100.000.000
JUMLAH										**4.381.177.887**				**5.130.029.750**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL Dan MENENGAH

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA KERJA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	9	10	11	12
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								
2	**17**	**02**			**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**Persentase permohonan perizinan usaha simpan pinjam yang ditindaklanjuti/selesaikan**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**105.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**165.000.000,00**
2	**17**	**02**	**2,01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**105.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**165.000.000,00**
2	17	02	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Diskop dan UKM	10 Unit Usaha	105.000.000,00	DAU		30 Unit Usaha	165.000.000
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Persentase koperasi aktif**	**Diskop dan UKM**	**54,62%**	**-**	**DAU**		**57%**	**250.000.000,00**
2	**17**	**05**	**2,01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Anggota Koperasi yang Mengikuti Pelatihan**	**Diskop dan UKM**	**90 Orang**	**-**	**DAU**		**90 Orang**	**250.000.000,00**
2	17	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Diskop dan UKM	90 Orang		DAU		90 Orang	250.000.000
2	**17**	**06**			**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**Diskop dan UKM**	**7,15%**	**136.250.000,00**	**DAU**		**8,05%**	**250.000.000,00**
2	**17**	**06**	**2,01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang difasiltasi untuk meningkatkan usaha koperasi**	**Diskop dan UKM**	**10**	**136.250.000,00**	**DAU**		**43%**	**250.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA KERJA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	9	10	11	12
2	17	06	2,01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Diskop dan UKM	26 Unit Usaha	136.250.000,00	DAU		45 Orang	250.000.000
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Pertumbuhan jumlah usaha kecil mikro (persen)**	**Diskop dan UKM**	**50,86%**	**89.000.000,00**	**DAU**		**54,20%**	**150.000.000,00**
2	**17**	**07**	**2,01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifakasi produk usaha**	**Diskop dan UKM**	**34%**	**89.000.000,00**	**DAU**		**40%**	**150.000.000,00**
2	17	07	2,01	01	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Diskop dan UKM	1.575 Unit Usaha	89.000.000,00	DAU		1.702 Unit Usaha	150.000.000
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	**Perkembangan jumlah UMKM (kumulatif)**	**Diskop dan UKM**	**4965**	**-**	**DAU**		**5.164**	**500.000.000,00**
2	**17**	**08**	**2,01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Diskop dan UKM**	**30%**	**-**	**DAU**		**33%**	**500.000.000,00**
2	17	08	2,01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Diskop dan UKM	55 Unit Usaha		DAU		100 Unit Usaha	500.000.000
2	**17**	**03**			**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Koperasi aktif yang diawasi**	**Diskop dan UKM**	**40%**	-	DAU		**50%**	**275.000.000,00**
2	**17**	**03**	**2,01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya**	**Diskop dan UKM**	**30%**	-	DAU		**35%**	**275.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA KERJA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	9	10	11	12
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Diskop dan UKM	17 Unit Usaha	-	DAU		17 Unit Usaha	137.500.000
2	17	03	2,01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Diskop dan UKM	17 Unit Usaha	-	DAU		17 Unit Usaha	137.500.000
2	**17**	**04**			**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Persentase koperasi sehat**	**Diskop dan UKM**	**15,41%**	**94.570.000,00**	**DAU**		**16%**	**150.000.000,00**
2	**17**	**04**	**2,01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**94.570.000,00**	**DAU**		**100%**	**150.000.000,00**
2	17	04	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Diskop dan UKM	99 Unit Usaha	94.570.000,00	DAU		90 Unit Usaha	127.000.000
2	17	04	2,01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Diskop dan UKM	3 Koperasi	-	DAU		3 Koperasi	23.000.000
2	**17**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah**	**Diskop dan UKM**	**90%**	**2.257.361.718,00**	**DAU**		**90%**	**3.069.190.380,08**
2	**17**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan PD**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**36.847.900,00**	**DAU**		**100%**	**32.947.355,00**
2	17	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop dan UKM	3 Dok	12.347.900,00	DAU		3 Dok	11.024.174,00
					Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskop dan UKM	1 Dok	3.750.000,00	DAU		1 Dok	4.350.000,00
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD	Diskop dan UKM	2 Dok	3.750.000,00	DAU		1 Dok	4.350.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA KERJA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	9	10	11	12
					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Diskop dan UKM	3 Dok	4.250.000,00	DAU		1 Dok	4.750.000,00
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Diskop dan UKM	4 Dok	4.250.000,00	DAU		1 Dok	4.750.000,00
2	17	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop dan UKM	1 Dok	8.500.000,00	DAU		1 Dok	3.723.181,00
2	**17**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran PD**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**1.850.732.200**	**DAU**		**100%**	**2.412.293.485**
2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop dan UKM	12 Bulan	1.842.232.200,00	DAU		12 Bulan	2.408.325.830
2	17	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskop dan UKM	1 Lap	8.500.000,00	DAU		1 Lap	3.967.655,08
2	**17**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi kepegawian PD**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**50.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**133.561.543,00**
2	17	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskop dan UKM	5 Orang	50.000.000,00	DAU		15 Orang	133.561.543
2	**17**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Adminsitrasi umum PD**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**110.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**236.552.907,00**
2	17	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskop dan UKM		-	DAU		6 Item	35.000.000,00
2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Diskop dan UKM	1 Tahun	5.000.000,00	DAU		1 Thn	12.734.496
2	17	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskop dan UKM	12 Bulan	5.000.000,00	DAU		12 Bln	12.734.496

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA KERJA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	9	10	11	12
2	17	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskop dan UKM	360 Org/Kali	-	DAU		360 Org/Kali	6.000.000
2	17	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop dan UKM	1 Lap	100.000.000,00	DAU		1 Lap	170.083.915
2	**17**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**125.781.618,00**	**DAU**		**100%**	**166.816.034,00**
2	17	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskop dan UKM	12 Bulan	95.781.618,00	DAU		12 bln	119.061.674
2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskop dan UKM	12 Bulan	30.000.000,00	DAU		12 bln	47.754.360
2	**17**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**84.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**87.019.056,00**
2	17	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskop dan UKM	1 Tahun	84.000.000,00	DAU		1 Thn	87.019.056
JUMLAH									**2.682.181.718,00**				**4.809.190.380,08**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (persen)**	DPMPTSP	**90%**	**4.296.949.172**	**DAU**		**90%**	**4.448.796.631**
2.18.01	**Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)	DPMPTSP	**100%**	**62.818.228**	**DAU**		**100%**	**65.959.139**
2.18.01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	4 Dok	17.000.000	**DAU**		3 Dok	17.850.000
2.18.01. 2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	1 Dok	954.557	**DAU**		1 Dok	1.002.285
2.18.01. 2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	1 Dok	954.557	**DAU**		1 Dok	1.002.285
2.18.01. 2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMPTSP	1 Dok	954.557	**DAU**		1 Dok	1.002.285
2.18.01. 2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	1 Dok	954.557	**DAU**		1 Dok	1.002.285

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01. 2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	1 Lap	7.000.000	**DAU**		1 Lap	7.350.000
2.18.01. 2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	16 Laporan	35.000.000	**DAU**		16 Laporan	36.750.000
2.18.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)**	DPMPTSP	**100%**	**2.893.106.986**	**DAU**		**100%**	**3.037.762.335**
2.18.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	350 OB	2.891.141.722	**DAU**		**95%**	3.035.698.808
2.18.01. 2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	1 Lap	982.632	**DAU**		1 Lap	1.031.764
2.18.01. 2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP	18 Lap	982.632	**DAU**		18 Lap	1.031.764
2.18.01. 2.03	**Administrasii Barang Milik Daearah Pada Perangkat Daerah**	**Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah (persen)**	DPMPTSP	**100%**	**49.542.632**	**DAU**		**100%**	**52.019.764**
2.18.01. 2.03. 02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	1 Dok	48.560.000	**DAU**		1 Dok	50.988.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	4 Lap	982.632	**DAU**		4 Lap	1.031.764

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01. 2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah**	**Rasio Efekifitas retribusi IMB/Minuman beralkoholTrayek (persen)**	DPMPTSP	**100%**	**72.982.632**	**DAU**		**100%**	76.631.764
2.18.01. 2.04. 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah	DPMPTSP	1 Dokumen	-	**DAU**		1 Dok	-
2.18.01. 2.04. 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	DPMPTSP	3 Lap	72.000.000	**DAU**		3 Lap	75.600.000
2.18.01. 2.04. 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DPMPTSP	1 Dok	982.632	**DAU**		1 Dok	1.031.764
2.18.01. 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)**	DPMPTSP	**100%**	**40.000.000**	**DAU**		**100%**	**42.000.000**
2.18.01. 2.0. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	2 orang	40.000.000	**DAU**		3 orang	42.000.000
2.18.01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		DPMPTSP	**100%**	**253.521.686**	**DAU**		**100%**	**203.197.770**
2.18.01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 paket	60.000.000	**DAU**		1 paket	63.000.000
2.18.01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPTSP	1 paket	40.000.000	**DAU**		1 paket	42.000.000
2.18.01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPMPTSP	2 Dok	13.000.000	**DAU**		2 Dok	13.650.000
2.18.01. 2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	1 Lap	40.000.000	**DAU**		1 Lap	42.000.000
2.18.01. 2.06. 09	Penyelangaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	3 Lap	100.521.686	**DAU**		3 Lap	105.547.770

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	DPMPTSP	**100%**	**443.563.170**	**DAU**		**100%**	**465.741.329**
2.18.01. 2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	1 Lap	260.326.770	**DAU**		1 Lap	273.343.109
2.18.01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	1 Lap	71.328.600	**DAU**		1 Lap	74.895.030
2.18.01. 2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Lap	51.907.800	**DAU**		1 Lap	54.503.190
2.18.01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Lap	60.000.000	**DAU**		1 Lap	63.000.000
2.18.01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	DPMPTSP	**100%**	481.413.838	**DAU**		**100%**	**505.484.530**
2.18.01. 2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPMPTSP	1 Unit	46.768.600	**DAU**		1 Unit	49.107.030
2.18.01. 2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	2 Unit	434.645.238	**DAU**		2 Unit	456.377.500
02:18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**		DPMPTSP						
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLAN**	**Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMA) (M Rupiah)**	DPMPTSP	**758,32**	**200.000.000**			**758,32**	

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.02	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN) (M Rupiah)**	DPMPTSP	**326,08**	200.000.000			**326,08**	
2.18.02. 2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah jenis fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang telah ditetapkan melalui perda/perbup**	DPMPTSP	**1 Dok**	-	**DAU**		**1 Dok**	-
2.18.02. 2.01. 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	DPMPTSP	3 Kegus	-	**DAU**		3 Kegus	-
2.18.02. 2.02	**Pembuatan Peta Potensi Insestasi**	**Tersedianya peta potensi investasi**	DPMPTSP	**1 peta**	**200.000.000**	**DAU**		**1 peta**	
2.18.02. 2.02. 01	Pemutakhiran Data Potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	DPMPTSP	5 Daerah	150.000.000	**DAU**		5 Daerah	157.500.000
2.18.02. 2.02. 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dok	50.000.000	**DAU**		1 Dok	52.500.000
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor berskala nasional (PMA dan PMDN)**	DPMPTSP	**262**	-	**DAU**		**262**	-
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal**	DPMPTSP	**100%**	-	**DAU**		**100%**	-
2.18.03. 2.01. 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	-	**DAU**		1 Dokumen	-
2.18.03. 2.01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	-	**DAU**		1 Dokumen	-

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP**	DPMPTSP	**87,5**	230.000.000	**DAU**		**87,5**	241.500.000
2.18.04. 2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinana Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengajuan perijinan yang ditindaklanjuti**	DPMPTSP	**100%**	230.000.000	**DAU**		**100%**	241.500.000
2.18.04.2.01. 02	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	200 Pelaku Usaha	150.000.000	**DAU**		200 responden	157.500.000
2.18.04.2.01. 03	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	15 Pelaku Usaha	30.000.000	**DAU**		15	31.500.000
2.18.04.2.01. 04	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	DPMPTSP	5 Kegiatan Usaha	50.000.000	**DAU**		5	52.500.000
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase perusahaan bermasalah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan**	DPMPTSP	**100%**	**229.906.394**			**100%**	**241.401.714**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.05. 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanaman modal yang terpantau dan taat aturan**	DPMPTSP	**100%**				**100%**	241.401.714
2.18.05. 2.01. 01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	9 Kegiata Usaha	58.305.000	**DAK**		25	61.220.250
2.18.05. 2.01. 02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risik	DPMPTSP	75 Pelaku Usaha	102.914.394	**DAK**		350	108.060.114
218.05. 2.01. 03	Pangawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	DPMPTSP	15 Kegiatan Usaha	68.687.000	**DAK**		25	72.121.350
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFOMASI PENANAMAN MODAL**	**Prentase data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sisstem informasi penanaman modal**	DPMPTSP	**100%**	**71.000.000**	**DAU**		**100%**	**74.550.000**
2.18.06 . 2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya data/informasi perizinan dan non perizinan**	DPMPTSP	**1185 izin**	**71.000.000**	**DAU**		**1185 izin**	**74.550.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.06 . 2.01. 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPTSP	2 Dok	71.000.000	**DAU**		2 Dok	74.550.000
JUMLAH					**5.027.855.566**				**5.006.248.344**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 19. 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah**	**Dispora**	**90%**	**3.118.569.037**			**90%**	**2.490.752.114**
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)**	**Dispora**	**100%**	**30.000.000**			**100%**	**22.000.000**
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Dispora	4 Dokumen	7.000.000	DAU		4 Dokumen	6.000.000
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dispora	2 Dokumen	12.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dispora	3 Laporan	7.000.000	DAU		3 Laporan	7.000.000
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dispora	3 Laporan	4.000.000	DAU		3 Laporan	4.000.000
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)**	**Dispora**	**100%**	**2.599.529.037**			**100%**	**2.121.992.526**
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dispora	520 Orang/bulan	2.594.529.037	DAU		520 Orang/bulan	2.116.992.526
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dispora	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	5.000.000
2.19.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah (persen)**	**Dispora**	**100%**	**6.000.000**			**100%**	**6.000.000**
2.19.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Dispora	1 Dokumen	3.000.000	DAU		1 Dokumen	3.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora	1 Laporan	3.000.000	DAU		1 Laporan	3.000.000
2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)**	**Dispora**	**100%**	**60.000.000**			**100%**	**68.963.588**
2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora	4 Orang	60.000.000	DAU		4 Orang	68.963.588
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah (persen)**	**Dispora**	**100%**	**128.640.000**			**100%**	**139.112.000**
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dispora	1 Laporan	68.640.000	DAU		1 Laporan	12.000.000
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	4 Laporan	60.000.000	DAU		6 Laporan	127.112.000
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Dispora**	**100%**	**216.400.000**			**100%**	**32.684.000**
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Dispora	4 Laporan	216.400.000	DAU		1 Laporan	32.684.000
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Dispora**	**100%**	**78.000.000**			**100%**	**100.000.000**
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	Dispora	1 Unit	78.000.000	DAU		1 Unit	100.000.000
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Pemuda Berprestasi tingkat Internasional/Nasional/Provinsi**	**Dispora**	**15 Orang**	**200.000.000**			**23 Orang**	**235.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Presentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Dispora**	**100%**	**200.000.000**			**100%**	**235.000.000**
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Dispora	12 Orang	150.000.000	DAU		10 Orang	60.000.000
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Dispora	1 Orang	50.000.000	DAU		2 Orang	175.000.000
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah Atlet/Atlet pelajar berprestasi tingkat Internasional/Nasional/Provinsi**	**Dispora**	**20 atlet**	**811.672.588**			**25 atlet**	**2.950.000.000**
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dispora**	**100%**	**500.000.000**			**100%**	**500.000.000**
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Dispora	1 Unit	500.000.000			1 Unit	500.000.000
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dispora**	**100%**	**100.000.000**			**100%**	**250.000.000**
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dispora	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	250.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Presentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Dispora**	**100%**	**111.672.588**			**100%**	**200.000.000**
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Dispora	5 Orang	75.000.000	DAU		5 Orang	150.000.000
2.19.03.2.03.0010	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Dispora	1 Dokumen	36.672.588	DAU		1 Dokumen	50.000.000
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Presentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Dispora**	**100%**	**100.000.000**			**100%**	**2.500.000.000**
2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dispora	1 Dokumen	100.000.000	DAU		5 Dokumen	2.500.000.000
JUMLAH					**4.130.241.625**				**5.440.752.114**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN, RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintah Wajib yang Terkait Bukan Pelayanan Dasar								
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah**		**90%**	**4.490.613.068**			**90%**	**4.613.698.668**
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Renja terhadap Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**		**100%**	**28.500.000**			**100%**	**28.500.000**
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4 Dokumen	12.000.000	DAU		4 Dokumen	12.000.000
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2 Laporan	7.000.000	DAU		2 Laporan	7.000.000
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Laporan	9.500.000	DAU		3 Laporan	9.500.000
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**		**100%**	**3.940.498.668**			**100%**	**3.950.498.668**
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	884 Org/Bln	3.910.498.668	DAU		884 Org/Bln	3.910.498.668
2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Dokumen	25.000.000	DAU		1 Dokumen	40.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUAHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	5.000.000,00
2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**17.500.000**			**100%**	**52.500.000**
2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	TTE, Manado, Jkt	1 Orang	17.500.000	DAU		3 Orang	52.500.000
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentasi Realisasi Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**167.000.000**			**100%**	**244.000.000**
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Paket	8.000.000	DAU		1 Paket	12.000.000
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Paket	8.000.000	DAU		1 Paket	12.000.000
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8 Dokumen	8.000.000	DAU		8 Dokumen	10.000.000
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Laporan	8.000.000	DAU		1 Laporan	10.000.000
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tte, Jkt,Mksar	10 Laporan	135.000.000	DAU		15 Laporan	200.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUAHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**		**100%**	**227.720.100**			**100%**	**225.200.000**
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Laporan	115.200.000	DAU		12 Laporan	115.200.000
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Laporan	112.520.100	DAU		12 Laporan	110.000.000
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**		**100%**	**109.394.300**			**100%**	**113.000.000**
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Unit	109.394.300	DAU		1 Unit	113.000.000
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah (Persen)**		**10%**	**85.313.663**			**10%**	**300.000.000**
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koleksi bahan Pustaka di Perpustakaan Daerah**		**16091**	**35.313.663**			**16091**	**150.000.000**
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Tobelo	5 Perpustakaan	35.313.663			25 Perpustakaan	150.000.000
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Masyarakat Gemar Membaca**		**62%**	**50.000.000**			**63%**	**150.000.000**
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Tobelo	5 Perpustakaan	50.000.000			5 Perpustakaan	150.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUAHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah mengelola arsip secara baku (kumulatif)**		**43 PD**	**200.000.000**			**48 PD**	**200.000.000**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang mengelolah dan Mengakses Arsip melalui Teknologi Informasi SRIKANDI**		**43 PD**	**200.000.000**			**48 PD**	**200.000.000**
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		1 Berkas	200.000.000			1 Berkas	200.000.000
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase keterlaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip**		**100%**	**50.000.000**			**100%**	**50.000.000**
2.24.03.2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Persentase Penyelamatan Dokumen Arsip OPD, Kecamatan, Desa yang Dibubarkan dan dimekarkan**		**100%**	**50.000.000**			**100%**	**50.000.000**
2.24 .03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Daftar	50.000.000			1 Daftar	50.000.000
JUMLAH					**4.825.926.731**				**5.113.698.668**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (%)**		**100%**	**4.183.991.844**			**90%**	**4.602.391.028**
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)**		**90%**	**108.000.000**			**24 Dok.**	**118.800.000**
3.25.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP	3 dok	59.000.000	DAU		3 Dok	64.900.000
3.25.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DKP	3 Dok	3.500.000	DAU		1 Dok.	3.850.000
3.25.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DKP	1 Dok.	3.500.000	DAU		1 Dok.	3.850.000
3.25.01.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DKP	1 Dok.	3.500.000	DAU		1 Dok.	3.850.000
3.25.01.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKDP	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DKP	1 Dok.	3.500.000	DAU		1 Dok.	3.850.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKP	3 Lap.	15.000.000	DAU		1 Lap.	16.500.000
3.25.01.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP	5 Lap.	20.000.000	DAU		16 Lap	22.000.000
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (persen)**		**100%**	**3.410.271.844**			**100%**	**3.751.299.028**
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKP	12 Org/Bln.	3.399.731.844			37 OB.	3.739.705.028
3.25.01.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP	1 Lap.	3.000.000	DAU		1 Lap.	3.300.000
3.25.01.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DKP	6 Lap.	4.540.000	DAU		18 Lap.	4.994.000
3.25.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DKP	1 Dok.	3.000.000	DAU		1 Dok.	3.300.000
3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**		**100%**	**98.000.000**	DAU		**100%**	**107.800.000**
3.25.01.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DKP	38 Paket.	38.000.000	DAU		37 Paket.	41.800.000
3.25.01.2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DKP	6 Org.	60.000.000	DAU		6 Org	66.000.000
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**		**100%**	**280.000.000**	DAU		**100%**	**308.000.000**
3.25.01.2.06. 01	Penyediaanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DKP	5 Paket	5.000.000	DAU		16 Paket.	5.500.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKP	4 Paket	80.000.000	DAU		4 Paket.	88.000.000
3.25.01.2.06. 03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DKP	12 Paket	20.000.000	DAU		12 Paket	22.000.000
3.25.01.2.06. 04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DKP	12 Dokumen	5.000.000	DAU		12 Bln	5.500.000
3.25.01.2.06. 05	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKP	24 Laporan	20.000.000	DAU		24 kali	22.000.000
3.25.01.2.06. 06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKP	18 Lap.	150.000.000	DAU		20 OK	165.000.000
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Peunnjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**		**100%**	**136.900.000**			**100%**	**150.590.000**
3.25.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP	12 Lap.	25.000.000	DAU		500 surat	27.500.000
3.25.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKP	12 Lap.	66.700.000	DAU		12 Bln.	73.370.000
3.25.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKP	6 Lap.	6.000.000	DAU		6 Lap.	6.600.000
3.25.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKP	12 Lap.	39.200.000	DAU		12 Lap+ 1 OH	43.120.000
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**		**100%**	**150.820.000**			**100%**	**165.902.000**
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKP	2 Unit	130.820.000			1 Unit	143.902.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKP	1 Unit	20.000.000			1 Unit	22.000.000

BAPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)**		**28.223**	**1.025.000.000**			**29.708**	**1.127.500.000**
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainya yang dapat Diusahakakn dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengelolaan usaha penangkapan ikan serta ketersediaan sarana perikanan tangkap di daerah dalam setahun**		**100%**	**940.000.000**			**100%**	**1.034.000.000**
3.25.03.2.01. 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	DKP	4 Dok.	35.000.000	DAU		4 Dok.	38.500.000
3.25.03.2.01. 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	DKP	50 Unit.	905.000.000	DAK		184 Unit.	995.500.000
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil di Daerah(%)**		**100%**	**85.000.000**			**100%**	**93.500.000**
3.25.03.2.02. 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	DKP	25 Org.	25.000.000	DAU		200 Orang	27.500.000
3.25.03.2.02. 02	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	DKP	10 Unit Usaha.	60.000.000	DAU		20 Kel.	66.000.000
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)**		**459,28**	**1.480.240.000**			**490,88**	**1.628.264.000**
3.25.04.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase izin usaha yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah bagi pelaku usaha pembudidaya ikan dlm setahun**		**100%**	**15.000.000**			**100%**	**16.500.000**
3.25.04.2.01.02	Pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang izin usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,lokasi dan atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	15 Rekom	15.000.000	DAU		20 Rekom	16.500.000
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Persentase Upaya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil di Daerah**		**100%**	**88.000.000**			**100%**	**96.800.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.04.2.02. 03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	DKP	15 Kel.	60.000.000	DAU		15 Kel.	66.000.000
3.25.04.2.02. 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	DKP	10 klpk	28.000.000	DAU		6 Kali	30.800.000
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**Persentase Pengelolaan Usaha Pembudidaya Ikan di Daerah Dalam Setahun**		**100%**	**1.377.240.000**			**100%**	**1.514.964.000**
3.25.04.2.04. 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	4 Dok.	35.000.000	DAU		4 Dok.	38.500.000
3.25.04.2.04. 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	35 Unit.	600.000.000	DAK		70 Unit.	660.000.000
3.25.04.2.04. 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	1 Unit	532.240.000	DAU		1 Unit	585.464.000
	Oprasional BBIL Kusuri		KUSURI	1 Paket	200.000.000	DAK			220.000.000
3.25.04.2.04. 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	DKP	2 Dok.	10.000.000	DAU		6 Dok.	11.000.000
3.25.0.5	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**PRESENTASI KETERLAKSANAAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN dan PERIKANAN**	DKP	2kali	**20.000.000**	**DAU**		**100%**	22.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan diWilayah Sungai , Danau,Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/kota**	**Persentase kawasan sumberdaya yang diawasi**	DKP	100%	**20.000.000**	**DAU**		**100%**	22.000.000
3.25.05.2.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	DKP	1 Dokumen	10.000.000	DAU		16 Dok	11.000.000
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	DKP	1 Dokumen	10.000.000	DAU		16 Dok	11.000.000
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Peningkatan produksi pengolahan hasil ikan (ton)**	DKP	1.462	**545.000.000**	DAU		1.501	**599.500.000**
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah rekomendasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi penerbitannya (dokumen)**	DKP	**100%**	**35.000.000**			**100%**	**38.500.000**
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	DKP	6 Dok.	35.000.000	DAU		6 Dok.	38.500.000
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah pengujian produk olahan hasil perikanan (Dok)**	DKP	**100%**	**60.000.000**			**100%**	**66.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.06.2.02.02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	DKP	6 Unit Usaha	60.000.000	DAU		8 Dok	66.000.000
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah ikan yang tersalurkan sebagai bahan baku industri (Ton)**	DKP	**100%**	**450.000.000**			**100%**	**495.000.000**
3.25.06.2.03. 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	16.370 Ton.	450.000.000	DAK/DAU		17.195 Ton.	495.000.000
JUMLAH TOTAL					**7.254.231.844**				**7.979.655.028**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISAT

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	Dispar	**100%**	**2.397.224.689**	**APBD II**	Dispar	**100%**	**2.507.856.809**
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	Dispar	**100%**	**26.831.500**	**APBD II**	Dispar	**100%**	**15.332.799**
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkar daerah	Dispar	3 dok	4.382.000	APBD II	Dispar	**2 dok**	**7.311.849**
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispar	1 dok	4.124.000	APBD II	Dispar	1 dok	2.067.450
3	26	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispar	1 dok	4.124.000	APBD II	Dispar	1 dok	-
3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dispar	1 dok	4.124.000	APBD II	Dispar	1 dok	-
3	26	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jJumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dispar	1 dok	4.124.000	APBD II	Dispar	1 dok	-
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispar	1 dok	5.953.500	APBD II	Dispar	1 dok	5.953.500
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispar	2 Laporan	5.953.500	APBD II	Dispar	2 Laporan	-

BAPPEDA HALUT

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah (person)	Dispar	100%	**1.996.440.539**	**APBD II**	Dispar	100%	**1.996.731.123**
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispar	32 org/ bln	Rp 1.984.957.124	APBD II	Dispar	23 org/ bln	Rp 1.984.957.124
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispar	1 laporan	5.811.666	APBD II	Dispar	1 dok	6.102.249
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispar	1 laporan	5.671.749	APBD II	Dispar	1 dok	5.671.749
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Dispar**	**100%**	**65.000.000**	**APBD II**	**Dispar**	**100%**	**92.545.242**
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dispar	1 pkt	-	APBD II	Dispar	25 pcs	18.152.742
3	26	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jakarta/ bali/ manado/ makasar	4 org	65.000.000	APBD II	Jakarta/ bali/ manado/ makasar	4 org	74.392.500
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah (persen)**	**Dispar**	**90%**	**201.952.650**	**APBD II**	**Dispar**	**90%**	**273.110.145**
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispar	5 pkt	50.952.650	APBD II	Dispar	5 pkt	30.581.250
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dispar	2 pkt	8.000.000	APBD II	Dispar	20 pkt	**14.699.895**
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dispar	1 dokumen	4.000.000	APBD II	Dispar	1 dokumen	12.526.500
3	26	01	2.08	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dispar	2 laporan	9.000.000	APBD II	Dispar	1 Laporan	15.120.000
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**sofifi, jakarta**	6 Laporan	130.000.000	APBD II	**sofifi, jakarta**	4 laporan	200.182.500
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dispar**	**100%**	**17.000.000**	**APBD II**	**Dispar**	**1**	**17.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispar	4 Laporan	9.000.000	APBD II	Dispar	240 surat,	**9.000.000**
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dispar	2 Laporan	8.000.000	APBD II	Dispar	5 Laporan	8.000.000
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dispar**	**100%**	**90.000.000**	**APBD II**	**Dispar**	**100%**	**113.137.500**
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dispar	1 unit Mobil	78.000.000	APBD II	Dispar	1 unit mobil	**15.498.788**
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dispar	2 unit mobil, 1 unit kend. Roda 2	12.000.000	APBD II	Dispar	2 unit mobil, 1 unit kend. Roda 2	**97.638.713**
3	26	2			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Presentase Potensi Destinasi / ODTW yang telah dikembangkan**		44,60	**2.958.500.000,00**	**APBD II/ DAK**		44,60	**2.863.010.000,00**
						Presentase lahan kawasan destinasi berstatus clean and clear		16,66%		**APBD II**		16,66%	
3	**26**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Presentase Jumlah Daya tarik wisata dalam kondisi terawat/baik**	**Tobelo**	**50%**	**-**	**APBD II**	**Tobelo**	**35%**	**163.010.000,00**
3	26	2	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah loksi DTW Kabupaten Kota	kao, Tobelo	*2 lokasi*			kao, Tobelo	*2 lokasi*	163.010.000,00
3	**26**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Presentase kawasan strategi pariwisata yang terkelola**	**Loloda,Galela , Kao**	***100%***	**2.938.500.000,00**	**APBD II/DAK**	**Loloda,Galela , Kao**	***100%***	**2.550.000.000,00**
3	26	2	2.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan strategi pariwisata	Loloda,Galela, Kao	*1 dokumen*	0,00	APBD II	Loloda,Galela, Kao	*1 dokumen*	-
3	26	2	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Halut	*1 dokumen*	350.000.000,00	APBD II	Halut	*1 dokumen*	350.000.000,00
3	26	2	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	CLUSTER TOBELO	*1 kawasan*	-	APBD II	dispar	*3 kawasan*	100.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	2	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tobelo Timur	*10 'unit*	2.588.500.000	APBD II	tj Jere, Tj bonggo, Mamuya, mawea, Tobelo	*24 'unit*	2.000.000.000
3	26	2	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jogya	*1 Laporan*	-	APBD II	Jogya	*1 Laporan*	100.000.000,00
3	**26**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Presentase destinasi pariwisata yang terkelola**	**Halut**	**45%**	**20.000.000,00**	**APBD II**	**Halut**	**45%**	**150.000.000,00**
3	26	2	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	17 KEC	2 laporan	20.000.000,00	APBD II	17 KEC	1 dok	50.000.000
3	26	2	2.03	07	Penetapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Galela -Tobelo	2 lokasi /deswis	-	APBD II	Galela -Tobelo	2 lokasi /deswis	100.000.000
3	**26**	**2**	**2.04**		***Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah***	**Jumlah Usaha pariwisata yang memiliki Tansa daftar usaha**		**2 dok**	-	**APBD II**		**2 dok**	-
3	26	2	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Tobelo	1 'Dokumen	-	APBD II	Tobelo	1 'Dokumen	-
3	26	2	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Tobelo	1 laporan	-	APBD II	Tobelo	1 laporan	-
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing**	**500**	**500,00**	**131.628.000,00**	**APBD II**	**500**	**750,00**	**230.000.000,00**
						Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara		**95.500,00**	-	**APBD II**		**95.000,00**	-
3	**26**	**3**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri**		**3 event**	**131.628.000,00**	**APBD II**		**3 event**	**230.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	3	2.01	06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	**Tobelo**	1 kegiatan	100.000.000,00	APBD II	Jakarta/ bali/ manado/ makasar	1 Laporan	130.000.000
3	26	3	2.01	07	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tobelo	1 DOK	31.628.000	APBD II	Tobelo	1 DOK	100.000.000
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Presentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan/pengembangan**		**85%**	**-**	**APBD II**		**85%**	**100.000.000,00**
3	**26**	**05**	**2,01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**jumlah SDM ekraf yang dibina**		**220 org**	**-**	**APBD II**		**220 org**	**-**
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jakarta	80 0rg	-	APBD II	Jakarta	80 0rg	-
3	**26**	**05**	**2.01**	**08**	***Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI***	**Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI**	**Jakarta**	**2 org**	**-**				**100.000.000,00**
3	26	05	2,01	10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Tobelo	70 org	-	APBD II	Tobelo	70 org	100.000.000
TOTAL									**5.487.352.689,30**				**5.700.866.809,20**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**Urusan Pilihan**								
3.27	**Pertanian**								
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah**		90 persen	**13.820.655.610**			90 persen	**14.717.369.857**
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**65.000.000**			**100 Persen**	**108.500.000**
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tobelo	3 Dokumen	35.000.000	DAU		3 Dokumen	75.000.000
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tobelo	1 Dokumen	2.000.000	DAU		1 Dokumen	2.000.000
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tobelo	1 Dokumen	2.000.000	DAU		1 Dokumen	2.000.000
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tobelo	1 Dokumen	2.000.000	DAU		1 Dokumen	2.500.000
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tobelo	1 Dokumen	2.000.000	DAU		1 Dokumen	2.000.000
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobelo	1 Laporan	10.000.000	DAU		2 Laporan	10.000.000
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tobelo	18 Laporan	12.000.000	DAU		18 Laporan	15.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**12.571.535.410**			**100%**	**13.268.979.857**
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tobelo	136 orang/bulan	12.553.535.410	DAU		136 orang/ bulan	13.243.979.857
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tobelo	3 Laporan	8.000.000	DAU		3 Laporan	10.000.000
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tobelo	18 Laporan	10.000.000	DAU		18 Laporan	15.000.000
3.27.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**5.000.000**			**100 Persen**	**5.000.000**
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tobelo	1 Dokumen	2.500.000	DAU		1 Dokumen	2.500.000
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobelo	12 Laporan	2.500.000	DAU		12 Laporan	2.500.000
3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**84.350.200**			**100 Persen**	**100.000.000**
3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kao Teluk, Malifut, Kao, Kao Utara, Kao Barat, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Tobelo, Galela, Galela Selatan, Galela Utara, Loloda Utara	1 dokumen	34.350.200	DAU			50.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tobelo	50 orang	50.000.000	DAU		50 orang	50.000.000
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**310.600.000**			**100 Persen**	**389.000.000**
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tobelo	1 Paket	100.000.000	DAU		1 Paket	100.000.000
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tobelo	1 Paket	7.000.000	DAU		1 Paket	10.000.000
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tobelo	12 Dokumen	3.600.000	DAU		1 Dokumen	4.000.000
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tobelo	12 Laporan	50.000.000	DAU		12 Laporan	75.000.000
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	150.000.000	DAU		12 Laporan	200.000.000
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 Persen**	**368.000.000**			**100 Persen**	**378.000.000**
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tobelo	1 Unit	78.000.000	DAU		1 Unit	78.000.000
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tobelo	140 Unit	40.000.000	DAU		20 Unit	50.000.000
3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tobelo	1 Unit	250.000.000	DAU		1 Unit	250.000.000
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**		**100 Persen**	**276.170.000**			**100 Persen**	**317.890.000**
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tobelo	12 Laporan	60.000.000	DAU		12 Laporan	100.000.000
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tobelo	12 Laporan	67.890.000	DAU		12 Laporan	67.890.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tobelo	12 Laporan	24.360.000	DAU		12 Laporan	25.000.000
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tobelo	12 Laporan	123.920.000	DAU		12 Laporan	125.000.000
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 Persen**	**140.000.000**			**100 Persen**	**150.000.000**
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tobelo	1 Unit	90.000.000	DAU		1 Unit	100.000.000
3.27.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Tobelo	1 unit	50.000.000	DAU		1 unit	50.000.000
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Produktivitas tanaman pangan - padi dan jagung		4,60 Ton/Ha	**1.296.242.100**			4,65 Ton/Ha	**1.450.000.000**
		Produktivitas tanaman hortikultura - cabai dan bawang merah		0,60 Ton/Ha				0,61 Ton/Ha	
		Produktivitas perkebunan		0,82 Ton/Ha				0,85 Ton/Ha	
		Produktivitas peternakan - Populasi Ternak		204.910 ekor				207.368 ekor	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase kelompok tani menggunakan bantuan sarana pertanian yang diberikan terawasi**		**100 Persen**	**841.242.100**			**100 Persen**	**900.000.000**
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		12 Laporan	766.242.100	DAU		12 Laporan	800.000.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		12 Laporan	75.000.000	DAU		12 Laporan	100.000.000
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah sumber daya genetik hewan dan tumbuhan yang di fasilitasi**		**1 Unit**	**330.000.000**			**1 Unit**	**200.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Tobelo, Tobelo Tengah	1 Dokumen	330.000.000	DAU		1 Dokumen	200.000.000
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Jumlah Benih/bibit ternak berkualitas yang disediakan**		**250 Dosis/ 75 ekor**	**125.000.000**			**1000 Dosis/5000 ekor**	**350.000.000**
3.27.02.2.06.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		50 ekor	75.000.000	DAU		5000 Ekor	250.000.000
3.27.02.2.06.04	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Tobelo	250 dosis	50.000.000	DAU		1000 dosis	100.000.000
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Produksi tanaman pangan (Ton)		228.428 Ton	**5.945.000.000**			335.218 Ton	**10.250.000.000**
		Produksi tanaman hortikultura (Ton)		7.735 Ton				10.752 Ton	
		Produksi tanaman perkebunan (Ton)		92.003 Ton				124.197 Ton	
		Produksi peternakan (Kg)		686.124 kg				928.363 kg	
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Cakupan prasarana pertanian yang digunakan**		**80 Persen**	**200.000.000**			**80 Persen**	**250.000.000**
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		12 Laporan	200.000.000	DAU		12 Laporan	250.000.000
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah prasarana pertanian yang dibangun**		**23 Unit**	**5.745.000.000**			**30 Unit**	**10.000.000.000**
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		6 Unit	1.800.000.000	DAK		10 Unit	3.000.000.000
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		5 Unit	1.795.000.000	DAU, DAK		10 Unit	3.000.000.000
3.27.03.2.02.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi		4 Unit	1.200.000.000	DAK		10 Unit	3.000.000.000
3.27.03.2.02.14	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi		1 Unit	950.000.000	DAK		1 Unit	1.000.000.000
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**		**81 Persen**	**145.000.000**			**82%**	**180.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah ternak besar, ternak kecil, unggas dan Hewan Pembawa Rabies (HPR) yang dilayani**		**1000 ekor**	**75.000.000**			**1000 ekor**	**100.000.000**
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	16 kecamatan	12 Laporan	75.000.000	DAU		12 Laporan	100.000.000
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Presentase unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner**		**100 persen**	**70.000.000**			**100 persen**	**80.000.000**
3.27.04.2.04.007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jawa Barat	1 Orang	20.000.000	DAU		1 orang	30.000.000
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Tobelo	20 orang	50.000.000	DAU		20 orang	50.000.000
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT - Tanaman Pangan**		**95 Persen**	**200.000.000**			**95%**	**200.000.000**
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT - Tanaman Hortikultura		**92 Persen**				**92%**	
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT - Tanaman Perkebunan		**80 Persen**				**80%**	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Jumlah luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang dikendalikan/ditangani**		**150 Ha**	**200.000.000**			**155 Ha**	**200.000.000**
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		150 Ha	200.000.000	DAU		150 Ha	200.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya**		**11 persen**	**265.000.000**			**13 persen**	**370.000.000**
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani yang difasilitasi**		**42 Unit**	**265.000.000**			**68 Unit**	**370.000.000**
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kao Teluk, Malifut, Kao, Kao Utara, Kao Barat, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Tobelo, Galela, Galela Selatan, Galela Utara, Loloda Utara	12 unit	200.000.000	DAU		12 unit	250.000.000
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tobelo	30 unit	50.000.000	DAU		30 unit	75.000.000
3.27.07.2.01.06	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Jawa Barat	1 Orang	15.000.000	DAU		3 Orang	45.000.000
TOTAL					**21.671.897.710**				**27.167.369.857**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 31. 01.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**		**90%**				**90%**	
3. 31. 01. 2. 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tingkat Konsistensi perencanaan perangkat daerah (Persen)		**100**				**100**	
3. 31. 01. 2. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dagperin	3 Dokumen	4.515.000	DAU		3 Dokumen	21.430.565,00
3. 31. 01. 2. 01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dagperin	1 Laporan	2.616.200	DAU		1 Laporan	9.621.442,00
3. 31. 01. 2. 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (Persen)**		**100**				**100**	
3. 31. 01. 2. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dagperin	26 Orang/Bulan	2.570.085.652	DAU		26 Orang/Bulan	2.627.690.679,00
3. 31. 01. 2. 02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dagperin	1 Laporan	4.490.000	DAU		1 Laporan	8.902.463,00
3. 31. 01. 2. 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dagperin	18 Laporan	3.710.000	DAU		18 Laporan	12.884.834
3. 31. 01. 2. 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%				100%	

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
3. 31. 01. 2. 05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tobelo	1 Dokumen	2.349.000			1 Dokumen	8.635.725
3. 31. 01. 2. 05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tobelo	1 Dokumen	3.710.000			1 Dokumen	13.003.725
3. 31. 01. 2. 05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jakarta	8 Orang	44.597.700	DAU		8 Orang	151.865.516
3. 31. 01. 2. 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%				100%	
3. 31. 01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dagperin	1 Paket	19.399.600	DAU		1 Paket	39.774.075,00
3. 31. 01. 2. 06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dagperin	1 Paket	5.445.000	DAU		1 Paket	12.734.496,00
3. 31. 01. 2. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dagperin	1 Dokumen	17.200.000	DAU		1 Dokumen	32.179.010,00
3. 31. 01. 2. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dagperin	1 Laporan	3.311.900	DAU		1 Laporan	12.397.031,00
3. 31. 01. 2. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sofifi, Jakarta	1 Laporan	33.555.500	DAU		1 Laporan	152.713.890,00
3. 31. 01. 2. 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**		**100%**				**100%**	
3. 31. 01. 2. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dagperin	1 Laporan	95.593.800	DAU		1 Laporan	195.129.668
3. 31. 01. 2. 08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dagperin	1 Laporan	50.870.800	DAU		1 Laporan	176.670.443
3. 31. 01. 2. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dagperin	1 Laporan	43.660.700	DAU		1 Laporan	113.164.118
3. 31. 01. 2. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**		**100%**				**100%**	

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
3. 31. 01. 2. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dagperin	4 Unit	125.140.000	DAU		4 Unit	183.952.448
3. 31. 01. 2. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dagperin	20 Unit	4.699.600	DAU		20 Unit	9.550.872
3. 31. 01. 2. 09. 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Dagperin	20 Unit	58.380.000	DAU		20 Unit	366.025.000
3. 29. 05.	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Cakupan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (persentase terhadap rencana tahun berkenaan)**		**100%**				**100%**	
3. 29. 05. 2. 01	**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kab/Kota**		**100**				**100**	
3. 29. 05. 2. 01. 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dagperin	1 Dokumen	13.082.000	DAU		1 Dokumen	104.449.500
3. 29. 05. 2. 01. 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dagperin	1 Dokumen	16.357.400	DAU		1 Dokumen	87.799.500
3. 29. 05. 2. 01. 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dagperin	1 Laporan	7.240.000	DAU		1 Laporan	57.751.000
3. 30. 02.	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perizinan**	**Presentase permohonan perijinan usaha perdagangan (IPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) yang diterbitkan rekomendasi teknisnya.**		**11,9**				**11,9**	
3. 30. 02. 2. 01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Presentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan		**85**				**87**	

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
3. 30. 02. 2. 01. 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dagperin	4 Dokumen	80.019.600	DAU		4 Dokumen	24.419.803,00
3. 30. 02. 2. 02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Presentase penerbitan TDG		**80**				**85**	
3. 30. 02. 2. 02. 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	2 Dokumen	46.679.300	DAU		2 Dokumen	43.079.450
3. 30. 03.	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Pasar Rakyat/Tradisional yang beroperasi secara normal**		73.9				82.6	
3. 30. 03. 2. 02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Presentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		**75**				**80**	
3. 30. 03. 2. 02. 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tobelo, Kao,Galela	1 Dokumen	77.869.500	DAU		1 Dokumen	233.679.072
3. 30. 04.	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan**		**52.3**				**57.6**	
3. 30. 04. 2. 01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan keamanan level stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Halmahera Utara		**100**				**100**	
3. 30. 04. 2. 01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tobelo, Kao,Galela, Loloda	1 Laporan	62.247.600	DAU		1 Laporan	55.797.372
3. 30. 04. 2. 02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		100				100	

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
3. 30. 04. 2. 02. 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tobelo, Galela, Kao, Loloda	1 Laporan	62.251.900	DAU		1 Laporan	26.777.448
3. 30. 04. 2. 02. 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tobelo	2 Laporan	146.800.325	DAU		2 Laporan	520.249.600
3. 30. 05. 2. 01. 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jakarta	1 Pelaku Usaha		DAU		1 Pelaku Usaha	95.201.195
3. 30. 06.	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti**		100				100	
3. 30. 06.	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti**		100				100	
3. 30. 06. 2. 01	**Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		95				97	
3. 30. 06. 2. 01. 01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	55 Unit	36.675.600	DAU		60 Unit	125.000.000
3. 30. 06. 2. 01. 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	50 Orang	47.139.400	DAU		50 Orang	125.000.000
3. 30. 07.	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (persentase teradap rencana tahun berkenaan)**		100				100	
3. 30. 07. 2. 01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Presentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100				100	

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
3. 30. 07. 2. 01. 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Tobelo	10 UMKM	34.356.100	DAU		10 UMKM	59.200.510
3. 31. 02.	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Pertumbuhan jumlah industri kecil (persen)**		7.1				7.2	
3. 31. 02. 2. 01	**Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Presentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		98				99	
3. 31. 02. 2. 01. 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jakarta	1 Dokumen	19.663.800	DAU		1 Dokumen	94.109.059
3. 31. 02. 2. 01. 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Tobelo, Kao, Galela	1 Dokumen	11.209.700	DAU		1 Dokumen	65.340.621
3. 31. 03.	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**	**Presentase permohonan perijinan usaha industri yang diterbitkan rekomendasi teknisnya**		100				100	
3. 31. 03. 2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Presentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan**		75				75	

BAPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
3. 31. 03. 2.01. 01	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usahasektorperindustriandalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi PenanamanModal DalamNegeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	1 Dokumen	16.200.200			1 Dokumen	32.200.500
3. 31. 03. 2.01. 02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jakarta	1 Dokumen	19.065.000	DAU		1 Dokumen	67.799.500
3. 31. 04.	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Presentase jumlah industri kecil dan sedang yang terdaftar dalam basis data SIINAS**		100				100	
3. 31. 04. 2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Presentase data perusahaan industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		86				90	

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN /SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
3. 31. 04. 2.01. 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	1 Dokumen	14.599.200			1 Dokumen	50.099.500
3. 31. 04. 2.01. 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	1 Dokumen	19.065.000	DAU		1 Dokumen	49.900.500
TOTAL					**3.823.852.077**				**6.066.180.130**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja perangkat Daerah**		***90%***	**35.924.541.038**			**90%**	**40.277.034.602**
4	**01**	**01**	**1.01**		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***Persentase konsistensi Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan Renja Terhadap Renstra***		***100%***	***61.000.000***			***100%***	***63.000.000***
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Halmahera Utara	2 Dok	10.000.000	DAU		2 Dok	5.000.000
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Halmahera Utara	1 Dok	5.000.000	DAU		1 Dok	6.500.000
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Halmahera Utara	1 Dok	5.000.000	DAU		1 Dok	6.500.000
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Halmahera Utara	1 Dok	5.000.000	DAU		1 Dok	6.500.000
4	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Halmahera Utara	1 Dok	5.000.000	DAU		1 Dok	6.500.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerj.a dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Halmahera Utara	1 Lap	25.000.000	DAU		1 Lap	25.000.000
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Halmahera Utara	2 Lap	6.000.000	DAU		1 Lap	7.000.000
4	01	01	1.02		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah***		***100%***	***11.444.879.655***			***100%***	***11.815.000.000***
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Halmahera Utara	2522 O/B	11.419.879.655	DAU		2522 O/B	11.650.000.000
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Halmahera Utara	3 Lap	25.000.000	DAU		3 Lap	165.000.000
4	01	01	1.05		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Capaian Indikator Kinerja Subkegiatan Administrasi Kepegawaian***		***100%***	***478.000.000***			***100%***	***817.757.102***
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Halmahera Utara			DAU		1 Pkt	92.944.500
4	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Halmahera Utara	1 Dok	65.000.000	DAU		1 Dok	150.000.000
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Daerah	10 Org	119.000.000	DAU		17 Org	152.312.602

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Halmahera Utara	120 Org	175.000.000	DAU		200 Org	195.000.000
4	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	10 Orang	119.000.000	DAU		18 Org	227.500.000
4	01	01	1.06		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Capaian Indikator Kinerja Subkegiatan Administrasi Umum Sekretariat Daerah***		***100%***	***3.899.999.000***			***100%***	***6.000.222.000***
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Halmahera Utara	1 Pkt	249.999.000	DAU		1 Pkt	285.000.000
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Halmahera Utara	1 Pkt	850.000.000	DAU		1 Pkt	1.985.060.000
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Halmahera Utara	1 Pkt	350.000.000	DAU		1 Pkt	280.000.000
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Halmahera Utara	1 lap	950.000.000	DAU		1 lap	950.102.000
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	1 lap	1.500.000.000	DAU		1 lap	2.500.060.000
4	01	01	1.07		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Capaian Indikator Kinerja Subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah***		***100%***	***1.100.000.000***			-	-
4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Halmahera Utara	2 Unit	1.100.000.000	DAU		-	-

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	1.08		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Capaian Indikator Kinerja Subkegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***100%***	***4.550.000.000***			***100%***	***6.120.055.500***
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Halmahera Utara	1 Lap	65.000.000	DAU		1 Lap	70.000.000
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Halmahera Utara	1 Lap	1.200.000.000	DAU		1 Lap	2.250.000.000
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Halmahera Utara	1 Lap	85.000.000	DAU		1 Lap	165.000.000
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Halmahera Utara	1 Lap	3.200.000.000	DAU		1 Lap	3.635.055.500
4	01	01	1.09		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Capaian Indikator Kinerja Subkegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***100%***	***3.925.700.000***			***100%***	***4.965.000.000***
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Halmahera Utara	3 Unit	125.700.000	DAU		3 Unit	175.000.000
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Halmahera Utara	15 Unit	1.850.000.000	DAU		15 Unit	2.590.000.000
4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Halmahera Utara	5 Unit	1.950.000.000	DAU		5 Gdg	2.200.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	1.11		***Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Subkegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***		***100%***	***914.962.383***			***100%***	***925.000.000***
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Halmahera Utara	24 OB	289.962.383,00	DAU		24 O/B	195.000.000
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Luar Daerah	24 OB	225.000.000,00	DAU		24 O/B	230.000.000
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Halmahera Utara	24 OB	400.000.000	DAU		24 O/B	500.000.000
4	01	01	1.12		***Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	***Persentase Capaian Indikator Kinerja Subkegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***		***100%***	***2.950.000.000***			***100%***	***3.355.000.000***
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Daerah	Kab. Halmahera Utara	1 Pkt	1.450.000.000	DAU		1 Pkt	1.700.000.000
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Halmahera Utara	1 Pkt	1.250.000.000	DAU		1 Pkt	1.370.000.000
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Halmahera Utara	1 Pkt	250.000.000			1 Pkt	285.000.000
4	01	01	2.13		***Penataan Organisasi***	***Persentase Penataan Organisasi***		***100%***	***1.000.000.000***			***100%***	***1.016.000.000***
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Halmahera Utara	1 Dok	350.000.000	DAU		2 Dok	355.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Halmahera Utara	1 Lap	150.000.000	DAU		1 Lap	160.000.000
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Halmahera Utara	1 Dok	135.000.000	DAU		2 Dok	165.000.000
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Halmahera Utara	1 Dok	120.000.000	DAU		1 Dok	156.000.000
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Luar Daerah	2 Dok	245.000.000	DAU		2 Dok	180.000.000
4	01	01	2.14		***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	***Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Subkegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***		***100%***	***5.600.000.000***			***100%***	***5.200.000.000***
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Halmahera Utara	2 Lap	1.250.000.000	DAU		2 Lap	1.250.000.000
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Halmahera Utara	6 Lap	4.350.000.000	DAU		6 Lap	3.950.000.000
4	01	02			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah**		**85.19 (Nilai)**	**1.350.000.000**			**89,45 (Nilai)**	**1.920.495.736**
						Persentase keterlaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum serta kerjasama daerah		**100%**	**7.381.703.688**			**100%**	**7.149.650.000**
4	01	02	2.01		***Administrasi Tata Pemerintahan***	***Persentase Jumlah Laporan Adminsitrasi Tata Pemerintahan yang Terlaksana***		***100%***	***1.350.000.000***			***100%***	***1.920.495.736***

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Halmahera Utara	4 Dok	650.000.000	DAU		4 Dok	552.245.736
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Kewilayahan	Kab. Halmahera Utara	1 Dok	250.000.000	DAU		1 Dok	370.000.000
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Halmahera Utara	6 Dok	450.000.000	DAU		6 Dok	998.250.000
4	01	02	2.02		***Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	***Persentase Fasilitasi dan Pelaksanaan Kebijkan Kesejahteraan Rakyat***		***100%***	***4.836.703.688***			***100%***	***4.590.000.000***
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Luar dan Dalam Daerah	6 Dok	1.850.000.000	DAU		6 Dok	1.500.000.000
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Halmahera Utara	1 Dok	150.000.000	DAU		1 Dok	200.000.000
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Halmahera Utara	56 Dok	2.836.703.688	DAU		56 Dok	2.890.000.000
4	01	02	2.03		***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	***Persentase Pemenuhan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***		***100%***	***2.295.000.000***			***100%***	***2.209.650.000***
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Halmahera Utara	5 Dok	520.000.000	DAU		3 Produk	810.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Halmahera Utara	10 Kasus	1.550.000.000	DAU		10 Kasus	1.200.000.000
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Halmahera Utara	3 Dok	225.000.000	DAU		450 Produk	199.650.000
4	01	02	2.04		***Fasilitasi Kerjasama Daerah***	***Persentase Kerjasama yang Terlaksana***		***100%***	***250.000.000***			***100%***	***350.000.000***
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1 Dok	250.000.000	DAU		1 Dok	350.000.000
4	01	03			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase keterlaksanaan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan**		**100%**	**305.000.000**			**100,0**	**405.000.000**
						Presentase jumlah paket pengadaan barang/ jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif (lelang)		**16,9**	**382.480.887**			**18,6**	**1.566.685.547**
4	01	03	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Presentase pelaksanaan kebijakan perekonomian**		***100%***	***55.000.000***			***100%***	***65.000.000***
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Halmahera Utara	1 Dok	55.000.000	DAU		1 Dok	65.000.000
4	01	03	2.02		***Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	***Persentasi terlaksananya administrasi pembangunan***		***100%***	***250.000.000***			***100%***	***340.000.000***
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Halmahera Utara	2 Dok	65.000.000	DAU		2 Dok	55.000.000
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Halmahera Utara	2 Lap	120.000.000	DAU		1 Lap	225.000.000
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Halmahera Utara	2 Lap	65.000.000	DAU		3 Lap	60.000.000
4	01	03	2.03		***Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	***Meningkatnya pengguna layanan secara elektronik***		***100%***	***382.480.887***			***100%***	***1.566.685.547***

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Halmahera Utara	80 Dok	150.000.000	DAU		85 Dok	1.095.000.000
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Halmahera Utara	2 Dok	182.480.887	DAU		2 Dok	386.685.547
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Halmahera Utara	30 Org	50.000.000	DAU		40 Org	85.000.000
									45.343.725.613				**51.318.865.885**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4.01 . 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah**	SEKWAN	**100%**	**32.214.825.562**	DAU		**100%**	**35.067.324.862**
4.01 . 01 . 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	SEKWAN	**100%**	**40.023.900**			**100%**	**40.023.900**
4.01 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	SEKWAN	2 dokumen	5.717.700	DAU		2 dokumen	5.717.700,00
4.01 . 01 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil kooordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	SEKWAN	1 dokumen	5.717.700	DAU		1 dokumen	5.717.700,00
4.01 . 01 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA_SKPD	SEKWAN	1 dokumen	5.717.700	DAU		1 dokumen	5.717.700,00
4.01 . 01 . 2.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	SEKWAN	1 dokumen	5.717.700	DAU		1 dokumen	5.717.700,00
4.01 . 01 . 2.01 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	SEKWAN	2 dokumen	5.717.700	DAU		1 dokumen	5.717.700,00
4.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SEKWAN	5 Laporan	5.717.700	DAU		4 Lap	5.717.700,00
4.01 . 01 . 2.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	SEKWAN	1 Laporan	5.717.700	DAU		1 Lap	5.717.700,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4.01 . 01 . 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah**	SEKWAN	**100%**	**3.679.891.560**			**100%**	**3.679.891.560**
4.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	SEKWAN	392 Orang/Bulan	3.679.891.560	DAU		392 Orang/Bulan	3.679.891.560,00
4.01 . 01 . 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaiaan perangkat Daerah**	SEKWAN	**100%**	**382.313.000**			**100%**	**382.313.000**
4.01 . 01 . 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	SEKWAN	1 paket	35.165.000	DAU		**3 paket**	35.165.000,00
4.01 . 01 . 2.05.10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti pendidikan dan pelatihan	SEKWAN	6 orang	178.736.000	DAU		14 orang	178.736.000,00
4.01 . 01 . 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SEKWAN	5 orang	168.412.000	DAU		14 orang	168.412.000,00
4.01 . 01 . 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi umum perangkat Daerah**	SEKWAN	**100%**	**1.605.864.302**			**100%**	**1.605.864.302**
4.01 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	SEKWAN	8 Paket	850.000.000	DAU		8 Paket	850.000.000,00
4.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	SEKWAN	2 Paket	250.016.302	DAU		2 Paket	250.016.302,00
4.01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	SEKWAN	1 Dok	200.000.000	DAU		1 Dok	200.000.000,00
4.01 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	SEKWAN	3 Laporan	305.848.000	DAU		3 Laporan	305.848.000,00
4.01 . 01 . 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	SEKWAN	**100%**	**150.000.000**			**100%**	**150.000.000**
4.01 . 01 . 2.07 . 10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	SEKWAN	1 Unit	150.000.000	DAU		4 Unit	150.000.000,00
4.01 . 01 . 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyenyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	SEKWAN	**100%**	**1.212.425.300**			**100%**	**1.212.425.300**
4.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SEKWAN	12 Laporan	410.673.800	DAU		12 Laporan	410.673.800,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SEKWAN	12 Laporan	267.327.300	DAU		12 Laporan	267.327.300,00
4.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SEKWAN	12 Laporan	534.424.200	DAU		12 Laporan	534.424.200,00
4.01 . 01 . 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	SEKWAN	**100%**	**405.193.500**			**100%**	**821.466.700**
4.01 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SEKWAN	2 Unit	201.053.500	DAU		2 Unit	201.053.500,00
4.01 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	SEKWAN	1 Unit	129.140.000	DAU		2 Unit	129.140.000,00
4.01 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SEKWAN	1 Unit	75.000.000	DAU		2 Unit	491.273.200,00
4.02 . 02 . 2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Cukupan Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	SEKWAN	**100%**	**23.074.240.400**			**100%**	**23.599.105.400**
4.02 . 02 . 2.15 . 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	SEKWAN	420 orang /bulan	22.605.180.000	DAU		420 orang /bulan	22.605.180.000,00
4.02 . 02 . 2.15 . 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	SEKWAN	4 Paket	229.060.400	DAU		4 Paket	229.060.400,00
4.02 . 02 . 2.15 . 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	SEKWAN	30 Orang	240.000.000	DAU		30 Orang	764.865.000,00
4.02 . 02 . 2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Cakupan layanan administrasi DPRD**	SEKWAN	**100%**	**1.664.873.600**			**100%**	**3.426.234.700**
4.02 . 02 . 2.16 . 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	SEKWAN	1 Laporan	92.180.000	DAU		1 Laporan	92.180.000,00
4.02 . 02 . 2.16 . 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	SEKWAN	12 Paket	1.572.693.600	DAU		12 Paket	3.334.054.700,00
4.02 . 02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Keterlaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	SEKWAN	**100%**	**10.356.333.140**			**100%**	**19.457.465.000**
4.02 . 02 . 2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD**	**Cakupan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD**	SEKWAN	**100%**	**775.200.000**			**100%**	**775.200.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4.02 . 02 . 2.01 . 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	SEKWAN	5 Dok	750.000.000	DAU		5 Dok	750.000.000,00
4.02 . 02 . 2.01 . 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	SEKWAN	5 Dok	25.200.000	DAU		5 Dok	25.200.000,00
4.02 . 02 . 2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Cakupan Ketersediaan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD**	SEKWAN	**100%**	**1.186.970.000**			**100%**	**1.195.605.000**
4.02 . 02 . 2.04 . 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	SEKWAN	1 Dok	477.770.000	DAU		1 Dok	477.770.000,00
4.02 . 02 . 2.04 . 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	SEKWAN	3 Orang	296.200.000	DAU		3 Orang	302.875.000,00
4.02 . 02 . 2.04 . 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	SEKWAN	14 orang	413.000.000	DAU		14 orang	414.960.000,00
4.02 . 02 . 2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Cakupan Terpenuhinya Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disampaikan Kepada Anggota DPRD**	SEKWAN	**100%**	**4.572.610.000**			**100%**	**4.589.110.000**
4.02 . 02 . 2.05 . 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	SEKWAN	1 Laporan	65.800.000	DAU		1 Laporan	82.300.000,00
4.02 . 02 . 2.05 . 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran yang disusun	SEKWAN	3 Dok	6.810.000	DAU		3 Dok	6.810.000,00
4.02 . 02 . 2.05 . 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	SEKWAN	3 Dok	4.500.000.000	DAU		3 Dok	4.500.000.000,00
4.02 . 02 . 2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Presentasi Fasilitasi Tugas DPRD**	SEKWAN	**100%**	**3.821.553.140**			**100%**	**12.897.550.000**
4.02 . 02 . 2.08 . 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	SEKWAN	3 Dok	3.821.553.140	DAU		3 Dok	12.897.550.000,00
JUMLAH TOTAL					**42.571.158.702**				**54.524.789.862**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**01**				**PERENCANAAN**									
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Kantor BAPPEDA**	**90**	**%**	**7.495.994.281,00**		-	**90%**	**8.148.413.029,00**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kantor BAPPEDA**	**100**	**%**	**27.553.500,00**		-	**100%**	**36.962.800,00**
						Tingkat Konsistensi Penganggaran Perangkat Daerah		**100**	**%**				**100%**	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	3	Dok	10.256.500,00	APBD II	-	2 Dok	12.931.000,00
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor BAPPEDA	1	Dok	1.464.000,00	APBD II	-	1 Dok	1.983.000,00
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor BAPPEDA	1	Dok	1.464.000,00	APBD II	-	1 Dok	1.983.000,00
5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kantor BAPPEDA	1	Dok	1.464.000,00	APBD II	-	1 Dok	1.983.000,00
5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kantor BAPPEDA	1	Dok	1.464.000,00	APBD II	-	1 Dok	1.983.000,00
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor BAPPEDA	2	Lap	5.615.000,00	APBD II	-	2 Lap	9.687.300,00
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	4	Lap	5.826.000,00	APBD II	-	4 Lap	6.412.500,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kantor BAPPEDA**	**100**	**%**	**5.429.532.181,00**		-	**100%**	**5.519.367.229,00**
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BAPPEDA	30	OB	5.416.333.181,00	APBD II	-	30 OB	5.505.405.229,00
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor BAPPEDA	1	Lap	3.940.000,00	APBD II	-	1 Lap	4.018.000,00
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dalam dan Luar Daerah	4	Lap	9.259.000,00	APBD II	-	4 Lap	9.944.000,00
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kantor BAPPEDA**	**100**	**%**	**463.280.100,00**			**100%**	**602.945.000,00**
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kantor BAPPEDA	1	Paket	42.000.000,00	APBD II	-	1 Paket	69.034.000,00
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor BAPPEDA	2	Dok	15.000.000,00	APBD II		2 Dok	55.000.000,00
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor BAPPEDA	20	Orang	406.280.100,00	APBD II	-	40 Org	478.911.000,00
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kantor BAPPEDA**	**100**	**%**	**882.092.500,00**			**100%**	**1.074.522.000,00**
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1	Paket	23.284.500,00	APBD II	-	1 Paket	27.843.000,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1	Paket	200.082.000,00	APBD II	-	1 Paket	315.840.000,00
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1	Paket	110.000.000,00	APBD II	-	1 Paket	124.000.000,00
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1	Paket	64.656.000,00	APBD II	-	1 Paket	65.949.000,00
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	2	Dok	86.174.000,00	APBD II	-	2 Dok	87.897.000,00
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor BAPPEDA	4	Lap	25.722.000,00	APBD II	-	4 Lap	26.236.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BAPPEDA	4	Lap	372.174.000,00	APBD II	-	4 Lap	426.757.000,00
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dalam & Luar Daerah**	**100**	**%**	**253.171.000,00**			**100%**	**440.614.000,00**
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor BAPPEDA	1	Lap	69.840.000,00	APBD II	-	1 Lap	152.631.000,00
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1	Lap	91.000.000,00	APBD II	-	1 Lap	94.067.000,00
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1	Lap	22.731.000,00	APBD II	-	1 Lap	23.185.000,00
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1	Lap	69.600.000,00	APBD II	-	1 Lap	170.731.000,00
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Halut**	**100**	**%**	**440.365.000,00**			**100%**	**474.002.000,00**
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Halut	10	Unit	252.388.000,00	APBD II	-	10 Unit	257.435.000,00
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Halut	1	Unit	152.977.000,00	APBD II	-	1 Unit	156.036.000,00
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Halut	1	Unit	35.000.000,00	APBD II	-	1 Unit	60.531.000,00
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**90**	**%**	**5.520.021.000,00**			**90%**	**6.410.316.068,00**
						Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	**Kabupaten Halmahera Utara**	**90**	**%**				**90%**	
						Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Kabupaten Halmahera Utara**	**90**	**%**				**90%**	

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**100**	**%**	**4.369.770.600,00**		**-**	**100%**	**4.873.293.068,00**
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Kantor BAPPEDA	3	Dok	130.000.000,00	APBD II	-	2 Dok	171.314.055,00
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kantor BAPPEDA	3	Dok	393.724.800,00	APBD II	-	2 Dok	947.057.000,00
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dalam & Luar Daerah	1	BA	650.000.000,00	APBD II	-	1 BA	446.121.000,00
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	2	BA	306.298.900,00	APBD II	-	1 BA	223.189.000,00
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kantor BAPPEDA	2	BA	847.670.400,00	APBD II	-	1 BA	974.061.013,00
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Dalam & Luar Daerah	588	Usulan	696.506.200,00	APBD II	-	588 Usulan	842.530.000,00
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dalam & Luar Daerah	3	Dok	1.345.570.300,00	APBD II	-	2 Dok	1.269.021.000,00
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**100**	**%**	**437.237.400,00**		**-**	**100%**	**674.633.000,00**
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kab. Halut	3	Dok	44.186.000,00	APBD II	-	3 Dok	78.252.000,00
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Halut	56	Orang	143.051.400,00	APBD II	-	56 Orang	268.035.000,00
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kab. Halut	1	Buku	250.000.000,00	APBD II	-	1 Buku	328.346.000,00
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Presentase Perangkat Daerah dengan tiingkat capaian kinerja minimal 80%**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**90**	**%**	**713.013.000,00**		**-**	**90%**	**862.390.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bappeda	3	Lap	125.257.000,00	APBD II	-	3 Lap	160.517.000,00
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Halut	7	Lap	587.756.000,00	APBD II	-	7 Lap	701.873.000,00
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKPD) Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**95**	**%**	**567.156.476,00**			**95%**	**506.289.393,00**
						Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKPD) Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	**Kabupaten Halmahera Utara**	**95**	**%**	**506.361.149,00**			**95%**	**463.596.300,00**
						Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Kabupaten Halmahera Utara**	**95**	**%**	**775.090.976,00**			**95%**	**786.300.800,00**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**95**	**%**	**567.156.476,00**		**-**	**95%**	**506.289.393,00**
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	3	Dok	67.760.000,00	APBD II	-	2 Dok	59.409.000,00
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kantor BAPPEDA	3	Lap	6.000.000,00	APBD II	-	2 Lap	18.239.000,00
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kantor BAPPEDA	4	Lap	10.600.000,00	APBD II	-	4 Lap	10.514.000,00
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kantor BAPPEDA	2	Lap	157.193.988,00	APBD II	-	2 Lap	165.964.393,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	3	Dok	67.760.000,00	APBD II	-	2 Dok	52.467.000,00
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	4	Lap	11.000.000,00	APBD II	-	2 Lap	21.213.000,00
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	2	Lap	15.276.300,00	APBD II	-	4 Lap	12.948.000,00
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	2	Lap	231.566.188,00	APBD II	-	2 Lap	165.535.000,00
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**95**	**%**	**506.361.149,00**		**-**	**95%**	**463.596.300,00**
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	3	Dok	70.840.000,00	APBD II	-	2 Dok	49.876.000,00
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	3	Lap	6.000.000,00	APBD II	-	2 Lap	13.798.000,00
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	4	Lap	12.163.001,00	APBD II	-	4 Lap	8.475.000,00
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	2	Lap	160.347.074,00	APBD II	-	2 Lap	176.514.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	3	Dok	69.920.000,00	APBD II	-	2 Dok	40.206.000,00
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	3	Lap	6.000.000,00	APBD II	-	2 Lap	12.226.300,00
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	4	Lap	10.744.000,00	APBD II	-	4 Lap	9.588.000,00
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	3	Lap	170.347.074,00	APBD II	-	2 Lap	152.913.000,00
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**95**	**%**	**775.090.976,00**		-	**95%**	**786.300.800,00**
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	3	Dok	89.680.000,00	APBD II	-	2 Dok	60.589.800,00
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	3	Lap	6.000.000,00	APBD II	-	2 Lap	15.880.000,00
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	4	Lap	16.262.000,00	APBD II	-	4 Lap	9.958.000,00
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	2	Lap	352.035.488,00	APBD II	-	2 Lap	434.881.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	3	Dok	89.680.000,00	APBD II	-	3 Dok	55.056.000,00
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	3	Lap	11.000.000,00	APBD II	-	2 Lap	26.096.000,00
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	4	Lap	12.158.000,00	APBD II	-	4 Lap	14.324.000,00
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	2	Lap	198.275.488,00	APBD II	-	2 Lap	169.516.000,00
J U M L A H										**14.864.623.882**				**16.314.915.590,00**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Tidak Langsung								
5	1	4		1	1. Belanja Subsidi	Terlaksananya belanja subsidi bagi masyarakat		100 Persen				100%	-
						Nilai Sakip Perangkat Daerah		78.				79.	-
5	`02	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian kinerja perangkat daerah sesuai Laporan Kinerja (LKj)**	**BKAD**	**100 Persen**	**14.767.342.890,00**	**DAU**	**Prioritas**	**100%**	**15.781.458.834,48**
5	**`02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan pada perangkat daerah**	**BKAD**	**24 Dok**	**277.000.000,00**	**DAU**	**Prioritas**	**24 Dok**	**302.600.000,00**
5	`02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlahn Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD	3 Dok	70.000.000,00	DAU	Prioritas	3 Dok	70.000.000,00
5	`02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKAD	1 Dok	150.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dok	175.000.000,00
5	`02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKAD	1 Dok	7.500.000,00	DAU	Prioritas	1 Dok	7.500.000,00
5	`02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BKAD	1 Dok	12.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dok	12.000.000,00
5	`02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BKAD	1 Dok	7.500.000,00	DAU	Prioritas	1 Dok	7.500.000,00
5	`02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKAD	1 Lap	20.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Lap	20.400.000
5	`02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD	1 Lap	10.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Lap	10.200.000
5	`02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat relaisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (presentasi)**	**BKAD**	100 Persen	**12.817.211.275,00**	**DAU**	**Prioritas**	100%	**13.451.910.882,85**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	`02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD	60 Orang	12.710.391.317,00	DAU	Prioritas	60 Orang	13.345.910.883
5	`02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD	1 Dokumen	36.819.958	DAU	Prioritas	1 Dokumen	37.000.000
5	`02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKAD	1 Laporan	50.000.000	DAU	Prioritas	1 Laporan	50.000.000
5	`02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKAD	1 Laporan	10.000.000	DAU	Prioritas	1 Laporan	10.000.000
5	`02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BKAD	1 laporan	10.000.000	DAU	Prioritas	1 laporan	9.000.000
5	**`02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan BMD pada PD (presen)**	**BKAD**	**100 Persen**	**66.000.000,00**	**DAU**	**Prioritas**	**100%**	**66.000.000,00**
5	`02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BKAD	1 Dokumen	14.000.000	DAU	Prioritas	1 Dokumen	14.000.000
5	`02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BKAD	1 laporan	10.000.000	DAU	Prioritas	1 laporan	10.000.000
5	`02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKAD	1 laporan	42.000.000	DAU	Prioritas	1 laporan	42.000.000
5	**`02**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Rasio efektifitas retribusi Daerah PAD (Presen)**	**BKAD**	**100 Persen**	**41.500.000,00**	**DAU**	**Prioritas**	**100%**	**41.500.000,00**
5	`02	01	2.04	`01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	BKAD	1 Dokumen	5.000.000	DAU	Prioritas	1 Dokumen	5.000.000
5	`02	01	2.04	04	Pendaftaran Wajip Pajak Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	BKAD	1 Dokumen	8.500.000	DAU	Prioritas	1 Dokumen	8.500.000
5	`02	01	2.04	05	Pengolahan Data PAD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	BKAD	1 laporan	15.000.000	DAU	Prioritas	1 laporan	15.000.000
5	`02	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	BKAD	1 laporan	13.000.000	DAU	Prioritas	1 laporan	13.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**`02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (presen)**	**BKAD**	**100 Persen**	**65.000.000,00**	**DAU**	**Prioritas**	**100%**	**65.000.000,00**
5	`02	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	BKAD			DAU	Prioritas		
5	`02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKAD	2 Dokumen	20.000.000	DAU	Prioritas	2 Dokumen	20.000.000
5	`02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKAD		0,00	DAU	Prioritas		-
5	`02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BKAD	1 Dokumen	15.000.000	DAU	Prioritas	1 Dokumen	15.000.000
5	`02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BKAD	2 Orang	30.000.000	DAU	Prioritas	2 Orang	30.000.000
5	`02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKAD		-	DAU	Prioritas		-
5	**`02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (presen)**	**BKAD**	100 Persen	**575.631.615,00**	**DAU**	**Prioritas**	100%	**704.447.951,63**
5	`02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKAD	19 Item	25.000.000,00	DAU	Prioritas	19 Item	50.000.000
5	`02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKAD	7 Item	100.631.615,00	DAU	Prioritas	7 Item	185.000.000,00
5	`02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BKAD	Paket	200.000.000,00	DAU	Prioritas	Paket	205.000.000
5	`02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	60.000.000
5	`02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKAD	1 Lap	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Lap	51.000.000
5	`02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselengaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD	46 OK	150.000.000,00	DAU	Prioritas	46 OK	153.447.952
5	**`02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (presen)**	**BKAD**	**100 Persen**	**700.000.000,00**	**DAU**	**Prioritas**	**100%**	**700.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	`02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	1 Laporan/12 Bulan	400.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan/12 Bulan	400.000.000
5	`02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKAD	1 Laporan/12 Bulan	100.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan/12 Bulan	100.000.000,00
5	`02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKAD	1 Laporan/12 Bulan	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan/12 Bulan	50.000.000,00
5	`02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKAD	1 Laporan/12 Bulan	150.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan/12 Bulan	150.000.000,00
5	**`02**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**BKAD**	**100 Persen**	**225.000.000,00**	**DAU**	**Prioritas**	**100%**	**225.000.000,00**
5	`02	01	**2.09**	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	BKAD	12 Bulan	175.000.000	DAU	Prioritas	12 Bulan	175.000.000
5	`02	01	**2.09**	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKAD	1 Unit	50.000.000	DAU	Prioritas	1 Unit	50.000.000
						Indeks pegelolaan keuangan daerah				DAU	Prioritas		
						1. Rasio kemandirian keuangan daerah (persen);		12,60		DAU	Prioritas	12,66	
						2. Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (		WTP		DAU	Prioritas	WTP	
5	`02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio efektifitas belanja daerah (persentase realisasi terhadap target)	**BKAD**	**86,25**	**220.144.309.200,00**	**DAU**	**Prioritas**	**86,25**	**224.782.195.384,00**
						Indeks predikat LKPD sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2020		100		**DAU**	Prioritas	100	
5	**`02**	**02**	**1,01**		**Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPDh**	**Jumlah Dokumen Anggaran Daerah**	**BKAD**	**4 Dokumen**	**1.999.613.100,00**	**DAU**	**Prioritas**	**4 Dokumen**	**2.274.605.362,00**
5	`02	02	1,01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BKAD	2 Dokumen	223.192.000	DAU	Prioritas	2 Dokumen	227.655.840
5	`02	02	1,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BKAD	2 Dokumen	215.546.000,00	DAU	Prioritas	2 Dokumen	219.856.920
5	`02	02	1,01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikas	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	51.000.000
5	`02	02	1,01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikas	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	51.000.000
5	`02	02	1,01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikas	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	51.000.000

BAPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	`02	02	1,01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikas	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	51.000.000
5	`02	02	1,01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD	2 Dokumen	635.625.900,00	DAU	Prioritas	2 Dokumen	648.338.418
5	`02	02	1,01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD	2 Dokumen	625.249.200,00	DAU	Prioritas	2 Dokumen	637.754.184
5	`02	02	1,01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BKAD	1 Dokumen	-	DAU	Prioritas	1 Dokumen	235.000.000
5	`02	02	1,01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	51.000.000
5	`02	02	1,01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	50 Orang	50.000.000,00	DAU	Prioritas	50 Orang	51.000.000
5	**`02**	**02**	**1,03**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Indeks Dokumen pengelolaan perbendahaaran daerah**	**BKAD**	100 P	**1.158.000.000,00**	**DAU**	**Prioritas**	100	**1.181.160.000,00**
5	**`02**	**02**	**1,03**	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD	1 Dok	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dok	51.000.000
5	`02	02	1,03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD	1 Dokumen	200.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	204.000.000
5	`02	02	1,03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	51.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	`02	02	1,03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BKAD	2 laporan	58.000.000,00	DAU	Prioritas	2 laporan	59.160.000
5	`02	02	1,03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BKAD	1 Dokumen	100.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	102.000.000
5	`02	02	1,03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD	2 Dokumen	500.000.000,00	DAU	Prioritas	2 Dokumen	510.000.000
5	`02	02	1,03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BKAD	2 Dokumen	100.000.000	DAU	Prioritas	2 Dokumen	102.000.000,00
5	`02	02	1,03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	100 Orang	100.000.000	DAU	Prioritas	100 Orang	102.000.000
5	`02	02	1,04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah Dokumen pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban PemerintahKabupaten/Kota**	**BKAD**	**2 Dokumen**	**1.457.000.000,00**	**DAU**	**Prioritas**	**2 Dokumen**	**1.486.140.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	`02	02	1,04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BKAD	1 Laporan	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	51.000.000
5	`02	02	1,04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BKAD	1 Dokumen	300.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	306.000.000
5	`02	02	1,04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BKAD	3 Laporan	50.000.000,00	DAU	Prioritas	3 Laporan	51.000.000
5	`02	02	1,04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BKAD	2 Laporan	350.000.000,00	DAU	Prioritas	2 Laporan	357.000.000
5	`02	02	1,04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BKAD	2 Dokumen	357.000.000	DAU	Prioritas	2 Dokumen	364.140.000
5	`02	02	1,04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	51.000.000
5	`02	02	1,04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	51.000.000
5	`02	02	1,04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	1 Dokumen	25.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	25.500.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	`02	02	1,04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BKAD	2 Dokumen	-	DAU	Prioritas	2 Dokumen	-
5	`02	02	1,04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	1 Dokumen	-	DAU	Prioritas	1 Dokumen	-
5	`02	02	1,04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	100 Orang	Rp 200.000.000,00	DAU	Prioritas	100 Orang	204.000.000
5	`02	02	1,04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	BKAD	1 Lembaga	Rp 25.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Lembaga	25.500.000
5	`02	02	1,04	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	1 Laporan	Rp -	DAU	Prioritas	1 Laporan	-
5	**`02**	**02**	**1,05**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daera**				**215.000.000.000,00**	**DAU**			**219.300.000.000,00**
5	**`02**	**02**	**1,05**		Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			**0,00**	DAU			-
5	**`02**	**02**	**1,05**		Analisis Perencanaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD	1 Laporan	**207.500.000.000,00**	DAU	Prioritas	1 Laporan	211.650.000.000
5	**`02**	**02**	**1,05**		Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD	1 Laporan	**7.500.000.000,00**	DAU	Prioritas	1 Laporan	7.650.000.000
5	**`02**	**02**	**1,06**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Terkelolanya Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**BKAD**	**100 Persen**	**529.696.100,00**	**DAU**	**Prioritas**	**100%**	**540.290.022,00**
5	`02	02	1,06	1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BKAD	1 Dokumen		DAU	Prioritas	1 Dokumen	-

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	`02	02	1,06	`02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BKAD	1 Dokumen	529.696.100,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	540.290.022
5	**`02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Pertumbuhan Nilai Barang Milik Daerah (persen)**	**BKAD**	**9,47 Persen**	**1.304.564.885,00**	**DAU**	**Prioritas**	**9,94**	**4.310.877.892,50**
5	**`02**	**03**	**1,01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Dokumen Standar Harga dan Dokumen BMD**	**BKAD**	**2 Dokumen**	**1.304.564.885,00**	**DAU**	**Prioritas**	**2 Dokumen**	**4.310.877.892,50**
5	`02	03	**1,01**	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BKAD	1 Dokumen	206.350.875,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	210.477.893
5	`02	03	**1,01**	`02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	-		DAU	Prioritas	-	210.000.000
5	`02	03	**1,01**	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Dokumen	78.214.010,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	100.000.000
5	`02	03	**1,01**	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Dokumen	-	DAU	Prioritas	1 Dokumen	50.000.000
5	`02	03	**1,01**	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Laporan	260.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	265.200.000
5	`02	03	**1,01**	`06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BKAD	1 Laporan	-	DAU	Prioritas	1 Laporan	2.500.000.000
5	`02	03	**1,01**	7	Pengamanan barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Laporan	-	DAU	Prioritas	1 Laporan	50.000.000
5	`02	03	**1,01**	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Laporan	-	DAU	Prioritas	1 Laporan	150.000.000
5	`02	03	**1,01**	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Laporan	-	DAU	Prioritas	1 Laporan	-
5	`02	03	**1,01**	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Dokumen	150.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	153.000.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	`02	03	**1,01**	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Laporan	100.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	102.000.000
5	`02	03	**1,01**	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BKAD	1 Laporan	360.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	367.200.000
5	`02	03	**1,01**	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	100 Orang	150.000.000,00	DAU	Prioritas	100 Orang	153.000.000
5	**`02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (persentase realisasi terhadap target)**	**BKAD**	**85 Persen**	**3.927.500.000,00**	**DAU**	**Prioritas**	**90 Persen**	**4.006.050.000,00**
5	**`02**	**04**	**1,01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan pendapatan Daerah**	**BKAD**	**2 Dokumen**	**3.927.500.000,00**	**DAU**	**Prioritas**	**2 Dokumen**	**4.006.050.000,00**
5	**`02**	**04**	**1,01**	`01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BKAD	1 Dokumen	3.177.500.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	3.241.050.000
5	**`02**	**04**	**1,01**	`02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BKAD	1 Dokumen	25.000.000	DAU	Prioritas	1 Dokumen	25.500.000
5	**`02**	**04**	**1,01**	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daera	BKAD	1 Laporan	75.000.000	DAU	Prioritas	1 Laporan	76.500.000
5	**`02**	**04**	**1,01**	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daer	BKAD	15 Paket	75.000.000	DAU	Prioritas	15 Paket	76.500.000
5	**`02**	**04**	**1,01**	`05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BKAD	1 Laporan	100.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	102.000.000
5	**`02**	**04**	**1,01**	`06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BKAD	2 Laporan	50.000.000	DAU	Prioritas	2 Laporan	51.000.000
5	**`02**	**04**	**1,01**	`07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BKAD	1 Laporan	200.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	204.000.000
5	**`02**	**04**	**1,01**	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BKAD	1 Dokumen	100.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	102.000.000
5	**`02**	**04**	**1,01**	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BKAD	1 Dokumen	125.000.000	DAU	Prioritas	1 Dokumen	127.500.000
JUMLAH									**240.143.716.975,00**				**248.880.582.110,98**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBNGAN SUMBER DAYA APARATUR

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**								
5	**03**				**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**BKD PSDA**	**90%**	**4.217.192.222**	**DAU**		**90%**	**5.294.540.000**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**BKD PSDA**	**100%**	**86.414.000**	**DAU**		**100%**	**218.362.000**
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKD PSDA	2 Dokumen	37.544.000	DAU		2 Dokumen	135.404.000
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	BKD PSDA	2 Dokumen	16.000.000	DAU		2 Dokumen	18.503.000
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKD PSDA	4 Laporan	32.870.000	DAU		4 Laporan	64.455.000
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**BKD PSDA**	**100%**	**3.768.007.722**	**DAU**		**100%**	**3.868.000.000**
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKD PSDA	1040 OB	3.768.007.722,00	DAU		1040 OB	3.868.000.000
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**BKD PSDA**	**100%**	**62.000.000**	**DAU**		**100%**	**255.168.000**
5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BKD PSDA	3 Orang	62.000.000	DAU		12 Orang	255.168.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BKD PSDA**	**100%**	**205.280.472**	**DAU**		**100%**	**770.435.000**
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKD PSDA	2 Paket	17.000.449	DAU		15 Paket	276.252.000
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKD PSDA	12 Paket	3.485.000	DAU		12 Paket	6.515.000
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKD PSDA	12 Paket	32.998.818	DAU		12 Paket	50.428.000
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan yang Disediakan	BKD PSDA	12 Paket	4.772.000	DAU		12 Paket	11.880.000
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	BKD PSDA	12 Dokumen	4.500.000	DAU		36 Dokumen	32.150.000
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKD PSDA	12 Laporan	11.901.000	DAU		12 Laporan	40.310.000
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Sofifi, Tte, Manado, Jakarta	8 Laporan	130.623.205	DAU		15 Laporan	352.900.000
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKD PSDA**	**100%**	**52.000.000**	**DAU**		**100%**	**78.000.000**
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKD PSDA	1 Laporan	52.000.000	DAU		1 Laporan	78.000.000
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKD PSDA**	**100%**	**43.490.028**	**DAU**		**100%**	**104.575.000**
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKD PSDA	5 Unit	42.440.028	DAU		5 Unit	89.025.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKD PSDA	2 Unit	1.050.000	DAU		15 Unit	15.550.000
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Pegawai ASN berkualifikasi Pendidikan Tinggi**	**BKD PSDA**	**33,5%**	**207.100.000**	**DAU**		**33,7%**	**989.100.000**
						Persentase Jabatan Eseloneering yang Terisi		**96,4%**	**1.503.381.600**			**100,0%**	**3.077.895.000**
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Capaian Kinerja Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**BKD PSDA**	**100%**	**525.577.100**	**DAU**		**100%**	**1.261.236.000**
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (NIP, Karis/Karsu)	BKD PSDA, BKN	60 Dokumen	32.077.900	DAU		155 Dokumen	187.669.000
5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	BKD PSDA, BKN, KEMENPAN RB	1 Laporan	342.069.500	DAU		1 Laporan	477.669.000
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKD PSDA, BKN	49 dokumen	90.681.000	DAU		84 dokumen	190.749.000
5	03	02	2.01	0001	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD PSDA	1 Dokumen	60.748.700	DAU		1 Dokumen	405.149.000
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Capaian Kinerja Layanan Mutasi dan Promosi ASN**		**100%**	**382.595.700**	**DAU**		**100%**	**652.898.000**
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKD PSDA, BKN	600 Dokumen	287.333.700	-		600 Dokumen	326.489.000
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengeloaan Promosi ASN	BKD PSDA	2 dokumen	95.262.000	-		4 dokumen	326.409.000
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Capaian Kinerja Pengembangan Kompetensi ASN**	**BKD PSDA**	**100%**	**512.728.500**	**DAU**		**100%**	**1.541.799.000**
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Centre	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Centre	BKD PSDA	1 Dokumen	305.628.500	DAU		1 Dokumen	552.699.000

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	02	2.03	0007	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Semarang, Makasar, Bandung, Jakarta	2 orang	207.100.000	DAU		15 orang	989.100.000
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Capaian Kinerja Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**BKD PSDA**	**100%**	**289.580.300**	**DAU**		**100%**	**611.062.000**
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKD PSDA	1 Dokumen	162.681.600	DAU		1 Dokumen	350.606.000
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	OPD	6 orang	79.534.800	DAU		6 orang	98.923.000
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKD PSDA	1 Laporan	47.363.900	DAU		1 Laporan	161.533.000
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun Berkenaan Telah Mengikuti Diklat Struktural**		**70,4%**	**5.352.050.000**	**DAU**		**80,1%**	**5.419.100.000**
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN Daerah yang Lulus Ujian Sertifikasi Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**100%**	**5.352.050.000**	**DAU**		**100%**	**5.419.100.000**
5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Sofifi, Ternate	110 orang	181.050.000	DAU		300 orang	774.100.000
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Tobelo, Ternate, Makassar, Ambon	3 Laporan	5.171.000.000	DAU		3 Laporan	4.645.000.000
					JUMLAH				**11.279.723.822,00**				**Rp 14.780.635.000**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (PERSEN)**	**BPPDS**	**100**	**%**	**2.886.005.469**	**DAU**		**100**	**%**	**3.295.181.669**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tingkat Konsistensi Perencanaan, Perangkat Daerah**	BPPDS	**100**	**%**	**53.363.800**			**100**	**%**	**57.037.000**
	Penyusunan umen Perencanaan Perangkat Daeraah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan		2	Dok	41.807.200			2	Dok	44.077.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4	Dok	11.556.600			4	Dok	12.960.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**BPPDS**	**100**	**%**	**2.535.594.769**	**DAU**		**100**	**%**	**2.572.006.769**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		294	OB	2.511.938.769			294	OB	2.511.938.769
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Lap	15.486.900			1	Lap	43.818.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2	Lap	8.169.100			2	Lap	16.250.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		-	-	-			**100**	**%**	70.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	-			1	OK	23.500.000

BAPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		- -	-			2	OK	46.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	BPPDS	**100 %**	**190.960.900**	**DAU**		**1**	**%**	**313.511.900**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5.808.200			4	Paket	5.793.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		- -	-			4	Paket	68.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	14.656.700			4	Paket	14.780.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BPPDS	4 Paket	5.413.600	DAU		4	Paket	5.413.600
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		60 Dok	12.624.400			60	Dok	12.624.400
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		2 Lap	5.272.000			2	Lap	6.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		16 Lap	147.186.000			16	Lap	200.900.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100** %	**28.086.000**			1	%	**204.626.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- -	-			11	Lap	106.700.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Lap	23.946.000			3	Lap	23.946.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Lap	4.140.000			3	Lap	4.140.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		- -	-			12	Lap	69.840.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan BMD Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**78.000.000**			**100**	**%**	**78.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPPDS	1 Unit	78.000.000	DAU		1	Unit	78.000.000
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**PRESENTASE KETERLAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**100 %**	**319.492.600**			1	%	**576.950.000**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindak lanjuti**		- -	-			-	-	**213.475.000**
	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan, dan aset Daerah Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan, dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi		- -	-			1	Lap	213.475.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di tindak lanjuti**		- -	-			1	Rekomendasi	**213.475.000**
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		- -	-			1	Dok	213.475.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	**Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi yang di tindak lanjuti**		**100 %**	**200.000.000**			-	-	
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Transportasi)	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Transportasi)		1 Dok	200.000.000			-	-	-
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah produk Inovasi Daerah Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan dan Terindeks dalam Sistim Inovasi daerah**		**75 %**	**119.492.600**			**75**	**%**	**150.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	Deseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inoatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		1 Lap	119.492.600			1	Lap	150.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**PENINGKATAN JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STSTISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (KUMULATIF)**		**100 %**	**247.483.300**			**100**	**%**	**350.000.000**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	**Presentase Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah yang di Manfaatkan dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah**		**100 %**	**247.483.300**	**DAU**		**100**	**%**	**350.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		32 PD	247.483.300			32	PD	350.000.000
Jumlah					**3.452.981.369**					**4.222.131.669**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATADAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 Sesuai Renstra				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase capaian kinerja sasaran Inspektorat**		**100%**	**5.729.870.028**			**100%**	**6.160.376.368,60**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan Renja terhadap Renstra**		**100%**	**119.789.300**			**100%**	**126.839.599,12**
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INSPEK	3 Dok	60.761.500	DAU		3 Dok	64.337.028
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	INSPEK	1 Dok	7.082.600	DAU		1 Dok	7.499.505
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	INSPEK	1 Dok	7.390.200	DAU		1 Dok	7.825.099
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	INSPEK	1 Dok	7.390.100	DAU		1 Dok	7.825.099
6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	INSPEK	1 Dok	7.390.200	DAU		1 Dok	7.825.099

BAPPEDA HALUT

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 Sesuai Renstra				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	INSPEK	3 Laporan	13.262.300	DAU		3 Laporan	14.043.394
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INSPEK	1 Laporan	16.512.400	DAU		1 Laporan	17.484.377
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja Indikator sub kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah**		**100%**	**4.097.158.584**			**100%**	**3.921.424.248,01**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	INSPEK	26 OB	4.082.993.484	DAU		33 OB	3.906.425.238
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	INSPEK	1 Laporan	6.774.900	DAU		1 Laporan	7.173.910
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	INSPEK	2 Laporan	7.390.200	DAU		2 Laporan	7.825.100
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja Indikator sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**100%**	**422.832.000**	**DAU**		**100%**	**317.616.564,12**
6			2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	INSPEK	26 Paket	38.000.000	DAU		26 Paket	12.209.760
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	JKT	10 Orang	184.284.000	DAU		3 Orang	85.739.650
6	01	01	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	JKT	18 Orang	200.548.000	DAU		12 Orang	219.667.154

BAPPEDA HALUT

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 Sesuai Renstra				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja Indikator sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah**		**100%**	**479.567.000**			**100%**	**860.826.264,96**
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	INSPEK	2 Paket	5.000.000	DAU		2 Paket	1.516.181
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	INSPEK	12 Paket	150.000.000	DAU		12 Paket	572.950.669
6	1	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	INSPEK	12 Paket	45.000.000	DAU		12 Paket	9.116.458
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	INSPEK	12 Dok	50.000.000	DAU		12 Dok	55.350.913
6	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	INSPEK	12 Laporan	35.000.000	DAU		12 Laporan	16.279.680
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JKT	24 Laporan	194.567.000	DAU		24 Laporan	205.612.363
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentasecapaian kinerja Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**276.260.040**			**100%**	**640.290.051,70**
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	117.640.020,00	DAU		12 Laporan	460.994.928
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	DAU		12 Laporan	33.210.548
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.480.000	DAU		12 Laporan	6.728.935
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	98.140.020	DAU		12 Laporan	139.355.641

BAPPEDA HALUT

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 Sesuai Renstra				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian Indikator sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**58,33%**	**334.263.104**			**58,33%**	**293.379.640,68**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	INSPEK	7 Unit	334.263.104	DAU		7 Unit	261.614.411
6	01	01	2.09	0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	INSPEK	5 Unit		DAU		5 Unit	31.765.230
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK**		**75,00**	**2.862.196.900**			**75,00**	**4.343.482.613,00**
						Presentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti selesai		**56,50%**				**56,50%**	
						Persentase OPD dengan nilai Sakip > = B		**92,00**				**92,00**	
						Persentase OPD yang bersih dari penyim- pangan pengelolaan keuangan yang material		**95,00%**				**95,00%**	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase OPD yang diawasi**		**100,00**	**2.507.097.000**			**100,00**	**3.011.994.935,00**
						Persentase Desa yang di awasi		**16,00**				**16,00**	
						Persentase Pelaksanaan Evaluasi SAKIP OPD		**100,00**				**100,00**	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	HALUT	8 Laporan	283.592.000	DAU		12 Laporan	371.561.960
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	HALUT	9 Laporan	305.390.000	DAU		12 Laporan	442.046.895,00

BAPPEDA HALUT

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 Sesuai Renstra				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	HALUT	22 Laporan	517.340.000	DAU		17 Laporan	801.208.760,00
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	HALUT	21 laporan	820.200.000	DAU		16 laporan	840.286.920,00
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	HALUT	10 Laporan	457.882.000	DAU		12 Laporan	450.729.840,00
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	HALUT	4 Dok	122.693.000	DAU		4 Dok	106.160.560,00
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Penanganan Kasus/Pengaduan**		**100%**	**355.099.900**			**100%**	**1.331.487.678,00**
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	HALUT	1 laporan	71.950.000	DAU		3 laporan	269.882.078,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	HALUT	12 laporan	283.149.900	DAU		22 laporan	1.061.605.600,00
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Tingkat Kapabilitas APIP (berdasarkan hasil QA BPKP)**		**Level 3**	**923.638.400**			**Level 4**	**1.645.176.459,93**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan yang ditetapkan**		**100**	**10.211.900**			**100**	**13.592.172,00**
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	INSPEK	6	10.211.900	DAU		6	13.592.172,00

BAPPEDA HALUT

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 Sesuai Renstra				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**01**	**03**	**2.02**		**Asistensi dan Pendampingan**	**Presentase OPD yang didampingi/diasistensi pelaksanaan tugasnya**		**100%**	**913.426.500**			**100%**	**1.631.584.287,93**
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	HALUT	49 PD	136.916.000	DAU		47 PD	116.695.420,00
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	HALUT	48 PD	257.650.000	DAU		47 PD	434.437.981,00
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	HALUT	11 Kegiatan	450.420.500	DAU		9 Kegiatan	949.122.790,00
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verivikasi Penegakan Integritas	HALUT	49 PD	68.440.000	DAU		49 PD	131.328.097
JUMLAH									**9.515.705.328**				**12.149.035.441,53**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GALELA

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec Galela**	**90 %**	**1.723.517.564,76**	**DAU**		**90 %**	**1.551.145.788,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kec Galela**	**100 %**	**7.501.000,00**	**DAU**		**100 %**	**11.718.750,00**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec Galela	3 Dok	3.750.500,00	DAU		3 Dok	5.859.375,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Galela	2 Lap	3.750.500,00	DAU		2 Lap	5.859.375,00
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kec Galela**	**100 %**	**1.419.848.662,76**	**DAU**		**100 %**	**1.100.283.805,00**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Galela	14 OB	1.417.848.662,76	DAU		14 OB	1.097.983.805,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Galela	1 Lap	2.000.000,00	DAU		1 Lap	2.300.000,00
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Kec Galela**	**100 %**	**30.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**30.000.000,00**
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec Galela	2 Orang	30.000.000,00	DAU		2 Orang	30.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec Galela**	**100 %**	**77.221.009,00**	**DAU**		**100 %**	**132.504.162,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Galela	2 Paket	2.512.750,00	DAU		2 Paket	2.889.663,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec Galela	2 Paket	8.580.000,00	DAU		2 Paket	12.167.000,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik kantor yang disediakan	Kec Galela	12 Paket	6.596.250,00	DAU		12 Paket	9.885.688,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kec Galela	3 Paket	1.983.750,00	DAU		3 Paket	2.281.313,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec Galela	12 Dok	1.587.000,00	DAU		12 Dok	1.825.050,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Galela	12 Lap	3.967.500,00	DAU		12 Lap	4.562.625,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Galela	12 Lap	51.993.759,00	DAU		12 Lap	98.892.823,00
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**Kec Galela**	**100 %**	**151.016.505,00**	**DAU**		**100 %**	**222.669.125,00**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Galela	15 Lap	108.640.900,00	DAU		18 Lap	171.202.310,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Galela	12 Lap	14.153.455,00	DAU		12 Lap	19.011.342,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Galut	12 Lap	28.222.150,00	DAU		12 Lap	32.455.473,00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Kec Galela**	**100 %**	**37.930.388,00**	**DAU**		**100 %**	**53.969.946,00**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec Galela	3 Unit	3.627.694,00	DAU		3 Unit	4.171.848,00

BAPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec Galela	3 Unit	3.627.694,00	DAU		3 Unit	4.171.848,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Galela	2 Unit	30.675.000,00	DAU		2 Unit	45.626.250,00
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec Galela**	**100 %**	**22.420.666,00**	**DAU**		**100 %**	**45.159.103,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec Galut**	**100 %**	**3.517.404,00**	**DAU**		**100 %**	**14.017.404,00**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi perencanaan & pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi perencanaan & pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi vertikal terkait	Kec Galela	10 Lap	3.517.404,00	DAU		10 Lap	14.017.404,00
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan**	**Kec Galela**	**100 %**	**12.258.250,00**	**DAU**		**100 %**	**20.102.000,00**
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec Galela	1 Dok	6.000.750,00	DAU		1 Dok	10.447.750,00
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec Galela	1 Lap	3.612.500,00	DAU		1 Lap	6.612.500,00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Galela	1 Lap	2.645.000,00	DAU		1 Lap	3.041.750,00
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**Cakupan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**Kec Galela**	**100 %**	**2.645.000,00**	**DAU**		**100 %**	**3.041.750,00**

BAPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dala pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Galela	1 Dok	2.645.000,00	DAU		1 Dok	3.041.750,00
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Cakupan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Kec Galela**	**100 %**	**4.000.012,00**	**DAU**		**100 %**	**7.997.949,00**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec Galela	1 Dok	1.500.000,00	DAU		1 Dok	1.500.000,00
7	01	02	2.04	02	pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec Galela	5 Lap	2.500.012,00	DAU		5 Lap	6.497.949,00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec Galela**	**100 %**	**10.826.900,00**	**DAU**		**100 %**	**13.547.731,00**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Galela**	**100 %**	**10.826.900,00**	**DAU**		**100 %**	**13.547.731,00**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec Galela	3 Lemas	4.425.500,00	DAU		3 Lemas	4.503.200,00
7	01	03	2.01	02	sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec Galela	1 Dok	3.900.700,00	DAU		1 Dok	4.000.000,00
7	01	03	2.01	03	peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec Galela	3 Lap	2.500.700,00	DAU		3 Lap	5.044.531,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec Galela**	**100 %**	**7.226.900,00**	**DAU**		**100 %**	**13.547.731,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Galela**	**100 %**	**7.226.900,00**	**DAU**		**100 %**	**13.547.731,00**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (ForKompincam)	Kec Galela	1 Lap	3.675.250,00	DAU		1 Lap	7.947.731,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Galela	1 Lap	3.551.650,00	DAU		1 Lap	5.600.000,00
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Galela**	**100 %**	**24.171.733,00**	**DAU**		**100 %**	**28.801.153,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Galela**	**100 %**	**24.171.733,00**	**DAU**		**100 %**	**28.801.153,00**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Galela	75 Orang	15.515.000,00	DAU		75 Orang	18.515.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2.01	02	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Galela	20 Orang	3.096.600,00	DAU		20 Orang	8.286.153,00
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa	Kec Galela	10 Orang	2.047.633,00	DAU		10 Orang	2.000.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Galela	1 Dok	3.512.500,00	DAU		- -	-
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec Galela**	**100 %**	**45.764.899,00**	**DAU**		**100 %**	**75.131.118,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Galela**	**100 %**	**45.764.899,00**	**DAU**		**100 %**	**75.131.118,00**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec Galela	3 Dok	3.500.000,00	DAU		3 Dok	6.149.625,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Galela	5 Dok	3.000.000,00	DAU		5 Dok	6.612.500,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Galela	5 Dok	3.350.000,00	DAU		5 Dok	6.612.500,00
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang Undangan	Kec Galela	3 Lap	3.000.000,00	DAU		- Dok	-

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec Galela	2 Dok	3.500.500,00	DAU		2 Dok	7.604.375,00
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec Galela	1 Dok	3.000.000,00	DAU		1 Dok	6.612.500,00
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Galela	1 Dok	2.923.199,00	DAU		1 Dok	3.361.679,00
7	01	06	2.01	010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec Galela	2 Dok	4.000.000,00	DAU		- Dok	-
7	01	06	2.01	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasiitasi Dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec Galela	2 Dok	2.990.000,00	DAU		2 Dok	7.273.750,00
7	01	06	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec Galela	2 Dok	3.500.000,00	DAU		2 Dok	5.951.259,00
7	01	06	2.01	015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam ranka Penetapan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec Galela	1 Dok	2.500.000,00	DAU		1 Dok	5.290.000,00
7	01	06	2.01	016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec Galela	1 Dok	2.500.700,00	DAU		1 Dok	6.768.555,00
7	01	06	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Galela	7 Lap	2.500.500,00	DAU		7 Lap	6.281.875,00
7	01	06	2.01	018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec Galela	1 Lap	5.500.000,00	DAU		1 Lap	6.612.500,00
JUMLAH									1.833.928.662,76				1.727.332.624,00

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GALELA BARAT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec. Galbar**	**90 %**	**1.416.832.705,28**	**DAU**		**90 %**	**1.493.162.039,00**
7	**01**	**01**			**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**6.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**6.300.000,00**
7	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan	Kec. Galbar	3 Dok	4.000.000,00	DAU		3 Dok	4.200.000,00
7	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Kec. Galbar	2 Lap	2.000.000,00	DAU		2 Lap	2.100.000,00
7	**2**	**02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**1.130.372.705,28**	**DAU**		**100 %**	**1.186.891.341,00**
7	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Galbar	10 OB	1.128.872.705,28	**DAU**		11 OB	1.185.316.341,00
7	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Galbar	1 Lap	1.500.000,00	DAU		1 Lap	1.575.000,00
7	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**30.000.000,00**
7	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Galbar	1 Orang	15.000.000,00	DAU		2 Orang	30.000.000,00
7	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**82.759.942,00**	**DAU**		**100 %**	**83.985.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Galbar	9 Paket	2.500.000,00	DAU		9 Paket	2.400.000,00
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Galbar	2 Paket	10.000.000,00	DAU		2 Paket	11.500.000,00
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Galbar	10 Paket	5.000.000,00	DAU		10 Paket	5.250.000,00
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Galbar	3 Paket	2.000.000,00	DAU		3 Paket	2.000.000,00
7	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Galbar	12 Dok	1.200.000,00	DAU		12 Dok	1.260.000,00
7	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Galbar	10 Lap	1.500.000,00	DAU		10 Lap	1.575.000,00
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Galbar	8 Lap	60.559.942,00	DAU		10 Lap	60.000.000,00
7	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**108.700.000,00**	**DAU**		**100 %**	**114.135.000,00**
7	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Galbar	4 Lap	85.360.000,00	DAU		6 Lap	89.628.000,00
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Galbar	12 Lap	2.000.000,00	DAU		12 Lap	2.100.000,00
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Galbar	1 Lap	21.340.000,00	DAU		1 Lap	22.407.000,00
7	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**74.000.058,00**	**DAU**		**100 %**	**71.850.698,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Galbar	1 Unit	36.000.000,00	DAU		1 Unit	39.000.000,00
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja dan Mesin yang Dipelihara	Kec. Galbar	3 Unit	2.000.000,00	DAU		3 Unit	2.100.000,00
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Galbar	1 Unit	36.000.058,00	DAU		1 Unit	30.750.698,00
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**6.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**8.150.000,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**6.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**8.150.000,00**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Galbar	10 Lap	3.000.000,00	DAU		10 Lap	3.150.000,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Galbar	1 Dok	3.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**4.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**4.200.000,00**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**4.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**4.200.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec. Galbar	5 Lemas	4.000.000,00	DAU		5 Lemas	4.200.000,00
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**4.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**4.200.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**4.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**4.200.000,00**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Galbar	1 Lap	4.000.000,00	DAU		1 Lap	4.200.000,00
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**17.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**17.850.000,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**17.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**17.850.000,00**
7	01	05	2.02	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Galbar	65 Orang	10.000.000,00	DAU		50 Orang	10.500.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Galbar	15 Orang	7.000.000,00	DAU		15 Orang	7.350.000,00
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**9.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**9.450.000,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**9.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**9.450.000,00**
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Galbar	1 Dok	3.000.000,00	DAU		1 Dok	3.150.000,00
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Galbar	1 Dok	3.000.000,00	DAU		1 Dok	3.150.000,00
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Galbar	1 Dok	3.000.000,00	DAU		1 Dok	3.150.000,00
JUMLAH									**1.456.832.705,28**				**1.537.012.039,00**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GALELA UTARA

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec Galut**	**90 %**	**1.282.787.318,68**	**DAU**		**90 %**	**1.405.962.985,09**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kec Galut**	**100 %**	**11.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**11.189.200,00**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec Galut	3 Dok	7.150.000,00	DAU		3 Dok	7.293.000,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Galut	2 Lap	3.850.000,00	DAU		2 Lap	3.896.200,00
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kec Galut**	**100 %**	**1.075.662.741,68**	**DAU**		**100 %**	**1.180.917.340,55**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Galut	9 OB	1.068.561.218,68	DAU		9 OB	1.175.417.340,55
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Galut	1 Lap	7.101.523,00	DAU		1 Lap	5.500.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec Galut**	**100 %**	**52.872.500,00**	**DAU**		**100 %**	**56.656.750,00**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Galut	1 Paket	522.500,00	DAU		1 Paket	574.750,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec Galut	10 Paket	5.750.000,00	DAU		10 Paket	5.300.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec Galut	3 Paket	1.850.000,00	DAU		3 Paket	1.887.000,00

BAPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec Galut	12 Dok	1.000.000,00	DAU		12 Dok	1.100.000,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Galut	4 Lap	3.750.000,00	DAU		4 Lap	3.795.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Galut	12 Lap	40.000.000,00	DAU		12 Lap	44.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Galut**	**100 %**	**63.557.077,00**	**DAU**		**100 %**	**69.773.194,54**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Galut	1 Lap	41.160.900,00	DAU		1 Lap	45.276.990,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Galut	12 Lap	1.744.877,00	DAU		12 Lap	1.779.774,54
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Galut	10 Lap	20.651.300,00	DAU		10 Lap	22.716.430,00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Galut**	**100 %**	**79.695.000,00**	**DAU**		**100 %**	**87.426.500,00**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec Galut	1 Unit	69.000.000,00	DAU		1 Unit	75.900.000,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec Galut	2 Unit	4.760.000,00	DAU		2 Unit	4.998.000,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec Galut	3 Unit	2.110.000,00	DAU		3 Unit	2.321.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Galut	1 Unit	3.825.000,00	DAU		1 Unit	4.207.500,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec Galut**	**100 %**	**22.350.000,00**	**DAU**		**100 %**	**23.235.000,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat desa**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat desa**	**Kec Galut**	**100 %**	**22.350.000,00**	**DAU**		**100 %**	**23.235.000,00**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi perencanaan & pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi perencanaan & pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi vertikal terkait	Kec Galut	2 Lap	14.750.000,00	DAU		2 Lap	15.635.000,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah document Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec Galut	2 Dok	7.600.000,00	DAU		2 Dok	7.600.000,00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec Galut**	**100 %**	**9.250.000,00**	**DAU**		**100 %**	**9.250.000,00**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Galut**	**100 %**	**9.250.000,00**	**DAU**		**100 %**	**9.250.000,00**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec Galut	2 Lemas	6.250.000,00	DAU		2 Lemas	6.250.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec Galut	1 Lap	3.000.000,00	DAU		1 Lap	3.000.000,00
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec Galut**	**100 %**	**6.700.000,00**	**DAU**		**100 %**	**7.035.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Galut**	**100 %**	**6.700.000,00**	**DAU**		**100 %**	**7.035.000,00**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (ForKompincam)	Kec Galut	1 Lap	6.700.000,00	DAU		1 Lap	7.035.000,00
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Galut**	**100 %**	**35.100.000,00**	**DAU**		**100 %**	**35.100.000,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Galut**	**100 %**	**35.100.000,00**	**DAU**		**100 %**	**35.100.000,00**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Galut	70 Orang	23.000.000,00	DAU		70 Orang	23.000.000,00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Galut	7 Orang	12.100.000,00	DAU		7 Orang	12.100.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec Galut**	**100 %**	**27.053.900,00**	**DAU**		**100 %**	**27.417.047,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Galut**	**100 %**	**27.053.900,00**	**DAU**		**100 %**	**27.417.047,00**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Galut	12 Dok	14.949.000,00	DAU		12 Dok	14.949.000,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Galut	12 Dok	12.104.900,00	DAU		12 Dok	12.468.047,00
JUMLAH									**1.383.241.218,68**				**1.508.000.032,09**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GALELA SELATAN

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec Galsel**	**90 %**	**2.210.855.493,00**	**DAU**		**90 %**	**2.421.528.612,10**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec Galsel**	**100 %**	**9.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**9.900.000,00**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec Galsel	3 Dok	5.500.000,00	DAU		3 Dok	6.050.000,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Galsel	2 Lap	3.500.000,00	DAU		2 Lap	3.850.000,00
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec Galsel**	**100 %**	1.954.410.201,00	DAU		**100 %**	2.149.520.721,10
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Galsel	17 OB	1.951.105.201,00	DAU		17 OB	2.146.215.721,10
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Galsel	1 Lap	3.305.000,00	DAU		1 Lap	3.305.000,00
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec Galsel**	**100 %**	**19.172.000,00**	**DAU**		**100 %**	**21.089.200,00**
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec Galsel	1 Orang	19.172.000,00	DAU		1 Orang	21.089.200,00
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec Galsel**	**100 %**	**80.986.812,00**	**DAU**		**100 %**	**88.725.493,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Galsel	1 Paket	2.199.700,00	DAU		1 Paket	2.419.670,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec Galsel	1 Paket	9.249.512,00	DAU		1 Paket	10.174.463,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec Galsel	10 Paket	9.733.600,00	DAU		10 Paket	10.706.960,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec Galsel	4 Paket	6.049.600,00	DAU		4 Paket	6.654.560,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec Galsel	60 Dok	2.200.000,00	DAU		60 Dok	2.420.000,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Galsel	2 Lap	6.324.800,00	DAU		2 Lap	6.597.280,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Galsel	9 Lap	45.229.600,00	DAU		9 Lap	49.752.560,00
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**Kec Galsel**	**100 %**	**89.688.470,00**	**DAU**		**100 %**	**94.703.237,00**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Galsel	10 Lap	60.903.770,00	DAU		10 Lap	66.994.147,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Galsel	12 Lap	10.412.800,00	DAU		12 Lap	7.500.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Galsel	10 Lap	18.371.900,00	DAU		10 Lap	20.209.090,00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Kec Galsel**	**100 %**	**57.598.010,00**	**DAU**		**100 %**	**57.589.961,00**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec Galsel	1 Unit	47.319.740,00	DAU		1 Unit	46.991.961,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec Galsel	3 Unit	4.180.000,00	DAU		3 Unit	4.598.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Galsel	1 Unit	6.098.270,00	DAU		1 Unit	6.000.000,00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec Galsel**	**100 %**	**13.226.700,00**	**DAU**		**100 %**	**13.547.731,00**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Galsel**	**100 %**	**13.226.700,00**	**DAU**		**100 %**	**13.547.731,00**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec Galsel	4 Lemas	8.349.800,00	DAU		4 Lemas	8.550.000,00
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan (profil Kecamatan)	Kec Galsel	1 Dok	4.876.900,00	DAU		1 Dok	4.997.731,00
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec Galsel**	**100 %**	**7.400.384,00**	**DAU**		**100 %**	**8.140.422,40**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Galsel**	**100 %**	**7.400.384,00**	**DAU**		**100 %**	**8.140.422,40**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (ForKompincam)	Kec Galsel	1 Lap	7.400.384,00	DAU		1 Lap	8.140.422,40

BAHAN BEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Galsel**	**100 %**	**34.891.560,00**	**DAU**		**100 %**	**36.127.282,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Galsel**	**100 %**	**34.891.560,00**	**DAU**		**100 %**	**36.127.282,00**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Galsel	35 Orang	25.498.560,00	DAU		35 Orang	26.000.000,00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Galsel	10 Orang	9.393.000,00	DAU		10 Orang	10.127.282,00
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec Galsel**	**100 %**	**12.691.064,00**	**DAU**		**100 %**	**13.620.000,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Galsel**	**100 %**	**12.691.064,00**	**DAU**		**100 %**	**13.620.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Galsel	1 Dok	6.699.564,00	DAU		1 Dok	7.270.000,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Galsel	1 Dok	5.991.500,00	DAU		1 Dok	6.350.000,00
JUMLAH									**2.279.065.201,00**				**2.492.964.047,50**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**URUSAN KEWILAYAHAN**								
7.01					**KECAMATAN**								
7.01	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec Tobelo**	**90%**	**1.853.146.770,88**	**DAU**		**90**	**1.853.646.770,88**
7.01	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	**Kec Tobelo**	**100%**	**8.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**8.500.000,00**
7.01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Tobelo	2 Dok	2.000.000,00	**DAU**		2 Dok	2.500.000,00
7.01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec Tobelo	1 Dok	1.500.000,00	**DAU**		1 Dok	1.500.000,00
7.01	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec Tobelo	1 Dok	1.500.000,00	**DAU**		1 Dok	1.500.000,00
7.01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Tobelo	2 Lap	1.500.000,00	**DAU**		2 lap	1.500.000,00
7.01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Tobelo	4 Lap	1.500.000,00	**DAU**		4 Lap	1.500.000,00
7.01	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan anggaran perangkat daerah**	**Kec Tobelo**	**100%**	**1.564.166.770,88**	**DAU**		**100%**	**1.564.166.770,88**
7.01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec Tobelo	17 Orang	1.562.666.770,88	DAU		17 Orang	1.562.666.770,88

BAPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec Tobelo	1 Lap	1.500.000,00	**DAU**		1 Lap	1.500.000,00
7.01	**01**	**2.03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah**	**Kec Tobelo**	**100%**	**1.500.000,00**	**DAU**		**100%**	**1.500.000,00**
7.01	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Tobelo	1 Lap	1.500.000,00	**DAU**		1 Lap	1.500.000,00
7.01	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Yang baik**	**Kec Tobelo**	**100%**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**15.000.000,00**
7.01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	1 Orang	15.000.000,00	**DAU**		1 Orang	15.000.000,00
7.01	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec Tobelo**	**100%**	**92.980.000,00**	**DAU**		**100%**	**92.980.000,00**
7.01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec Tobelo	1 Paket	850.000,00	DAU		1 Paket	850.000,00
7.01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec Tobelo	1 Paket	20.000.000,00	DAU		1 Paket	20.000.000,00
7.01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec Tobelo	1 Paket	4.000.000,00	DAU		1 Paket	4.000.000,00
7.01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kec Tobelo	2 Paket	1.000.000,00	DAU		2 Paket	1.000.000,00
7.01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kec Tobelo	3 Dok	1.500.000,00	DAU		3 Dok	1.500.000,00
7.01	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kec Tobelo	1 Lap	800.000,00	DAU		1 Lap	800.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Tobelo	8 Lap	64.830.000,00	DAU		8 Lap	64.830.000,00
7.01	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Tobelo**	**100 %**	**125.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**125.000.000,00**
7.01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Tobelo	12 Lap	60.000.000,00	DAU		12 Lap	60.000.000,00
7.01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec Tobelo	12 Lap	5.000.000	DAU		12 Lap	5.000.000,00
7.01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec Tobelo	12 Lap	60.000.000,00	DAU		12 Lap	60.000.000,00
7.01	**01**	**2,1**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Tobelo**	**100%**	**46.500.000,00**	**DAU**		**100%**	**46.500.000,00**
7.01	01	2,1	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec Tobelo	3 Unit	10.000.000,00	DAU		3 Unit	10.000.000,00
7.01	01	2,1	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec Tobelo	3 unit	1.500.000,00	DAU		3 unit	1.500.000
7.01	01	2,1	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabiitasi	Kec Tobelo	3 unit	35.000.000,00	DAU		3 unit	35.000.000,00
7.01	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec Tobelo**	**100%**	**3.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**3.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	**02**	**2.01**			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec Tobelo**	**100%**	**3.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**3.000.000,00**
7.01	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Tobelo	1 Lap	1.500.000,00	DAU		1 lap	1.500.000,00
7.01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Tobelo	1 Dok	1.500.000,00	DAU		1 Dok	1.500.000,00
7.01	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec Tobelo**	**100%**	**5.000.000**	**DAU**		**100%**	**5.000.000**
7.01	**03**	**2.01**			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Tobelo**	**100%**	**5.000.000**	**DAU**		**100%**	**5.000.000**
7.01	03	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kec Tobelo	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000	DAU		4 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00
7.01	03	2.01	02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec Tobelo	1 Dok	1.500.000	DAU		1 Dok	1.500.000,00
7.01	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Tobelo	1 Lap	1.500.000	DAU		1 Lap	1.500.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec Tobelo**	**100 %**	**17.200.000**	**DAU**		**100 %**	**17.200.000**
7.01	**04**	**2.01**			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Tobelo**	**100%**	**17.200.000**	**DAU**		**100%**	**17.200.000**
7.01	04	2.01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Tobelo	1 Lap	17.200.000	DAU		1 Lap	17.200.000,00
7.01	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Tobelo**	**100 %**	**2.000.000**	**DAU**		**100%**	**2.000.000**
7.01	**05**	**2.01**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Tobelo**	**100%**	**2.000.000**	**DAU**		**100%**	**2.000.000**
7.01	05	2.01	04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang Yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Tobelo	20 Orang	2.000.000	DAU		20 Orang	2.000.000
7.01	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec Tobelo**	**100 %**	**2.000.000**	**DAU**		**100 %**	**2.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	**06**	**2.01**			**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kec Tobelo**	**100%**	**2.000.000**	**DAU**		**100%**	**2.000.000**
7.01	06	2.01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Tobelo	10 Dok	1.000.000,00	DAU		10 Dok	1.000.000,00
7.01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Tobelo	10 Dok	1.000.000,00	DAU		10 Dok	1.000.000,00
JUMLAH									**1.882.346.770,88**				**1.882.846.770,88**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO SELATAN

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7 **01**	**KECAMATAN**								
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec. Tobsel**	**100 %**	**2.095.855.863,80**			**1 %**	**2.425.882.633,80**
01.2 01	**Perencanaan, pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat dearah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (%)**	**Kec. Tobsel**	**3 Dok**	**2.500.000,00**			3 **Dok**	**4.070.000,00**
01.2 01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikthisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunsn laporan capian kinerja Iktisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Tobsel	3 Lap	2.500.000,00			3 Lap	4.070.000,00
01. 2. 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (%)**	**Kec. Tobsel**	**100 %**	**1.863.898.092,80**			**100 %**	**1.867.398.092,80**
01. 2 02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Kec. Tobsel	15 0rg/14 bln	1.861.898.092,80			15 0rg/14 bln	1.861.898.092,80
	Koordinasi dan penyusunanlaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Tobsel	1 Lap	2.000.000,00			1 Lap	5.500.000,00
01. 2. 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**Kec. Tobsel**	**100 %**	**14.774.000,00**			**100 %**	**70.950.000,00**
01. 2. 05 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Tobsel	1 OK	14.774.000,00			5 OK	70.950.000,00
01 2. 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**Kec. Tobsel**	**100 %**	**71.346.360,00**			**100 %**	**157.705.020,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
\	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponene instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Tobsel	1 Paket	2.000.000,00			1 Paket	5.000.000,00
01 2. 06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Tobsel	2 Paket	16.500.000,00			2 Paket	51.390.520,00
01 2. 06 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Tobsel	1 Paket	3.500.000,00			1 Paket	9.576.000,00
01 2. 06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	Kec. Tobsel	1 Paket	3.099.800,00			1 Paket	4.725.000,00
01 2. 06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kec. Tobsel	2 Dok	2.206.560,00			2 Dok	4.851.000,00
01 2. 06 08	Fasilitas Kunjngan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kec. Tobsel	1 Lap	14.500.000,00			1 Lap	15.750.000,00
01 2. 06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggraan rapat koordinasi dan kunsultasi SKPD	Kec. Tobsel	5 Lap	29.540.000,00			6 Lap	66.412.500,00
01 2. 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)**	**Kec. Tobsel**	**100 %**	**65.660.411,00**			**100 %**	**196.600.000,00**
01 2. 08 01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Tobsel	4 Lap	52.078.811,00			4 Lap	175.000.000,00
01 2. 08 02	Penyediaa jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaaan jasa komonikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. Tobsel	1 Lap	9.100.000,00			1 Lap	9.100.000,00
01 2. 08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec. Tobsel	1 Lap	4.481.600,00			1 Lap	12.500.000,00
01 2. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**Kec. Tobsel**	**100 %**	**77.677.000,00**			**100 %**	**129.159.521,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 2. 09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kenderaan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kec. Tobsel	1 Unit	49.677.000,00			1 Unit	63.525.000,00
01 2. 09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Tobsel	3 Unit	3.000.000,00			5 Unit	6.500.000,00
01 2. 09 09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	Kec. Tobsel	1 Unit	25.000.000,00			1 Unit	59.134.521,00
7. 01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**100** %	**14.500.000**			**100** %	53.598.150,00
7. 01. 02. 2. 01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Tobsel**	**1 Lap**	**4.500.000,00**			**1 Lap**	**26.052.330,00**
7. 01. 02. 2. 01 01	Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec. Tobsel	1 Lap	4.500.000,00			1 Lap	26.052.330,00
7. 01. 02. 2. 02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**	**Kec. Tobsel**	**100 %**	**5.000.000,00**			**100 %**	**17.006.020,00**
7. 01. 02. 2. 02. 02	Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Kec. Tobsel	1 Lap	5.000.000,00			1 Lap	17.006.020,00
2 03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Cakupan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kec. Tobsel**	**3 Kegiatan**	**5.000.000,00**			**3 Kegiatan**	**10.539.800,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kooordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kec. Tobsel	1 Dok	5.000.000,00			1 Dok	10.539.800,00
7. 01. 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Tobsel	**100 %**	**10.000.000,00**			**100 %**	**16.079.444,00**
2 01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Tobsel**	**100 %**	**10.000.000,00**			**100 %**	**16.079.444,00**
2 01 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawara perencanaan pembangunan di desa (Musrembang)	Kec. Tobsel	5 LK	10.000.000,00			5 LK	16.079.444,00
7. 01. 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec. Tobsel	**100** %	**14.500.000**			**100** %	**16.079.444,00**
7. 01. 04. 2 01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Kec. Tobsel	**100** %	**14.500.000,00**			**100** %	**16.079.444,00**
7. 01. 04 2 01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kec. Tobsel	2 Lap	10.000.000,00			2 Lap	11.000.000,00
7. 01. 04. 2 01 02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat	Kec. Tobsel	2 Lap	4.500.000,00			2 Lap	5.079.444,00
7. 01. 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Tobsel**	**100 %**	**35.402.229**			**100 %**	**42.868.519,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Dearah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Tobsel	**100** %	**35.402.229,00**			**100** %	**42.868.519,00**
2 01 01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945, pelestarian Bhineka tunggal Ika serta pemerintahan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Kec. Tobsel	50 Org	14.872.229,00			50 Org	15.877.658,00
2 01 04	Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkwn stabilitas keamanan lokal Regioanl dan Nasional	Kec. Tobsel	100 Org	20.530.000,00			100 Org	26.990.861,00
7. 01. 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Tobsel**	**100** **%**	**34.760.000**			**100** **%**	**88.245.669,00**
2 01	**Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Tobsel**	**100** **%**	**34.760.000,00**			**100** **%**	**88.245.669,00**
2 01 01	Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Tobsel	2 Dok	4.100.000,00			2 Dok	8.500.000,00
2 01 02	Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan desa	Kec. Tobsel	3 Dok	4.050.000,00			3 Dok	17.584.716,00
2 01 03	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pemberdayagunaan aset desa	Kec. Tobsel	2 Dok	4.030.000,00			2 Dok	5.035.604,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 01 05	Fasilitas pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen yang Fasilitasi Pelaksanaan Tugas kepala desa dan perangkat desa	Kec. Tobsel	1 Dok	4.020.000,00			1 Dok	6.200.000,00
2 01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Tobsel	1 Dok	3.000.000,00			1 Dok	9.321.000,00
2 01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec. Tobsel	1 Dok	4.010.000,00			1 Dok	15.600.000,00
2 01 11	Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen fasilitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	Kec. Tobsel	1 Dok	4.500.000,00			1 Dok	12.600.000,00
2 01 16	Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan desa	Kec. Tobsel	2 Dok	3.550.000,00			2 Dok	5.904.349,00
2 01 17	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah lapoaran hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilyahnya	Kec. Tobsel	1 Dok	3.500.000,00			1 Dok	7.500.000,00
JUMLAH					**2.205.018.092,80**				**2.642.753.859,80**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO UTARA

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec. Tobut**	**90 %**	**1.877.940.117,50**	**DAU**		**90 %**	**1.879.898.470,00**
		01	**2.02**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**11.740.000,00**	**DAU**		**100 %**	**10.840.000,00**
		01	2.02	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tobut	3 Dok	7.260.000,00	DAU		3 Dok	6.000.000,00
		01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tobut	2 Lap	4.480.000,00	DAU		2 Lap	4.840.000,00
		01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**1.538.426.117,50**	**DAU**		**100 %**	**1.538.426.117,50**
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tobut	18 org	1.536.006.117,50	DAU		18 org	1.536.006.117,50
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tobut	1 Lap	2.420.000,00	DAU		1 Lap	2.420.000,00
		01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**30.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**30.000.000,00**
		01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangi-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tobut	2 org	30.000.000,00	DAU		2 org	30.000.000,00

BAPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**109.874.000,00**	**DAU**		**100 %**	**113.143.077,50**
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tobut	4 Paket	10.000.000,00	DAU		4 Paket	11.907.000,00
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tobut	4 Paket	30.169.000,00	DAU		4 Paket	30.169.387,50
		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tobut	8 Paket	20.000.000,00	DAU		8 Paket	20.299.230,00
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tobut	3 Paket	2.205.000,00	DAU		3 Paket	2.205.000,00
		01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Udangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tobut	1 Dok	2.500.000,00	DAU		1 Dok	2.738.610,00
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tobut	4 Lap	10.000.000,00	DAU		4 Lap	10.143.000,00
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tobut	5 Lap	35.000.000,00	DAU		5 Lap	35.680.850,00
		01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**96.900.000,00**	**DAU**		**100 %**	**95.708.025,00**
		01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tobut	12 Lap	53.000.000,00	DAU		12 Lap	51.111.900,00
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tobut	12 Lap	18.900.000,00	DAU		12 Lap	18.929.925,00
		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tobut	12 Lap	25.000.000,00	DAU		12 Lap	25.666.200,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**91.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**91.781.250,00**
		01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan da Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Tobut	1 Unit	78.000.000,00	DAU		1 Unit	78.000.000,00
		01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tobut	10 Unit	13.000.000,00	DAU		10 Unit	13.781.250,00
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**23.625.000,00**	**DAU**		**100 %**	**23.764.972,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**11.025.000,00**	**DAU**		**100 %**	**11.025.000,00**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Signeri Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tobut	1 Lap	5.512.500,00	DAU		1 Lap	5.512.500,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tobut	1 Dok	5.512.500,00	DAU		1 Dok	5.512.500,00
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Cakupan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Kec. Tobut	100 %	**4.600.000,00**	DAU		100 %	**4.647.622,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Tobut	1 Dok	4.600.000,00	DAU		1 Dok	4.647.622,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**02**	**2.04**	**01**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**8.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**8.092.350,00**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Tobut	1 Dok	4.000.000,00	DAU		1 Dok	4.046.175,00
7	**01**	**03**			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Tobut	1 Lap	4.000.000,00	DAU		1 Lap	4.046.175,00
7	**01**	**03**	**2.01**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**16.215.459,00**	**DAU**		**100 %**	**21.025.000,00**
7	01	03	2.01	01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**16.215.459,00**	**DAU**		**100 %**	**21.025.000,00**
7	01	03	2.01	02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tobut	4 Lmbg	10.000.000,00	DAU		4 Lmbg	10.000.000,00
7	01	03	2.01	03	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Tobut	1 Dok	3.107.730,00	DAU		1 Dok	5.512.500,00
7	**01**	**04**			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tobut	1 Lap	3.107.729,00	DAU		1 Lap	5.512.500,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**04**	**2.01**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**18.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**19.129.492,00**
7	**01**	**05**			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**18.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**19.129.492,00**
7	01	05	2.01		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tobut	1 Lap	18.000.000,00	DAU		1 Lap	19.129.492,00
7	01	05	2.01	01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**41.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**51.011.978,00**
7	01	05	2.01	04	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**41.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**51.011.978,00**
7	01	05	2.01	08	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tobut	75 Org	20.000.000,00	DAU		75 Org	29.986.978,00

DAFTAR BEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Muwujudkan Stabilitasi Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tobut	15 Org	11.000.000,00	DAU		15 Org	11.025.000,00
7	01	06	2.01		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tobut	1 Dok	10.000.000,00	DAU		1 Dok	10.000.000,00
7	**01**	**06**	**2.01**	**02**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**39.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**45.576.474,00**
7	01	06	2.01	03	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**39.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**45.576.474,00**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tobut	10 Dok	4.000.000,00	DAU		10 Dok	5.512.500,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pngelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tobut	10 Dok	4.000.000,00	DAU		10 Dok	5.512.500,00
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Tobut	10 Lap	3.000.000,00	DAU		10 Lap	3.307.500,00
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Tobut	10 Dok	3.000.000,00	DAU		10 Dok	3.307.500,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tobut	1 Dok	3.000.000,00	DAU		1 Dok	3.307.500,00
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tobut	10 Dok	3.000.000,00	DAU		10 Dok	3.307.500,00
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Tobut	10 Dok	5.000.000,00	DAU		10 Dok	5.886.474,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tobut	1 Lap	10.000.000,00	DAU		1 Lap	11.025.000,00
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Tobut	1 Lap	4.000.000,00	DAU		1 Lap	4.410.000,00
JUMLAH									**2.015.780.576,50**				**2.040.406.386,00**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO TENGAH

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7.01 01	**KECAMATAN**								
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec. Tobteng**	**90 Persen**	**2.136.517.795,92**	**DAU**		**90 Persen**	**2.440.817.911**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kec. Tobteng**	**100 Persen**	**4.500.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**7.869.710,00**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan	Kec. Tobteng	2 Dokumen	2.000.000,00	DAU		2 Dokumen	2.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Kec. Tobteng	1 Laporan	2.500.000,00	DAU		1 Laporan	5.869.710
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kec. Tobteng**	**100 Persen**	**1.899.318.245,92**	**DAU**		**100 Persen**	**2.134.099.283,70**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tobteng	28 OB	1.893.818.245,92	DAU		28 OB	2.123.424.052,05
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tobteng	1 Laporan	2.500.000,00	DAU		1 Laporan	3.926.278,65
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kec. Tobteng	1 Laporan	3.000.000,00	DAU		1 Laporan	6.748.953,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Tobteng**	**100 Persen**	**11.550.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**12.127.500,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tobteng	1 Orang	11.550.000,00	DAU		1 Orang	12.127.500,00
7.01.01.2.06	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Tobteng**	**100 Persen**	**69.082.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**119.638.917,00**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tobteng	2 Paket	2.000.000,00	DAU		2 Paket	5.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tobteng	3 Paket	10.000.000,00	DAU		3 Paket	25.103.925
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tobteng	5 Paket	5.000.000,00	DAU		5 Paket	10.467.180
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tobteng	2 Paket	4.000.000,00	DAU		2 Paket	6.931.762
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tobteng	12 Dok	5.082.000,00	DAU		12 Dok	5.082.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tobteng	1 Lap	10.000.000,00	DAU		1 Lap	14.553.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tobteng	35 Lap	33.000.000,00	DAU		35 Lap	52.501.050
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tobteng**	**100 Persen**	**141.417.550,00**	**DAU**		**100 Persen**	**155.900.000**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tobteng	10 Lap	105.517.550,00	DAU		10 Lap	120.000.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Kec. Tobteng**	**12 Lap**	**13.500.000,00**	**DAU**		**12 Lap**	**13.500.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tobteng	1 Lap	22.400.000,00	DAU		1 Lap	22.400.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tobteng**	**100 Persen**	**10.650.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**11.182.500**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tobteng	2 Unit	3.150.000,00	DAU		2 Unit	3.307.500,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tobteng	5 Unit	2.500.000	DAU		5 Unit	2.625.000,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tobteng	100% Unit	5.000.000,00	DAU		1 Unit	5.250.000,00
7.01.03	**PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Tobteng**	**100 Persen**	**13.860.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**14.553.000,00**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Tobteng**	**100 Persen**	**13.860.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**14.553.000,00**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa	Kec. Tobteng	4 Lemas	13.860.000,00	DAU		4 Lemas	14.553.000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Tobteng**	100 **Persen**	**10.150.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**10.657.500,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Tobteng**	**100 Persen**	**10.150.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**10.657.500**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tobteng	50 Org	5.050.000,00	DAU		50 Org	5.302.500,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tobteng	6 Org	5.100.000,00	DAU		15 Org	5.355.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Tobteng**	**100 Persen**	**9.690.450,00**	**DAU**		**100 Persen**	**10.174.972,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Tobteng**	**100 Persen**	**9.690.450**	**DAU**		**100 Persen**	**10.174.972,00**
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tobteng	2 Dok	9.690.450,00	DAU		2 Dok	10.174.972,00
JUMLAH					**2.170.218.245,92**				**2.476.203.382,70**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO TIMUR

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA DAERAH KABUPATE / KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec. Tobtim**	**90 %**	**1.842.838.015,84**	**DAU**		**90 %**	**2.055.586.669,81**
7	**01**	**01**	**201**		**Perencanaan, pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat dearah**	**Tingkat Kosistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**5.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**8.000.000,00**
7	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaan perangkat Daerah	Kec. Tobtim	3 Dok	2.500.000,00	DAU		3 Dok	4.000.000,00
7	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tobtim	1 lap	2.500.000,00	DAU		1 lap	4.000.000,00
7	**01**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**1.578.658.015,84**	**DAU**		**100 %**	**1.697.377.911,96**
7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Kec. Tobtim	12 OB	1.576.158.015,84	DAU		12 OB	1.693.377.911,96
7	01	01	202	05	Koordinasi dan penyusunanlaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Tobtim	1 Lap	2.500.000,00	DAU		1 Lap	4.000.000,00
7	**01**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Adminstrasi Kepegawaian perangkat Daerah**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**18.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**28.000.000,00**
7	01	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Tobtim	1 Org	18.000.000,00	DAU		2 Org	28.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**48.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**69.000.000,00**
7	01	01	206	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tobtim	1 Pkt	2.000.000,00	DAU		3 Pkt	3.000.000,00
7	01	01	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tobtim	1 Pkt	10.000.000,00	DAU		0 Pkt	
7	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Tobtim	1 Pkt	2.000.000,00	DAU		1 Pkt	3.500.000,00
7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tobtim	2 Pkt	1.000.000,00	DAU		2 Pkt	2.000.000,00
7	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tobtim	12 Dok	1.000.000,00	DAU		12 Dok	3.000.000,00
7	01	01	206	08	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tobtim	12 Lap	2.000.000,00	DAU		12 Lap	3.500.000,00
7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tobtim	2 Lap	30.000.000,00	DAU		5 Lap	54.000.000,00
7	**01**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**40.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**50.000.000,00**
7	01	01	207	10	Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Tobtim	1 Unit	40.000.000,00	DAU		1 Unit	50.000.000,00
7	**01**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**104.180.000,00**	**DAU**		**100 %**	**123.920.000,00**
7	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tobtim	12 Lap	75.572.000,00	DAU		12 Lap	93.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tobtim	24 Lap	3.000.000,00	DAU		24 Lap	5.000.000,00
7	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tobtim	12 Lap	25.608.000,00	DAU		12 Lap	25.920.000,00
7	**01**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**49.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**79.288.757,85**
7	**01**	**01**	**209**		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tobtim	1 Unit	32.000.000,00	DAU		1 Unit	35.288.757,85
7	01	01	209	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tobtim	2 Unit	2.000.000,00	DAU		4 Unit	2.000.000,00
7	01	01	209	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tobtim	1 Unit	15.000.000,00	DAU		1 Unit	42.000.000,00
7	01	01	209	09	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**12.000.000,00**	**DAU**	-	**100 %**	**44.777.526,89**
7	**01**	**02**			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintah di tkt Kecamatan**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**24.777.526,89**
7	**01**	**02**	**201**		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tobtim	1 Lap	4.000.000,00	DAU		2 Lap	14.777.526,89
7	01	02	201	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tobtim	1 Dok	6.000.000,00	DAU		1 Dok	10.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	201	02	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**2.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**20.000.000,00**
7	**01.**	**02**	**204**		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Tobtim	1 Dok	1.000.000,00	DAU		5 Dok	10.000.000,00
7	01.	02	204	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Tobtim	1 Lap	1.000.000,00	DAU		5 Lap	10.000.000,00
7	01.	02	204	02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**3.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**7.000.000,00**
7	**01**	**03**			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**3.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**7.000.000,00**
7	**01**	**03**	**201**		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tobtim	6 LMD	3.000.000,00	DAU		6 LMD	7.000.000,00
7	01	03	201	01	**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**1.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**13.433.258,07**
7	**01**	**04**			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**1.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**13.433.258,07**
7	**01**	**04**	**201**		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tobtim	1 Lap	1.000.000,00	DAU		6 Lap	13.433.258,07

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	201	01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**22.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**35.822.021,51**
7	**01**	**05**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**22.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**35.822.021,51**
7	**01**	**05**	**201**		Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945, pelestarian Bhineka tunggal Ika serta pemerintahan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Kec. Tobtim	50 Org	15.000.000,00	DAU		50 Org	25.000.000,00
7	01	05	201	01	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tobtim	5 Org	5.000.000,00	DAU		5 Org	5.000.000,00
7	01	05	201	04	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tobtim	1 Dok	2.000.000,00	DAU		3 Dok	5.822.021,51
7	01	05	201	08	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**55.000.000,00**
7	**01**	**06**			**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**55.000.000,00**

DAK BEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**06**	**201**		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tobtim	1 Dok	1.500.000,00	DAU		6 Dok	10.000.000,00
7	01	06	201	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Tobtim	1 Dok	1.500.000,00	DAU		6 Dok	10.000.000,00
7	01	06	201	05	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Tobtim	1 Dok	6.000.000,00	DAU		0 Dok	-
7	01	06	201	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tobtim	1 Dok	2.000.000,00	DAU		3 Dok	5.000.000,00
7	01	06	201	11	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Tobtim	1 Dok	2.000.000,00	DAU		6 Dok	20.000.000,00
7	01	06	201	16	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tobtim	1 Lap	2.000.000,00	DAU		6 Lap	10.000.000,00
JUMLAH									**1.895.838.015,84**				**2.211.619.476,28**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO BARAT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7.01	**KECAMATAN**								
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec. Tobar**	**90 Persen**	**860.138.271**	**DAU**		**90 Persen**	**860.138.271**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kec. Tobar**	**100 Persen**	**10.000.000**	**DAU**		**100 Persen**	**10.000.000**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan	Kec. Tobar	2 Dokumen	6.000.000	DAU		2 Dokumen	6.000.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Kec. Tobar	1 Laporan	4.000.000	DAU		1 Laporan	4.000.000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kec. Tobar**	**100 Persen**	**619.458.271**	**DAU**		**100 Persen**	**619.458.271**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tobar	5 OB	615.458.271	DAU		5 OB	615.458.271
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tobar	1 Laporan	4.000.000	DAU		1 Laporan	4.000.000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Tobar**	**100 Persen**	**30.000.000**	**DAU**		**100 Persen**	**30.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Tobar	2 Orang	30.000.000	DAU		2 Orang	30.000.000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Tobar**	**100 Persen**	**89.500.000**	**DAU**		**100 Persen**	**89.500.000**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tobar	2 Paket	3.000.000	DAU		2 Paket	3.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tobar	2 Paket	5.000.000	DAU		2 Paket	5.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tobar	1 Paket	5.000.000	DAU		1 Paket	5.000.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tobar	2 Paket	5.000.000	DAU		2 Paket	5.000.000
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tobar	12 Dok	1.500.000	DAU		12 Dok	1.500.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tobar	12 Lap	15.000.000	DAU		12 Lap	15.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tobar	12 Lap	55.000.000	DAU		12 Lap	55.000.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tobar**	**100 Persen**	**55.180.000**	**DAU**		**100 Persen**	**55.180.000**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec. Tobar**	12 Lap	42.180.000	DAU		12 Lap	42.180.000

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Kec. Tobar**	12 Lap	3.000.000	DAU		12 Lap	3.000.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Kec. Tobar**	12 Lap	10.000.000	DAU		12 Lap	10.000.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tobar**	**100 Persen**	**56.000.000**	**DAU**		**100 Persen**	**56.000.000**
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tobar	2 Unit	30.000.000	DAU		2 Unit	30.000.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tobar	6 Unit	6.000.000	DAU		6 Unit	6.000.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabitilasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Tobar	1 Unit	20.000.000	DAU		1 Unit	20.000.000
7.01.03	**PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Tobar**	**100 Persen**	**8.000.000**	**DAU**		**100 Persen**	**7.000.000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Tobar**	**100 Persen**	**8.000.000**	**DAU**		**100 Persen**	**7.000.000**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa	Kec. Tobar	8 Lemas	8.000.000,00	DAU		8 Lemas	7.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PRESENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Tobar**	**100 Persen**	**12.000.000**	**DAU**		**100 Persen**	**12.000.000**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Tobar**	**100 Persen**	**12.000.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**12.000.000,00**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tobar	12 Laporan	12.000.000,00	DAU		12 Laporan	12.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec. Tobar	100 Persen	30.000.000,00	DAU		100 Persen	30.000.000,00
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Tobar**	**100 Persen**	**30.000.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**30.000.000,00**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tobar	20 Org	20.000.000	DAU		20 Org	20.000.000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tobar	15 Org	10.000.000,00	DAU		15 Org	10.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Tobar**	**100 Persen**	**25.000.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**25.000.000,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Tobar	100 Persen	25.000.000,00	DAU		100 Persen	25.000.000,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tobar	1 Dok	10.000.000	DAU		1 Dok	10.000.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tobar	1 Dok	10.000.000	DAU		1 Dok	10.000.000
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Tobar	1 Dok	5.000.000	DAU		1 Dok	5.000.000
JUMLAH					**935.138.270,52**				**934.138.270,52**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KAO

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7.01	**KECAMATAN**								
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec. Kao**	**90 %**	**1.719.596.232,20**	**DAU**		**90 %**	**1.864.471.855,42**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	**Kec. Kao**	**100 %**	**5.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**5.000.000,00**
7.01.01.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kao	2 Laporan	5.000.000,00	DAU		2 Laporan	5.000.000,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah**	**Kec. Kao**	**100 %**	**1.471.104.141,20**	**DAU**		**100 %**	**1.618.014.555,32**
7.01.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kao	15 OB	1.469.104.141,20	DAU		15 OB	1.616.014.555,32
7.01.01.2.02. 05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kao	1 Laporan	2.000.000,00	DAU		1 Laporan	2.000.000,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Kec. Kao**	**100 %**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**11.000.000,00**
7.01.01.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Kao	1 Orang	10.000.000,00	DAU		1 Orang	11.000.000,00

BARED A HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**Kec. Kao**	**100 %**	**82.650.000,00**	**DAU**		**100 %**	**83.165.000,00**
7.01.01.02.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Kao	1 Paket	1.650.000,00	DAU		1 Paket	1.815.000,00
7.01.01.02.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Kao	10 Paket	3.000.000,00	DAU		10 Paket	3.000.000,00
7.01.01.02.06. 05	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Kao	1 Paket	2.500.000,00	DAU		1 Paket	2.750.000,00
7.01.01.02.06. 06	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Kao	1 Dokumen	1.500.000,00	DAU		1 Dokumen	1.200.000,00
7.01.01.02.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kao	1 Laporan	4.000.000,00	DAU		1 Laporan	4.400.000,00
7.01.01.02.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kao	12 Laporan	70.000.000,00	DAU		12 Laporan	70.000.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Kao**	**100 %**	**123.002.091,00**	**DAU**		**100 %**	**118.802.300,10**
7.01.01.2.08. 01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kao	1 Laporan	65.406.000,00	DAU		1 Laporan	71.946.600,00
7.01.01.2.08. 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Kao	1 Laporan	2.596.091,00	DAU		1 Laporan	2.855.700,10
7.01.01.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Kao	1 Laporan	55.000.000,00	DAU		1 Laporan	44.000.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Kao**	**100 %**	**27.840.000,00**	**DAU**		**100 %**	**28.490.000,00**
7.01.01.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kec. Kao	2 Unit	21.340.000,00	DAU		2 Unit	21.340.000,00
7.01.01.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Kao	4 Unit	1.500.000,00	DAU		4 Unit	1.650.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Kao	2 Unit	5.000.000,00	DAU		2 Unit	5.500.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Kao**	**100 %**	**13.187.908,80**	**DAU**		**100 %**	**13.496.091,00**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan**	**Kec. Kao**	**100 %**	**13.187.908,80**	**DAU**		**100 %**	**13.496.091,00**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kao	1 Laporan	10.187.908,80	DAU		1 Laporan	10.196.091,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kao	1 Dokumen	3.000.000,00	DAU		1 Dokumen	3.300.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Kao**	**100 %**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**15.000.000,00**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Kao**	**100 %**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**15.000.000,00**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kao	3 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	DAU		3 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kao	1 Dokumen	5.000.000,00	DAU		1 Dokumen	5.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kao	1 Laporan	5.000.000,00	DAU		1 Laporan	5.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Kao**	**100 %**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**10.000.000,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Kao**	**100 %**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**10.000.000,00**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kao	1 Laporan	10.000.000,00	DAU		1 Laporan	10.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Kao**	**100 %**	**42.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**42.000.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Kao**	**100 %**	**42.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**42.000.000,00**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kao	157 Orang	31.000.000,00	DAU		157 Orang	31.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kao	1 Dokumen	11.000.000,00	DAU		1 Dokumen	11.000.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**KEC. KAO**	**100 %**	**14.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**15.040.099,00**
7.01.06. 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Kao**	**100 %**	**14.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**15.040.099,00**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kao	1 Dokumen	5.000.000,00	DAU		1 Dokumen	5.040.099,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kao	1 Dokumen	4.000.000,00	DAU		1 Dokumen	5.000.000,00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Kao	1 Laporan	5.000.000,00	DAU		1 Laporan	5.000.000,00
JUMLAH					**1.813.784.141,00**				**1.960.008.045,42**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KAO UTARA

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7 01	**KECAMATAN**								
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec Kao Utara**	**90 Persen**	**1.622.544.689,28**	**DAU**		**90 Persen**	**1.627.278.986,03**
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**4.444.453,00**	**DAU**		**100 Persen**	**4.444.453,00**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec Kao Utara	3 Dokumen	3.066.328,00	DAU		3 Dokumen	3.066.328,00
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Kao Utara	2 Laporan	1.378.125,00	DAU		2 Laporan	1.378.125,00
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**1.352.205.351,03**	**DAU**		**100 Persen**	**1.352.205.351,03**
7 01 01 2'02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Kao Utara	11 OB	1.348.415.507,28	DAU		11 OB	1.348.415.507,28
7 01 01 2'02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Kao Utara	1 Laporan	3.789.843,75	DAU		1 Laporan	3.789.843,75
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**12.987.703,25**	**DAU**		**100 Persen**	**15.000.000,00**
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Kao Utara	1 Orang	12.987.703,25	DAU		1 Orang	15.000.000,00
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**52.116.682,00**	**DAU**		**100 Persen**	**52.616.682,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Kao Utara	1 Paket	2.000.000,00	DAU		1 Paket	2.000.000,00
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec Kao Utara	2 Paket	5.000.000,00	DAU		2 Paket	5.500.000,00
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec Kao Utara	6 Paket	7.000.000,00	DAU		6 Paket	7.000.000,00
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec Kao Utara	1 Paket	1.500.000,00	DAU		1 Paket	1.500.000,00
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Kao Utara	1 Laporan	3.000.000,00	DAU		1 Laporan	3.000.000,00
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Kao Utara	12 Laporan	33.616.682,00	DAU		12 Laporan	33.616.682,00
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**84.000.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**84.000.000,00**
7 01 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Kao Utara	10 Laporan	58.200.000,00	DAU		10 Laporan	58.200.000,00
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Kao Utara	12 Laporan	4.800.000,00	DAU		12 Laporan	4.800.000,00
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Kao Utara	10 Laporan	21.000.000,00	DAU		10 Laporan	21.000.000,00
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**116.790.500,00**	**DAU**		**100 Persen**	**119.012.500,00**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec Kao Utara	3 Unit	55.778.000,00	DAU		3 Unit	58.000.000,00
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec Kao Utara	3 Unit	5.000.000,00	DAU		3 Unit	5.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Kao Utara	1 Unit	56.012.500,00	DAU		1 Unit	56.012.500,00
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**15.000.000,00**
7 01 2 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintah di tkt Kecamatan**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**15.000.000,00**
7 01 2 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Kao Utara	6 Laporan	10.000.000,00	DAU		6 Laporan	10.000.000,00
7 01 2 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiaatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Kao Utara	2 Dokumen	5.000.000,00	DAU		2 Dokumen	5.000.000,00
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**9.340.075,81**	**DAU**		**100 Persen**	**9.340.075,81**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**9.340.075,81**	**DAU**		**100 Persen**	**9.340.075,81**
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Mayarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembnagunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Kao Utara	4 Lemas	5.000.000,00	DAU		4 Lemas	5.000.000,00
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec Kao Utara	2 Dokumen	4.340.075,81	DAU		2 Dokumen	4.340.075,81

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**5.000.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**5.000.000,00**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**5.000.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**5.000.000,00**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Kao Utara	1 Laporan	5.000.000,00	DAU		1 Laporan	5.000.000,00
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**31.210.742,19**	**DAU**		**100 Persen**	**31.210.742,19**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**31.210.742,19**	**DAU**		**100 Persen**	**31.210.742,19**
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Kao Utara	100 Orang	24.167.500,00	DAU		100 Orang	24.167.500,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Kao Utara	10 Orang	2.043.242,19	DAU		10 Orang	2.043.242,19
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Kao Utara	2 Dokumen	5.000.000,00	DAU		2 Dokumen	5.000.000,00
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**10.000.000,00**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Kao Utara**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**10.000.000,00**
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Kao Utara	12 Dokumen	2.500.000,00	DAU		12 Dokumen	2.500.000,00
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Kao Utara	12 Dokumen	2.500.000,00	DAU		12 Dokumen	2.500.000,00
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec Kao Utara	12 Laporan	5.000.000,00	DAU		12 Laporan	5.000.000,00
JUMLAH					**1.693.095.507,28**				**1.697.829.804,03**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KAO BARAT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7.01	**KECAMATAN**								
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec. Kao Barat**	**90%**	**1.819.753.967,80**	**DAU**	**-**	**90%**	**2.245.233.967,80**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**14.000.000,00**	**DAU**	**-**	**100%**	**14.000.000,00**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kao Barat	3 Dok	8.000.000,00	DAU	-	3 Dok	8.000.000,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikthisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan capian kinerja Iktisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Kao Barat	3 Lap	6.000.000,00	DAU	-	3 Lap	6.000.000,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**1.448.233.967,80**	**DAU**	**-**	**100%**	**1.449.233.967,80**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Kec. Kao Barat	11 0rg/14 bln	1.441.233.967,80	DAU	-	11 0rg/14 bln	1.441.233.967,80
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Kao Barat	1 Lap	7.000.000,00	DAU	-	1 Lap	8.000.000,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**50.000.000,00**	**DAU**	**-**	**100%**	**71.000.000,00**
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peratura Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbngan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. Kao Barat	3 Orang	50.000.000,00	DAU	-	5 Orang	71.000.000,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**133.500.000,00**	**DAU**	**-**	**100%**	**228.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Kao Barat	1 Paket	2.500.000,00	DAU	-	1 Paket	9.000.000,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Kao Barat	1 Paket	45.000.000,00	DAU	-	1 Paket	82.000.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Kao Barat	1 Paket	9.000.000,00	DAU	-	1 Paket	11.000.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kec. Kao Barat	1 Paket	2.500.000,00	DAU	-	1 Paket	8.000.000,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kec. Kao Barat	2 Dok	2.000.000,00	DAU	-	2 Dok	6.000.000,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kec. Kao Barat	4 Lap	2.500.000,00	DAU	-	4 Lap	21.000.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggraan rapat koordinasi dan kunsultasi SKPD	Kec. Kao Barat	10 Lap	70.000.000,00	DAU	-	10 Lap	91.000.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**109.000.000,00**	**DAU**	-	**100%**	**325.000.000,00**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Kao Barat	4 Lap	75.000.000,00	DAU	-	4 Lap	250.000.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaa jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaaan jasa komonikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. Kao Barat	4 Lap	9.000.000,00	DAU	-	4 Lap	20.000.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec. Kao Barat	4 Lap	25.000.000,00	DAU	-	4 Lap	55.000.000,00
7.01.01.2. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**65.020.000,00**	**DAU**	-	**100%**	**158.000.000,00**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	Kec. Kao Barat	2 Unit	31.020.000,00	DAU	-	2 Unit	88.000.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Kao Barat	1 Unit	25.000.000,00	DAU	-	1 Unit	30.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	Kec. Kao Barat	2 Unit	9.000.000,00	DAU	-	2 Unit	40.000.000,00
7. 01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**10.500.000,00**	**DAU**	-	**100%**	**74.000.000,00**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**7.500.000,00**	**DAU**	-	**100%**	**36.000.000,00**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec. Kao Barat	2 Lap	6.000.000,00	DAU	-	2 Lap	17.000.000,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kec. Kao Barat	2 Dok	1.500.000,00	DAU	-	2 Dok	19.000.000,00
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**3.000.000,00**	**DAU**	-	**100%**	**38.000.000,00**
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Kec. Kao Barat	1 Dok	1.500.000,00	DAU	-	1 Dok	19.000.000,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Kec. Kao Barat	2 Lap	1.500.000,00	DAU	-	2 Lap	19.000.000,00
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**4.500.000,00**	**DAU**	-	**100%**	**22.000.000,00**
7. 01. 03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**4.500.000,00**	**DAU**	-	**100%**	**22.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 01. 03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa (Musrembang)	Kec. Kao Barat	1 Lemas	1.500.000,00	DAU	-	1 Lenmas	10.000.000,00
7. 01. 03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kao Barat	1 Dok	1.500.000,00	DAU	-	1 Dok	5.000.000,00
7. 01. 03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kao Barat	1 Lap	1.500.000,00	DAU	-	1 Lap	7.000.000,00
7. 01. 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**8.000.000,00**	**DAU**	**-**	**100%**	**22.000.000,00**
7. 01. 04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**8.000.000,00**	**DAU**	**-**	**100%**	**22.000.000,00**
7. 01. 04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kec. Kao Barat	1 Lap	8.000.000,00	DAU	-	1 Lap	22.000.000,00
7. 01. 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**20.000.000,00**	**DAU**	**-**	**100%**	**59.000.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Dearah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Dearah**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**20.000.000,00**	**DAU**	**-**	**100%**	**59.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945, pelestarian Bhineka tunggal Ika serta pemerintahan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Kec. Kao Barat	25 Orang	12.000.000,00	DAU	-	30 Orang	30.000.000,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkwn stabilitas keamanan lokal Regioanl dan Nasional	Kec. Kao Barat	5 Orang	6.000.000,00	DAU	-	30 Orang	17.000.000,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kao Barat	1 Dok	2.000.000,00	DAU	-	1 Dok	12.000.000,00
7. 01. 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**13.000.000,00**	**DAU**	-	**100%**	**126.000.000,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Kao Barat**	**100%**	**13.000.000,00**	**DAU**	-	**100%**	**126.000.000,00**
7.01.06.2.01.02	Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kao Barat	1 Dok	1.000.000,00	DAU	-	1 Dok	10.000.000,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kao Barat	1 Dok	1.500.000,00	DAU	-	1 Dok	7.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.05	Fasilitas pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen yang Fasilitasi ddalam rangka Pelaksanaan Tugas kepala desa dan perangkat desa	Kec. Kao Barat	1 Dok	1.500.000,00	DAU	-	1 Dok	12.000.000,00
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Kao Barat	1 Dok	1.500.000,00	DAU	-	1 Dok	30.000.000,00
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam RangkaPelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	Kec. Kao Barat	1 Dok	1.500.000,00	DAU	-	1 Dok	18.000.000,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen fasilitas dalam rangka penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	Kec. Kao Barat	1 Dok	1.000.000,00	DAU	-	1 Dok	7.000.000,00
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan dann penegasan batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan da penegasan batas Desa	Kec. Kao Barat	1 Dok	1.000.000,00	DAU	-	1 Dok	7.000.000,00
7.01.06.2.01.16	Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan desa	Kec. Kao Barat	1 Dok	2.000.000,00	DAU	-	1 Dok	20.000.000,00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah lapoaran hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilyahnya	Kec. Kao Barat	1 Lap	1.000.000,00	DAU	-	1 Lap	9.000.000,00
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan	Kec. Kao Barat	1 Lap	1.000.000,00	DAU	-	1 Lap	6.000.000,00
JUMLAH					**1.875.753.967,80**				**2.548.233.967,80**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KAO TELUK

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10
7						**URUSAN KEWILAYAHAN**									
7	**01**					**KECAMATAN**									
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kecamatan Kao Teluk**	**90**	**%**	**1.711.536.377,20**	**DAU**		**90**	**%**	**1.711.536.377,20**
7	**01**	**01**	**2**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100**	**%**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100**	**%**	**10.000.000,00**
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Kecamatan Kao Teluk	2	Dok	5.000.000,00	DAU		2	Dok	5.000.000,00
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang dihasilkan	Kecamatan Kao Teluk	1	Lap	5.000.000,00	DAU		1	Lap	5.000.000,00
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100**	**%**	**1.348.336.877,20**	**DAU**		**100**	**%**	**1.348.336.877,20**
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kao Teluk	16	OB	1.344.186.877,20	DAU		16	OB	1.344.186.877,20
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Kao Teluk	1	Lap	4.150.000,00	DAU		1	Lap	4.150.000,00
7	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100**	**%**	**42.000.000,00**	**DAU**		**100**	**%**	**42.000.000,00**
7	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Kao Teluk	2	Org	42.000.000,00	DAU		2	Org	42.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**141.679.500,00**	**DAU**		**100 %**	**141.679.500,00**
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Kao Teluk	4 Pkt	3.145.000,00	DAU		4 Pkt	3.145.000,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Kao Teluk	27 Pkt	5.293.500,00	DAU		27 Pkt	5.293.500,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Kao Teluk	3 Pkt	3.435.000,00	DAU		3 Pkt	3.435.000,00
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan & perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kecamatan Kao Teluk	144 Dok	4.956.000,00	DAU		144 Dok	4.956.000,00
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kao Teluk	1 Lap	22.000.000,00	DAU		1 Lap	22.000.000,00
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kao Teluk	28 Lap	102.850.000,00	DAU		28 Lap	102.850.000,00
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**115.120.000,00**	**DAU**		**100 %**	**115.120.000,00**
7	01	01	2	08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kao Teluk	12 Lap	70.000.000,00	DAU		12 Lap	70.000.000,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Kantor	Kao Teluk	12 Lap	18.000.000,00	DAU		12 Lap	18.000.000,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kao Teluk	1 Lap	27.120.000,00	DAU		1 Lap	27.120.000,00
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**54.400.000,00**	**DAU**		**100 %**	**54.400.000,00**
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kecamatan Kao Teluk	1 Unit	44.000.000,00	DAU		1 Unit	44.000.000,00
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Kao Teluk	3 Unit	10.400.000,00	DAU		3 Unit	10.400.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**4.500.000,00**	**DAU**		**100 %**	**4.500.000,00**
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**4.500.000,00**	**DAU**		**100 %**	**4.500.000,00**
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kao Teluk	1 Lap	4.500.000,00	DAU		1 Lap	4.500.000,00
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kao Teluk**	**100 %**	**17.500.000,00**	**DAU**		**100 %**	**17.500.000,00**
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kao Teluk**	**100 %**	**17.500.000,00**	**DAU**		**100 %**	**17.500.000,00**
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kao Teluk	4 Lga	5.000.000,00	DAU		4 Lga	5.000.000,00
7	01	03	2	01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Kao Teluk	1 Dok	6.000.000,00	DAU		1 Dok	6.000.000,00
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kao Teluk	1 Lap	6.500.000,00	DAU		1 Lap	6.500.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100**	**%**	**13.200.000,00**	**DAU**		**100**	**%**	**13.200.000,00**
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100**	**%**	**13.200.000,00**	**DAU**		**100**	**%**	**13.200.000,00**
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kao Teluk	1	Lap	6.600.000,00	DAU		1	Lap	6.600.000,00
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kao Teluk	1	Lap	6.600.000,00	DAU		1	Lap	6.600.000,00
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100**	**%**	**33.480.500,00**	**DAU**		**100**	**%**	**33.480.500,00**
7	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100**	**%**	**33.480.500,00**	**DAU**		**100**	**%**	**33.480.500,00**
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan epublik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan epublik Indonesia	Kecamatan Kao Teluk	300	Orang	16.205.500,00	DAU		300	Orang	16.205.500,00

BAPPEDA HALUT

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Kao Teluk	24 Orang	15.000.000,00	DAU		24 Orang	15.000.000,00
7	01	05	2	01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Kao Teluk	1 Laporan	2.275.000,00	DAU		1 Lap	2.275.000,00
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kao Teluk**	**100 %**	**20.050.000,00**	**DAU**		**100 %**	**20.050.000,00**
7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kao Teluk**	**100 %**	**20.050.000,00**	**DAU**		**100 %**	**20.050.000,00**
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kao Teluk	1 Dok	2.200.000,00	DAU		1 Dok	2.200.000,00
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Kao Teluk	1 Dok	2.200.000,00	DAU		1 Dok	2.200.000,00
7	01	06	2	01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Kao Teluk	1 Dok	2.200.000,00	DAU		1 Dok	2.200.000,00
7	01	06	2	01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Kao Teluk	1 Dok	3.750.000,00	DAU		1 Dok	3.750.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2	01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Kao Teluk	1 Dok	4.800.000,00	DAU		1 Dok	4.800.000,00
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kecamatan Kao Teluk	1 Lap	4.900.000,00	DAU		1 Lap	4.900.000,00
JUMLAH										**1.800.266.877,20**				**1.800.266.877,20**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MALIFUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec Malifut**	**90 %**	**2.467.917.869,00**	**DAU**		**90 %**	**2.605.803.101,65**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kec Malifut**	**100 %**	**15.110.000,00**	**DAU**		**100 %**	**17.150.000,00**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec Malifut	3 Dok	7.555.000,00	DAU		3 Dok	8.575.000,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Malifut	4 Lap	7.555.000,00	DAU		4 Lap	8.575.000,00
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kec Malifut**	**100 %**	**2.127.304.254,00**	**DAU**		**100 %**	**2.071.753.102,00**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Malifut	26 OB	2.111.535.169,00	DAU		26 OB	2.055.984.044,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Malifut	2 Lap	15.769.085,00	DAU		2 Lap	15.769.058,00
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Kec Malifut**	**100 %**	**45.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**30.000.000,00**
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec Malifut	3 Orang	45.000.000,00	DAU		2 Orang	30.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec Malifut**	**100 %**	**71.829.968,00**	**DAU**		**100 %**	**161.140.478,65**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Malifut	1 Paket	4.210.000,00	DAU		1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec Malifut	4 Paket	14.580.000,00	DAU		4 Paket	51.390.520,65
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik kantor yang disediakan	Kec Malifut	2 Paket	8.596.000,00	DAU		2 Paket	9.576.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kec Malifut	1 Paket	1.983.000,00	DAU		1 Paket	8.160.458,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec Malifut	2 Dok	1.587.000,00	DAU		2 Dok	4.851.000,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Malifut	12 Lap	3.970.000,00	DAU		12 Lap	15.750.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Malifut	17 Lap	36.903.968,00	DAU		17 Lap	66.412.500,00
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**Kec Malifut**	**100 %**	**171.600.000,00**	**DAU**		**100 %**	**196.600.000,00**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Malifut	12 Lap	150.000.000,00	DAU		12 Lap	175.000.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Malifut	12 Lap	9.100.000,00	DAU		12 Lap	9.100.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Malifut	12 Lap	12.500.000,00	DAU		12 Lap	12.500.000,00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Kec Malifut**	**100 %**	**37.073.647,00**	**DAU**		**100 %**	**129.159.521,00**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kec Malifut	2 Unit	500.000,00	DAU		2 Unit	63.525.000,00

BAPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec Malifut	8 Unit	3.627.000,00	DAU		8 Unit	6.500.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Malifut	1 Unit	32.946.647,00	DAU		1 Unit	59.134.521,00
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec Malifut**	**100 %**	**2.645.000,00**	**DAU**		**100 %**	**32.090.727,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec Malifut**	**100 %**	**2.645.000,00**	**DAU**		**100 %**	**32.090.727,00**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi perencanaan & pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi perencanaan & pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi vertikal terkait	Kec Malifut	1 Lap	2.645.000,00	DAU		1 Lap	32.090.727,00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec Malifut**	**100 %**	**9.326.200,00**	**DAU**		**100 %**	**23.427.006,00**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Malifut**	**100 %**	**9.326.200,00**	**DAU**		**100 %**	**23.427.006,00**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec Malifut	12 Lemas	4.425.500,00	DAU		12 Lemas	18.427.006,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec Malifut	1 Lap	4.900.700,00	DAU		1 Lap	5.000.000,00

BAPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec Malifut**	**100 %**	**13.131.100,00**	**DAU**		**100 %**	**23.427.006,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Malifut**	**100 %**	**13.131.100,00**	**DAU**		**100 %**	**23.427.006,00**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Malifut	2 Lap	7.600.000,00	DAU		2 Lap	14.427.006,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Malifut	2 Lap	5.531.100,00	DAU		2 Lap	9.000.000,00
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Malifut**	**100 %**	**18.515.000,00**	**DAU**		**100 %**	**30.472.015,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Malifut**	**100 %**	**18.515.000,00**	**DAU**		**100 %**	**30.472.015,00**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Malifut	100 Orang	18.515.000,00	DAU		100 Orang	30.472.015,00
JUMLAH									**2.511.535.169,00**				**2.715.219.855,65**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LOLODA UTARA

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec Loloda Utara**	**90 %**	**1.703.612.434,96**	**DAU**		**90 %**	**2.119.076.641,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**5.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**5.000.000,00**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec Loloda Utara	2 Dok	3.000.000,00	DAU		2 Dok	3.000.000,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Loloda Utara	1 Lap	2.000.000,00	DAU		1 Lap	2.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**1.492.291.508,00**	**DAU**		**100 %**	**1.744.176.641,00**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Loloda Utara	13 OB	1.490.791.508,00	DAU		13 OB	1.742.676.641,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Loloda Utara	1 Lap	1.500.000,00	DAU		1 Lap	1.500.000,00
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**30.000.000,00**
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Loloda Utara	1 Orang	15.000.000,00	DAU		2 Orang	30.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**86.399.926,96**	**DAU**		**100 %**	**154.200.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Loloda Utara	1 Paket	2.000.000,00	DAU		1 Paket	2.000.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec Loloda Utara	2 Paket	27.000.000,00	DAU		2 Paket	50.000.000,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik kantor yang disediakan	Kec Loloda Utara	10 Paket	6.500.000,00	DAU		10 Paket	6.500.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kec Loloda Utara	3 Paket	1.500.000,00	DAU		3 Paket	1.500.000,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec Loloda Utara	12 Dok	1.200.000,00	DAU		12 Dok	1.200.000,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Loloda Utara	12 Lap	3.000.000,00	DAU		12 Lap	3.000.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Loloda Utara	12 Lap	45.199.926,96	DAU		12 Lap	90.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**94.921.000,00**	**DAU**		**100 %**	**155.700.000,00**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Loloda Utara	35 Lap	67.221.000,00	DAU		35 Lap	128.000.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Loloda Utara	12 Lap	2.700.000,00	DAU		12 Lap	2.700.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Loloda Utara	12 Lap	25.000.000,00	DAU		12 Lap	25.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**30.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kec Loloda Utara	1 Unit	2.500.000,00	DAU		1 Unit	2.500.000,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec Loloda Utara	1 Unit	2.500.000,00	DAU		1 Unit	2.500.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Loloda Utara	1 Unit	5.000.000,00	DAU		1 Unit	25.000.000,00
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**26.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**63.891.834,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**15.750.000,00**	**DAU**		**100 %**	**43.891.834,00**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi perencanaan & pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi perencanaan & pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi vertikal terkait	Kec Loloda Utara	1 Lap	9.450.000,00	DAU		1 Lap	20.000.000,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Loloda Utara	1 Dok	6.300.000,00	DAU		1 Dok	23.891.834,00
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Cakupan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**10.250.000,00**	**DAU**		**100 %**	**20.000.000,00**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec Loloda Utara	5 Dok	5.250.000,00	DAU		5 Dok	10.000.000,00
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec Loloda Utara	5 Lap	5.000.000,00	DAU		5 Lap	10.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**16.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**19.167.550,00**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**16.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**19.167.550,00**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec Loloda Utara	5 Lemas	7.500.000,00	DAU		5 Lemas	10.000.000,00
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec Loloda Utara	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec Loloda Utara	1 Lap	3.500.000,00	DAU		1 Lap	4.167.550,00
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**19.167.550,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**19.167.550,00**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (ForKompincam)	Kec Loloda Utara	1 Lap	10.000.000,00	DAU		1 Lap	19.167.550,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**20.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**40.000.000,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**20.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**40.000.000,00**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Loloda Utara	40 Orang	10.000.000,00	DAU		40 Orang	25.000.000,00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Loloda Utara	10 Orang	5.000.000,00	DAU		10 Orang	10.000.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Loloda Utara	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**64.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**96.005.301,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Loloda Utara**	**100 %**	**64.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**96.005.301,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Loloda Utara	2 Dok	10.000.000,00	DAU		2 Dok	15.005.301,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Loloda Utara	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	10.000.000,00
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec Loloda Utara	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	10.000.000,00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Loloda Utara	1 Dok	7.000.000,00	DAU		1 Dok	14.000.000,00
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec Loloda Utara	1 Dok	7.000.000,00	DAU		1 Dok	7.000.000,00
7	01	06	2.01	011	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasiitasi Dalam rangka Pelaksanaan Tugas , Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec Loloda Utara	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
7	01	06	2.01	015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam rangka Penetapan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec Loloda Utara	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	10.000.000,00
7	01	06	2.01	016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec Loloda Utara	1 Dok	10.000.000,00	DAU		1 Dok	10.000.000,00
7	01	06	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Loloda Utara	1 Lap	5.000.000,00	DAU		1 Lap	10.000.000,00
7	01	06	2.01	018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec Loloda Utara	1 Lap	5.000.000,00	DAU		1 Lap	5.000.000,00
JUMLAH									1.839.612.434,96				2.357.308.876,00

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7.01	**KECAMATAN**								
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Loloda Kepulauan**	**90%**	**1.505.525.622,96**	**DAU**		**90%**	**1.546.947.544,72**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	**Loloda Kepulauan**	**100%**	**5.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**5.000.000,00**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Loloda Kepulauan	3 Dok	2.500.000,00	DAU		3 Dok	2.500.000,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kenerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loloda Kepulauan	2 Lap	2.500.000,00	DAU		2 Lap	2.500.000,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah**	**Loloda Kepulauan**	**100%**	**1.215.924.622,96**	**DAU**		**100%**	**1.215.924.622,96**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Loloda Kepulauan	17 Orang/bulan	1.213.424.622,96	DAU		17 Orang/bulan	1.213.424.622,96
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loloda Kepulauan	1 Lap	2.500.000,00	DAU		1 Lap	2.500.000,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Loloda Kepulauan**	**100%**	**25.001.000,00**	**DAU**		**100%**	**25.001.000,00**
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Loloda Kepulauan	2 Org	25.001.000,00	DAU		2 Org	25.001.000,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**Loloda Kepulauan**	**100%**	**106.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**122.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
'7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Loloda Kepulauan	5 Pkt	2.000.000,00	DAU		5 Pkt	2.000.000,00
'7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Loloda Kepulauan	23 Pkt	2.500.000,00	DAU		23 Pkt	2.500.000,00
'7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Loloda Kepulauan	12 Pkt	5.000.000,00	DAU		12 Pkt	6.000.000,00
'7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang Disediakan	Loloda Kepulauan	60 Dok	1.500.000,00	DAU		60 Dok	1.500.000,00
'7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Loloda Kepulauan	12 Lap	8.000.000,00	DAU		12 Lap	10.000.000,00
'7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	4 Lap	87.000.000,00	DAU		4 Lap	100.000.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Loloda Kepulauan**	**100%**	**112.600.000,00**	**DAU**		**100%**	**111.021.921,76**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Loloda Kepulauan	30 Lap	75.000.000,00	DAU		30 Lap	75.000.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Loloda Kepulauan	12 Lap	7.000.000,00	DAU		12 Lap	7.000.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Loloda Kepulauan	12 Lap	30.600.000,00	DAU		12 Lap	29.021.921,76
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Loloda Kepulauan**	**100%**	**41.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**68.000.000,00**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Loloda Kepulauan	3 Unit	1.000.000,00	DAU		3 Unit	58.000.000,00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan Mebel yang Dipelihara	Loloda Kepulauan	6 Unit	6.000.000,00	DAU		6 Unit	6.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.06	Pemerliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Loloda Kepulauan	3 Unit	4.000.000,00	DAU		3 Unit	4.000.000,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara	Loloda Kepulauan	1 Unit	30.000.000,00	DAU		-	-
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Loloda Kepulauan**	**100%**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**10.000.000,00**
7.01.02. 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan**	**Loloda Kepulauan**	**100%**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**10.000.000,00**
7.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Loloda Kepulauan	1 Lap	10.000.000,00	DAU		1 Lap	10.000.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Loloda Kepulauan**	**100%**	**4.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**5.000.000,00**
7.01.03. 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Loloda Kepulauan**	**100%**	**4.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**5.000.000,00**
7.01.03. 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Loloda Kepulauan	4 Lembaga	4.000.000,00	DAU		4 Lembaga	5.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Loloda Kepulauan**	**100%**	**9.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**5.000.000,00**

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Loloda Kepulauan**	**100%**	**9.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**5.000.000,00**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Loloda Kepulauan	1 Lap	4.000.000,00	DAU		1 Lap	5.000.000,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Loloda Kepulauan	1 Lap	5.000.000,00	DAU		-	-
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Loloda Kepulauan**	**100 %**	**53.016.800,00**	**DAU**		**100 %**	**31.000.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Loloda Kepulauan**	**100 %**	**53.016.800,00**	**DAU**		**100 %**	**31.000.000,00**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Loloda Kepulauan	200 org	30.000.000,00	DAU		200 org	16.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Loloda Kepulauan	20 org	18.016.800,00	DAU		20 org	15.000.000,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Loloda Kepulauan	1 Dok	5.000.000,00	DAU		-	-
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETERLAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Loloda Kepulauan**	**100%**	**31.882.200,00**	**DAU**		**100%**	**42.000.000,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**Loloda Kepulauan**	**100%**	**31.882.200,00**	**DAU**		**100%**	**42.000.000,00**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Loloda Kepulauan	1 Dok	3.489.600,00	DAU		1 Dok	6.000.000,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loloda Kepulauan	1 Dok	2.464.200,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Loloda Kepulauan	1 Dok	2.464.200,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Loloda Kepulauan	1 Dok	2.464.200,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Loloda Kepulauan	1 Dok	10.000.000,00	DAU		1 Dok	10.000.000,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loloda Kepulauan	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loloda Kepulauan	1 Dok	6.000.000,00	DAU		1 Dok	6.000.000,00
JUMLAH					**1.613.424.622,96**				**1.639.947.544,72**

BAPPEDA HALUT

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**		**90%**	**4.317.422.220,00**	**DAU**		**90%**	**4.412.062.360**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistnsi Perencanaan Perangkat Daerah (%)**	Badan Kesbangpol	**100%**	**31.350.000,00**	**DAU**		**100%**	**36.052.500,00**
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	3 Dok	6.600.000,00	DAU		5 Dok	7.590.000,00
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	1 Dok	3.850.000,00	DAU		1 Dok	4.427.500,00
8	01	01	2.01	0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	1 Dok	3.850.000,00	DAU		1 Dok	4.427.500,00
8	01	01	2.01	0004	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	1 Dok	3.850.000,00	DAU		1 Dok	4.427.500,00
8	01	01	2.01	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	1 Dok	3.850.000,00	DAU		1 Dok	4.427.500,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	1 Laporan	3.850.000,00	DAU		1 Laporan	4.427.500,00
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Halmahera Utara	5 Laporan	5.500.000,00	DAU		5 Laporan	6.325.000,00
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Angggaran Perangkat Daerah (%)**	Kab. Halmahera Utara	**100%**	**3.612.871.220,00**	**DAU**		**100%**	**3.612.871.220,00**
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	520 OB	3.612.871.220,00	DAU		546 OB	3.612.871.220,00
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**97.286.000,00**	**DAU**		**100%**	**117.024.333,00**
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Badan Kesbangpol	26 Paket	22.990.000,00	DAU		26 Paket	30.000.000,00
8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar daerah	4 OK	74.296.000,00	DAU		5 OK	87.024.333,00
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah (%)**		**100%**	**199.775.000,00**	**DAU**		**100%**	**263.764.306,70**
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Kesbangpol	9 Paket	39.075.000,00	DAU		10 Paket	62.120.470,70
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Kesbangpol	1 Paket	16.500.000,00	DAU		1 Paket	27.450.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Badan Kesbangpol	1 Dokumen	10.000.000,00	DAU		1 Dokumen	12.650.000,00
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Kesbangpol	1 Laporan	13.200.000,00	DAU		1 Laporan	20.543.836,00
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	1 Laporan	121.000.000,00	DAU		1 Laporan	141.000.000,00
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah (%)**			**164.730.000,00**	**DAU**			**186.000.000,00**
8	01	01	2.08	0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	1 Laporan	110.000.000,00	DAU		1 Laporan	121.000.000,00
8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Kesbangpol	1 Laporan	10.730.000,00	DAU		1 Laporan	15.000.000,00
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Kesbangpol	1 Laporan	44.000.000,00	DAU		1 Laporan	50.000.000,00
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (%)**		**100%**	**211.410.000,00**	**DAU**		**100%**	**196.350.000,00**
8	01	01	2.09	0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Badan Kesbangpol	1 Unit	158.910.000,00	DAU		1 Unit	138.600.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	01	2.09	0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Badan Kesbangpol	1 Unit	52.500.000,00	DAU		1 Unit	57.750.000,00
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**		**70**	**1.540.000.000,00**	**DAU**		**100**	**1.900.000.000,00**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**70**	**1.540.000.000,00**	**DAU**		**100**	**1.900.000.000,00**
8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Badan Kesbangpol	2 Dok.	15.000.000,00	DAU		2.Dok	30.000.000,00
8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun.	Badan Kesbangpol	2.Dok	15.000.000,00	DAU		2.Dok	80.000.000,00
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Luar Dearah dan dalam Daerah	30 Orang	1.395.000.000,00	DAU		30 Orang	1.600.000.000,00

BAPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Luar Dearah dan dalam Daerah	5 Orang	100.000.000,00	DAU		10 Orang	165.000.000,00
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Halmahera Utara / kesbangpol	1 Lap	15.000.000,00	DAU		1 Lap	25.000.000,00
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik**		**80**	**2.015.000.000,00**	**DAU**		**100**	**3.468.346.295,00**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**		**80**	**2.015.000.000,00**	**DAU**		**100**	**3.468.346.295,00**

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Yang Disusun .	Badan Kesbangpol	2 Dok	20.000.000,00	DAU		2 Dok	20.000.000,00
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Badan Kesbangpol	1 Laporan	1.650.000.000,00	DAU		1 Laporan	2.718.346.295,00
					1. Partai Kebangkitan Bangsa				112.710.000,00				
					2. Partai Gerakan Indonesia Raya				140.385.000,00				
					3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan				196.680.000,00				
					4. Partai Golongan Karya				196.680.000,00				
					5. Partai Nasdem				177.405.000,00				
					6. Partai Buruh				2.850.000,00				
					7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia				109.020.000,00				

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					8. Partai Keadilan Sejahtera				89.100.000,00				
					9. Partai Kebangkita Nusantara				59.985.000,00				
					10. Partai Hati Nurani Rakyat				86.235.000,00				
					11. Partai Garda Republik Indonesia				5.955.000,00				
					12. Partai Amanat Nasional				5.955.000,00				
					13. Partai Bulan Bintang				13.575.000,00				
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Luar daerah dan dalam daerah	20 Orang	150.000.000,00	DAU		20 Orang	225.000.000,00
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Luar daerah dan dalam daerah	15 Orang	175.000.000,00	DAU		24 Orang	480.000.000,00

PAPER DAHALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Halmahera Utara / kesbangpol	1 Laporan	20.000.000,00	DAU		1 Laporan	25.000.000,00
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**		**100**	**75.000.000,00**	**DAU**		**100**	**100.000.000**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**100**	**75.000.000,00**	**DAU**		**100**	**100.000.000,00**
8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Badan Kesbangpol	2 Dok	10.000.000,00	DAU		2 Dok	15.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Luar daerah dan dalam daerah	5 Orang	20.000.000,00	DAU		5 Orang	35.000.000,00
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Luar daerah dan dalam daerah	2 Orang	45.000.000,00	DAU		3 Orang	50.000.000,00
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya**		**100**	**200.000.000,00**	**DAU**		**100**	**200.000.000,00**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		**100**	**200.000.000,00**	**DAU**		**100**	**200.000.000,00**
8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kabupaten Halmahera Utara / kesbangpol	1 Dok	200.000.000,00	DAU		1 Dok	200.000.000,00

BAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**		**100**	**640.919.681,00**	**DAU**		**100**	**550.000.000,00**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial**	**Persentasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemetaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial**		**100**	**640.919.681,00**	**DAU**		**100**	**550.000.000,00**
8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Dokumen program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Badan Kesbangpol	1 Dok	15.000.000,00	DAU		1 Dok	20.000.000,00
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Luar daerah dan dalam daerah	30 Orang	510.919.681,00	DAU	510.919.681	14 Orang	360.000.000,00

TAPPEDA HALUT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	**01**	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Luar daerah dan dalam daerah	5 Orang	100.000.000,00	DAU		12 Orang	150.000.000,00
8	**01**	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Kabupaten Halmahera Utara / kesbangpol	1 Laporan	15.000.000,00	DAU		1 Laporan	20.000.000,00
JUMLAH									**8.788.341.901,00**				**10.630.408.655**

BAPPEDA HALUT